BANK INDONESIA

Bersinergi Memperkuat Resiliensi, Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi

2016

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Keterangan sampul:

Jembatan merupakan infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia dan mendorong sinergi aktivitas perekonomian. Oleh karena itu jembatan adalah simbol resiliensi ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang masih tinggi.

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2016

ISSN 0522-2572

BANK INDONESIA

VISI

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

MISI

Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.

Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

NILAI-NILAI STRATEGIS

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas ***Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork.***

DAFTAR ISI

Daftar Isi iv
Daftar Tabel viii
Daftar Grafik x
Daftar Diagram dan Gambar xvi
Dewan Gubernur Bank Indonesia xviii
Prakata xxii
Tinjauan Umum xxvi
Boks. Akuntabilitas Pencapaian Sasaran Inflasi 2016 xxxix

BAGIAN I
PEREKONOMIAN GLOBAL 1

BAB 1
Dinamika Perekonomian Global 7

1.1. Perekonomian Negara Maju 9
1.2. Perekonomian Negara Berkembang 11
1.3. Harga Komoditas Global 13
1.4. Pasar Keuangan Global 14
Boks 1.1. Volume Perdagangan Global dan Risiko ke Depan 16
Boks 1.2. Pengaruh Perekonomian AS dan Tiongkok terhadap Harga Komoditas Dunia 18

BAB 2
Respons Kebijakan Ekonomi Global 21

2.1. Kebijakan Ekonomi Negara Maju 22
2.2. Kebijakan Ekonomi Negara Berkembang 25
2.3. Kerja Sama Internasional 27

BAGIAN II

PEREKONOMIAN DOMESTIK 31

BAB 3
Pertumbuhan Ekonomi 37

3.1. PDB Pengeluaran 38
3.2. PDB Lapangan Usaha 41
3.3. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 43
Boks 3.1. Konsolidasi Korporasi dan Kinerja Investasi 45

BAB 4
Neraca Pembayaran Indonesia 49

4.1. Transaksi Berjalan 50
4.2. Transaksi Modal dan Finansial 57
4.3. Ketahanan Eksternal 60
Boks 4.1. Industri Jasa Pelayaran dan Defisit Neraca Jasa 64

BAB 5
Nilai Tukar 69

5.1. Dinamika Nilai Tukar Rupiah 70
5.2. Lalu lintas Modal di Pasar Valas Domestik 74
5.3. Struktur Pasar Valas Domestik 75

BAB 6
Inflasi 79

6.1. Inflasi Inti 80
6.2. Inflasi *Volatile Food* 82
6.3. Inflasi *Administered Prices* 84

BAB 7
Fiskal 89

7.1. Dinamika Fiskal 2016 90
7.2. Pendapatan Negara 92
7.3. Belanja Negara 93
7.4. Pembiayaan Defisit APBN 94
Boks 7.1. Kebijakan Amnesti Pajak 96

BAB 8
Stabilitas Sistem Keuangan 101

8.1. Asesmen Umum Risiko Sistem Keuangan 102
8.2. Perkembangan Kinerja dan Risiko Korporasi 103
8.3. Perkembangan Kinerja dan Risiko Perbankan 104
8.4. Kinerja dan Risiko IKNB 114
8.5. Pembiayaan, Kinerja, dan Risiko Pasar Keuangan 115

DAFTAR ISI

BAB 9
Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 121

9.1. Kinerja Sistem Pembayaran 122
9.2. Kinerja Pengelolaan Uang Rupiah 129
Boks 9.1. Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 135

BAB 10
Ekonomi Regional 141

10.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Daerah 142
10.2. Inflasi Regional 148
10.3. Fiskal Daerah 151
Boks 10.1. Pengembangan Daya Saing Perkotaan sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah 157

BAGIAN III
RESPONS BAURAN KEBIJAKAN 161

BAB 11
Kebijakan Moneter 67

11.1. Kebijakan Suku Bunga dan Giro Wajib Minimum 168
11.2. Kebijakan Nilai Tukar 169
11.3. Pendalaman Pasar Uang 172
11.4. Transmisi Kebijakan Moneter 174
Boks 11.1. Penguatan Kerangka Operasional Kebijakan Moneter 178

BAB 12
Kebijakan Makroprudensial 181

12.1. Pelonggaran Ketentuan *Loan/Financing to Value Ratio* 182
12.2. Kebijakan Giro Wajib Minimum Terkait *Loan to Funding Ratio* 184
12.3. Kebijakan Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 184
12.4. Kebijakan *Countercyclical Buffer* 187
12.5. Pengawasan dan Pemeriksaan oleh Bank Indonesia 187

BAB 13
Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 191

13.1. Kebijakan Sistem Pembayaran 192
13.2. Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah 199
Boks 13.1. *Financial Technology* dan *Regulatory Sandbox* 205

BAB 14
Koordinasi Kebijakan 209

14.1. Koordinasi dalam rangka Menjaga Stabilitas Makroekonomi dan Stabilitas Sistem Keuangan 210
14.2. Koordinasi dalam rangka Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi 214
Boks 14.1. Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 222

BAGIAN IV
TANTANGAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA 225

BAB 15
Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan 231

15.1. Tantangan Perekonomian 233
15.2. Arah Kebijakan 2017 235
Boks 15.1. Perangkap Negara Berpendapatan Menengah *(Middle Income Trap)* 242
Boks 15.2. Survei Kinerja dan Efektivitas Reformasi Struktural Berupa Paket Kebijakan Ekonomi 244

BAB 16
Prospek Perekonomian 247

16.1. Prospek Perekonomian Jangka Pendek 248
16.2. Prospek Perekonomian Jangka Menengah 252
16.3. Risiko dan Tantangan Perekonomian 253

LAMPIRAN 255

DAFTAR TABEL

1. Dinamika Perekonomian Global 7

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Global 9

Tabel 1.2. Harga Komoditas Ekspor Indonesia 14

2. Respons Kebijakan Ekonomi Global 21

Tabel 2.1. Kebijakan Moneter Kuantitatif Negara Maju 23

3. Pertumbuhan Ekonomi 37

Tabel 3.1. Pertumbuhan PDB Pengeluaran 38

Tabel 3.2. Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha 42

Tabel 3.3. Angkatan Kerja dan Pengangguran 43

4. Neraca Pembayaran Indonesia 49

Tabel 4.1. Neraca Pembayaran Indonesia 51

Tabel 4.2. Posisi Investasi Internasional Indonesia 52

Tabel 4.3. Ekspor Nonmigas Menurut Kelompok Barang (Berdasarkan SITC) 53

Tabel 4.4. Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan Utama 54

Tabel 4.5. Impor Nonmigas Menurut Kelompok Barang 54

Tabel 4.6. Indikator Solvabilitas Sektor Eksternal 60

Tabel 4.7. Indikator Likuiditas Sektor Eksternal 61

6. Inflasi 79

Tabel 6.1. Penyumbang Inflasi Inti Kelompok Nonpangan terhadap Inflasi IHK 81

Tabel 6.2. Penyumbang Inflasi Inti Kelompok Pangan terhadap Inflasi IHK 81

Tabel 6.3. Sumbangan Inflasi/Deflasi Komoditas Pangan Strategis terhadap Inflasi IHK 82

Tabel 6.4. Kebijakan Terkait *Administered Prices* Tahun 2016 85

7. Fiskal 89

Tabel 7.1. Asumsi Makro 90

Tabel 7.2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 2015-2016 91

8. Stabilitas Sistem Keuangan 101

Tabel 8.1. Kinerja Korporasi Sektoral 103

Tabel 8.2. Perkembangan Pembiayaan Sektor Keuangan 115

Tabel 8.3. Pangsa Pembiayaan Neto Dalam Negeri 117

9. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 121

Tabel 9.1. Hasil Survei Kualitas Uang Layak Edar Tahun 2016 133

10. Ekonomi Regional 141

Tabel 10.1. Postur APBD Agregat Tahun 2016 152

11. Kebijakan Moneter 167

Tabel 11.1. Kerja Sama *Swap Arrangement* 171

Tabel 11.2. Perkembangan Pasar Uang Rupiah 2015-2016 173

12. Kebijakan Makroprudensial 181

Tabel 12.1. Besaran Rasio *Loan to Value* Kredit Properti dan *Financing to Value* Pembiayaan Properti Syariah 183

13. Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 191

Tabel 13.1. Rekapitulasi Hasil *Assesment* BI-RTGS dan BI-SSSS 193

Tabel 13.2. Bank Pengelola dan Bank Anggota Kas Titipan 203

14. Koordinasi Kebijakan 209

Tabel 14.1. Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah 216

Tabel 14.2. Sinergi IRU-RIRU-GIRU 219

15. Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan 231

Tabel 15.1. APBN 2015 -2017 240

16. Prospek Perekonomian 247

Tabel 16.1. Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 248

Tabel 16.2. Proyeksi PDB Sisi Pengeluaran 249

Tabel 16.3. Proyeksi PDB Sisi Lapangan Usaha 250

DAFTAR GRAFIK

1. Dinamika Perekonomian Global 7

Grafik 1.1. Volume Perdagangan Dunia dan PDB Dunia 8
Grafik 1.2. Inflasi Global 8
Grafik 1.3. Inflasi Beberapa Negara Maju dan Harga Komoditas Global 9
Grafik 1.4. Sektor Industri AS dan Harga Minyak 9
Grafik 1.5. Sektor Perumahan AS 10
Grafik 1.6. Sektor Tenaga Kerja AS 10
Grafik 1.7. Inflasi AS 10
Grafik 1.8. Dekomposisi Pertumbuhan Eropa (*Euro Area*) 10
Grafik 1.9. Dekomposisi Pertumbuhan Ekonomi Jepang 11
Grafik 1.10. Inflasi Beberapa Negara Berkembang 11
Grafik 1.11. Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi India 12
Grafik 1.12. Produksi Sektor Manufaktur India 12
Grafik 1.13. PDB Tiongkok Berdasarkan Industri 12
Grafik 1.14. Investasi Aset Tetap Tiongkok 12
Grafik 1.15. Kredit Rumah Tangga dan Kredit Korporasi 13
Grafik 1.16. Perkembangan Harga Minyak dan Indeks Harga Komoditas Ekspor 13
Grafik 1.17. Permintaan Batubara Dunia 14
Grafik 1.18. Perkembangan Indeks VIX dan DXY 15
Grafik 1.19. Aliran Modal Neto ke Negara Berkembang (kecuali Tiongkok) 15

2. Respons Kebijakan Ekonomi Global 21

Grafik 2.1. Suku Bunga Kebijakan Negara Maju 22
Grafik 2.2. Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB Negara Eropa 23
Grafik 2.3. Stimulus Fiskal dan Moneter AS 24
Grafik 2.4. Angka Kelahiran Jepang 24
Grafik 2.5. Kondisi Ketenagakerjaan dan Pendapatan Riil Jepang 25
Grafik 2.6. Perbandingan Suku Bunga Kebijakan Beberapa Negara Berkembang 25
Grafik 2.7. Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB Negara Berkembang dibandingkan Negara Maju 25
Grafik 2.9. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Bank di India 26
Grafik 2.8. Pertumbuhan Investasi Swasta dan Pemerintah Tiongkok 26

3. Pertumbuhan Ekonomi 37

Grafik 3.1. Indeks Keyakinan Konsumen 39
Grafik 3.2. Perkembangan Jenis Konsumsi Rumah Tangga 39
Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Riil 41
Grafik 3.4. Pertumbuhan Impor Nonmigas Riil 41
Grafik 3.5. Perkembangan Kepariwisataan 42
Grafik 3.6. Konsumsi Semen Domestik 42
Grafik 3.7. Perkembangan *Job Vacancy Online* dan PDB 44
Grafik 3.8. Perubahan Jumlah Tenaga Kerja Sektoral 44
Grafik 3.9. Pangsa dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kota dan Desa 44
Grafik 3.10. Rasio Gini dan Garis Kemiskinan di Desa dan Kota 44

4. Neraca Pembayaran Indonesia 49

Grafik 4.1.	Transaksi Berjalan, Transaksi Modal dan Finansial, dan Neraca Keseluruhan NPI	50
Grafik 4.2.	Perkembangan Transaksi Berjalan	52
Grafik 4.3.	Perkembangan Harga Komoditas dan Ekspor Nonmigas Indonesia	52
Grafik 4.4.	Perkembangan Neraca Perdagangan Migas dan Harga Minyak	55
Grafik 4.5.	Perkembangan Neraca Jasa	55
Grafik 4.6.	Neraca Jasa *Freight* dan Neraca Jasa Lainnya	55
Grafik 4.7.	Rasio *Freight* Jasa Transportasi	56
Grafik 4.8.	Perkembangan Neraca Pendapatan Primer	56
Grafik 4.9.	Perkembangan Jumlah dan Remitansi TKI	57
Grafik 4.10.	Investasi Langsung Bukan Penduduk menurut Negara Investor Utama	57
Grafik 4.11.	Investasi Langsung Bukan Penduduk menurut Sektor Ekonomi	57
Grafik 4.12.	Investasi Portofolio Bukan Penduduk di Indonesia	59
Grafik 4.13.	Perkembangan Investasi Lainnya	59
Grafik 4.14.	Perkembangan *Basic Balance* NPI	60
Grafik 4.15.	Cadangan Devisa Indonesia	61
Grafik 4.16.	Perkembangan DSR Indonesia	62
Grafik 4.17.	Rasio ULN terhadap PDB Indonesia	62
Grafik 4.18.	Rasio ULN terhadap PDB Beberapa Negara	62
Grafik 4.19.	Perkembangan Posisi ULN Indonesia Menurut Kelompok Peminjam	62
Grafik 4.20.	Perkembangan ULN Indonesia Menurut Jangka Waktu Sisa (*Remaining Maturity*)	63

5. Nilai Tukar 69

Grafik 5.1.	Nilai Tukar Rupiah 2015-2016	70
Grafik 5.2.	Perbandingan Nilai Tukar Rupiah dan *Peers*	70
Grafik 5.3.	Perkembangan VIX dan CDS	71
Grafik 5.4.	Perkembangan Indeks Dolar	72
Grafik 5.5.	Imbal Hasil Obligasi Negara Indonesia	72
Grafik 5.6.	Perbandingan Imbal Hasil Investasi Obligasi Negara	73
Grafik 5.7.	Transaksi Valas Domestik dan Nilai Tukar Rupiah	73
Grafik 5.8.	Rasio Kepatuhan Pelapor KPPK Berdasarkan Jumlah Perusahaan	73
Grafik 5.9.	Permintaan - Penawaran Neto Valas di Pasar *Spot*	74
Grafik 5.10.	Aliran Dana Masuk SBI, SUN, dan Saham	74
Grafik 5.11.	Perkembangan Transaksi Valas di Pasar Uang	75
Grafik 5.12.	Komposisi Transaksi Derivatif dan *Spot*	76
Grafik 5.13.	Porsi Volume Transaksi Derivatif oleh Korporasi	76

6. Inflasi 79

Grafik 6.1.	Inflasi Indeks Harga Konsumen dan Komponennya	80
Grafik 6.2.	Pola Historis Inflasi Inti	80
Grafik 6.3.	Pertumbuhan Penjualan Riil dan Indeks Keyakinan Konsumen	81
Grafik 6.4.	Perkembangan Nilai Tukar, Harga Komoditas Global, dan Indeks Harga Perdagangan Besar Impor Nonmigas	81
Grafik 6.5.	Ekspektasi Pengamat Ekonomi	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 6.6. Perkembangan Inflasi Inti *Traded* dan *Nontraded* 82

Grafik 6.7. Inflasi Pada Periode Hari Besar Keagamaan Nasional 83

Grafik 6.8. Kontribusi Inflasi Terkait Komoditas Energi terhadap Inflasi IHK 84

Grafik 6.9. Kontribusi Inflasi Terkait Tarif Angkutan terhadap Inflasi IHK 86

7. Fiskal 89

Grafik 7.1. Pertumbuhan Komponen Penerimaan Pajak 92

Grafik 7.2. Penerimaan Pajak dan Rasio terhadap PDB 93

Grafik 7.3. Perkembangan Komponen Belanja Negara 93

Grafik 7.4. Perkembangan Sub-Komponen Belanja Negara 94

Grafik 7.5. Perkembangan Defisit Fiskal dan Keseimbangan Primer 94

Grafik 7.6. Porsi Utang Pemerintah terhadap PDB 95

8. Stabilitas Sistem Keuangan 101

Grafik 8.1. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan 102

Grafik 8.2. Pertumbuhan Penjualan dan *Asset Turnover* 103

Grafik 8.3. Pertumbuhan COGS dan *Gross Profit Margin* 104

Grafik 8.4. *Debt to Equity Ratio* 104

Grafik 8.5. *Interest Coverage Ratio* 104

Grafik 8.6. Perkembangan ULN Korporasi 104

Grafik 8.7. Sektor dengan Pertumbuhan Kredit Rendah 105

Grafik 8.8. Sektor dengan Pertumbuhan Kredit tinggi 105

Grafik 8.9. Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan 105

Grafik 8.10. Indeks *Lending Standard* 106

Grafik 8.11. Pertumbuhan Kredit Negara *Peer Countries* 106

Grafik 8.12. NPL Menurut Jenis Penggunaan Kredit 106

Grafik 8.13. NPL Menurut Sektor Ekonomi 106

Grafik 8.14. NPL Indonesia dan *Peer Countries* 107

Grafik 8.15. Posisi dan Pertumbuhan NPL 107

Grafik 8.16. Pertumbuhan DPK Per Jenis Valuta 107

Grafik 8.17. Pertumbuhan DPK Per Jenis Simpanan 107

Grafik 8.18. Pertumbuhan DPK menurut BUKU 108

Grafik 8.19. Perkembangan Rasio Likuiditas Perbankan 108

Grafik 8.20. Perkembangan Alat Likuid Perbankan 108

Grafik 8.21. Perkembangan Efisiensi Perbankan 109

Grafik 8.22. *Spread* Suku Bunga Perbankan 109

Grafik 8.23. Struktur Pendapatan dan Beban Operasional 109

Grafik 8.24. Perkembangan CAR Perbankan Indonesia 109

Grafik 8.25. CAR Perbankan Indonesia dan *Peer Countries* 110

Grafik 8.26. Perkembangan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan, Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah 110

Grafik 8.27. Perkembangan PYD dan NPF Perbankan Syariah 111

Grafik 8.28. Perkembangan Kredit UMKM 112

Grafik 8.29. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral 112

Grafik 8.30. NPL *Gross* Kredit UMKM 112

Grafik 8.31. NPL Gross Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi 113

Grafik 8.32. Realisasi KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi 113

Grafik 8.33. Kinerja Perusahaan Pembiayaan 114

Grafik 8.34. Pembiayaan PP Menurut Valuta 114
Grafik 8.35. Pendanaan Perusahaan Pembiayaan 115
Grafik 8.36. Penerbitan Obligasi Neto dan Jatuh Tempo 115
Grafik 8.37. Suku Bunga Bank dan *Yield* Obligasi 116
Grafik 8.38. Pembiayaan Pasar Keuangan 2016 116
Grafik 8.39. Pangsa Pembiayaan Neto Dalam Negeri 117
Grafik 8.40. *Yield* SBN dan Net Jual/Beli Asing 117
Grafik 8.41. Kepemilikan SBN Asing 117
Grafik 8.42. IHSG dan Indeks Bursa Global 118
Grafik 8.43. Indeks Sektoral 118

9. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 121

Grafik 9.1. Indeks Sistem Pembayaran Nontunai 122
Grafik 9.2. Rasio Transaksi Ritel terhadap PDB 123
Grafik 9.3. Rasio Transaksi Ritel terhadap Konsumsi Rumah Tangga 123
Grafik 9.4. Indeks Penjualan Eceran dan Transaksi Ritel 123
Grafik 9.5. Perkembangan Transaksi Sistem BI-RTGS 124
Grafik 9.6. *Turnover Ratio* BI-RTGS 124
Grafik 9.7. Perkembangan Transaksi BI-SSSS 124
Grafik 9.8. Perkembangan Transaksi SKNBI 125
Grafik 9.9. Perkembangan Transaksi APMK 125
Grafik 9.10. Perkembangan Transaksi ATM dan ATM/Debet 126
Grafik 9.11. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit 126
Grafik 9.12. Rasio NPL Kartu Kredit 126
Grafik 9.13. Kolektibilitas Kartu Kredit 2015 dan 2016 127
Grafik 9.14. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik 127
Grafik 9.15. Pangsa Volume dan Nilai Transaksi Transfer Dana 128
Grafik 9.16. Perkembangan Transaksi Penukaran UKA melalui KUPVA BB 128
Grafik 9.17. Pangsa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank 129
Grafik 9.18. Kurs Jual-Beli Penyelenggara KUPVA BB 129
Grafik 9.19. Posisi Uang Kartal yang Diedarkan Akhir Tahun 129
Grafik 9.20. Perkembangan UYD secara Harian 130
Grafik 9.21. Rasio UYD terhadap PDB dan Konsumsi Rumah Tangga 130
Grafik 9.22. Perbandingan UYD terhadap M1 dan M2 130
Grafik 9.23. Pangsa UYD Berdasarkan Denominasi 130
Grafik 9.24. Aliran Uang Kartal melalui Bank Indonesia 131
Grafik 9.25. Rasio Posisi Kas terhadap Rata-rata *Outflow* Bulanan 131
Grafik 9.26. Rasio Posisi Kas terhadap Rata-rata *Outflow* Bulanan per Wilayah 131
Grafik 9.27. Jumlah Kas Titipan dan Penarikan Uang Rupiah 132
Grafik 9.28. Penarikan Uang Kartal Dalam Rangka Kas Keliling 132
Grafik 9.29. Rasio Pemusnahan Uang Rupiah terhadap *Inflow* 133
Grafik 9.30. Rasio Pemusnahan terhadap *Inflow* Berdasarkan Pecahan 133
Grafik 9.31. Temuan Uang Rupiah Palsu oleh Kepolisian dan Laporan Perbankan 134
Grafik 9.32. Temuan Uang Rupiah Palsu dan Rasionya terhadap Uang yang Diedarkan 134

DAFTAR GRAFIK

10. Ekonomi Regional 141

Grafik 10.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Sisi Pengeluaran 143

Grafik 10.2. Pertumbuhan Ekspor Riil Komoditas Utama Sumatera 143

Grafik 10.3. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Sisi Pengeluaran 144

Grafik 10.4. Pertumbuhan Ekspor Riil Komoditas Utama Jawa 144

Grafik 10.5. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Sisi Pengeluaran 144

Grafik 10.6. Pertumbuhan Ekspor Riil Komoditas Utama Kalimantan 145

Grafik 10.7. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia 145

Grafik 10.8. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia Sisi Pengeluaran 146

Grafik 10.9. Pertumbuhan Angkatan Kerja Regional 146

Grafik 10.10. Tingkat Pengangguran Regional 147

Grafik 10.11. Disparitas Tingkat Pengangguran Regional 147

Grafik 10.12. Jumlah Penduduk Miskin Regional 148

Grafik 10.13. Rasio Gini Daerah 2016 148

Grafik 10.14. Perkembangan Inflasi Regional 2012-2016 149

Grafik 10.15. Perbandingan Antar Wilayah Inflasi Kelompok Bahan Makanan 150

Grafik 10.16. Pertumbuhan Kredit Korporasi di Daerah 154

Grafik 10.17. NPL Kredit Korporasi di Daerah 154

Grafik 10.18. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Daerah 155

Grafik 10.19. NPL Kredit Rumah Tangga di Daerah 155

Grafik 10.20. Pertumbuhan Kredit UMKM di Daerah 155

Grafik 10.21. NPL Kredit UMKM di Daerah 156

Grafik 10.22. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan di Daerah 156

Grafik 10.23. Pertumbuhan Penyaluran Lembaga Pembiayaan 156

11. Kebijakan Moneter 167

Grafik 11.1. Cadangan Devisa Indonesia 170

Grafik 11.2. Perkembangan Volume Transaksi Repo 172

Grafik 11.3. *Yield Curve* JIBOR 173

Grafik 11.4. Suku Bunga PUAB O/N dan Koridor Suku Bunga Bank Indonesia 175

Grafik 11.5. Posisi Operasi Moneter dan *Spread* PUAB O/N-DF 175

Grafik 11.6. Posisi Operasi Moneter 175

Grafik 11.7. Durasi Operasi Moneter Menurut Sisa *Maturity* 175

Grafik 11.8. Suku Bunga Kebijakan, LPS dan Suku Bunga Deposito 176

Grafik 11.9. Suku Bunga Deposito dan Kredit 176

Grafik 11.10. Pertumbuhan Komponen M0 176

Grafik 11.11. Pertumbuhan Komponen M1 177

Grafik 11.12. Pertumbuhan Komponen M2 177

Grafik 11.13. Kontribusi Komponen Kuasi pada M2 177

12. Kebijakan Makroprudensial 181

Grafik 12.1. Pertumbuhan Kredit Properti 183

Grafik 12.2. Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah Menurut Tipe 184

Grafik 12.3. Perkembangan Batas Atas dan Batas Bawah Target *Loan to Funding Ratio* 184

Grafik 12.4. Kesenjangan Kredit terhadap PDB 187

Grafik 12.5. CCB *Buffer Rate* 187

Grafik 12.6. Indeks Harga Properti Residensial di Pasar Primer 188

Grafik 12.7. Cara Pembelian Properti oleh Konsumen 189

13. Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 191

Grafik 13.1. Komposisi Peserta Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* 193

Grafik 13.2. Komposisi Peserta BI-*Scripless Securities Settlement System* 193

Grafik 13.3. Perkembangan Transaksi Valas Domestik 198

Grafik 13.4. Pengaduan Konsumen Sistem Pembayaran 198

14. Koordinasi Kebijakan 209

Grafik 14.1. Perkembangan *Sovereign Credit Rating* Indonesia 218

15. Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan 231

Grafik 15.1. Keragaman Barang Ekspor – Impor 234

Grafik 15.2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDB dan Pertumbuhan Industri Pengolahan 235

Grafik 15.3. Pangsa Sektor Maritim terhadap PDB 241

Grafik 15.4. Defisit Neraca Jasa dan Defisit Transaksi Berjalan 241

16. Prospek Perekonomian 247

Grafik 16.1. Belanja Infrastruktur Pemerintah 250

Grafik 16.2. Belanja Subsidi dan Infrastruktur 250

DAFTAR DIAGRAM & GAMBAR

8. Stabilitas Sistem Keuangan 101

Gambar 8.1. Realisasi KUR Berdasarkan Wilayah 114

10. Ekonomi Regional 141

Gambar 10.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2016 142

Gambar 10.2. Peta Inflasi Daerah Tahun 2016 149

Gambar 10.3. Realisasi Belanja Daerah 153

11. Kebijakan Moneter 167

Diagram 11.1. Ekosistem Pengembangan Pasar Keuangan 174

13. Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 191

Diagram 13.1. Skema *National Payment Gateway* Indonesia 195

Gambar 13.1. Peta Penyebaran Kas Titipan 202

14. Koordinasi Kebijakan 209

Gambar 14.1. Jumlah dan Sebaran TPID Posisi Desember 2016 211

Diagram 14.1. Organisasi Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi 216

Diagram 14.2. Stuktur Organisasi Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan 217

15. Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan 231

Gambar 15.1. Kerangka Kerja Program *Voyage to* Indonesia 238

DEWAN GUBERNUR

Erwin Rijanto
Deputi Gubernur

Agus D. W. Martowardojo
Gubernur

Perry Warjiyo
Deputi Gubernur

Rosmaya Hadi
Deputi Gubernur

Mirza Adityaswara
Deputi Gubernur Senior

Sugeng
Deputi Gubernur

DEWAN GUBERNUR

Hendar
Deputi Gubernur

Menjabat hingga 27 Desember 2016

Ronald Waas
Deputi Gubernur

Menjabat hingga 27 Desember 2016

"Respons bauran kebijakan makroekonomi yang tepat waktu, konsisten dan diterapkan secara disiplin menjadi kunci upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan."

Agus D. W. Martowardojo
Gubernur

PRAKATA

Tahun 2016 yang pada awalnya diharapkan menjadi tahun percepatan pemulihan ekonomi domestik kembali menjadi tahun yang penuh tantangan seiring dengan perkembangan global yang masih belum menggembirakan. Ekonomi global masih belum pulih seperti yang diharapkan dan tetap diwarnai ketidakpastian. Dinamika ekonomi global pada 2016 berkisar pada tiga permasalahan utama yang terjadi sejak 2015, yaitu pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat, harga komoditas yang masih rendah, dan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi.

Pertumbuhan ekonomi dunia 2016 masih belum cukup kuat, tercatat lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Konsolidasi ekonomi masih berlanjut di berbagai belahan dunia, termasuk Tiongkok. Seiring dengan itu, volume perdagangan dunia juga melemah sejalan dengan turunnya kinerja ekspor, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut berdampak kepada masih rendahnya harga komoditas dunia, setidaknya terjadi hingga triwulan III 2016. Sementara itu, ketidakpastian di pasar keuangan global terus meningkat terutama sebelum keputusan kenaikan Fed Funds Rate (FFR) oleh bank sentral AS, yang ditandai dengan penguatan dolar AS.

Permasalahan ekonomi dunia bertambah kompleks menyusul terjadinya sejumlah peristiwa geopolitik di sejumlah negara utama dunia. Pada akhir semester I 2016, hasil referendum Inggris yang memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa *(Brexit)* memicu ketidakpastian karena tidak sejalan dengan ekspektasi pasar. Ketidakpastian kembali meningkat saat pelaku ekonomi menyikapi hasil pemilihan Presiden AS yang juga di luar perkiraan. Ketidakpastian terutama bersumber dari rencana penerapan kebijakan fiskal yang ekspansif di tengah besarnya beban utang pemerintah, kebijakan perdagangan yang lebih protektif, dan kebijakan imigrasi yang lebih ketat.

Perkembangan global yang kurang menguntungkan memberikan beberapa tantangan yang memengaruhi kelanjutan proses pemulihan ekonomi domestik 2016. Penurunan kinerja ekspor yang mengakibatkan belum kuatnya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kinerja korporasi. Hal

tersebut mendorong korporasi untuk melakukan konsolidasi internal dan mengurangi ekspansi usaha yang berdampak pada permintaan kredit yang menurun dan risiko kredit yang meningkat. Kondisi ini berdampak pada efektivitas transmisi kebijakan moneter dan kinerja sektor keuangan, termasuk perbankan.

Menghadapi berbagai tantangan global dan domestik, kebijakan makroekonomi 2016 ditujukan untuk mencapai empat arah kebijakan. Pertama, memitigasi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat peran permintaan domestik sebagai sumber pertumbuhan. Kedua, menjaga dan meningkatkan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sebagai basis bagi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, memperkuat struktur perekonomian dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta daya saing dalam jangka menengah panjang. Keempat, menjaga berbagai kebijakan yang ditempuh tetap berada dalam koridor kebijakan makroekonomi yang sehat.

Arah kebijakan pada 2016 ditempuh melalui koordinasi dan sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi kebijakan diwujudkan melalui suatu bauran kebijakan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan mikroprudensial, dan kebijakan struktural. Bauran kebijakan tersebut ditujukan tidak hanya memitigasi risiko siklikal jangka pendek, tetapi juga memperkuat struktur perekonomian dalam jangka menengah panjang.

Di sisi fiskal, Pemerintah memperkuat stimulus fiskal melalui peningkatan belanja ke sektor-sektor produktif, dengan tetap konsisten menjaga kesinambungan fiskal. Strategi ini didukung oleh peningkatan ruang fiskal pasca-reformasi subsidi energi. Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan penerimaan pajak melalui program amnesti pajak yang berhasil mengumpulkan dana tebusan pajak terbesar di dunia.

Di sisi moneter, Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang lebih longgar untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Efektivitas kebijakan moneter diperkuat melalui langkah reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter dengan mengubah suku bunga kebijakan BI rate menjadi BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) sejak 19 Agustus 2016 yang diikuti upaya mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah serta memperkuat pengelolaan permintaan dan penawaran valas agar volatilitas rupiah tidak terjadi secara berlebihan.

Dalam upaya mendorong intermediasi perbankan, Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial secara selektif. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian ketentuan *Loan (Financing) to Value* (LTV/FTV), *Loan to Funding Ratio* (LFR), dan ketentuan *Countercyclical Buffer* (CCB).

Pada area sistem pembayaran, Bank Indonesia terus bekerja untuk menghadirkan sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien, dan memperhatikan perluasan akses serta kepentingan nasional. Berbagai upaya mulai dari penguatan infrastruktur dan penataan kelembagaan sampai dengan penyusunan model bisnis elektronifikasi menjadi fokus Bank Indonesia di tahun 2016. Kemajuan penting yang berhasil dicatat antara lain, penyelesaian rancangan dan uji konsep *National Payment Gateway* (NPG), peluncuran Bank Indonesia *Fintech Office* beserta fungsi *regulatory sandbox* didalamnya, serta pengaturan *e-commerce*. Bank Indonesia bersama Kementerian / Lembaga terkait di tahun 2016 juga telah berhasil menyelesaikan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), serta mewujudkan penyaluran bantuan sosial secara nontunai yang terintegrasi antar program menggunakan sistem perbankan melalui Layanan Keuangan Digital (LKD).

Untuk pengelolaan uang rupiah, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar hingga menjangkau wilayah terpencil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, di tahun 2016 Bank Indonesia terus meningkatkan jaringan distribusi pengedaran uang di seluruh Indonesia. Bank Indonesia juga menerbitkan dan mengedarkan secara bersamaan 4 pecahan logam dan 7 pecahan kertas. Hal ini menjadi sejarah tersendiri, karena penerbitan dan pengedaran 11 pecahan secara sekaligus belum pernah dilakukan semenjak Indonesia merdeka.

Dari sisi mikroprudensial, sebagai bagian dari sinergi kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK menempuh berbagai kebijakan mikroprudensial yang diarahkan untuk memastikan kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara dengan baik, transparan dan akuntabel. Selain itu kebijakan juga diarahkan untuk dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Di sektor riil, implementasi berbagai kebijakan reformasi struktural juga terus dilakukan guna mendorong efisiensi dan produktivitas serta meningkatkan daya saing perekonomian. Kebijakan reformasi struktural difokuskan pada beberapa aspek seperti harmonisasi peraturan, kemudahan perizinan, dan insentif fiskal untuk mendorong investasi. Pada tahun 2016, kebijakan reformasi struktural dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) IX–XIV yang merupakan kelanjutan

paket kebijakan yang ditempuh tahun 2015. Selain itu, Pemerintah juga telah dan terus membangun infrastruktur energi seperti pembangkit listrik melalui Program 35.000 MW dan infrastruktur konektivitas seperti jalan, pelabuhan, rel kereta, dan bandara.

Untuk mendukung bauran kebijakan yang telah ditempuh, koordinasi antara Pemerintah, Bank Indonesia dan pemangku kebijakan lainnya terus diperkuat. Penguatan koordinasi dilakukan antara lain melalui upaya pengendalian inflasi di pusat dan daerah, upaya mendorong pendalaman pasar keuangan dan keuangan inklusif, serta upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengesahan Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan merupakan salah satu produk utama penguatan koordinasi di bidang sistem keuangan.

Dengan bauran kebijakan yang terkoordinasi dan bersinergi, perekonomian Indonesia dapat memitigasi berbagai risiko sehingga tetap berdaya tahan di tengah kondisi global yang masih kurang menguntungkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tercatat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, stabilitas ekonomi tetap terjaga baik seperti tercermin dari inflasi yang tetap rendah dan berada dalam sasaran inflasi, transaksi berjalan yang menurun dan tetap berada pada level sehat, serta nilai tukar yang terkendali. Stabilitas sistem keuangan juga terpelihara, didukung oleh kondisi sistem pembayaran nasional yang andal.

Dinamika dan tantangan perekonomian sepanjang tahun 2016 memberikan beberapa pelajaran penting yang dapat menjadi pegangan bagi penerapan kebijakan dalam mengelola perekonomian ke depan. Pertama, respons bauran kebijakan makroekonomi yang tepat waktu, konsisten dan diterapkan secara disiplin menjadi kunci upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedua, koordinasi dan sinergi kebijakan yang baik antar pemangku kebijakan, baik Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia serta otoritas terkait lainnya, terbukti dapat meningkatkan resiliensi dan fleksibilitas perekonomian dalam melakukan penyesuaian terhadap guncangan dengan tetap memanfaatkan momentum pertumbuhan. Ketiga, dinamika ekonomi domestik yang sangat tergantung pada perkembangan global memberi pelajaran tentang pentingnya konsistensi dan keberlanjutan reformasi struktural dan upaya melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat fondasi perekonomian.

Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan terus membaik seiring perkembangan positif di global maupun domestik. Sejumlah tantangan, baik yang berasal dari global maupun domestik tetap perlu diwaspadai karena dapat mengganggu prospek perekonomian. Dari sisi global, terdapat empat tantangan utama yang perlu terus diwaspadai yakni pertumbuhan ekonomi global yang berisiko lebih rendah apabila konsolidasi ekonomi di negara besar tidak seperti yang diharapkan, kebijakan perdagangan internasional negara maju yang cenderung protektif, ketidakpastian keuangan global akibat arah kebijakan AS, dan inflasi global yang meningkat. Di sisi domestik, tantangan berkaitan dengan meningkatkan kemampuan penerimaan pajak untuk memperluas stimulus fiskal, melakukan penyelesaian konsolidasi korporasi dan perbankan, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mengendalikan potensi tekanan inflasi sejalan dengan kenaikan harga komoditas global, termasuk harga energi.

Diskusi dan uraian tentang dinamika dan tantangan perekonomian selama tahun 2016, respons kebijakan yang diambil, arah kebijakan dan prospek perekonomian ke depan, kami sajikan dalam Buku Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2016 yang kini ada di hadapan Anda. Melalui buku ini, kami mengharapkan pembaca dapat memahami dasar-dasar pertimbangan berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya dalam mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan selama tahun 2016. Dalam buku LPI 2016 ini, kami sampaikan pula strategi dan arah kebijakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing perekonomian agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Sebagai penutup, atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, kami mempersembahkan Buku LPI 2016 ini kepada masyarakat Indonesia. Kami meyakini dan berharap buku ini tetap dapat menjadi salah satu rujukan utama yang berkualitas dan terpercaya bagi kita semua dalam menyusun rencana ke depan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik secara berkesinambungan dan berkeadilan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi langkah dan upaya kita dalam bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara tercinta.

Jakarta, April 2017
Gubernur Bank Indonesia

Agus D. W. Martowardojo

INFOGRAFIS TINJAUAN UMUM

BERSINERGI MEMPERKUAT RESILIENSI, MENDORONG MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI

TANTANGAN GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi & volume perdagangan global belum kuat

- Lebih rendah dari tahun sebelumnya
- Negara maju tumbuh lebih rendah
- Negara berkembang tumbuh meningkat
- Volume perdagangan global masih melambat

Harga komoditas masih rendah

- Harga minyak masih rendah
- Harga komoditas baru mulai meningkat pada triwulan IV

Ketidakpastian pasar keuangan tetap tinggi

- Ketidakpastian kenaikan FFR
- Peningkatan geopolitik yang cenderung populis.
- *Brexit* dan *Trump Effect*

Tantangan Domestik Jangka Pendek

- Perlambatan kinerja ekspor
- Konsolidasi sektor korporasi dan perbankan
- Perlambatan penerimaan pajak yang mendorong konsolidasi fiskal
- Volatilitas aliran modal yang berdampak pada nilai tukar

EKONOMI DOMESTIK

Tetap berdaya tahan ditopang pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabilitas ekonomi yang terjaga

Tantangan Domestik Jangka Menengah

- Memperbaiki komposisi produk ekspor
- Memperkuat peran sektor industri
- Mendorong persaingan pasar dan tata niaga yang lebih sehat
- Memperkuat struktur pembiayaan domestik

RESPONS JANGKA PENDEK

- FISKAL
- MONETER
- MAKRO PRUDENSIAL
- MIKRO PRUDENSIAL
- SP-PUR

RESPONS JANGKA PANJANG

- STRUKTURAL

RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

- PEMERINTAH
- BANK INDONESIA
- OTORITAS JASA KEUANGAN

→ Menjaga stabilitas makroekonomi dan SSK

→ Mendorong momentum, pemulihan ekonomi

TINJAUAN UMUM

Bersinergi Memperkuat Resiliensi, Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi

Perekonomian Indonesia pada 2016 tetap berdaya tahan. Peran permintaan domestik yang besar dan respons kebijakan yang ditempuh mampu memitigasi berbagai risiko dari perekonomian global yang dapat mengganggu kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 kembali dalam lintasan meningkat dan ditopang stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Perbaikan ekonomi juga dibarengi sinergi kebijakan yang semakin solid, baik pada kebijakan siklikal maupun kebijakan struktural. Ke depan, prospek pemulihan ekonomi diperkirakan berlanjut, meskipun beberapa risiko dari global dan domestik tetap perlu menjadi perhatian. Untuk itu, sinergi kebijakan akan terus diperkuat guna meningkatkan resiliensi perekonomian sebagai pilar penting dalam mendorong berlanjutnya pemulihan ekonomi.

Perekonomian Indonesia pada 2016 tetap berdaya tahan di tengah kondisi perekonomian global yang masih belum kuat dan penuh ketidakpastian. Perkembangan tersebut dipengaruhi struktur permintaan domestik yang dominan serta ditopang respons kebijakan yang memadai. Kombinasi kedua hal tersebut pada gilirannya mampu memitigasi risiko dampak pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat, harga komoditas global yang masih rendah, dan ketidakpastian pasar keuangan dunia yang tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 meningkat dari 4,9% pada 2015 menjadi 5,0%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga ditandai oleh inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang menurun, nilai tukar rupiah yang terkendali, dan stabilitas sistem keuangan masih terjaga dengan risiko sistemik yang rendah.

Secara keseluruhan, dinamika ekonomi 2016 mengindikasikan berbagai kemajuan positif dalam perekonomian Indonesia. Stabilitas ekonomi yang terpelihara sebagai buah konsistensi kebijakan yang sebelumnya ditempuh telah menjadi pijakan kuat bagi berlangsungnya proses penyesuaian ekonomi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat kembali dalam lintasan meningkat. Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 berbeda dengan kinerja pertumbuhan banyak negara besar yang masih belum membaik. Selain itu, sinergi kebijakan baik kebijakan siklikal merespon kondisi jangka pendek maupun kebijakan struktural juga semakin solid. Sinergi kebijakan tersebut pada gilirannya dapat mendukung proses pemulihan ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka menengah.

Perekonomian Global 2016

Perekonomian global masih berkutat dengan tiga permasalahan seperti pada 2015. Ketiga permasalahan tersebut kembali memberikan tantangan bagi perekonomian domestik pada 2016. Tiga permasalahan utama ekonomi dunia tersebut saling berkaitan, yang akhirnya membuat pemulihan ekonomi global tetap lambat (Diagram 1). Permasalahan ekonomi dunia semakin kompleks akibat ketidakpastian geopolitik, termasuk hasil referendum *Brexit* dan Pemilu AS yang jauh berbeda dengan ekspektasi pelaku pasar. Kondisi tersebut kemudian turut berkontribusi pada ketidakpastian yang masih tinggi dan akhirnya mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia.

Permasalahan pertama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang masih belum kuat dan tidak merata. Konsolidasi ekonomi dunia yang masih berlanjut, termasuk di Tiongkok, mendorong pertumbuhan ekonomi dunia pada 2016 tetap lemah yakni 3,1%. Kondisi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian 2015 sebesar 3,2% (Tabel 1). Dalam dinamika triwulanan, pertumbuhan ekonomi dunia pada triwulan IV 2016 meningkat. Namun kemajuan tersebut belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi dunia keseluruhan tahun 2016 menjadi lebih tinggi dari capaian 2015.

Dampak pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat semakin melebar karena banyak negara merespons pelemahan ekonomi dunia dengan mengalihkan strategi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berorientasi domestik. Bersamaan dengan indikasi *global value chain*

Diagram 1. **Perekonomian Global, Tantangan Perekonomian Indonesia, dan Respons Kebijakan 2016**

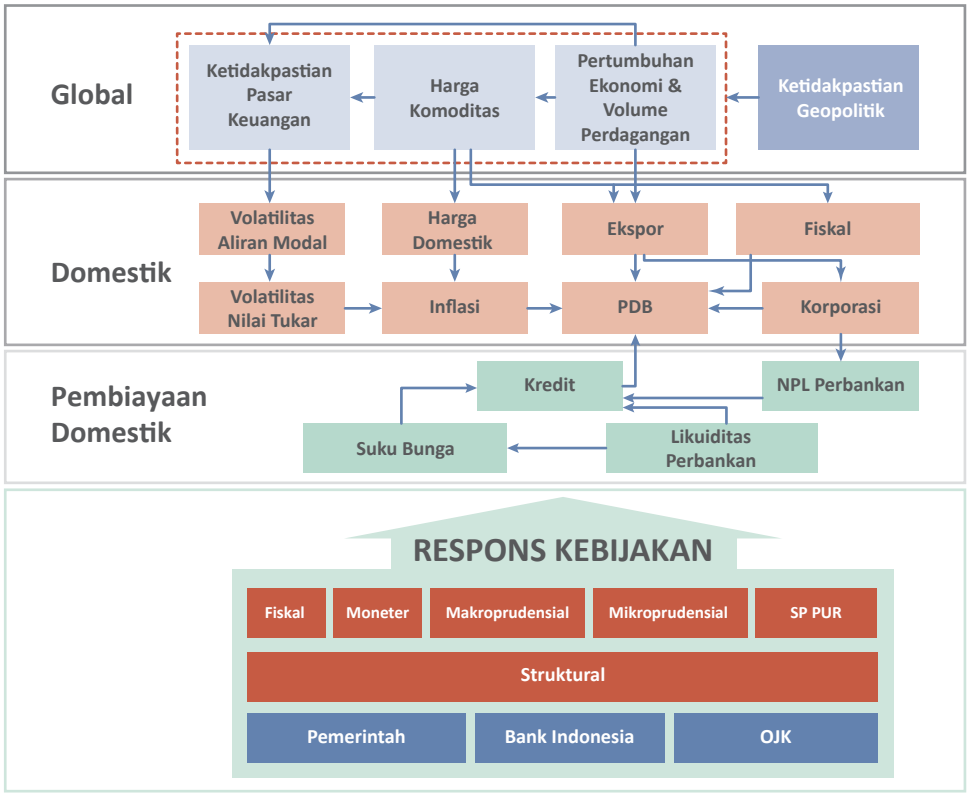

Sumber: Bank Indonesia

yang berkurang, strategi tersebut kemudian membuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia melemah. Akibatnya, pertumbuhan volume perdagangan dunia 2016 semakin turun yakni dari 2% pada 2015 menjadi hanya 1%, yang kemudian semakin menurunkan kinerja ekspor banyak negara di dunia.

Permasalahan kedua berkenaan dengan masih rendahnya harga komoditas dunia, setidaknya sampai dengan triwulan III 2016. Harga komoditas baik energi maupun non-energi hingga triwulan III 2016 masih rendah dipengaruhi permintaan yang lemah serta pasokan yang besar. Dari komoditas energi, harga minyak dunia masih belum kuat, meskipun telah melewati level terendah pada Januari 2016. Harga minyak jenis Minas sampai dengan triwulan III 2016 rata-rata mencapai 38,8 dolar AS per barel, sebelum pada triwulan IV 2016 naik kembali menjadi 47,6 dolar AS per barel (Tabel 1). Dari komoditas non-energi, berbagai harga komoditas juga tetap rendah, termasuk harga komoditas ekspor Indonesia seperti batubara, kelapa sawit,

Tabel 1. **Indikator Utama Ekonomi Dunia**

Komponen	2013	2014	2015	2016				
				I	II	III	IV	Total
Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)	3,3	3,4	3,2	3,1	3,0	3,0	3,1	3,1
Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (%)	2,2	2,7	2,0	0,8	1,1	1,1	2,2	1,0
Harga Minyak Dunia (dolar AS/barel)	98,0	92,9	48,8	33,6	45,6	44,9	49,3	43,5
Harga Minas (dolar AS/barel)	108,4	98,7	49,0	30,9	43,3	42,0	47,6	41,0
Indeks Harga Komoditas Ekspor Nonmigas Indonesia (%, yoy)	-9,8	-4,3	-15,0	-11,6	-5,0	7,0	27,9	5,4
Rata-rata DXY (Indeks - naik dolar menguat)	81,5	82,6	96,3	97,4	94,6	95,8	99,8	96,9
Rata-rata VIX (Indeks - naik volatilitas meningkat)	14,1	14,1	16,6	20,5	15,7	13,2	14,1	15,8

Sumber: Bloomberg dan Bank Indonesia

dan tembaga. Harga komposit komoditas utama ekspor nonmigas Indonesia pada semester I 2016 juga masih tercatat rendah, sebelum kemudian meningkat signifikan pada triwulan IV 2016.

Permasalahan ketiga tentang masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Ketidakpastian tersebut terindikasi dari indeks VIX yang naik, terutama pada triwulan I 2016 dan triwulan IV 2016 (Tabel 1). Ketidakpastian di pasar keuangan global juga menguat karena pengaruh rencana kenaikan Fed Funds Rate (FFR) oleh bank sentral AS. Kondisi tersebut kemudian mengubah pola aliran modal di pasar keuangan global yang kemudian memicu penguatan dolar dan memberikan tekanan kepada mata uang banyak negara, termasuk Indonesia. Perkembangan tersebut tergambar dari rata-rata indeks DXY yang meningkat pada triwulan I 2016 dan triwulan IV 2016 sejalan dengan penguatan dolar AS.

Pemulihan ekonomi dunia semakin lambat dan ketidakpastian pasar keuangan dunia tetap tinggi karena saat bersamaan terjadi transisi politik di beberapa negara utama dunia. Pada akhir semester I 2016, hasil referendum Inggris yang memutuskan keluar dari Uni Eropa *(Brexit),* sempat memicu ketidakpastian karena berbeda dengan ekspektasi pelaku pasar. Ketidakpastian juga naik saat menyikapi hasil pemilihan Presiden AS yang juga di luar perkiraan pelaku pasar. Pelaku pasar membaca berbagai rencana kebijakan Presiden AS terpilih Donald Trump akan rentan mengganggu proses pemulihan ekonomi global. Rencana kebijakan AS tersebut antara lain kebijakan fiskal yang lebih ekspansif di tengah beban utang pemerintah yang besar, rencana kebijakan perdagangan internasional yang lebih protektif, dan beberapa kebijakan di bidang imigrasi.

Tantangan Perekonomian Indonesia 2016

Perekonomian global yang belum membaik pada gilirannya memberikan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi global yang belum menguntungkan berisiko mengganggu proses pemulihan ekonomi Indonesia pada 2016. Risiko tersebut bila terus berlanjut tidak hanya dapat menghambat perbaikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan tekanan kepada stabilitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan (Diagram 1). Hubungan keduanya bahkan saling timbal balik karena pertumbuhan ekonomi yang masih belum kuat rentan mengganggu stabilitas ekonomi dan sistem keuangan dan berbalik memberikan tekanan kepada pertumbuhan ekonomi.

Tantangan bagi perekonomian Indonesia dapat dimulai dari pertumbuhan ekonomi yang berisiko kembali melemah dipicu prospek ekspor yang belum kuat. Risiko tersebut cukup relevan mengingat pertumbuhan ekonomi dunia belum kuat sehingga dapat menurunkan permintaan terhadap produk ekspor Indonesia, khususnya ekspor nonkomoditas. Ekspor semakin rentan melemah karena harga komoditas yang turun dapat menekan *terms of trade* Indonesia. Di tengah komposisi ekspor Indonesia banyak disumbang komoditas primer, penurunan *terms of trade* Indonesia dapat menurunkan kinerja ekspor Indonesia semakin dalam.

Risiko dari prospek ekspor yang belum kuat perlu semakin menjadi perhatian karena bisa memengaruhi kinerja korporasi dan perbankan. Kerentanan korporasi bisa meningkat akibat penerimaan ekspor yang menurun. Kerentanan korporasi dapat semakin naik jika permintaan domestik tetap belum kuat, termasuk akibat dampak lanjutan dari respons korporasi yang lebih memilih melakukan konsolidasi internal dibandingkan ekspansi usaha. Kinerja korporasi yang berisiko turun pada akhirnya bisa berpengaruh kepada kinerja sektor keuangan, termasuk industri perbankan. Kinerja industri perbankan berisiko turun jika risiko kredit terus naik akibat kinerja korporasi yang belum kuat.

Kinerja perbankan yang berisiko turun pada gilirannya bisa mengganggu efektivitas transmisi kebijakan moneter, baik melalui jalur suku bunga maupun jalur kredit. Risiko kredit yang meningkat dapat memengaruhi perilaku bank dalam menentukan suku bunga, khususnya suku bunga kredit. Suku bunga kredit berisiko menjadi kurang elastis terhadap perubahan suku bunga kebijakan bank sentral jika saat bersamaan risiko kredit meningkat. Selain itu, risiko kredit yang meningkat juga bisa menghambat minat perbankan dalam menyalurkan kredit. Secara keseluruhan jalur suku bunga dan jalur kredit yang terganggu pada gilirannya berisiko menurunkan peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ruang fiskal untuk mendorong perekonomian juga berisiko menurun akibat berkurangnya potensi penerimaan pajak. Risiko penurunan pajak tidak hanya sebagai dampak langsung penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akibat penurunan harga komoditas, tetapi juga dari dampak tidak langsung kepada penurunan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Risiko penurunan pajak secara keseluruhan pada gilirannya bisa membatasi kemampuan belanja pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi mengingat pada sisi lain upaya menjaga prospek kesinambungan fiskal perlu terus dikelola.

Tantangan perekonomian menjadi semakin kompleks karena bisa merambat mengganggu stabilitas

makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Prospek perekonomian domestik yang berisiko menurun bisa mengganggu prospek penanaman modal di Indonesia, termasuk aliran modal jenis investasi portofolio. Risiko penurunan investasi portofolio semakin besar dan disertai volatilitas yang meningkat bila terjadi ketidakpastian pasar keuangan global, termasuk dampak dari ketidakpastian kenaikan FFR dan risiko geopolitik. Hal ini bila berlanjut dapat memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan domestik. Pelemahan rupiah pada gilirannya juga dapat memberikan tekanan kepada inflasi, tidak hanya inflasi inti tetapi juga inflasi kelompok *volatile food* and inflasi kelompok *administered*.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan perekonomian domestik tersebut perlu direspons dengan segera karena bila terus bergulir dapat saling memengaruhi dan menghambat proses pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang belum kuat dapat meningkatkan risiko korporasi dan risiko kredit perbankan serta mengganggu transmisi kebijakan moneter dan mengurangi ruang stimulus fiskal. Risiko perekonomian tersebut dapat juga meningkatkan risiko stabilitas makroekonomi dan risiko stabilitas sistem keuangan yang kemudian kembali menghambat proses pemulihan perekonomian. Selain respons yang bersifat siklikal, respons yang bersifat struktural juga perlu terus diperkuat termasuk untuk memperkuat berbagai aspek dari sisi spasial seperti konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik.

Respons Kebijakan 2016

Kebijakan makroekonomi yang ditempuh pada 2016 secara umum diarahkan untuk memitigasi risiko yang dapat mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Respons yang ditempuh secara umum mencakup empat arah kebijakan. Pertama, memitigasi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat peran permintaan domestik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan tersebut penting karena perekonomian yang belum kuat dapat memicu berbagai risiko yang saling berhubungan dan bila berlanjut akan mengganggu pemulihan perekonomian secara keseluruhan. Kedua, terus mempertahankan stabilitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang sudah terkendali dan telah menjadi pijakan bagi pemulihan ekonomi. Ketiga, memperkuat struktur perekonomian melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian guna terus meningkatkan daya saing perekonomian dalam jangka menengah panjang. Keempat, mempertahankan berbagai kebijakan yang ditempuh tetap dalam koridor kebijakan makroekonomi yang sehat guna mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan makroekonomi ditempuh melalui sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sinergi kebijakan yang diimplementasikan dalam satu bauran kebijakan yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan mikroprudensial, dan kebijakan struktural termasuk kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah (SP-PUR). Bauran kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memitigasi risiko siklikal jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat struktur perekonomian dalam jangka menengah panjang. Bauran kebijakan juga ditempuh Bank Indonesia dengan mengombinasikan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan SP-PUR.

Konsisten dengan arah kebijakan makroekonomi, Pemerintah memperkuat stimulus fiskal dengan memperbesar belanja ke sektor yang lebih produktif, sambil tetap konsisten menjaga prospek kesinambungan fiskal. Arah kebijakan tersebut diejawantahkan dalam APBN 2016. APBN 2016 menargetkan belanja negara meningkat 17% ditopang target peningkatan penerimaan dalam negeri yang cukup tinggi yakni 21,6%. Dengan rencana anggaran tersebut, defisit APBN 2016 ditargetkan sebesar 2,15% terhadap PDB.

Dalam perkembangannya, strategi kebijakan fiskal 2016 tersebut menghadapi tantangan. Penerimaan pajak dalam negeri hingga semester I 2016 belum sesuai harapan akibat harga komoditas yang masih rendah dan perbaikan perekonomian domestik yang belum kuat. Sementara realisasi belanja pemerintah hingga akhir semester I 2016 tercatat cukup besar yakni 44,3% dari target. Kondisi tersebut pada gilirannya menyebabkan defisit APBN 2016 pada semester I 2016 telah mencapai 1,9% dari PDB.

Pemerintah merespons tantangan dengan menempuh langkah konsolidasi fiskal pada semester II 2016, guna tetap menjaga kredibilitas kesinambungan fiskal. Dari sisi penerimaan, pemerintah menurunkan target penerimaan pajak menjadi lebih realistis, dengan tetap berupaya mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, termasuk dengan menempuh program amnesti pajak. Dalam perkembangannya, program amnesti pajak berhasil mengumpulkan tebusan pajak sebesar Rp107 triliun hingga akhir 2016. Keberhasilan amnesti pajak tidak hanya menutupi kebutuhan jangka pendek penerimaan negara, tetapi juga menjadi langkah penguatan basis pajak ke depan. Berbagai langkah konsolidasi fiskal yang ditempuh Pemerintah pada akhirnya mengarahkan defisit APBN-P 2016 tetap terkendali yakni 2,5% dari PDB, lebih rendah

dari tahun sebelumnya sebesar 2,6%. Capaian tersebut kemudian menjaga posisi utang pemerintah tetap rendah dan sehat serta berkesinambungan yakni 27,8% dari PDB.

Bank Indonesia merespons arah kebijakan makroekonomi dengan memperkuat bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah (SP-PUR). Sejalan dengan Pemerintah, bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan tidak hanya untuk merespons isu siklikal jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi jangka menengah-panjang. Untuk respons siklikal jangka pendek, respons kebijakan ditempuh guna memitigasi risiko penurunan pertumbuhan ekonomi yang bila terus berlanjut rentan kembali memberikan tekanan kepada stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Untuk struktural jangka menengah, respons ditempuh melalui berbagai langkah untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mengendalikan stabilitas perekonomian. Langkah yang ditempuh Bank Indonesia pada 2016 merupakan bagian dari berbagai langkah transformasi Bank Indonesia yang telah dicanangkan pada 2014.

Dari kebijakan moneter, kebijakan diarahkan untuk memberikan ruang bagi upaya memperkuat momentum pemulihan ekonomi dan mendukung stabilitas sistem keuangan, sambil tetap konsisten menjaga stabilitas makroekonomi yang sudah terpelihara. Arah kebijakan ditempuh mempertimbangkan stabilitas makroekonomi yang semakin terkendali tercermin dari tekanan inflasi yang rendah dan sesuai dengan sasaran, defisit transaksi berjalan yang turun dan tetap berada di level yang sehat, serta nilai tukar rupiah yang terkendali. Berbagai kondisi tersebut pada gilirannya memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter. Sejalan dengan arah kebijakan, suku bunga kebijakan BI pada 2016 diturunkan 150bps sehingga suku bunga kebijakan yang baru BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) tercatat 4,75% pada Desember 2016 dan GWM Primer diturunkan 1,0% sehingga menjadi 6,50%.

Kebijakan nilai tukar untuk menjaga nilai tukar agar bergerak sesuai dengan nilai fundamental juga ditempuh guna memperkuat efektivitas menjaga stabilitas ekonomi. Bank Indonesia melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah agar volatilitas rupiah tidak terjadi secara berlebihan karena berisiko kembali memberikan tekanan kepada nilai tukar dan inflasi. Kebijakan nilai tukar rupiah juga ditopang upaya memperkuat pengelolaan permintaan dan penawaran valas, termasuk mengimplementasikan ketentuan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) terhadap utang luar negeri yang dimiliki dan memperkuat implementasi ketentuan kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, strategi untuk meningkatkan ketahanan sektor eksternal guna mendukung kebijakan nilai tukar rupiah terus dilakukan melalui upaya menjaga kecukupan cadangan devisa baik dari sisi *first line of defense* maupun sisi *second line of defense.*

Kebijakan moneter juga diperkuat langkah reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter. Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter merupakan salah satu bagian dari upaya transformasi yang ditempuh Bank Indonesia. Reformulasi tersebut memiliki tiga tujuan utama, yaitu memperkuat sinyal kebijakan moneter, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Reformulasi kerangka operasional moneter ditempuh dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI7DRR yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter turut disertai langkah-langkah percepatan pendalaman pasar uang, baik di pasar uang rupiah maupun pasar valas.

Bauran kebijakan Bank Indonesia juga ditopang kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk memperkuat intermediasi perbankan, sambil tetap konsisten menjaga stabilitas sistem keuangan yang telah terkendali. Pada 2016, Bank Indonesia antara lain menyempurnakan ketentuan *Loan (Financing) to Value Ratio* dengan kembali menaikkan rasio *Loan to Value (LTV)* atau *Financing to Value (FTV)* untuk kredit properti. Selain itu, Bank Indonesia juga menyempurnakan ketentuan *Loan to Funding Ratio* (LFR) yang dikaitkan dengan Giro Wajib Minimum (GWM) dengan menyesuaikan batas bawah rasio target dari 78% menjadi 80% guna mendorong fungsi intermediasi perbankan. Selanjutnya, Bank Indonesia kembali menetapkan *Countercyclical Buffer* (CCB) sebesar 0% setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini dan risiko sistemik dari pertumbuhan kredit.

Sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas sistem keuangan juga dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menempuh berbagai kebijakan mikroprudensial. Kebijakan OJK pada tahun 2016 tetap diarahkan untuk memastikan kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, yang pada gilirannya bisa memperkuat ketahanan sistem keuangan sekaligus mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam tugasnya, OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kebijakan sistem pembayaran juga ditempuh Bank Indonesia untuk memperkuat infrastruktur sistem pembayaran sesuai standar internasional. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendukung penguatan struktur perekonomian melalui penciptaan sistem pembayaran yang efisien. Setelah implementasi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI RTGS) Generasi II dan Sistem Kliring Nasional Baru Indonesia (SKNBI) Generasi II berjalan dengan baik, Bank Indonesia menyempurnakan dan menyesuaikan fitur layanan sistem pembayaran dengan mengimplementasikan layanan *bulk payment* pada 2 Mei 2016. Bank Indonesia juga menerapkan konsep *National Payment Gateway* (NPG) sebagai infrastruktur yang mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik. Di bidang sistem pembayaran ini, Bank Indonesia juga memperkuat sinergi kebijakan dengan Kementerian Sosial saat melakukan integrasi sistem pembayaran nontunai ke dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk sistem pembayaran tunai, kebijakan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar.

Bauran kebijakan Bank Indonesia ditempuh dengan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan pemangku kebijakan lain. Koordinasi kebijakan dilakukan berkaitan upaya pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan beberapa otoritas guna mendorong pendalaman pasar keuangan dan keuangan inklusif serta berbagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan seperti melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi di bidang stabilitas sistem keuangan diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Selain itu, koordinasi juga diarahkan untuk mempercepat reformasi struktural guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bauran kebijakan dan koordinasi tersebut juga diperkuat dengan strategi komunikasi yang efektif kepada publik.

Berbagai kebijakan yang ditempuh tetap didukung kebijakan struktural guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekononomian. Dalam kaitan ini, Pemerintah terus melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur energi yakni pembangkit listrik dan infrastruktur konektivitas seperti jalan tol, bandar udara, *Light Rapid Transit* (LRT), dan sebagainya. Selain itu, pada 2016 Pemerintah juga fokus pada kebijakan seperti harmonisasi peraturan, kemudahan perizinan, dan insentif fiskal. Fokus kebijakan dituangkan Pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yakni Paket IX–XIV dan menjadi kelanjutan paket kebijakan yang ditempuh tahun 2015. Beberapa hal yang menonjol dalam PKE 2016 ialah berbagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia sebagai inisiatif untuk mendorong investasi. Selain itu, Pemerintah juga berupaya memperkuat kegiatan ekonomi berorientasi ekspor. Dalam upaya tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE).

Kinerja Perekonomian Indonesia 2016

Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK serta ditopang peran permintaan domestik yang besar dapat mengarahkan perekonomian Indonesia pada 2016 tetap berdaya tahan. Kombinasi kedua faktor tersebut dapat memitigasi risiko yang muncul dari kondisi global yang kurang menguntungkan. Struktur perekonomian yang masih sekitar 60% ditopang konsumsi swasta, mampu meminimalkan dampak kinerja sektor eksternal yang belum kuat. Peran konsumsi swasta yang tetap besar juga tidak terlepas dari pengaruh stimulus yang diberikan oleh kebijakan fiskal, moneter dan makroprudensial, serta dampak positif dari stabilitas ekonomi dan sistem keuangan yang tetap terkendali. Berbagai kondisi ini pada gilirannya membawa pertumbuhan ekonomi kembali dalam lintasan meningkat dan tetap ditopang stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 meningkat dari 4,9% pada 2015 menjadi 5,0% ditopang permintaan domestik, sedangkan kinerja ekspor riil belum kuat. Peran permintaan domestik yang dominan didorong stimulus fiskal melalui berbagai proyek infrastruktur terutama pada semester I 2016, serta dampak positif pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial. Belanja infrastruktur pada semester I 2016 berhasil menjadi penopang investasi, khususnya investasi bangunan, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi sampai triwulan III 2016 (Tabel 2). Respons kebijakan juga dapat mempertahankan keyakinan konsumen dan membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap kuat yakni 5,0% pada 2016. Namun, peran korporasi swasta belum kuat akibat strategi konsolidasi internal korporasi swasta dalam merespons perekonomian global yang belum kuat. Strategi ini membuat korporasi menahan ekspansi dan akhirnya membuat investasi nonbangunan masih lemah sampai triwulan III 2016.

Dinamika triwulanan menunjukkan peran ekspor riil dan juga korporasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi mulai membaik pada triwulan IV 2016. Pertumbuhan ekspor

Tabel 2. Indikator Utama Perekonomian Indonesia

Komponen	2013	2014	2015	2016				
				I	II	III	IV	Total
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,6	5,0	4,9	4,9	5,2	5,0	4,9	5,0
Konsumsi Rumah Tangga (%,yoy)	5,4	5,2	5,0	5,0	5,1	5,0	5,0	5,0
Konsumsi Pemerintah (%,yoy)	6,8	1,2	5,3	3,4	6,2	-3,0	-4,1	-0,2
PMTB (%,yoy)	5,0	4,5	5,0	4,7	4,2	4,2	4,8	4,5
PMTB Bangunan (%,yoy)	6,7	5,5	6,1	6,8	5,1	5,0	4,1	5,2
PMTB Non Bangunan (%,yoy)	0,6	1,6	2,0	-1,2	1,7	2,2	7,1	2,5
Ekspor Barang dan Jasa (%,yoy)	4,2	1,1	-2,1	-3,3	-2,2	-5,7	4,2	-1,7
Impor Barang dan Jasa (%,yoy)	1,9	2,1	-6,4	-5,1	-3,2	-3,7	2,8	-2,3
Inflasi IHK (%,yoy)	8,4	8,4	3,4	4,4	3,5	3,1	3,0	3,0
Inflasi Inti (%,yoy)	5,0	4,9	4,0	3,5	3,5	3,2	3,1	3,1
Inflasi *Volatile Food* (%,yoy)	11,8	10,9	4,8	9,6	8,1	6,5	5,9	5,9
Inflasi *Administered Price* (%,yoy)	16,7	17,6	0,4	2,8	-0,5	-0,4	0,2	0,2
Neraca Pembayaran Indonesia								
Defisit Transaksi Berjalan (% PDB)	3,19	3,09	2,03	2,14	2,25	1,92	0,75	1,75
Overall Balance (miliar dolar AS)	-7,32	15,25	-1,10	-0,29	2,16	5,71	4,51	12,09
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	99,39	111,86	105,93	107,54	109,79	115,67	116,36	116,36
Nilai Tukar (rata-rata; Rp per dolar AS)	10.445	11.876	13.392	13.525	13.313	13.130	13.247	13.305
IHSG (Indeks)	4.274	5.227	4.593	4.845	5.017	5.365	5.297	5.297
Yield SUN 10 Tahun (%)	8,45	7,80	8,76	7,67	7,45	7,06	7,97	7,97
Perbankan								
Kredit Total (% yoy)	21,80	11,65	10,40	8,52	8,78	6,35	7,85	7,85
CAR (akhir periode,%)	18,36	19,38	21,39	21,76	22,29	22,34	22,69	22,93
NPL (akhir periode,%)	1,77	2,16	2,49	2,83	3,05	3,10	2,93	2,93
APBN								
Pajak (% PDB)	11,3	10,9	10,7	1,7	2,6	3,0	3,1	10,3
Defisit APBN (% PDB)	2,2	2,1	2,6	1,2	0,7	0,1	0,7	2,5

Sumber: Bank Indonesia, BPS, BEI, Kemenkeu

riil pada triwulan IV 2016 tercatat 4,2% (yoy), capaian pertumbuhan positif pertama kali sejak triwulan III 2014. Kinerja korporasi sektor swasta juga membaik tergambar dari pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nonbangunan pada triwulan IV 2016 yang meningkat menjadi 7,1% (yoy), tertinggi sejak 2013. Perkembangan positif ekspor riil dan investasi nonbangunan pada gilirannya mampu menahan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat berkurangnya stimulus fiskal pada triwulan IV 2016.

Secara spasial, perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 terutama tercatat di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perkembangan sama terlihat di Kalimantan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tercatat di hampir seluruh provinsi. Perbaikan ekonomi di berbagai wilayah tersebut terutama ditopang konsumsi rumah tangga yang tetap kuat dan ekspor pada triwulan IV 2016 yang membaik seiring kenaikan harga komoditas di pasar global. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia pada 2016 tetap tinggi, meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan kinerja 2016 akibat sektor pertambangan yang belum kuat.

Tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka pada 2016 turun dari 6,2% pada 2015 menjadi menjadi 5,6%. Jumlah penduduk miskin juga turun yakni 11,2% dari total penduduk pada 2015 menjadi 10,7%. Berbagai perbaikan tersebut berdampak positif kepada menurunnya ketimpangan pendapatan tercermin dari penurunan rasio Gini dari 0,402 pada 2015 menjadi menjadi 0,397.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) membaik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. NPI 2016 mencatat surplus sebesar 12,1 miliar dolar AS, dipengaruhi penurunan

defisit transaksi berjalan (TB) dan kenaikan surplus transaksi modal finansial (TMF). Penurunan defisit TB dari 2,0% pada 2015 menjadi 1,8% PDB cukup menggembirakan di tengah kondisi kinerja ekspor yang belum kuat akibat ekonomi global yang tidak menguntungkan. Penurunan defisit TB dipengaruhi impor yang tetap terkendali sebagai kontribusi positif penyesuaian pelaku domestik terhadap penurunan permintaan eksternal serta dampak dari nilai tukar rupiah yang bergerak sesuai fundamental. Sementara itu, kenaikan surplus TMF dipengaruhi aliran masuk modal asing yang cukup tinggi didorong berbagai persepsi positif investor asing terhadap prospek perekonomian Indonesia, termasuk pengaruh dari keberhasilan program amnesti pajak. Perkembangan positif NPI 2016 pada gilirannya mendorong kenaikan cadangan devisa Indonesia dari 105,9 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 116,4 miliar dolar AS. Total utang luar negeri juga dalam posisi aman yakni 34% dari PDB, menurun dari 36% dari PDB pada 2015 sejalan dengan proses konsolidasi sektor korporasi swasta.

NPI 2016 yang mencatat surplus berdampak positif kepada nilai tukar rupiah pada 2016 yang bergerak terkendali. Berbeda dengan mata uang negara kawasan yang mencatat depresiasi, nilai tukar rupiah pada 2016 secara rata-rata menguat 0,7% dibandingkan dengan kondisi 2015. Sementara secara *point to point*, rupiah ditutup di level Rp13.473 per dolar AS pada akhir 2016 menguat 2,3% dibandingkan dengan level akhir tahun 2015. Penguatan rupiah terutama terlihat pada tiga triwulan pertama 2016 sejalan dengan meningkatnya aliran masuk modal asing ke Indonesia dan perbaikan struktur permintaan valas. Permintaan valas terindikasi terus membaik sebagai dampak positif implementasi ketentuan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) terhadap utang luar negeri dan ketentuan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI. Aliran masuk modal asing yang banyak ditempatkan di instrumen pasar keuangan Indonesia juga mendorong kenaikan kinerja pasar modal dan pasar obligasi Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir 2016 tercatat meningkat menjadi 5.296, naik dari 4.593 pada 2015. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun juga menurun 77 bps menjadi 7,97%, yang antara lain turut dipengaruhi oleh penurunan suku bunga dan inflasi.

Perekonomian Indonesia pada 2016 yang membaik juga didukung inflasi yang terkendali. Inflasi 2016 tercatat cukup rendah di level 3,02% sehingga masih melanjutkan capaian tahun 2015 yang berada dalam rentang sasaran 4,0±1%. Capaian dipengaruhi harga komoditas yang masih rendah, nilai tukar yang terkendali, permintaan agregat yang terkelola baik, dan ekspektasi inflasi yang menurun. Berbagai faktor tersebut berkontribusi kepada inflasi inti yang rendah yakni 3,07%. Inflasi yang rendah juga dipengaruhi inflasi kelompok *administered prices* akibat penurunan harga beberapa komoditas energi strategis terutama pada semester I 2016 seperti BBM, Tarif Tenaga Listrik untuk golongan pelanggan 1.300 VA ke atas, dan LPG 12kg. Sementara itu, inflasi *volatile food* cukup terkendali, meskipun sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian 2015 akibat gangguan pasokan terkait *La Nina*.

Stabilitas sistem keuangan juga terpelihara, meskipun peningkatan risiko kredit menjadi perhatian. Berbagai indikator ketahanan perbankan seperti indikator likuiditas dan permodalan masih tetap kuat. Indikator likuiditas perbankan 2016 membaik tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga bank yang meningkat menjadi 20,9%. Peningkatan kecukupan likuiditas antara lain dipengaruhi ekspansi keuangan pemerintah dan dampak pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia. Kecukupan modal perbankan pada 2016 meningkat dari 21,2% pada 2015 menjadi 22,8%. Namun, risiko kredit meningkat tercermin dari *non performing loan* (NPL) yang naik dari 2,5% menjadi 2,9% pada 2016, meskipun masih cukup aman karena di bawah 5%.

Peningkatan risiko kredit mendorong perbankan juga melakukan konsolidasi internal dan berdampak pada transmisi kebijakan moneter baik melalui jalur suku bunga maupun jalur kredit. Dari jalur suku bunga, risiko kredit yang naik terindikasi menahan penurunan suku bunga kredit lebih besar. Suku bunga kredit baru turun 80 bps, jauh berbeda dibandingkan suku bunga kebijakan dan suku bunga deposito yang masing-masing sudah turun 150 bps dan 123 bps. Dari jalur kredit, risiko kredit yang naik menurunkan minat bank dalam menyalurkan kredit. Bersamaan dengan permintaan kredit dari korporasi yang belum kuat dan suku bunga kredit yang belum turun optimal, perbankan yang juga melakukan konsolidasi internal pada gilirannya membuat pertumbuhan kredit belum kuat yakni 7,9% pada 2016. Pertumbuhan tersebut menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2015 sebesar 10,4%.

Stabilitas sistem keuangan yang terpelihara dan risiko sistemik yang rendah juga tidak terlepas dari kondisi sistem pembayaran nasional yang tetap baik. Berbagai indikator sistem pembayaran meningkat dan penyelenggaraan sistem pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia dan industri berjalan baik dan tanpa gangguan signifikan. Nilai transaksi sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan industri tercatat meningkat. Khusus untuk transaksi ritel non tunai, nilai transaksi pada 2016 bertumbuh 15,5%. Sementara dari sistem pembayaran tunai, pengelolaan uang rupiah tetap positif tercermin dari terpenuhinya kebutuhan uang tunai dalam jumlah yang

cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar.

Prospek Perekonomian 2017 dan Jangka Menengah

Perekonomian Indonesia pada 2017 diperkirakan terus membaik dipengaruhi prospek perbaikan ekonomi global dan domestik. Dari global, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan capaian pada 2016. Perkembangan ini dapat mendorong harga komoditas, baik energi maupun non-energi, tetap tinggi. Dari domestik, perbaikan prospek ekonomi ditopang perkiraan mulai berkurangnya proses konsolidasi yang dilakukan oleh korporasi dan perbankan. Korporasi diperkirakan melanjutkan ekspansi usaha yang sudah terlihat pada triwulan IV 2016 didorong kenaikan optimisme berusaha antara lain akibat kenaikan harga komoditas dunia. Sejalan optimisme korporasi, perbankan diperkirakan juga mulai meningkatkan pemberian kredit dipengaruhi perkiraan risiko kredit yang juga mulai menurun.

Prospek perbaikan perekonomian juga didorong arah kebijakan fiskal 2017 untuk tetap memberikan stimulus kepada perekonomian, khususnya kepada sektor yang memiliki dampak pengganda yang besar. Pada 2017, Pemerintah menargetkan anggaran untuk belanja infrastruktur mencapai Rp387 triliun, meningkat dari realisasi 2016 sebesar Rp267 triliun. Peningkatan anggaran belanja infrastruktur membuat pangsa belanja infrastruktur terhadap total belanja pada 2017 mencapai 18,6%, lebih tinggi dari pangsa tahun 2016 sebesar 14,4%. Strategi kebijakan tersebut tetap diarahkan dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dimana defisit APBN 2017 ditargetkan sekitar 2,4% dari PDB.

Dengan memperhatikan faktor global dan domestik tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 diproyeksikan meningkat dalam kisaran 5,0%-5,4%. Pertumbuhan ekonomi masih akan banyak ditopang permintaan domestik, yakni konsumsi dan investasi, meskipun ekspor juga telah mulai membaik. Konsumsi swasta diperkirakan masih kuat dipengaruhi keyakinan rumah tangga dan dampak peningkatan kelas menengah. Investasi juga meningkat didorong berlanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah dan mulai bergulirnya investasi swasta. Sementara itu, ekspor riil diperkirakan juga meningkat sejalan pengaruh kenaikan pertumbuhan ekonomi dunia dan harga komoditas global. Secara sektoral, kenaikan harga komoditas diperkirakan mendukung kenaikan sektor pertambangan dan pertanian yang pada gilirannya mendorong kenaikan sektor sekunder seperti sektor industri pengolahan, dan juga sektor tersier.

Stabilitas ekonomi diperkirakan tetap terkendali sehingga dapat berkontribusi mendukung prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inflasi 2017 diperkirakan meningkat, namun masih mampu dikelola dalam kisaran sasarannya sebesar 4,0±1%. Peningkatan inflasi 2017 terutama didorong kenaikan inflasi kelompok *administered* terkait kebijakan Pemerintah melakukan subsidi TTL tepat sasaran untuk pelanggan 900 VA. Kenaikan prospek inflasi juga dipengaruhi dampak kenaikan harga energi dunia yang berpotensi meningkatkan harga bahan bakar khusus dan tarif listrik. Sementara itu, pengaruh kenaikan permintaan agregat sejalan peningkatan pertumbuhan ekonomi masih terkendali sehingga inflasi inti tetap rendah. Stabilitas ekonomi yang terkendali juga diikuti defisit transaksi berjalan yang diperkirakan tetap sehat di bawah level 2,5% dari PDB.

Pertumbuhan ekonomi yang membaik dan stabilitas ekonomi yang terjaga diperkirakan memperkuat kinerja perbankan. Prospek pertumbuhan ekonomi yang naik, risiko kredit yang menurun, serta suku bunga kredit yang masih berpotensi turun bisa meningkatkan penyaluran kredit perbankan 2017. Pertumbuhan kredit pada 2017 diperkirakan dalam kisaran 10-12%. Kenaikan pertumbuhan kredit tersebut bisa memberikan dampak pengganda bagi kenaikan dana pihak ketiga yang pada tahun 2017 diproyeksikan bertumbuh dalam kisaran 9-11%.

Prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka menengah diperkirakan terus berlanjut dengan didukung inflasi yang turun dan defisit transaksi berjalan yang sehat. Perkiraan didukung dampak positif berbagai langkah reformasi struktural yang ditempuh. Reformasi struktural diperkirakan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Perbaikan efisiensi dan produktivitas tersebut termasuk dampak perbaikan konektivitas antar wilayah yang akan memperkuat struktur produksi dan distribusi serta menurunkan biaya produksi. Secara keseluruhan, prospek perbaikan efisiensi dan produktivitas pada gilirannya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada inflasi dan defisit transaksi berjalan. Inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran 3,0±1% pada 2021. Selain itu, defisit transaksi berjalan tetap berada dalam level yang sehat di bawah 2,5% PDB.

Tantangan Perekonomian ke Depan

Prospek ekonomi Indonesia tersebut tetap perlu dikelola dengan baik karena beberapa risiko jangka pendek dan jangka menengah dari global dan domestik masih dapat mengemuka. Berbagai risiko tersebut bisa kembali

menganggu prospek perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi tidak sesuai perkiraan, namun juga bisa memberikan tekanan kepada stabilitas perekonomian seperti kenaikan inflasi dan tekanan depresiatif terhadap nilai tukar rupiah. Stabilitas yang terganggu bila terus berlanjut akan memberikan tekanan balik kepada pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah panjang.

Risiko pertama dari global pada 2017 terkait dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global yang dapat kembali tidak sekuat harapan. Harga komoditas juga dapat tidak setinggi perkiraan. Pertumbuhan ekonomi global bisa kembali lebih rendah dari perkiraan jika proses konsolidasi ekonomi di negara besar belum selesai. Bila kondisi tersebut kembali mengemuka pada 2017 maka dapat membuat prospek harga komoditas menjadi tidak setinggi perkiraan dan akhirnya kembali menurunkan kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017.

Risiko kedua berhubungan dengan kebijakan perdagangan internasional di negara maju yang cenderung menjadi lebih protektif dan diikuti kebijakan politik yang populis. Risiko kedua tersebut memiliki berbagai dampak lanjutan. Pada tahap awal, arah kebijakan berpeluang menurunkan volume perdagangan dunia. Risiko kemudian dapat melebar kepada penurunan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas. Isu proteksionisme perdagangan dan kebijakan populis selanjutnya bisa juga meluas kepada peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Risiko ketiga dari global berhubungan dengan arah kebijakan makroekonomi AS yang dapat meningkatkan risiko pembalikan modal AS dan ketidakpastian pasar keuangan dunia. Arah kebijakan makroekonomi AS berkaitan dengan rencana kebijakan fiskal yang ekspansif. Kondisi tersebut bila terjadi dapat meningkatkan imbal hasil surat utang pemerintah AS yang kemudian berisiko memicu pembalikan modal dari negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Risiko pembalikan modal semakin kuat bila bank sentral AS, The Fed, menaikkan FFR lebih agresif dari perkiraan pasar. Berbagai kondisi yang bisa memicu risiko pembalikan modal dan ditambah dengan risiko geopolitik di banyak negara pada akhirnya rentan meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global, termasuk naiknya tekanan depresiasi mata uang di dunia termasuk rupiah.

Risiko terakhir berkaitan dengan inflasi global yang kembali meningkat bila harga komoditas dunia, termasuk harga energi, terus naik. Risiko ini bila berlanjut dapat meningkatkan tekanan inflasi domestik. Selain itu, kenaikan inflasi global dapat mengubah *stance* kebijakan moneter dunia yang saat ini dalam arah longgar menjadi ke arah netral atau ketat. Perubahan respons kebijakan moneter perlu menjadi perhatian karena memengaruhi arus modal dunia dan meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan, termasuk memberikan tekanan kepada mata uang negara berkembang.

Berbagai risiko perekonomian global memberikan tantangan bagi perekonomian Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan serta memperkuat pertumbuhan ekonomi. Tantangan perekonomian tersebut semakin perlu mendapat perhatian kerena beberapa aspek domestik jangka pendek yang saling berhubungan juga menjadi kunci percepatan pemulihan ekonomi. Pertama berkaitan dengan kemampuan meningkatkan penerimaan pajak sebagai basis untuk memperluas ruang stimulus fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua berhubungan dengan kecepatan penyelesaian proses konsolidasi korporasi dan perbankan yang diantaranya juga dipengaruhi kemampuan stimulus fiskal. Ketiga tentang upaya memperkuat kembali efektivitas transmisi kebijakan moneter yang sebelumnya tersendat akibat konsolidasi perbankan dan korporasi. Terakhir ialah mengenai optimalisasi strategi mengendalikan tekanan inflasi yang berisiko meningkat di atas perkiraan. Risiko kenaikan inflasi terutama bersumber dari kemungkinan kenaikan harga energi. Hal ini cukup penting karena kenaikan harga energi global dapat berdampak kepada kenaikan harga kelompok *administered* strategis dan harga lain.

Dalam jangka menengah panjang, tantangan perekonomian terkait dengan upaya memperkuat struktur perekonomian sehingga lebih berdaya tahan. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat perekonomian agar semakin berdaya saing guna mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi sekaligus menghindarkan Indonesia dari jebakan kelompok ekonomi berpendapatan menengah *(middle income trap)*. Tantangan perekonomian jangka menengah antara lain berkaitan dengan upaya memperbaiki komposisi produk ekspor menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi, memperkuat peran sektor industri, mendorong persaingan pasar dan tata niaga yang lebih sehat, dan penguatan struktur pembiayaan domestik.

Arah Kebijakan 2017

Arah kebijakan makroekonomi pada 2017 difokuskan kepada upaya memelihara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna menjaga berlanjutnya pemulihan ekonomi. Arah kebijakan ditempuh mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian jangka pendek dan menghambat proses pemulihan ekonomi ke depan. Upaya menjaga

stabilitas mekroekonomi cukup penting karena pengalaman empiris, termasuk pengalaman pada 2016, menunjukkan stabilitas perekonomian menjadi pijakan bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat bersamaan, upaya menjaga keberlanjutan kenaikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek serta upaya memperkuat struktur perekonomian dalam jangka menengah juga terus ditempuh.

Sebagaimana pada 2016, arah kebijakan akan diimplementasikan melalui sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK. Sinergi kebijakan yang diimplementasikan melalui bauran kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan mikroprudensial, dan kebijakan struktural termasuk kebijakan SP-PUR. Sinergi kebijakan tidak hanya ditujukan untuk memitigasi risiko siklikal jangka pendek guna tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sinergi kebijakan juga diarahkan untuk terus memperkuat struktur perekonomian sehingga semakin berdaya tahan dan berdaya saing.

Searah dengan fokus kebijakan makroekonomi, Bank Indonesia pada 2017 tetap konsisten menjaga stabilitas perekonomian. Dalam konteks ini, Bank Indonesia akan menempuh bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran-pengelolaan uang rupiah (SP-PUR). Kebijakan moneter difokuskan untuk memelihara stabilitas makroekonomi dan disinergikan dengan kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dalam perekonomian sehingga dapat mendukung berjalannya transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial.

Dari kebijakan moneter, Bank Indonesia secara konsisten akan menempuh kebijakan untuk mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasaran dan menjaga defisit transaksi berjalan di tingkat yang sehat. Konsisten dengan arah kebijakan moneter ini, BI7DRR diarahkan untuk menjaga inflasi sesuai dengan sasaran. *Stance* kebijakan moneter ditopang kebijakan nilai tukar yang ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar bergerak sesuai dengan nilai fundamentalnya. Kebijakan nilai tukar juga didukung pengelolaan permintaan dan penawaran valas domestik, serta pendalaman pasar valas. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, Bank Indonesia juga melakukan kerjasama bilateral, khususnya dengan negara kawasan yang setelmennya menggunakan mata uang domestik *(local currency settlement)*.

Arah kebijakan moneter juga diperkuat strategi operasional kebijakan moneter. Pertama, Bank Indonesia akan mengimplementasikan sistem Giro Wajib Minimum (GWM) *Averaging* pada pertengahan 2017. Kebijakan GWM *Averaging* ditujukan untuk memberikan fleksibilitas bagi bank dalam mengelola likuiditas secara lebih efisien yang pada akhirnya bisa memperkuat transmisi kebijakan moneter. Kedua, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen operasi moneter menggantikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara bertahap. Strategi ini ditujukan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan dan juga sebagai implementasi amanat UU Bank Indonesia dan UU Perbendaharaan Negara. Ketiga, Bank Indonesia akan kembali menerapkan mekanisme lelang *Variable Rate Tender* dalam pelaksanaan operasi moneter menggantikan sistem *Fixed Rate Tender*.

Dari kebijakan makroprudensial, kebijakan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sambil tetap memberi ruang bagi upaya pemulihan ekonomi. Dalam kaitan ini, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memitigasi akumulasi risiko yang muncul dari perilaku prosiklikalitas dan risiko sistemik dalam sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial bisa berperan sebagai instrumen kontrasiklikal untuk mendorong pemulihan ekonomi. Dalam kaitan dengan upaya untuk memitigasi risiko sistemik, Bank Indonesia memperkuat dan memperluas cakupan surveilans makroprudensial terhadap rumah tangga, korporasi dan grup korporasi nonkeuangan. Perluasan tersebut sejalan dengan hasil asesmen yang menunjukkan adanya potensi risiko di sistem keuangan, khususnya perbankan, sebagai dampak dari penurunan kinerja korporasi. Kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan juga diperkuat melalui koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendeteksi sejak dini risiko tekanan secara terintegrasi.

Bank Indonesia juga menempuh sejumlah inisiatif guna mengakselerasi pendalaman pasar keuangan untuk mendukung stabilitas sekaligus ketahanan sistem keuangan. Dalam arah kebijakan ini, Bank Indonesia akan terus melakukan pengembangan pasar keuangan melalui pendekatan ekosistem. Pengembangan tersebut dilakukan melalui tujuh pilar yang mencakup instrumen, pengguna/penyedia dana, lembaga perantara, infrastruktur, kerangka pengaturan, *benchmark rate* dan koordinasi/edukasi. Untuk mendukung inisiatif tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait dalam mempercepat pendalaman pasar keuangan, termasuk melalui beberapa forum seperti Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC), dan Association Cambiste Internationale (ACI).

Bank Indonesia juga mendukung akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pelengkap keuangan konvensional. Untuk itu, Bank Indonesia akan menyusun dan meluncurkan cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang mencakup sisi komersial dan sisi sosial keuangan syariah *(Islamic social finance)*. Di sisi pendalaman pasar keuangan syariah, Bank Indonesia akan mendorong instrumen pasar uang syariah dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai *underlying* transaksi dan implementasi *Waqaf Linked Sukuk*. Sementara di sisi keuangan sosial syariah, Bank Indonesia akan mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan peran zakat dan waqaf, serta melanjutkan inisiasi pendirian lembaga standarisasi regulasi dan perumusan kebijakan dalam tataran internasional.

Bank Indonesia turut memberikan perhatian kepada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam upaya pengendalian harga, khususnya *volatile food*, Bank Indonesia akan mendorong perluasan dan pengembangan klaster pengendalian inflasi berbasis UMKM dengan pendekatan hilirisasi. Klaster pengendalian inflasi ini juga menjadi salah satu instrumen Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Selain itu, Bank Indonesia akan melanjutkan program perluasan dan pendalaman infrastruktur kredit UMKM guna mengurangi kendala *assymmetric information* yang disebabkan kesenjangan antara kapasitas UMKM dan kapasitas pembiayaan Perbankan.

Dari kebijakan sistem pembayaran, kebijakan difokuskan kepada penguatan kelembagaan dan infrastruktur, serta mendorong inklusi keuangan. Arah kebijakan sistem pembayaran ditujukan untuk melalui meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi sehingga berkontribusi pada upaya memperkuat struktur perekonomian. Dalam arah kebijakan ini, inisisatif kebijakan meliputi empat aspek utama. Pertama, melakukan implementasi aturan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), termasuk pelaku teknologi finansial (*Fintech*). Kedua, mengoptimalkan peran kantor Teknologi Finansial *(Fintech Office)* dan fungsi *regulatory sandbox* untuk mendorong perkembangan *fintech* secara sehat. Ketiga, mempercepat pembentukan lembaga yang akan mengoperasikan fungsi-fungsi pengelolaan *National Standard of Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS). Keempat, mengakselerasi *National Payment Gateway* (NPG) dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi keuangan di domestik. Di sisi pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia akan terus mendorong *clean money policy* hingga ke wilayah terpencil dan terluar melalui *masterplan Centralized Cash Network Plan (CCNP)*. Sementara untuk mendorong inklusi keuangan, Bank Indonesia akan terus memperluas akses keuangan dan meningkatkan efisiensi dengan mengintegrasikan ekosistem nontunai elektronik dalam program bantuan dan layanan Pemerintah.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2017 juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan. Sinergi kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pemulihan ekonomi. Sinergi kebijakan termasuk koordinasi dengan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi sesuai target.

Bank Indonesia juga terus mendukung berbagai upaya Pemerintah untuk memperkuat prospek kesinambungan fiskal yang diyakini mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan. Terkait hal tersebut, upaya untuk memperkuat struktur penerimaan pajak dan upaya meningkatkan kualitas belanja negara perlu menjadi prioritas karena akan memperkuat ketahanan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Selain itu, Bank Indonesia juga mendukung berbagai upaya Pemerintah untuk mempercepat dan menajamkan berbagai kebijakan struktural yang diyakini juga akan berkontribusi signifikan dalam mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi ke depan. Terkait hal tersebut beberapa prioritas kebijakan perlu ditempuh dengan menyeimbangkan ketersediaan sumber daya. Prioritas kebijakan yang ditempuh antara lain kebijakan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi dan pangan, serta ketersediaan air; kebijakan industrialisasi di berbagai sektor, termasuk industri maritim; kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik; serta kebijakan penguatan sektor keuangan.

Khusus pembangunanan infrastruktur nonfisik untuk mendukung penguatan struktur perekonomian, beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian ialah tentang komitmen untuk terus memperkuat berbagai modal dasar pembangunan. Modal dasar tersebut mencakup modal manusia, inovasi dan teknologi, serta kelembagaan yang kuat. Aspek modal manusia serta inovasi dan teknologi menjadi modal penting dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi. Dari aspek kelembagaan, komitmen pemberantasan korupsi dan memperkuat kepastian hukum di Indonesia perlu terus diperkuat. Selain itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha juga perlu diteruskan, termasuk meneruskan berbagai kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang telah ditempuh Pemerintah dewasa ini.

Boks Akuntabilitas Pencapaian Inflasi 2016

Inflasi IHK tahun 2016 terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi (4,0±1%). Inflasi 2016 tercatat cukup rendah sebesar 3,02%, terendah sejak tahun 2010. Dengan pencapaian tersebut, inflasi IHK kembali berada dalam rentang sasaran inflasi sebagaimana juga capaian pada 2015 (Grafik 1). Inflasi IHK yang rendah ditopang seluruh komponen yakni terkendalinya inflasi inti, minimalnya inflasi *administered prices* (AP), dan cukup terjaganya inflasi *volatile food* (VF)

Inflasi inti tercatat cukup rendah yakni sebesar 3,07%, menurun dari tahun 2015 yang sebesar 3,95%. Perkembangan ini berkontribusi pada inflasi IHK 2016 sebesar 1,91% (Grafik 2). Inflasi inti yang rendah dipengaruhi beberapa faktor yaitu permintaan agregat yang terkelola baik, tekanan eksternal yang minimal, termasuk nilai tukar yang menguat, dan ekspektasi inflasi yang menurun. Inflasi inti yang rendah juga dipengaruhi dampak lanjutan inflasi AP dan inflasi VF ke inflasi inti yang minimal.

Inflasi inti yang rendah tidak terlepas dari kontribusi positif berbagai kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga agar inflasi sesuai dengan sasaran. Kebijakan ditempuh melalui kebijakan moneter yang tetap konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan moneter tersebut juga termasuk mengarahkan agar nilai tukar rupiah bergerak stabil sesuai dengan nilai fundamental. Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah guna memperkuat keyakinan masyarakat bahwa inflasi ke depan akan terkendali sesuai sasaran (Diagram 1).

Grafik 2. Dekomposisi Sumbangan Inflasi IHK 2012-2016

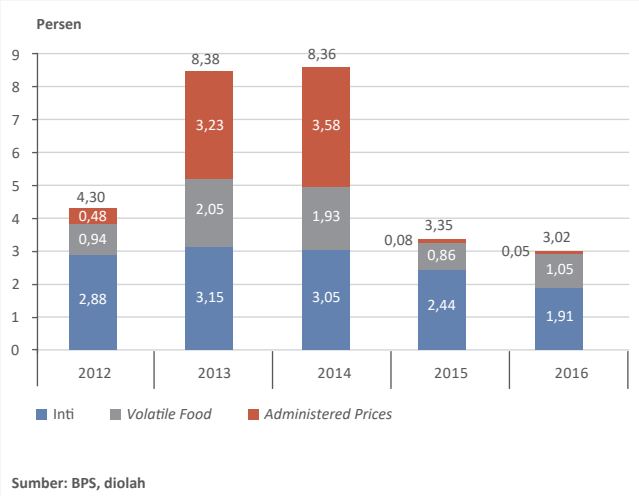

Sumber: BPS, diolah

Inflasi kelompok AP pada 2016 juga tercatat rendah yakni 0,21%, menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,39%. Capaian positif tersebut terutama dipengaruhi dampak lanjutan harga minyak dunia yang rendah dan rupiah yang menguat. Kedua perkembangan positif tersebut kemudian membuka ruang bagi pemerintah untuk menurunkan berbagai harga komoditas strategis. Pada paruh pertama 2016, Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan diikuti penurunan tarif angkutan umum, serta batas atas dan batas bawah tarif angkutan udara. Harga bahan bakar khusus nonsubsidi dan harga LPG tabung 12 kg juga diturunkan. Inflasi AP yang rendah turut dipengaruhi

Grafik 1. Realisasi dan Sasaran Inflasi IHK

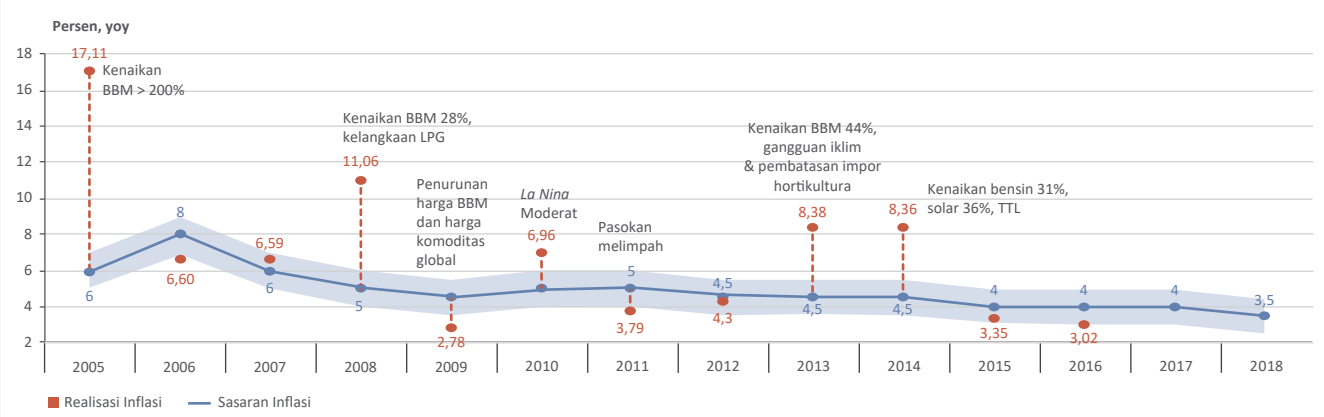

Sumber: BPS, Bank Indonesia

Diagram 1. Inflasi 2016 dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi

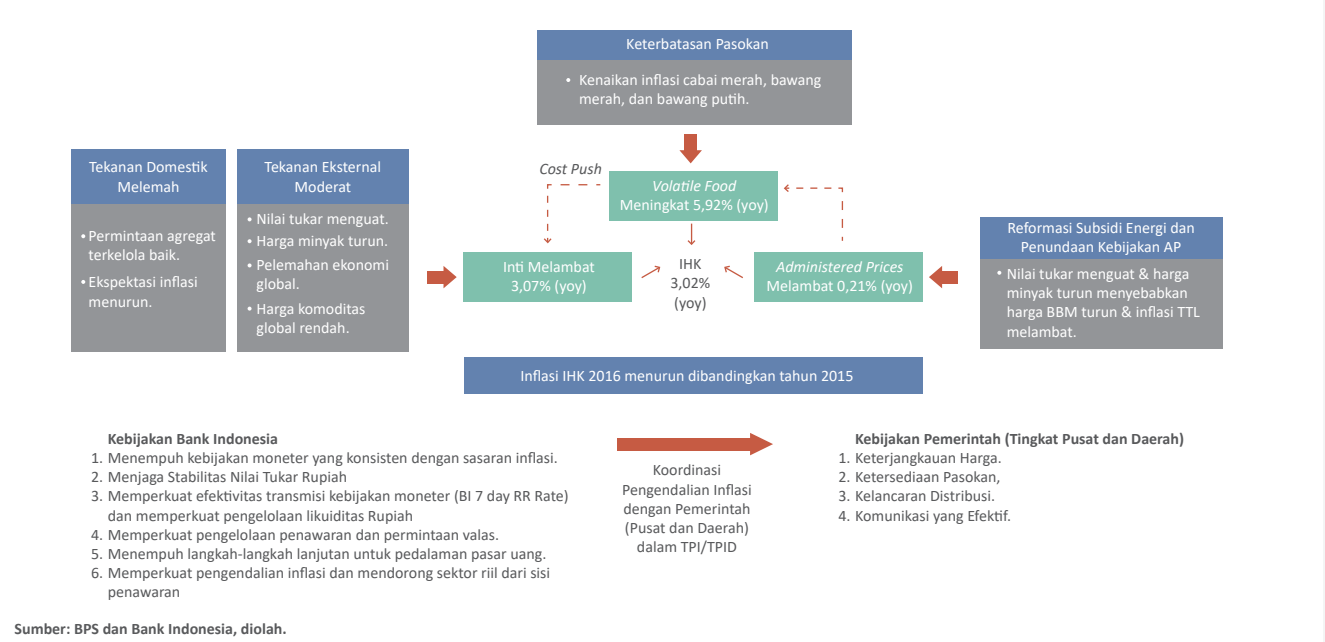

Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah.

penundaan implementasi kebijakan subsidi tepat sasaran untuk pelanggan listrik daya 900 VA dan kenaikan harga LPG tabung 3 kg.

Inflasi VF pada 2016 tetap terkendali, meskipun sedikit meningkat dari kondisi tahun sebelumnya. Kelompok VF tercatat mengalami inflasi sebesar 5,92%, sedikit lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun sebelumnya sebesar 4,84%. Meskipun meningkat, realisasi inflasi VF pada 2016 masih lebih rendah dibandingkan dengan pola historis 2005-2016 yang rata-rata dalam kisaran 6%-8%.[1]

Komoditas utama yang menyumbang kenaikan inflasi VF pada 2016 ialah komoditas cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Kenaikan harga tiga komoditas tersebut dipicu permasalahan pasokan akibat curah hujan yang tinggi dan serangan virus di sejumlah sentra produksi, sedangkan instrumen stabilisasi harga masih terbatas. Kenaikan inflasi VF lebih lanjut dapat tertahan oleh perbaikan harga komoditas lain khususnya beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi. Selain itu, upaya pemerintah yang cukup intensif dalam memperkuat pasokan pangan juga menahan tekanan kenaikan inflasi VF lebih lanjut.

Pemerintah menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga kecukupan pasokan pangan untuk mendukung pengendalian inflasi VF. Kebijakan yang ditempuh antara lain kebijakan untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri dan *carry over* impor beras tahun 2015. Kebijakan tersebut membuat pasokan beras sangat memadai. Cadangan Beras Pemerintah meningkat 25% pada 2016 sehingga mendukung pelaksanaan Operasi Pasar. Selain itu, pasokan daging sapi juga cukup terjaga sepanjang tahun 2016 didukung pasokan dari dalam negeri dan pasokan luar negeri oleh Bulog. Peran Bulog yang cukup strategis dalam pengendalian harga pangan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang menugaskan Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen. Di samping itu, Pemerintah juga menempuh beberapa kebijakan yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan distribusi dan aksesibilitas pangan antara lain melalui program Gerai Maritim dan Rumah Pangan Kita (RPK).

Pencapaian sasaran inflasi pada 2016 juga didukung koordinasi yang semakin solid antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Koordinasi terutama dilakukan melalui forum TPI dan TPID. Pada tahun 2016, TPI dan TPID melanjutkan program yang berfokus pada peningkatan produksi, perbaikan struktur pasar, perbaikan distribusi, penguatan regulasi, dan pengelolaan ekspektasi dan edukasi inflasi. Hasil koordinasi yang baik antara lain tercermin pada inflasi pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional 2016 yang lebih baik dibandingkan dengan pola historisnya. Upaya stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah

1 Rata-rata inflasi tahunan akhir tahun kelompok VF pada tahun 2005-20016 (kecuali tahun kenaikan BBM 2005, 2006, 2008, 2013-2015) adalah 7,69%.

berbasis komoditi utama inflasi, seperti operasi pasar cabai dan daging sapi. TPID juga mendorong kerja sama antar daerah seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dalam rangka pengendalian pasokan beras dan daging sapi. Selain itu, kegiatan TPID juga berfokus pada peningkatan produksi cabai, budidaya pembibitan masal bawang putih, pengaturan pola tanam cabai, optimalisasi sistem resi gudang, pemberian bantuan biaya ongkos angkutan barang, dan pengembangan akses informasi harga pangan.

BAGIAN I PEREKONOMIAN GLOBAL

Keterangan gambar:
Seperti pengolahan logam dalam bara, respons kebijakan yang tepat dapat membuat ekonomi Indonesia tetap lentur dan berdaya tahan di tengah perkembangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

INFOGRAFIS BAGIAN I

PEREKONOMIAN GLOBAL

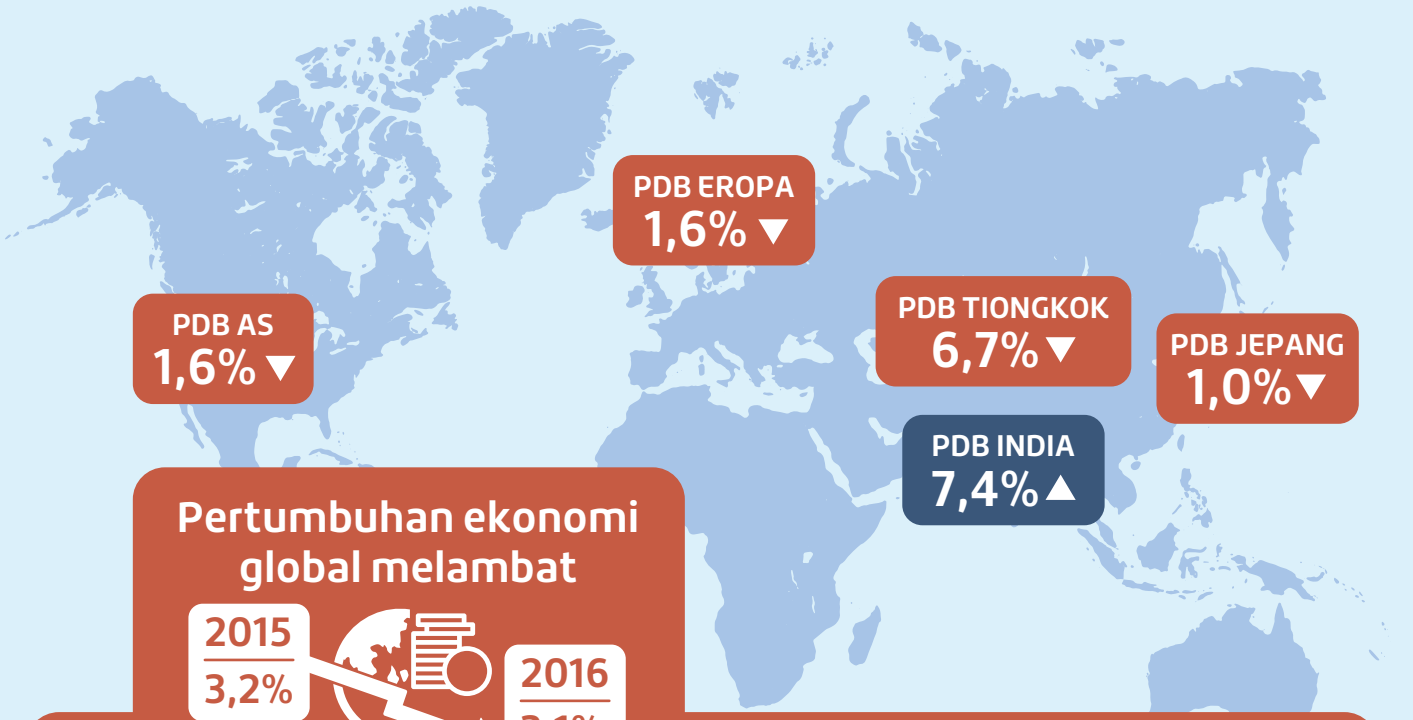

Pertumbuhan ekonomi global melambat

2015 3,2% → 2016 3,1%

HARGA KOMODITAS GLOBAL MASIH LEMAH

Sawit | Kopi | Minyak | Batubara

KETIDAKPASTIAN PASAR KEUANGAN GLOBAL MASIH TINGGI

Transisi politik di beberapa negara utama: *Brexit*, *Trump Effect*

Kenaikan FFR

INFLASI GLOBAL MASIH RENDAH

RESPONS KEBIJAKAN

NEGARA MAJU

- KEBIJAKAN MONETER EKSPANSIF, KECUALI AS
- STIMULUS FISKAL TERBATAS
- IMPLEMENTASI REFORMASI STRUKTURAL
- PENGUATAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NEGARA BERKEMBANG

- KEBIJAKAN MONETER AKOMODATIF
- OPTIMALISASI STIMULUS FISKAL
- IMPLEMENTASI REFORMASI STRUKTURAL

BAGIAN I
Perekonomian Global

Perekonomian global pada 2016 masih menghadapi sejumlah risiko yang telah mengemuka pada 2015. Tiga risiko utama kembali terlihat pada 2016, yakni pertumbuhan ekonomi yang menurun, harga komoditas yang masih rendah, dan ketidakpastian di pasar keuangan yang masih tinggi. Permasalahan menjadi semakin kompleks akibat ketidakpastian geopolitik di beberapa negara. Berbagai perkembangan yang kemudian berimbas pada proses pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi global pada 2016 masih belum kuat dan tidak merata. Pertumbuhan ekonomi dunia 2016 tercatat sebesar 3,1%, sedikit lebih rendah dari capaian pada 2015 sebesar 3,2%. Perkembangan tersebut juga lebih rendah dari perkiraan awal tahun sebesar 3,4%. Berdasarkan kelompok negara, pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat terutama dipengaruhi ekonomi negara maju yang masih lemah yang bertumbuh 1,6%, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2015 sebesar 2,1%. Kinerja negara maju yang lemah dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan ekonomi di AS, Eropa, dan Jepang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang sedikit meningkat dari 4,0% pada 2015 menjadi 4,1%. Perkembangan positif di negara berkembang terutama ditopang beberapa negara di Asia seperti India dan Indonesia yang mencatat kenaikan pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun dari 6,9% menjadi 6,7%.

Beberapa faktor memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat. Di AS, pertumbuhan ekonomi yang menurun disebabkan oleh investasi residensial dan investasi nonresidensial yang masih lemah akibat kinerja sektor minyak dan pertambangan yang masih turun. Di Eropa, investasi juga melambat terutama pascareferendum *Brexit* pada akhir Juni 2016 yang kemudian memicu ketidakpastian dan menahan minat pemilik modal untuk berinvestasi. Di Jepang, pelemahan ekonomi dipengaruhi penurunan di hampir seluruh komponen PDB yakni konsumsi, investasi, dan ekspor. Sementara itu, pelemahan ekonomi Tiongkok banyak dipengaruhi oleh strategi *economic rebalancing* yang ditempuh Pemerintah Tiongkok dalam merespons perekonomian global yang belum kuat.

Dampak pengaruh pertumbuhan ekonomi dunia yang belum solid melebar karena banyak negara merespons pelemahan ekonomi dunia dengan strategi pertumbuhan ekonomi berorientasi domestik. Strategi tersebut membuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia melemah. Hubungan keduanya semakin turun karena saat bersamaan *global value chain* juga terindikasi berkurang. Akibatnya, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap volume perdagangan dunia menurun dari 0,6 pada 2015 menjadi hanya 0,3 pada 2016. Perkembangan tersebut pada gilirannya semakin menekan kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi banyak negara.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat berdampak kepada harga komoditas global yang masih rendah sampai dengan triwulan III 2016. Dari komoditas energi, rata-rata harga minyak dunia sampai dengan triwulan III 2016 masih dalam kisaran 28,7 dolar AS hingga 41,3 dolar AS per barel, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada 2015 sebesar 48,7 dolar AS per barel. Satu sisi, perkembangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh permintaan yang belum kuat sejalan dengan perekonomian dunia yang masih lemah. Di sisi lain, harga minyak dunia yang rendah juga dipengaruhi peningkatan pasokan minyak di pasar dunia akibat respons OPEC yang meningkatkan produksi. Harga minyak dunia baru meningkat pada triwulan IV 2016 hingga rata-rata mencapai 46,5 dolar AS per barel. Harga minyak dunia naik cukup tinggi pada triwulan IV 2016 dipengaruhi oleh permintaan dari negara berkembang, seperti Tiongkok dan India yang mulai meningkat. Selain itu, kenaikan harga juga dipengaruhi oleh produksi minyak dunia yang berkurang terutama pascakomitmen penurunan produksi oleh OPEC.

Sejalan dengan kondisi tersebut, harga komoditas nonmigas global, termasuk harga komoditas ekspor Indonesia seperti batubara, kelapa sawit, dan tembaga, juga masih rendah sampai dengan awal triwulan III 2016. Perkembangan harga komoditas yang rendah terutama dipengaruhi oleh permintaan dunia yang belum kuat. Selanjutnya, perkembangan harga komoditas nonmigas menunjukkan peningkatan tajam pada triwulan IV 2016. Kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh permintaan yang

mulai meningkat, terutama dari Tiongkok, serta gangguan produksi di komoditas timah dan kelapa sawit.

Harga komoditas yang masih rendah dan permintaan dunia yang belum kuat berkontribusi kepada inflasi dunia yang masih rendah. Sampai dengan triwulan III 2016, inflasi dunia tercatat sangat rendah di beberapa negara dipengaruhi harga energi yang masih rendah dan permintaan agregat yang belum kuat, seperti di Jepang dan Eropa. Namun, sejak triwulan IV 2016 inflasi dunia mulai meningkat dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas dan permintaan agregat dunia yang mulai naik. Dengan dinamika tersebut, inflasi dunia pada 2016 mencapai 3,2%, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan inflasi pada 2015 sebesar 2,9%. Peningkatan inflasi tercatat lebih besar terjadi di negara maju dibandingkan dengan inflasi di negara berkembang. Inflasi negara maju naik dari 0,5% pada 2015 menjadi 1,2%, sedangkan inflasi negara berkembang stabil sebesar 4,7%.

Perekonomian dunia yang belum solid mendorong peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global terindikasi dari indeks VIX yang naik, terutama pada triwulan I 2016 dan triwulan IV 2016. Ketidakpastian di pasar keuangan global juga meningkat dipengaruhi rencana kenaikan Fed Funds Rate (FFR) oleh bank sentral AS. Ketidakpastian kemudian memicu perubahan pola aliran modal di pasar keuangan global. Hal ini kemudian mendorong penguatan dolar dan memberikan tekanan kepada mata uang banyak negara, termasuk Indonesia. Perkembangan tersebut tergambar dari rata-rata indeks DXY yang meningkat pada triwulan I dan triwulan IV 2016 sejalan dengan penguatan dolar AS.

Ketidakpastian pasar keuangan dunia yang tinggi juga didorong transisi politik di beberapa negara utama dunia. Pada akhir semester I 2016, hasil referendum Inggris yang memutuskan keluar dari Uni Eropa *(Brexit)*, sempat memicu ketidakpastian karena berbeda dengan ekspektasi pelaku pasar. Ketidakpastian kembali naik saat pasar menyikapi hasil pemilihan presiden AS. Pelaku pasar membaca berbagai rencana arah kebijakan Presiden AS terpilih Donald Trump rentan mengganggu proses pemulihan ekonomi global. Rencana arah kebijakan AS tersebut antara lain kebijakan fiskal yang lebih ekspansif di tengah beban utang pemerintah yang besar, rencana kebijakan perdagangan internasional yang lebih protektif, dan beberapa kebijakan di bidang imigrasi.

Kebijakan makroekonomi yang ekspansif dan ditopang dengan penguatan kebijakan struktural ditempuh banyak negara dalam merespons dinamika perekonomian dunia 2016. Berbagai bank sentral negara maju menempuh kebijakan moneter ekspansif, kecuali AS yang menaikkan suku bunga FFR sebanyak satu kali. Bank of Japan menempuh kebijakan suku bunga negatif, sama seperti Bank Sentral Eropa yang juga menempuh pelonggaran kebijakan moneter. Bank Sentral Tiongkok juga melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan Giro Wajib Minimum guna menjaga likuiditas yang berkurang saat terjadi pembalikan modal. Pemerintah Tiongkok juga menempuh kebijakan reformasi struktural seperti di sektor produksi yang membatasi peningkatan kapasitas produksi untuk industri baja, batubara, dan alumunium. Sementara di India, bank sentral juga menurunkan suku bunga kebijakan yang disinergikan dengan kebijakan reformasi struktural Pemerintah untuk memperkuat kemudahan berinvestasi.

Kebijakan makroekonomi di banyak negara juga didukung berbagai kerja sama internasional. Agenda utama kerja sama internasional adalah mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dunia serta meningkatkan resiliensi ekonomi dan sistem keuangan global. Beberapa kerja sama tersebut, seperti yang dilakukan forum G20 dan EMEAP. Bank Dunia seperti halnya International Monetary Fund (IMF) juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui berbagai inisiatif investasi infrastruktur dalam forum G20. Untuk kawasan regional, penguatan resiliensi kawasan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas surveilans ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).

BAB 1
Dinamika Perekonomian Global

Perekonomian global tahun 2016 masih diwarnai sejumlah risiko yang telah mengemuka pada 2015. Risiko dipicu pertumbuhan ekonomi global dan volume perdagangan yang menurun. Pertumbuhan ekonomi global yang turun kemudian berdampak pada harga komoditas, baik energi maupun non-energi, yang masih di level rendah sampai triwulan III 2016. Perkembangan ekonomi global yang tidak sesuai harapan pada gilirannya mendorong ketidakpastian di pasar keuangan tetap tinggi. Ketidakpastiaan di pasar keuangan sempat meningkat, saat perkembangan geopolitik di sejumlah negara tidak sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar seperti hasil referendum *Brexit* dan hasil Pemilu AS.

Keterangan gambar:
Perekonomian global ibarat perputaran bumi yang mengandung sisi gelap dan sisi terang. Pada 2016, sisi gelap mendominasi perekonomian global dalam bentuk perlambatan ekonomi dan ketidakpastian di pasar keuangan yang kemudian berdampak negatif pada kinerja ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Perekonomian global pada 2016 masih belum sesuai harapan dan diwarnai sejumlah risiko yang sudah mengemuka pada 2015. Tiga risiko utama yang kembali terlihat pada 2016 yaitu pertumbuhan ekonomi global yang menurun, harga komoditas yang masih di level rendah, dan ketidakpastian di pasar keuangan yang tinggi. Ketidakpastiaan di pasar keuangan semakin tinggi, saat perkembangan geopolitik di sejumlah negara berbeda dengan ekspektasi pelaku pasar seperti hasil *Brexit* dan Pemilu AS. Berbagai faktor tersebut saling terkait, yang pada gilirannya berdampak pada pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat.

Data terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi global pada 2016 tercatat lebih lambat dari capaian 2015. Ekonomi dunia pada 2016 tumbuh sebesar 3,1%, lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 3,2%. Angka ini bahkan di bawah perkiraan pada awal tahun 2016 sebesar 3,4%. Ekonomi global yang belum kuat dipengaruhi perekonomian negara maju yang masih lemah sedangkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang tetap solid. Dampak pertumbuhan ekonomi global yang turun semakin luas karena pertumbuhan ekonomi global yang melambat direspons banyak negara dengan menggeser strategi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berorientasi domestik. Strategi tersebut kemudian menyebabkan elastisitas antara pertumbuhan ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia semakin kecil (lihat Boks 1.1). Kompleksitas ini pada akhirnya mengakibatkan pertumbuhan volume perdagangan dunia kembali dalam tren menurun sejak tahun 2010 (Grafik 1.1).

Pertumbuhan ekonomi global yang turun berdampak pada pelemahan harga komoditas hingga triwulan III 2016, baik komoditas energi maupun non-energi. Dari komoditas energi, harga minyak dunia masih rendah, dengan level terendah tercatat pada Januari 2016. Harga minyak jenis Minas sampai dengan triwulan III 2016 rata-rata mencapai 38,8 dolar AS per barel dan baru kembali naik pada triwulan IV 2016 menjadi 47,6 dolar AS per barel. Dari komoditas non-energi, berbagai harga komoditas juga tetap rendah, termasuk harga komoditas ekspor Indonesia seperti batubara, kelapa sawit, dan tembaga. Pada paruh kedua 2016 harga minyak dan komoditas non-energi secara bertahap mulai naik, dengan peningkatan cukup besar terutama terjadi pada triwulan terakhir. Peningkatan harga komoditas non-energi terutama didorong penguatan ekonomi negara-negara berkembang dan dampak gangguan sisi pasokan.

Peningkatan harga minyak dan komoditas terindikasi mulai meningkatkan tekanan inflasi, meskipun masih dalam kisaran rendah. Inflasi dunia pada tahun 2016 mencapai 3,2%, meningkat dibandingkan dengan inflasi pada 2015 sebesar 2,9% (Grafik 1.2). Peningkatan tekanan inflasi terutama terjadi pada paruh kedua 2016, dipengaruhi kenaikan harga minyak dan harga komoditas non-energi, serta mulai membaiknya permintaan global. Perkembangan ini berbeda dengan kondisi paruh pertama 2016 dimana inflasi sempat tercatat sangat rendah di beberapa negara maju seperti Eropa dan Jepang.

Pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat dan dibarengi dengan transisi politik di beberapa negara berdampak pada masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Transisi politik cukup kuat memengaruhi ketidakpastian pasar keuangan pada paruh kedua 2016, terutama pascareferendum *Brexit* dan Pemilu AS. Ketidakpastian meningkat dipicu hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Ketidakpastian juga sempat muncul pada triwulan I 2016 akibat sentimen pelemahan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian peningkatan FFR AS.

Grafik 1.1. Volume Perdagangan Dunia dan PDB Dunia

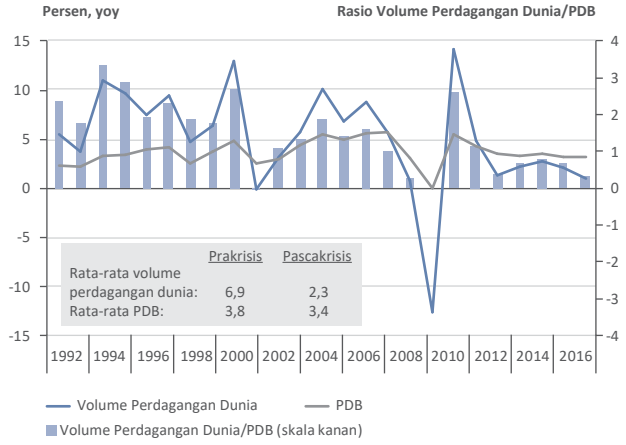

Sumber: CPB, WEO-IMF, diolah

Grafik 1.2. Inflasi Global

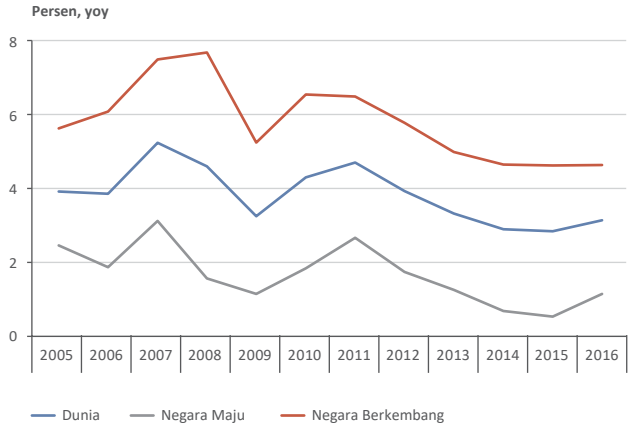

Sumber: WEO-IMF

1.1. PEREKONOMIAN NEGARA MAJU

Perkembangan ekonomi negara maju ditandai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan tekanan inflasi yang meningkat. Ekonomi negara maju tumbuh sebesar 1,6% pada 2016, melambat dibandingkan dengan capaian pada 2015 sebesar 2,1% (Tabel 1.1). Perlambatan terutama dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi di AS, Eropa dan Jepang. Sementara itu, inflasi negara maju mencapai 1,2% pada 2016, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2015 sebesar 0,5%. Peningkatan inflasi negara maju terutama didorong kenaikan harga minyak dan harga komoditas global non-energi pada paruh kedua 2016 (Grafik 1.3). Meskipun meningkat, inflasi di beberapa negara maju tersebut masih berada di bawah target masing-masing bank sentral. Bahkan, perkembangan harga di Eropa dan Jepang sempat mencatat deflasi pada semester pertama 2016.

Berdasarkan negara, perekonomian AS pada 2016 tumbuh melambat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, meskipun dinamika triwulanan mengindikasikan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi AS tercatat 1,6% pada 2016, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 2,6% dan juga perkiraan awal sebesar 2,4%. Perkembangan ini dipengaruhi pemulihan ekonomi yang tidak sesuai harapan karena pada semester II 2016 investasi baik residensial maupun nonresidensial masih lemah. Kinerja yang menurun pada investasi nonresidensial dipengaruhi pelambatan investasi sektor minyak dan sektor pertambangan akibat harga minyak dan komoditas yang masih lemah sejak tahun 2014 (Grafik 1.4). Sementara itu, investasi residensial pada 2016 melambat karena pada 2015 investor telah melakukan pembelian properti cukup besar guna mengantisipasi kenaikkan FFR yang dimulai sejak akhir 2015 (Grafik 1.5).

Sejalan dengan dinamika triwulanan pada PDB, sektor tenaga kerja AS selama tahun 2016 juga dalam tren membaik dan mulai mendekati kondisi *full employment*. Sejak semester II 2016, pemulihan sektor tenaga kerja AS semakin solid dengan level pengangguran pada akhir 2016 tercatat 4,7%, atau sudah lebih rendah dari level *Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment* (NAIRU) yang ditetapkan oleh The Fed sebesar 4,9%. Namun, dampak penurunan pengangguran kepada akselerasi upah riil terindikasi tidak optimal tercermin pada rata-rata pendapatan per jam yang stagnan (Grafik 1.6). Hal ini dipengaruhi kondisi masih tingginya komposisi tenaga kerja paruh waktu yang memiliki level pendapatan masih rendah. Pendapatan rata-rata riil yang masih rendah tersebut kemudian membatasi perbaikan kinerja konsumsi.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Global

	2015	2016	Kontribusi (%)
Dunia	3,2	3,1	100
Negara Maju	2,1	1,6	41,85
Jepang	1,2	1,0	4,14
Amerika Serikat	2,6	1,6	15,59
Kawasan Eropa	2,0	1,6	11,30
Perancis	1,3	1,2	2,30
Jerman	1,5	1,9	3,34
Italia	0,7	0,9	1,87
Spanyol	3,2	3,2	1,42
Negara Berkembang	4,0	4,1	58,15
Tiongkok	6,9	6,7	17,86
India	7,2*	7,3*	7,32

* Penghitungan diseragamkan dengan negara lain yakni data periode Jan - Des 2016.
PDB India tahun 2015 berdasarkan tahun fiskal (Maret 2015 s.d. Maret 2016) adalah 7,5%.
Sumber: WEO IMF Jan-17, diolah

Grafik 1.3. Inflasi Beberapa Negara Maju dan Harga Komoditas Global

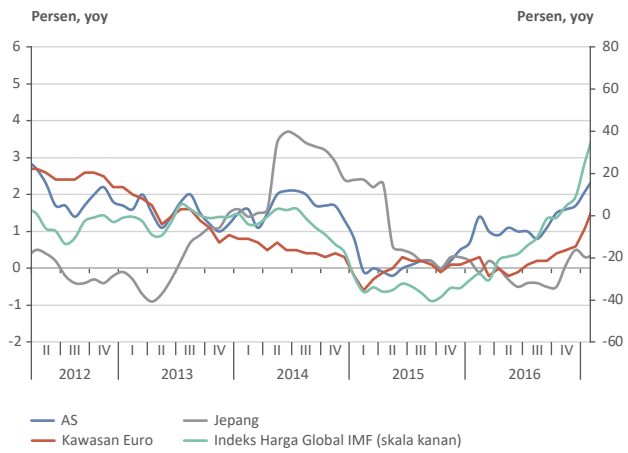

Sumber: WEO-IMF

Grafik 1.4. Sektor Industri AS dan Harga Minyak

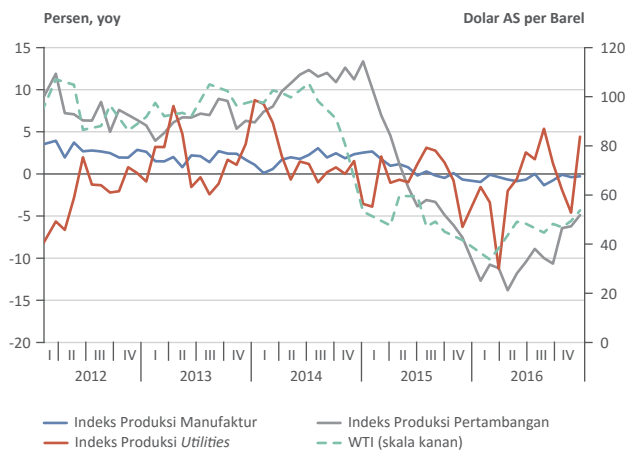

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.5. Sektor Perumahan AS

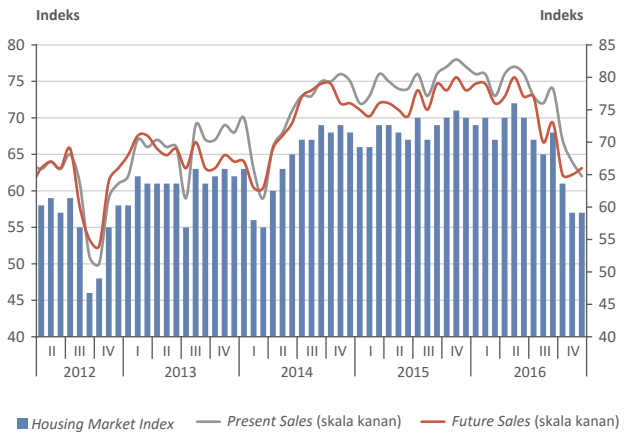

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.7. Inflasi AS

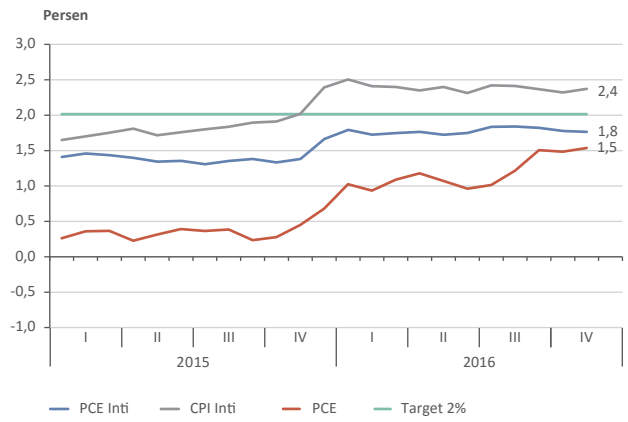

Sumber: Bloomberg, diolah

Inflasi AS pada 2016 juga tercatat meningkat, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan The Fed. The Fed menggunakan *Personal Consumption Expenditure* (PCE) sebagai sasaran yang dalam jangka panjang ditargetkan sebesar 2%. Secara umum, kenaikan tekanan inflasi AS terutama dipengaruhi tren peningkatan harga komoditas pada triwulan IV 2016. Selain itu, ekspektasi inflasi AS juga meningkat terutama dipengaruhi rencana ekspansi kebijakan fiskal Trump. Menurut kelompok barang, tekanan inflasi terutama berasal dari peningkatan harga untuk jasa kesehatan dan perumahan yang kemudian menyebabkan inflasi inti berada pada level di atas 2% sejak awal tahun 2015. Secara keseluruhan, inflasi IHK dan inflasi PCE tercatat meningkat menjadi 1,5% (Grafik 1.7).

Dari Eropa, pertumbuhan ekonomi tercatat lebih lambat dibandingkan dengan capaian pada 2015 sedangkan inflasi tercatat meningkat meskipun masih terbatas. PDB Eropa 2016 tumbuh sebesar 1,6%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 2% (Grafik 1.8). Pemulihan ekonomi Eropa yang belum kuat dipengaruhi ekspor yang masih lemah pascareferendum *Brexit* dan juga dipengaruhi transisi politik Eropa. Sementara itu, inflasi Eropa tercatat meningkat dari 0,5% pada 2015 menjadi 1,1%. Meskipun naik, inflasi tersebut masih di bawah target inflasi bank sentral Eropa (ECB) yang mendekati 2%. Kenaikan inflasi terutama terjadi pada paruh kedua didorong kenaikan harga kelompok energi. Kenaikan harga energi terindikasi telah meningkatkan tekanan harga sejak di tingkat produsen, tercermin dari inflasi *Producer Price Index* (PPI) yang telah mencatat positif pada akhir tahun 2016 sebesar 0,1%.

Dari Jepang, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 tercatat melambat dari 1,2% pada 2015 menjadi 1,0% sehingga berkontribusi pada inflasi yang masih lemah.

Grafik 1.6. Sektor Tenaga Kerja AS

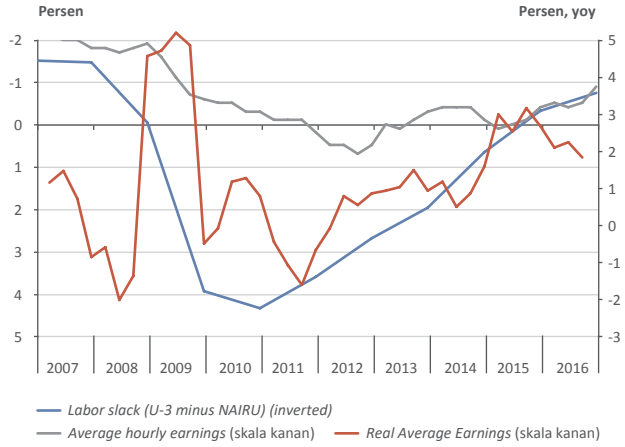

Sumber: FRED, Bloomberg, diolah

Grafik 1.8. Dekomposisi Pertumbuhan Eropa (*Euro Area*)

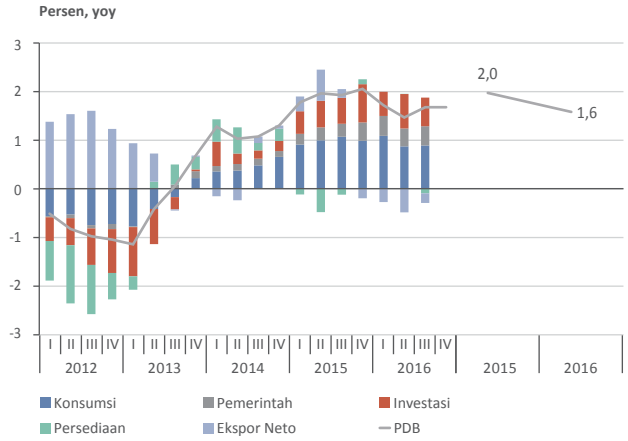

Sumber: Eurostat

Pertumbuhan ekonomi yang lemah dipengaruhi pemulihan konsumsi, investasi serta ekspor neto yang masih terbatas (Grafik 1.9). Kinerja konsumsi tahun 2016 cenderung stagnan antara lain dipengaruhi perbaikan sektor tenaga kerja yang terbatas serta fenomena kondisi demografi masyarakat yang menua (*aging population*). Konsumsi yang belum kuat kemudian berdampak pada tren penjualan ritel dan belanja rumah tangga yang belum kuat. Permintaan agregat yang belum kuat selanjutnya berkontribusi pada inflasi yang masih lemah. Pada akhir tahun 2016, inflasi tercatat sebesar 0,3% disumbang inflasi nonmakanan yang masih cukup rendah. Dalam dinamika triwulanan, inflasi dari kelompok produsen terindikasi meningkat dipengaruhi kenaikan harga energi. Perkembangan ini tergambar pada deflasi dari harga produsen yang semakin berkurang.

1.2. PEREKONOMIAN NEGARA BERKEMBANG

Perekonomian negara berkembang pada 2016 tumbuh lebih solid dan disertai inflasi yang tetap terkendali. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang pada 2016 tercatat 4,1%, sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 4,0%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang terutama dipengaruhi kenaikan harga komoditas sejak paruh kedua tahun 2016. Kondisi tersebut kemudian mendorong perbaikan ekonomi pada beberapa negara penghasil minyak seperti Rusia dan Arab Saudi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi India dan Indonesia yang meningkat ditopang oleh permintaan domestik yang kuat juga berkontribusi pada kenaikan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang solid dibarengi inflasi yang tetap terkendali sama dengan capaian tahun sebelumnya 4,7%. Perkembangan positif tersebut tidak terlepas dari kontribusi keberhasilan pengendalian inflasi di beberapa negara berkembang seperti Tiongkok, India, Brasil dan Indonesia (Grafik 1.10).

Berdasarkan negara, pertumbuhan ekonomi India tercatat meningkat dan dibarengi penurunan tekanan inflasi. Pertumbuhan ekonomi India pada 2016 tercatat meningkat dari 7,2% pada 2015 menjadi 7,3%. Sumber utama kenaikan pertumbuhan ekonomi India berasal dari konsumsi swasta sedangkan investasi melambat (Grafik 1.11). Konsumsi swasta meningkat dipengaruhi kebijakan peningkatan upah dan dana pensiun di sektor publik pada paruh kedua 2016. Peningkatan konsumsi juga dipengaruhi perbaikan kinerja sektor pertanian didorong cuaca yang mendukung setelah pada tahun sebelumnya mengalami kekeringan. Sementara itu, pertumbuhan investasi melambat, meskipun masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi India. Investasi yang melambat kemudian menurunkan produksi khususnya untuk komponen produksi barang modal (Grafik 1.12). Di tengah pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tekanan inflasi di India masih menurun. Pada akhir tahun 2016, inflasi India tercatat 3,4% lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2015 sebesar 5,6%. Perkembangan positif ini dipengaruhi harga bahan pangan yang terkendali dan *imported inflation* yang rendah.

Dari Tiongkok, pertumbuhan ekonomi tercatat melambat dari 6,9% pada 2015 menjadi 6,7%. Meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2016 masih sesuai dengan kisaran sasaran pertumbuhan ekonomi Pemerintah Tiongkok sebesar 6,5 - 7% dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan pada awal tahun sebesar 6,3%. Sementara itu, inflasi Tiongkok tercatat 2,1% lebih tinggi dibandingkan inflasi 2015 sebesar 1,6%. Peningkatan inflasi tersebut sejalan dengan permintaan domestik Tiongkok yang masih cukup kuat, sebagaimana terlihat dari peningkatan

Grafik 1.9. Dekomposisi Pertumbuhan Ekonomi Jepang

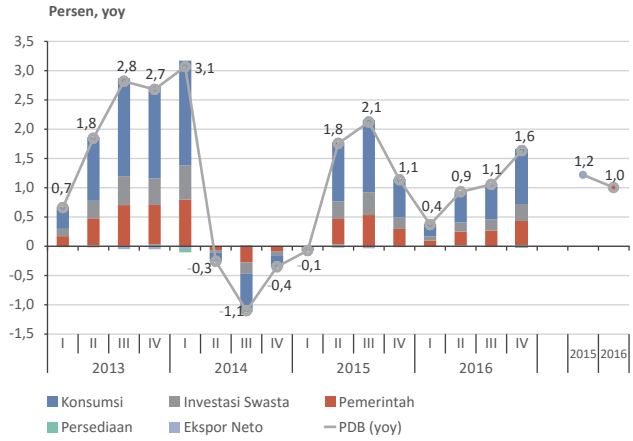

Sumber: Bloomberg

Grafik 1.10. Inflasi Beberapa Negara Berkembang

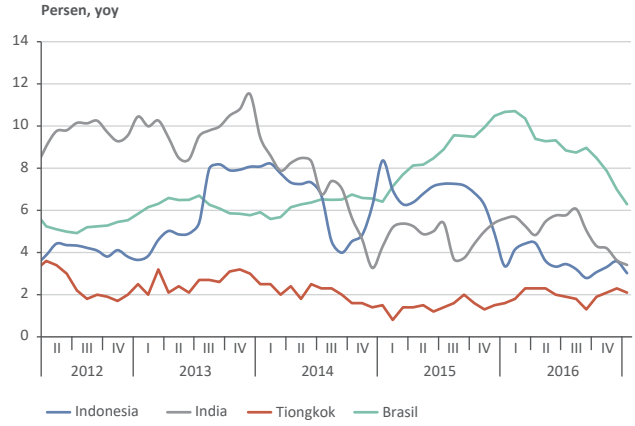

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.11. Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi India

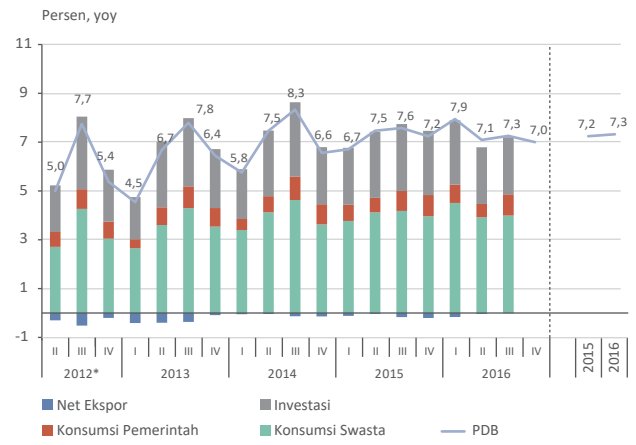

Sumber: Bloomberg

Grafik 1.13. PDB Tiongkok Berdasarkan Industri

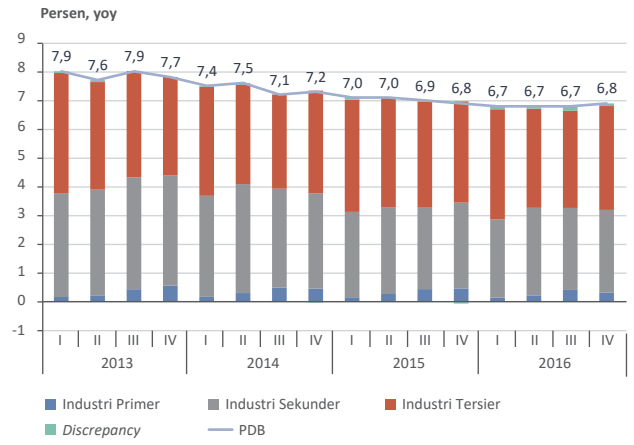

Sumber: China National Bureau Statistics

inflasi inti khususnya komponen nonmakanan. Sebaliknya, tekanan inflasi dari bahan pangan justru menurun.

Perlambatan ekonomi Tiongkok tidak terlepas dari strategi *rebalancing* ekonomi yang ditempuh Pemerintah Tiongkok dan kemudian berimplikasi pada penurunan kinerja investasi. Strategi *rebalancing* ekonomi Tiongkok ditempuh dengan menggeser sumber pertumbuhan dari struktur ekonomi yang berorientasi kepada investasi melalui sektor industri, menuju struktur ekonomi yang berorientasi konsumsi melalui sektor jasa (Grafik 1.13). Selain itu, perlambatan juga dipengaruhi lintasan pertumbuhan ekonomi natural Tiongkok yang juga melambat akibat berakhirnya era *investment-boom* dan menurunnya angkatan kerja. Secara keseluruhan, strategi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak sekuat kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Dalam perkembangannya, implementasi strategi *rebalancing* ekonomi Tiongkok tidak secepat perkiraan sehingga mendorong peran investasi tetap besar. Peran investasi yang besar terutama dipengaruhi investasi pemerintah melalui pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Pembangunan infrastruktur pada 2016 tercatat cukup tinggi, seiring rencana pembangunan 303 proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jalur kereta api, pelabuhan udara, saluran air dan transportasi publik (Grafik 1.14). Sementara itu, investasi swasta yang berkontribusi sebesar 70% dari total investasi, terlihat dalam tren melemah sejak awal 2016. Investasi swasta yang menguat tercatat pada investasi bangunan, khususnya konstruksi properti. Peningkatan investasi bangunan khususnya konstruksi properti terutama terjadi pada triwulan I 2016. Hal tersebut merupakan dampak dari pelonggaran kebijakan sektor properti yang diimplementasikan pada

Grafik 1.12. Produksi Sektor Manufaktur India

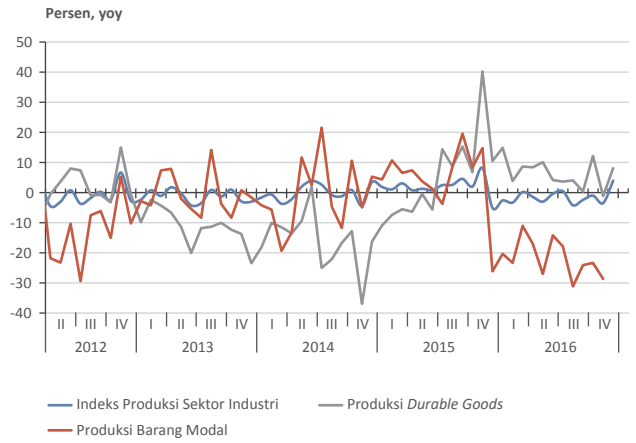

Sumber: Bloomberg

Grafik 1.14. Investasi Aset Tetap Tiongkok

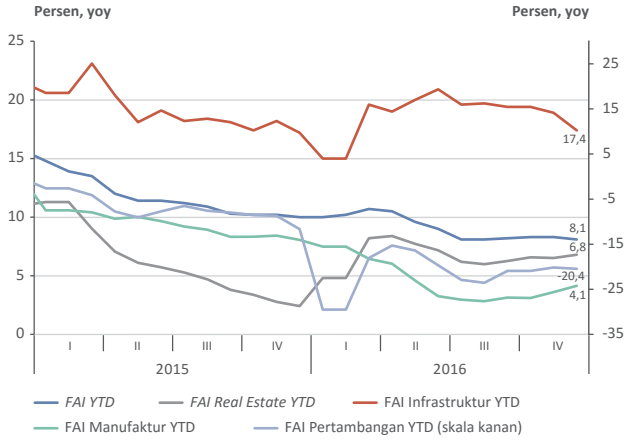

Sumber: Bloomberg, diolah

akhir 2015, antara lain melalui penurunan *mortgage rate* dan uang muka.

Konsumsi Tiongkok cenderung stabil didukung stimulus fiskal pemerintah. Konsumsi yang stabil terlihat dari rata-rata pertumbuhan penjualan ritel tahun 2016 yang masih di atas 10%. Penjualan ritel yang stabil juga dipengaruhi perbaikan sektor properti yang mendorong kenaikan penjualan ritel untuk perabotan rumah dan material dekorasi. Selain itu, penjualan otomotif juga tumbuh pesat dibandingkan dengan kinerja pada 2015 ditopang pelonggaran kredit, penurunan uang muka, dan pemberian subsidi oleh Pemerintah. Konsumsi stabil juga dipengaruhi penyaluran kredit ke rumah tangga dan korporasi yang masih cukup tinggi (Grafik 1.15).

1.3. HARGA KOMODITAS GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi global yang turun berdampak pada harga komoditas energi dan non-energi yang masih rendah hingga triwulan III 2016 (lihat Boks 1.2). Dari harga komoditas energi, harga minyak dunia pada tahun 2016 secara rata-rata masih lebih rendah dibandingkan dengan harga tahun sebelumnya, meskipun pada triwulan akhir 2016 sudah meningkat. Rata-rata harga minyak jenis Minas tercatat 41,0 dolar AS per barel, menurun dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada tahun 2015 yang mencapai 48,9 dolar AS per barel.

Dinamika harga minyak selama tahun 2016 menunjukkan tiga perkembangan besar, yakni pada triwulan I, triwulan II-III, dan triwulan IV 2016. Pada triwulan I 2016, harga minyak dunia tercatat cukup rendah, bahkan sempat berada pada level terendah dalam satu dekade terakhir yakni pada level 26,4 dolar AS per barel (Grafik 1.16). Perkembangan tersebut dipengaruhi pasokan yang melimpah di tengah kondisi inventori minyak yang masih tinggi dan permintaan yang masih lemah. Kenaikan pasokan minyak tidak terlepas dari respons OPEC sejak tahun 2015 untuk mempertahankan pangsa pasar saat terjadi peningkatan produksi *shale oil* di AS. Setelah periode itu, harga minyak cenderung stabil dan bergerak pada kisaran sempit 40-50 dolar AS per barel pada triwulan II dan III 2016. Perkembangan in dipengaruhi gangguan produksi yang terjadi di Kanada, Irak, Kuwait dan Nigeria serta penurunan produksi di AS sehingga menahan penurunan harga minyak lebih lanjut. Pada triwulan terakhir 2016, harga minyak meningkat cukup tinggi hingga di atas level 50 dollar AS per barel.

Pada triwulan IV 2016, kenaikan harga minyak naik tinggi dipengaruhi ekspektasi berkurangnya pasokan, di tengah proses pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut. Berkurangnya pasokan minyak akibat rencana penurunan produksi oleh OPEC yang disepakati pada akhir September 2016. Pada 10 Desember 2016, OPEC dan beberapa negara non-OPEC, termasuk Rusia, menyepakati pemotongan produksi sebesar 1,8 mbpd yang terdiri dari 1,2 juta barel per hari (*million barrel per day*/mbpd) untuk anggota OPEC dan 0,6 mbpd untuk anggota non-OPEC. Kesepakatan pemotongan produksi yang setara 2% dari pasokan dunia berlaku pada Januari-Juni 2017 dan dapat diperpanjang untuk 6 bulan selanjutnya. Pasca tercapainya kesepakatan tersebut, level harga minyak melonjak ke 54 dolar AS per barel dari sebelumnya stabil pada level 40-50 dolar AS per barel sejak triwulan III 2016.

Perkembangan harga komoditas non-energi juga masih rendah sampai dengan triwulan III 2016. Indeks komposit harga komoditas non-energi dunia tercatat rendah, sebelum meningkat pada triwulan IV 2016. Harga komoditas non-energi global yang masih rendah dipengaruhi permintaan

Grafik 1.15. Kredit Rumah Tangga dan Kredit Korporasi

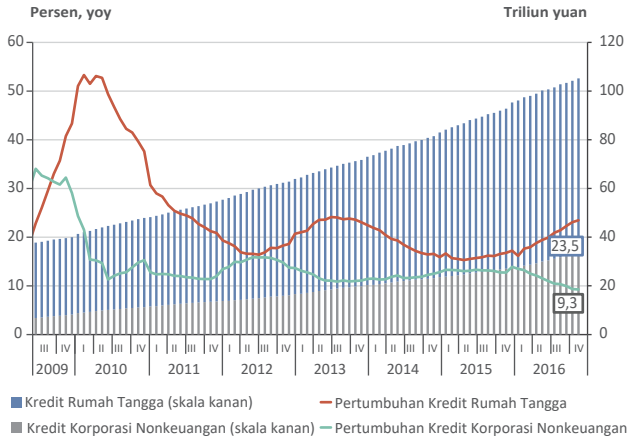

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.16. Perkembangan Harga Minyak dan Indeks Harga Komoditas Ekspor

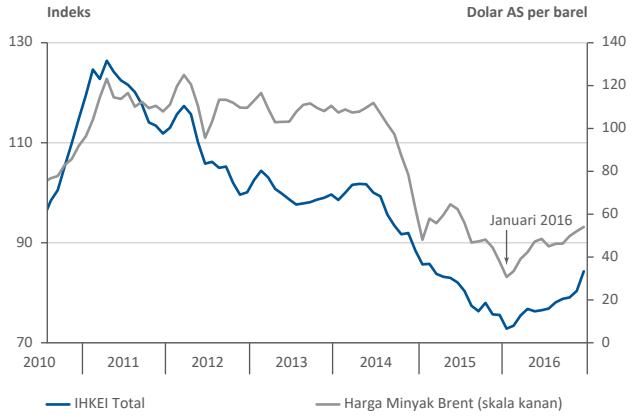

Sumber: Bloomberg, diolah

yang masih lemah, di tengah pasokan yang masih cukup besar. Kondisi ini membuat pertumbuhan harga komoditas ekspor nonmigas Indonesia sempat mengalami kontraksi hingga 11,6% pada triwulan I 2016.

Harga komoditas non-energi meningkat cukup signifikan pada triwulan IV 2016. Perkembangan ini mendorong indeks harga komoditas pada 2016 tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan indeks pada 2015. Kenaikan harga komoditas pada triwulan IV 2016 juga tercermin pada harga komoditas ekspor nonmigas Indonesia seperti batubara, kelapa sawit, dan timah (Tabel 1.2). Peningkatan permintaan komoditas terutama terlihat pada batubara sejalan tingginya permintaan dari Tiongkok di tengah kondisi produksi di Tiongkok yang juga menurun. Pengaruh permintaan Tiongkok cukup tinggi mendorong kenaikan harga komoditas mengingat pangsa permintaan Tiongkok terhadap total permintaan global cukup dominan (Grafik 1.17). Sementara itu, peningkatan harga minyak kelapa sawit dipicu gangguan produksi akibat faktor cuaca yakni *La Nina* yang terjadi hingga triwulan III 2016. Secara keseluruhan, dinamika harga tersebut membuat indeks harga komoditas ekspor nonmigas Indonesia pada tahun 2016 kembali tumbuh positif yakni 4,6%.

Grafik 1.17. Permintaan Batubara Dunia

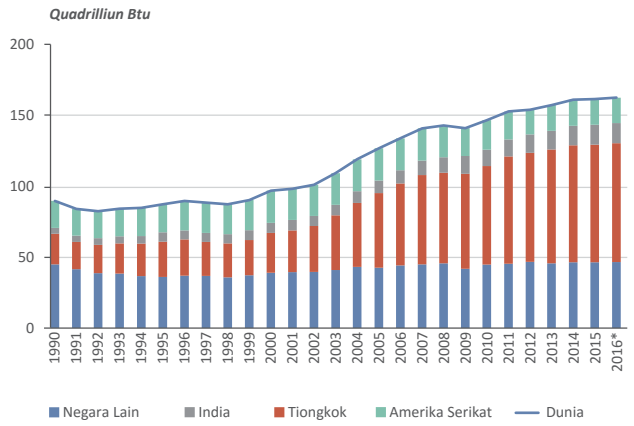

Sumber: *US Energy Information Administration*

1.4. PASAR KEUANGAN GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat dan dibarengi dengan transisi politik di sejumlah negara memicu ketidakpastian di pasar keuangan global tetap tinggi. Ketidakpastian tersebut sempat meningkatkan VIX cukup signifikan hingga mencapai di atas 20 pada triwulan I 2016 (Grafik 1.18).[1] Berbagai ketidakpastian juga sempat meningkatkan VIX pada awal triwulan III dipicu gejolak politik pascareferendum EU *Brexit*. Ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat juga kembali terlihat pada triwulan IV 2016 sehingga memicu peningkatan VIX pascakemenangan Trump yang berada di luar perkiraan pelaku pasar.

Di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, aliran modal ke negara berkembang pada 2016 secara umum masih meningkat. Perkembangan ini dipengaruhi pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang tetap solid dan imbal hasil yang masih menarik. Tekanan pembalikan modal di negara berkembang sempat terjadi pascapemilu AS pada triwulan IV 2016. Aliran dana keluar sempat terjadi

Tabel 1.2. Harga Komoditas Ekspor Indonesia

Komoditas	Satuan	2014	2015	2016				2016
				I	II	III	IV	
Batubara	USD/Metrik Ton	75,3	56,8	45,4	48,3	59,8	84,0	59,4
Tembaga	USD/Metrik Ton	6.827,8	5.506,8	4.688,2	4.727,7	4.798,0	5.293,6	4.878,1
Nikel	USD/Metrik Ton	16.971,3	11.924,0	8.558,0	8.854,8	10.337,6	10.829,4	9.647,8
Kelapa Sawit	MYR/Metrik Ton	2.413,7	2.190,7	2.467,4	2.597,5	2.628,7	2.932,5	2.657,9
Karet	USD/Kg	223,3	178,2	140,0	183,8	173,7	192,7	172,9
Timah	USD/Metrik Ton	21.877,4	16.041,9	15.491,3	16.863,0	18.587,3	20.680,9	17.918,2
Aluminium	USD/Metrik Ton	1.895,6	1.684,4	1.515,3	1.581,9	1.635,0	1.709,5	1.611,0
Kopi [1)]	USD/Pound	196,3	151,6	130,4	136,7	153,0	157,3	144,4

[1)] Data 2014 hanya tersedia dari bulan Juni. Periode rata-rata adalah Juni s.d. Desember 2014
Sumber : Bloomberg, diolah

1 VIX merupakan indikator pasar yang digunakan untuk mengukur ketidakpastian atau volatilitas. VIX dipublikasikan oleh Chicago Board Options Exchange (CBOE) yang secara matematis diturunkan dari indeks saham AS S&P 500.

Grafik 1.18. Perkembangan Indeks VIX dan DXY

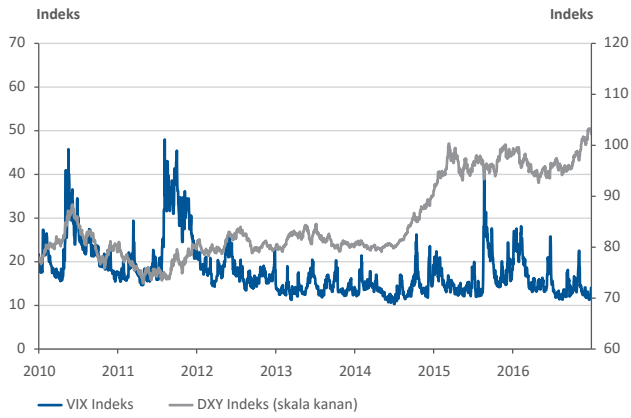

Sumber: Bloomberg

Grafik 1.19. Aliran Modal Neto ke Negara Berkembang (kecuali Tiongkok)

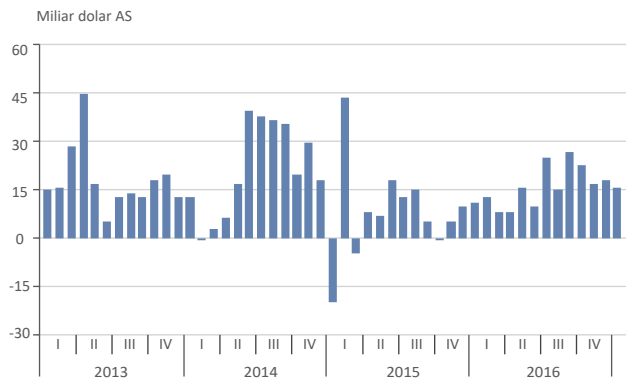

Sumber: IIF

pada periode tersebut, meskipun relatif kecil dibandingkan dengan jumlah aliran masuk ke negara berkembang sepanjang tahun 2016 (Grafik 1.19).

Aliran modal ke negara berkembang yang masih besar telah mendorong indeks komposit harga saham dunia meningkat pada 2016. Indeks saham naik menjadi 150,4 pada akhir tahun 2016 dibandingkan dengan indeks akhir tahun 2015 yang sebesar 142,3. Peningkatan tersebut dipengaruhi kenaikan indeks saham di negara G7 yang cukup signifikan pascapemilu AS. Peningkatan indeks saham di negara Asia Pasifik dan negara berkembang Asia lebih terbatas masing-masing naik dari 109,6 menjadi 111,9 dan dari 100,5 menjadi 102,7.

Berbeda dengan kondisi negara berkembang, tekanan aliran modal keluar dari Tiongkok cukup kuat pada 2016. Tekanan dipicu ekspektasi pelemahan yuan terhadap dolar AS pascapenerapan sistem nilai tukar yuan yang baru. Selain itu, peningkatan ketidakpastian global terkait hasil referendum *Brexit* dan hasil Pemilu AS turut menambah ketidakpastian aliran modal di Tiongkok. Pada satu sisi, aliran modal keluar dari Tiongkok berdampak pada penurunan cadangan devisa Tiongkok pada 2016 hingga sebesar 210 miliar dolar AS yakni dari sebesar 3,23 triliun dolar AS pada awal tahun 2016 menjadi menjadi 3,01 triliun dolar AS. Pada sisi lain, aliran modal ke luar neto juga mendorong pelemahan Yuan sebesar 6,6% terhadap dolar AS (*ptp*) pada tahun 2016.

Boks 1.1. Volume Perdagangan Global dan Risiko ke Depan

Volume perdagangan global selama lebih dari satu dekade terakhir berada dalam tren menurun. Data enam tahun terakhir menunjukkan perdagangan global bergerak stagnan dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 2,33%. Angka pertumbuhan ini jauh di bawah pertumbuhan pada periode sebelum krisis keuangan global yang rata-rata mencapai 6,87%.

Volume perdagangan dunia yang melemah utamanya dipengaruhi faktor struktural akibat matangnya rantai nilai global seiring melambatnya fragmentasi proses produksi internasional. Publikasi terakhir OECD-WTO terkait rantai nilai global menunjukkan bahwa matangnya rantai nilai global telah terjadi sejak tahun 2000.[1] Estimasi menggunakan tabel *Input-Output* dari WIOD (*World Input Output Database*) dengan periode observasi hingga tahun 2014 juga menunjukkan fenomena kematangan rantai nilai global tersebut masih terus berlanjut (Grafik 1). Pada periode 2011-2014, rantai nilai global mulai stabil dan tidak menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana juga ditemukan pada rantai nilai global untuk Indonesia.

Volume perdagangan dunia yang melemah juga dipengaruhi faktor siklikal akibat pertumbuhan ekonomi negara maju yang masih lemah pascakrisis finansial global tahun 2008. Hasil estimasi mengindikasikan pertumbuhan ekonomi negara maju pascakrisis 2008 berada di bawah pertumbuhan potensial. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara maju setelah 2008 tercatat 1,8%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 20 tahun sebelumnya (1987-2007) sebesar 2,5%.

Berbagai faktor struktural dan siklikal tersebut pada gilirannya mengakibatkan berkurangnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia. Beberapa indikator mengindikasikan divergensi antara pertumbuhan volume perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia melebar. Data indeks volume perdagangan 2015 menunjukkan penurunan pertumbuhan impor tercatat lebih besar dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi (Grafik 2).

Ke depan, risiko penurunan perdagangan global dapat meningkat seiring rencana kebijakan proteksionisme perdagangan di beberapa negara. Sebagai gambaran, risiko proteksionisme mengemuka pascareferendum *Brexit* pada 23 Juni 2016. Keunggulan suara pihak yang menginginkan agar Inggris keluar dari Uni Eropa dalam Referendum Uni Eropa dapat menurunkan perdagangan dunia dalam jangka menengah-panjang. Hal ini karena kemenangan kubu *Brexit* dapat berdampak terhadap perdagangan bebas internasional seiring dengan potensi hilangnya hak istimewa Inggris terhadap pasar barang, jasa dan orang di Eropa (*single market access*).

Risiko kebijakan proteksionisme juga muncul setelah Pemilu AS 7 November 2016. Pada pidato pelantikan 21 Januari 2017, Presiden AS terpilih Donald Trump menitikberatkan agenda populis dengan elemen utama

Grafik 1. Estimasi Rantai Nilai Global

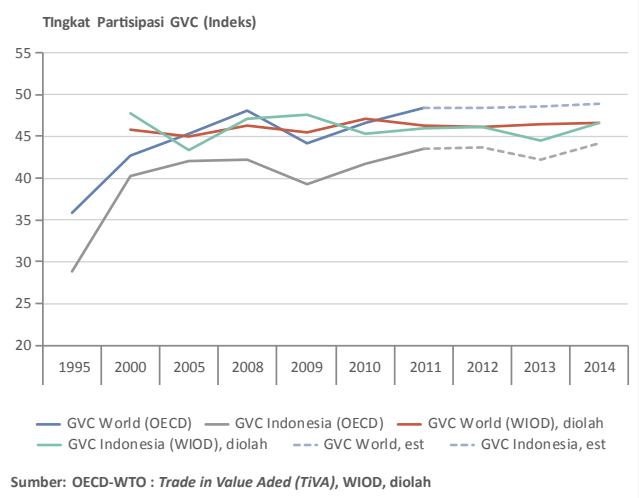

Sumber: OECD-WTO : *Trade in Value Aded (TiVA)*, WIOD, diolah

Grafik 2. Perlambatan PDB dan Impor

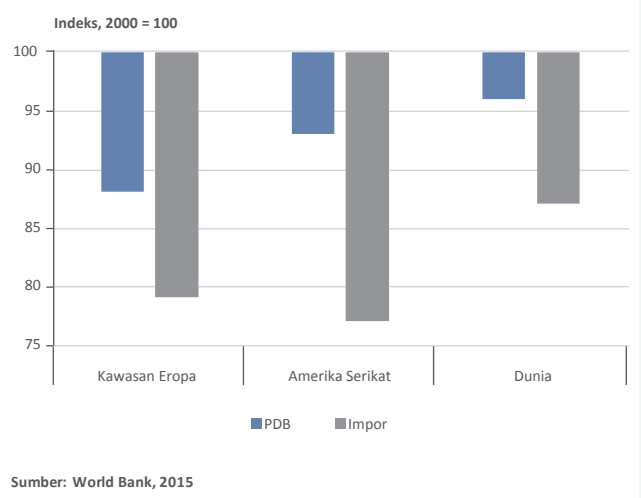

Sumber: World Bank, 2015

1 OECD-WTO: *Trade in Value Added (TiVA)*, dengan periode observasi hingga tahun 2011.

Tabel 1. Simulasi Dampak Penerapan Tarif Impor Tiongkok oleh AS terhadap PDB Sejumlah Negara

Negara	Δ Perdagangan/PDB(-1) (%)	Δ PDB (%)
Tiongkok	-3,14	-0,30
Mitra Dagang Utama Tiongkok		
Jepang	-0,26	-0,02
Korea	-1,12	-0,10
Hong Kong	-5,20	-0,45
Jerman	-0,24	-0,02
Australia	-0,38	-0,03
Vietnam	-3,21	-0,30
Meksiko	-0,38	-0,04
Malaysia	-1,42	-0,13
Belanda	-0,51	-0,04

Negara	Δ Perdagangan/PDB(-1) (%)	Δ PDB (%)
AS	-1,67	-0,14
Mitra Dagang Utama Amerika Serikat		
Kanada	-1,92	-0,17
Meksiko	-2,74	-0,26
Jepang	-0,22	-0,02
Jerman	-0,32	-0,03
Korea	-0,62	-0,05
Inggris	-0,28	-0,02
Perancis	-0,19	-0,02
India	-0,23	-0,02
Italia	-0,19	-0,02

Sumber: Bank Indonesia

proteksionisme. Pidato tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penandatanganan *Executive Orders* yang menyatakan AS keluar dari *Trans-Pacific Partnership.* Rencana penerapan kebijakan proteksionisme lainnya juga masih sejalan dengan janji kampanye, antara lain renegosiasi keanggotaan North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan penerapan hukuman terhadap negara yang melanggar perjanjian perdagangan.

Rencana lain yang menjadi perhatian pasar terkait kebijakan proteksionisme AS ialah rencana penerapan 45% tarif kepada impor Tiongkok dan 35% tarif kepada impor Meksiko.[2] Khusus untuk Tiongkok, penerapan tarif impor terhadap Tiongkok diperkirakan dapat menurunkan transaksi perdagangan antara Tiongkok dan AS. Kondisi ini bila berlanjut tidak saja dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan AS, tetapi dapat merambat kepada mitra dagang masing-masing negara dan volume perdagangan global (Tabel 1).

Bagaimana dampak kebijakan proteksionisme AS terhadap Indonesia? Berdasarkan simulasi Bank Indonesia, dampak kebijakan proteksionisme khususnya kebijakan Trump dan *Brexit* terhadap Indonesia masih terbatas. Hasil perhitungan dampak *spillover* penurunan PDB Tiongkok dan AS terhadap PDB Indonesia hanya 0,2 ppt (*percentage point*), tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara lain.[3] Terbatasnya dampak tersebut dipengaruhi penurunan PDB AS yang relatif lebih kecil dibandingkan penurunan PDB Tiongkok.

Kajian sebelumnya pada Anglingkusumo (2014) menunjukkan hal yang sama bahwa dampak *spillover* dari perekonomian Tiongkok ke PDB Indonesia tercatat lebih kecil dibandingkan dengan dampak *spillover* dari perekonomian AS.[4] Sementara itu, implikasi *Brexit* terhadap ekonomi Indonesia diperkirakan juga terbatas karena pangsa ekspor Indonesia ke Inggris hanya sekitar 1% dari total ekspor Indonesia. Meskipun demikian, dampak lanjutan dari terganggunya hubungan perdagangan Inggris-Eropa perlu dicermati mengingat pangsa ekspor Indonesia ke Eropa (di luar Inggris) cukup besar yakni mencapai 11,4%.

2 Tiongkok merupakan penyumbang defisit terbesar neraca perdagangan AS. Pada tahun 2015, defisit neraca perdagangan AS tercatat 744 miliar dolar AS, hampir 50% dari defisit tersebut bersumber dari perdagangan dengan Tiongkok.

3 Estimasi merujuk pada elastisitas dalam penelitian Harahap et al. (2016), "*Spillovers of United States and People's Republic of China Shocks on Small Open Economies: The Case of Indonesia*", *ADBI Working Paper Series No. 616*", November 2016.

4 Anglingkusumo *et al* (2014), "Daya Saing Negara dan Dampak *Spillover* Perekonomian Dalam Jaringan Produksi Global", Bank Indonesia.

Boks 1.2. Pengaruh Perekonomian AS dan Tiongkok terhadap Harga Komoditas Dunia

Dua tren menandai pergerakan harga komoditas dunia pada 2016. Tren pertama terlihat dari periode triwulan I hingga triwulan III 2016. Pada periode ini, harga komoditas bergerak dalam level yang rendah. Indeks harga komoditas yang pada tahun 2011 sempat mencapai level tertinggi 126,4, dalam perkembangan pada tiga triwulan pertama 2016 terlihat terus turun hingga sempat berada di level terendah 72,8 pada awal 2016. Tren kedua terlihat pada triwulan IV 2016 dimana harga komoditas meningkat cukup tinggi hingga pada akhir 2016 indeks harga komoditas ditutup di level 84,3.

Berbagai studi empiris menunjukkan perkembangan harga komoditas dunia memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok, khususnya untuk komoditas logam dan minyak. Roache (2012) menunjukkan setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi AS sebesar 1 *percentage point* akan meningkatkan harga komoditas logam seperti alumunium, tembaga, nikel dan timah dalam kisaran 6,0% hingga 9,8%. Sementara itu, kenaikan 1 *percentage point* pertumbuhan ekonomi AS berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak tercatat sebesar 9,9% untuk periode satu tahun ke depan.[1]

Harga komoditas dunia juga berkaitan dengan perkembangan dolar AS. Data empiris menunjukkan dolar AS memiliki korelasi negatif dengan harga komoditas, meskipun perkembangan terkini cenderung melemah. Roache (2012) menunjukkan apresiasi *real effective exchange rate* dolar AS sebesar 1 *percentage point* akan mendorong pelemahan harga minyak sebesar 3,45% dan juga pelemahan harga komoditas logam seperti alumunium, tembaga, nikel, dan timah dalam kisaran 1,7-3,7% selama satu tahun ke depan.

Namun, perkembangan terkini menunjukkan korelasi negatif antara dolar AS dan harga komoditas melemah.[2] Sejak awal tahun 2015, korelasi negatif antara harga minyak dan dolar AS menurun dan bahkan beralih positif pada akhir 2016. Perkembangan yang sama juga terlihat pada korelasi antara indeks harga komoditas ekspor utama Indonesia (IHKEI) dan dolar AS (Grafik 1).

Grafik 1. Korelasi Harga Komoditas dengan Indeks DXY

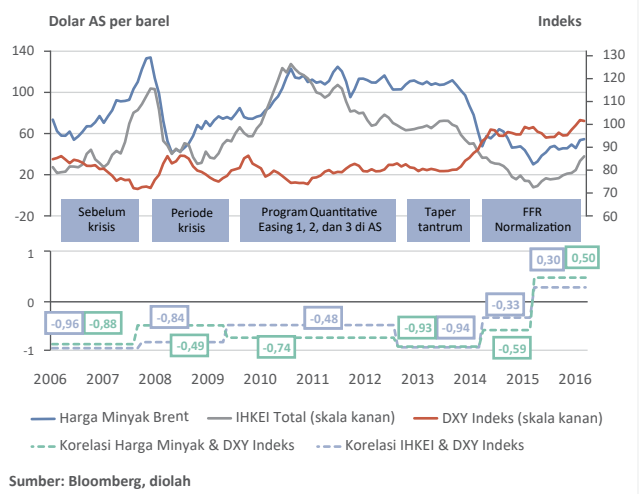

Sumber: Bloomberg, diolah

Korelasi negatif antara dolar AS dan harga komoditas yang melemah dapat berimplikasi pada potensi penguatan dolar AS tidak serta merta mendorong penurunan harga komoditas. Optimisme membaiknya ekonomi AS yang dapat mendorong penguatan dolar AS dapat saja tidak diikuti dengan pelemahan harga minyak dan komoditas lain. Hal ini dikarenakan permintaan terhadap komoditas dapat terus tinggi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas ekonomi AS. Bahkan, dalam jangka pendek, potensi kedua hal tersebut bergerak searah akan terbuka.

Hubungan yang sama juga ditemukan pada korelasi antara pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan harga komoditas. Roache (2012) menunjukkan kenaikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 1 *percentage point* mendorong kenaikan harga komoditas dalam kisaran 0,9% hingga 2,3% untuk komoditas logam, dan 1,9% untuk harga minyak. Peran ekonomi Tiongkok terhadap harga komoditas dunia diperkirakan semakin besar karena impor komoditas Tiongkok terhadap komoditas yang terus meningkat. Sebagai gambaran, pada tahun 2015, impor komoditas oleh Tiongkok sudah lebih besar dibandingkan dengan impor yang dilakukan AS (Grafik 2). Senada dengan temuan tersebut, Abiad et. al (2016) juga menemukan peningkatan pertumbuhan Tiongkok sebesar 1 *percentage point* akan meningkatkan harga batu bara dan logam sebesar 7-22% dan harga komoditas migas sebesar 5-7%.[3]

1 Shaun K. Roache, IMF Working Paper 12/15: *China's Impact on Commodity Market*, Mei 2012.

2 Penghitungan korelasi dibedakan berdasarkan *event* utama global yang memengaruhi pergerakan dolar AS, yakni periode (i) sebelum krisis (April 2006 – Mei 2008); (ii) krisis (Juni 2008 – Desember 2009); (iii) stimulus QE (Januari 2010 – April 2013); (iv) *taper tantrum* (April 2013 – Januari 2015); dan (v) normalisasi Fed Fund Rate (periode ekspektasi kenaikan Februari – Desember 2015 dan periode peningkatan FFR Januari 2016 – Januari 2017).

3 Abiad et. al, ADB Briefs: "*Moderating Growth and Structural Change in the People's Republic of China: Implications for Developing Asia and Beyond*", Maret 2016.

Grafik 2. **Tingkat Impor Komoditas Dunia**

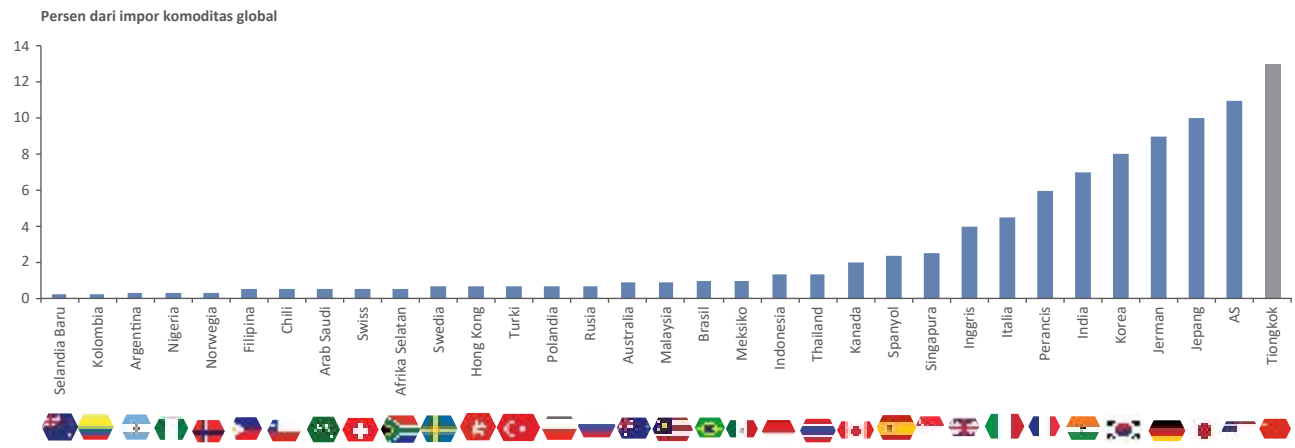

Sumber: HSBC, UN Comtrade, US Global Investor, Agustus 2015

Ke depan, kenaikan harga komoditas berpotensi berlanjut mempertimbangkan prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok. Hubungan tersebut dapat semakin kuat jika pertumbuhan ekonomi didorong oleh berbagai kegiatan pembangunan proyek infrastruktur seperti yang direncanakan di AS dan Tiongkok. Pembangunan infrastruktur Tiongkok diperkirakan tetap tinggi dipengaruhi implementasi strategi *rebalancing* ekonomi Tiongkok yang masih akan dilakukan bertahap. Potensi peningkatan harga komoditas juga tetap besar karena korelasi negatif antara dolar AS dan harga komoditas terlihat semakin lemah.

BAB 2
Respons Kebijakan Ekonomi Global

Respons kebijakan ekonomi global pada 2016 diarahkan untuk memitigasi risiko berlanjutnya pelemahan perekonomian global. Kebijakan moneter negara maju, kecuali AS, masih akomodatif melalui kebijakan moneter nonkonvensional sedangkan stimulus melalui fiskal terbatas. Kebijakan moneter di AS tetap diarahkan untuk melanjutkan proses normalisasi kebijakan yang sudah ditempuh sejak 2014, meskipun implementasinya tidak secepat yang diperkirakan. Sementara itu, kelompok negara berkembang melakukan ekspansi fiskal, memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter, dan terus menjalankan reformasi struktural. Kebijakan-kebijakan tersebut ditopang pula dengan kerjasama internasional untuk memperkuat struktur perekonomian dunia.

Keterangan gambar:
Merespons perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian di pasar keuangan, otoritas berbagai negara memperkuat kerja sama melalui berbagai fora internasional guna menyusun rumusan kebijakan yang tepat.

Respons kebijakan ekonomi global pada 2016 secara umum diarahkan untuk memitigasi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai ketidakpastian di pasar keuangan global. Respons kebijakan dari berbagai negara secara umum lebih bersifat akomodatif. Kelompok negara-negara maju, kecuali AS, masih berupaya untuk mendorong kinerja perekonomiannya melalui kebijakan moneter longgar dengan suku bunga rendah atau bahkan negatif dan program pembelian aset oleh bank sentral. Respons melalui kebijakan fiskal lebih terbatas mempertimbangkan ruang stimulus yang lebih kecil. Sementara itu, kelompok negara berkembang cenderung ekspansif dengan memanfaatkan ruang stimulus fiskal yang ada dan ruang pelonggaran moneter yang masih lebar serta terus melanjutkan agenda reformasi struktural.

Respons kebijakan ekonomi global juga dilakukan melalui berbagai kerja sama internasional. Kerjasama internasional dilakukan, baik dalam konteks kerjasama regional maupun kerjasama global. Di berbagai fora internasional, agenda utama yang menjadi fokus kerjasama adalah upaya mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dunia serta meningkatkan resiliensi ekonomi dan sistem keuangan global. Kerjasama yang ditujukan untuk memperkuat struktur perekonomian global dilakukan dalam beberapa forum kerja sama antara lain G20, Financial Stability Board (FSB), dan kerja sama di level regional seperti Association of South East Asia Nations (ASEAN) dan Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP).

2.1. KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA MAJU

Respons kebijakan ekonomi negara maju, kecuali AS, pada 2016 secara umum masih akomodatif. Kebijakan moneter ditempuh baik melalui pendekatan harga, yakni suku bunga, maupun pendekatan kuantitas (Grafik 2.1 dan Tabel 2.1). Arah kebijakan yang telah ditempuh sejak krisis keuangan global tahun 2008 ditujukan untuk memitigasi risiko perlambatan ekonomi yang masih cukup besar. Pertumbuhan ekonomi negara maju sejak 2008 terlihat belum kembali dalam lintasan meningkat yang pada gilirannya memengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan, termasuk harga komoditas yang masih rendah.

Bank of Japan (BoJ) masih melanjutkan kebijakan moneter akomodatif. BoJ menambah stimulus dengan mengeluarkan kebijakan moneter baru yang bersifat nonkonvensional berupa suku bunga negatif. Memasuki tahun keempat *Abenomics* tepatnya pada Januari 2016, BoJ menyatakan komitmennya untuk mencapai target inflasi 2% melalui tiga dimensi kebijakan, yaitu pelonggaran

Grafik 2.1. Suku Bunga Kebijakan Negara Maju

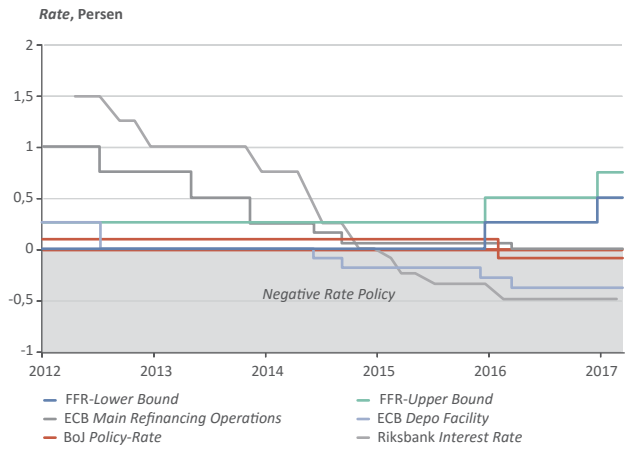

Sumber: Bloomberg

moneter kuantitatif dan kualitatif yang diikuti dengan suku bunga negatif (*quantitative and qualitative monetary easing with a negative interest rate*).[1] Kebijakan suku bunga negatif diharapkan akan memberikan disinsentif bagi konsumen untuk menyimpan uang di bank dan dapat mendorong perbankan untuk menyalurkan pinjaman lebih banyak. Suku bunga negatif juga diharapkan membantu melemahkan mata uang yen relatif terhadap mata uang negara lain sehingga meningkatkan kinerja ekspor.

Dalam perkembangannya, kebijakan suku bunga negatif belum optimal menarik Jepang dari zona deflasi maupun mendorong pertumbuhan ekonomi. Jepang masih mencatat deflasi dan pertumbuhan ekonomi yang hampir mengalami resesi teknik pada 2016. Konsumsi domestik sulit untuk ditingkatkan karena permasalahan struktural berupa penuaan populasi (*aging population*). Risiko eksternal turut menekan pertumbuhan ekonomi Jepang. Berbagai risiko ketidakpastian eksternal menyebabkan yen menguat karena dianggap sebagai salah satu *safe haven currency*. Penguatan yen dan lemahnya permintaan global kemudian menyebabkan inflasi turun, ekspor terkontraksi, dan investasi tumbuh melambat.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, BoJ melakukan penyempurnaan kebijakan. Kebijakan moneter melalui jalur kuantitatif menjadi salah satu opsi yang ditempuh BoJ sebagaimana beberapa negara maju lainnya. Pada Juli 2016, BoJ menambah volume pembelian aset pasar uang berupa *Exchange-Traded Fund* (ETF) hingga

1 *Abenomics* adalah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada awal tahun 2013. *Abenomics* terdiri dari "tiga panah" kebijakan, yaitu kebijakan moneter agresif, kebijakan fiskal yang fleksibel, dan strategi pertumbuhan yang menyertakan reformasi struktural.

Tabel 2.1. Kebijakan Moneter Kuantitatif Negara Maju

No	Negara Maju	Kebijakan Moneter Kuantitatif
1.	Amerika Serikat	QE 1 (Nov 2008 - June 2010) MBS: total 600 miliar dolar AS T Notes: 20 miliar dolar AS per bulan QE 2 (Nov 2010 - 2011) T Notes: 600 miliar dolar AS QE 3 (Sep 2012 - Okt 2014) 40 miliar dolar AS, naik menjadi 85 miliar dolar AS pada Des 2012, lalu diturunkan menjadi 65 miliar dolar AS pada Sep 2013. Penurunan jumlah pembelian aset (*tapering*) dimulai pada Jan 2014.
2.	*Euro Zone*	PSPP + CBPP3 + ABSPP Jan 2015: 60 miliar Euro per bulan EAPP + CSPP Mar 2016: 80 miliar Euro per bulan
3.	Inggris	QE 1 (Mar - Jul 2012) Total 375 miliar Poundsterling QE 2 (Agt 2016 - sekarang) UK Gilts: 60 miliar Poundsterling *Corporate bonds*: 10 miliar Poundsterling
4.	Jepang	Okt 2010 - Okt 2011: total 55 triliun yen April 2013: QE sebesar 60 - 70 triliun yen per tahun Okt 2014: QE naik menjadi 80 triliun yen per tahun Juli 2016: QE ETF naik menjadi 6 triliun per tahun dari sebelumnya 3,3 triliun yen

Keterangan: PSPP: *Public Sector Purchase Programme*, CBPP3: *Covered Bond Purchase Programme 3*, ABSPP: *Asset Backed Securities Purchase Programme*
Sumber: Federal Reserve, ECB, BoE, BoJ

hampir dua kali lipat menjadi 6 triliun yen per tahun.[2] Dalam asesmen kebijakan moneternya pada September 2016, BoJ menyatakan target tingkat inflasi 2% masih belum tercapai karena berbagai faktor eksternal dan ekspektasi inflasi yang cenderung melemah. BoJ kemudian menerapkan penguatan kebijakan *Quantitative and Qualitative Easing* (QQE) dengan menambahkan kontrol pada kurva imbal hasil obligasi pemerintah Jepang agar berada di sekitar nol persen. BoJ juga merumuskan kembali target inflasinya yang semula "mencapai inflasi 2%" menjadi "mencapai inflasi di atas 2%" untuk menjangkar ekspektasi masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi.

Kebijakan moneter di Jepang yang akomodatif juga bersinergi dengan kebijakan fiskal yang ekspansif. Pada tahun 2016, Jepang kembali meluncurkan program stimulus fiskal dengan nilai sebesar 7,5 triliun yen (sekitar 73 miliar dolar AS) atau kedua terbesar sejak krisis keuangan global. Program stimulus terutama ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur, selain juga disalurkan dalam bentuk *cash handout*, program pensiunan, dan perbaikan fasilitas perawatan anak (*child care*) sebagai salah satu bentuk dukungan bagi progam reformasi struktural Jepang.

Di kawasan Eropa, bank sentral Eropa, European Central Bank (ECB) mengeluarkan kebijakan moneter yang sangat longgar untuk mendorong perekonomian. ECB meningkatkan stimulus *Quantitative Easing* (QE) dengan menambah besaran program pembelian aset (*Assets Purchase Program*/APP) dari 60 miliar Euro menjadi 80 miliar Euro per bulan dan memperluas cakupan aset yang dapat dibeli dalam APP. ECB juga menurunkan suku bunga acuan *Deposit Facility* (DF) sebesar 10 bps menjadi -0,40%, terendah sepanjang sejarah ECB. Kebijakan suku bunga negatif sempat menurunkan nilai saham perbankan Eropa karena terdapat kekhawatiran bahwa bank akan kesulitan memperoleh pendanaan dari masyarakat bila memberlakukan suku bunga negatif bagi produk simpanan perbankan. ECB merespons permasalahan melalui kebijakan pinjaman murah jangka panjang bagi bank yang ditujukan sebagai sumber pendanaan perbankan.

Pada 2016, *European Commission* juga mengarahkan negara-negara Eropa agar kembali menempuh kebijakan fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi. Namun, untuk mendukung efektivitas arah kebijakan fiskal tersebut, beberapa negara Eropa seperti Yunani, Italia, Siprus, dan Portugal harus terlebih dahulu mengurangi beban utangnya untuk dapat memberikan stimulus fiskal. Beban hutang negara-negara tersebut saat ini masih cukup tinggi (Grafik 2.2). Upaya menurunkan beban utang tersebut diarahkan agar prospek kesinambungan fiskal di negara-negara tersebut tetap berdaya tahan.

Grafik 2.2. Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB Negara Eropa

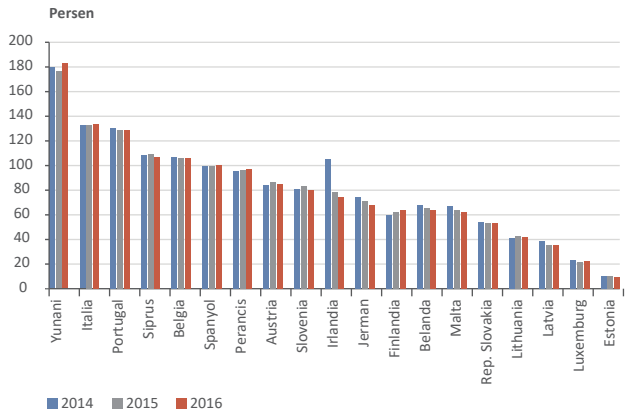

Sumber: IMF

2 ETF adalah produk pasar keuangan yang harganya berbasis pada suatu indeks yang mengacu pada komoditas, obligasi, atau suatu keranjang aset. ETF diperdagangkan seperti saham di bursa saham.

Berbeda dengan respons Jepang dan Eropa, kebijakan moneter di AS tetap diarahkan untuk melanjutkan proses normalisasi kebijakan yang sudah ditempuh sejak 2014. Upaya normalisasi kebijakan tersebut ditempuh melalui kenaikan suku bunga acuan Fed Funds Rate (FFR). Namun, upaya normalisasi tidak bisa dilakukan secara agresif mempertimbangkan pemulihan ekonomi AS yang berjalan lambat pada paruh pertama 2016, meskipun pasar tenaga kerja terus membaik. Inflasi juga tertahan akibat masih rendahnya harga minyak. Pertumbuhan ekonomi AS baru meningkat pada triwulan III 2016 dan ketidakpastian transisi politik juga mulai mereda. Perkembangan tersebut akhirnya mendorong bank sentral AS, The Fed, menaikkan FFR sebesar 25 bps pada Desember 2016.

Dari kebijakan fiskal, Pemerintah AS tidak memiliki ruang besar karena tingkat utang pemerintah sudah cukup tinggi. Stimulus fiskal terakhir yang diberikan oleh Pemerintah AS dalam jumlah cukup signifikan adalah pada tahun 2009 melalui *American Recovery and Reinvestment Act* (ARRA). Sejak 2009, volume belanja pemerintah cenderung turun, berkebalikan dengan neraca The Fed yang terus meningkat seiring penerapan QE yang agresif (Grafik 2.3).

Kebijakan Struktural Negara Maju

Pengambil kebijakan kelompok negara maju juga menempuh kebijakan struktural, dengan penekanan antara lain pada upaya pemecahan masalah kependudukan, khususnya dampak penuaan populasi. Jepang menjadi negara dengan porsi populasi berusia lanjut terbesar, yakni 33% populasi berumur 60 tahun atau lebih. Porsi populasi berusia lanjut yang tinggi juga terjadi di Jerman (28%), Italia (28%), dan Finlandia (27%)[3]. Dengan besarnya porsi populasi berumur lanjut, rumah tangga cenderung memilih untuk menyimpan kekayaannya dibandingkan dengan melakukan konsumsi. Penuaan populasi juga meningkatkan beban ekonomi bagi penduduk usia produktif. Negara-negara maju telah berupaya mengubah komposisi populasi dengan cara meningkatkan angka kelahiran, seperti yang dilakukan Jepang melalui penyediaan pendidikan usia dini, bantuan pengobatan infertilitas, dan tambahan bantuan untuk keluarga dengan orang tua tunggal (*single-parent)*. Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Jepang menargetkan peningkatan angka kelahiran dari 1,45 pada tahun 2015 menjadi 1,8 pada tahun 2025 (Grafik 2.4).

Kebijakan struktural juga diarahkan untuk mengurangi segmentasi pasar tenaga kerja di negara maju. Di Jepang, jaminan pekerjaan seumur hidup (*lifetime employment*) yang diterapkan perusahaan Jepang menyebabkan segmentasi tenaga kerja antara kelompok pegawai tetap dan kelompok pekerja temporer. Perusahaan Jepang memilih untuk mengisi lowongan kerja baru dengan pegawai temporer bergaji rendah dan enggan mengambil pekerja tetap karena berbagai peraturan ketenagakerjaan mengharuskan pemberian gaji dan fasilitas yang cenderung memberatkan perusahaan. Dengan kondisi tersebut, tingkat pengangguran Jepang dalam tren menurun, namun kenaikan gaji pegawai secara agregat berlangsung lambat (Grafik 2.5). Kondisi serupa juga terjadi di Eropa yang memiliki segmentasi pasar tenaga kerja antara *secured jobs*

Grafik 2.3. Stimulus Fiskal dan Moneter AS

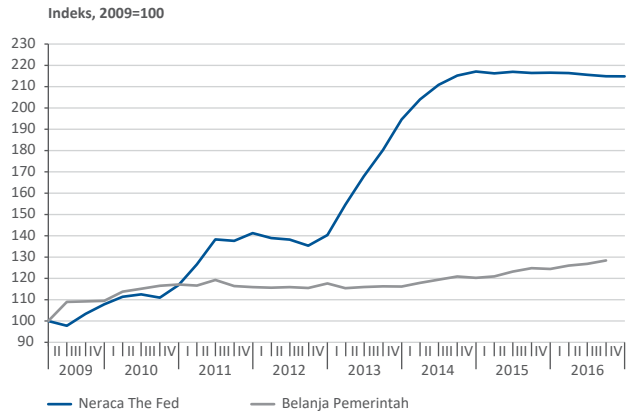

Sumber: Bloomberg & US Bureau of Economic Analysis

Grafik 2.4. Angka Kelahiran Jepang

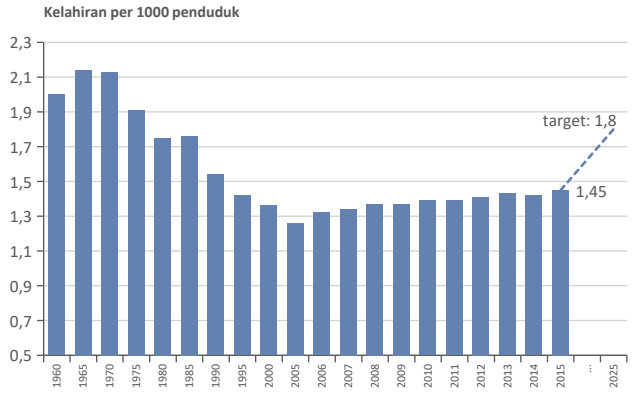

Sumber: Departemen Kesehatan Jepang

3 United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2015). World Population Ageing 2015.

Grafik 2.5. Kondisi Ketenagakerjaan dan Pendapatan Riil Jepang

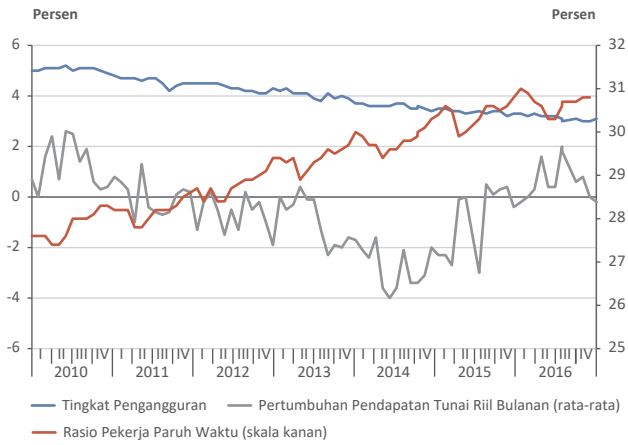

Sumber: Bloomberg

Grafik 2.6. Perbandingan Suku Bunga Kebijakan Beberapa Negara Berkembang

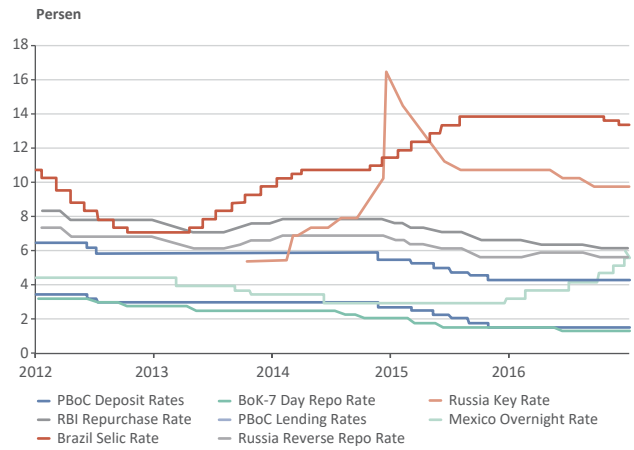

Sumber: Bloomberg

dan *unsecured jobs*. Penanganan permasalahan segmentasi pasar tenaga kerja membutuhkan perubahan mendasar pada undang-undang tenaga kerja dan budaya di tingkat perusahaan. Dengan demikian, proses reformasi struktural diperkirakan akan berjalan lambat.

2.2. KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG

Respons kebijakan makroekonomi negara berkembang juga diarahkan untuk memitigasi risiko perlambatan ekonomi. Secara umum, negara berkembang memiliki ruang kebijakan makroekonomi yang lebih luas dibandingkan dengan ruang yang dimiliki negara maju, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Dari kebijakan moneter, pelonggaran kebijakan moneter dimungkinan ditempuh mengingat tekanan inflasi cukup rendah pada 2016 (Grafik 2.6). Perbedaan respons kebijakan moneter antar negara, di kelompok negara berkembang hanya dipengaruhi perbedaan sensitivitas aliran modal asing terhadap ketidakpastian pasar keuangan global, termasuk akibat ketidakpastian kenaikan FFR. Dari kebijakan fiskal, ruang stimulus fiskal juga masih ada mempertimbangkan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang masih rendah bila dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh negara-negara maju (Grafik 2.7).

Respons kebijakan moneter akomodatif antara lain terlihat di India. Seiring dengan turunnya risiko inflasi, bank sentral India, Reserve Bank of India (RBI) melakukan pemotongan suku bunga kebijakan sebanyak dua kali pada 2016 sehingga tercatat pada level 6,25% pada akhir 2016. Penurunan suku bunga kebijakan di India juga dimungkinkan karena mempertimbangkan risiko arus modal keluar yang rendah.

Penurunan suku bunga acuan ditujukan untuk mendorong bank swasta menambah penyaluran kredit ke sektor riil, di tengah perlambatan penyaluran kredit bank pemerintah akibat tingginya rasio kredit macet (Grafik 2.8).

Namun, India lebih berhati-hati dalam menempuh kebijakan fiskal ekspansif mengingat rasio defisit fiskal India terhadap PDB sudah dalam kategori tinggi di Asia. Pemerintah India berupaya melakukan konsolidasi fiskal dengan menargetkan defisit fiskal turun hingga nol persen pada tahun 2020. Sementara untuk anggaran belanja pemerintah pada 2016-2017, Pemerintah India menargetkan defisit sebesar 3,5% dari PDB, lebih rendah dari realisasi tahun fiskal sebelumnya yang tercatat 3,9% dari PDB. Dalam ruang lingkup konsolidasi fiskal ini, Pemerintah India juga menekankan belanja fiskal akan banyak diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2.7. Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB Negara Berkembang dibandingkan Negara Maju

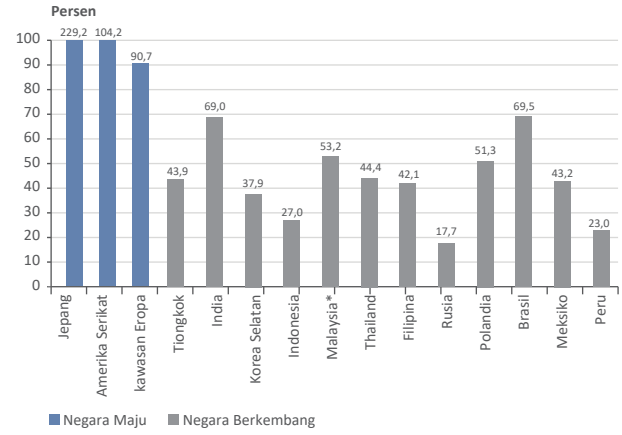

Sumber: IMF

Grafik 2.8. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Bank di India

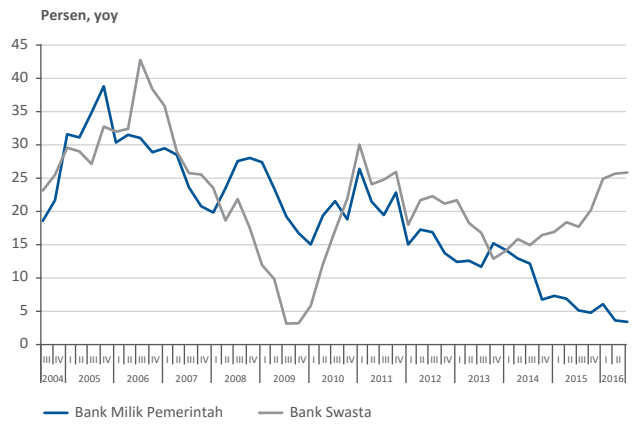

Sumber: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)

Belanja pemerintah difokuskan pada sektor pertanian dan pengembangan ekonomi pedesaan, seperti elektrifikasi desa, irigasi, dan program asuransi panen, selain melalui proyek infrastruktur.

Berbeda dengan India, respons kebijakan moneter di Tiongkok utamanya masih diarahkan untuk memperkuat upaya stabilisasi perekonomian. Pada 2016, bank sentral Tiongkok, People's Bank of China (PBoC), menempuh stance kebijakan moneter yang bersifat netral dengan menjaga tingkat kecukupan likuiditas perekonomian. *Stance* kebijakan moneter yang netral yang ditempuh tersebut masih merupakan kelanjutan *stance* sejak 2011.

Untuk memperkuat *stance* kebijakan moneter, PBoC mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi risiko arus modal keluar. Kebijakan tersebut dilakukan melalui pengendalian arus modal dan injeksi likuiditas guna memitigasi berlanjutnya arus modal keluar dari Tiongkok yang dipicu oleh ekspektasi penguatan dolar AS. Tiongkok kemudian memperketat kebijakan arus modalnya, antara lain melalui pengetatan persyaratan *Outbound Direct Investment* (ODI) serta penurunan limit minimum remitansi ke luar negeri yang harus dilaporkan dari 50 juta dolar AS menjadi 5 juta dolar AS. PBoC juga berupaya mengendalikan ekspektasi depresiasi yuan dengan mendiseminasikan penggunaan indeks *China Foreign Exchange Trade System* (CFETS) sebagai acuan bagi pasar dalam menilai pergerakan nilai tukar yuan.

Stance kebijakan moneter PBoC kemudian dikombinasikan dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Februari 2016 sebesar 0,5% ke level 17%. Penurunan GWM tersebut ditempuh guna mengimbangi turunnya cadangan devisa Tiongkok dan mengakomodasi fasilitas operasi pasar terbuka yang jatuh waktu pada bulan Maret 2016 sebesar 1 triliun yuan. PBoC juga bertindak cukup agresif pasca kenaikan FFR pada Desember 2016 dengan menyalurkan pinjaman darurat sekitar 600 miliar yuan kepada lembaga finansial.

Bauran kebijakan makroekonomi Tiongkok juga didukung kebijakan fiskal yang akomodatif sehingga membuat defisit anggaran pemerintah hampir melebihi batasan tiga persen. Pemerintah Tiongkok memberikan stimulus dengan memanfaatkan keberadaan bank-bank pembangunan untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang dijamin pemerintah. Pemerintah Tiongkok juga menyalurkan stimulus fiskal melalui belanja kuasi-fiskal, dengan menerbitkan obligasi oleh *Local Government Financial Vehicles* (LGFV). LGFV adalah lembaga finansial milik pemerintah lokal yang pembukuannya terpisah dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana yang diperoleh dari obligasi tersebut kemudian diinvestasikan pada proyek-proyek pemerintah daerah. Realisasi berbagai stimulus terlihat dari investasi pada perusahaan milik negara yang tumbuh tajam selama 2016 (Grafik 2.9).

Pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan kebijakan fiskal khusus untuk mendorong konsumsi. Pemotongan pajak pembelian mobil berukuran kecil sejak Oktober 2015 yang disertai pemberian subsidi untuk pembelian mobil dengan sumber tenaga ramah lingkungan berhasil meningkatkan volume penjualan mobil Tiongkok 2016 hingga 14,1%. Sektor properti juga mengalami peningkatan penjualan yang didorong oleh stimulus pemerintah. Untuk meningkatkan kinerja sektor properti di pasar *tier-2*, Pemerintah menurunkan persyaratan uang muka dan menawarkan rumah-rumah yang belum terjual sebagai rumah sosial (*social housing*). Pada saat yang bersamaan, Pemerintah

Grafik 2.9. Pertumbuhan Investasi Swasta dan Pemerintah Tiongkok

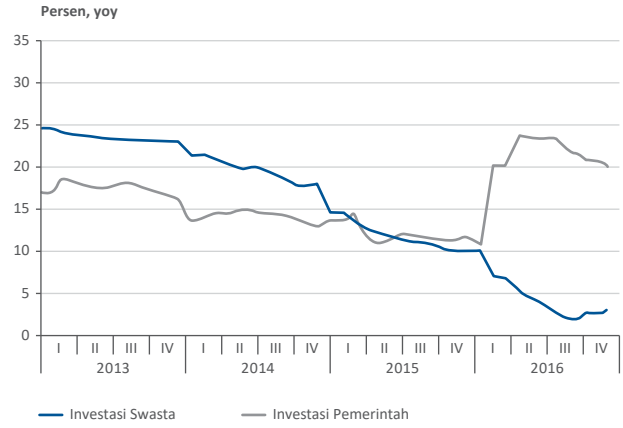

Sumber: Bloomberg

memperketat persyaratan pembelian rumah di pasar *tier-1* karena berpotensi menciptakan *bubble* di sektor properti.

Berbeda dengan *stance* kebijakan moneter negara berkembang di Asia seperti India dan Indonesia, sejumlah negara Amerika Latin menempuh kenaikan suku bunga kebijakan. Bank sentral di negara-negara Meksiko, Peru, dan Chile pada akhirnya meningkatkan suku bunga acuan beberapa kali pada tahun 2016. Respons tersebut ditempuh guna mengantisipasi risiko arus modal keluar dan depresiasi nilai tukar akibat kenaikan FFR. Selain menaikkan suku bunga kebijakan, bank sentral di negara Amerika Latin tersebut juga melakukan stabilisasi pasar finansial merespons ketidakpastian akibat kenaikan FFR.

Kebijakan Struktural Negara Berkembang

Respons kebijakan yang bersifat siklikal di negara berkembang juga ditopang dengan kebijakan struktural. Kebijakan struktural diarahkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya dan meningkatkan kapasitas produksi dengan cepat. Dobla-Norris et. al. (2016) merekomendasikan negara dengan tingkat pendapatan rendah dapat memfokuskan kebijakan kepada reformasi untuk menghilangkan hambatan terhadap pergerakan barang dan faktor-faktor produksi.[4] Sementara itu, di negara berkembang yang sudah lebih maju, reformasi struktural perlu lebih diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi.

Fokus kebijakan struktural Pemerintah India diarahkan untuk mendorong kemudahan berinvestasi. India memiliki target untuk menempatkan negaranya pada peringkat 50 teratas dalam hal kemudahan melakukan usaha (*ease of doing business*). Terkait hal tersebut, India telah memperbaiki infrastruktur listrik dan kereta api, merelaksasi persyaratan investasi asing, serta melakukan otomasi dan digitalisasi proses persetujuan dan pendaftaran perusahaan baru. India juga memulai perbaikan sistem perpajakan serta mengeluarkan penyempurnaan ketentuan mengenai kebangkrutan.

Tiongkok juga telah menetapkan sejumlah agenda reformasi struktural. Pemerintah Tiongkok berencana menurunkan beban biaya perusahaan serta mengurangi persediaan perumahan dan barang-barang industri. Reformasi pada sektor produksi direncanakan melalui pembatasan peningkatan kapasitas produksi, terutama pada industri baja, batubara, dan alumunium. Namun reformasi struktural tersebut akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi yang terlalu dalam. Pada pelaksanaannya, Pemerintah Tiongkok memperlambat langkah reformasinya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Pemerintah Tiongkok juga meneruskan kebijakan stimulus fiskal melalui investasi pemerintah, meskipun hal tersebut memperlambat proses *rebalancing* antara konsumsi dan investasi.

2.3. KERJA SAMA INTERNASIONAL

Respons kebijakan global juga ditempuh dengan memperkuat kerjasama internasional melalui koordinasi di berbagai fora. Selain pemulihan ekonomi yang berjalan lambat, fora mencermati sejumlah tantangan dan risiko, antara lain volatilitas pasar keuangan, pelemahan ekonomi beberapa negara berkembang, meningkatnya kebijakan yang berorientasi domestik, dan faktor non-ekonomi seperti tekanan geopolitik dan terorisme. Sebagai respons atas kondisi perekonomian global tersebut, fora internasional memperkuat kerjasama, memberikan rekomendasi, dan memperkuat komitmen untuk mendorong pertumbuhan dan mempercepat pemulihan ekonomi, serta meningkatkan resiliensi ekonomi dan sistem keuangan global.

Kerja Sama Mendorong Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi

Kerja sama internasional untuk mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang inklusif antara lain dilakukan di forum G20 di bawah kepemimpinan Tiongkok. Agenda forum G20 untuk mempercepat pemulihan ekonomi diimplementasikan melalui kesepakatan *Hangzhou Leaders Communique* pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hangzhou, 4-5 September 2016. Berdasarkan kesepakatan tersebut, setiap negara diharapkan dapat menerapkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang kuat, seimbang, berkelanjutan, dan inklusif. Terkait dengan reformasi struktural, G20 telah menunjukkan langkah maju dalam mengimplementasikan komitmen yang pernah didokumentasikan dalam Strategi Pertumbuhan (*Growth Strategies*). Hasil asesmen organisasi internasional menunjukkan bahwa 55% strategi pertumbuhan pada 2016 telah terlaksana dan diperkirakan dapat memberi tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 *percentage point* terhadap PDB negara G20 pada tahun 2018.

G20 juga mendorong seluruh pelaku ekonomi untuk mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan angka pertumbuhan potensial. Hal tersebut diwujudkan dengan pengesahan G20 *Blueprint on Innovative Growth*

4 Dabla-Norris, E., G. Ho, and A. Kyobe. 2016. "Structural Reforms and Productivity Growth in Emerging Market and Developing." IMF Working Paper WP/16/15. IMF.

yang berisi upaya global untuk mendorong revolusi industri baru dan inisiatif kerjasama ekonomi. G20 juga mendorong pembentukan komitmen bersama sebelas *Multilateral Development Bank* (MDB) untuk memberi dukungan pada investasi infrastruktur.[5] G20 bersama MDB kemudian membentuk aliansi yang diberi nama *Global Infrastructure Connectivity Alliance* untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama di antara berbagai program infrastruktur global. Aliansi tersebut akan mengintegrasikan *Global Infrastructure Hub* (GIH) yang dibentuk G20 pada 2014.

Negara-negara G20 juga berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan perekonomian. Keterbukaan perekonomian akan diwujudkan melalui upaya fasilitasi dan penguatan kerjasama perdagangan dan investasi antar negara G20. Terkait hal tersebut, negara anggota G20 diharapkan untuk meratifikasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) dan mendorong anggota *World Trade Organization* (WTO) lainnya untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, G20 mengesahkan dokumen *G20 Strategy for Global Trade Growth* yang berisi upaya negara anggota untuk mendorong penurunan biaya perdagangan dan pemanfaatan koherensi kebijakan perdagangan dan investasi.

International Monetary Fund (IMF) turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi global dan upaya mengatasi tantangan yang muncul. Dalam *Global Policy Agenda*, IMF merumuskan empat prioritas kebijakan yang perlu dilakukan oleh negara anggota, yaitu (i) optimasi bauran kebijakan, (ii) pemberian prioritas kepada reformasi struktural, (iii) persiapan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan teknologi, dan (iv) peningkatan kerjasama global. IMF juga akan memperkuat perannya dalam melakukan surveilans terhadap kondisi perekonomian global dan individu negara anggotanya. Selain itu, IMF berkomitmen untuk membantu negara berpenghasilan rendah dalam mengurangi kemiskinan melalui pinjaman dengan skema *Poverty Reduction and Growth Trus*t (PRGT).

Sejalan dengan IMF, Bank Dunia juga berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia melakukan berbagai inisiatif investasi infrastruktur dan memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan global utama dalam mendorong pembangunan. Terkait agenda pembangunan, Bank Dunia menyampaikan Visi 2030 dalam rangka memfasilitasi tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* 2030) serta agenda global dalam mengatasi dampak perubahan iklim seperti tercantum dalam kesepakatan *The 21st Conference on Parties Agreement*.

Kerja Sama Meningkatkan Resiliensi

Kerjasama meningkatkan resiliensi global juga dilakukan dalam forum G20 melalui kerjasama dengan berbagai organisasi internasional. G20 mendorong IMF, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Bank for International Settlement (BIS) untuk melakukan analisa perkembangan aliran modal global dan meningkatkan ketersediaan data melalui inisiatif pemenuhan kesenjangan data tahap kedua. Selain itu, G20 meminta organisasi internasional menyusun referensi pelaksanaan *capital flow management* yang efektif melalui *benchmarking* dan berbagai penelitian. Penguatan jaring pengaman keuangan global dilakukan melalui pembentukan fasilitas IMF yang sesuai dengan kebutuhan anggota, penguatan sumber keuangan IMF, dan penguatan kerjasama dengan jaring pengaman keuangan regional. G20 juga berupaya mengurangi ketergantungan perekonomian global terhadap mata uang dolar AS dengan mendorong penggunaan *Special Drawing Right* (SDR) sebagai satuan hitung laporan keuangan dan neraca pembayaran serta mendorong penerbitan obligasi pemerintah dalam SDR.

Upaya global dalam meningkatkan resiliensi dilakukan melalui regulasi sektor keuangan dan pasar keuangan. G20 mendukung upaya reformasi sektor keuangan global yang dikoordinasikan oleh Financial Stability Board (FSB) dengan prioritas pada empat area utama. Prioritas pertama ditujukan untuk meningkatkan ketahanan atau resiliensi lembaga keuangan. Lembaga keuangan diwajibkan untuk memiliki permodalan dan likuiditas pada tingkat yang memadai untuk menyerap potensi risiko yang timbul. Prioritas kedua adalah upaya mencegah terbentuknya lembaga keuangan yang bersifat '*too-big-to-fail*'. G20 terus mendorong implementasi standar *Total Loss Absorbing Capacity* (TLAC). Hal tersebut ditujukan untuk mempersiapkan kecukupan kemampuan lembaga keuangan global yang sistemik (*Global Systemically Important Financial Institutions*/GSIFIs) untuk menyerap kerugian sehingga mekanisme *bail-out* Pemerintah dapat dihindari. Selain itu, G20 berupaya memperkuat infrastruktur pasar keuangan melalui pembentukan *Central Clearing Counterparty* (CCP), yaitu lembaga yang bertugas melakukan proses kliring dan penjaminan transaksi di pasar keuangan.

5 MDB yang ikut serta dalam *Joint Declaration of Aspirations on Actions to Support Investment Infrastructure* ialah World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Development Bank of Latin America, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, Inter-American Development Bank, Islamic Development Bank, New Development Bank, dan International Finance Corporation.

Prioritas ketiga dan keempat dari FSB berturut-turut adalah upaya untuk mereformasi pasar *over-the-counter* (OTC) derivatif dan sistem *shadow banking*.[6] Pasar OTC derivatif mendapat perhatian akibat kompleksitas dan terbatasnya transparansi sehingga menghambat kemampuan otoritas dalam memonitor dan merespon akumulasi risiko, serta mengevaluasi dampak penularan yang ditimbulkan ketika terjadi kegagalan lembaga keuangan. Selain itu, fungsi intermediasi di luar sektor perbankan yang dilakukan oleh entitas *shadow banking* juga mendapatkan perhatian karena dinilai berkontribusi pada krisis keuangan global. Mekanisme untuk memantau perkembangan aktivitas dan risiko *shadow banking* serta serangkaian kebijakan untuk merespon risiko tersebut telah dikembangkan. G20 juga mengeluarkan *High Level Principles for Digital Financial Inclusion* sebagai panduan dalam mendorong inklusi keuangan.

Kerja sama untuk meningkatkan resiliensi juga dilakukan dalam forum kerjasama regional. Pada tahun 2016, Bank Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Gubernur Bank Sentral wilayah Asia dan Pasifik yang tergabung dalam forum *Executives Meeting of East Asia Pacific* (EMEAP). Salah satu isu yang dibahas adalah dampak penundaan penyelesaian pembayaran (*T+1 margin settlement*) di AS dan Uni Eropa. Ketentuan tentang penundaan tersebut dinilai memiliki dampak negatif terhadap likuiditas, kelancaran fungsi sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi global. Gubernur EMEAP meminta otoritas AS dan Uni Eropa untuk bekerja sama dengan EMEAP menyelesaikan isu tersebut, serta meminta masing-masing otoritas menunda implementasi ketentuan dimaksud.

Negara-negara ASEAN+3 terus melakukan penguatan resiliensi kawasan dalam menghadapi risiko ketidakpastian global.[7] *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) diperkuat dengan: (i) penyempurnaan *Operational Guidelines*; (ii) penguatan matriks *Economic Report and Policy Dialogue* (ERPD); (iii) penyusunan mekanisme koordinasi antara CMIM dengan jaring pengaman keuangan global; dan (iv) pengkajian ulang terhadap fasilitas CMIM yang tidak terkait dengan program IMF (CMIM-IMF *De-linked Portion*/DLP).[8] Dalam *review* CMIM-IMF DLP, Bank Indonesia bertanggung jawab menyusun *framework review*, metodologi pengukuran, dan mengawal proses *review*. Penguatan resiliensi kawasan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas surveilans ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) melalui penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan IMF dan penyempurnaan kerangka surveilans.

Integrasi keuangan di kawasan ASEAN juga menjadi isu strategis yang dibahas dalam forum *Senior Level Committee (SLC) on Financial Integration*.[9] Bank Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan SLC ke-12 di Jakarta pada 14 Oktober 2016. Dalam pertemuan tersebut, anggota SLC menyepakati penguatan pada dua area dalam rangka memastikan pencapaian visi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Pertama, negara ASEAN akan melaksanakan asesmen menyeluruh untuk meyakini tercapainya manfaat dari integrasi ekonomi. Kedua, negara ASEAN akan melakukan asesmen stabilitas makroekonomi dan keuangan guna menjaga kelancaran proses integrasi MEA yang sedang berjalan.

6 *Shadow banking* didefinisikan sebagai aktivitas intermediasi yang melibatkan entitas dan aktivitas, baik sebagian maupun seluruhnya berada, di luar sektor perbankan.

7 Kerjasama bank sentral ASEAN dengan tambahan tiga negara, yaitu Jepang, Tiongkok, dan Korea

8 CMIM adalah kerja sama multilateral yang mengatur transaksi *swap* antar mata uang negara ASEAN+3 dan Hong Kong dengan tujuan memberikan dukungan finansial dalam dolar AS.

9 SLC beranggotakan Deputi Gubernur Bank Sentral dan *Co-chairs* ASEAN *Working Committee* dan memiliki mandat untuk memberikan panduan terhadap inisiatif dan implementasi integrasi keuangan kawasan.

BAGIAN II PEREKONOMIAN DOMESTIK

Keterangan gambar:
Aktivitas sektor manufaktur dapat mencerminkan kinerja suatu perekonomian. Tingkat produksi dapat meningkat maupun menurun seiring dengan dinamika dan perkembangan ekonomi.

INFOGRAFIS BAGIAN II

PEREKONOMIAN DOMESTIK

EKONOMI DOMESTIK

Tetap berdaya tahan ditopang pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabilitas ekonomi yang terjaga

Aliran masuk modal asing (*inflows*)

NT Rupiah Terkendali

TRY | KRW | IDR 2,3% | MYR

Imported Inflation

Inflasi dalam sasaran 4,0±1%

4,0±1% — 3,02% (yoy)

Ekspor Terbatas
s/d Tw-III 2016

Stimulus Fiskal
Naik pada Sm-I 2016

Defisit Transaksi Berjalan ↓

1,8% — Defisit Transaksi Berjalan — 2016

PDB ↑

5,0% — konsumsi swasta — 2016

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

ketahanan industri perbankan | SSK | stabilitas pasar keuangan terjaga

Pembiayaan Domestik ↑ Moderat

Rp modal kerja | Rp investasi | Rp konsumsi

BAGIAN II
Perekonomian Domestik

Perekonomian global pada 2016 yang masih belum sesuai dengan harapan memberikan tantangan bagi perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi global yang masih lemah dan harga komoditas yang rendah hingga triwulan III 2016 berisiko menurunkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi perlu mendapat perhatian karena tidak hanya menurunkan kinerja korporasi, tetapi juga memunculkan tantangan bagi upaya penguatan kinerja perbankan, peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan pengelolaan kebijakan fiskal. Tantangan akan menjadi semakin kompleks karena stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan dapat terganggu. Tekanan terhadap stabilitas ekonomi semakin berisiko meningkat pada 2016 karena di saat bersamaan ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi.

Dalam perkembangannya, penyesuaian ekonomi domestik yang baik dan ditopang oleh respons sinergi kebijakan yang solid mampu memitigasi risiko dari kondisi perekonomian dunia yang tidak menguntungkan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari 4,9% pada 2015 menjadi 5,0% pada 2016 ditopang oleh permintaan domestik sedangkan ekspor masih lemah. Kinerja tersebut ditopang oleh stimulus fiskal terutama pada semester I 2016, serta dampak positif pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial. Respons kebijakan makroekonomi dapat menjaga keyakinan konsumen dan membuat konsumsi rumah tangga tetap kuat. Perbaikan ekonomi 2016 juga mulai didukung perbaikan ekspor pada triwulan IV 2016, sejalan dampak positif kenaikan harga komoditas global. Perkembangan ini kemudian memberikan dampak pengganda ke sektor investasi swasta yang juga mulai meningkat. Secara spasial, perbaikan ekonomi terutama terlihat di Sumatera, Jawa dan Kalimantan sedangkan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sedikit melambat akibat kinerja sektor pertambangan yang belum kuat.

Perbaikan ekonomi pada 2016 ditopang oleh stimulus fiskal, sambil tetap menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal. Ruang stimulus fiskal cukup terbuka terutama pada semester I 2016, sebagai dampak positif berlanjutnya reformasi anggaran melalui pengalihan belanja subsidi energi ke belanja infrastruktur. Di tengah upaya memberikan stimulus fiskal tersebut, berbagai upaya juga dilakukan Pemerintah guna memperkuat struktur penerimaan pajak. Pemerintah pada 2016 menerapkan kebijakan amnesti pajak yang dinilai sangat berhasil dibandingkan dengan capaian banyak negara lain. Pada semester II 2016, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang konsolidatif guna tetap menjaga kredibilitas prospek kesinambungan fiskal. Berbagai arah kebijakan fiskal dapat mengendalikan defisit APBN-P 2016 tetap sehat yakni tercatat 2,5% dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan capaian 2015 sebesar 2,6% dari PDB. Sementara itu, rasio utang Pemerintah terhadap PDB pada tahun 2016 tetap terjaga rendah yakni 27,8%.

Pertumbuhan ekonomi 2016 yang meningkat didukung oleh inflasi yang terkendali. Inflasi 2016 tercatat cukup rendah di level 3,02% sehingga sama dengan capaian pada 2015 yang berada dalam rentang sasaran 4,0±1%. Perkembangan inflasi yang rendah dipengaruhi oleh permintaan agregat yang terkelola baik, nilai tukar rupiah yang menguat, dan ekspektasi inflasi yang menurun. Berbagai faktor tersebut berkontribusi kepada inflasi inti yang cukup rendah yakni 3,07% pada 2016. Inflasi yang rendah juga dipengaruhi inflasi kelompok *administered prices* yang rendah sebagai akibat penurunan harga beberapa komoditas energi strategis seperti BBM, tarif tenaga listrik untuk golongan pelanggan di atas 2.200 VA, dan LPG 12 kg. Sementara itu, inflasi *volatile food* cukup terkendali, meskipun sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian 2015 akibat gangguan pasokan terkait *La Nina*. Secara keseluruhan, koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi, termasuk melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi, baik di tingkat pusat (TPI) maupun daerah (TPID) berkontribusi positif pada inflasi 2016 yang rendah.

Stabilitas makroekonomi yang terkendali turut dipengaruhi nilai tukar rupiah yang bergerak menguat. Berbeda dengan mata uang negara kawasan yang mencatat depresiasi, nilai tukar rupiah pada 2016 secara rata-rata tercatat Rp 13.305 per dolar AS, atau menguat 0,7% dibandingkan dengan 2015. Sementara secara *point to point*, rupiah yang ditutup di level Rp13.473 per dolar AS pada akhir 2016 tercatat menguat 2,3% dibandingkan dengan level akhir 2015. Tren penguatan

rupiah terutama terlihat pada tiga triwulan pertama 2016, sebelum kemudian sempat tertekan menjelang akhir tahun. Penguatan rupiah tidak terlepas dari pengaruh ketahanan ekonomi domestik, termasuk defisit transaksi berjalan yang menurun, dan dampak positif dari program amnesti pajak Pemerintah yang meningkatkan keyakinan penanaman modal di Indonesia. Berbagai persepsi positif tersebut kemudian menyebabkan berlanjutnya aliran masuk modal asing dan akhirnya mendorong rupiah dalam tren menguat pada 2016.

Nilai tukar rupiah yang dalam tren menguat didukung oleh perbaikan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan ketahanan sektor eksternal. Perkembangan ekonomi global memberikan tantangan bagi perbaikan NPI 2016. Namun, proses penyesuaian domestik seperti konsolidasi internal korporasi, nilai tukar yang bergerak sesuai fundamental, serta persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, termasuk dampak amnesti pajak, dapat menopang perbaikan komponen utama NPI yakni neraca transaksi berjalan dan neraca transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan menurun menjadi 1,8% dari PDB yang dipengaruhi oleh perbaikan neraca perdagangan migas dan nonmigas. Sementara itu, transaksi modal finansial mencatat kenaikan surplus akibat peningkatan aliran modal masuk dipengaruhi oleh persepsi positif terhadap ketahanan ekonomi domestik, termasuk dampak kebijakan amnesti pajak. Secara keseluruhan, NPI pada 2016 mencatatkan surplus 12,1 miliar dolar AS dan mendorong peningkatan cadangan devisa menjadi 116,4 miliar dolar AS. Total utang luar negeri juga dalam posisi aman yakni 34% dari PDB, menurun dari 36% dari PDB pada 2015.

Pertumbuhan ekonomi 2016 yang meningkat juga ditopang oleh stabilitas sistem keuangan yang terjaga dengan risiko sistemik yang rendah. Kinerja perbankan secara umum tetap baik dan pasar keuangan domestik masih cukup stabil seperti tercermin dari Indeks stabilitas sistem keuangan yang masih rendah. Khusus industri perbankan, berbagai indikator menunjukkan ketahanan perbankan masih tetap kuat. Indikator likuiditas perbankan pada 2016 membaik, yang antara lain dipengaruhi oleh ekspansi keuangan pemerintah dan dampak pelonggaran GWM Bank Indonesia. Indikator kecukupan modal perbankan (CAR) juga meningkat menjadi 22,8%. Sementara itu, risiko kredit yang mencerminkan indikator rasio *Non Performing Loan* (NPL) masih cukup terkendali di bawah batas aman 5%, meskipun meningkat dari 2,5% menjadi 2,9% pada 2016. Namun, peningkatan NPL dan investasi swasta yang belum kuat terindikasi berpengaruh kepada pertumbuhan kredit perbankan yang belum kuat pada 2016 yakni 7,9%. Kredit perbankan yang belum kuat mendorong alternatif sumber pembiayaan dari nonbank seperti penerbitan saham, obligasi, NCD, dan MTN. Pembiayaan bruto nonbank bertumbuh signifikan dari 17,2% pada 2015 menjadi 76,4% pada 2016.

Stabilitas sistem keuangan pada 2016 yang terpelihara juga tidak terlepas dari kondisi sistem pembayaran nasional yang tetap baik. Berbagai indikator sistem pembayaran dalam tren meningkat ditopang oleh penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia dan industri yang tetap baik dan tanpa gangguan signifikan. Nilai transaksi sistem pembayaran masih dalam tren meningkat, dengan nilai transaksi ritel nontunai bertumbuh sebesar 15,5% pada 2016. Rasio nilai transaksi sistem pembayaran ritel terhadap nilai konsumsi pada 2016 juga meningkat yang mengindikasikan pergeseran preferensi masyarakat untuk menggunakan instrumen pembayaran nontunai dalam pengeluaran konsumsinya. Dari sisi sistem pembayaran tunai, pengelolaan uang rupiah tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai baik dari sisi jumlah, jenis pecahan, ketepatan waktu, serta kondisi yang layak edar. Berbagai perkembangan positif sistem pembayaran nasional 2016 tidak terlepas dari komitmen Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran untuk menjaga kelancaran proses transaksi bagi seluruh pelaku ekonomi sehingga dapat menopang perekonomian.

BAB 3
Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali berada dalam lintasan meningkat pada 2016. Penyesuaian ekonomi domestik yang baik serta respons kebijakan makroekonomi yang solid dapat memitigasi risiko dari ekonomi global dan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 5,0%. Pada triwulan IV 2016, beberapa perkembangan mengindikasikan peningkatan peran investasi nonbangunan dan ekspor dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan diharapkan akan terus berlanjut pada 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan pada 2016.

Keterangan gambar:
Kegiatan pertambangan batubara. Komoditas sumber daya alam memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena porsinya yang signifikan dalam struktur ekspor. Oleh karena itu, perubahan harga komoditas di pasar global selalu berdampak pada kegiatan ekonomi domestik.

Perekonomian dunia yang belum sesuai harapan memberikan tantangan bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016. Tantangan dipicu pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat, harga komoditas dunia yang masih rendah, dan ketidakpastian pasar keuangan dunia yang tetap tinggi. Berbagai risiko global menjadi perhatian penting bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat dan *terms of trade* Indonesia yang lemah akibat harga komoditas global yang masih rendah, berisiko menurunkan kinerja ekspor. Penanaman modal di Indonesia juga berisiko lebih rendah bila ketidakpastian pasar keuangan dunia tetap tinggi. Berbagai risiko tersebut perlu dicermati dan direspons dengan tepat karena dapat mengganggu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyesuaian ekonomi domestik yang baik dan respons kebijakan makroekonomi yang solid dapat memitigasi risiko ekonomi global tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kembali berada dalam lintasan meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 tercatat meningkat yakni dari 4,9% pada 2015 menjadi 5,0% pada 2016. Perkembangan positif ini tidak terlepas dari peran permintaan domestik yang dominan, khususnya melalui konsumsi Rumah Tangga (RT) yang tetap solid. Stimulus fiskal yang cukup besar sampai semester I 2016 serta ditopang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial oleh Bank Indonesia juga mendukung permintaan domestik tetap kuat. Sementara itu, peran investasi swasta terkait nonbangunan belum meningkat signifikan sampai triwulan III 2016 dipengaruhi proses konsolidasi internal korporasi swasta. Kinerja ekspor barang dan jasa riil juga masih lemah sampai triwulan III 2016 akibat permintaan dunia dan harga komoditas yang rendah. Peran investasi swasta non-bangunan dan ekspor mulai meningkat pada triwulan IV 2016 didukung perbaikan harga komoditas dunia, yang pada gilirannya dapat menahan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya stimulus fiskal.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2016 juga diikuti perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dari sisi ketenagakerjaan, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja pada 2016 turun dari 6,2% pada 2015 menjadi 5,6%. Perbaikan turut ditopang peningkatan daya serap PDB terhadap tenaga kerja. Tingkat kemiskinan juga menurun dari 11,2% pada 2015 menjadi 10,7% terhadap total penduduk. Perbaikan tingkat kemiskinan terutama terjadi pada wilayah perkotaan seiring membaiknya kinerja sektor industri, perdagangan besar dan eceran, serta jasa-jasa. Selain kedua capaian itu, ketimpangan pendapatan berkurang tercermin dari penurunan indikator rasio Gini dari 0,402 pada 2015 menjadi 0,397.

3.1. PDB PENGELUARAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 telah kembali dalam lintasan meningkat setelah dalam dua tahun terakhir cenderung melambat. Pada 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,0%, lebih tinggi dari capaian 2015 sebesar 4,9% (Tabel 3.1). Secara umum, kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 juga cukup baik di tengah kondisi banyak negara yang masih berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi dalam periode perekonomian dunia yang masih belum kuat.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi 2016 di tengah pelemahan ekonomi global tidak terlepas dari pengaruh penyesuaian pelaku ekonomi domestik dan respons kebijakan makroekonomi yang berjalan baik. Struktur perekonomian yang masih dominan ditopang konsumsi RT mampu meredam risiko perlambatan ekonomi akibat menurunnya kinerja sektor eksternal. Konsumsi RT

Tabel 3.1. Pertumbuhan PDB Pengeluaran

Persen, yoy

Komponen PDB	2013	2014	2015*	2016**				
				I	II	III	IV	Total
Konsumsi RT	5,43	5,15	4,96	4,97	5,07	5,01	4,99	5,01
Konsumsi LNPRT	8,18	12,19	-0,62	6,40	6,71	6,64	6,72	6,62
Konsumsi Pemerintah	6,75	1,16	5,32	3,43	6,23	-2,95	-4,05	-0,15
PMTB	5,01	4,45	5,01	4,67	4,18	4,24	4,80	4,48
Bangunan	6,74	5,52	6,11	6,78	5,07	4,96	4,07	5,18
Nonbangunan	0,63	1,58	1,95	-1,20	1,70	2,16	7,07	2,45
Ekspor Barang dan Jasa	4,17	1,07	-2,12	-3,29	-2,18	-5,65	4,24	-1,74
Impor Barang dan Jasa	1,86	2,12	-6,41	-5,14	-3,20	-3,67	2,82	-2,27
Produk Domestik Bruto	5,56	5,01	4,88	4,92	5,18	5,01	4,94	5,02

* Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS

tetap terjaga karena ditopang inflasi yang cukup rendah dan keyakinan rumah tangga yang membaik. Pada saat bersamaan, respons kebijakan fiskal yang ekspansif pada semester I 2016 serta kebijakan moneter yang melonggar juga menopang pertumbuhan ekonomi pada 2016. Secara keseluruhan berbagai penyesuaian ekonomi tersebut dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi pada 2016 tetap berdaya tahan dan meningkat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.

Permintaan domestik menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016. Permintaan domestik terutama ditopang konsumsi RT yang tetap solid dan bertumbuh sekitar 5% di setiap triwulan. Perkembangan ini cukup menggembirakan mengingat pangsa konsumsi RT terhadap PDB sekitar 55%. Selain itu, konsumsi pemerintah juga berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada semester I 2016. Peran konsumsi Pemerintah menurun pada semester II 2106 sejalan dengan proses konsolidasi fiskal yang ditempuh pemerintah. Peran investasi, khususnya bangunan, terlihat cukup baik sampai dengan triwulan III 2016 sejalan dengan pengaruh positif belanja infrastruktur pemerintah. Sementara itu, kinerja ekspor dan investasi nonbangunan belum cukup kuat sampai dengan triwulan III 2016, sebelum kemudian membaik pada triwulan akhir 2016.

Beberapa faktor menopang konsumsi RT tetap solid bertumbuh 5,0% pada 2016. Keyakinan konsumen seperti tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen yang kembali berada di atas ambang batas level optimis sejak awal tahun 2016 menjadi faktor penting untuk konsumsi tetap solid (Grafik 3.1). Perbaikan keyakinan konsumen tidak terlepas dari kontribusi tetap terjaganya stabilitas makroekonomi seperti inflasi yang rendah dan nilai tukar yang terkendali. Inflasi yang rendah pada gilirannya mendukung daya beli masyarakat tetap terjaga dan menopang konsumsi RT. Daya beli masyarakat yang terpelihara juga didukung stimulus fiskal oleh Pemerintah serta pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial oleh Bank Indonesia. Selain itu, konsumsi RT dari Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) juga meningkat sejalan dengan berbagai persiapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2017.

Perbaikan konsumsi RT terutama terlihat pada konsumsi nonmakanan-minuman sedangkan konsumsi makanan-minuman menurun. Konsumsi nonmakanan-minuman pada 2016 tercatat tumbuh 4,9%, meningkat dibandingkan dengan capaian pada 2015 sebesar 4,7% (Grafik 3.2). Kenaikan konsumsi nonmakanan-minuman terjadi baik di kelompok konsumsi barang sekunder maupun kelompok barang tersier. Perbaikan pada kelompok barang sekunder terlihat pada pertumbuhan belanja transportasi dan komunikasi yang meningkat dari 4,6% pada 2015 menjadi 5,7%. Perbaikan pada kelompok tersier tergambar pada pertumbuhan belanja pada jasa restoran dan hotel yang meningkat. Secara keseluruhan, perbaikan konsumsi nonmakanan ini cukup positif karena tidak hanya dapat mengindikasikan perbaikan struktur konsumsi RT, tetapi juga menjadi indikasi awal berlanjutnya perbaikan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Peran stimulus fiskal juga penting dalam menopang permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi 2016, terutama pada semester I 2016. Konsumsi pemerintah pada triwulan I dan II 2016 tercatat positif, bahkan pada triwulan II 2016 meningkat cukup kuat hingga sebesar 6,2% (yoy). Kondisi ini dipengaruhi oleh belanja pemerintah melalui belanja barang dan jasa yang meningkat tinggi pada paruh pertama 2016. Belanja pegawai juga meningkat signifikan dipengaruhi penyaluran gaji ke-14 bagi PNS pada bulan

Grafik 3.1. Indeks Keyakinan Konsumen

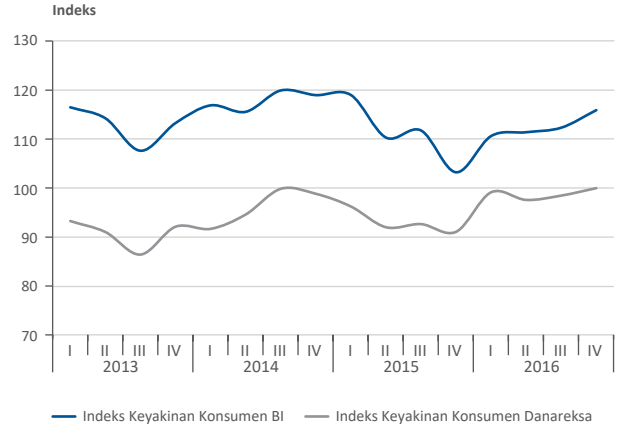

Sumber: Danareksa dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2. Perkembangan Jenis Konsumsi Rumah Tangga

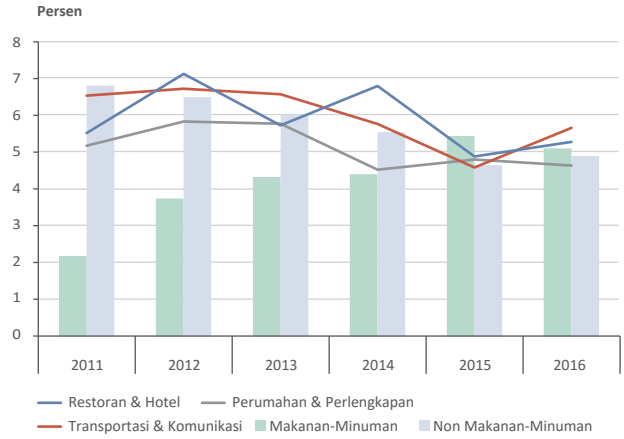

Sumber: BPS, diolah

Juni 2016. Selain belanja Pemerintah Pusat, konsumsi pemerintah pada semester I 2016 yang meningkat juga didorong belanja Pemerintah Daerah, yang kemudian turut mendorong peran konsumsi pemerintah pada semester I 2016.

Peran konsumsi pemerintah dalam menopang permintaan domestik menurun pada semester II 2016 sejalan proses konsolidasi fiskal yang ditempuh Pemerintah. Pada triwulan III dan IV 2016, pertumbuhan konsumsi pemerintah mencatat kontraksi masing-masing mencapai hampir 3,0% (yoy) dan 4,1% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi respons penghematan yang ditempuh Pemerintah melalui penghematan belanja sekitar 12,5% dibandingkan dengan alokasi anggaran pada APBN-P 2016. Pemotongan belanja dilakukan Pemerintah baik pada belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) maupun non K/L. Penghematan terbesar terdapat pada belanja non K/L yang mencapai 12,6%, yang sebagian bersumber dari subsidi non-energi. Dengan dinamika belanja pemerintah yang menurun pada semester II 2016 tersebut, konsumsi pemerintah secara keseluruhan tahun 2016 mengalami kontraksi 0,2%, jauh berbeda dengan kondisi tahun 2015 yang masih tumbuh positif sebesar 5,3%.

Investasi, khususnya investasi bangunan, juga bergerak searah dengan perkembangan konsumsi pemerintah. Investasi bangunan mencatat pertumbuhan tinggi pada semester I 2016 sejalan komitmen pemerintah memperbesar belanja infrastruktur untuk penguatan struktur ekonomi ke depan. Anggaran infrastruktur pemerintah pada 2016 mencapai 15,2% dari total anggaran, sedikit meningkat dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya yakni sebesar 14,2%. Dukungan kuat belanja infrastruktur pemerintah pada gilirannya mendorong pertumbuhan investasi bangunan pada triwulan I dan II 2016 menjadi cukup tinggi yakni 6,8% (yoy) dan 5,1% (yoy).

Investasi bangunan melambat pada semester II 2016. Pada triwulan III dan IV 2016, pertumbuhan investasi bangunan menurun masing-masing menjadi 5,0% (yoy) dan 4,1% (yoy). Penurunan kinerja investasi bangunan dipengaruhi langkah penghematan anggaran infrastruktur oleh pemerintah, yang antara lain ditempuh melalui perpanjangan jangka waktu pembangunan proyek infrastruktur. Selain itu, investasi bangunan swasta juga melambat tidak terlepas dari pengaruh permintaan agregat yang belum kuat serta pasokan properti komersial yang masih besar. Dinamika belanja infrastruktur pemerintah yang melambat pada semester II 2016 dan kemudian menurunkan kinerja investasi bangunan di periode yang sama, pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan investasi bangunan pada 2016 yang melambat dari 6,1% pada 2015 menjadi 5,2%.

Berbeda dengan investasi bangunan, investasi nonbangunan sampai dengan triwulan III 2016 belum kuat. Pertumbuhan investasi nonbangunan pada triwulan I 2016 bahkan mencatat kontraksi 1,2% (yoy), sebelum sedikit membaik pada triwulan II dan III 2016 menjadi 1,7% (yoy) dan 2,1% (yoy). Perkembangan investasi nonbangunan yang belum kuat tersebut dipengaruhi langkah konsolidasi internal yang ditempuh korporasi dalam merespons kondisi global dan domestik yang kurang menguntungkan. Dalam proses konsolidasi tersebut, korporasi lebih menempuh langkah efisiensi dan konsolidasi keuangan dibandingkan melakukan ekspansi usaha sehingga berdampak pada tertahannya investasi (Lihat Boks 3.1).

Investasi nonbangunan baru meningkat tinggi pada triwulan IV 2016 menjadi 7,1% (yoy). Pertumbuhan investasi nonbangunan pada triwulan IV 2016 cukup menggembirakan karena merupakan pertumbuhan tertinggi investasi nonbangunan tertinggi sejak 2013. Akselerasi pertumbuhan investasi non-bangunan pada triwulan IV 2016 antara lain dipengaruhi ekspektasi perbaikan ekonomi yang dipicu kenaikan harga komoditas sejak akhir triwulan III 2016. Konsolidasi internal korporasi juga mulai berkurang yang pada gilirannya mendorong kenaikan investasi yang terkait komoditas sumber daya alam seperti investasi alat angkut. Kenaikan tinggi investasi nonbangunan pada triwulan IV 2016 pada akhirnya mendorong total investasi nonbangunan 2016 tercatat lebih tinggi dari 2015 yakni 2,0% menjadi 2,5%. Namun, pertumbuhan total investasi 2016 tetap belum kuat yakni 4,5%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 2015 sebesar 5,0%.

Searah dengan kinerja investasi, pertumbuhan ekspor barang dan jasa juga belum kuat sampai dengan triwulan III 2016. Dalam periode tersebut, pertumbuhan tahunan ekspor mengalami kontraksi, dengan kontraksi yang cukup besar terjadi pada triwulan III 2016 yakni sebesar 5,7% (yoy). Perkembangan ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat dan harga komoditas yang masih rendah sampai dengan triwulan III-2016. Penurunan ekspor barang terjadi baik pada ekspor migas maupun ekspor nonmigas.

Kinerja ekspor mulai membaik pada triwulan IV 2016 yang bertumbuh positif 4,2% (yoy), cukup tinggi bila dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir. Perbaikan kinerja ekspor pada triwulan IV 2016 didorong peningkatan harga komoditas nonmigas, termasuk komoditas andalan ekspor Indonesia seperti batubara, kelapa sawit, karet, dan tembaga. Kenaikan harga komoditas mendorong ekspor komoditas sumber daya alam meningkat sehingga

berkontribusi mendorong kenaikan pertumbuhan ekspor pertambangan. Ekspor riil pertambangan mencapai 8,3% pada triwulan IV 2016 atau masih terkontraksi 10,8% untuk keseluruhan 2016. Capaian ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi 14,1% (Grafik 3.3).

Kenaikan ekspor, pada triwulan IV 2016 juga didorong ekspor manufaktur, yang pada triwulan IV 2016 mencatat pertumbuhan riil sebesar 6,7%. Perbaikan ekspor manufaktur pada triwulan IV 2016 didorong kenaikan permintaan dari Amerika Serikat dan Eropa. Perbaikan kinerja ekspor manufaktur juga bersumber dari kenaikan permintaan pasar Asia, yang memiliki pangsa terbesar dalam komposisi ekspor Indonesia yakni sekitar 65% dari total ekspor. Dalam perkembangannya, permintaan ekspor manufaktur ke Tiongkok dan Jepang untuk produk kimia dasar dan bubur kertas membaik. Ekspor ke ASEAN, khususnya ke Thailand dan Filipina, juga meningkat didorong peningkatan permintaan kendaraan *Low Cost Green Car* (LCGC).

Permintaan domestik yang meningkat berkontribusi pada dinamika impor Indonesia pada 2016. Kontraksi pertumbuhan impor secara triwulanan terus menurun sejalan dengan perbaikan permintaan domestik. Pertumbuhan impor barang dan jasa bahkan pada triwulan IV 2016 sudah kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,82% (yoy), meskipun secara keseluruhan tahun 2016 masih mengalami kontraksi 2,3%. Berdasarkan kelompok barang pada impor barang nonmigas, kontraksi pertumbuhan impor barang modal terus berkurang, sama seperti pertumbuhan impor bahan baku yang juga terus meningkat hingga mencapai 16,0% pada triwulan IV 2016 (Grafik 3.4). Sementara itu, pertumbuhan impor barang konsumsi tetap positif di sepanjang tahun 2016.

Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Riil

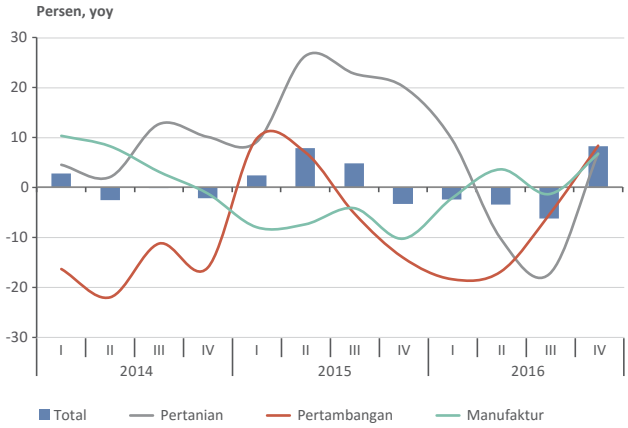

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.4. Pertumbuhan Impor Nonmigas Riil

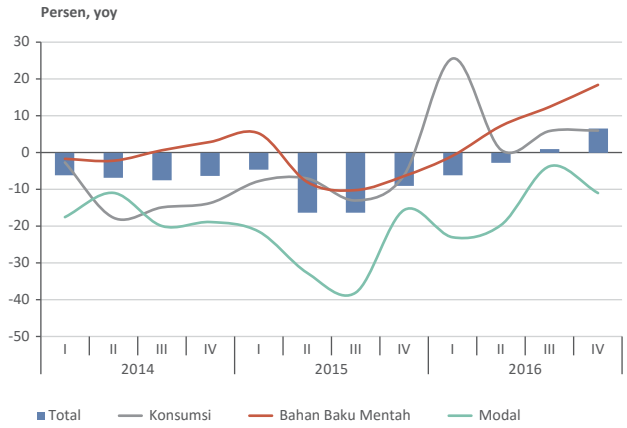

Sumber: Bank Indonesia

3.2. PDB LAPANGAN USAHA

Perkembangan PDB dari sisi lapangan usaha (LU) memperkuat asesmen peran dominan permintaan domestik, termasuk peran kebijakan fiskal, dalam menopang pertumbuhan ekonomi 2016. Beberapa sektor yang terkait dengan permintaan domestik seperti LU Pengadaan listrik, LU Perdagangan, LU Transportasi, dan LU Penyediaan Akomodasi mencatat kenaikan pertumbuhan pada 2016. LU Konstruksi dan LU Real Estate juga meningkat khususnya pada semester I 2016. Sementara itu, LU Pertanian masih menurun sejalan dengan dampak harga komoditas dunia yang masih rendah hingga triwulan III 2016. LU Pertambangan sudah meningkat pada 2016, tetap belum kuat dipengaruhi harga komoditas pertambangan yang sampai triwulan III 2016 masih rendah.

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada 2016 tercatat tumbuh 3,9%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 2,6% (Tabel 3.2). Perkembangan ini sejalan dengan peran permintaan domestik, khususnya konsumsi RT, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 2016. Pada semester I 2016, pertumbuhan perdagangan besar dan eceran meningkat, antara lain juga didukung penyesuaian siklus Lebaran dan pencairan gaji ke-13 dan 14 yang lebih cepat. Selain itu, pengaruh daya beli masyarakat yang tetap terjaga sejalan dengan inflasi yang rendah juga mendukung perbaikan kinerja pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran.

Sejalan dengan LU Perdagangan, pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga meningkat yakni dari 4,3% pada 2015 menjadi 4,9%. Perkembangan ini dipengaruhi kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara yang menjadi hampir 12 juta orang, sehingga tumbuh

Tabel 3.2. Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha

Persen, yoy

Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016**				
				I	II	III	IV	Total
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,20	4,24	3,77	1,47	3,44	3,03	5,31	3,25
Pertambangan dan Penggalian	2,53	0,43	-3,42	1,20	1,15	0,29	1,60	1,06
Industri Pengolahan	4,37	4,64	4,33	4,68	4,63	4,52	3,36	4,29
Pengadaan Listrik	5,23	5,90	0,90	7,50	6,24	4,88	3,14	5,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,32	5,24	7,07	5,39	4,12	2,36	2,66	3,60
Konstruksi	6,11	6,97	6,36	6,76	5,12	4,95	4,21	5,22
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	4,81	5,18	2,59	4,15	4,10	3,59	3,90	3,93
Transportasi dan Pergudangan	6,97	7,36	6,68	7,90	6,91	8,26	7,85	7,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,80	5,77	4,31	5,68	4,96	4,68	4,47	4,94
Informasi dan Komunikasi	10,39	10,12	9,69	7,58	9,33	8,95	9,57	8,87
Jasa Keuangan	8,76	4,68	8,59	9,32	13,59	9,04	4,18	8,90
Real Estate	6,54	5,00	4,11	4,87	4,76	3,97	3,65	4,30
Jasa Perusahaan	7,91	9,81	7,69	8,14	7,57	6,95	6,83	7,36
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,56	2,38	4,63	4,64	4,43	3,80	0,27	3,19
Jasa Pendidikan	7,44	5,47	7,33	5,35	5,14	1,95	3,12	3,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	7,96	7,96	6,68	6,49	5,05	4,49	4,10	5,00
Jasa Lainnya	6,40	8,93	8,08	7,91	7,88	7,71	7,69	7,80
Pajak Dikurangi Subsidi Atas Produk	21,80	5,08	32,24	11,84	13,35	22,44	26,74	19,31
Produk Domestik Bruto	**5,56**	**5,01**	**4,88**	**4,92**	**5,18**	**5,01**	**4,94**	**5,02**

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS

hingga 15,0% dibandingkan dengan kunjungan tahun pada 2015. Pertumbuhan wisatawan mancanegara tersebut merupakan yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir (Grafik 3.5). Beberapa upaya yang ditempuh untuk terus mendukung kinerja antara lain penambahan investasi jumlah kamar hotel dan perluasan destinasi wisata baru, termasuk dengan pembentukan 10 kawasan strategis pariwisata nasional.

Pengaruh stimulus fiskal kepada permintaan domestik juga terlihat pada kinerja beberapa LU. Pertumbuhan LU Pengadaan Listrik pada 2016 meningkat cukup kuat yakni 5,4%, jauh lebih tinggi dari capaian tahun 2015 sebesar 0,9%. Pertumbuhan LU Konstruksi cukup tinggi pada semester I 2016 didorong pembangunan proyek infrastruktur pemerintah yang cukup besar. Namun, pertumbuhan LU Konstruksi dalam perkembangannya kemudian menurun cukup dalam pada semester II 2016 dipengaruhi proses konsolidasi fiskal yang ditempuh Pemerintah. Penurunan LU Konstruksi pada semester II 2016 tercermin pada penjualan semen yang mengalami kontraksi pada periode yang sama (Grafik 3.6). Kondisi ini pada gilirannya membawa pertumbuhan LU Konstruksi untuk keseluruhan 2016

Grafik 3.5. Perkembangan Kepariwisataan

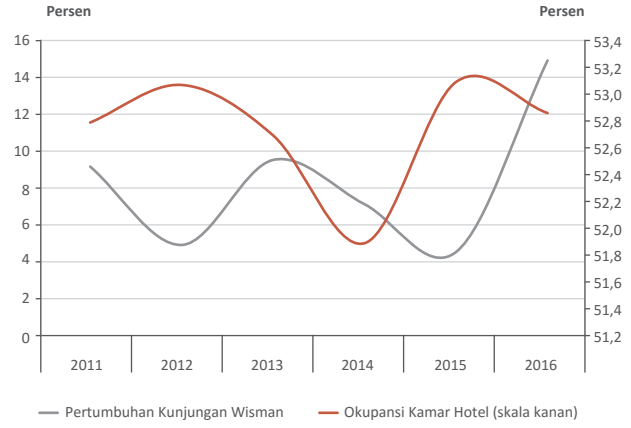

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.6. Konsumsi Semen Domestik

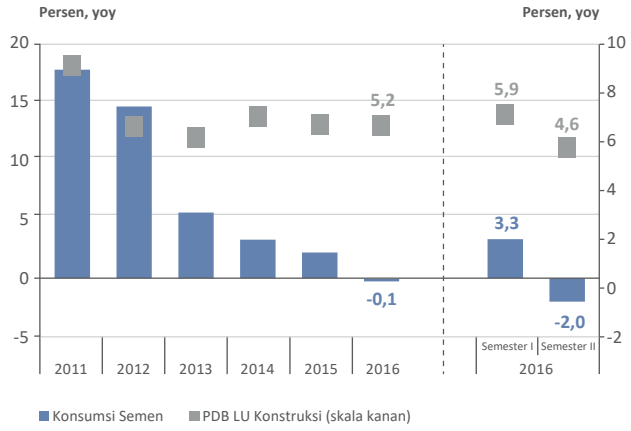

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

tercatat hanya 5,2%, lebih lambat dari catatan pada 2015 sebesar 6,3%.

Kinerja LU Pertambangan telah kembali meningkat pada 2016. Pertumbuhan LU Pertambangan pada 2016 tercatat sebesar 1,1% pada 2016, jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian sebelum yang mencatat kontraksi 3,4%. Peningkatan kinerja LU Pertambangan tidak terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor minerba mentah sejak 2015. Kebijakan ini pada gilirannya mendorong beberapa perusahaan untuk membangun *smelter* biji logam dan sebagian mulai dioperasikan pada pertengahan tahun 2016. Perkembangan tersebut kemudian berkontribusi pada peningkatan produksi beberapa komoditas seperti nikel. Perbaikan LU Pertambangan juga didukung kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA), khususnya harga batubara, pada triwulan IV 2016. Kenaikan harga komoditas dunia tersebut cukup penting karena harga komoditas SDA yang rendah sebelum triwulan IV 2016 telah menahan perbaikan kinerja LU Pertambangan.

Berbeda dengan berbagai LU yang terkait dengan permintaan domestik dan LU Pertambangan, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada 2016 terlihat menurun. Pada 2016, pertumbuhan LU ini hanya 3,3%, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya 3,8%. Perkembangan ini pada satu sisi tidak terlepas dari dampak harga komoditas global yang masih rendah pada 2016. Harga kelapa sawit yang rendah sampai dengan triwulan III 2016 berdampak pada menurunnya kinerja LU ini. Pada sisi lain, penurunan kinerja LU ini juga dipengaruhi fenomena *La Nina* sehingga menurunkan produksi pertanian baik pada tanaman bahan pangan maupun perkebunan. Kinerja LU ini baru meningkat tinggi pada triwulan III 2016 hingga mencapai 5,3% (yoy) sebagai dampak positif kenaikan harga komoditas perkebunan dunia, termasuk kelapa sawit.

Kinerja eksternal yang belum sepenuhnya pulih dibarengi dengan strategi konsolidasi fiskal pada semester II 2016 berkontribusi pada kinerja LU Industri yang belum banyak meningkat pada 2016. Pertumbuhan LU Industri pada 2016 tercatat sebesar 4,3%, tidak berbeda dengan capaian tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi kinerja sektor eksternal yang belum kuat sehingga berdampak pada capaian beberapa sub industri, seperti furnitur dan industri tekstil yang belum kuat sampai dengan triwulan III 2016. Beberapa sub-LU ini baru kembali meningkat pada triwulan IV 2016 sebagai dampak tidak langsung kenaikan harga komoditas dunia. Hubungan stimulus fiskal terhadap LU Industri juga cukup erat pada 2016. Stimulus fiskal yang besar pada semester I 2016 mendorong kinerja LU Industri pada triwulan I dan II 2016 cukup kuat masing-masing sebesar 4,7% (yoy) dam 4,6% (yoy). Namun, kinerja LU Industri menurun pada semester II 2016 bersamaan dengan pengaruh konsolidasi fiskal yang ditempuh Pemerintah.

3.3. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2016 berkontribusi pada perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 6,2% pada 2015 menjadi 5,6% pada 2016. Kondisi ini dipengaruhi kenaikan pekerja penuh waktu yang meningkat dari 65,8% pada 2015 menjadi 68,7% dari total angkatan kerja pada Agustus 2016. Perbaikan tersebut juga ditopang kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yakni dari 65,8% pada Agustus 2015 menjadi 66,3% pada Agustus 2016 (Tabel 3.3). Secara keseluruhan, hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga-kerja antara lain terlihat pada *job vacancy online* yang sejak awal tahun 2016 cenderung meningkat sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi (Grafik 3.7).

Beberapa perkembangan positif terkait daya serap tenaga kerja juga mengemuka pada 2016. Data menunjukkan pada 2016 perekonomian domestik mampu menyerap tambahan tenaga kerja sekitar 3,5 juta orang. Daya serap yang tinggi tersebut antara lain dipengaruhi peran Lapangan Usaha (LU) Jasa, LU Keuangan, LU Transportasi, dan LU Perdagangan yang banyak menyerap tenaga kerja pada 2016 (Grafik 3.8).

Tabel 3.3. Angkatan Kerja dan Pengangguran

Kegiatan Utama	2014		2015		2016	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Penduduk Usia Produktif (15+, juta jiwa)	181,2	183,0	184,6	186,1	187,6	189,1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,2	66,6	69,5	65,8	68,1	66,3
Angkatan Kerja (juta jiwa)	125,3	121,9	128,3	122,4	127,7	125,4
Pekerja Penuh (%)	64,8	64,7	66,4	65,8	66,0	68,7
Pekerja Paruh Waktu (%)	21,1	21,4	20,0	20,1	20,3	18,5
Setengah Penganggur (%)	8,4	7,9	7,8	8,0	8,2	7,2
Penganggur Terbuka (%)	5,7	5,9	5,8	6,2	5,5	5,6

Sumber: BPS

Grafik 3.7. Perkembangan *Job Vacancy Online* dan PDB

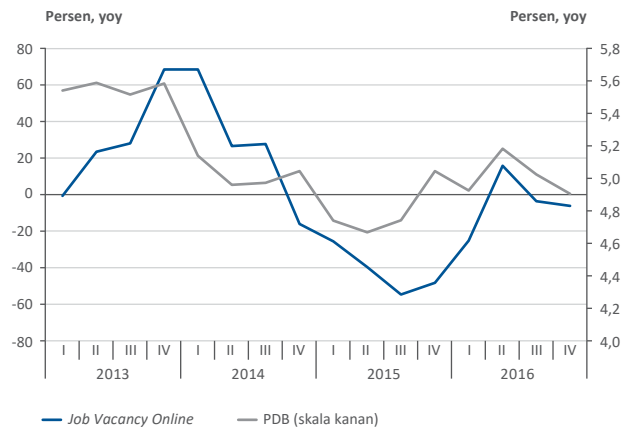

Sumber: Bank Indonesia dan BPS, diolah

Grafik 3.9. Pangsa dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kota dan Desa

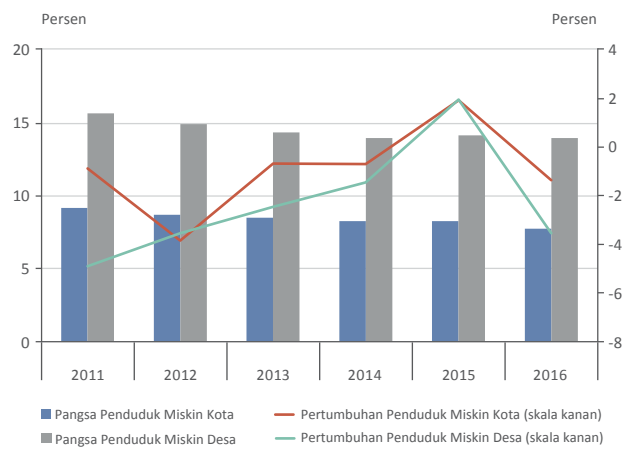

Sumber: BPS, diolah

Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan daya serap tenaga kerja di LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Perdagangan Besar dan Eceran ialah dampak positif perkembangan pesat bisnis *online* baik dari aspek *e-commerce* maupun aspek jasa transportasi berbasis aplikasi. Perkembangan positif lain ialah penurunan tingkat pengangguran terjadi pada hampir seluruh tingkat pendidikan, khususnya menengah dan tinggi.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi juga berdampak positif pada penurunan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada 2016 berkurang sekitar 780 ribu orang sehingga menjadi 27,8 juta orang pada 2016. Perkembangan ini kemudian berdampak pada penurunan pangsa penduduk miskin terhadap total penduduk di Indonesia yakni dari 11,2% pada 2015 menjadi 10,7%. Perbaikan tingkat kemiskinan terutama terjadi pada wilayah perkotaan sedangkan perbaikan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih terbatas. Pangsa penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat 7,7% terhadap total penduduk di kota, menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 sebesar 8,2% (Grafik 3.9).

Ketimpangan pendapatan juga menurun pada 2016 sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta perbaikan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan positif ini tercermin pada penurunan rasio Gini dari 0,402 pada 2015 menjadi menjadi 0,397. Penurunan ketimpangan pendapatan terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan, sebagaimana terlihat pada penurunan rasio Gini (Grafik 3.10). Perkembangan positif di pedesaan antara lain dipengaruhi dampak positif Program Dana Desa dan Dana Bantuan Sosial yang ditempuh oleh Pemerintah.

Grafik 3.8. Perubahan Jumlah Tenaga Kerja Sektoral

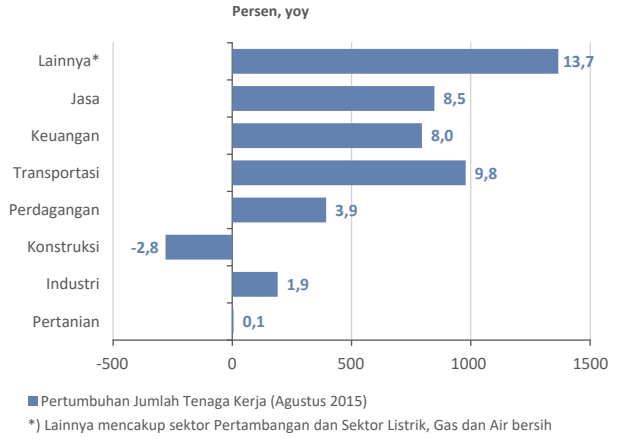

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.10. Rasio Gini dan Garis Kemiskinan di Desa dan Kota

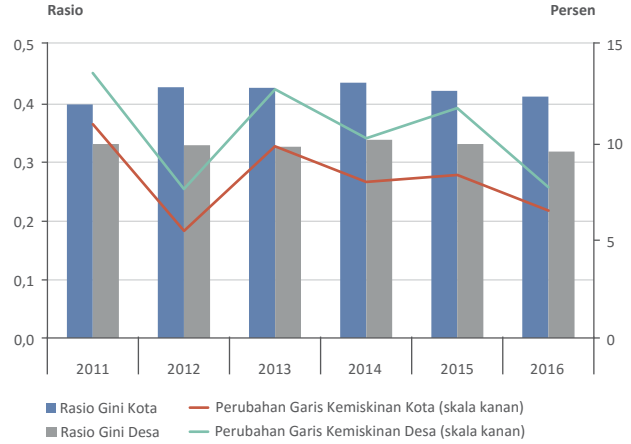

Sumber: BPS

Boks 3.1. Konsolidasi Korporasi dan Kinerja Investasi

Perlambatan pertumbuhan ekonomi berimbas pada kinerja keuangan korporasi. Penurunan kinerja keuangan korporasi pada tahun 2015 memaksa korporasi melakukan penyehatan neraca keuangannya. Kinerja penjualan yang menurun serta biaya operasional yang sulit ditekan membuat laba bersih perusahaan menurun. Hal ini merupakan imbas dari fase perlambatan ekonomi yang telah berlangsung semenjak tahun 2012 setelah *boom* harga komoditas SDA dan terus berlanjut hingga mencapai titik terdalam pada pertengahan tahun 2015 (Grafik 1). Namun, di tengah kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, sebagian korporasi memilih untuk mengompensasi pemilik modal dengan dividen yang lebih besar bila dibandingkan dengan perolehan laba nominal.[1] Dalam kondisi kinerja laba yang negatif, korporasi berbasis komoditas SDA juga tetap membagikan dividen (Grafik 2). Perilaku korporasi tersebut turut berpengaruh pada kemampuan pembiayaan internal untuk investasi pada tahun 2016.

Sebagian korporasi melakukan konsolidasi keuangan melalui berbagai efisiensi, termasuk membatasi rencana ekspansi. Efisiensi pada belanja modal tercermin dari menurunnya rasio utang terhadap modal atau *Debt to Equity Ratio* (DER) secara signifikan di tahun 2016 (Grafik 3). Neraca korporasi juga mengindikasikan lebih rendahnya penarikan utang. Konsolidasi melalui penghematan belanja modal ditempuh dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menambah investasi yang belum mendesak. Hal ini sejalan dengan masih memadainya kapasitas terpasang di tengah perbaikan ekonomi yang masih moderat. Selain melakukan pengurangan belanja modal, konsolidasi juga diwujudkan dengan efisiensi modal kerja dengan menunda pembayaran utang usaha ke pihak ketiga untuk menjaga arus kas. Penghematan dalam menggunakan modal kerja juga berpengaruh pada pembayaran biaya bunga yang lebih rendah. Langkah korporasi untuk melakukan konsolidasi keuangan internal tersebut turut berimbas pada permintaan kredit tahun 2016 yang masih belum kuat.

Dinamika neraca keuangan perusahaan berbasis komoditas SDA khususnya pertambangan membaik pada semester II 2016 seiring kenaikan harga komoditas, sehingga mendorong investasi. Kendati pertumbuhan volume

Grafik 1. Kinerja Penjualan Emiten dan PDB

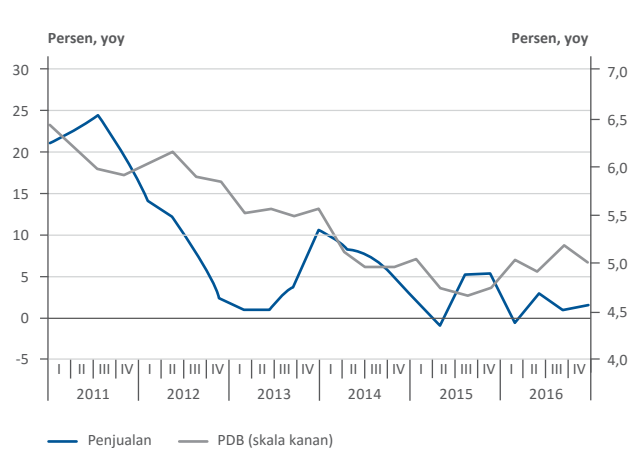

Sumber: Bloomberg, BPS, diolah

Grafik 2. Rasio Dividen terhadap Laba di Laporan Akhir 2015

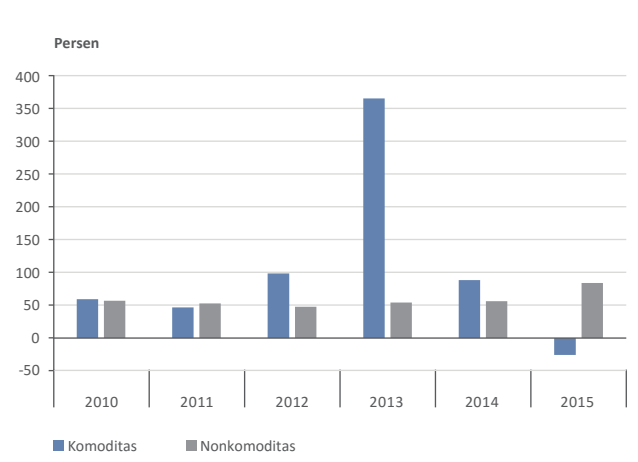

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 3. Rasio Utang terhadap Modal dan *Account Payable Days*

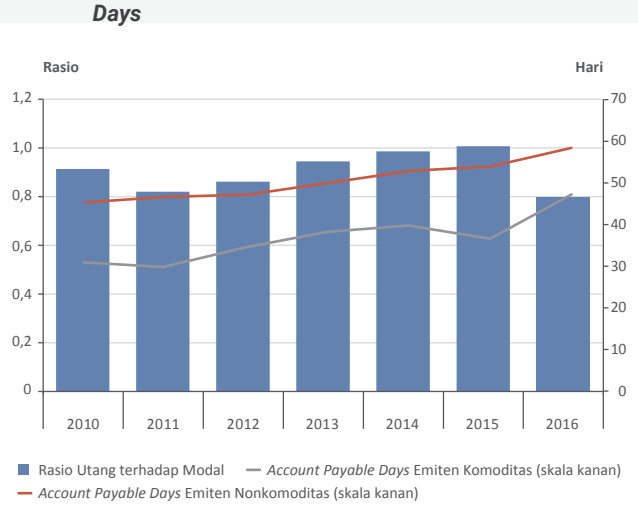

Sumber: Bloomberg, diolah

1 Tercermin dari rasio dividen terhadap laba (*dividend payout ratio*) yang direncanakan pada akhir tahun 2015.

Grafik 4. **Rasio EBITDA dan Penjualan Alat Berat Pertambangan**

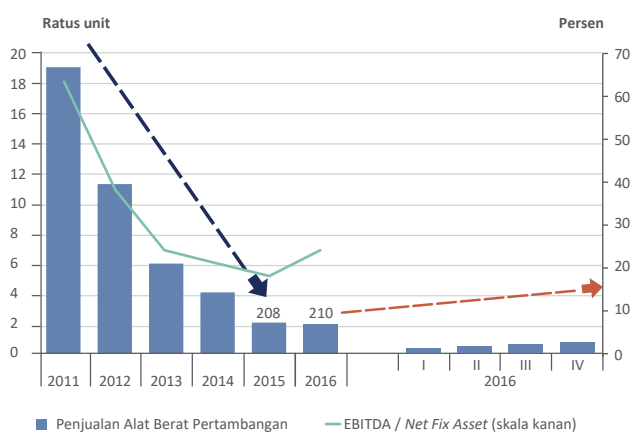

Sumber: Bloomberg, United Tractors, diolah

Grafik 5. **Rasio Perputaran Barang Inventori Korporasi Nonkomoditas**

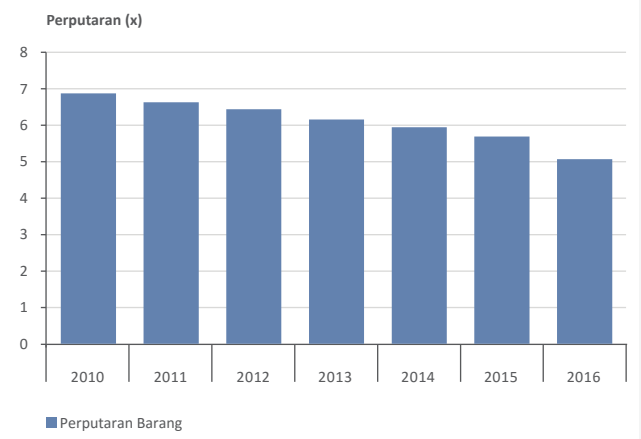

Sumber: Bloomberg, diolah

penjualan belum menunjukkan angka yang positif, namun faktor harga mendorong membaiknya kondisi keuangan korporasi dibandingkan dengan perkiraan pada awal tahun. Membaiknya kondisi keuangan korporasi membuat kemampuan untuk melakukan investasi kembali meningkat sebagaimana tercermin pada rasio EBITDA (*Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortization*) terhadap nilai bersih aset tetap. Perkembangan ini mendorong peningkatan investasi nonbangunan berupa peremajaan alat berat oleh sejumlah korporasi berbasis komoditas khususnya di pertambangan (Grafik 4). Penggantian aset tetap perusahaan di sektor SDA tersebut didorong oleh rata-rata umur alat berat yang telah saatnya diganti untuk menjaga produktivitas, disamping nilai bukunya yang terus mengalami penurunan. Ke depan, perbaikan harga komoditas SDA berpotensi mendorong berlanjutnya peningkatan investasi sektor komoditas.

Konsolidasi keuangan untuk perusahaan nonkomoditas diperkirakan berakhir pada tahun 2016 dan membuka potensi peningkatan investasi pada 2017. Hal ini terindikasi dari rasio EBITDA terhadap nilai bersih aset tetap korporasi nonkomoditas yang telah meningkat. Peningkatan tersebut mengindikasikan kemampuan sekaligus tuntutan untuk melakukan penggantian ataupun penambahan aset tetap korporasi. Kendati rasio perputaran barang inventori dari korporasi nonkomoditas masih lambat, ke depan perputaran barang diperkirakan lebih cepat sehingga semakin mendorong kebutuhan investasi (Grafik 5). Optimisme ini didukung oleh dampak *spillover* dari kenaikan harga komoditas yang berpotensi mendorong peningkatan daya beli.

Investasi pada tahun 2017 diperkirakan akan lebih baik sejalan dengan berakhirnya konsolidasi keuangan korporasi. Keyakinan tersebut diperkuat dari indikasi peningkatan nilai merger dan akuisisi yang telah berlangsung pada tahun 2016 (Tabel 1). Maraknya investasi merger dan akuisisi menandakan keyakinan pelaku usaha dalam melakukan ekspansi pada tahun berikutnya. Hal ini umumnya dilakukan setelah perbaikan internal perusahaan yang diakuisisi. Selain itu, transmisi pelonggaran kebijakan moneter diperkirakan masih berlanjut sehingga turut memberikan insentif bagi korporasi untuk melakukan ekspansi usaha.

Tabel 1. **Nilai Investasi Jenis Merger dan Akuisisi**

Indonesia *Deal Summary*	2013		2014			2015			2016		
	Vol	Nilai (Juta dolar AS)	Vol	Nilai (Juta dolar AS)	%(yoy)	Vol	Nilai (Juta dolar AS)	%(yoy)	Vol	Nilai (Juta dolar AS)	%(yoy)
Total Lintas Batas	59	6.911	57	3.192	-54	81	1.375	-57	23	893	-35
inbound	48	2.797	49	2.886	0,03	68	1.037	-64	43	853	-18
outbound	11	4.114	8	306	-0,93	13	338	10	5	40	-88
Domestik	30	3.405	18	1.874	-0,45	23	196	-90	71	1.083	453
Total Meger dan Akuisisi	89	10.316	75	5.066	-51	105	1.571	-69	94	1.976	26

[1] Data 2014 hanya tersedia dari bulan Juni. Periode rata-rata adalah Juni s.d. Desember 2014
Sumber : Puff & Phelps, 2016

BAB 4
Neraca Pembayaran Indonesia

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2016 mencatat surplus cukup besar, di tengah kondisi global yang tidak menguntungkan. Surplus NPI ditopang rendahnya defisit Transaksi Berjalan dan tingginya surplus Transaksi Modal dan Finansial. Surplus NPI cukup menggembirakan karena mengindikasikan proses penyesuaian perekonomian domestik yang baik dalam merespons perekonomian global serta persepsi investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Perbaikan kinerja NPI pada 2016 juga memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia, antara lain tercermin pada peningkatan posisi cadangan devisa menjadi sebesar 116,4 miliar dolar AS.

Keterangan gambar:
Aktivitas bongkar muat di pelabuhan dapat menjadi indikator kegiatan ekspor-impor yang kemudian memengaruhi kinerja neraca pembayaran. Pada 2016, Neraca Pembayaran Indonesia mencatat perbaikan yang menggembirakan di tengah kondisi ekonomi global yang belum kondusif.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2016 membaik signifikan, di tengah kondisi global yang tidak menguntungkan akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas yang masih rendah hingga triwulan III 2016. Setelah pada 2015 mengalami defisit sebesar 1,1 miliar dolar AS, NPI 2016 mencatatkan surplus cukup besar yakni 12,1 miliar dolar AS (Grafik 4.1). Surplus ditopang penurunan defisit Transaksi Berjalan (TB) dan peningkatan surplus Transaksi Modal dan Finansial (TMF). Defisit TB terjaga dalam level yang sehat yakni tercatat sebesar 1,8% terhadap PDB, atau menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang mencapai 2,0% terhadap PDB. Sementara itu, surplus TMF juga meningkat signifikan menjadi 29,2 miliar dolar AS, dari capaian tahun sebelumnya sebesar 16,9 miliar.

Perkembangan positif NPI 2016 cukup menggembirakan karena mengindikasikan beberapa aspek ketahanan ekonomi domestik. Satu sisi, penurunan defisit TB menunjukkan proses penyesuaian perekonomian domestik berjalan baik sehingga dapat merespons kondisi perekonomian global yang tidak sesuai harapan. Pelaku swasta domestik dapat mengendalikan permintaan impor sebagai respons atas kondisi permintaan domestik dan kinerja ekspor yang belum kuat sampai dengan triwulan III 2016. Pelaku swasta juga memiliki fleksibilitas tinggi memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas dunia pada triwulan IV 2016 sehingga dapat mendorong kenaikan ekspor pada triwulan terakhir 2016. Sisi lain, surplus TMF juga mengindikasikan persepsi investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap kuat, meskipun saat bersamaan ketidakpastian dunia masih tinggi. Persepsi positif investor asing yang terjaga dengan baik dipengaruhi stabilitas perekonomian yang terkendali dengan dukungan sinergi kebijakan antar otoritas yang semakin solid. Berbagai persepsi positif pada gilirannya mendorong aliran masuk modal asing ke Indonedia sehingga mendorong TMF mencatatkan surplus yang tinggi pada 2016.

Secara keseluruhan, perbaikan kinerja NPI pada 2016 memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia. Surplus NPI berkontribusi pada peningkatan posisi cadangan devisa pada 2016 dari 105,9 miliar dolar AS pada akhir tahun 2015 menjadi sebesar 116,4 miliar dolar AS (Tabel 4.1). Posisi cadangan devisa tersebut cukup kuat karena setara dengan 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Indikator-indikator ketahanan eksternal lain dari sisi Utang Luar Negeri (ULN) juga membaik. Rasio ULN terhadap PDB pada 2016 turun dari 36,0% pada 2015 menjadi 34,0%, sehingga masih tergolong sehat dan dalam kisaran negara *peers*. Struktur ULN juga tergolong sehat tercermin pada komposisi ULN jangka panjang yang lebih dominan yakni mencapai hampir 87%. Demikian pula dengan kewajiban neto Posisi Investasi Indonesia (PII) pada 2016 juga menurun dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya (Tabel 4.2).

Grafik 4.1. Transaksi Berjalan, Transaksi Modal dan Finansial, dan Neraca Keseluruhan NPI

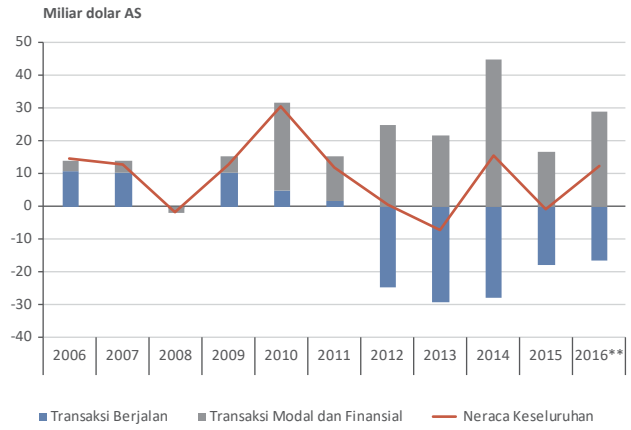

**Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

4.1. TRANSAKSI BERJALAN

Pada 2016, defisit TB kembali menurun sehingga berada dalam level yang semakin sehat. Defisit TB tercatat turun menjadi 16,3 miliar dolar AS (1,8% terhadap PDB) dari 17,5 miliar dolar AS (2,0% terhadap PDB) pada tahun 2015 (Grafik 4.2). Dari dinamika triwulanan, penurunan defisit TB banyak dipengaruhi capaian pada triwulan IV 2016. Pada triwulan terakhir 2016, kinerja ekspor nonmigas meningkat tinggi mencapai 36,3 miliar dolar AS, dipicu dampak kenaikan harga komoditas dunia. Kontribusi positif kenaikan ekspor nonmigas kemudian mendorong defisit TB pada triwulan IV 2016 turun tajam menjadi 0,8% terhadap PDB sehingga menjadi defisit TB terendah sejak 2012.

Defisit TB yang rendah pada tahun 2016 didukung meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas serta menurunnya defisit neraca perdagangan migas dan defisit neraca jasa. Surplus neraca perdagangan nonmigas naik ditopang kinerja ekspor nonmigas, terutama pada triwulan IV 2016 yang membaik signifikan akibat kenaikan harga komoditas dunia. Pertumbuhan impor nonmigas yang masih terkendali turut mendukung peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas. Sementara itu, penurunan defisit neraca perdagangan migas dipengaruhi penurunan impor migas sebagai dampak positif rendahnya harga minyak dunia dan positifnya dampak kebijakan reformasi energi. Adapun perbaikan neraca jasa dipengaruhi penurunan pembayaran jasa transportasi barang (*freight*) sejalan kegiatan impor yang masih terbatas, serta kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Tabel 4.1. Neraca Pembayaran Indonesia

Juta dolar AS

Rincian	2015				Total	2016				Total **
	I	II	III	IV		I*	II*	III*	IV**	
I. Transaksi Berjalan	**-4.314**	**-4.279**	**-4.224**	**-4.703**	**-17.519**	**-4.651**	**-5.203**	**-4.680**	**-1.812**	**-16.347**
A. Barang, neto	**3.198**	**4.371**	**4.248**	**2.232**	**14.049**	**2.648**	**3.749**	**3.923**	**5.070**	**15.390**
- Ekspor	37.962	39.931	36.192	35.038	149.124	33.039	36.282	34.891	40.229	144.441
- Impor	-34.764	-35.561	-31.945	-32.806	-135.076	-30.391	-32.533	-30.967	-35.160	-129.051
1. Barang dagangan umum	2.826	4.056	4.154	2.283	13.319	2.340	3.517	3.706	5.240	14.803
- Ekspor	37.586	39.612	35.835	34.692	147.725	32.687	35.977	34.554	39.843	143.061
- Impor	-34.760	-35.557	-31.680	-32.409	-134.406	-30.347	-32.460	-30.848	-34.604	-128.258
a. Nonmigas	3.947	5.932	6.158	2.986	19.023	3.244	4.959	5.042	6.381	19.625
- Ekspor	33.068	34.722	32.038	30.713	130.541	29.836	32.752	31.292	36.293	130.173
- Impor	-29.122	-28.790	-25.880	-27.727	-111.518	-26.592	-27.793	-26.250	-29.912	-110.548
b. Minyak	-3.184	-3.658	-3.521	-2.743	-13.106	-2.030	-2.463	-2.621	-2.588	-9.702
- Ekspor	1.927	2.611	1.786	1.510	7.833	1.221	1.816	1.631	1.600	6.267
- Impor	-5.111	-6.268	-5.307	-4.253	-20.938	-3.250	-4.279	-4.252	-4.188	-15.969
c.Gas	2.063	1.781	1.517	2.041	7.402	1.126	1.021	1.286	1.447	4.880
- Ekspor	2.591	2.280	2.011	2.469	9.351	1.631	1.409	1.631	1.950	6.620
- Impor	-528	-498	-494	-429	-1.949	-505	-388	-345	-503	-1.741
2. Barang lainnya	372	315	94	-51	730	308	232	217	-170	587
- Ekspor	376	319	358	346	1.400	352	305	337	386	1.380
- Impor	-4	-4	-264	-398	-670	-44	-73	-120	-556	-793
B. Jasa-Jasa, neto	**-1.823**	**-2.829**	**-2.293**	**-1.752**	**-8.697**	**-1.041**	**-2.273**	**-1.614**	**-1.558**	**-6.486**
C. Pendapatan Primer, neto	**-7.116**	**-7.246**	**-7.452**	**-6.565**	**-28.379**	**-7.493**	**-7.903**	**-8.013**	**-6.272**	**-29.681**
D. Pendapatan Sekunder, neto	**1.428**	**1.426**	**1.273**	**1.382**	**5.508**	**1.235**	**1.223**	**1.024**	**949**	**4.430**
II. Transaksi Modal & Finansial	**5.612**	**1.999**	**62**	**9.188**	**16.860**	**4.379**	**7.506**	**10.556**	**6.757**	**29.198**
A. Transaksi modal	**1**	**0**	**2**	**14**	**17**	**0**	**4**	**5**	**0**	**9**
B. Transaksi finansial	**5.611**	**1.998**	**60**	**9.174**	**16.843**	**4.378**	**7.502**	**10.551**	**6.757**	**29.188**
- Aset	-8.294	-9.155	-3.708	-332	-21.489	-1.316	-3.849	3.925	20.418	19.178
- Kewajiban	13.905	11.154	3.768	9.506	38.332	5.694	11.351	6.626	-13.661	10.010
1. Investasi langsung	2.319	3.982	1.608	2.795	10.704	3.082	3.272	6.533	2.234	15.121
a. Aset	-3.392	-3.276	-1.266	-1.141	-9.075	-852	-1.185	471	12.925	11.359
b. Kewajiban	5.712	7.258	2.873	3.936	19.779	3.934	4.457	6.062	-10.690	3.762
2. Investasi portofolio	8.509	5.528	-2.188	4.333	16.183	4.439	8.277	6.541	-385	18.872
a. Aset	24	-737	-683	127	-1.268	-168	402	1.938	14	2.186
b. Kewajiban	8.484	6.266	-1.505	4.206	17.451	4.607	7.875	4.604	-399	16.686
3. Derivatif finansial	93	-3	231	-301	20	-22	-25	-28	66	-9
a. Aset	205	229	196	37	667	276	171	160	1	609
b. Kewajiban	-112	-232	35	-338	-647	-298	-195	-188	64	-618
4. Investasi lainnya	-5.310	-7.510	409	2.346	-10.064	-3.121	-4.022	-2.495	4.842	-4.796
a. Aset	-5.131	-5.371	-1.955	645	-11.812	-573	-3.236	1.356	7.477	5.024
b. Kewajiban	-179	-2.138	2.364	1.702	1.748	-2.548	-786	-3.851	-2.635	-9.820
III. Total (I + II)	**1.298**	**-2.280**	**-4.162**	**4.485**	**-659**	**-272**	**2.303**	**5.876**	**4.944**	**12.851**
IV. Selisih Perhitungan Bersih	**5**	**-645**	**-404**	**605**	**-439**	**-15**	**-141**	**-167**	**-439**	**-762**
V. Neraca Keseluruhan (III+IV)	**1.303**	**-2.925**	**-4.565**	**5.089**	**-1.098**	**-287**	**2.162**	**5.708**	**4.505**	**12.089**
VI. Cadangan Devisa dan yang terkait	**-1.303**	**2.925**	**4.565**	**-5.089**	**1.098**	**287**	**-2.162**	**-5.708**	**-4.505**	**-12.089**
Memorandum:										
- Posisi Cadangan Devisa	111.554	108.030	101.720	105.931	105.931	107.543	109.789	115.671	116.362	116.362
- Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	6,6	6,8	6,8	7,4	7,4	7,7	8,0	8,5	8,4	8,4
- Transaksi Berjalan/PDB (%)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,2	-2,0	-2,1	-2,3	-1,9	-0,8	-1,8

*Angka sementara **Angka sangat sementara

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 4.2. Posisi Investasi Internasional Indonesia

Juta dolar AS

Rincian	2015				Total	2016				Total
	I	II	III	IV		I*	II*	III*	IV**	
Posisi Investasi Internasional Indonesia, neto	**-406.983**	**-383.845**	**-355.247**	**-376.834**	**-376.834**	**-400.520**	**-413.865**	**-344.731**	**-320.958**	**-320.958**
Investasi langsung, neto	-211.147	-201.698	-195.204	-193.059	-193.059	-204.609	-210.749	-185.705	-176.071	-176.071
Investasi portofolio, neto	-201.811	-192.237	-162.627	-187.914	-187.914	-202.180	-213.951	-227.332	-213.618	-213.618
Derivatif finansial, neto	1	61	-13	91	91	73	51	13	-20	-20
Investasi lainnya, neto	-105.580	-98.000	-99.123	-101.883	-101.883	-101.348	-99.006	-47.378	-47.611	-47.611
Cadangan devisa	111.554	108.030	101.720	105.931	105.931	107.543	109.789	115.671	116.362	116.362

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

Neraca Perdagangan Nonmigas

Neraca perdagangan nonmigas pada 2016 mencatat peningkatan surplus ditopang perbaikan ekspor yang melampaui peningkatan impor nonmigas. Perbaikan kinerja ekspor nonmigas tersebut tidak terlepas dari peningkatan harga komoditas terutama pada triwulan IV 2016 (Grafik 4.3). Setelah menyusut cukup besar pada tahun 2012 akibat jatuhnya harga komoditas dan melambatnya permintaan dunia, surplus neraca nonmigas pada 2016 kembali meningkat. Pada tahun 2016, surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat 20,2 miliar dolar AS, meningkat dari surplus 2015 sebesar 19,7 miliar dolar AS.

Perbaikan kinerja ekspor nonmigas banyak didukung pertumbuhan positif ekspor produk manufaktur. Nilai ekspor produk manufaktur pada 2016 tumbuh sebesar 2,4%, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh -6,9%. Peningkatan ekspor produk manufaktur, yang memiliki pangsa 51,2% dari total ekspor, ditopang pula perbaikan dari sisi volume dan harga ekspor manufaktur.

Volume ekspor manufaktur bertumbuh 1,6% pada 2016 dan diikuti kenaikan harga sebesar 0,8%.

Beberapa ekspor produk manufaktur yang meningkat pada 2016 antara lain ekspor makanan olahan, kendaraan dan bagiannya, serta mesin dan mekanik. Ekspor makanan olahan mencatatkan peningkatan sebesar 4,4%, terutama kenaikan permintaan dari Tiongkok yang mencapai hingga 15,7%. Implementasi strategi *rebalancing* ekonomi Tiongkok yang tidak sesuai perkiraan turut mendorong peningkatan impor barang konsumsi termasuk produk makanan. Sementara itu, ekspor kendaraan dan bagiannya serta ekspor mesin dan mekanik, juga tumbuh positif masing-masing sebesar 8,5% dan 5,1% didorong peningkatan permintaan dari beberapa negara khususnya ASEAN. Beberapa ekspor produk manufaktur andalan Indonesia seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alat listrik, barang dari logam tidak mulia dan karet olahan juga membaik, meskipun masih tumbuh negatif.

Perbaikan ekspor nonmigas juga didukung perbaikan ekspor komoditas primer, terutama sejak semester II 2016. Ekspor

Grafik 4.2. Perkembangan Transaksi Berjalan

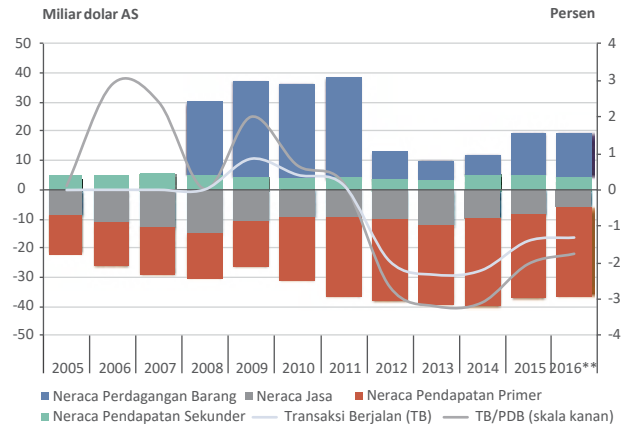

**Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.3. Perkembangan Harga Komoditas dan Ekspor Nonmigas Indonesia

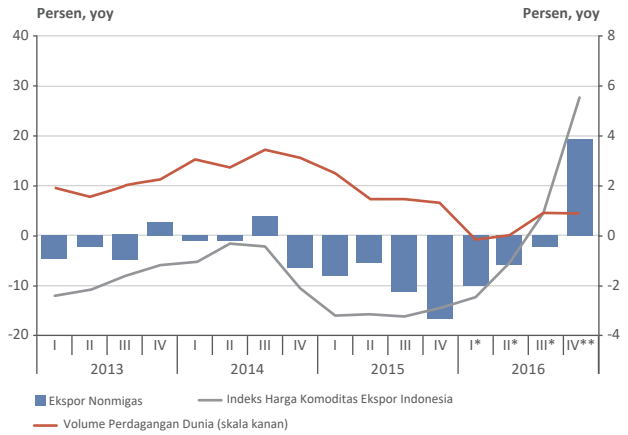

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

minyak nabati dan batubara, dengan total pangsa sebesar 24,4% dari ekspor nonmigas, masih menjadi komoditas andalan ekspor Indonesia. Dalam perkembangannya sejak paruh kedua 2016, kinerja ekspor komoditas primer membaik terutama didorong kenaikan harga yang meningkat 5,8% sedangkan volume masih turun sebesar 8,4% (Tabel 4.3). Penurunan volume ekspor minyak nabati yang sebagian besar merupakan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*/CPO) antara lain disebabkan produksi yang menurun akibat fenomena *La Nina*, pemenuhan kebutuhan domestik, serta persaingan dengan Tiongkok dan India yang juga sebagai pemasok CPO dunia. Sementara itu, penurunan volume ekspor batubara terutama dipengaruhi kebijakan penerapan *clean energy* di Tiongkok. Secara keseluruhan, kenaikan harga pada dua komoditas andalan yakni CPO dan batubara berkontribusi meningkatkan nilai ekspor produk primer.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas Indonesia ke sepuluh negara mitra dagang utama meningkat, kecuali India dan Malaysia. Ekspor ke Filipina, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand pada 2016 bahkan sudah tercatat tumbuh positif. Sementara itu, ekspor ke Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan Australia masih tumbuh negatif, namun dengan pertumbuhan yang sudah membaik dibandingkan tahun 2015. Dinamika triwulanan menunjukkan ekspor pada triwulan IV 2016 telah tumbuh positif ke hampir ke seluruh negara tujuan utama, kecuali Australia dan Oceania (Tabel 4.4).

Perbaikan ekspor nonmigas berkontribusi pada perbaikan impor nonmigas, meskipun masih terbatas. Peningkatan impor yang terbatas tidak terlepas dari pengaruh konsolidasi internal korporasi sebagai respons kondisi global yang kurang menguntungkan. Pada 2016, kontraksi impor nonmigas telah berkurang menjadi 1,0%, lebih baik dibandingkan dengan kontraksi pada 2015 sebesar 12,4% (Tabel 4.5). Berdasarkan kelompok barang, perbaikan impor non migas banyak ditopang impor barang konsumsi dan impor bahan baku. Pemulihan ekonomi domestik yang didukung resiliensi konsumsi swasta dan nilai tukar rupiah yang menguat turut mendorong peningkatan pertumbuhan impor barang konsumsi signifikan menjadi 15,6% dan penurunan kontraksi impor bahan baku menjadi -0,5%. Sementara itu, kontraksi pertumbuhan impor barang modal masih besar yakni 10,2%, meskipun telah lebih kecil dari kontraksi 2015 sebesar 15,6%. Dinamika menunjukkan impor barang modal membaik pada triwulan IV 2016 dipengaruhi perbaikan investasi nonbangunan.

Neraca Perdagangan Migas

Neraca perdagangan migas masih mencatat defisit, namun telah menurun dibandingkan dengan kondisi pada 2015. Pada 2016, defisit neraca perdagangan migas tercatat 4,8 miliar dolar AS, membaik dibandingkan dengan defisit tahun sebelumnya sebesar 5,7 miliar dolar AS (Grafik 4.4). Perkembangan ini cukup positif karena pada gilirannya dapat berkontribusi pada penurunan defisit TB.

Tabel 4.3. Ekspor Nonmigas Menurut Kelompok Barang (Berdasarkan SITC)

Rincian	Pangsa (%)		Pertumbuhan Tahunan (Persen, yoy)									
			2015					2016				
	2015	2016**	I	II	III	IV	Total	I*	II*	III*	IV**	Total**
A. Produk Primer												
Nominal	48,7	47,3	-10,2	-5,7	-16,2	-18,3	-12,6	-17,6	-15,9	-3,4	27,2	-3,1
Riil	51,4	48,4	14,3	25,7	18,7	12,6	17,6	-0,4	-13,5	-15,1	-7,2	-8,4
Indeks Harga	-	-	-21,4	-25,0	-29,5	-27,4	-25,7	-17,3	-2,7	13,8	37,0	5,8
B. Produk Manufaktur												
Nominal	49,9	51,2	-4,9	-4,5	-4,9	-13,3	-6,9	-2,0	4,2	-1,3	9,2	2,4
Riil	47,9	50,5	-8,0	-7,4	-4,2	-10,3	-7,4	-2,2	3,6	-1,4	6,7	1,6
Indeks Harga	-	-	3,3	3,2	-0,7	-3,4	0,5	0,2	0,6	0,1	2,4	0,8
C. Lainnya												
Nominal	1,5	1,5	-26,1	-17,8	-14,0	-6,9	-17,1	-10,8	0,1	-6,3	16,4	-0,5
Riil	0,7	0,7	-22,2	-11,6	-2,1	1,5	-9,8	6,0	-2,7	-18,6	7,4	-5,3
Indeks Harga	-	-	-4,9	-4,9	-12,2	-8,4	-8,1	-5,1	2,9	15,1	8,4	5,1
Total												
Nominal	100,0	100,0	-8,0	-5,3	-10,9	-15,7	-10,0	-9,7	-5,7	-2,4	18,1	-0,3
Riil	100,0	100,0	2,3	7,8	4,7	-3,4	2,8	-1,7	-3,3	-6,1	5,6	-1,5
Indeks Harga	-	-	-10,0	-12,1	-14,9	-12,8	-12,4	-8,2	-2,4	4,0	11,9	1,2

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

Tabel 4.4. Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan Utama

Rincian	Pangsa (%)		Pertumbuhan Tahunan (Persen, yoy)										
			2014	2015					2016				
	2015	2016**	Total	I	II	III	IV	Total	I*	II*	III*	IV**	Total **
1. Amerika Serikat	11,6	11,9	5,6	-1,1	-0,4	-4,8	-7,6	-3,5	-4,0	4,4	-1,8	10,7	2,3
2. Tiongkok	10,0	11,5	-22,2	-36,5	-13,1	-9,6	-13,8	-19,5	-9,4	-6,9	11,7	61,9	14,4
3. Jepang	9,8	10,0	-8,7	-5,4	-8,4	-12,9	-17,8	-11,2	-6,0	-2,2	-2,0	15,7	1,2
4. India	8,8	7,6	-5,6	7,3	18,1	-27,0	-13,7	-5,0	-28,5	-32,4	3,4	7,8	-14,3
5. Singapura	6,5	6,6	11,6	1,7	-19,4	-9,2	-16,8	-11,4	-3,3	5,4	-4,6	1,6	-0,3
6. Malaysia	4,7	4,5	-10,6	3,5	0,2	-7,3	-9,7	-3,3	-12,9	-15,4	-4,5	17,2	-4,6
7. Korea Selatan	4,1	4,0	-4,6	0,1	0,4	-6,3	-16,0	-5,5	-12,5	-7,5	-4,5	14,8	-3,1
8. Filipina	3,0	4,0	3,4	-2,0	4,2	7,2	-7,1	0,8	7,6	34,6	30,8	63,8	33,9
9. Thailand	3,5	3,5	-4,2	-6,4	-4,0	-11,6	-10,2	-8,0	-12,3	0,1	-0,7	16,5	0,4
10. Australia dan Oceania	2,8	2,5	15,2	-36,4	-17,0	7,4	-21,7	-17,5	5,6	-18,6	-14,8	-8,0	-10,2
Total 10 Negara	**64,9**	**66,0**	**-5,5**	**-9,6**	**-4,4**	**-10,0**	**-13,5**	**-9,3**	**-9,3**	**-5,9**	**1,3**	**21,1**	**1,5**

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

Perbaikan kinerja neraca migas didukung berkurangnya defisit neraca perdagangan minyak, terutama akibat penurunan impor minyak. Sementara itu, ekspor minyak terkontraksi dari 7,8 miliar dolar AS pada tahun 2015 menjadi 6,3 miliar dolar AS. Perbaikan impor minyak dipengaruhi oleh penurunan harga minyak dibandingkan dengan harga tahun sebelumnya. Harga minyak dunia yang rendah pada 2016 menyebabkan harga impor produk minyak turun sebesar 25,1% dan mendorong penurunan impor minyak dari 20,9 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 16,0 miliar dolar AS.

Selain faktor harga, penurunan impor minyak juga disebabkan turunnya volume impor produk minyak dari 206,3 juta barel pada 2015 menjadi 189,7 juta barel pada 2016. Volume impor minyak yang turun merupakan dampak positif dari reformasi di bidang energi, termasuk melalui peningkatan *lifting* minyak. Dalam kaitan ini, pemerintah melakukan optimalisasi produksi kilang *Residual Fluid Catalytic Cracking* (RFCC) di Cilacap dan *Trans Pasific Petrochemical Indotama* (TPPI) di Tuban, penghapusan subsidi untuk jenis minyak dengan *Reseach Octane*

Tabel 4.5. Impor Nonmigas Menurut Kelompok Barang

Rincian	Pangsa (%)		Pertumbuhan Tahunan (Persen, yoy)									
			2015					2016				
	2015	2016**	I	II	III	IV	Total	I*	II*	III*	IV**	Total**
Barang Konsumsi												
Nominal	8,7	10,2	-8,8	-9,3	-14,9	-6,3	-9,9	27,3	6,5	13,0	16,7	15,6
Riil	7,4	7,6	-7,7	-7,1	-13,0	-6,0	-8,1	25,4	0,8	5,9	6,3	9,1
Indeks Harga	-	-	-1,2	-2,4	-2,2	-0,3	-1,9	1,5	5,7	6,8	9,8	6,0
Bahan Baku												
Nominal	69,5	69,8	-1,7	-15,2	-17,7	-13,8	-12,3	-9,5	-2,6	1,7	9,3	-0,5
Riil	81,2	83,5	5,2	-8,0	-10,3	-6,4	-4,4	-0,8	7,2	12,5	18,5	9,1
Indeks Harga	-	-	-6,6	-7,9	-8,3	-8,0	-8,3	-8,8	-9,2	-9,6	-7,8	-8,8
Barang Modal												
Nominal	21,0	19,1	-8,7	-21,7	-20,6	-10,8	-15,6	19,0	-12,2	-7,7	-1,5	-10,2
Riil	11,5	8,9	-21,5	-32,8	-29,2	-15,6	-26,3	-23,2	-19,7	-16,0	-11,1	-17,5
Indeks Harga	-	-	16,3	16,5	12,2	5,7	14,5	5,5	9,4	9,9	10,8	8,9
Total												
Nominal	100,0	100,0	-3,9	-16,3	-17,4	-11,4	-12,4	-8,6	-3,4	0,3	8,2	-1,0
Riil	100,0	100,0	-4,7	-16,4	-16,4	-9,1	-11,9	-6,2	-2,8	1,0	6,5	-0,4
Indeks Harga	-	-	0,8	0,2	0,2	-1,1	-0,5	-2,5	-0,6	-0,6	1,6	-0,6

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.4. Perkembangan Neraca Perdagangan Migas dan Harga Minyak

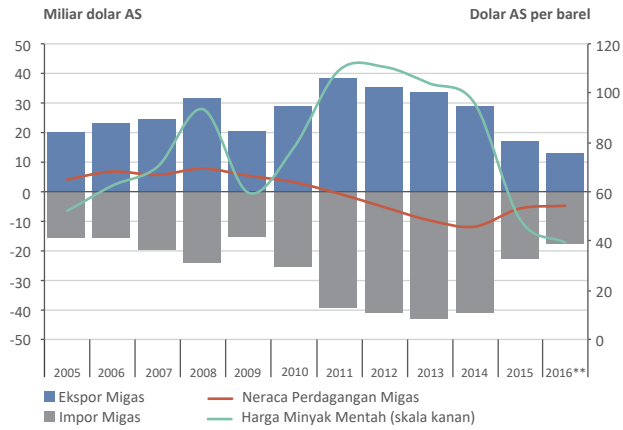

**Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.5. Perkembangan Neraca Jasa

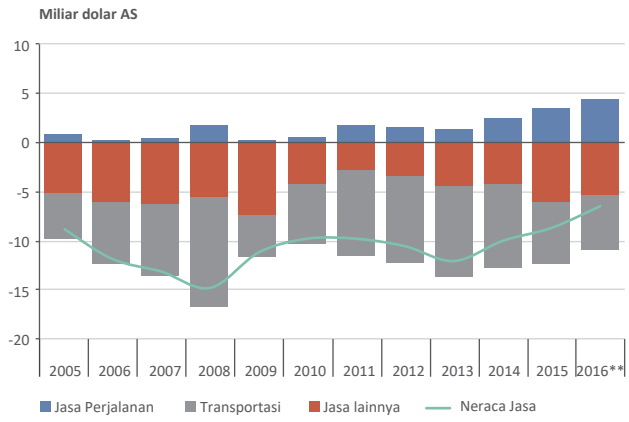

**Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

Number (RON) 88, penambahan varian minyak nonsubsidi, yaitu Pertalite, dan efisiensi proses impor minyak.[1] Selain itu, peningkatan *lifting* minyak yang sebagian besar dimanfaatkan untuk kebutuhan kilang domestik, juga menyebabkan kenaikan volume ekspor minyak tidak signifikan. Secara keseluruhan, peningkatan konsumsi minyak dalam negeri mampu ditutupi dari hasil dari produksi domestik sehingga berkontribusi pada perbaikan defisit neraca perdagangan minyak.

Perbaikan neraca migas juga dipengaruhi surplus neraca gas, meskipun lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya. Kinerja neraca gas masih cukup baik didukung peningkatan ekspor *Liquid Natural Gas* (LNG), meskipun harga ekspor gas masih rendah. Selama tahun 2016 neraca gas tercatat surplus 4,9 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada 2015 sebesar 7,4 miliar dolar AS. Penurunan surplus tersebut akibat kontraksi ekspor gas sebesar 29,2% yang bersumber dari penurunan harga ekspor gas dan penurunan volume ekspor *Natural Gas* (NG). Kontraksi ekspor gas tertahan dengan peningkatan volume ekspor *Liquid Natural Gas* (LNG). Sementara itu, impor gas pada 2016 juga menurun 10,7% yang sejalan dengan penurunan konsumsi gas domestik.

Neraca Jasa, Neraca Pendapatan Primer, dan Neraca Pendapatan Sekunder

Neraca jasa menunjukkan perkembangan membaik dipengaruhi penurunan defisit neraca jasa transportasi dan perbaikan penerimaan jasa perjalanan. Defisit neraca perdagangan jasa menurun 25,4% dibandingkan dengan capaian 2015. Penurunan defisit terutama disebabkan berkurangnya defisit jasa transportasi, khususnya *freight*, seiring dengan penurunan impor barang (Grafik 4.5). Perbaikan neraca jasa juga ditopang kenaikan penerimaan jasa perjalanan akibat meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Defisit neraca jasa transportasi, meskipun telah menurun, tetap perlu mendapatkan perhatian. Hal ini karena defisit neraca jasa transportasi, khususnya *freight*, masih terus berlangsung. Kondisi ini semakin perlu dicermati mengingat defisit jasa *freight* memiliki pangsa terbesar terhadap total defisit neraca jasa pada tahun 2016 yaitu 67,7% (Grafik 4.6). Defisit *freight* yang masih tinggi dan persisten mengindikasikan belum kuatnya industri transportasi domestik dalam mendukung perdagangan antar negara. Nilai pembayaran jasa *freight* kepada asing relatif cukup

Grafik 4.6. Neraca Jasa *Freight* dan Neraca Jasa Lainnya

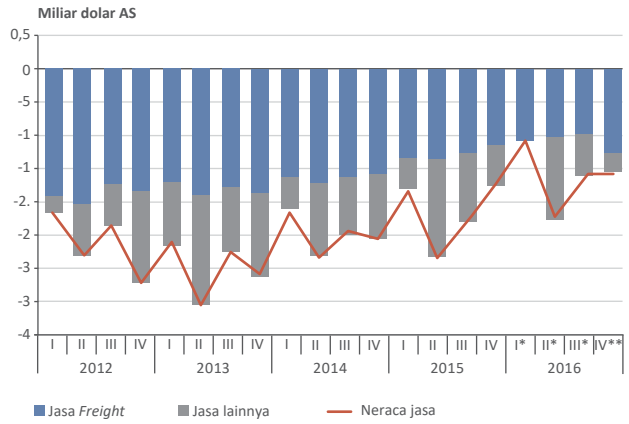

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

1 Kedua kilang tersebut mulai beroperasi pada akhir tahun 2015, namun baru mencapai produksi optimal pada pertengahan 2016.

besar dibandingkan dengan nilai impornya. Perkembangan defisit neraca jasa transportasi tercermin dari besarnya persentase biaya pengeluaran *freight* kepada bukan penduduk untuk pengangkutan barang-barang impor (rasio *freight import to import*) dengan menggunakan moda transportasi laut masih berada pada kisaran 5%. Sementara itu, persentase penerimaan *freight* dari bukan penduduk untuk pengangkutan barang-barang ekspor (rasio *freight export to export*) dengan menggunakan moda transportasi laut hanya berada pada kisaran 1% (Grafik 4.7). Pemetaan ini secara umum berimplikasi perlunya penguatan peran jasa freight dalam mendukung ketahanan neraca jasa Indonesia (Lihat Boks 4.1).

Peningkatan suplus neraca jasa perjalanan (*travel*) dipengaruhi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sepanjang 2016, jumlah kunjungan wisman mengalami kenaikan dari 9,8 juta orang pada 2015 menjadi 10,9 juta orang.[2] Kenaikan tersebut antara lain ditopang kebijakan pembangunan destinasi pariwisata nasional dengan 10 destinasi pariwisata prioritas termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEKP).[3] Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga diikuti dengan peningkatan pengeluaran wisatawan selama berkunjung ke Indonesia. Berdasarkan negara asal, wisatawan dari Singapura, Malaysia, Australia, Jepang, dan Tiongkok merupakan kelompok terbesar yang berkunjung ke Indonesia. Adapun tujuan favorit wisman ke Indonesia masih terkonsentrasi pada tiga daerah yaitu Bali, Jakarta, dan Batam. Sejalan dengan kenaikan jumlah kunjungan dan pengeluaran wisatawan, penerimaan jasa perjalanan dari perjalanan wisatawan pada 2016 meningkat dari 10,8 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 12,2 miliar dolar AS.

Dari neraca pendapatan primer, perkembangan 2016 mencatat peningkatan defisit sejalan dengan bertambahnya posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN). Pada tahun 2016 defisit neraca pendapatan primer meningkat dari 28,4 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya menjadi 29,7 miliar dolar AS (Grafik 4.8). Kenaikan defisit tersebut sejalan dengan bertambahnya posisi KFLN Indonesia sebagai imbas dari naiknya investasi bukan penduduk yang masuk ke Indonesia. Selain itu, kenaikan defisit pendapatan primer juga disebabkan meningkatnya pembayaran bunga surat utang pemerintah seiring dengan meningkatnya posisi kewajiban investasi portofolio pemerintah. Potensi terus membesarnya defisit neraca pendapatan primer pada 2016 tertahan oleh menyusutnya pembayaran pendapatan investasi langsung yang disebabkan repatriasi aset residen terkait dengan kebijakan amnesti pajak.

Dari neraca pendapatan sekunder, capaian 2016 mencatatkan penurunan surplus akibat berkurangnya remitansi TKI ke Indonesia dan meningkatnya remitansi TKA ke luar negeri. Surplus neraca pendapatan sekunder menurun dari 5,5 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 4,4 miliar dolar AS. Penurunan surplus terutama disumbang oleh berkurangnya penerimaan remitansi TKI di luar negeri dan meningkatnya remitansi TKA ke luar negeri. Hal ini berkaitan dengan berlanjutnya kebijakan moratorium TKI terutama di Timur Tengah sehingga mendorong penurunan jumlah TKI pada 2016 dari 3,7 juta orang pada 2015 menjadi 3,5 juta orang (Grafik 4.9). Dengan perkembangan tersebut remitansi TKI pada tahun 2016 tercatat sebesar 8,9 miliar dolar AS atau turun dari 9,4 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya.

Grafik 4.7. Rasio *Freight* Jasa Transportasi

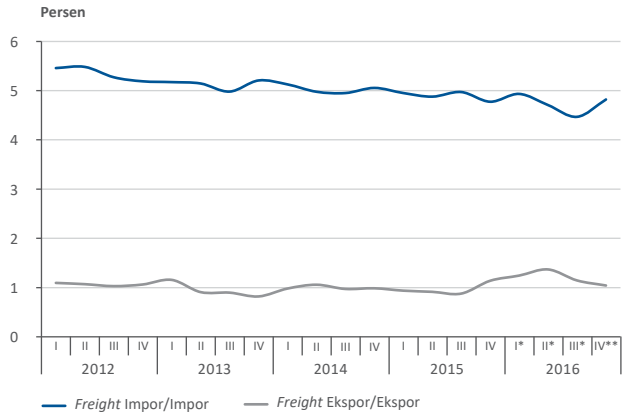

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.8. Perkembangan Neraca Pendapatan Primer

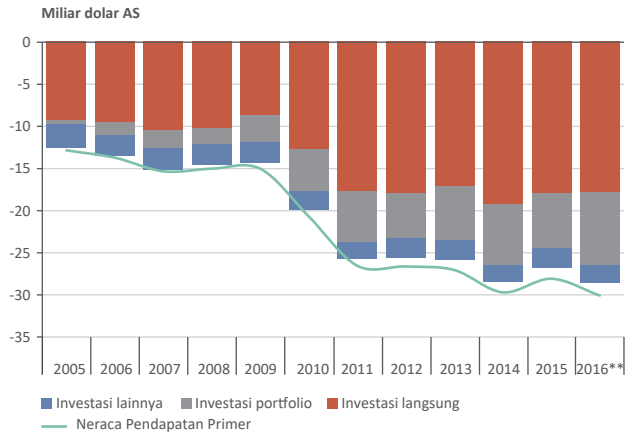

**Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

2 Belum memperhitungkan jumlah wisatawan yang melalui pos lintas batas (PLB) dan wisatawan khusus (lansia, rohaniawan, diklat, riset, dll).

3 Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016 -2019, Kementerian Pariwisata 2016

Grafik 4.9. Perkembangan Jumlah dan Remitansi TKI

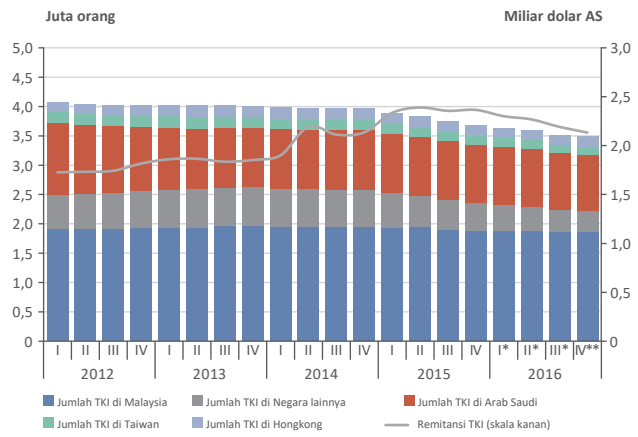

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.10. Investasi Langsung Bukan Penduduk menurut Negara Investor Utama

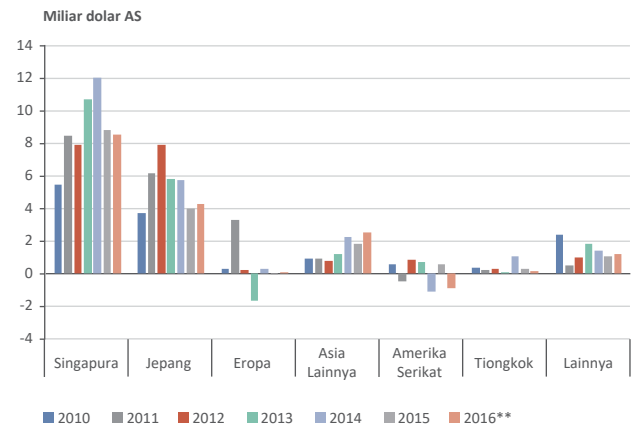

**Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

4.2. TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL

Neraca Transaksi Modal dan Finansial (TMF) pada 2016 mencatat surplus sebesar 29,2 miliar dolar AS, atau meningkat signifikan dari 16,9 miliar pada tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama berasal dari naiknya surplus dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio. Selain itu, peningkatan surplus TMF juga didukung oleh penurunan defisit dalam bentuk investasi lainnya.

Peningkatan surplus TMF secara umum dipengaruhi persepsi positif investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia, meskipun saat bersamaan ketidakpastian dunia masih tinggi. Persepsi positif tersebut ditopang prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, stabilitas ekonomi yang terkendali, dan imbal hasil yang menarik. Selain itu, kebijakan Amnesti Pajak juga memperkuat persepsi positif terhadap ekspektasi apresiasi kurs dan ketahanan ekonomi ke depan, termasuk ketahanan fiskal. Berbagai persepsi positif pada gilirannya dapat meminimalkan risiko global antara lain terkait ketidakpastian kenaikan FFR dan risiko geopolitik di Eropa dan AS pada semester II 2016. Secara keseluruhan, persepsi positif yang terjaga mendorong aliran masuk modal asing cukup besar, yang pada gilirannya berkontribusi pada kenaikan surplus TMF 2016.

Investasi Langsung

Investasi langsung pada 2016 secara neto tercatat 15,1 miliar dolar AS, atau meningkat 41,3% dibandingkan dengan kondisi tahun 2015. Peningkatan arus masuk tersebut sejalan dengan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan, termasuk dampak kenaikan peringkat kemudahan berusaha. Data terakhir menunjukkan peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia meningkat dari 106 menjadi 91.

Berdasarkan negara asal investasi, investor Penanaman Modal Asing (PMA) masih didominasi oleh Singapura dan Jepang (Grafik 4.10). Nilai investasi kedua negara tersebut pada 2016 mencapai 12,9 miliar dolar AS. Negara-negara kawasan Asia lainnya juga masih menjadi investor utama bagi Indonesia. Investasi langsung dari Tiongkok tercatat sebesar 163 juta dolar AS, lebih rendah dari capain tahun sebelumnya sebesar 324 juta dolar AS. Sementara itu, investasi langsung dari AS pada tahun 2016 mencatat neto arus keluar sebesar 0,9 miliar dolar AS, berbalik arah dari tahun 2015.

Secara sektoral, realisasi PMA pada 2016 terkonsentrasi pada lapangan usaha industri manufaktur dan perdagangan (Grafik 4.11). Nilai investasi pada lapangan usaha industri

Grafik 4.11. Investasi Langsung Bukan Penduduk menurut Sektor Ekonomi

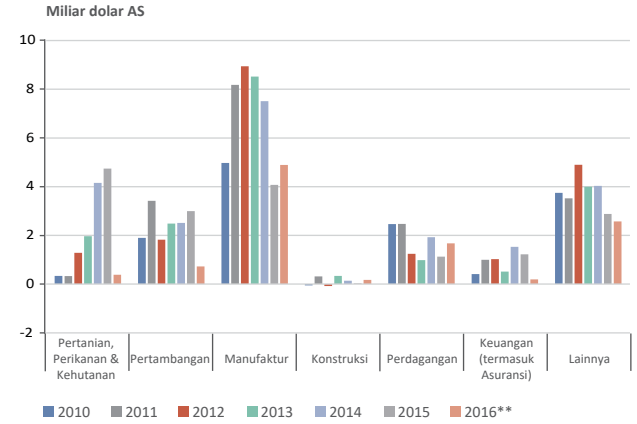

**Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

manufaktur mencapai 7,5 miliar dolar AS dengan investor utama adalah Singapura dan Jepang. Sementara itu, investasi pada lapangan usaha perdagangan tahun 2016 juga meningkat dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun terakhir dan melampaui investasi pada lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. Nilai investasi pada lapangan usaha perdagangan pada 2016 sebesar 2,0 miliar dolar AS, dengan Singapura sebagai investor utama.

Investasi langsung yang meningkat juga tercermin pada perkembangan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang tercatat positif di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).[8] Data perkembangan realisasi PMA yang dipublikasikan oleh BKPM pada 2016 mencatat peningkatan sebesar 8,4%, yaitu dari Rp365,9 triliun menjadi Rp396,6 triliun. Nilai realisasi PMA tersebut setara dengan 29,0 miliar dolar AS.[4] Secara sektoral, BPKM mencatat realisasi PMA terkonsentrasi pada sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik; serta sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi dengan pangsa masing-masing sektor tersebut sebesar 13,4% dan 10% dari total PMA. Selain itu, investasi PMA juga cukup besar ke sektor industri kertas, barang dari kertas dan percetakan (pangsa 9,6%), sektor pertambangan (pangsa 9,5%) dan sektor industri alat angkutan dan transportasi lainnya lainnya (pangsa 8,2%).

Dengan berbagai perkembangan tersebut, posisi neto kewajiban investasi langsung pada Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia menurun. Perkembangan ini terindikasi tidak terlepas dari pengaruh positif program Amnesti Pajak. Dalam tahap awal implementasi kebijakan amnesti pajak, para wajib pajak diminta mendeklarasikan aset-aset yang selama ini belum dilaporkan. Deklarasi aset khususnya yang berada di luar negeri akan mempengaruhi PII Indonesia. Deklarasi aset tersebut terjadi sejak triwulan III 2016 dan menyebabkan posisi investasi langsung pada PII Indonesia di sisi aset meningkat melebihi peningkatan posisi kewajiban. Perkembangan tersebut menyebabkan neto kewajiban investasi langsung pada PII Indonesia pada akhir 2016 menurun dari 193,1 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 176,1 miliar dolar AS.

Investasi portofolio

Investasi portofolio pada 2016 juga masih mencatat suplus besar didukung persepsi positif terhadap perekonomian domestik dan imbal hasil yang menarik. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, investasi portofolio neto pada 2016 tetap mencatat suprlus sebesar 18,9 miliar dolar AS. Surplus tersebut bahkan lebih tinggi dari capaian tahun 2015 sebesar 16,2 miliar dolar AS.

Aliran masuk investasi portofolio terutama terjadi pada tiga triwulan pertama 2016. Sepanjang tiga triwulan pertama 2016 investasi portofolio secara neto mencatat arus masuk sebesar 19,3 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan neto arus masuk selama periode yang sama tahun 2015. Sektor publik menjadi pendorong masuknya aliran dana asing pada investasi portofolio. Besarnya kontribusi sektor publik ini tercermin dari tingginya kepemilikan asing pada surat berharga sektor publik, termasuk dari penerbitan *global bond* dan sukuk global. Pada periode yang sama, sektor swasta juga mencatat arus masuk, namun lebih rendah dibandingkan dengan capaian sektor publik.

Memasuki triwulan IV 2016, tekanan di pasar keuangan global meningkat dipicu risiko global dari dinamika politik AS dan ketidakpastian kenaikan FFR. Perkembangan ini kemudian mendorong pembalikan modal dari negara berkembang termasuk Indonesia. Akibatnya, investasi portofolio yang sebelumnya meningkat, pada triwulan IV 2016 mengalami pembalikan, baik di sektor publik maupun swasta. Pada triwulan IV 2016, investasi portofolio neto mencatat arus keluar sebesar 0,4 miliar dolar AS, terutama terkait dengan pelepasan kepemilikan asing atas surat berharga di sektor swasta.

Berdasarkan instrumen penempatan, semua jenis instrumen investasi portofolio mencatat surplus, dengan instrumen berdenominasi rupiah masih menjadi kontributor utama aliran masuk investasi portofolio. Aliran dana bukan penduduk pada instrumen Surat Utang Negara (SUN) rupiah mencatat neto aliran masuk sebesar 8,4 miliar dolar AS, lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 7,7 miliar dolar AS. Sejalan dengan hal tersebut, posisi kepemilikan investor bukan penduduk pada SUN rupiah meningkat dari 42,9% pada akhir 2015 menjadi 43,8% pada akhir 2016. Dana asing pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara neto mencatat aliran masuk sebesar 0,1 miliar dolar AS, berbalik arah dari arus keluar pada 2015 sebesar 0,1 miliar dolar AS. Kondisi ini membuat posisi kepemilikan investor bukan penduduk atas SBI dari sebelumnya nol menjadi 1,5% pada akhir 2016. Di pasar saham, sampai dengan triwulan III 2016 para investor masih mencatat neto pembelian sebesar 2,6 miliar dolar AS. Namun, seiring dengan kenaikan suku bunga acuan AS dan hasil pemilihan presiden AS mendorong aksi jual investor pada triwulan IV 2016. Dengan perkembangan tersebut, transaksi saham oleh investor bukan penduduk sepanjang 2016 mencatat net beli sebesar 1,3 miliar dolar AS.

Investasi portofolio dalam bentuk surat utang pemerintah berjangka panjang, termasuk dari penerbitan obligasi dan

4 Perhitungan menggunakan nilai tukar APBN dan APBN-P 2016.

sukuk global, juga meningkat. Sepanjang 2016, pemerintah secara neto menerbitkan obligasi global dengan pembeli bukan penduduk sebesar 8,7 miliar dolar AS. Penerbitan tersebut terdiri atas *global bond* sebesar 5,4 miliar dolar AS termasuk pembiayaan awal APBN 2017 yang dilakukan pada akhir tahun 2016, euro bond sebesar 3,2 miliar euro, dan samurai bond sebesar 1,0 miliar dolar AS. Di samping itu, pemerintah juga menerbitkan sukuk global dengan pembeli bukan penduduk senilai 2,3 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, posisi kewajiban investasi portofolio neto pada PII Indonesia 2016 tercatat 213,6 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisinya pada 2015 sebesar 187,9 miliar dolar AS.

Berbagai dinamika investasi portofolio tersebut membuat investasi portofolio sisi kewajiban pada 2016 mencatat surplus sebesar 16,7 miliar dolar AS, sedikit lebih rendah dari surplus 17,5 miliar dolar AS pada tahun 2015 (Grafik 4.12). Sementara itu, investasi portofolio di sisi aset pada tahun 2016 mencatat surplus 2,2 miliar dolar AS, berbeda dengan kondisi normal yang mencatatkan defisit. Surplus yang terjadi pada investasi portofolio sisi aset terkait dengan pencairan aset terkait program pengampunan pajak pemerintah.

Investasi Lainnya

Defisit investasi lainnya pada 2016 tercatat menurun signifikan dipengaruhi kebijakan amnesti pajak khususnya repatriasi dana penduduk di luar negeri. Aliran dana masuk neto tersebut terutama terjadi pada triwulan III dan IV 2016 sehingga secara keseluruhan tahun 2016 investasi lainnya pada sisi asset mencatatkan surplus. Sementara itu, investasi lainnya milik bukan penduduk di sisi kewajiban mengalami defisit yang disebabkan oleh pembayaran

Grafik 4.12. Investasi Portofolio Bukan Penduduk di Indonesia

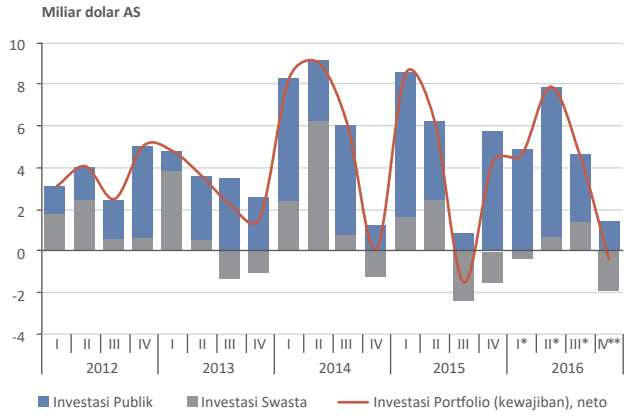

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.13. Perkembangan Investasi Lainnya

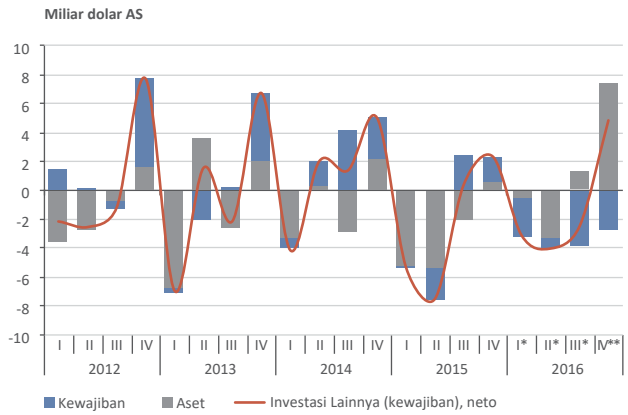

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

neto atas pinjaman luar negeri baik pada sektor publik maupun swasta (Grafik 4.13). Investasi lainnya sisi kewajiban mengalami defisit sejalan dengan perilaku sektor swasta yang berhati-hati dalam mengelola sumber pembiayaan dari luar negeri. Hal tersebut tercemin dari pembayaran neto pada investasi lainnya sisi kewajiban, yang terutama diakibatkan penarikan pinjaman yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembayarannya yang tetap berjalan sesuai jadwal. Kondisi ini sejalan dengan perilaku korporasi yang sedang dalam tahapan konsolidasi dan memilih memperbaiki kondisi keuangan internal dibandingkan dengan melakukan ekspansi usaha.

Investasi lainnya sisi aset yang merupakan aset penduduk di luar negeri tercatat mengalami penarikan neto sebesar 5,0 miliar dolar AS. Penarikan neto terutama terjadi pada semester II 2016 dengan total sebesar 8,8 miliar dolar AS, setelah sebelumnya pada semester I 2016 mencatat penempatan neto sebesar 3,8 miliar dolar AS. Penurunan aset terutama dalam bentuk simpanan sektor swasta di perbankan luar negeri, yang diduga sebagai dampak kebijakan amnesti pajak.

Investasi lainnya pada sektor publik mencatatkan defisit dan semakin besar dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Investasi lainnya sektor publik pada 2016 mengalami defisit 3,5 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada tahun sebelumnya yang mencapai 0,2 miliar dolar AS. Meningkatnya defisit terutama didorong oleh naiknya pembayaran pinjaman luar negeri pemerintah dari tahun sebelumnya dan melebihi penarikan ULN pemerintah selama 2016 yang jumlahnya masih tidak berbeda jauh dengan kondisi pada 2015.

Dengan perkembangan tersebut, Investasi Lainnya mencatat defisit sebesar 4,8 miliar dolar AS pada tahun 2016,

menurun signifikan dari defisit 10,1 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Penurunan defisit pada transaksi investasi lainnya mengakibatkan posisi neto kewajiban investasi lainnya pada PII Indonesia menurun dari 101,9 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 47,6 miliar dolar AS pada 2016.

4.3. KETAHANAN EKSTERNAL

Perbaikan kinerja NPI 2016 berkontribusi memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia. Berbagai indikator ketahanan eksternal pada 2016 berada pada kondisi yang sehat dan membaik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Selain itu, kemampuan sumber pembiayaan jangka panjang dalam menopang defisit transaksi berjalan juga membaik seiring dengan pencapaian surplus TMF. Hal tersebut tercermin dalam perkembangan *basic balance*. Meskipun sempat memburuk pada triwulan II 2016, *basic balance* kembali berada dalam tren perbaikan pada semester II 2016 (Grafik 4.14).

Indikator ketahanan eksternal dari aspek solvabilitas menunjukkan perbaikan. Hal ini ditunjukkan penurunan pangsa neto kewajiban PII Indonesia terhadap PDB yang utamanya karena kenaikan aset luar negeri dalam program amnesti pajak yang di deklarasikan. Berkurangnya tekanan terhadap sektor eksternal juga tercermin dari meningkatnya peran aliran modal asing dalam bentuk non-utang *(non debt creating inflows)* sebagai sumber pembiayaan yang lebih aman. Beberapa indikator solvabilitas lain juga menunjukkan

Grafik 4.14. Perkembangan *Basic Balance* NPI

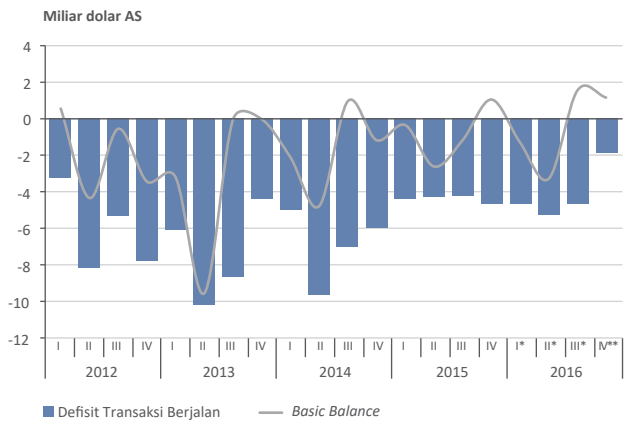

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia, diolah

perbaikan sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi 2016 (Tabel 4.6).

Indikator ketahanan dari aspek likuiditas juga menunjukkan perbaikan dipengaruhi peningkatan posisi cadangan devisa. Pada akhir 2016, posisi cadangan devisa berada pada level 116,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir 2014 sebesar 105,9 miliar dolar AS (Grafik 4.15). Jumlah cadangan devisa pada 2016 tersebut cukup untuk membiayai 8,7 bulan kebutuhan pembayaran impor atau 8,4 bulan kebutuhan pembayaran impor dan ULN Pemerintah. Level kecukupan cadangan devisa tersebut juga masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar

Tabel 4.6. Indikator Solvabilitas Sektor Eksternal

Persen

Indikator	Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016**
1. PII Indonesia Neto / PDB	Rasio yang digunakan untuk mengukur porsi PII dari keseluruhan perekonomian domestik. Rasio peran ULN terhadap pembiayaan perekonomian domestik.	35,4	34,3	35,3	43,1	44,7	36,4
2. Utang Luar Negeri / PDB	Rasio peran ULN terhadap pembiayaan perekonomian domestik.	25,0	27,4	29,1	32,9	36,1	34,0
3. Utang Luar Negeri / Ekspor Barang dan Jasa [1]	Rasio yang mengukur seberapa besar untuk mengukur kemampuan membayar ULN dari penerimaan ekspor barang dan jasa.	105,8	119,6	129,8	147,5	181,3	188,0
4. Utang Luar Negeri Neto [2] / Penerimaan Transaksi Berjalan	Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan membayar ULN neto dari penerimaan transaksi berjalan.	31,2	36,8	49,6	56,9	70,1	71,4
5. Neto Kewajiban Investasi Langsung / PDB	Rasio yang digunakan untuk mengukur peran investasi langsung terhadap perekonomian domestik.	22,1	19,4	21,3	25,8	28,1	25,9
6. *Non-debt creating inflows* (Kewajiban Investasi Langsung + Ekuitas) / PDB	Rasio yang mengukur peran aliran modal masuk non-utang terhadap pembiayaan perekonomian domestik.	32,0	30,4	29,8	37,3	37,9	35,0

1) Total penerimaan ekspor barang dan jasa serta pendapatan primer dan sekunder
2) Selisih antara komponen utang di sisi KLFN dan sisi AFLN pada PII Indonesia

**Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia, BPS, diolah

Tabel 4.7. Indikator Likuiditas Sektor Eksternal

Persen

Indikator	Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016**
1. Cadangan Devisa / Impor Barang dan Jasa	Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan cadangan devisa dalam memenuhi kebutuhan impor barang dan jasa.	58,1	53,0	47,0	55,4	63,8	72,9
2. Cadangan Devisa / *Broad Money* (M2)	Indikator yang digunakan untuk mengukur dampak potensial dari penurunan kepercayaan terhadap mata uang domestik.	33,3	31,9	27,8	31,8	31,2	30,9
3. Cadangan Devisa / Utang Luar Negeri Jangka Pendek (sisa jangka waktu)	Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan cadangan devisa dalam membayar ULN jangka pendek berdasarkan sisa jangka waktu.	235,5	206,4	176,6	188,8	190,9	212,9

**Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

3 bulan impor. Selain itu, kemampuan cadangan devisa dalam memenuhi kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik juga membaik, tergambar dari meningkatnya rasio cadangan devisa terhadap uang beredar (Tabel 4.7).

Ketahanan eksternal dari aspek kemampauan perekonomian dalam membayar kewajiban juga membaik. Indikator *debt service ratio* (DSR) *Tier*-1 pada 2016 berada dalam ketegori normal dan menurun dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. DSR *Tier*-1 menurun dari 20,7% pada 2015 menjadi 20,5%.[5] Penurunan tersebut terutama didorong oleh berkurangnya pembayaran ULN yang melampaui penurunan penerimaan transaksi berjalan. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia juga melakukan perhitungan DSR (*Tier*-2) dengan menggunakan metodologi yang lebih konservatif seperti memasukkan utang dagang kepada bukan penduduk.[6] Berdasarkan risikonya, utang dagang yang memiliki porsi yang relatif besar dalam perhitungan DSR *Tier*-2 tersebut memiliki profil risiko yang lebih rendah. Jika dihitung dengan menggunakan metodologi tersebut, DSR *Tier*-2 pada 2016 tercatat sebesar 61,4%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan DSR *Tier*-2 pada 2015. Perkembangan DSR tersebut terutama berasal dari penurunan DSR sektor swasta ditengah kenaikan DSR sektor publik (Grafik 4.16).

Berbagai upaya juga dilakukan Bank Indonesia untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia menaruh perhatian terhadap upaya mengelola risiko eksternal terkait pemanfaatan sumber pembiayaan dari luar negeri oleh sektor korporasi. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PBI No 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Korporasi yang memiliki ULN dalam valas wajib mengikuti Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) dengan memenuhi rasio lindung nilai (*hedging*) minimum, rasio likuiditas minimum dan pemenuhan minimum peringkat utang yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan sikap kehati-hatian korporasi nonbank dalam memitigasi risiko yang timbul dari kegiatan ULN, sambil tetap memperhatikan praktek umum pengelolaan usaha

Grafik 4.15. Cadangan Devisa Indonesia

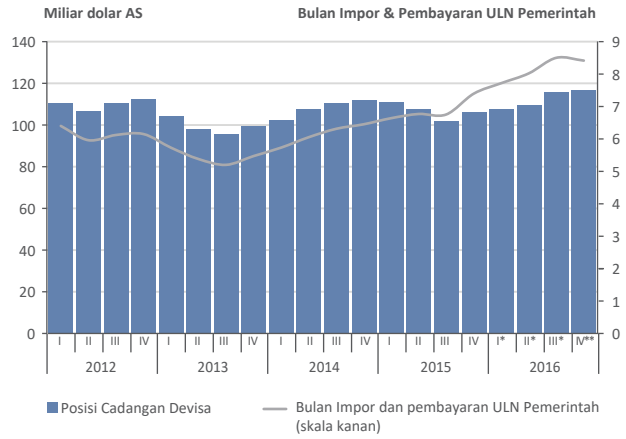

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia, BPS, diolah

5 DSR *Tier*-1 merupakan metodologi penghitungan dari Bank Dunia. Pada metodologi ini, DSR *Tier*-1 merupakan rasio pembayaran total ULN (pokok dan bunga) terhadap penerimaan transaksi berjalan, dimana total pembayaran ULN pada *Tier*-1 meliputi pembayaran pokok ULN jangka panjang dan total pembayaran bunga ULN jangka panjang maupun pendek.

6 DSR *Tier*-2 merupakan modifikasi dari metodologi Bank Dunia dengan menambah cakupan pinjaman jangka pendek dan utang dagang, dengan tujuan pengelolaan ULN secara lebih berhati-hati. Pada metodologi ini DSR *Tier*-2 didefinisikan sebagai merupakan rasio pembayaran total ULN (pokok dan bunga) terhadap penerimaan transaksi berjalan, dimana total pembayaran ULN pada *Tier*-2 meliputi pembayaran pokok dan bunga atas ULN dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri, serta pinjaman (*loan*) dan utang dagang (*trade credit*) kepada non-afiliasi.

Grafik 4.16. Perkembangan DSR Indonesia

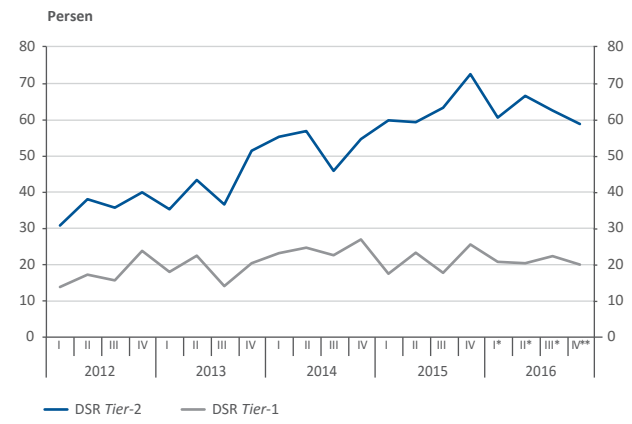

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.18. Rasio ULN terhadap PDB Beberapa Negara

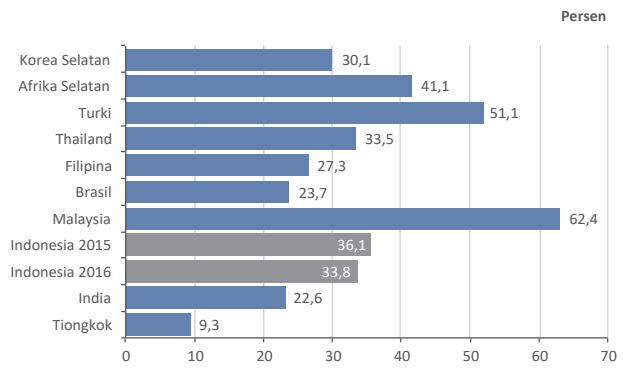

Sumber: Bank Dunia, diolah

Utang Luar Negeri

Perbaikan ketahanan eksternal juga tergambar pada perkembangan dan profil utang luar negeri (ULN) Indonesia. ULN pada 2016 tumbuh melambat diikuti dengan rasio ULN terhadap PDB yang juga menurun. Total posisi ULN pada akhir 2016 tercatat sebesar 317,0 miliar dolar AS, atau tumbuh melambat dari 5,9% pada 2015 menjadi sebesar 2,0%. Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan posisi ULN, rasio posisi ULN terhadap PDB pada 2016 menurun dari 36,0% pada 2015 menjadi 34,0% (Grafik 4.17). Rasio tersebut cukup aman dan berada dalam kisaran negara *peer group* (Grafik 4.18).

Menurut kelompok peminjam, posisi ULN sektor swasta pada 2016 menurun. Posisi ULN sektor swasta tumbuh negatif 5,6% sehingga pangsa dari total posisi ULN menurun dari 54,1% menjadi sebesar 50,1%. Penurunan posisi ULN swasta dipengaruhi menurunnya ULN jangka panjang yang memiliki pangsa 74,0% dari total posisi ULN swasta, sedangkan ULN jangka pendek meningkat terutama terkait dengan utang dagang *(trade credit)*. Dengan perkembangan demikian, posisi ULN sektor swasta sampai akhir 2016 mencapai 158,7 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada 2015 yang mencapai 168,2 miliar dolar AS. Penurunan posisi ULN swasta terutama disebabkan oleh berkurangnya perjanjian pinjaman *(loan agreement)* dan surat utang. Perkembangan ini sejalan dengan perilaku koporasi yang lebih berhati-hati untuk mengelola sumber pembiayaannya, termasuk dari luar negeri sejalan dengan langkah konsolidasi internal yang ditempuh.

Posisi ULN sektor publik meningkat sejalan dengan penerbitan obligasi negara dan sukuk global yang lebih tinggi, serta kepemilikan investor asing atas surat berharga negara yang naik. Posisi ULN sektor publik, yang menempati pangsa 49,9% dari total posisi ULN, mencatat

Grafik 4.17. Rasio ULN terhadap PDB Indonesia

*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19. Perkembangan Posisi ULN Indonesia Menurut Kelompok Peminjam

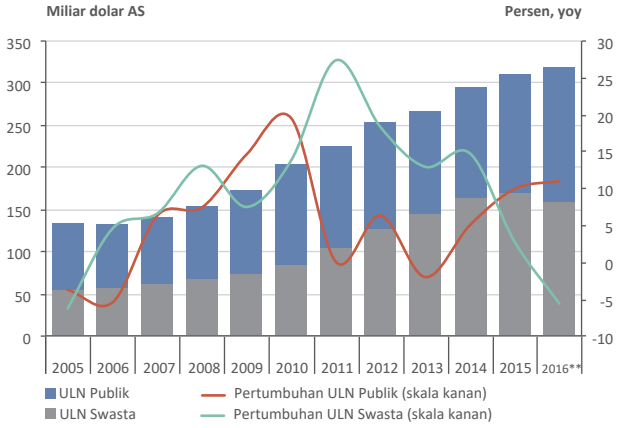

**Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia

pertumbuhan sebesar 11,0% pada 2016 atau lebih tinggi dari 9,9% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ULN tersebut terutama bersumber dari ULN jangka panjang dengan pangsa 99,5% dari total ULN publik. Pertumbuhan yang meningkat tersebut sejalan dengan kebutuhan pembiayaan Pemerintah. Sementara itu, ULN jangka pendek sektor publik mengalami penurunan. Dengan demikian, pada akhir 2016 posisi ULN sektor publik meningkat dari 142,6 miliar dolar AS menjadi 158,3 miliar dolar AS (Grafik 4.19).

Posisi ULN Pemerintah yang terbesar dalam bentuk surat berharga negara, meningkat sebesar 21,1% dibandingkan dengan posisi pada 2015. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan defisit APBN. Sementara itu, kebijakan pemerintah untuk mengurangi penarikan pinjaman luar negeri terus berlanjut sampai tahun 2016. Akibatnya, posisi ULN pemerintah dalam bentuk perjanjian pinjaman turun secara gradual dari 68,1 miliar dolar AS pada tahun 2010 menjadi sebesar 54,2 miliar dolar AS pada 2016.

Berdasarkan jangka waktu sisa, struktur posisi ULN juga tergolong sehat. Hal ini tercermin pada posisi ULN jangka panjang yang lebih dominan yakni sebesar 262,3 miliar dolar AS atau 86,7% terhadap total posisi ULN (Grafik 4.20). Posisi ULN jangka panjang yang lebih dominan dibandingkan dengan posisi ULN jangka pendek terlihat tidak hanya pada sektor publik, tetapi juga pada sektor swasta.

Grafik 4.20. Perkembangan ULN Indonesia Menurut Jangka Waktu Sisa (*Remaining Maturity*)

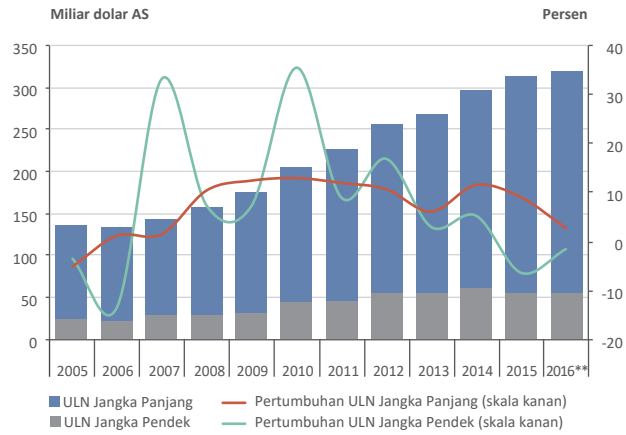

**Angka sangat sementara
Sumber: Bank Indonesia, BPS, diolah

Boks 4.1. Industri Jasa Pelayaran dan Defisit Neraca Jasa

Gambar 1. Sumber Utama Defisit Neraca Jasa di Transportasi Laut

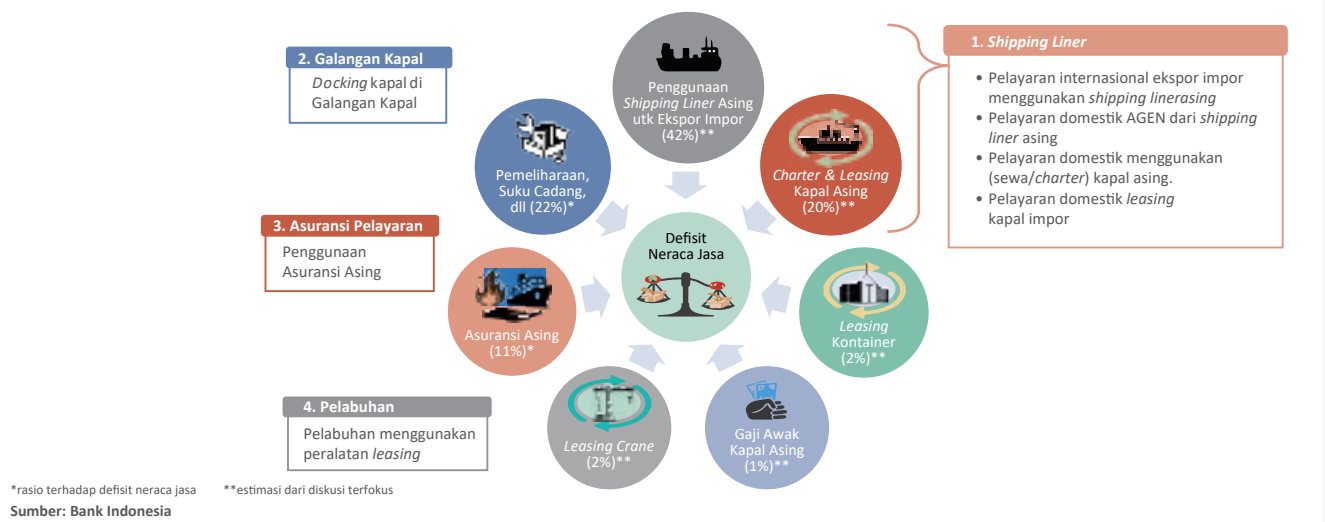

*rasio terhadap defisit neraca jasa **estimasi dari diskusi terfokus

Sumber: Bank Indonesia

Neraca jasa dalam NPI selalu mengalami defisit. Sektor jasa pelayaran laut adalah penyumbang terbesar defisit neraca jasa tersebut. Neraca jasa ini merupakan indikator kekuatan industri transportasi domestik dalam melayani perdagangan antar pulau dan antar negara. Struktur defisit neraca jasa sebagian besar disumbang oleh jasa transportasi yang mencapai 78%, khususnya untuk transportasi barang. Tingginya defisit jasa transportasi (*freight*), antara lain disebabkan oleh cukup tingginya ketergantungan terhadap kapal asing.

Data menunjukkan kapal asing memiliki peran yang cukup dominan dalam jasa pelayaran di Indonesia. Ketergantungan terhadap jasa pelayaran asing mencapai sekitar 95% untuk kegiatan ekspor-impor internasional, sedangkan untuk angkutan laut dalam negeri, pangsa kapal asing sebesar 40%. Hasil kajian Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa kapal asing menguasai 78% jumlah kapal, 94% daya angkut, dan 90% muatan ekspor-impor. Sementara itu, pelaku usaha kapal Indonesia hanya menguasai kapal-kapal dengan daya angkut yang relatif kecil. Pelayaran laut domestik walaupun dilayari oleh 100% armada domestik masih tetap menggunakan kapal buatan asing (melalui fasilitas *charter* atau *leasing*) atau merupakan perusahaan agen pelayaran asing. Secara garis besar, sumber utama penyebab defisit necara jasa dapat terbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu: Industri Jasa Pelayaran atau *Shipping Liner* (62%), diikuti oleh Industri Galangan Kapal (22%), Jasa Keuangan Asuransi (11%), dan Pelabuhan (2%).

Pelayaran domestik menghadap tantangan yang tidak ringan. Armada domestik tidak mampu melayani perdagangan internasional karena belum mencapai skala ekonomi dan kalah bersaing dengan pelayaran asing yang jauh lebih murah karena ekses suplai sesudah *Global Financial Crisis* (GFC). Di sisi lain, kebijakan dan aturan yang belum harmonis dan terintegrasi antara pemangku kebijakan terkait menyebabkan pelaku swasta domestik di bidang jasa pelayaran laut dan galangan kapal tidak memiliki insentif yang cukup untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha. Oleh karena itu pelaku swasta domestik tertahan di industri dengan skala ekonomi rendah dan tidak cukup menguntungkan untuk bermain di level internasional.

Profil Industri Pelayaran Domestik Setelah Pemberlakuan Asas *Cabotage*

Pemerintah menerapkan asas *cabotage* yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 untuk mengatasi dominasi asing. Penerapan asas *cabotage* bertujuan untuk mendorong pengembangan industri pelayaran nasional dengan cara memberi hak kepada perusahaan pelayaran nasional untuk beroperasi secara eksklusif di perairan Indonesia. Sesudah diterapkan melalui Inpres No.5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang kemudian diperkuat dengan UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, industri pelayaran tumbuh pesat. Pada 2005, jumlah kapal niaga berbendera Indonesia baru 6.041 unit, namun pada 2015 jumlah kapal

Grafik 1. Jumlah Armada Pelayaran Nasional

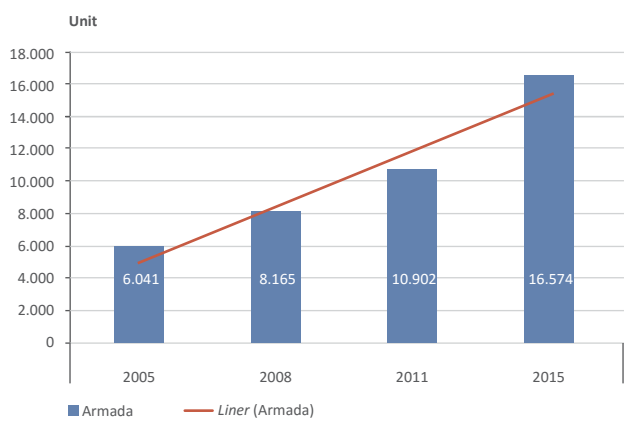

Sumber: INSA

menjadi 16.574 unit, atau naik 174% (Grafik 1). Secara umum, industri pelayaran di Indonesia dikuasai oleh lima perusahaan pelayaran dengan total pangsa pasar 50,4% (Grafik 2).[1]

Tantangan Struktur Spasial Ekonomi Indonesia dan Perbaikan Infrastruktur Maritim

Pola penyebaran industri yang berpusat di Jawa dan ketidakseimbangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa berdampak pada tingginya biaya logistik. Hal tersebut

Grafik 2. Pangsa Pasar Pelayaran Nasional

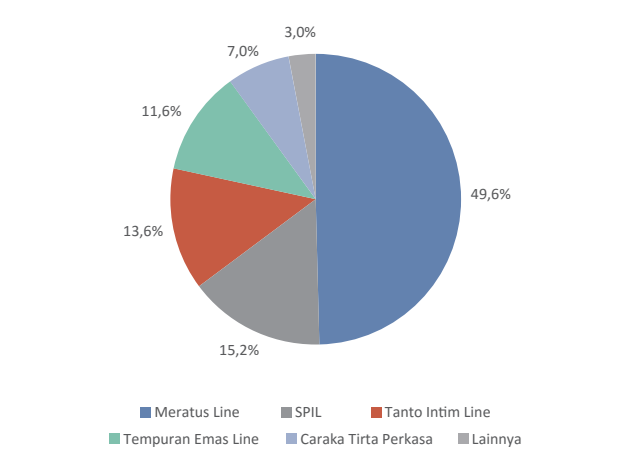

Sumber: Alphaliner, Gurning (2016), data diolah

berujung pada ketidakseimbangan volume perdagangan antar wilayah yang sering disebut sebagai *empty backhaul problem* di dunia pelayaran, yaitu ketidakseimbangan perdagangan antara *destination* dan *origin*. Singkatnya, pelayaran terisi penuh hanya pada satu arah. Barang kebutuhan industri di Jawa umumnya berasal dari impor (bahan baku dan penolong), sedangkan kebutuhan di luar Jawa, umumnya dipasok dari Jawa. Akibatnya, pengusaha pelayaran cenderung membebankan seluruh biaya operasional kapal kepada pengirim barang dari Jawa karena tidak memiliki kepastian apakah kapalnya akan terisi dalam perjalanan pulang. Hal tersebut menyebabkan biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain.

Keterbatasan infrastruktur pelayaran, terutama di kawasan timur Indonesia, ikut berkontribusi pada tingginya biaya logistik antar pulau. Sebagian besar pelabuhan di Indonesia masih merupakan pelabuhan tradisional dengan *draft* (level kedalaman air pelabuhan) relatif dangkal (Gambar 2). Hal tersebut menyebabkan Pelabuhan domestik hanya dapat dilayani oleh kapal-kapal berukuran kecil, atau hanya dapat melayani kapal kontainer dengan kapasitas maksimum 5.000 TEUs. Sementara pelabuhan di negara lain sudah dapat menampung kapal dengan ukuran s.d. 18.000 TEUs. Dangkalnya pelabuhan juga berdampak pada keputusan perusahaan pelayaran nasional untuk menggunakan kapal kecil sebagai angkutan peti kemas (kontainer) domestik, sehingga menyebabkan biaya per-TEU menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan kapal besar.

Penggunaan kapal kontainer yang lebih besar merupakan prasyarat logistik modern yang lebih murah dan efisien. Selama kurun waktu 2016, *Harper Petersen Index* mencatat kondisi ekses suplai bahkan membuat harga sewa kapal turun lebih dari separuh harga sewa tahun 2004[2]. Penurunan lebih tajam dialami oleh kapal dengan bobot lebih besar, sehingga membuat harga sewa kapal 3.500 TEUs (± 50.000 DWT) lebih murah dibandingkan harga sewa kapal 1.700 TEUs (± 25.000 DWT). Sampai bulan November 2016, biaya sewa per hari per TEUs menggunakan kapal 3.500 TEUs lebih murah 43,44% dibandingkan menggunakan kapal 1.700 TEUs. Dengan demikian, penggunaan kapal lebih besar yakni 3.500 TEUs akan sanggup memotong biaya logistik kurang lebih 56,56%, bila dibandingkan dengan menggunakan kapal 1.700 TEUs yang rata-rata dipakai oleh perusahaan pengangkutan di Indonesia. Namun, peningkatan kapal

1 Berdasarkan data di awal 2016, bila jumlah kapal dan kapasitas angkut lima maskapai laut terbesar Indonesia tersebut dijadikan dalam satu perusahaan, maka jumlah kapal total adalah sebanyak 180 kapal dan kapasitas angkut 118,345 TEUs. Perusahaan tersebut akan menduduki peringkat 5 dunia dalam hal jumlah kapal dan peringkat 21 dunia dalam hal kapasitas angkut.

2 Harper Petersen Index (HARPEX) adalah indeks internasional yang mentabulasi *charter rates* harian tertimbang untuk tujuh ukuran kelas kapal dari seluruh kapal kontainer yang beroperasi di perairan internasional. Indeks ini bisa diakses di http://www.harperpetersen.com/harpex/harpexRH.csv

Gambar 2. **Kedalaman Pelabuhan dan Ukuran Kapal**

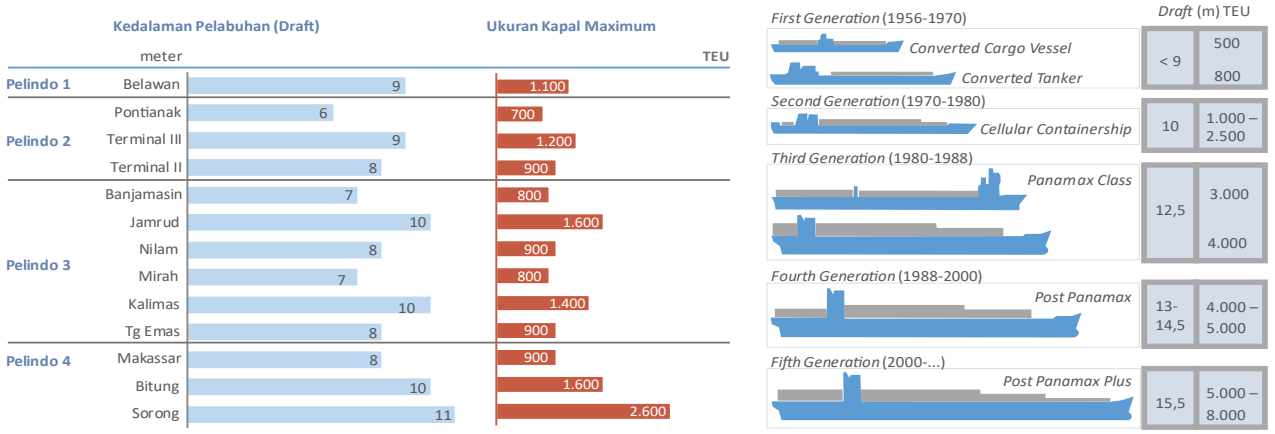

Sumber: McKinsey Global Institute Analysis

kontainer tersebut perlu diikuti dengan peningkatan *draft* pelabuhan menjadi minimal 12,5 meter (Gambar 3).

Tantangan Industri Maritim Terintegrasi dan Cita-cita Memiliki Kapal Buatan Indonesia

Faktor terakhir penyebab dominasi asing adalah ketergantungan pelayaran domestik terhadap kapal impor, karena lemahnya daya saing kapal buatan dalam negeri baik dari segi harga, kualitas, dan kecepatan pembuatan. Proses impor material input yang panjang juga mengakibatkan proses pembuatan di dalam negeri relatif lebih lama. Sementara turunnya perdagangan dunia menyebabkan harga kapal bekas asing lebih murah karena keadaan yang kelebihan suplai. Perbaikan dan reparasi kapal seringkali dilakukan di galangan kapal luar negeri karena tidak memadainya jumlah galangan kapal domestik dengan proses yang lama dan mutu yang lebih rendah. Relatif tingginya kandungan impor pengadaan kapal ini juga berdampak pada defisit neraca perdagangan nasional.

Simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa penambahan kapal merupakan variabel paling penting untuk menurunkan defisit neraca jasa. Pengurangan defisit terbesar adalah bila Indonesia memproduksi kapal sendiri dengan total pengurangan defisit 0,14%. Sebaliknya, bila penambahan kapal dilakukan dengan mekanisme impor, maka pengurangan defisit hanya sebesar 0,05%. Analisis Input-Output juga menunjukkan bahwa industri kapal sangat krusial dan membawa dampak ke berbagai sektor.

Saat ini, salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kekurangan galangan kapal, khususnya di Pulau Jawa, sebagai dampak dari pertumbuhan jumlah kapal yang sangat besar. Dari 250 industri galangan kapal yang terdaftar, hanya sekitar 40% yang terhitung aktif beroperasi, di mana sebagian besar industri galangan kapal domestik hanya mampu memenuhi sekitar 35% dari kebutuhan bangunan baru untuk kapal, dan 85% untuk reparasi kapal. Hal tersebut cukup mempersulit perusahaan pelayaran karena kapal harus mengantri selama 2-3 bulan untuk perbaikan. Apabila diperlukan perbaikan mendesak, perusahaan pelayaran akan menggunakan galangan kapal di negara lain, sehingga menyebabkan kerugian dalam bisnis akibat kehilangan potensi penerimaan. Sebagai ilustrasi, Jakarta menjadi titik akhir dari 67% kapal di Indonesia, namun jumlah galangan kapal di Jakarta hanya 15% dari total galangan kapal yang ada di Indonesia (Grafik 3 & Grafik 4).

Permasalahan di industri maritim berdampak pada defisit neraca jasa Indonesia. Permasalahan industri maritim

Grafik 3. **Kapasitas Galangan Kapal Indonesia**

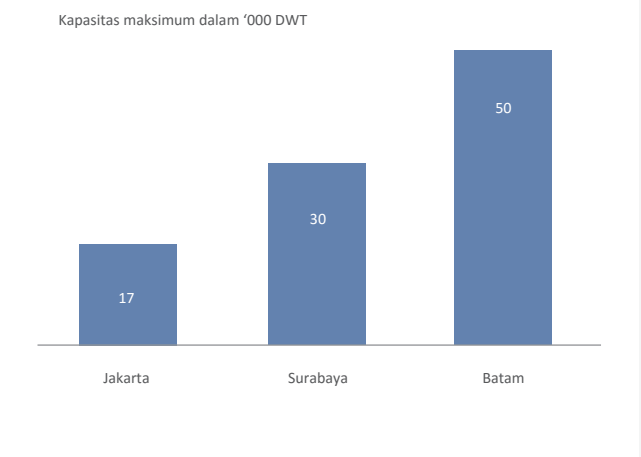

Sumber: INSA (2012 dan 2014); Departemen Perindustrian (2014) dikutip dalam Gurning (2016)

Gambar 3. **Kedalaman Pelabuhan**

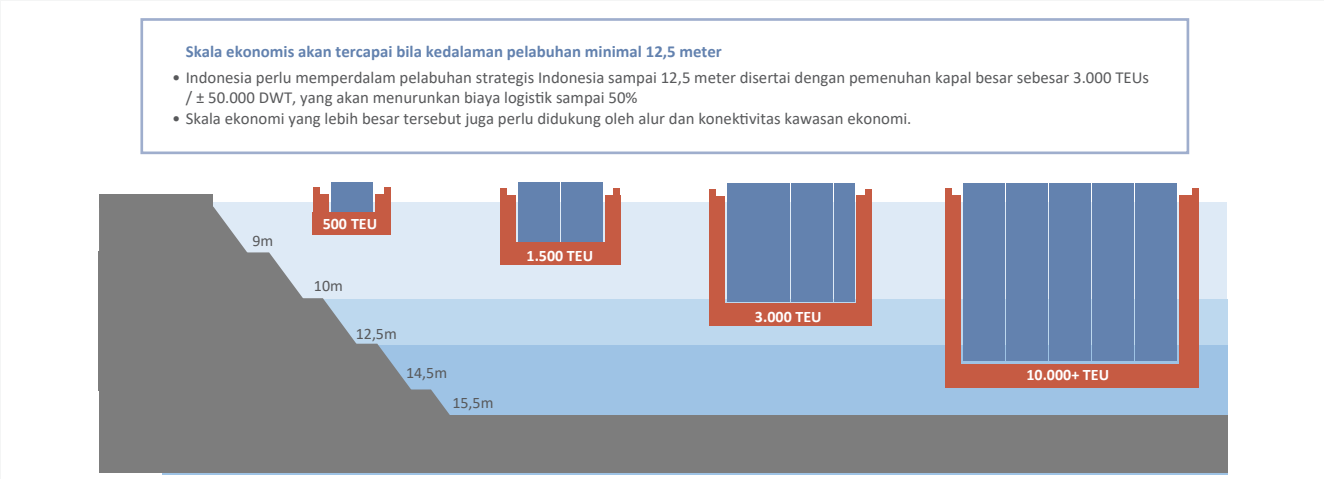

Sumber: Departemen Perhubungan, diolah

domestik terletak pada struktur industri yang ditandai oleh rendahnya daya dukung sektor hulu (industri galangan kapal), terbatasnya pangsa pasar sektor antara (industri jasa pelayaran), dan minimnya preferensi penggunaan jasa pelayaran domestik di sektor hilir (industri manufaktur). Sementara syarat penting untuk bisa mendorong berkembangnya industri maritim adalah kuatnya industri galangan kapal domestik. Tanpa syarat ini, akibat jangka pendek adalah kapal buatan domestik lebih mahal dan lebih lama proses pembuatannya. Dalam jangka panjang, pilihan impor kapal yang lebih murah justru akan memperbesar defisit neraca barang.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, upaya untuk memperbaiki neraca jasa dapat ditempuh dengan membuat industri maritim terintegrasi dengan perkembangan daerah.

Grafik 4. **Kapasitas Industri Galangan Kapal (Reparasi)**

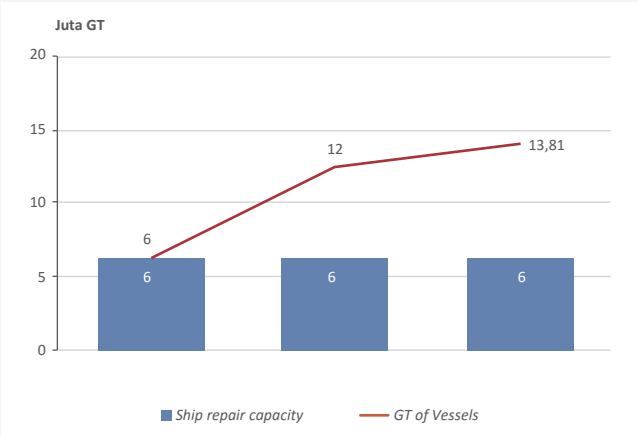

Sumber: BPS INSA (2012 dan 2014); Departemen Perindustrian (2014) dikutip dalam Gurning (2016)

Membangun kapal buatan Indonesia sangat penting artinya bagi pembangunan perekonomian daerah disertai peta spasial perdagangan Indonesia. Pemerintah juga perlu melakukan inovasi kebijakan supaya industri galangan kapal tumbuh dan efisien.

Selama tahun 2016, pemerintah memberikan penekanan yang lebih besar untuk sektor maritim. Beberapa langkah strategis pemerintah antara lain dengan konsolidasi departemen dan lembaga terkait untuk memperbaiki berbagai indikator efektivitas sektor jasa. Pembentukan satuan tugas untuk menurunkan *dwell time* merupakan salah satu bagian konsolidasi ini. Untuk mendukung galangan kapal domestik, beberapa departemen terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng galangan kapal domestik untuk memenuhi kebutuhan kapal.

BAB 5
Nilai Tukar

Nilai tukar rupiah pada 2016 secara umum bergerak dalam arah menguat disertai volatilitas yang menurun. Penguatan nilai tukar rupiah secara fundamental dipengaruhi perbaikan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia, termasuk akibat aliran masuk modal asing yang meningkat sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian. Penguatan rupiah juga tidak terlepas dari pengaruh positif kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia terkait nilai tukar, Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian untuk korporasi yang memiliki utang luar negeri, dan Kewajiban Penggunaan Rupiah. Penguatan rupiah pada 2016 juga diikuti dengan perbaikan komposisi lalu lintas modal di pasar valas dan penguatan struktur pasar valas domestik.

Keterangan gambar:
Uang kertas Rupiah dan dolar AS. Kestabilan nilai tukar menjadi salah satu fokus bauran kebijakan Bank Indonesia. Pada 2016, nilai tukar rupiah tetap terjaga dan cenderung mengalami penguatan di tengah tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Nilai tukar rupiah pada 2016 secara umum bergerak dalam arah menguat disertai volatilitas yang menurun. Secara rata-rata, rupiah menguat dari Rp13.392 per dolar AS pada tahun 2015 menjadi Rp13.305 per dolar AS atau menguat 0,7%. Secara *point-to-point*, nilai tukar rupiah juga menguat 2,3% (yoy) hingga ditutup pada level Rp13.473 per dolar AS di akhir 2016 (Grafik 5.1). Volatilitas rupiah juga menurun dari 11,1% pada 2015 menjadi sebesar 8,4%. Perkembangan rupiah yang menguat cukup stabil tersebut terjadi di tengah banyak mata uang negara berkembang pada 2016 bergerak dalam arah melemah.

Penguatan nilai tukar rupiah secara fundamental dipengaruhi perbaikan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). NPI pada 2016 mencatat surplus yang didorong menurunnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat. Surplus transaksi modal finansial yang meningkat tidak terlepas dari pengaruh aliran masuk modal asing yang naik pada 2016. Aliran masuk modal asing dipengaruhi oleh imbal hasil yang menarik dan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian, termasuk pengaruh kebijakan amnesti pajak. Penguatan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi konsistensi sinergi kebijakan, termasuk kebijakan Bank Indonesia terkait nilai tukar, Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) untuk korporasi yang memiliki utang luar negeri, dan Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penguatan nilai tukar rupiah pada 2016 diikuti perbaikan komposisi lalu lintas modal di pasar valas dan penguatan struktur pasar valas domestik. Komposisi lalu lintas modal di pasar valas membaik tercermin pada meningkatnya pasokan valas baik dari pelaku nonresiden maupun pelaku residen. Sementara itu, penguatan struktur valas domestik terlihat pada peningkatan volume transaksi valas di pasar *spot*, *forward*, dan *swap*.

5.1. DINAMIKA NILAI TUKAR RUPIAH

Penguatan nilai tukar rupiah pada 2016 terutama terlihat pada tiga triwulan pertama 2016 dan sebelumnya kemudian melemah pada triwulan terakhir 2016. Nilai tukar rupiah pada akhir 2016 ditutup di level Rp13.473 per dolar AS atau secara *point-to-point* menguat 2,3% (yoy) dibandingkan dengan level akhir 2015. Secara rata-rata, rupiah menguat dari Rp13.392 per dolar AS pada tahun 2015 menjadi Rp13.305 per dolar AS atau menguat 0,7%. Volatilitas rupiah juga menurun dari 11,1% pada 2015 menjadi sebesar 8,4%. Rupiah yang menguat berbeda dengan perkembangan mata uang negara berkembang lain yang pada 2016 secara umum bergerak dalam arah melemah, seperti Afrika Selatan (-13,1%), Turki (-9,9%), Malaysia (-5,7%), India (-4,5%), Brasil (-4,2%), Filipina (-4,1%), Thailand (-2,9%), dan Korea (-2,5%). Volatilitas mata uang beberapa negara lain juga meningkat lebih tinggi dibandingkan volatilitas nilai tukar rupiah (Grafik 5.2).

Pada triwulan I 2016, nilai tukar rupiah menguat disertai dengan volatilitas yang menurun. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2016 tercatat Rp13.525 per dolar AS atau menguat sebesar 1,8% (qtq) dibandingkan dengan level triwulan IV 2015. Volatilitas nilai tukar rupiah juga menurun tajam dari triwulan IV 2015 yang mencapai 16,7% menjadi 10,3%. Penguatan nilai tukar rupiah pada triwulan I 2016 cukup menggembirakan mengingat saat bersamaan berbagai risiko dari eksternal belum mereda. Persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia dan penurunan risiko domestik dapat meminimalkan berbagai risiko dari eksternal. Risiko eksternal sempat

Grafik 5.1. Nilai Tukar Rupiah

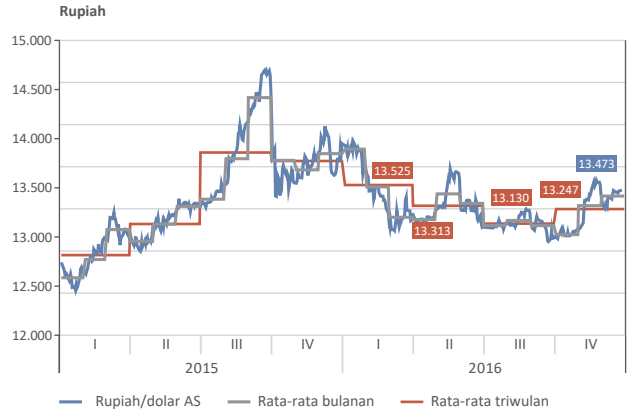

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.2. Perbandingan Nilai Tukar Rupiah dan *Peers*

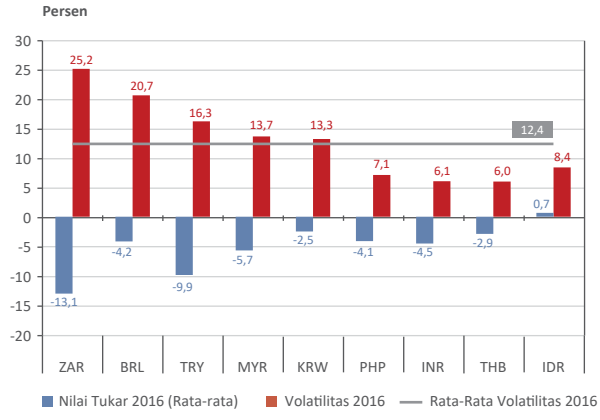

Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah

meningkat pada Januari 2016 dipicu tekanan di pasar uang dan bursa saham Tiongkok. Hal tersebut bermula dari implementasi *'circuit breaker'* di bursa saham Tiongkok guna mengantisipasi *net* jual berlebihan yang justru berbalik menimbulkan kepanikan di pasar keuangan. Tekanan dari eksternal pada Januari 2016 juga dipengaruhi penurunan harga minyak dunia ke level di bawah 30 dolar AS per barel akibat berlimpahnya pasokan. Penurunan harga minyak itu dikhawatirkan akan memengaruhi prospek negara-negara penghasil komoditas. Pada Februari 2016, tekanan eksternal lebih terkendali seiring dampak positif berbagai kebijakan stabilisasi yang ditempuh otoritas Tiongkok serta arah kebijakan bank sentral AS pada bulan Maret 2016 yang lebih *dovish*.

Penguatan nilai tukar rupiah berlanjut pada triwulan II 2016, meskipun dengan besaran yang lebih terbatas. Secara rata-rata, rupiah menguat sebesar 1,6% (qtq) dan mencapai Rp13.313 per dolar AS. Penguatan nilai tukar rupiah pada periode ini dipengaruhi persepsi positif investor dan risiko perekonomian yang tetap terkendali. Nilai tukar rupiah tetap menguat pada triwulan II 2016 ditopang oleh sentimen positif domestik atas pengesahan UU amnesti pajak sehingga meningkatkan optimisme penanaman modal di Indonesia.

Penguatan nilai tukar rupiah sedikit tertahan pada triwulan II 2016 terutama dipengaruhi pernyataan beberapa pejabat bank sentral AS dan rilis hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada April 2016 yang memberikan sinyal kenaikan Fed Funds Rate (FFR). Rilis tersebut menyatakan kenaikan FFR pada FOMC Juni 2016 masih dimungkinkan jika data ekonomi AS konsisten dengan penguatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2016, perbaikan pasar tenaga kerja masih berlanjut, dan peningkatan inflasi menuju target 2% tetap berlangsung. Dalam perkembangannya, ketidakpastian pasar global berkurang setelah muncul pernyataan Gubernur Bank Sentral AS pada akhir Juni 2016 bahwa kenaikan FFR akan dilakukan bertahap dan lebih berhati-hati.

Penguatan nilai tukar rupiah pada triwulan II 2016 yang lebih terbatas juga dipengaruhi kekhawatiran atas hasil referendum di Inggris. Kekhawatiran mulai meningkat saat *polling* terhadap kemungkinan hasil referendum pada 13 Juni 2016 yang mengarah pada keluarnya Inggris dari Uni Eropa *(Brexit)*. Kekhawatiran berlanjut setelah pelaksanaan referendum menghasilkan *"leave vote"* sebagai pemenang. Hasil referendum tersebut kurang sejalan dengan ekspektasi pelaku pasar memicu kenaikan risiko global sebagaimana terlihat dari kenaikan VIX (Grafik 5.3).

Grafik 5.3. Perkembangan VIX dan CDS

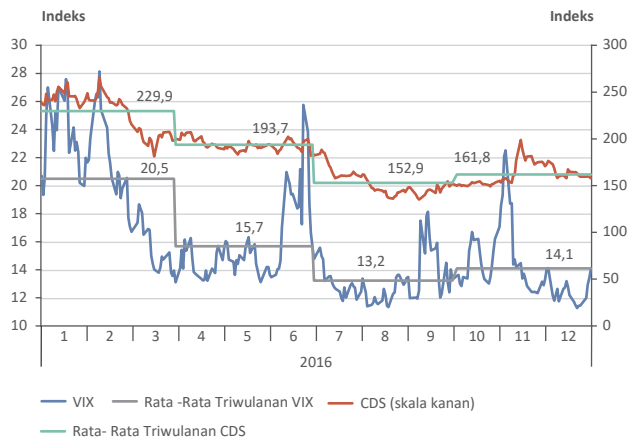

Sumber: Bloomberg

Penguatan nilai tukar rupiah masih berlanjut pada triwulan III 2016. Secara rata-rata, rupiah menguat sebesar 1,4% (qtq) dan mencapai level Rp13.130 per dolar AS. Penguatan terutama didorong sentimen positif atas program amnesti pajak periode pertama yang berakhir pada September 2016. Sentimen positif atas program amnesti pajak mendorong peningkatan aliran dana masuk ke Indonesia. Aliran dana masuk meningkat cukup besar mencapai 4,8 miliar dolar AS, baik pada instrumen SBI, SUN, maupun saham. Sentimen positif atas program amnesti pajak dapat meminimalkan risiko eksternal yang meningkat karena rencana kenaikan FFR dan jelang pemilihan presiden AS. Peningkatan risiko eksternal tersebut terlihat dari kenaikan VIX triwulan III 2016 yang rata-rata mencapai 14,1, lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi triwulan II 2016 sebesar 13,2.

Pada triwulan IV 2016, rupiah mendapat tekanan depresiasi akibat faktor eksternal. Rupiah pada triwulan IV 2016 secara rata-rata tercatat di level Rp13.247 per dolar AS atau terdepresiasi 0,9% (qtq). Faktor eksternal yang memberikan tekanan terhadap rupiah terutama bersumber dari perkembangan positif ekonomi AS dan hasil Pemilihan Presiden AS yang berbeda dengan ekspektasi pasar. Risiko eksternal memberikan tekanan terhadap mata uang secara global, termasuk rupiah. Penguatan mata uang dolar secara global tercermin pada penguatan indeks dolar terhadap mata uang dunia dan Asia yang masih berlanjut pada Desember 2016 (Grafik 5.4). Kenaikan FFR yang direalisasikan pada pertengahan Desember 2016 turut memperkuat mata uang dolar sehingga menambah tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

Faktor eksternal yang memberikan tekanan terhadap rupiah pada triwulan IV 2016 juga dipicu respons kebijakan negara lain yang di luar ekspektasi pasar. Respons negara

Grafik 5.4. Perkembangan Indeks Dolar

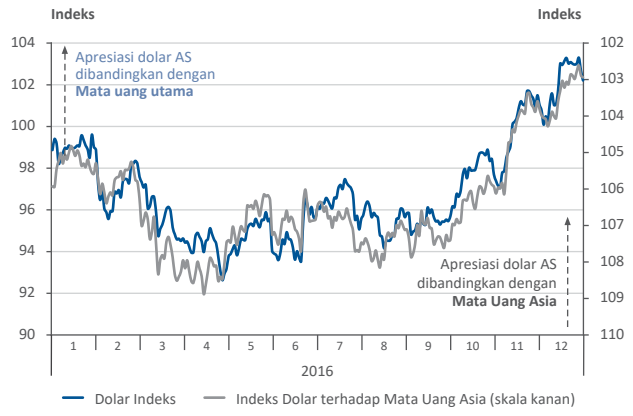

Sumber: Bloomberg

lain tersebut kemudian memberikan tekanan kepada mata uang kawasan, termasuk rupiah. Kebijakan tersebut seperti kebijakan yang diadopsi oleh bank sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia (BNM), untuk merespons depresiasi ringgit pasca Pemilihan Presiden AS. Bank sentral Malaysia melarang bank untuk melakukan penjualan valas kepada pelaku *offshore* dan hanya boleh menjual valas kepada *onshore* dengan kurs yang lebih rendah atau sama dengan rentang perdagangan penutupan hari sebelumnya. Pembatasan tersebut dianggap pasar sebagai *unofficial capital control* sehingga juga memberikan tekanan depresiasi tambahan kepada mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah.

Dinamika nilai tukar rupiah pada 2016 secara umum menggambarkan penguatan rupiah banyak dipengaruhi terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik, stabilitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang tetap terkendali, kebijakan makroekonomi yang tetap dalam koridor sehat, dan sinergi kebijakan yang semakin solid, menjadi faktor-faktor yang mendukung persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Persepsi positif investor yang kemudian mampu menjadi daya tarik aliran masuk modal asing ke Indonesia dan mendukung penguatan rupiah.

Persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian juga dipengaruhi program amnesti pajak yang ditempuh Pemerintah. Di satu sisi, penguatan rupiah dipengaruhi dampak langsung repatriasi dana dari luar negeri dalam kaitan dengan program Amnesti Pajak. Di sisi lain, penguatan rupiah juga dipengaruhi persepsi terhadap ketahanan fiskal jangka menengah. Hal ini karena program amnesti pajak yang berhasil tidak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga akan memperkuat ketahanan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Penguatan nilai tukar rupiah pada 2016 juga ditopang imbal hasil obligasi Indonesia yang tetap menarik. Pada tahun 2016, imbal hasil obligasi negara Indonesia mencapai 15,8%, meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya yang tercatat negatif 5,9% (Grafik 5.5). Imbal hasil pada 2016 bahkan tercatat lebih tinggi dari rata-rata imbal hasil tahunan dalam sepuluh tahun terakhir. Perkembangan imbal hasil obligasi Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil negara *peers* (Grafik 5.6).

Penguatan nilai tukar rupiah tersebut tidak terlepas dari dampak positif implementasi beberapa kebijakan Bank Indonesia. Berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia berkontribusi positif pada perilaku permintaan terhadap dolar sehingga menjadi lebih terukur dan terkendali. Perkembangan positif ini pada gilirannya berdampak bagi stabilitas nilai tukar rupiah pada 2016 yang tetap terjaga.

Kebijakan pertama berkaitan dengan ketentuan tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. PBI tersebut menegaskan setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah NKRI, baik dilakukan penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun nontunai, sepanjang dilakukan di Wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi nontunai berupa sanksi administratif. Meskipun PBI tersebut diterbitkan pada tahun 2015, implementasi dari PBI terlihat semakin efektif

Grafik 5.5. Imbal Hasil Obligasi Negara Indonesia

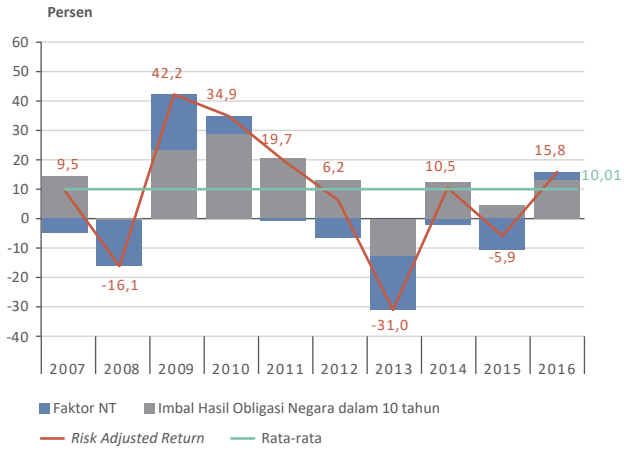

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 5.6. Perbandingan Imbal Hasil Investasi Obligasi Negara

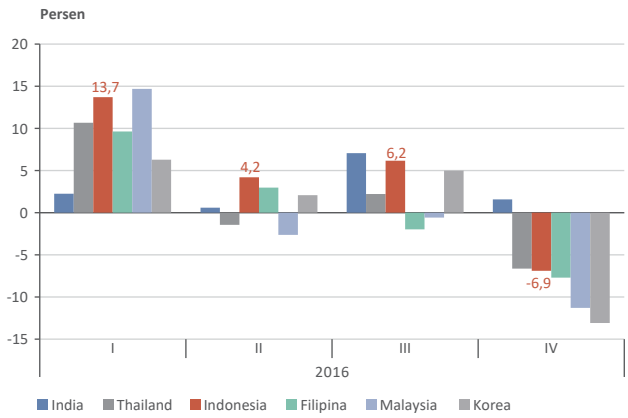

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 5.7. Transaksi Valas Domestik dan Nilai Tukar Rupiah

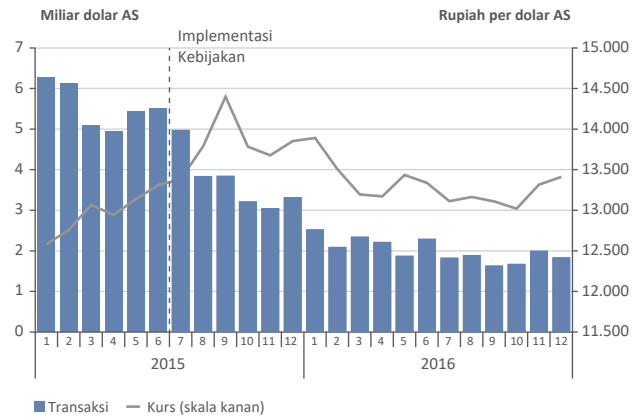

Sumber: Bank Indonesia, Reuters

pada 2016 terindikasi dari transaksi valas domestik antar penduduk yang berada dalam tren menurun sejak Juli 2015 (Grafik 5.7).

Kebijakan kedua berkaitan dengan ketentuan pengendalian risiko Utang Luar Negeri (ULN) melalui tahapan implementasi Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK).[1] Ketentuan tersebut mengatur tiga hal. Pertama, ketentuan rasio lindung nilai dengan nilai minimum sebesar 25%. Kedua, korporasi yang memiliki ULN wajib memenuhi rasio likuiditas dengan nilai minimum sebesar 70%. Ketiga, korporasi yang akan menerbitkan atau melakukan penarikan ULN baru setelah tanggal 1 Januari 2016 diwajibkan untuk menyampaikan informasi pemenuhan minimum peringkat utang BB-.

Beberapa perkembangan positif dicapai setelah implementasi KPPK. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pelaporan KPPK dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Jumlah korporasi yang wajib melapor KPPK pada triwulan III 2016 sebanyak 2.679 korporasi, meningkat 1,8% (qtq) dibandingkan dengan jumlah korporasi triwulan sebelumnya. Jumlah pelapor tersebut juga telah meningkat sebesar 7,2% dibandingkan dengan posisi triwulan IV 2015. Dari pelapor pada triwulan III 2016, sebanyak 2.532 (94,5%) telah melakukan pelaporan KPPK dengan data yang dapat diolah. Secara nominal, nilai utang korporasi pelapor telah mewakili 84,9% dari total posisi ULN seluruh korporasi pelapor ULN swasta.

Tingkat kepatuhan pelapor KPPK juga meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2016, tercatat sebanyak 88,6% dari total pelapor yang sudah memenuhi rasio lindung nilai untuk 0-3 bulan, lebih tinggi dari rasio kepatuhan pada triwulan III 2015 yaitu sebesar 83,5%. Sementara itu, sebanyak 93,6% pelapor KPPK telah memenuhi rasio lindung nilai sebesar 3-6 bulan dan sebanyak 86,5% pelapor sudah memenuhi rasio likuiditas. Rasio-rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di periode yang sama tahun 2015 (Grafik 5.8). Dari pemenuhan peringkat utang minimum, sebanyak 32,8% dari korporasi wajib lapor telah menyampaikan informasi peringkat utang pada bulan Desember 2016. Angka

Grafik 5.8. Rasio Kepatuhan Pelapor KPPK Berdasarkan Jumlah Perusahaan

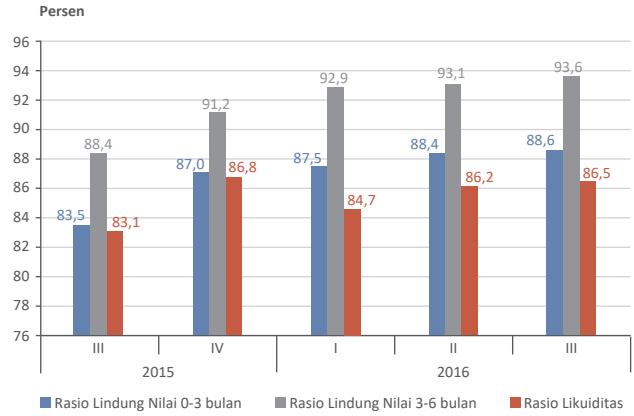

Sumber: Bank Indonesia

1 Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) adalah kegiatan korporasi nonbank yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang berlebihan (*overleverage*) terhadap utang luar negeri yang dimiliki. Ketentuan ini mewajibkan korporasi nonbank untuk menghitung *asset* dan kewajiban valasnya pada periode 0 s.d 3 bulan dan 3 s.d 6 bulan mendatang. Korporasi yang memiliki ULN dalam valas wajib menerapkan KPPK dengan memenuhi rasio lindung nilai minimum, rasio likuiditas minimum dan pemenuhan minimum peringkat utang yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan terkait KPPK didasari oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.

Persentase tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan kondisi Januari 2016 yang mencapai 7,9%. Dari sejumlah korporasi yang telah melaporkan *credit rating*-nya pada Desember 2016, seluruhnya telah memenuhi ketentuan peringkat utang minimum.

Berbagai persepsi positif terhadap prospek perekonomian tersebut pada gilirannya berkontribusi pada penurunan risiko perekonomian. Data menunjukkan *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia sebagai proksi dari indikator risiko terlihat dalam arah menurun pada tahun 2016. Bila pada triwulan I 2016 rata-rata CDS Indonesia masih berada pada level 229, CDS pada triwulan IV 2016 telah turun menjadi rata-rata 161. Volatilitas CDS Indonesia juga cukup kecil sehingga semakin memperkuat indikasi terjaganya persepsi positif investor, meskipun pada sisi lain volatilitas dolar dalam periode yang sama tercatat cukup tinggi seperti tercermin pada indikator VIX yang berfluktuatif.

5.2. LALU LINTAS MODAL DI PASAR VALAS DOMESTIK

Penguatan nilai tukar rupiah juga tercermin pada meningkatnya pasokan valas di pasar valas, baik dari pelaku nonresiden maupun pelaku residen. Dari pelaku nonresiden, nilai penjualan jual valas neto pada 2016 tercatat sebesar 12,8 miliar dolar AS, atau meningkat siginifikan dari tahun 2015 yang mencapai 6 miliar dolar AS. Aliran dana valas dari nonresiden tertinggi tercatat pada triwulan III 2016 yakni mencapai 5,8 miliar dolar AS (Grafik 5.9). Sementara itu, pada triwulan IV 2016 peningkatan ketidakpastian eksternal mendorong investor melakukan permintaan valas sehingga terjadi net beli valas oleh nonresiden sebesar 1,2 miliar dolar AS.

Aliran dana valas dari nonresiden antara lain ditempatkan di berbagai instrumen keuangan rupiah. Selama tahun 2016, total aliran dana masuk nonresiden ke instrumen rupiah utama, yakni Surat Utang Negara (SUN), saham dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tercatat sebesar 9,3 miliar dolar AS, naik dari 5,1 miliar dolar AS pada 2015. Peningkatan aliran dana masuk terutama tercatat pada instrumen SUN sebesar 8,0 miliar dolar AS, dan diikuti oleh peningkatan kepemilikan asing pada instrumen saham sebesar 1,2 miliar dolar AS, dan SBI sebesar 0,1 miliar dolar AS. Aliran dana nonresiden ke instrumen keuangan rupiah tercatat paling tinggi terjadi pada triwulan III 2016 sebesar 4,8 miliar dolar AS, sedangkan pada triwulan IV 2016 aliran dana nonresidien asing di ketiga instrumen keuangan rupiah mengalami net beli sebesar 2,8 milar dolar AS (Grafik 5.10).

Peningkatan aliran dana nonresiden pada gilirannya turut berkontribusi mendorong kenaikan harga saham dan obligasi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara rata-rata tumbuh sebesar 2,5% mencapai 5.027, meningkat signifikan dibandingkan kinerja tahun 2015 yang turun sebesar 0,15%. IHSG mencapai posisi tertinggi di 5.472 pada awal Oktober 2016 meskipun kemudian terkoreksi turun hingga 5.028 menjelang akhir tahun akibat meningkatnya risiko global. Sejalan dengan pengaruh positif di pasar saham, aliran dana nonresiden ke obligasi negara juga mendorong imbal hasil obligasi negara tenor 10 tahun secara rata-rata turun dari 8,2% pada 2015 menjadi 7,6% pada 2016.

Perkembangan positif lain juga ditunjukkan pelaku residen di pasar valas domestik. Pelaku domestik juga mencatat penjualan valas neto sebesar 4 miliar dolar AS, setelah pada tahun 2015 mencatatkan pembelian neto mencapai 17,2 miliar dolar AS. Penjualan valas oleh residen pada gilirannya turut menambah pasokan valas dan berkontribusi menopang penguatan rupiah pada 2016. Beberapa faktor

Grafik 5.9. Permintaan - Penawaran Neto Valas di Pasar *Spot*

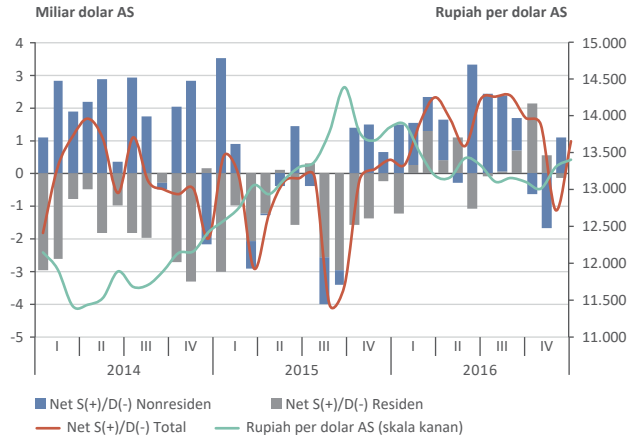

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.10. Aliran Dana Masuk SBI, SUN, dan Saham

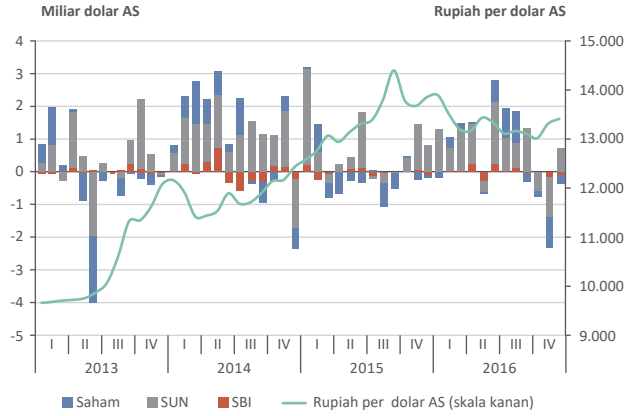

Sumber: Bank Indonesia, BEI, Bloomberg

mendorong pelaku residen melakukan penjualan valas pada 2016 antara lain untuk memenuhi kebutuhan repatriasi amnesti pajak, mengantisipasi ekspektasi apresiasi rupiah pasca program amnesti pajak, dan membaiknya penerimaan ekspor. Pasokan valas residen terlihat meningkat signifikan pada triwulan IV 2016 dipengaruhi batas waktu repatriasi dana program amnesti pajak tahap I yaitu Desember 2016. Selain itu, ekspektasi penguatan rupiah akibat program amnesti pajak turut mendorong pelaku domestik menjual kepemilikan valas. Sementara itu, pasokan valas yang meningkat dari penerimaan ekspor nonmigas terutama terjadi pada triwulan akhir 2016 sejalan dengan perbaikan kinerja ekspor.

5.3. STRUKTUR PASAR VALAS DOMESTIK

Penguatan nilai tukar rupiah pada tahun 2016 juga diikuti perkembangan positif di pasar valas domestik. Volume transaksi valas tercatat meningkat dari rata-rata 4,5 miliar dolar AS per hari pada tahun 2015 menjadi 5 miliar dolar AS per hari pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 10% (Grafik 5.11). Perkembangan ini cukup positif di tengah kondisi kinerja ekspor Indonesia yang belum kuat. Data menunjukkan peningkatan transaksi valas domestik mendorong pangsa transaksi valas terhadap arus perdagangan internasional meningkat dari rata-rata 1,6% pada tahun 2015 menjadi 1,8% terhadap arus perdagangan internasional di tahun 2016.

Perkembangan positif lain dari volume transaksi valas ialah peningkatan volume transaksi valas terjadi di seluruh jenis pasar yakni pasar *spot*, pasar *forward*, dan pasar *swap*. Di pasar *spot*, rata-rata harian volume transaksi meningkat sebesar 15% dari 2,9 miliar dolar AS per hari di tahun 2015 menjadi 3,1 miliar dolar AS per hari pada 2016 (Grafik 5.11).

Grafik 5.11. Perkembangan Transaksi Valas di Pasar Uang

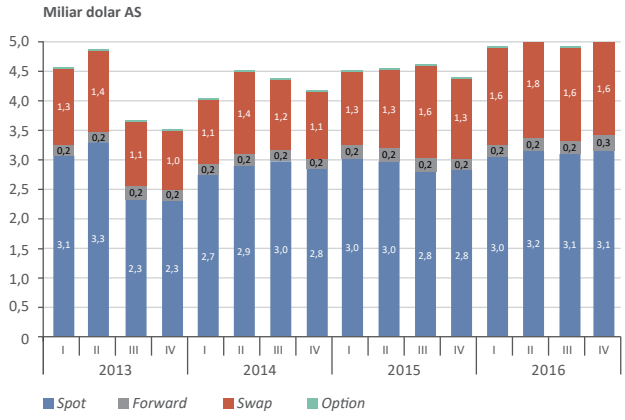

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume transaksi *forward* juga meningkat dari rata-rata per hari sebesar 0,21 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 0,23 miliar dolar AS pada 2016. Sementara di pasar *swap*, rata-rata harian volume transaksi *swap* meningkat 17% dari 1,4 miliar dolar AS per hari tahun 2015 menjadi 1,7 miliar dolar AS pada tahun 2016.

Di pasar *spot*, peningkatan volume transaksi terjadi pada pelaku dalam negeri dan pelaku luar negeri. Pelaku dalam negeri mencatatkan peningkatan volume transaksi (beli dan jual) sebesar 6,7% dari 568 milliar dolar AS menjadi 606 milliar dolar AS. Peningkatan volume transaksi yang signifikan terutama pada transaksi individu yang naik sebesar 400% dari 23 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 115 miliar dolar AS pada 2016. Peningkatan volume transaksi individu antara lain dipengaruhi program Amnesti Pajak. Sementara itu, pelaku luar negeri juga meningkatkan volume transaksi *spot* sebesar 6,9% mencapai 130 miliar dolar AS. Peningkatan volume transaksi *spot* oleh pelaku luar negeri terutama dalam bentuk pasokan valas sebagai dampak dari meningkatnya arus masuk modal investasi ke Indonesia.

Di pasar derivatif, peningkatan volume transaksi juga terjadi baik yang bersumber dari pelaku dalam negeri maupun pelaku luar negeri. Volume transaksi yang dilakukan oleh pelaku dalam negeri meningkat dari 314 miliar dolar AS pada tahun 2015 menjadi 340 miliar dolar AS. Peningkatan terbesar terjadi pada transaksi *swap* sebesar 55%, transaksi *forward* naik sebesar 12%, diikuti transaksi *spot* yang naik sebesar 3%. Sementara itu, transaksi derivatif yang dilakukan oleh pelaku luar negeri juga meningkat dari 151 miliar dolar AS menjadi 197 miliar dolar AS. Kenaikan itu terkait permintaan *hedging* pada triwulan IV 2016 seiring dengan peningkatan tekanan depresiasi rupiah. Dari perkembangan ini, komposisi pasar derivatif di pasar valas domestik meningkat dari 36% total transaksi pada tahun 2015 menjadi sebesar 38% (Grafik 5.12).

Peningkatan pasar derivatif juga tidak terlepas dari pengaruh positif kebijakan Bank Indonesia untuk memberikan fleksibilitas pelaku pasar dalam melakukan transaksi lindung nilai. Di pasar *forward*, kebijakan Bank Indonesia telah menambah fleksibilitas pelaksanaan transaksi *forward* melalui penyelesaian transaksi secara *netting* dalam bentuk *unwind*, *early termination* dan *rollover*. Peningkatan pasar derivatif juga dipengaruhi penerapan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri, termasuk untuk korporasi nonbank yang memiliki utang luar negeri yang diwajibkan untuk melakukan lindung nilai. Ketentuan ini mendorong porsi pembelian valas korporasi di instrumen derivatif

Grafik 5.12. Komposisi Transaksi Derivatif dan *Spot*

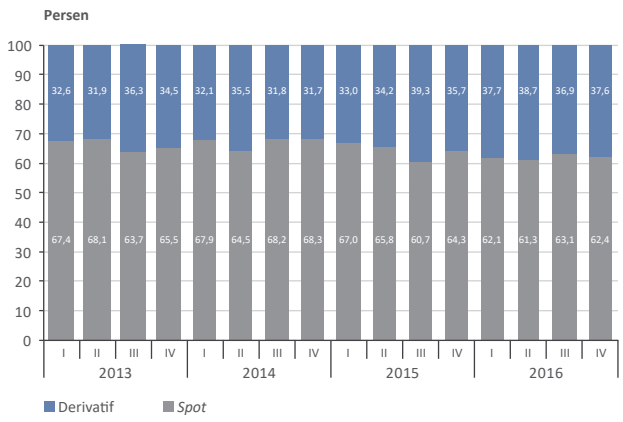

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13. Porsi Volume Transaksi Derivatif oleh Korporasi

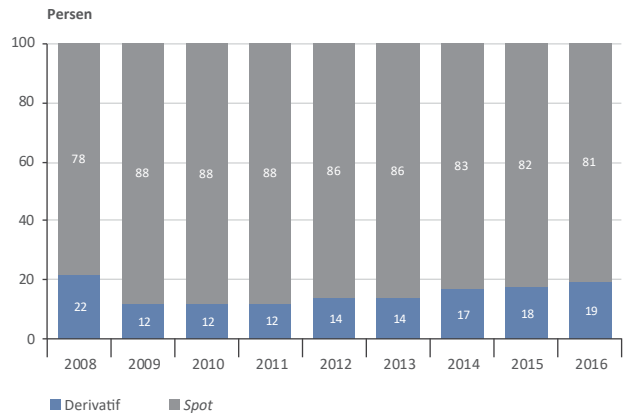

Sumber: Bank Indonesia, diolah

meningkat menjadi 19% pada 2016 dari 18% pada 2015 (Grafik 5.13).

Dalam periode laporan, Bank Indonesia juga meluncurkan instrumen *structured product* baru untuk mendukung upaya pendalaman pasar valas. Instrumen *structured product* ditujukan untuk memberikan opsi instrumen derivatif selain *forward*, *swap*, dan *option* kepada pelaku pasar. Penambahan opsi instrumen derivatif terutama untuk mendorong pelaku pasar melakukan transaksi lindung nilai atas eksposur valas. Instrumen *structured product* valas ini dikenal sebagai *call spread option*.[2] Biaya lindung nilai dengan *call spread option* relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya pada transaksi valas *forward*, meskipun rentang nilai tukar yang dilindungi lebih terbatas. Penambahan opsi instrumen derivatif diharapkan juga dapat mendorong pelaku pasar semakin mampu mengelola risiko *currency mismatch* sehingga menjadi efisien dan memperkuat kedalaman sekaligus ketahanan pasar valuta asing.

2 *Call spread option* adalah gabungan beli dan jual *call option* yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan nominal yang sama namun dengan *strike price* yang berbeda.

BAB 6
Inflasi

Inflasi pada 2016 menurun dan berada pada rentang sasaran 4,0±1%. Perkembangan positif tersebut dipengaruhi inflasi inti yang terkendali seiring permintaan agregat yang terkelola, tekanan eksternal yang minimal, serta ekspektasi inflasi yang menurun. Inflasi *administered prices* juga turun dipengaruhi penurunan harga bahan bakar minyak sejalan kondisi harga minyak dunia yang rendah. Selain itu, inflasi *volatile food* cukup terkendali meskipun sedikit meningkat dipengaruhi dampak fenomena *La Nina*. Inflasi yang rendah pada berbagai komponen tidak terlepas dari dampak positif konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan koordinasi yang solid dengan Pemerintah melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat daerah.

Keterangan gambar:
Aktivitas pasar tempat terbentuknya harga. Inflasi pada 2016 tercatat rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran. Rendahnya inflasi tersebut tidak lepas dari konsistensi kebijakan moneter dan koordinasi solid Bank Indonesia dan Pemerintah mengendalikan inflasi.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2016 tercatat cukup rendah yakni 3,02% sehingga berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar 4,0±1% (Grafik 6.1). Perkembangan inflasi 2016 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada 2015 sebesar 3,35%. Inflasi yang rendah juga tergambar pada dinamika inflasi bulanan sepanjang tahun 2016, yang bahkan lebih kecil dibandingkan dengan pola historisnya. Perbedaan inflasi bulanan hanya terlihat pada April 2016 yang mencatat deflasi akibat turunnya harga bahan bakar minyak dan melimpahnya hasil panen beberapa komoditas pangan strategis. Secara keseluruhan, inflasi IHK pada 2016 merupakan inflasi terendah dalam 7 tahun terakhir.

Tekanan inflasi IHK yang rendah dipengaruhi penurunan inflasi di hampir seluruh komponen inflasi. Inflasi inti cukup terkendali dipengaruhi permintaan agregat yang terkelola, tekanan eksternal yang minimal, serta ekspektasi inflasi yang menurun. Inflasi kelompok *administered prices* juga turun antara lain akibat harga minyak dunia yang masih rendah. Selain itu, inflasi *volatile food* cukup terkendali di tengah gejala *La Nina* yang berisiko meningkatkan inflasi kelompok pangan.

Secara umum, inflasi yang rendah di berbagai komponen tidak terlepas dari dampak positif konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah yang semakin solid dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat daerah, juga berperan dalam pencapaian inflasi yang rendah pada 2016.

6.1. INFLASI INTI

Inflasi inti 2016 tercatat cukup rendah 3,07%, menurun bila dibandingkan dengan inflasi inti tahun sebelumnya sebesar 3,95%. Tekanan inflasi inti yang menurun terlihat dari perkembangan bulanan di sepanjang tahun 2016, kecuali pada bulan Juni 2016 saat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh bersamaan dengan periode liburan sekolah (Grafik 6.2). Bila dibandingkan dengan rata-rata historis 2011-2015, inflasi inti 2016 secara bulanan juga tercatat lebih rendah terutama sejak Juli 2016. Seluruh determinan inflasi inti yakni permintaan agregat yang terkelola, tekanan eksternal yang minimal dan ekspektasi inflasi yang menurun mendukung rendahnya tekanan inflasi inti.

Inflasi inti 2016 yang rendah dipengaruhi kondisi permintaan agregat yang masih moderat dan pasokan yang memadai dalam memenuhi permintaan tersebut. Permintaan agregat yang masih moderat tercermin dari pertumbuhan penjualan ritel dan indeks keyakinan konsumen yang belum meningkat (Grafik 6.3). Pertumbuhan kredit konsumsi dan besaran moneter yang juga masih rendah mengindikasikan permintaan agregat yang moderat tersebut. Sementara itu, respons pasokan yang masih memadai terlihat dari kapasitas utilisasi sektor industri yang masih berada di bawah level 80%.

Tekanan eksternal yang minimal turut berkontribusi pada inflasi inti yang terkendali. Perkembangan ini dipengaruhi harga komoditas global yang masih rendah dan nilai tukar yang menguat. Harga komoditas global yang mulai meningkat terutama pada triwulan terakhir 2016, sementara waktu belum ditransmisikan pada inflasi inti domestik. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut

Grafik 6.1. Inflasi Indeks Harga Konsumen dan Komponennya

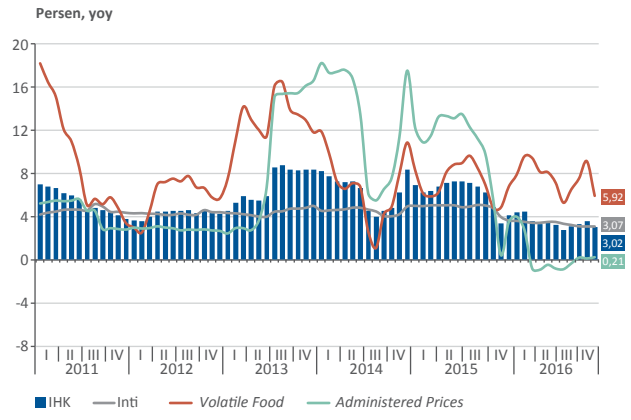

Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.2. Pola Historis Inflasi Inti

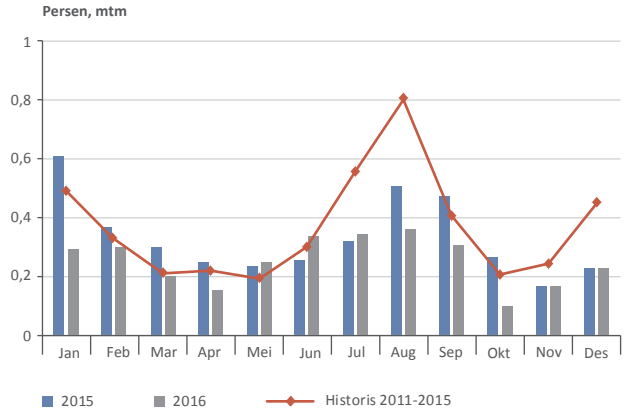

Sumber: BPS, diolah.

Grafik 6.3. Pertumbuhan Penjualan Riil dan Indeks Keyakinan Konsumen

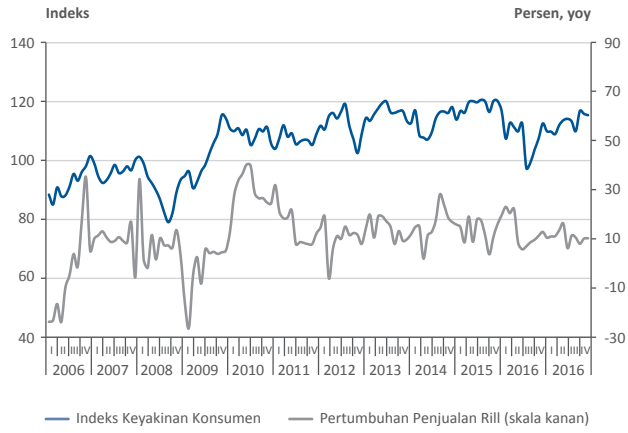

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 6.4. Perkembangan Nilai Tukar, Harga Komoditas Global, dan Indeks Harga Perdagangan Besar Impor Nonmigas

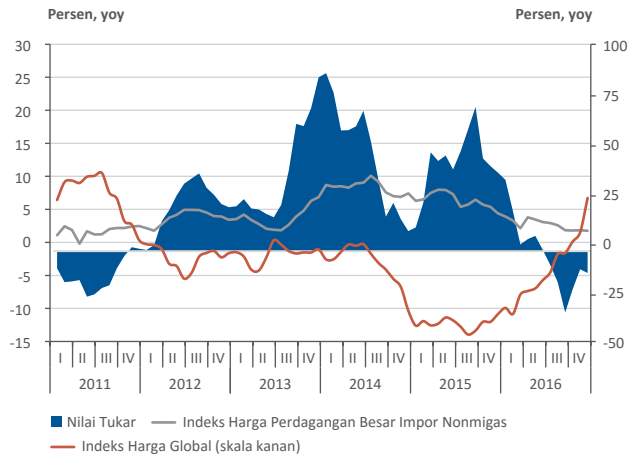

Sumber: IMF, Bloomberg, BPS (diolah)

menyebabkan masih lemahnya *imported inflation* sebagaimana terlihat dari inflasi Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) impor nonmigas pada 2016 yang menurun cukup dalam dari semula 5,52% pada 2015 menjadi 2,98% pada 2016 (Grafik 6.4). Tekanan harga di level pedagang besar yang masih terbatas, kemudian juga ditransmisikan ke harga konsumen. Sumbangan inflasi produk dengan kandungan impor seperti mobil menurun dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya (Tabel 6.1). Untuk kelompok pangan, sumbangan inflasi dari produk turunan komoditas pangan impor seperti gandum dan jagung juga masih rendah (Tabel 6.2).

Ekspektasi inflasi yang terkendali juga berperan penting terhadap inflasi inti yang rendah. Hal tersebut tercermin dari indeks ekspektasi inflasi konsumen dan pedagang eceran yang terus menurun serta proyeksi inflasi pengamat ekonomi sepanjang tahun 2016 yang bergerak turun ke sasaran inflasi (Grafik 6.5). Perkembangan positif ini tidak terlepas dari kontribusi positif konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi sehingga mendukung terkendalinya ekspektasi inflasi di sepanjang tahun 2016. Selain itu, upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan koordinasi yang solid antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi turut berpengaruh kepada ekspektasi inflasi yang terkendali.

Secara keseluruhan, inflasi inti yang rendah didukung oleh minimalnya tekanan dari global dan domestik. Hal ini tercermin pada perkembangan inflasi inti kelompok *traded* dan *nontraded* yang seluruhnya menurun dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya (Grafik 6.6). Inflasi inti kelompok *traded* turun dari 3,60% pada tahun sebelumnya menjadi 2,79%. Sejalan dengan itu, inflasi inti kelompok *nontraded* juga menurun dari 4,24% pada tahun 2015

Tabel 6.1. Penyumbang Inflasi Inti Kelompok Nonpangan terhadap Inflasi IHK

Persen

No.	Komoditas	2015	2016
Inflasi			
1	Kontrak Rumah	0,10	0,10
2	Tarif Pulsa Ponsel	0,00	0,10
3	Sewa Rumah	0,13	0,09
4	Emas Perhiasan	0,04	0,07
5	Mobil	0,10	0,06
6	Tukang Bukan Mandor	0,08	0,05
7	Akademi / Perguruan Tinggi	0,06	0,04
8	Sekolah Menengah Atas	0,04	0,04
9	Sekolah Dasar	0,05	0,04
10	Upah Pembantu RT	0,06	0,04

Sumber: BPS, diolah

Tabel 6.2. Penyumbang Inflasi Inti Kelompok Pangan terhadap Inflasi IHK

Persen

No.	Komoditas	2015	2016
Inflasi			
1	Nasi Dengan Lauk	0,14	0,08
2	Gula Pasir	0,05	0,06
3	Mie	0,07	0,04
4	Air Kemasan	0,04	0,03
5	Ayam Goreng	0,03	0,03
6	Es	0,02	0,02
7	Kue Kering Berminyak	0,03	0,02
8	Ketupat / Lontong Sayur	0,02	0,02
9	Jus Buah	0,01	0,02
10	Bubur	0,03	0,02

Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.5. Ekspektasi Pengamat Ekonomi

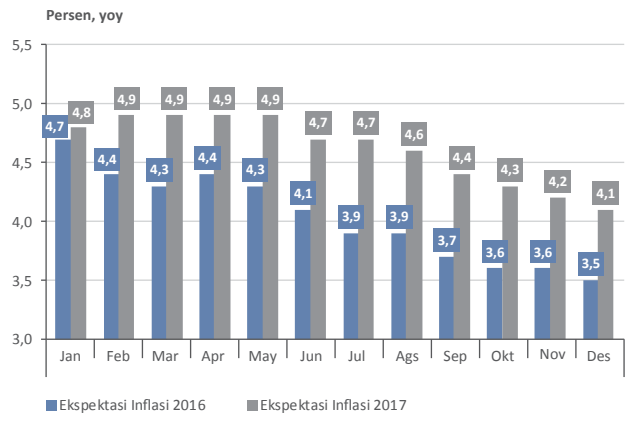

Sumber: *Consensus Economics*

menjadi 3,29%. Penurunan inflasi inti kelompok *nontraded* juga terlihat pada beberapa biaya jasa seperti sewa rumah, tukang bukan mandor, dan biaya pendidikan (Tabel 6.1).

6.2. INFLASI *VOLATILE FOOD*

Inflasi *volatile food* pada 2016 tetap terkendali, meskipun sedikit meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Inflasi *volatile food* tercatat sebesar 5,92%, meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 sebesar 4,84%. Komoditas utama yang banyak menyumbang kenaikan inflasi *volatile food* pada tahun 2016 ialah komoditas cabai merah, bawang merah, dan bawang putih (Tabel 6.3).

Grafik 6.6. Perkembangan Inflasi Inti *Traded* dan *Nontraded*

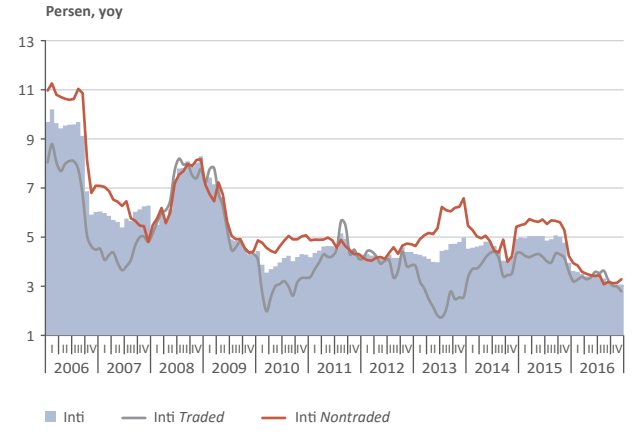

Sumber: BPS, diolah.

Tabel 6.3. Sumbangan Inflasi/Deflasi Komoditas Pangan Strategis terhadap Inflasi IHK

Persen

Komoditas	2015	2016
Cabe Merah	-0,39	0,35
Bawang Merah	0,15	0,17
Bawang Putih	0,07	0,11
Cabe Rawit	-0,13	0,07
Minyak Goreng	-0,04	0,06
Daging Sapi	0,05	0,04
Daging Ayam	0,15	0,01
Beras	0,31	-0,01
Telur Ayam	0,09	-0,02

Sumber: BPS, diolah

Kenaikan inflasi *volatile food* 2016 lebih dipicu permasalahan pasokan akibat curah hujan yang tinggi dan serangan hama atau virus di sejumlah daerah sentra produksi. Pengaruh kedua faktor tersebut menjadi dominan karena instrumen stabilisasi harga masih terbatas, sehingga kemudian menyebabkan inflasi komoditas cabai merah, bawang merah, dan bawang putih meningkat signifikan pada 2016. Dalam perkembangannya, kenaikan inflasi *volatile food* dapat tertahan akibat berkurangnya tekanan harga komoditas lain khususnya beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi. Harga beberapa komoditas ini masih bisa dikendalikan seiring terjaganya pasokan dan cukup intensifnya operasi pasar yang dijalankan Pemerintah.

Dinamika triwulanan menunjukkan inflasi *volatile food* secara umum berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkembangan tahun sebelumnya. Pada semester pertama 2016, inflasi kelompok *volatile food* secara kumulatif tercatat sebesar 3,47% (ytd), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,33% (ytd). Tingginya inflasi kelompok VF pada semester pertama 2016 terutama didorong permasalahan pasokan bawang merah sehingga inflasi komoditas ini melonjak hingga 30,86% (mtm) pada Maret 2016. Kenaikan harga komoditas pada periode tersebut dipicu gangguan produksi di sentra produksi akibat tingginya intensitas hujan.

Inflasi *volatile food* cukup terkendali pada triwulan III 2016 didukung koordinasi pengendalian inflasi pangan yang intensif di tingkat pusat maupun daerah. Inflasi pangan menjelang perayaan hari besar keagamaan (Idul Fitri) pada 2016 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 6.7). Rata-rata inflasi bulanan *volatile food* Juni hingga September 2016 saat hari besar tersebut tercatat sebesar 0,51% (mtm), menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 sebesar 0,89% (mtm).

Grafik 6.7. Inflasi Pada Periode Hari Besar Keagamaan Nasional

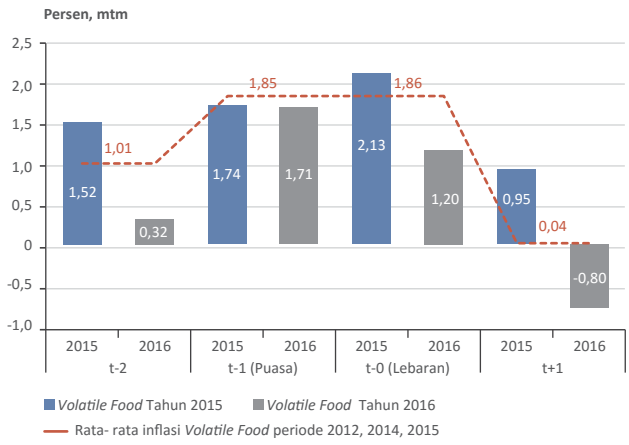

Sumber: BPS, diolah

Perkembangan positif inflasi *volatile food* pada periode ini dipengaruhi respons operasi pasar dan pasar murah yang lebih difokuskan kepada komoditas utama penyumbang inflasi di masing-masing daerah, seperti operasi pasar cabai di Padang, dan daging sapi di Jakarta dan Palembang. Selain itu, beberapa daerah juga mendorong penguatan pasokan pangan melalui kerjasama antar daerah seperti antara Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk pasokan beras dan daging sapi.

Tekanan kenaikan inflasi *volatile food* kembali naik pada triwulan IV 2016 dipicu kendala pasokan pada beberapa komoditas hortikultura, terutama cabai merah. Rata-rata inflasi *volatile food* sepanjang periode Oktober hingga Desember 2016 tercatat sebesar 7,53%, lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi periode yang sama tahun 2015 sebesar 5,54%. Tekanan inflasi *volatile food* terutama disumbang komoditas cabai merah yang pada November 2016 naik hingga 20,86% (mtm) sehingga menyumbang inflasi sebesar 0,16% (mtm) dari inflasi IHK sebesar 0,47% (mtm) pada bulan tersebut. Inflasi tinggi dari cabai merah pada akhir tahun 2016 disebabkan terganggunya produksi di sejumlah daerah sentra produksi di Sumatera akibat serangan virus kuning. Sementara itu, instrumen untuk stabilisasi harga dan pasokan untuk komoditas hortikultura masih terbatas.

Secara keseluruhan, meskipun meningkat, tekanan inflasi *volatile food* pada tahun 2016 masih terkendali di tengah fenomena *La Nina* yang berdampak terhadap produksi pangan. Hal ini dipengaruhi oleh peran Pemerintah yang cukup signifikan dalam menjaga harga pangan, khususnya beras dan daging sapi. Harga beras cukup terkendali didukung kenaikan produksi beras dalam negeri dan pasokan dari sisa impor beras tahun 2015. Kenaikan produksi dalam negeri tercermin dari kenaikan pengadaan beras dalam negeri oleh BULOG sekitar 10%, sementara pasokan dari sisa impor beras 2015 tercatat sebesar 676.695 ton. Kenaikan pasokan beras berdampak positif kepada Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2016 yang meningkat 25%, sehingga dapat mendukung kenaikan operasi pasar sebesar 26% pada periode yang sama. Pasokan beras yang terjaga juga terlihat dari peningkatan stok beras BULOG pada akhir 2016 sekitar 30% dibandingkan dengan stok pada akhir tahun 2015.

Inflasi *volatile food* yang terkendali juga ditopang dampak positif kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan terkait peningkatan pasokan daging sapi. Pasokan daging sapi yang sepanjang tahun 2016 cukup memadai didukung pasokan dalam negeri dan pengadaan sumber pasokan luar negeri oleh BULOG. Hal tersebut dipengaruhi kebijakan Pemerintah yang menugaskan Perum BULOG untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen.[1] Secara khusus, Perum BULOG ditugaskan untuk menjaga stabilitas harga untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai. Untuk komoditas lainnya seperti gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabai, daging sapi dan daging ayam ras, Pemerintah dapat menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di luar Perum BULOG atau kepada Perum BULOG.

Kebijakan pemerintah lainnya yang secara tidak langsung mendukung terkendalinya inflasi *volatile food* antara lain pembangunan infrastruktur dan pemberian subsidi. Selama tahun 2016, Pemerintah melanjutkan pembangunan proyek bendungan baru untuk irigasi lahan pertanian, penanggulangan banjir, pembangkit tenaga listrik, dan persediaan air baku. Pemberian subsidi untuk peningkatan produksi pangan dalam negeri juga dilakukan dengan menyalurkan subsidi pupuk dan subsidi benih ke petani dengan nilai masing-masing mencapai Rp30,1 triliun dan Rp1,0 triliun pada 2016.

Kebijakan lain yang juga berpengaruh tidak langsung kepada terkendalinya inflasi *volatile food* ialah kebijakan distribusi dan aksesibilitas pangan. Untuk mengatasi masalah distribusi dan aksesibilitas pangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan BULOG mengembangkan program Gerai Maritim dan Rumah Pangan Kita (RPK). Di sektor hilir, Kemendag mengeluarkan ketentuan mengenai harga acuan yang digunakan sebagai pedoman bagi Perum BULOG dan/atau BUMN lain yang mendapat penugasan Pemerintah untuk melakukan pembelian barang kebutuhan

1 Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional tanggal 25 Mei 2016.

pokok di petani dan penjualan di konsumen.[2] Di samping itu, koordinasi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang semakin solid melalui forum TPI dan TPID turut berkontribusi pada terkendalinya inflasi VF. Sepanjang tahun 2016, TPI dan TPID terus berfokus pada upaya menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, kelancaran distribusi, dan pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui komunikasi yang efektif.

Di tengah inflasi *volatile food* yang terkendali pada 2016, beberapa tantangan masih mengemuka terutama terkait pengendalian inflasi pangan. Berulangnya permasalahan pasokan setiap tahun dan bergantinya komoditas *volatile food* penyumbang inflasi mengindikasikan masih banyaknya tantangan struktural. Pada 2016, permasalahan pasokan akibat curah hujan yang tinggi dan serangan virus kuning, merupakan tantangan utama yang mendorong tingginya fluktuasi harga komoditas cabai merah dan bawang merah. Tantangan tersebut semakin muncul ke permukaan karena pada saat yang bersamaan instrumen kebijakan pasokan atau stabilisasi harga untuk kedua komoditas tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi kelompok *volatile food* perlu terus diperkuat termasuk mitigasi risiko lanjutan dari dampak kenaikan harga energi terhadap biaya produksi.

6.3. INFLASI *ADMINISTERED PRICES*

Inflasi kelompok *administered prices* tahun 2016 tercatat cukup rendah. Inflasi *administered prices* pada 2016 tercatat sebesar 0,21%, lebih rendah dibandingkan kondisi pada 2015 yang mencapai 0,39%. Dalam horison waktu lebih panjang, inflasi *administered prices* pada 2016 bahkan terendah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.

Inflasi *administered prices* yang rendah pada 2016 tidak terlepas dari pengaruh kebijakan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah. Respons ini dipengaruhi harga minyak dunia yang rendah dan nilai tukar rupiah yang bergerak dalam arah menguat. Pada semester pertama 2016, harga minyak yang rendah dan nilai tukar yang menguat memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menurunkan harga BBM sebanyak dua kali pada 2016 (Tabel 6.4). Pada 5 Januari 2016, harga bensin RON 88 turun sebesar Rp350/liter dan solar turun sebesar Rp1.050/liter.[3] Selanjutnya, Pemerintah pada 1 April 2016 mengoreksi harga bensin RON 88 dan solar masing-masing sebesar Rp500/liter.[4]

Selain harga BBM, Pemerintah juga menurunkan harga LPG tabung 12 kg pada Januari 2016 sebesar Rp5.600/tabung atau Rp467/kg untuk Jabodetabek, atau secara nasional turun Rp5.800/tabung. Sementara itu, tarif listrik tercatat mengalami koreksi sebanyak empat kali yakni pada Februari, Maret, April, dan Mei 2016 dan kenaikan sebanyak delapan kali sesuai perkembangan perekonomian. Kebijakan pemerintah tersebut secara keseluruhan menyebabkan turunnya kontribusi inflasi terkait energi pada 2016 (Grafik 6.8).

Dalam perkembangan selanjutnya pada semester II 2016, harga BBM ditetapkan tidak berubah, meskipun harga minyak dunia sudah mulai meningkat. Pemerintah pada 27 Juni 2016 dan 23 September 2016 memutuskan harga bensin RON 88 khusus penugasan dan solar tidak berubah masing-masing untuk periode Juli-September 2016 dan Oktober-Desember 2016.[5] Pemerintah juga mengatur besaran subsidi tetap dalam perhitungan Harga Jual Eceran solar menjadi sebesar Rp500/L yang berlaku sejak 1 Juli 2016. Tekanan terhadap inflasi *administered prices* juga tidak meningkat pada 2016 karena dipengaruhi penundaan kebijakan subsidi tepat sasaran untuk pelanggan listrik daya 900 VA dan pembatalan kenaikan harga LPG tabung 3 kg.

Grafik 6.8. Kontribusi Inflasi Terkait Komoditas Energi terhadap Inflasi IHK

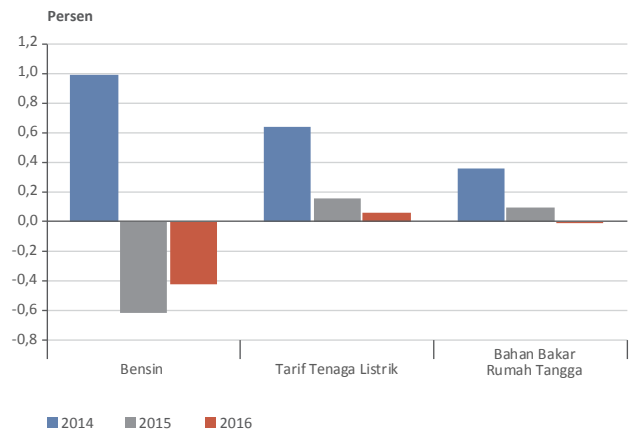

Sumber: BPS, diolah

2 Permendag No. 63 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen tanggal 9 September 2016.

3 Keputusan Menteri ESDM NO. 2 K/12/MEM/2016 tanggal 4 Januari 2016

4 Keputusan Menteri ESDM No. 4738 K/12/MEM/2016 tanggal 30 Maret 2016

5 Keputusan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya (1) kemampuan keuangan negara atau situasi perekonomian, (2) kemampuan daya beli masyarakat, serta (3) ekonomi riil dan sosial masyarakat. Penentuan harga BBM di Juli dan Oktober diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 5976 K/12/MEM/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Keputusan Menteri ESDM No. 7147K/12/MEM/2016 tanggal 23 September 2016.

Tabel 6.4. Beberapa Kebijakan Terkait *Administered Prices* Tahun 2016

Bulan	Kebijakan AP
Januari	- Premium turun Rp350/l menjadi Rp6.950/l (non Jamali) dan solar turun Rp1.050/l menjadi Rp 5.650/l - Pertamax turun sebesar Rp200/l, Pertamax Plus Rp500/l, Pertamina Dex Rp650/l.* - Tarif Tenaga Listrik (TTL) turun dari 1.509/KwH menjadi 1.409/KwH.** - LPG 12 kg turun sebesar Rp5.600/tabung atau Rp467/kg (Jakarta). - Tarif Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan lintas propinsi turun sebesar 5%. - Harga rokok masing-masing naik sebesar 0,71; 0,99; dan 0,74% (mtm).***
Februari	- Pertamax Plus dan Pertamax masing-masing turun sebesar Rp200/l dan Pertamina Dex turun Rp300/l.* - TTL turun dari 1.409/KwH menjadi 1.392/KwH.** - Penurunan batas atas dan batas bawah tarif angkutan udara sebesar 5%. - Harga rokok masing-masing naik sebesar 0,83; 1,45; dan 1,31% (mtm).***
Maret	- Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex turun tiga kali masing-masing sebesar Rp200/l per penurunan. Pertalite turun satu kali sebesar Rp200/l.* - TTL turun dari 1.392/KwH menjasi 1.355/KwH.** - Harga rokok masing-masing naik sebesar 0,76; 0,64; dan 1,32% (mtm).***
April	- Premium dan Solar turun sebesar Rp500/l menjadi masing-masing Rp6.450/l (non Jamali) dan Rp5.150/l. - TTL turun dari 1.355/KwH menjadi 1.343/KwH.** - Tarif AKAP, Penyeberangan Lintas Propinsi, Angkutan Dalam Kota, dan Taksi masing-masing turun sebesar 3,5%; 3,38%; 0,76%, dan 2,74% (mtm) - Kenaikan *Passenger Service Charge* (PSC) di 7 Bandara rata-rata sebesar 34%. - Harga rokok masing-masing naik sebesar 0,62; 0,61; dan 0,47% (mtm).***
Mei	- Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertalite turun sebesar Rp200/l, serta Pertamina Dex turun sebesar Rp300/l.* - TTL naik dari 1.343/KwH menjadi 1.354/KwH.** - Penurunan tarif Angkutan Penumpang Laut sebesar 0,27% (mtm). - Harga rokok masing-masing naik sebesar 1,18; 0,82; dan 0,79% (mtm).***
Juni	- TTL naik dari 1.354/KwH menjadi 1.365/KwH.** - Harga rokok masing-masing naik sebesar 0,50; 0,41; dan 0,26% (mtm).***
Juli	- Penurunan subsidi solar sebesar Rp500/l. - TTL naik dari 1.365/KwH menjadi 1.413/KwH.** - Harga rokok masing-masing naik sebesar 0,36; 0,32; dan 0,41% (mtm).***
Agustus	- TTL turun dari 1.413/KwH menjadi 1.410/KwH. - Harga rokok masing-masing naik sebesar 0,36; 0,32; dan 0,41% (mtm).***
September	- Dexlite naik sebesar Rp200/l.* - TTL naik dari 1.410/KwH menjadi 1.458/KwH.** - Harga rokok masing-masing naik sebesar 0,91; 1,01; dan 1,17% (mtm).***
Oktober	- Dexlite naik sebesar Rp200/l.* - TTL naik dari 1.458/KwH menjadi 1.460/KwH.** - Tarif tol ruas Prof. Dr. Ir. Sedyatmo rata-rata naik sebesar Rp1.000 untuk tiap golongan. - Harga rokok masing-masing naik sebesar 0,52; 0,63; dan 1,04% (mtm).***
November	- Pertamax dan Pertamax Plus naik sebesar Rp250 dan Rp150/l.* - TTL naik dari 1.460/KwH menjadi 1.462/KwH.** - Harga rokok masing-masing naik sebesar 0,56; 0,63; dan 0,63% (mtm).***
Desember	- Pertamax Plus dan Pertamax Turbo naik sebesar Rp50/l. Pertamax, Dexlite, dan Pertalite naik sebesar Rp150/l.* - TTL naik dari 1.462/KwH menjadi 1.472/KwH.** - Harga rokok masing-masing naik sebesar 0,98; 0,84; dan 0,96% (mtm).***

* Harga BBM merupakan harga di DKI Jakarta
** Tarif Tenaga Listrik (TTL) merupakan tarif listrik rumah tangga untuk pelanggan daya di atas 1300 VA non-subsidi.
*** Rokok terdiri dari jenis rokok kretek, kretek filter, dan putih.

Sumber: Kementerian ESDM, Pertamina, PLN, dan BPS

Sejalan dengan dinamika harga minyak dunia yang rendah dan nilai tukar yang menguat, Pemerintah juga menurunkan tarif angkutan. Pemerintah pada Februari 2016 menurunkan batas atas dan batas bawah tarif angkutan udara sebesar 5%.[6] Sepanjang periode April hingga Juli 2016, Pemerintah juga menurunkan tarif angkutan umum yang terdiri dari angkutan laut, kereta api, angkutan antar kota, angkutan penyeberangan lintas antar provinsi, serta angkutan dalam kota dan taksi. Rata-rata penurunan tarif angkutan umum mencapai 3%.[7] Kebijakan terkait penyesuaian tarif angkutan pada gilirannya menyebabkan turunnya kontribusi inflasi angkutan pada 2016, terutama kontribusi angkutan dalam kota dan angkutan antar kota (Grafik 6.9).

Grafik 6.9. Kontribusi Inflasi Terkait Tarif Angkutan terhadap Inflasi IHK

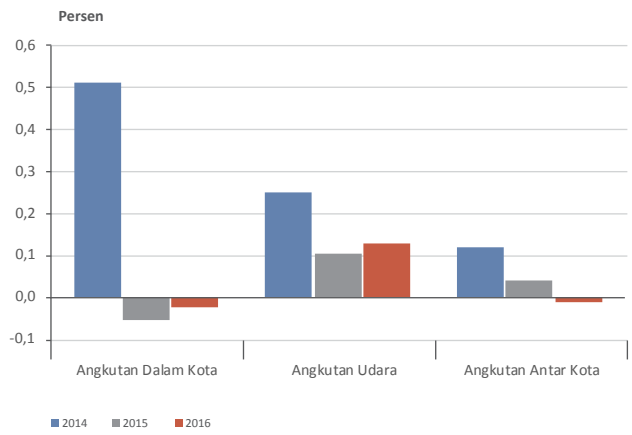

Sumber: BPS, diolah

6 Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 14 Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016

7 Penurunan tarif angkutan penumpang laut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 38 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016. Penurunan tarif Kereta Api diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 35 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016. Penurunan tarif angkutan antar kota antar provinsi dan lintas provinsi serta anjuran agar Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dan tarif penyeberangan diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan No SE 15 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016.

BAB 7
Fiskal

Kebijakan fiskal 2016 diarahkan untuk memperkuat stimulus bagi perekonomian guna memitigasi risiko dari pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat, sambil tetap menjaga prospek kesinambungan fiskal. Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 ditujukan kepada upaya memperkuat kualitas belanja ke sektor yang lebih produktif dan disertai upaya memperkuat struktur penerimaan pajak. Berbagai upaya pemerintah, termasuk dengan menurunkan target penerimaan pajak menjadi lebih realistis dan melakukan konsolidasi belanja pada semester II 2016, dapat menjaga kredibilitas prospek kesinambungan fiskal. Defisit APBN 2016 terkendali di level 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan utang pemerintah tetap di level yang sehat yakni 27,8% dari PDB.

Keterangan gambar:
Untuk mendorong pemulihan ekonomi, Pemerintah memberikan stimulus fiskal melalui belanja untuk pembangunan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur diyakini akan menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Arah kebijakan fiskal 2016 ditujukan untuk memperkuat stimulus bagi perekonomian domestik, sambil tetap menjaga kredibilitas prospek kesinambungan fiskal. Arah kebijakan ditempuh guna merespons risiko perekonomian global yang masih tinggi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang belum kuat dan harga komoditas yang rendah. Pemerintah menerjemahkan arah kebijakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 melalui strategi optimalisasi penerimaan pajak dan memperkuat kualitas belanja ke sektor yang produktif dan prioritas, termasuk dengan meningkatkan belanja infrastruktur. Strategi tersebut ditopang upaya menjaga kesinambungan pembiayaan sehingga dapat mengendalikan risiko fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Dalam perkembangannya pada semester I 2016, strategi kebijakan fiskal untuk memperkuat stimulus menghadapi tantangan. Penerimaan pajak dalam negeri hingga semester I 2016 belum sesuai harapan akibat harga komoditas yang masih rendah dan perbaikan perekonomian domestik yang belum kuat. Sementara itu, realisasi belanja Pemerintah hingga akhir semester I 2016 tercatat cukup besar yakni 44,3% dari target. Kondisi ini pada gilirannya menyebabkan defisit APBN 2016 pada semester I 2016 telah mencapai 1,9% PDB.

Pada semester II 2016, Pemerintah menempuh langkah konsolidasi, baik dari sisi penerimaan maupun sisi belanja, guna tetap menjaga kredibilitas prospek kesinambungan fiskal. Dari sisi penerimaan, Pemerintah menurunkan target penerimaan pajak menjadi lebih realistis, sambil tetap berupaya mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, termasuk dengan menempuh program amnesti pajak. Dalam perkembangannya, program amnesti pajak berhasil mengumpulkan tebusan pajak sebesar Rp107 triliun pada akhir 2016. Dari sisi belanja, Pemerintah lebih mengutamakan belanja ke sektor yang produktif dan prioritas antara lain untuk belanja infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan.

Konsolidasi fiskal yang ditempuh Pemerintah berhasil mengarahkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara -Perubahan (APBN-P) 2016 tetap aman sehingga tetap menjaga kredibilitas prospek kesinambungan fiskal. Realisasi defisit APBN-P 2016 tercatat 2,5% dari PDB, lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian tersebut turut menjaga posisi utang pemerintah akhir 2016 tetap rendah dan dalam level yang sehat yakni 27,8% dari PDB.

7.1. DINAMIKA FISKAL 2016

Kebijakan fiskal 2016 secara umum diarahkan untuk memperkuat stimulus kepada perekonomian, dengan tetap menjaga prospek kesinambungan fiskal. Arah kebijakan tersebut pada satu sisi ditujukan untuk mengantisipasi kondisi siklikal ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Pada sisi lain, arah kebijakan bertujuan untuk terus memperkuat struktur perekonomian guna meningkatkan kapasitas dan memperkuat daya saing perekonomian. Dalam implementasinya, stimulus fiskal yang ditempuh Pemerintah tidak hanya dengan meningkatkan jumlah belanja, tetapi juga aspek kualitas belanja dengan mengalokasikan lebih banyak belanja negara ke sektor yang produktif dan prioritas, seperti belanja infrastruktur.

Arah kebijakan fiskal pada awalnya diejawantahkan dalam beberapa asumsi dan target di APBN 2016 yang ditetapkan pada November 2015. APBN 2016 antara lain mengasumsikan harga minyak dunia masih tinggi sebesar 50 dolar AS per barel. Asumsi ini kemudian berkontribusi pada asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia 2016 yang masing-masing diperkirakan sebesar 5,3% dan 4,7% (Tabel 7.1). Dengan beberapa asumsi tersebut, APBN 2016 memperkirakan penerimaan dalam negeri akan mencapai Rp1.820,5 triliun, meningkat 21,8% dibandingkan dengan realisasi 2015. Dalam asumsi yang sama, belanja negara diarahkan sebesar Rp2.095,7 triliun, meningkat 16,6% dibandingkan dengan realisasi 2015 (Tabel 7.2). Secara

Tabel 7.1. Asumsi Makro

Asumsi Makro	2015			2016		
	APBN	APBN-P	Realisasi	APBN	APBN-P	Realisasi
Pertumbuhan ekonomi (persen, yoy)	5,8	5,7	4,8	5,3	5,2	5,0
Inflasi (persen, yoy)	4,4	5,0	3,4	4,7	4,0	3,1
Nilai tukar (rupiah per dolar AS)	11.900	12.500	13.395	13.900	13.500	13.307
Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan (persen per tahun)	6,0	6,2	6,0	5,5	5,5	5,7
Harga minyak internasional-ICP (dolar AS per barel)	105	60	49,2	50	40	40
Lifting minyak Indonesia (ribu barel per hari)	900	825	778	830	820	829
Lifting gas Indonesia (ribu barel setara minyak per hari)	1.248	1.221	1.195	1.155	1.150	1.184

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 7.2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 2015-2016

Rincian	APBN-P 2015	Realisasi 2015				APBN 2016	APBN-P 2016	Realisasi 2016			
	Triliun Rp	Triliun Rp	%PDB	%yoy	% APBN-P	Triliun Rp	Triliun Rp	Triliun Rp	%PDB	%yoy	% APBN-P
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**1.761,6**	**1.504,5**	**13,0**	**-3,0**	**85,4**	**1.822,5**	**1.786,2**	**1.555,1**	**12,5**	**3,4**	**87,1**
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.758,3	1.494,1	12,9	-3,3	85,0	1.820,5	1.784,2	1.546,9	12,5	3,5	86,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.489,3	1.240,4	10,7	8,2	83,3	1.546,7	1.539,2	1.285,0	10,4	3,6	83,5
- Pajak Dalam Negeri	1.440,0	1.205,5	10,4	9,3	83,7	1.506,6	1.503,3	1.249,5	10,1	3,6	83,1
- Pajak Perdagangan Internasional	49,3	34,9	0,3	-20,0	70,9	40,1	35,9	35,5	0,3	1,7	98,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	269,1	253,7	2,2	-36,3	94,3	273,8	245,1	261,9	2,1	3,2	106,9
II. Hibah	3,3	10,4	0,1	106,6	314,9	2,0	2,0	8,2	0,1	-21,2	417,0
B. Belanja Negara	**1.984,1**	**1.796,6**	**15,6**	**1,1**	**90,5**	**2.095,7**	**2.082,9**	**1.860,3**	**15,0**	**3,5**	**89,3**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.319,5	1.173,6	10,2	-2,5	88,9	1.325,6	1.306,7	1.150,1	9,3	-2,0	88,0
1. Belanja Pegawai	299,3	281,1	2,4	15,3	93,9	347,5	342,4	305,1	2,5	8,5	89,1
2. Belanja Barang	259,7	232,4	2,0	31,6	89,5	325,0	304,2	259,4	2,1	11,6	85,3
3. Belanja Modal	252,8	209,0	1,8	41,9	82,7	201,6	206,6	166,4	1,3	-20,4	80,6
4. Pembayaran Bunga Utang	155,7	156,0	1,4	16,9	100,2	184,9	191,2	182,8	1,5	17,2	95,6
5. Subsidi	212,1	186,0	1,6	-52,5	87,7	182,6	177,8	174,2	1,4	-6,3	98,0
6. Belanja Hibah	4,6	3,1	0,0	244,4	66,6	4,0	8,5	6,5	0,1	109,7	76,3
7. Bantuan Sosial	103,6	97,0	0,8	-0,9	93,7	55,3	53,4	49,6	0,4	-48,9	92,9
8. Belanja Lain-lain	31,7	8,9	0,1	-23,9	28,2	24,7	22,5	6,0	0,0	-32,6	26,8
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	664,6	623,0	5,4	8,6	93,7	770,2	776,3	710,3	5,7	14,0	91,5
1. Tranfer Ke Daerah	643,8	602,2	5,2	5,0	93,5	723,3	729,3	663,6	5,3	10,2	91,0
2. Dana Desa	20,8	20,8	0,2		100,0	47,0	47,0	46,7	0,4	124,9	99,4
C. Keseimbangan Primer	**-66,8**	**-136,1**	**-1,2**	**52,8**	**203,8**	**88,3**	**-105,5**	**-122,5**	**-1,0**	**-10,0**	**116,1**
D. Surplus/Defisit Anggaran	**-222,5**	**-292,1**	**-2,5**	**31,7**	**131,3**	**-273,3**	**-296,7**	**-305,2**	**-2,5**	**4,5**	**102,9**
E. Pembiayaan	**222,5**	**318,1**	**2,8**	**27,8**	**143,0**	**273,3**	**296,7**	**331,0**	**2,7**	**4,1**	**111,6**

Sumber: Kementerian Keuangan

keseluruhan, berbagai perkiraan ini membuat defisit APBN 2016 diperkirakan sekitar 2,15% PDB.

Dalam perkembangannya, kondisi global dan domestik tidak sesuai dengan harapan sehingga memberikan tantangan pada pengelolaan fiskal 2016. Perekonomian global masih belum kuat dan merambat pada harga komoditas, termasuk harga minyak, yang tidak setinggi perkiraan awal. Kondisi ini pada gilirannya bisa membuat prospek perekonomian domestik tidak sesuai perkiraan semula. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat lebih rendah dari asumsi yang digunakan pada APBN 2016. Bila berbagai kondisi perekonomian global dan domestik tidak sesuai asumsi maka berbagai target yang digunakan pada APBN 2016 seperti penerimaan dalam negeri berisiko tidak tercapai sehingga kemudian bisa mengganggu ketahanan fiskal.

Pemerintah merespons tantangan tersebut dengan mengubah beberapa asumsi dan target pada APBN 2016 menjadi lebih realistis. Pada APBN-P 2016 yang ditetapkan pertengahan 2016, asumsi harga minyak 2016 diturunkan menjadi 40 dolar AS per barel sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang masih lemah. Akibatnya, asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2016 juga menjadi lebih rendah masing-masing menjadi 5,2% dan 4,0%. Perubahan asumsi tersebut kemudian berimplikasi pada perubahan postur anggaran pemerintah 2016. APBN-P 2016 menurunkan target penerimaan dalam negeri menjadi Rp1.784,2 triliun, terutama akibat penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Rp273,8 triliun pada APBN 2016 menjadi Rp245,1 triliun. Implikasinya, belanja negara juga diturunkan menjadi Rp2.082,9 triliun guna menjaga agar defisit APBN-P 2016 tetap sehat. Dengan postur baru tersebut maka defisit APBN-P 2016 ditargetkan sedikit meningkat menjadi 2,37% PDB.

Dalam perkembangannya, setelah penetapan APBN-P 2016, tantangan pengelolaan fiskal 2016 tetap mengemuka. Pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas dunia, termasuk harga minyak, masih rendah sehingga membuat penerimaan dalam negeri sampai semester I 2016 belum sesuai harapan. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah telah tercatat cukup besar khususnya belanja infrastruktur. Belanja pemerintah tumbuh 15% pada semester I 2016 dibandingkan dengan capaian di periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pemerintah tersebut juga telah mencapai 44,3% dari target. Berbagai kondisi ini pada gilirannya menyebabkan defisit APBN-P 2016 pada semester I 2016 telah mencapai 1,9% PDB.

Pemerintah merespons tantangan tersebut dengan menempuh langkah konsolidasi fiskal, baik dari sisi penerimaan maupun sisi belanja. Langkah konsolidasi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden No.8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang berisikan penyiapan Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN-P Tahun 2016. Respons ini ditujukan untuk tetap menjaga kredibilitas prospek kesinambungan fiskal. Dari sisi penerimaan, Pemerintah menurunkan target penerimaan pajak menjadi lebih realistis, sambil tetap berupaya mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, termasuk dengan menempuh program amnesti pajak. Dalam perkembangannya, program amnesti pajak berhasil mengumpulkan tebusan pajak sebesar Rp107 triliun pada akhir 2016. Dari sisi belanja, Pemerintah lebih mengutamakan belanja ke sektor yang produktif dan prioritas, antara lain infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan.

7.2. PENDAPATAN NEGARA

Upaya untuk meningkatkan pendapatan negara sebagai pijakan kesinambungan stimulus fiskal masih menemui tantangan pada 2016. Tantangan terutama dipicu dampak pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas dunia yang masih rendah pada 2016. Kondisi perekonomian global yang belum sesuai harapan berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik dan rentan membuat penerimaan perpajakan menjadi rendah. Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak tidak optimal karena harga minyak dunia yang masih lemah. Secara keseluruhan, kondisi global yang kurang menguntungkan berdampak pada penurunan penerimaan dalam negeri, baik penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

Realisasi penerimaan dalam negeri dari komponen pendapatan negara pada 2016 tercatat Rp1.546,9 triliun, atau hanya 86,7% dari target APBN-P 2016. Realisasi yang tidak sesuai harapan terutama disebabkan rendahnya penerimaan pajak dalam negeri, yang hanya mencapai 83,1% dari target, atau masih kurang Rp254 triliun dari target. Angka kekurangan pajak dari target pada 2016 tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan kekurangan tahun lalu yang mencapai Rp249 triliun. Sementara itu, PNBP tercatat lebih tinggi dari target yakni Rp261,9 triliun, atau bertumbuh 3,2% dari tahun sebelumnya. PNBP yang melebihi target tersebut tidak terlepas dari kinerja positif berbagai Kementerian dan Lembaga, serta peningkatan disiplin serta efisiensi berbagai Badan Layanan Umum.

Penerimaan perpajakan pada 2016 hanya bertumbuh 3,6% dari tahun 2015, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 8,2%. Penurunan penerimaan pajak 2016 terutama dipengaruhi penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Grafik 7.1). Sementara itu, penerimaan pajak PPh nonmigas masih mencatat pertumbuhan positif, meskipun lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2015. Pertumbuhan penerimaan pajak yang belum kuat pada 2016 antara lain juga dipengaruhi kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang kembali dilakukan pada 2016.

Penerimaan pajak 2016 tetap dapat tumbuh positif karena ditopang keberhasilan program amnesti pajak. Program tersebut berkontribusi menambah penerimaan pajak 2016 melalui tebusan pajak sebesar Rp107 triliun (lihat Boks 7.1). Pengaruh positif tebusan pajak tersebut tergambar pada peningkatan kontribusi PPh Nonmigas dalam struktur penerimaan negara yang tercatat Rp630,1 triliun pada 2016. Kenaikan PPh Nonmigas cukup menggembirakan di tengah

Grafik 7.1. Pertumbuhan Komponen Penerimaan Pajak

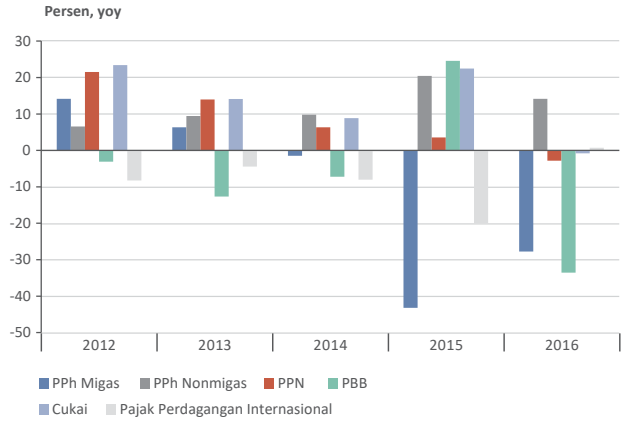

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

kondisi penurunan penerimaan pajak di hampir seluruh komponen pajak lainnya, yakni PPh Migas, PPN, serta PBB.

Perkembangan positif dari Penerimaan Dalam Negeri yakni pada penerimaan cukai rokok yang tetap tinggi. Penerimaan cukai cukup tinggi sebesar Rp143,5 triliun, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp144,6 triliun. Penerimaan cukai yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya lebih merupakan *base effect* dari kebijakan jatuh tempo penerapan insentif penundaan pembayaran cukai bagi pengusaha dan importir rokok.[1] Penerapan kebijakan tersebut meningkatkan penerimaan cukai pada 2015 cukup signifikan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2014 sebesar Rp116 triliun.

Perkembangan pajak 2016 yang belum sesuai harapan berimplikasi pada semakin pentingnya reformasi pajak dalam mendukung kesinambungan penerimaan pajak ke depan. Perkembangan pada 2016 menunjukkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi belum kuat seperti terlihat pada rasio pajak Indonesia terhadap PDB (*Tax Ratio)* yang masih turun. *Tax Ratio* 2016 tercatat 10,3%, lebih rendah dari capaian tahun 2015 sebesar 10,7% (Grafik 7.2). Penurunan peran pajak pada 2016 semakin penting untuk disikapi dengan baik karena pada saat bersamaan rasio penerimaan migas terhadap PDB juga menurun dari 0,43% pada 2015 menjadi 0,29% akibat perkembangan harga komoditas yang masih lemah.

Grafik 7.2. Penerimaan Pajak dan Rasio terhadap PDB

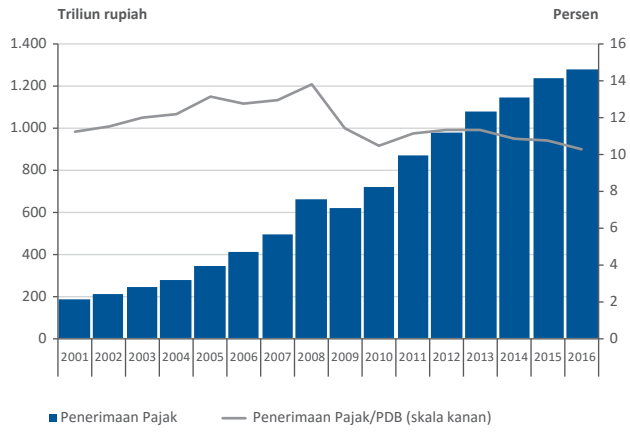

Sumber: Kementerian Keuangan

1 Melalui PMK Nomor 69/PMK.04/2009 Pemerintah memberikan insentif (penundaan pembayaran cukai) bagi pengusaha dan importir rokok yang patuh melekatkan pita cukai pada kemasan rokok. Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.04/2015, perubahan ketiga atas PMK tersebut, diatur bahwa jatuh tempo pembayaran cukai menjadi 31 Desember di tahun berjalan meskipun jatuh tempo penundaan yang sebelumnya diperjanjikan lebih lama dari itu.

7.3. BELANJA NEGARA

Belanja negara 2016 secara keseluruhan meningkat dari capaian 2015, namun dengan komposisi peran belanja Pemerintah Pusat yang lebih rendah dan tidak sekuat target semula. Belanja negara pada 2016 tercatat Rp1.860,3 triliun, meningkat 3,5% bila dibandingkan dengan realisasi 2015 (Grafik 7.3). Kenaikan terutama didorong komponen transfer ke daerah dan dana desa yang meningkat 14% dibandingkan dengan realisasi 2015. Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat sedikit turun dari Rp1.173,6 triliun pada 2015 menjadi Rp1.150,1 triliun, atau hanya sekitar 88% dari target APBN-P 2016 sebesar Rp1.306,7 triliun.

Peran belanja Pemerintah Pusat yang turun dipengaruhi proses konsolidasi fiskal yang ditempuh. Dalam proses konsolidasi tersebut, penghematan anggaran belanja lebih banyak diarahkan pada komponen belanja operasional, sedangkan pemotongan pada komponen belanja modal diminimalkan. Dalam strategi ini, Pemerintah menginstruksikan penghematan dilakukan pada kegiatan yang belum dikontrakkan, kegiatan yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun, atau kegiatan yang tidak mendesak dan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.

Di tengah peran belanja Pemerintah Pusat yang turun tersebut, stimulus fiskal melalui belanja infrastruktur terus berlanjut. Rasio belanja infrastruktur terhadap belanja negara 2016 naik menjadi 14,4% dari 14,2% pada tahun 2015. Selain melalui APBN, pembiayaan infrastruktur juga ditempuh melalui optimalisasi sinergi antara

Grafik 7.3. Perkembangan Komponen Belanja Negara

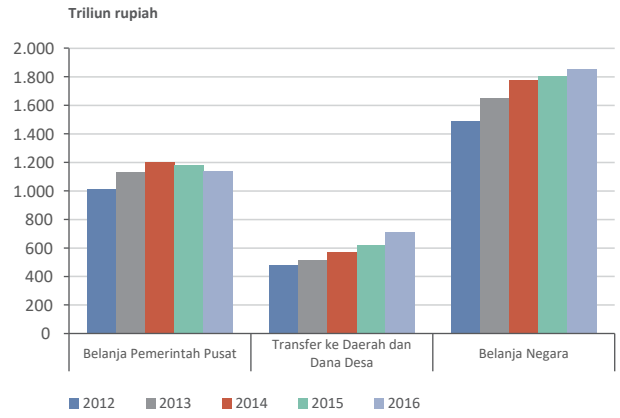

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

pemerintah, BUMN dan sektor swasta, antara lain melalui skim pembiayaan *Public Private Partnership* (PPP) dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Sepanjang tahun 2016, terdapat 12 proyek PPP yang telah direalisasikan dengan nilai konstruksi sebesar Rp93,8 triliun. Beberapa proyek PPP lainnya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Palapa Ring, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan juga telah mencapai tahap *financial close* setelah tertunda cukup lama. Pemberian PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Penjaminan Infrastruktur, dan BUMN lainnya juga tetap terlaksana.

Perkembangan positif dari belanja Pemerintah Pusat ialah bergesernya alokasi subsidi energi ke subsidi nonenergi. Pada 2016, Pemerintah melanjutkan rangkaian reformasi subsidi dengan melakukan pemangkasan subsidi solar. Subsidi tetap solar diturunkan dari Rp1.000 per liter menjadi Rp500 per liter yang berlaku efektif pada 1 Juli 2016. Perkembangan ini kemudian mengurangi beban subsidi energi di APBN-P 2016 (Grafik 7.4). Subsidi energi tersebut kemudian dialokasikan ke beberapa subsidi non-energi. Subsidi non-energi tersebut antara lain subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi bunga kredit perumahan, dan subsidi bantuan uang muka perumahan yang direalisasikan menggunakan anggaran subsidi kredit program. Pada 2016, total realisasi subsidi pada 2016 tercatat Rp174,2 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan capaian 2015 sebesar Rp186,0 triliun.

Berbeda dengan belanja Pemerintah Pusat, realisasi komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa tercatat meningkat pada 2016, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan target APBN-P 2016. Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi realisasi Dana Alokasi Khusus yang meningkat. Satu hal yang juga memengaruhi kenaikan realisasi transfer daerah ialah dampak positif kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan konversi transfer ke daerah menjadi berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) bila satu daerah tidak dapat memenuhi target serapan di tahun berjalan. Data Laporan Bank Umum menunjukkan penurunan posisi dana milik Pemerintah Daerah di Bank Umum. Perkembangan ini dapat mengindikasikan Pemerintah Daerah mulai menggunakan dana transfer tersebut untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah, yang pada gilirannya mendorong kenaikan realisasi dana transfer ke daerah.

7.4. PEMBIAYAAN DEFISIT APBN

Dengan perkembangan penerimaan dalam negeri dan belanja negara selama 2016, realisasi defisit APBN-P 2016 mencapai Rp305,2 triliun, atau 2,5% dari PDB. Defisit APBN-P 2016 sedikit lebih besar dari target semula sebesar 2,37% PDB, namun tetap pada level aman dan sehat dalam menjaga kesinambungan fiskal. Defisit APBN-P 2016 juga sedikit lebih kecil dibandingkan dengan defisit tahun 2015 sebesar 2,6% PDB. Sejalan dengan kondisi tersebut, realisasi defisit keseimbangan primer APBN-P 2016 tercatat 1,0%, turun dibandingkan dengan capaian pada 2015 sebesar 1,2% PDB (Grafik 7.5).

Pembiayaan defisit APBN-P 2016 dilakukan dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Pemerintah pada 2016 menerbitkan SBN (bruto) sebesar Rp651,9 triliun sehingga posisi SBN pada akhir 2016 mencapai Rp2.734 triliun. Dengan posisi ini, SBN memiliki pangsa terbesar dalam struktur utang pemerintah (Grafik 7.6). Sementara itu, berdasarkan realisasi sementara Kementerian Keuangan, penarikan pinjaman luar negeri

Grafik 7.4. Perkembangan Sub-Komponen Belanja Negara

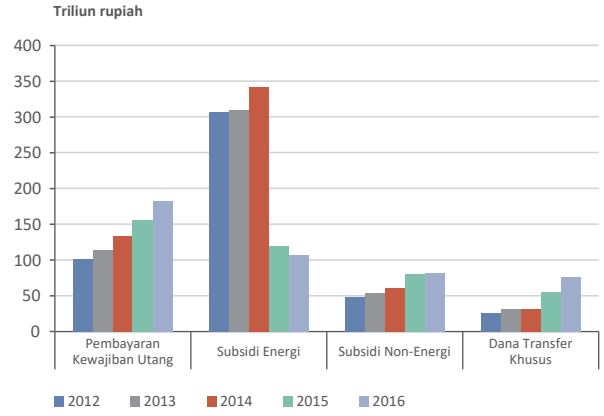

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 7.5. Perkembangan Defisit Fiskal dan Keseimbangan Primer

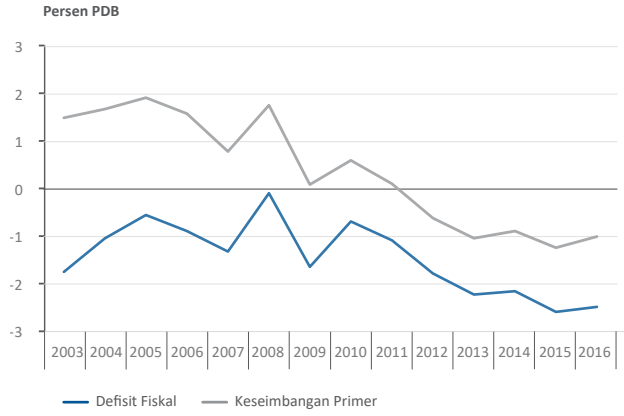

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 7.6. Porsi Utang Pemerintah terhadap PDB

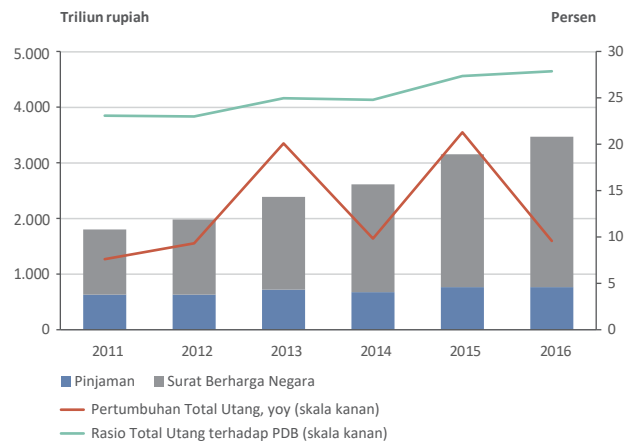

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

(bruto) terlihat menurun yakni dari Rp77,5 triliun pada 2015 menjadi Rp58,3 triliun.

Strategi yang digunakan Pemerintah baik saat penerbitan SBN maupun untuk pembiayaan awal anggaran guna meningkatkan kemampuan belanja sejak awal tahun, dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas pasar uang dalam negeri, termasuk likuiditas. Sebagai gambaran, Pemerintah tidak melakukan tambahan penerbitan SBN di akhir tahun 2016 setelah mempertimbangkan kebutuhan likuiditas dalam negeri di akhir tahun yang biasanya juga meningkat. Untuk meminimalkan dampak terhadap likuiditas rupiah, strategi pembiayaan awal dilakukan melalui penerbitan *Global Bonds* senilai 3,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp46 triliun. Strategi lain yang digunakan ialah dengan memperkaya fitur penerbitan *Savings Bond Retail* (SBR) yakni fitur fasilitas pelunasan sebelum jatuh tempo *(early redemption)*.

Dengan perkembangan pembiayaan defisit APBN-P tersebut, utang pemerintah pada 2016 secara umum masih dalam level sehat dan aman. Posisi utang pemerintah pada Desember 2016 mencapai Rp3.467 triliun, meningkat dari posisi 2015 sebesar Rp3.165 triliun. Namun, pertumbuhan utang pemerintah 2016 tercatat melambat yakni dari 21,3% (yoy) pada 2015 menjadi 9,5% (yoy). Komposisi utang dalam bentuk rupiah juga meningkat dari 55% menjadi 58% sehingga mengurangi *currency risk* dalam pengelolaan utang. Selain itu, rasio utang pemerintah juga masih rendah dan dalam koridor aman yakni 27,8% PDB, tidak berbeda jauh dengan level 2015 sebesar 27,3% PDB.

Boks 7.1. Kebijakan Amnesti Pajak

Sebagai sumber pendapatan negara terbesar, realisasi penerimaan pajak masih berada di bawah potensinya. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan BPS, rata-rata rasio pajak terhadap PDB sepanjang tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 sebesar 11,5%. Rasio tersebut masih lebih rendah dibandingkan potensi rasio pajak terhadap PDB yang mencapai 21.5%.[1]

Kondisi tersebut tidak terlepas dari pengaruh tingkat kepatuhan terhadap pajak di Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja tercatat lebih dari 120 juta orang dan lebih dari 3,5 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Di sisi lain, data Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan baru sebanyak 30 juta WP yang terdiri dari WP Orang Pribadi (OP) Karyawan, WP Non-Karyawan, dan WP Badan masing-masing tercatat sekitar 22,3 juta, 5,2 juta dan 2,5 juta. Sementara itu, WP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2015 hanya sekitar 60% dari total jumlah WP terdaftar. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Beberapa data juga mengindikasikan adanya potensi dana milik WNI di luar negeri yang bersifat *illicit* dan belum dikenakan pajak. *Global Financial Integrity* (GFI) mengklasifikasikan pergerakan uang antar negara sebagai *illicit* apabila dana tersebut diperoleh, ditransfer, atau digunakan secara ilegal. Dari hasil studi oleh Kar dan Spanjers (2015), Indonesia menempati urutan kesembilan negara dengan jumlah dana *illicit* tertinggi yang berada di luar negeri.[2] Akumulasi *illicit financial outflows* dari Indonesia periode 2004-2013 mencapai 181 miliar dollar AS (Tabel 1). Secara rata-rata, *illicit financial outflows* dari Indonesia mencapai 18 miliar dollar AS per tahunnya. Motivasi utama dari adanya *Illicit financial outflows* adalah penghindaran pajak (*tax evasion*).

Meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan di tengah masih terbatasnya penerimaan pajak mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pajak melalui penerapan kebijakan amnesti pajak (AP). Program AP dimulai pada 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Dalam Undang Undang No.11 tentang Pengampunan Pajak yang disahkan pada tanggal 28 Juni 2016, objek AP adalah

Tabel 1. ***Illicit Financial Outflows***

Juta dolar AS

Tahun	Indonesia	Total Negara Berkembang
2004	18.466	465.269
2005	13.290	524.588
2006	15.995	543.524
2007	18.354	699.145
2008	27.237	827.959
2009	20.547	747.026
2010	14.646	906.631
2011	18.292	1.007.744
2012	19.248	1.035.904
2013	14.633	1.090.130
Kumulatif	**180.710**	**7.847.921**

Sumber: Kar dan Spanjers, 2015.

kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh WP, yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Perhitungan kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan tersebut dilakukan oleh pemohon AP. Lingkup AP tidak termasuk peningkatan aset yang disebabkan oleh revaluasi. Pemohon AP diwajibkan membayar uang tebusan yang jumlahnya relatif kecil dengan perhitungan berdasarkan selisih dari hasil perhitungan kewajiban pajak yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan tersebut. Besarnya tarif uang tebusan untuk deklarasi harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri ditetapkan sebesar 4% untuk periode pelaporan 1 Juli - 30 September 2016, 6% untuk periode pelaporan 1 Oktober - 31 Desember 2016, dan 10% untuk periode pelaporan 1 Januari - 31 Maret 2017. Tarif uang tebusan untuk deklarasi harta di dalam negeri atau apabila pemohon melakukan repatriasi atas deklarasi hartanya di luar negeri, lebih rendah 50% dibandingkan tarif tebusan untuk deklarasi harta di luar negeri untuk masing-masing periode pelaporan.

Penerapan program AP mencatat pekembangan yang positif. Sampai dengan 31 Desember 2016, total dana tebusan pajak cukup besar yakni mencapai Rp107 triliun. Dana tebusan dari AP berhasil meningkatkan penerimaan pajak tahun 2016, khususnya pajak penghasilan nonmigas. Jumlah harta kekayaan yang dideklarasikan tercatat sebesar Rp4.294 triliun, diantaranya merupakan repatriasi sebesar Rp141 triliun (Tabel 2). Jumlah dana tebusan dan harta kekayaan yang dideklarasikan pada periode I AP ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah program AP di

1 IMF (2011). *Indonesia: Selected Issue*. IMF Country Report No.11/310.

2 Kar and Spanjers (2015). *Illicit Financial Flows from Developing Countries 2004-2013*. Global Financial Integrity.

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Pengampunan Pajak

Miliar rupiah

Keterangan	Jul	Ags	Sep	Periode I	Okt	Nov	Des	Periode II	Periode I dan II
Uang tebusan pengampunan dan setoran tunggakan pajak	1.118	6.019	90.020	97.156	779	1.100	7.790	9.669	106.825
Penghentian pemeriksaan bukti permulaan	1	66	288	354	45	84	256	385	739
Pembayaran tunggakan pajak	987	1.137	941	3.065	-	-	-	-	3.065
Deklarasi repatriasi	41	2.247	127.341	129.628	473	2.020	8.879	11.372	141.000
Deklarasi LN	87	15.750	908.284	924.121	6.751	10.073	72.055	88.879	1.013.000
Deklarasi DN	1.071	71.827	2.529.513	2.602.411	82.061	94.202	361.327	537.589	3.140.000
Total harta	1.199	89.824	3.565.137	3.656.160	89.285	106.295	442.261	637.840	4.294.000

Sumber: Diolah dari *Dashboard* Statistik Amnesti Pajak, Kementerian Keuangan

dunia (Grafik 1 dan Grafik 2). Jumlah penerimaan ini jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan program *Sunset Policy* yang diberlakukan pada tahun 2008. Penerapan kebijakan *Sunset Policy* hanya menghasilkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp7,5 triliun.

Dalam jangka pendek, program AP sempat memengaruhi kondisi likuiditas perbankan. Pembayaran tebusan AP membuat sebagian likuiditas perbankan beralih ke Pemerintah secara temporer. Tekanan likuiditas perbankan terlihat pada dinamika penerimaan uang tebusan setiap bulan. Pada periode I program AP, tekanan pada likuiditas perbankan tertinggi pada bulan September 2016 dengan jumlah uang tebusan yang dibayarkan sebesar Rp90 triliun (Tabel 2). Secara keseluruhan, pada periode I uang tebusan yang masuk mencapai Rp97 triliun. Tingginya penerimaan uang tebusan pada periode I 2016 disebabkan oleh banyaknya WP yang memanfaatkan tarif tebusan pada periode I 2016 yang lebih rendah dibandingkan periode berikutnya. Pada periode selanjutnya, jumlah penerimaan uang tebusan turun signifikan. Sampai dengan 31 Desember 2016 penerimaan uang tebusan secara keseluruhan mencapai Rp107 triliun, atau bertambah Rp10 triliun dibandingkan posisi akhir periode I.

Program AP juga berpotensi memberikan pengaruh positif pada variabel ekonomi lain. Program AP berhasil menarik dana penduduk yang ditempatkan di luar negeri sehingga meningkatkan likuiditas dalam negeri, memperbaiki posisi investasi internasional Indonesia, dan menguatkan nilai tukar rupiah. Hal ini tercermin pada perpindahan simpanan *Overseas Current Account* (OCA) di bank ke Nostro, penjualan surat-surat berharga dan divestasi aset luar negeri sepanjang tahun 2016 (Grafik 3). Perpindahan simpanan OCA ke Nostro mencapai posisi tertinggi pada periode September - Desember 2016. Hal yang sama juga terjadi pada pola *inflow* valuta asing ke rupiah sepanjang tahun 2016. Transaksi *inflow* valuta asing ke rupiah naik signifikan pada periode September - Desember 2016. Aliran dana yang masuk tersebut selain menambah

Grafik 1. Perbandingan Dana Tebusan pada Program Amnesti Pajak Negara-negara di Dunia

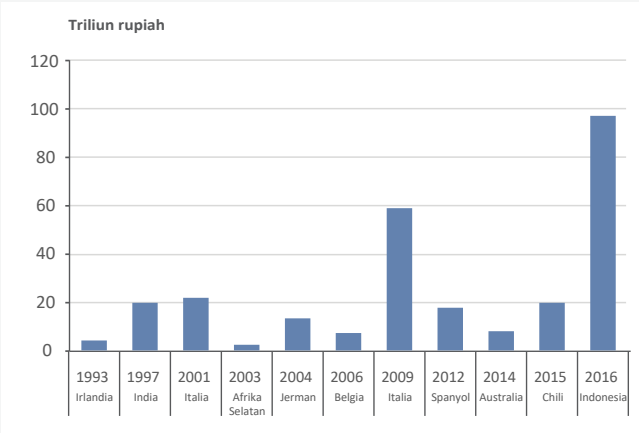

Sumber: *Dashboard Statistic* TA-DJP dan *Center for Indonesia Taxation Analysis*, diolah

Grafik 2. Perbandingan Deklarasi Harta pada Program Amnesti Pajak Negara-negara di Dunia

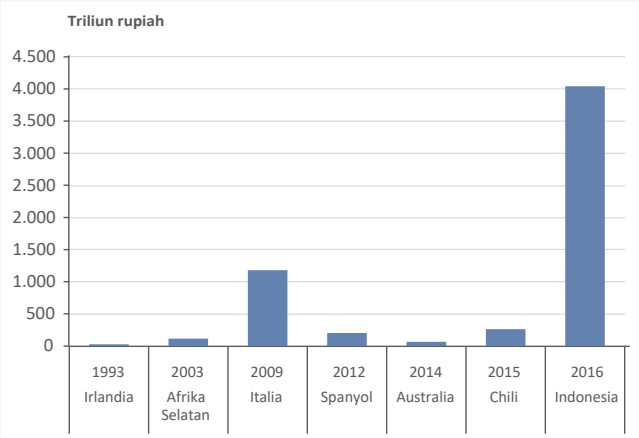

Sumber: *Dashboard Statistic* TA- DJP dan *Center for Indonesia Taxation Analysis*, diolah

Grafik 3. Perkembangan Transaksi dari OCA ke Nostro dan *Inflows* Valas

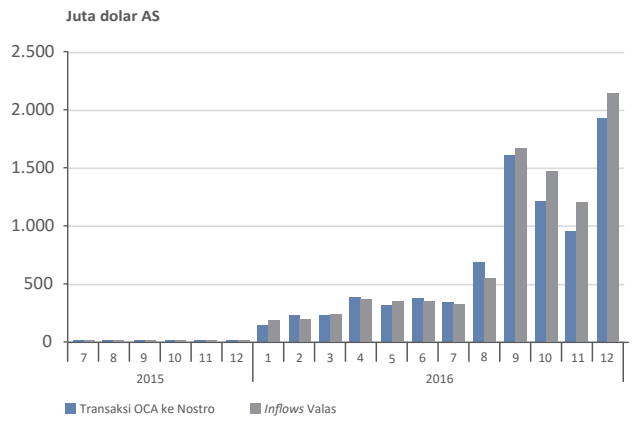

Sumber: Bank Indonesia

likuiditas dalam negeri, juga memperbaiki posisi investasi internasional Indonesia pada semester II 2016.[3] Selain itu, meningkatnya pasokan valas tersebut juga turut berdampak pada penguatan rupiah.[4]

Pemanfaatan dana repratriasi memerlukan dukungan ketersediaan instrumen penempatan yang memadai. Instrumen penempatan dana berdenominasi rupiah antara lain terdiri dari investasi pada Surat Berharga Negara (SBN), pasar saham, sektor perbankan seperti deposito berjangka (*time deposit*) dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit/NCD*), obligasi korporasi, reksadana, sukuk dan instrumen lainnya. Adapun instrumen dalam valuta asing yang tersedia cukup beragam baik yang diterbitkan oleh pemerintah seperti *global bond* maupun yang diterbitkan korporasi seperti *direct investment*, *refinancing* utang luar negeri, *debt to equity swap*, dan *back-to-back loan*. Peluang untuk menampung dana repatriasi juga cukup besar pada obligasi yang bertenor lebih panjang seperti obligasi infrastruktur. Adapun guna memudahkan pelaku dana repatriasi melakukan lindung nilai di perbankan domestik, Bank Indonesia telah memberi tambahan kemudahan dalam transaksi *plain vanilla* seperti *forward* melalui penyelesaian transaksi secara *netting* untuk *unwind*, *early termination*, *rollover* dan *structured product* seperti *call spread option*.

Ke depan, program AP berpotensi meningkatkan basis penerimaan pajak untuk tahun-tahun selanjutnya dengan didukung reformasi di bidang perpajakan. Tebusan dan deklarasi harta dari pengampunan pajak mengindikasikan besarnya potensi penerimaan ke depan, baik dari WP *existing* maupun menjaring WP yang sebelumnya belum terdaftar. Meskipun demikian, dampak AP terhadap peningkatan kapasitas fiskal pemerintah dalam jangka panjang akan lebih optimal apabila secara signifikan dapat menaikkan dan memperluas basis penerimaan pajak. Untuk itu program AP harus disertai dengan reformasi perpajakan yang meliputi penguatan dan perluasan basis data perpajakan baik internal maupun eksternal melalui dukungan teknologi informasi, penyempurnaan regulasi, perbaikan administrasi, penguatan kapasitas dan peningkatan efektivitas penegakan hukum.

3 Lihat Bab 4 Neraca Pembayaran Indonesia

4 Lihat Bab 5 Nilai Tukar

BAB 8
Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan pada 2016 tetap terjaga di tengah meningkatnya risiko kredit perbankan. Naiknya risiko kredit meningkatkan kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit dan mendorong dilakukannya konsolidasi internal oleh bank. Strategi konsolidasi tersebut berdampak mengurangi efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial dalam mendorong pemulihan pertumbuhan kredit. Untuk itu, kinerja intermediasi perbankan pada 2016 relatif rendah. Perlambatan penyaluran kredit perbankan mendorong peningkatan pembiayaan ekonomi dari nonbank secara signifikan pada 2016, khususnya melalui penerbitan obligasi korporasi, *medium term notes*, *negotiable certificate of deposit*, dan *promissory notes*. Kondisi tersebut mendorong peningkatan kinerja pasar keuangan nonbank diikuti dengan penurunan risiko sejalan dengan sentimen positif terhadap perkembangan pemulihan ekonomi domestik dan keberhasilan program amnesti pajak.

Keterangan gambar:
Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga. Pada 2016, kredit perbankan mulai meningkat sementara kinerja pasar modal membaik seiring meningkatnya pembiayaan melalui penerbitan saham, obligasi, MTN dan NCD.

Kondisi sistem keuangan pada 2016 tetap stabil didukung oleh tingginya likuiditas dan permodalan perbankan, serta membaiknya kinerja pasar obligasi dan pasar modal. Namun demikian, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada 2016 tetap menghadapi tantangan terutama berupa risiko kredit yang meningkat. Melambatnya kinerja korporasi yang terdampak oleh penurunan permintaan dan harga komoditas global, serta belum kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik mendorong korporasi melakukan konsolidasi internal dan menunda ekspansi usaha. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan risiko kredit dan menurunkan kinerja intermediasi perbankan pada 2016.

Peningkatan risiko kredit mendorong bank semakin berhati-hati dalam penyaluran kredit baru dan lebih mengutamakan konsolidasi internal daripada ekspansi kredit. Konsolidasi internal bank ditengarai telah menghambat transmisi kebijakan moneter bias longgar, baik melalui jalur suku bunga maupun jalur kredit. Selain itu, dampak pelonggaran kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penyaluran kredit perbankan juga menjadi berkurang. Pada 2016, pertumbuhan kredit perbankan, kecuali kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan kredit UMKM terutama didorong oleh kenaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengakselerasi penyaluran KUR pada 2016. Kebijakan mendorong KUR dilakukan melalui penurunan suku bunga, perluasan lembaga penyalur dan penerima KUR, serta penyediaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) merupakan faktor pendukung meningkatnya penyaluran KUR pada 2016.

Di tengah perlambatan intermediasi perbankan, kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB) secara umum membaik pada 2016. Hal tersebut tercermin dari kinerja penyaluran pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) dan peningkatan aset, investasi, rasio premi, serta tingkat penetrasi perusahaan asuransi. Dari sisi risiko, baik PP maupun asuransi mengalami kenaikan risiko sebagaimana tercemin dari peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) dan rasio klaim bruto dibandingkan dengan premi bruto.

Perlambatan penyaluran kredit berdampak mendorong korporasi memanfaatkan alternatif sumber pembiayaan melalui pasar obligasi dan pasar modal. Hal tersebut terindikasikan dari penerbitan obligasi korporasi dan *Medium Term Notes* (MTN) yang meningkat signifikan pada 2016. Di pasar keuangan, kinerja pasar obligasi dan saham meningkat diikuti penurunan risiko yang didorong oleh aliran modal masuk sejalan dengan sentimen positif terhadap perkembangan ekonomi domestik dan keberhasilan program amnesti pajak.

8.1. ASESMEN UMUM RISIKO SISTEM KEUANGAN

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada 2016 tetap terjaga dengan baik didukung oleh likuiditas dan permodalan perbankan yang tinggi, dan relatif terjaganya volatilitas di pasar keuangan. Terjaganya SSK tercermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang terjaga berada di zona normal (Grafik 8.1).[1] SSK didukung oleh ketahanan perbankan yang membaik. Berbagai indikator ketahanan perbankan, seperti rasio likuiditas terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dan rasio permodalan (*Capital Adequacy Ratio/ CAR*) berada pada level tinggi dan meningkat masing masing dari 19,4% pada 2015 menjadi 20,9% dan dari 21,2 % menjadi 22,7 % pada akhir 2016. Selain itu, tingginya arus masuk modal asing terutama ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 107,3 triliun memberi kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pasar keuangan Indonesia. Dalam situasi SSK yang stabil, beberapa risiko menunjukkan peningkatan, seperti melambatnya pertumbuhan intermediasi perbankan yang disertai dengan meningkatnya risiko kredit (*Non Performing Loans*/NPL) akibat aktivitas korporasi yang melambat. Tekanan di sisi penghimpunan dana juga masih berlanjut dari tahun 2015 walaupun telah mengalami perbaikan pada triwulan IV 2016 didorong oleh masuknya dana repatriasi amnesti pajak.

Grafik 8.1. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

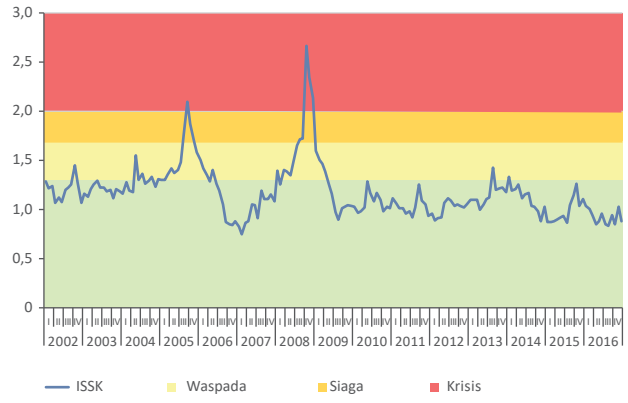

Sumber: Bank Indonesia

1 Komponen pembentuk ISSK adalah indeks Stabilitas Institusi Keuangan yang terdiri dari komponen tekanan, intermediasi dan efisiensi perbankan serta Indeks Stabilitas Pasar Keuangan.

8.2. PERKEMBANGAN KINERJA DAN RISIKO KORPORASI

Kinerja korporasi nonkeuangan relatif terbatas sejalan dengan upaya korporasi yang lebih mengutamakan konsolidasi internal daripada melakukan ekspansi usaha.[2] Terbatasnya kinerja korporasi tercermin dari beberapa indikator, seperti pertumbuhan penjualan dan *asset turnover* (Grafik 8.2), serta *inventory turnover* (Tabel 8.1) yang mengalami penurunan. Secara sektoral, kinerja korporasi di sektor komoditas mengalami penurunan yang lebih dalam akibat permintaan dan harga komoditas di pasar global yang menurun. Melambatnya kinerja korporasi sektor komoditas kemudian berdampak pada kinerja korporasi di sektor pendukung, terutama sektor pengangkutan dan perdagangan, sehingga sektor korporasi secara agregat menunjukkan perlambatan kinerja pada 2016.

Grafik 8.2. Pertumbuhan Penjualan dan *Asset Turnover*

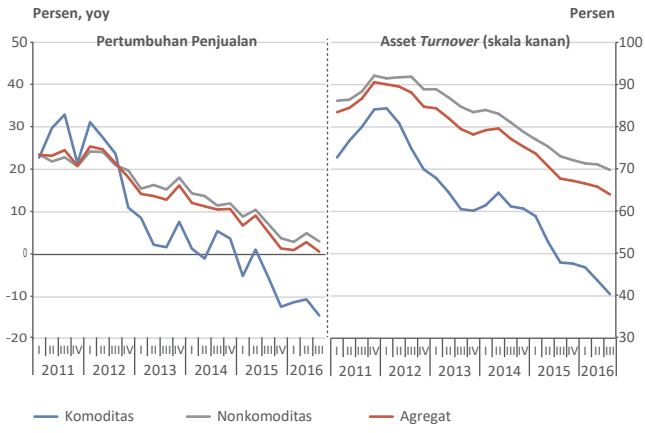

Sumber: Bloomberg, diolah

Di tengah perlambatan kinerja, profitabilitas korporasi masih menunjukkan tren perbaikan sejak awal 2016 sejalan dengan upaya konsolidasi dan efisiensi yang dilakukan dan terjaganya *profit margin*. Perbaikan kinerja terlihat pada indikator *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) yang meningkat, antara lain dialami oleh korporasi di sektor infrastruktur, barang konsumsi, dan pertanian. Sementara itu, profitabilitas korporasi di sektor komoditas pertambangan masih negatif (Tabel 8.1 dan Grafik 8.3). Sebagai antisipasinya, korporasi melakukan upaya konsolidasi dan efisiensi dengan cara menekan biaya operasional untuk menurunkan harga pokok penjualan atau *cost of goods sold* (COGS). Selanjutnya, guna menjaga *profit margin*, korporasi mempertahankan harga jual produknya sehingga dampak penurunan penjualan terhadap laba menjadi tertahan. Perilaku korporasi di sektor komoditas ini tercermin dari *Gross Profit Margin* yang meningkat (Grafik 8.3).

Merespons kinerja usaha yang menurun, korporasi terindikasi melakukan konsolidasi internal dengan menurunkan utang (*leverage*). Utang korporasi, baik secara agregat maupun korporasi di sektor komoditas, mengalami penurunan sebagaimana tercermin dari indikator *debt to equity ratio* (DER) yang menurun (Grafik 8.4). Sejalan dengan menurunnya tingkat penjualan, korporasi mengurangi utang terutama dalam bentuk utang jangka pendek yang biasa digunakan untuk keperluan modal kerja. Konsolidasi

Tabel 8.1. Kinerja Korporasi Sektoral

No.	Sektor	ROA		ROE		DER		*Current Ratio*		TA/TL		ATO		ITO	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1.	Pertanian	0,22%	2,38%	0,48%	5,26%	1,32	1,11	0,82	0,90	1,76	1,90	0,64	0,49	8,06	6,74
2.	Industri Dasar & Kimia	2,18%	4,21%	4,52%	8,52%	1,08	0,98	1,36	1,42	1,93	2,02	0,71	0,67	4,85	4,96
3.	Industri Barang Konsumsi	10,88%	12,24%	22,29%	23,03%	1,09	0,73	1,64	1,98	1,92	2,38	1,31	1,31	4,67	4,90
4.	Infrastruktur, utilitas dan transportasi	1,72%	4,18%	4,87%	11,14%	1,85	1,50	0,97	0,93	1,54	1,67	0,51	0,51	64,93	62,67
5.	Aneka Industri	4,29%	4,37%	9,76%	9,72%	1,28	1,17	1,20	1,25	1,78	1,85	0,79	0,74	7,28	7,46
6.	Pertambangan	-2,44%	-3,89%	-6,29%	-10,42%	1,57	1,82	0,78	0,89	1,64	1,55	0,41	0,36	9,39	9,46
7.	Properti & Real Estate	5,44%	4,52%	11,42%	9,32%	1,07	1,05	1,81	1,73	1,93	1,95	0,37	0,33	1,94	1,75
8.	Perdagangan, jasa & investasi	3,48%	3,02%	6,78%	5,80%	0,95	0,89	1,46	1,52	2,06	2,12	0,89	0,86	7,40	7,47
Agregat		**2,96%**	**3,66%**	**6,67%**	**8,03%**	**1,27**	**1,13**	**1,26**	**1,34**	**1,79**	**1,88**	**0,68**	**0,64**	**6,08**	**7,47**

Keterangan: TA/TL: *Total Assets/ Total Liabilities*; ATO: *Assets Turnover*; ITO: *Inventory Turnover*
Sumber : Bloomberg, diolah

2 Data berdasarkan kinerja 448 korporasi yang *go-public* di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Grafik 8.3. Pertumbuhan COGS dan *Gross Profit Margin*

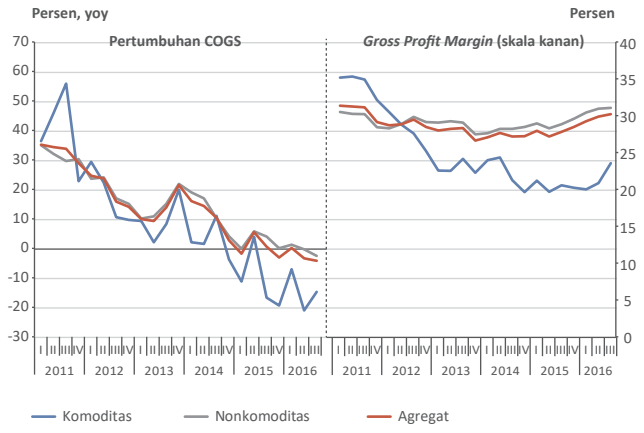

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 8.5. *Interest Coverage Ratio*

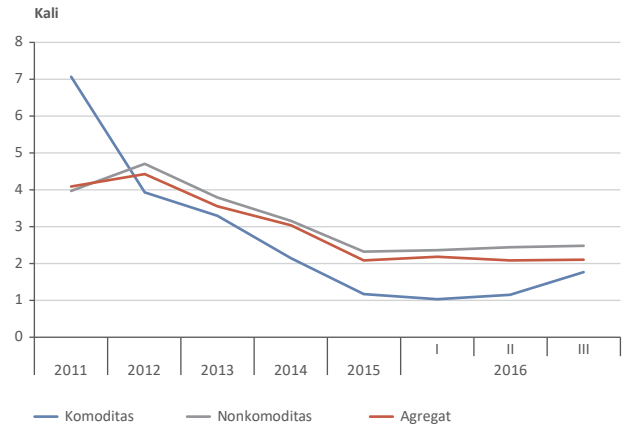

Sumber: Bloomberg, diolah

yang dilakukan korporasi menyebabkan penurunan suku bunga kredit dan *yield* obligasi akibat pelonggaran kebijakan moneter belum dapat mendorong peningkatan utang korporasi dan ekspansi usaha. Penurunan suku bunga kredit memberi manfaat sebatas pada penurunan biaya bunga korporasi. Dengan demikian, upaya konsolidasi korporasi dapat menjaga kemampuan membayar utang korporasi sebagaimana tercermin dari *interest coverage ratio* (ICR) yang cenderung stabil (Grafik 8.5).

Penurunan tingkat *leverage* korporasi juga terindikasi dari posisi Utang Luar Negeri (ULN) swasta yang menurun (Grafik 8.6). Posisi ULN swasta menurun dari 168 miliar dolar AS pada akhir 2015 menjadi 159 miliar dolar AS pada akhir 2016. Penurunan ULN tersebut merupakan indikasi berkurangnya eksposur risiko valuta asing bagi korporasi swasta. Upaya penurunan utang luar negeri tersebut ditengarai banyak dilakukan oleh korporasi di sektor komoditas. Hal tersebut karena korporasi di sektor komoditas merupakan korporasi yang berorientasi ekspor sehingga cenderung memiliki utang luar negeri.

8.3. PERKEMBANGAN KINERJA DAN RISIKO PERBANKAN

Kinerja dan Risiko Industri Perbankan

Sejalan dengan proses konsolidasi korporasi, pertumbuhan kredit perbankan melambat dari 10,5% pada 2015 menjadi 7,9% pada 2016 yang merupakan pertumbuhan terendah sejak 2002. Secara sektoral, perlambatan pertumbuhan kredit terbesar terjadi pada sektor pertambangan dan sektor pendukungnya (*value chain*) seperti sektor

Grafik 8.4. *Debt to Equity Ratio*

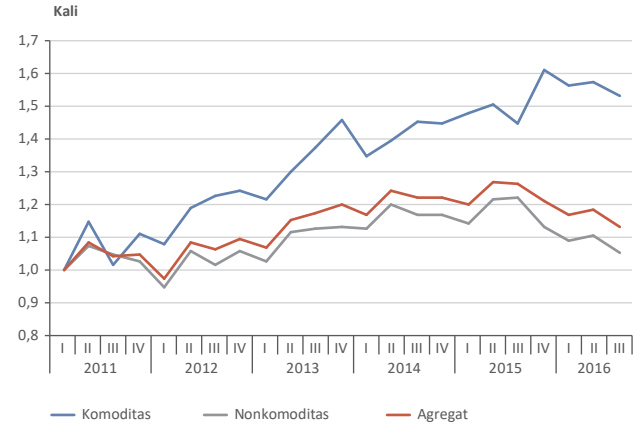

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 8.6. Perkembangan ULN Korporasi

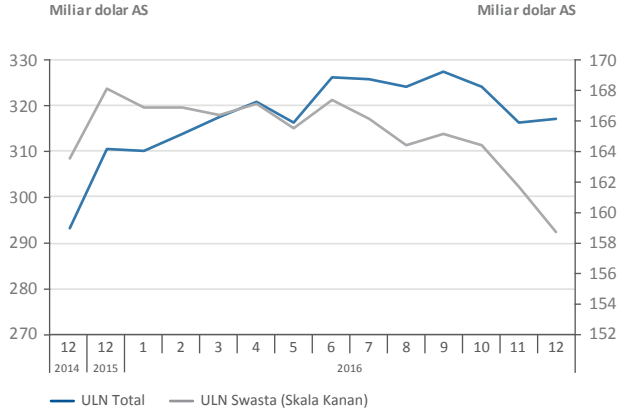

Sumber: Bank Indonesia

pengangkutan akibat permintaan dan harga komoditas yang rendah (Grafik 8.7). Secara sektoral, pertumbuhan kredit di sektor industri manufaktur mengalami penurunan sejalan dengan permintaan ekspor produk Indonesia yang menurun. Sementara itu, pertumbuhan kredit yang tinggi terjadi di sektor listrik dan konstruksi, didorong oleh tingginya pembangunan infrastruktur Pemerintah (Grafik 8.8). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terendah terjadi pada jenis Kredit Modal Kerja (KMK). Hal tersebut sejalan dengan masih rendahnya aktivitas penjualan korporasi yang mengakibatkan permintaan modal kerja korporasi terutama untuk pembelian bahan baku menurun (Grafik 8.9). Sementara penurunan kredit konsumsi, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) relatif tertahan akibat dampak positif pelonggaran LTV yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Perlambatan kredit perbankan dipengaruhi baik oleh sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, pelemahan kredit perbankan sejalan dengan kondisi korporasi yang masih melakukan konsolidasi dan cenderung menunda ekspansi usaha. Sementara dari sisi penawaran terdapat kecenderungan perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit akibat meningkatnya persepsi risiko bank yang tercermin pada meningkatnya indeks *lending standard* pada 2016 (Grafik 8.10). Dibandingkan dengan negara-negara *peer group*, pertumbuhan kredit di Indonesia masih relatif tinggi meski beberapa negara sudah mengalami pertumbuhan kredit yang meningkat (Grafik 8.11).[3]

Sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit, risiko kredit perbankan (NPL) cenderung meningkat sepanjang

Grafik 8.7. Sektor dengan Pertumbuhan Kredit Rendah

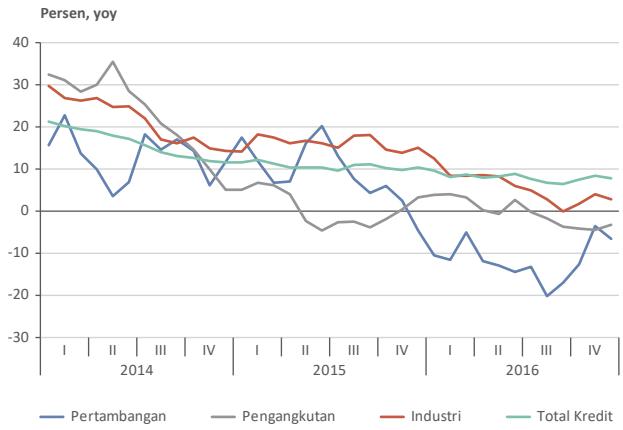

Sumber: Bank Indonesia

3 Sumber: Bank Indonesia (Desember 2016), Malaysia, Singapura Thailand dan India: CEIC (November 2016), diolah

Grafik 8.8. Sektor dengan Pertumbuhan Kredit tinggi

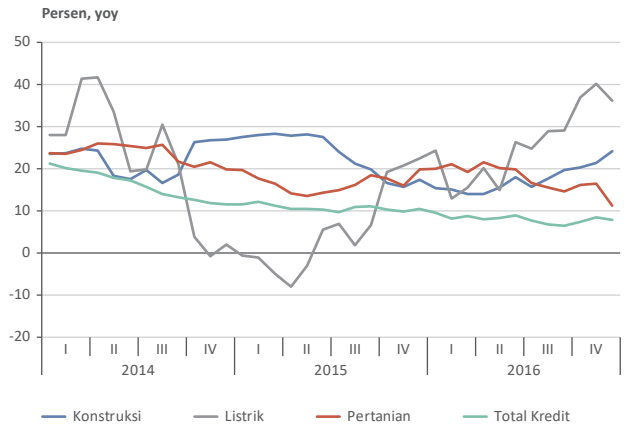

Sumber: Bank Indonesia

2016, meskipun masih berada cukup jauh di bawah batas aman sebesar 5%. Rasio NPL *gross* perbankan pada 2016 meningkat menjadi 2,9% dari 2,5% pada 2015. Berdasarkan jenis penggunaan, NPL tertinggi terjadi pada KMK yang mencapai 3,6% sejalan dengan upaya konsolidasi korporasi (Grafik 8.12). Secara sektoral, peningkatan NPL didorong oleh melemahnya pendapatan korporasi di sektor perdagangan dan industri yang berdampak pada tingkat kemampuan membayar pinjaman. Selain itu, penurunan harga komoditas juga telah memengaruhi kinerja perusahaan di sektor pertambangan sehingga menyebabkan kualitas kredit sektor ini menurun secara signifikan dengan rasio NPL mencapai 7,2% pada akhir 2016 (Grafik 8.13). Penurunan kinerja sektor pertambangan juga memberi dampak terhadap pemburukan kredit di sektor pendukung pertambangan, seperti sektor pengangkutan dengan rasio NPL sebesar 4,8%. Jika dibandingkan dengan negara-negara *peer group*, peningkatan NPL industri perbankan Indonesia

Grafik 8.9. Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan

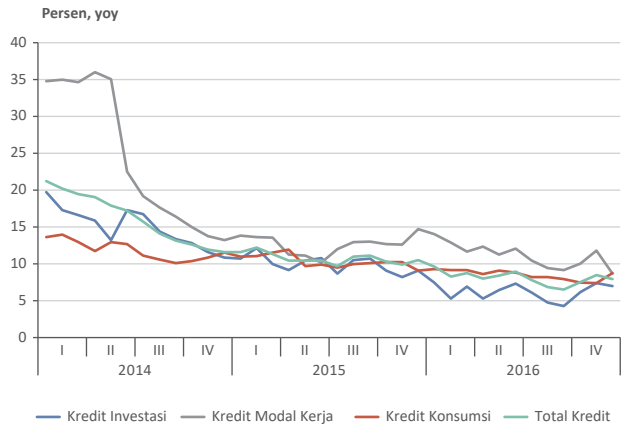

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 8.10. Indeks *Lending Standard*

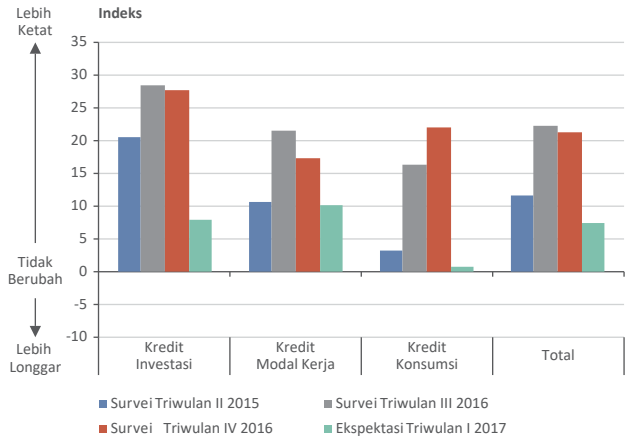

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 8.12. NPL Menurut Jenis Penggunaan Kredit

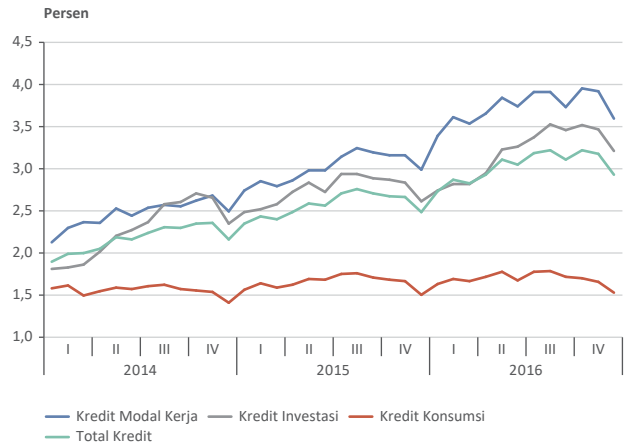

Sumber: Bank Indonesia

relatif sejalan dengan tren peningkatan NPL di kawasan ASEAN dan *peer countries* yang umumnya terdampak oleh perlambatan ekonomi global (Grafik 8.14).[4]

Merespon peningkatan risiko kredit, perbankan juga melakukan konsolidasi internal melalui penguatan manajemen risiko kredit secara preventif dengan mengurangi pembiayaan pada sektor-sektor dengan risiko tinggi serta dengan memperkuat proses monitoring kredit. Konsolidasi juga dilakukan internal perbankan melalui upaya mengintensifkan proses penyelesaian kredit bermasalah dan secara aktif melakukan restrukturisasi, khususnya bagi kredit yang mempunyai potensi permasalahan ke depan.

Grafik 8.11. Pertumbuhan Kredit Negara *Peer Countries*

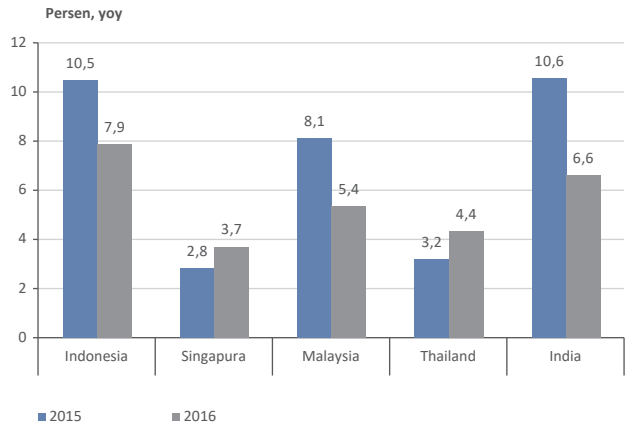

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, diolah

Di samping itu, perbankan juga menyiapkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang relatif tinggi untuk menutup kerugian akibat kredit bermasalah. Strategi konsolidasi tersebut berhasil menahan laju pertumbuhan NPL pada 2016 (Grafik 8.15). Optimisme perbaikan NPL perbankan didukung oleh mulai meningkatnya harga komoditas pada triwulan IV 2016 sehingga dapat memperbaiki kinerja perusahaan di sektor pertambangan dan sektor pendukungnya.

Seiring dengan belum kuatnya pertumbuhan kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan juga tumbuh terbatas, meski mulai mengalami peningkatan pada triwulan IV 2016 karena adanya program amnesti pajak. Pertumbuhan DPK pada 2016 mengalami peningkatan menjadi 9,6% dari sebesar 7,3% pada 2015 (Grafik 8.16). Peningkatan DPK tersebut disumbang oleh ekspansi fiskal dan masuknya dana repatriasi amnesti pajak yang tercermin

Grafik 8.13. NPL Menurut Sektor Ekonomi

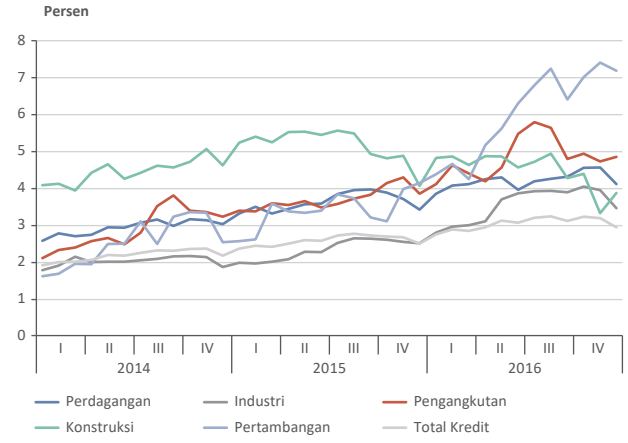

Sumber: Bank Indonesia

4 Sumber data Indonesia: Bank Indonesia posisi Desember 2016, data Malaysia, Singapura dan Thailand: Bloomberg posisi triwulan III 2016, data Filipina dan India: IMF posisi triwulan II 2016, diolah

Grafik 8.14. NPL Indonesia dan *Peer Countries*

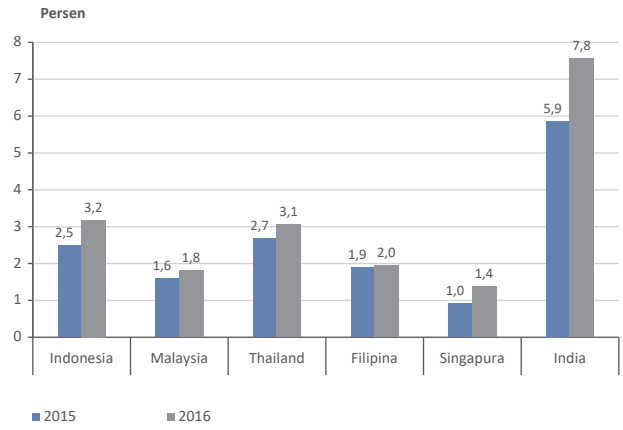

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, diolah

Grafik 8.16. Pertumbuhan DPK Per Jenis Valuta

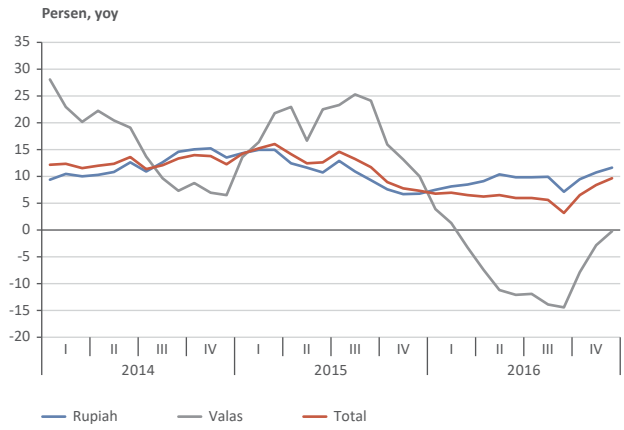

Sumber: Bank Indonesia

dari peningkatan giro dan deposito (Grafik 8.17). Meski telah mengalami peningkatan, namun perlu diperhatikan kesinambungan dari peningkatan DPK tersebut. Hal ini mengingat adanya tekanan musiman yang dapat menyebabkan terjadinya *funding gap* dan berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas pada perbankan. Selain itu, peningkatan DPK secara kelompok BUKU masih didominasi oleh bank-bank besar, yaitu bank BUKU 4 dan BUKU 3. Sementara pertumbuhan DPK pada bank BUKU 1 dan BUKU 2 masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan DPK perbankan (Grafik 8.18).

Faktor regulasi dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang tinggi memberikan tekanan dan pengaruh terhadap perkembangan DPK perbankan pada 2016. Implementasi ketentuan mengenai kewajiban penggunaan rupiah pada transaksi dalam negeri menyebabkan pertumbuhan DPK valas menurun akibat adanya pengalihan ke DPK rupiah.

Sementara ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mensyaratkan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) untuk memenuhi target persentase kepemilikan SBN juga mengakibatkan terjadinya pengalihan DPK, terutama yang dimiliki IKNB menjadi portofolio SBN. Selain itu, tekanan terhadap DPK juga dipicu oleh nilai imbal hasil SBN yang lebih menarik dibandingkan dengan suku bunga deposito sehingga mendorong pengalihan DPK secara perseorangan.

Di tengah perlambatan DPK, bank berupaya meningkatkan pendanaannya melalui penerbitan obligasi dan *medium term notes* (MTN). Penerbitan surat berharga oleh bank ditujukan untuk mengantisipasi *funding gap* yang terjadi, khususnya pada triwulan II dan triwulan III 2016. Peningkatan penerbitan obligasi oleh bank juga sejalan dengan semakin murahnya pendanaan melalui penerbitan surat-surat berharga (SSB). Selain itu dari sisi jangka waktu, SSB juga berjangka waktu lebih panjang dari DPK sehingga akan memperbaiki

Grafik 8.15. Posisi dan Pertumbuhan NPL

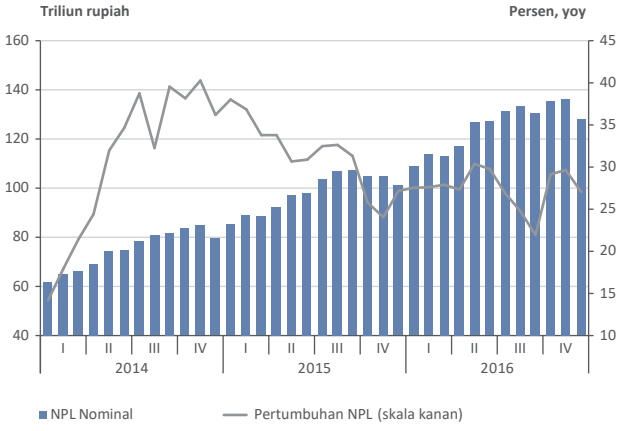

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 8.17. Pertumbuhan DPK Per Jenis Simpanan

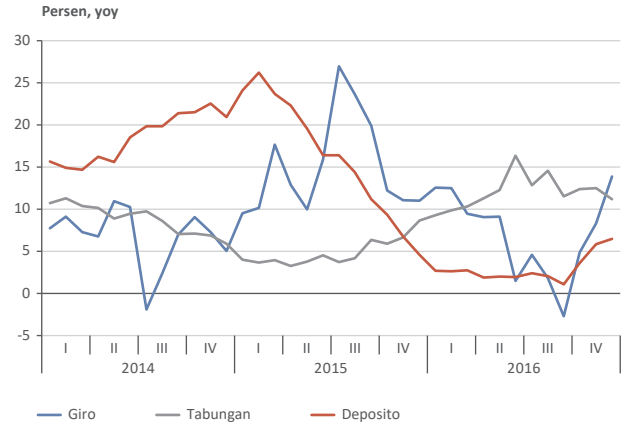

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 8.18. Pertumbuhan DPK menurut BUKU

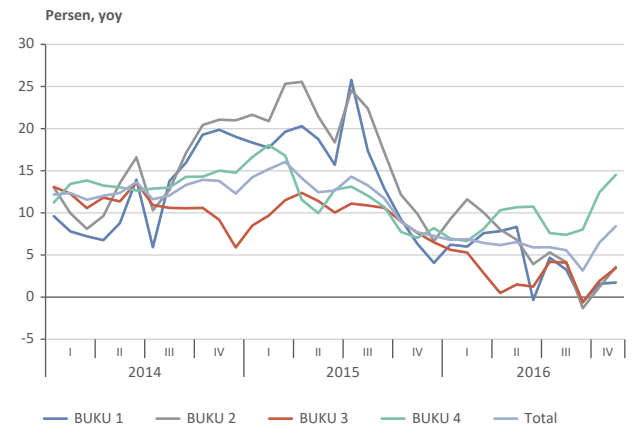

Sumber: Bank Indonesia

struktur maturitas liabilitas bank. Namun demikian, pangsa penerbitan SSB terhadap total pendanaan perbankan masih relatif kecil. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam penghimpunan DPK ke depan, penerbitan SSB akan menjadi sumber pendanaan alternatif perbankan.

Likuiditas perbankan pada 2016 cenderung tinggi seiring dengan meningkatnya ekspansi keuangan pemerintah sejak awal tahun, pelonggaran kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) yang dilakukan oleh Bank Indonesia, serta perlambatan pertumbuhan kredit. Peningkatan likuiditas perbankan tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat dari 19,4% pada 2015 menjadi 20,9% pada akhir 2016 (Grafik 8.19). Sementara rasio Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit* (AL/NCD) meningkat dari 93,4% pada 2015 menjadi 99,4% pada 2016. Rasio likuiditas tersebut jauh di atas *threshold* minimal likuiditas pada masing-masing indikator. Meskipun kondisi likuiditas cukup longgar, likuiditas perbankan sempat mengalami penurunan pada tiga periode tekanan. Pertama pada April 2016 akibat kebutuhan pembayaran pajak korporasi sehingga alat likuid berkurang sebesar Rp21 triliun. Kedua pada Juni 2016 akibat pola musiman penarikan uang kartal untuk perayaan hari besar keagamaan (Idul Fitri) sehingga alat likuid berkurang Rp25 triliun. Ketiga pada September 2016 akibat pembayaran tebusan amnesti pajak tahap I yang mencapai Rp45 triliun. Sebaliknya, pada akhir 2016, likuiditas perbankan mengalami peningkatan kembali sebesar Rp97 triliun yang berasal dari masuknya dana repatriasi amnesti pajak (Grafik 8.20).

Di tengah terbatasnya kinerja intermediasi dan meningkatnya risiko kredit, profitabilitas perbankan tetap terjaga karena *Net Interest Margin* (NIM) yang meningkat dan selalu dijaga pada level tinggi (Grafik 8.21). Meningkatnya NIM perbankan pada 2016 lebih disebabkan oleh *spread* antara suku bunga kredit dan simpanan yang meningkat (Grafik 8.22). Perbankan merespon pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga acuan dengan menurunkan suku bunga simpanan, khususnya deposito, lebih cepat dari penurunan suku bunga kredit. Namun demikian, peningkatan NIM tidak diikuti dengan efisiensi perbankan yang justru mengalami penurunan. Hal tersebut tercermin dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan yang sedikit meningkat dari 82,2% pada 2015 menjadi 82,8% pada 2016. Kenaikan BOPO disebabkan oleh peningkatan *overhead cost* (OHC) perbankan akibat meningkatnya biaya CKPN untuk menghapus buku kredit bermasalah (Grafik 8.23). Untuk mengimbangi peningkatan BOPO, perbankan melakukan upaya untuk meningkatkan *fee based income* sebagai alternatif pendapatan selain bunga sehingga profitabilitas tetap dapat terjaga.

Grafik 8.19. Perkembangan Rasio Likuiditas Perbankan

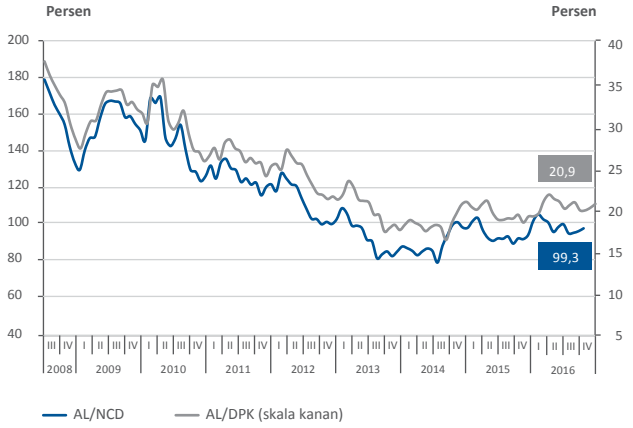

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 8.20. Perkembangan Alat Likuid Perbankan

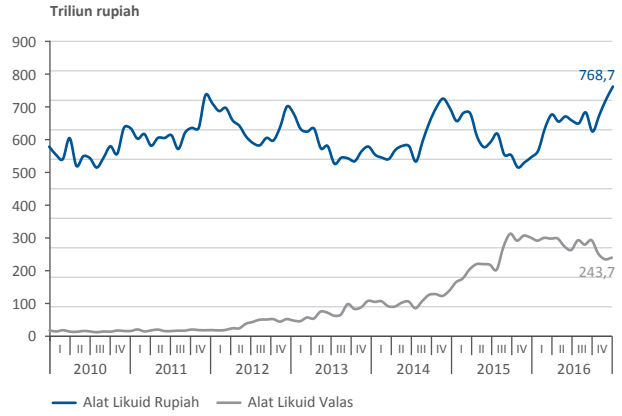

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 8.21. Perkembangan Efisiensi Perbankan

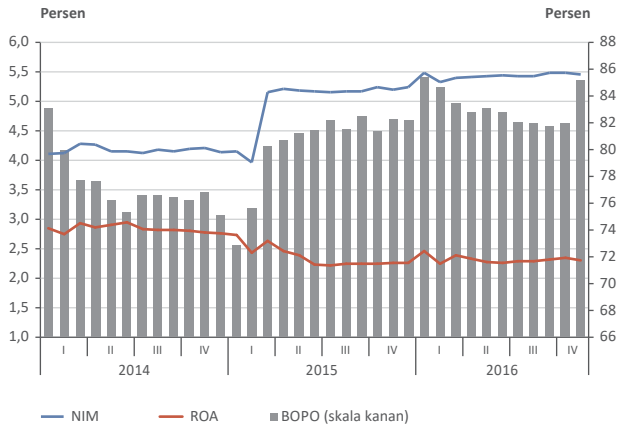

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 8.23. Struktur Pendapatan dan Beban Operasional

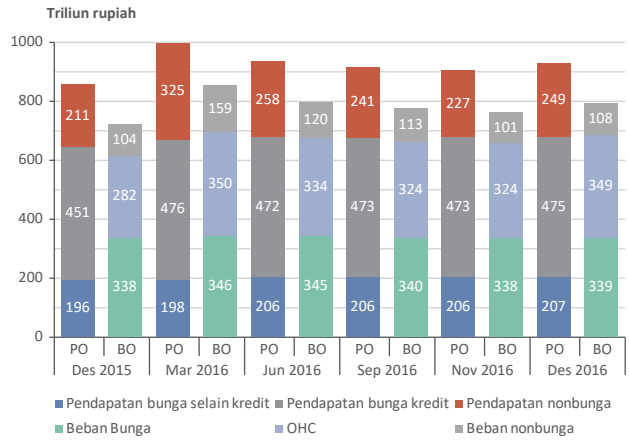

Sumber: Bank Indonesia

Ketahanan permodalan perbankan terus meningkat akibat menurunnya pertumbuhan kredit dan naiknya profitabilitas perbankan. Pada Desember 2016, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan mencapai 22,7% meningkat dari sebesar 21,2% pada 2015 (Grafik 8.24). Level CAR perbankan Indonesia berada jauh di atas rata-rata CAR perbankan di kawasan ASEAN dan *peer group* (Grafik 8.25). Tingginya permodalan perbankan Indonesia merupakan respons bank yang berhati-hati dalam menyalurkan kredit di tengah belum kuatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) menurun. Kuatnya permodalan juga mengindikasikan kesiapan perbankan dalam memenuhi berbagai ketentuan Basel III mengenai permodalan, khususnya *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Capital Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk bank yang tergolong sistemik. Selanjutnya secara struktur, permodalan perbankan juga relatif sehat karena didominasi oleh *tier 1* yang merupakan komponen permodalan yang paling stabil.

Grafik 8.22. *Spread* Suku Bunga Perbankan

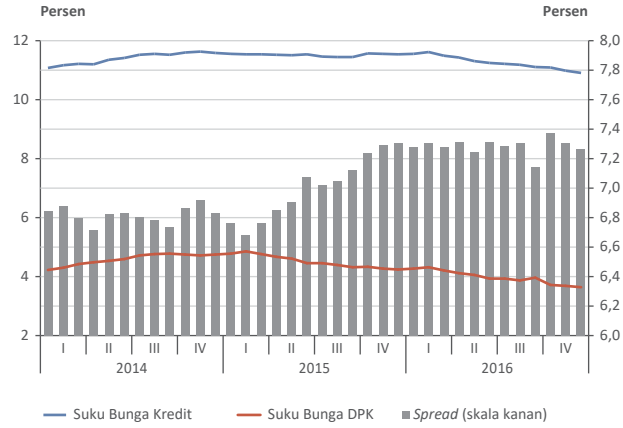

Sumber: Bank Indonesia

Perbankan dan Keuangan Syariah

Asesmen Kinerja Perbankan Syariah

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih belum kuat, perkembangan perbankan syariah pada 2016 masih mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2015. Dari sisi kelembagaan, terdapat penambahan jumlah Bank Umum Syariah (BUS). Pada September 2016, bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu Bank Aceh dikonversi menjadi BUS sehingga menjadi satu-satunya BUS yang memiliki status sebagai BUMD. Sebagai dampak dari konversi tersebut, aset dan jumlah BUS pada akhir 2016 meningkat. Jumlah BUS meningkat dari 12 bank menjadi

Grafik 8.24. Perkembangan CAR Perbankan Indonesia

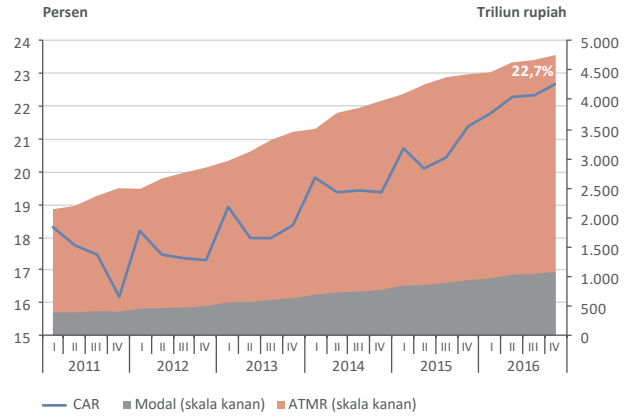

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 8.25. CAR Perbankan Indonesia dan *Peer Countries*

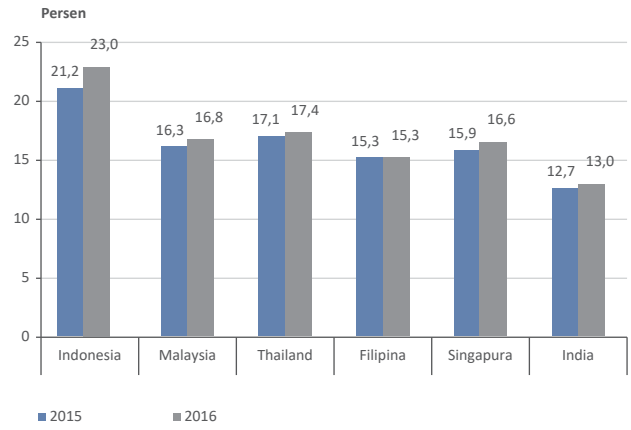

Sumber: Bank Indonesia, CEIC, diolah

Grafik 8.26. Perkembangan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan, Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah

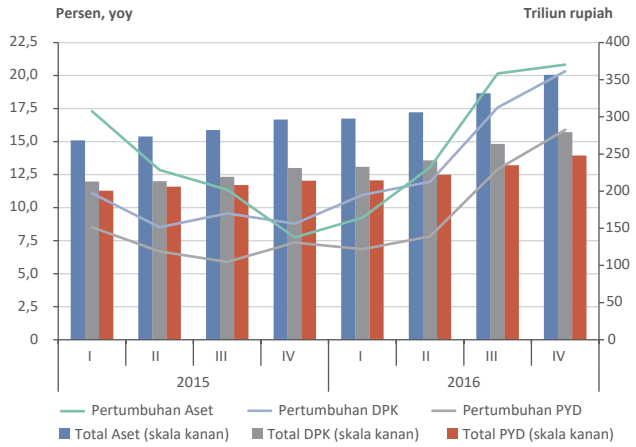

Sumber: Bank Indonesia, OJK

13 bank, sementara jumlah UUS menurun dari 22 menjadi 21. Namun penambahan jumlah BUS tidak diikuti dengan perkembangan jumlah kantor BUS, yang justru menurun dari akhir 2015 sebanyak 1.990 kantor menjadi 1.869 kantor. Penurunan jumlah kantor tersebut merupakan hasil proses konsolidasi internal dan penyesuaian model bisnis bank syariah. Sementara itu, jumlah kantor UUS meningkat dari 311 menjadi 332 kantor pada akhir 2016. Di tingkat global, posisi perbankan syariah Indonesia dari sisi aset berada di urutan ke-10 dengan pangsa sebesar 1,4% perbankan syariah global.[5] Ke depan, Indonesia sebagai salah satu anggota Organisasi Konferensi Islam (*Organization of Islamic Cooperation* /OIC) yang diproyeksikan memiliki pertumbuhan ekonomi jangka menengah lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata dunia sehingga potensi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga diharapkan meningkat cukup tinggi.

Total aset perbankan syariah (BUS ditambah UUS) di akhir 2016 sebesar Rp356,5 triliun, meningkat 20,3% atau lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan pada 2015 sebesar 8,8%. DPK juga mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan 2015, yaitu meningkat dari 7,8% menjadi 20,8% atau menjadi sebesar Rp279,3 triliun. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) juga mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yaitu meningkat dari 7,4% dari 2015 menjadi 15,9% sehingga posisi PYD pada akhir 2016 menjadi sebesar Rp248,0 triliun (Grafik 8.26). Pangsa perbankan syariah juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 4,8% menjadi 5,3% pada akhir 2016. Peningkatan kinerja perbankan syariah turut dipengaruhi oleh konversi Bank Aceh menjadi BUS. Aset BUS dan UUS masih mendominasi industri perbankan syariah yaitu mencapai ±98% aset industri perbankan syariah nasional, sementara sisanya merupakan aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang masih relatif kecil.

Tingkat profitabilitas perbankan syariah pada 2016 juga mengalami peningkatan. Indikator *Return on Asset* (ROA) meningkat dari 0,5% pada 2015 menjadi 0,6% pada 2016. Membaiknya tingkat profitabilitas tersebut juga diikuti dengan meningkatnya efisiensi yang ditunjukkan oleh penurunan BOPO dari 97,0% pada 2015 menjadi 96,2%. Kemampuan permodalan perbankan syariah juga meningkat, ditunjukkan oleh peningkatan rasio permodalan (CAR) dari 15,02% pada 2015 menjadi 15,6% pada akhir 2016.

Pembiayaan Perbankan dan Keuangan Syariah

Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah (BUS ditambah UUS) pada 2016 meningkat dibandingkan dengan 2015. Pembiayaan perbankan syariah pada 2016 tumbuh 15,9%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,4%. Kualitas pembiayaan perbankan syariah yang tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/NPF) juga relatif membaik menjadi sebesar 4,2% pada akhir 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,3% (Grafik 8.27).

Pembiayaan perekonomian menggunakan instrumen keuangan syariah juga dilakukan melalui instrumen nonperbankan, antara lain melalui penerbitan obligasi syariah (sukuk) korporasi. Pada 2016 terdapat penerbitan sukuk korporasi sebanyak 14 seri dengan total nilai sebesar Rp3,8 triliun. Dengan penerbitan tersebut, jumlah *outstanding* sukuk korporasi menjadi 53 seri, dengan nilai

5 Islamic Financial Services Industry (IFSI) Stability Report 2016, Islamic Financial Services Board (IFSB)

Grafik 8.27. Perkembangan PYD dan NPF Perbankan Syariah

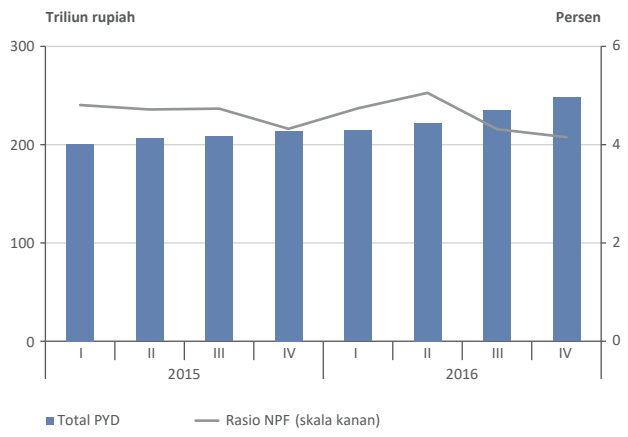

Sumber: Bank Indonesia, OJK

sebesar Rp11,9 triliun. Jumlah dan nilai sukuk korporasi pada 2016 mengalami penyesuaian dibandingkan 2015 dengan jumlah penerbitan sukuk korporasi sebanyak 16 seri dengan total nilai sebesar Rp3,3 triliun sehingga jumlah sukuk korporasi mencapai 47 seri sukuk dengan nilai *outstanding* sebesar Rp9,9 triliun.

Selain melalui pembiayaan yang bersifat komersial, sistem keuangan syariah juga menyediakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial melalui instrumen zakat dan wakaf. Zakat wajib dibayarkan oleh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan kajian Bank Indonesia, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp217 triliun per tahun atau setara dengan 3,4% dari PDB Indonesia pada 2010. Potensi tersebut terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu potensi zakat penghasilan individu (rumah tangga) sebesar Rp83 triliun, potensi zakat perusahaan baik BUMN maupun swasta sebesar Rp117 triliun, dan potensi zakat tabungan sebesar Rp17 triliun. Penelitian lain dari *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) menyatakan bahwa potensi zakat Indonesia adalah sekitar Rp20 triliun per tahun, sementara ADB memprediksi mencapai Rp100 triliun per tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dana zakat tidak boleh ditahan sehingga dalam waktu maksimal 1 tahun harus sudah didayagunakan. Pendayagunaan dana zakat dapat bersifat konsumtif dan produktif. Masyarakat yang berhak menerima zakat terbatas pada 8 kelompok, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqob*, *gharimin*, *fii sabiilillah*, dan *ibnu sabil.*

Dari sisi penghimpunan, jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZ resmi di seluruh Indonesia belum mencapai angka yang optimal sesuai potensinya. Berdasarkan data BAZNAS, jumlah realisasi dana zakat yang terkumpul sebesar Rp3,65 triliun.[6] Salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi penghimpunan zakat adalah belum optimalnya sistem pelaporan zakat. Masyarakat belum semuanya membayar zakat melalui BAZNAS atau LAZ. Sebagian masyarakat menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima dan tidak dilaporkan, sehingga tidak tersedia data jumlah zakat yang disalurkan oleh individu secara akurat.

Selain melalui instrumen zakat, wakaf dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan. Berbeda dengan zakat, wakaf bersifat sukarela dan tidak ada pembatasan kelompok masyarakat yang berhak memanfaatkan aset wakaf. Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, aset yang diwakafkan dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, termasuk uang. Aset wakaf dapat diperuntukkan bagi: (i) sarana dan kegiatan ibadah; (ii) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (iii) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; (iv) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau (v) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Mengingat aset yang diwakafkan harus tetap nilai pokoknya dan tidak boleh berkurang, maka wakaf khususnya wakaf uang memungkinkan untuk terus terakumulasi dan dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan yang tersedia dalam jangka panjang.

Perkembangan UMKM

Perkembangan Kredit UMKM

Penyaluran kredit UMKM pada 2016 menunjukan peningkatan. Posisi kredit UMKM mencapai Rp857 triliun atau 19,4% dari total kredit perbankan nasional. Kredit UMKM pada 2016 tumbuh sebesar 8,4% atau tumbuh sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan pada 2015 sebesar 8,0% (Grafik 8.28). Berdasarkan jumlah rekening kreditnya, sekitar 23,1% UMKM pada 2016 telah memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan, meningkat dibandingkan dengan 2015 sebesar 20,6%. Peningkatan kredit UMKM tersebut ditengarai didorong oleh penurunan suku bunga kredit, dan peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Modal Kerja tumbuh sebesar 9,2%, meningkat dari 7,6% pada akhir

6 Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS 2016 dalam *Outlook* Zakat Indonesia 2017, PUSKAS BAZNAS

Grafik 8.28. Perkembangan Kredit UMKM

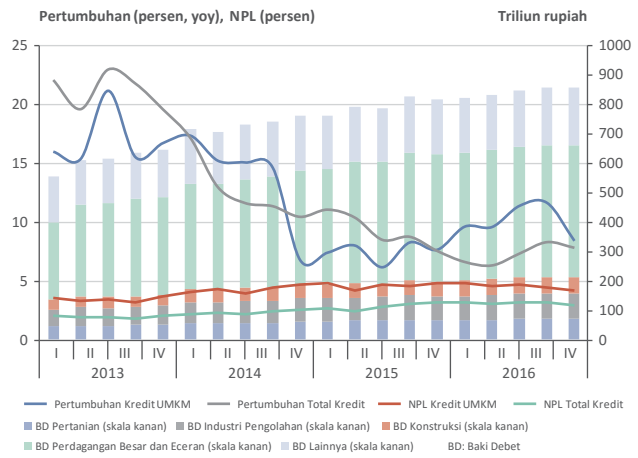

Sumber: Bank Indonesia

2015. Sementara Kredit Investasi tumbuh 6,4% pada 2016, melambat dari pertumbuhan 2015 yang sebesar 9,2%.

Dari lima sektor dengan pangsa kredit UMKM terbesar, sektor perdagangan, real estate, dan pertanian merupakan sektor dengan pertumbuhan kredit UMKM tertinggi. Ketiga sektor tersebut memiliki pertumbuhan tertinggi sepanjang 2016, dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 11,9%, 11,5% dan 11,0% (Grafik 8.29). Sementara beberapa sektor masih mengalami penurunan pada 2016, diantaranya adalah sektor pertambangan dan penggalian, jasa kemasyarakatan, dan perantara keuangan yang masing-masing tumbuh negatif sebesar 4,0%, 2,0%, dan 4,7%, meskipun telah membaik dari 2015 yang tumbuh negatif sebesar 19,2%, 6,2%, dan 10,5%. Berdasarkan klasifikasi usaha, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi sepanjang 2016 adalah kredit yang disalurkan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tumbuh masing-masing sebesar 10,9% dan 11,1%. Sementara itu, kredit Usaha Menengah hanya tumbuh 5,7%. Tingginya pertumbuhan kredit Usaha Mikro dan Usaha Kecil sejalan dengan penyaluran KUR pada 2016 yang cukup tinggi.

Secara spasial, sebaran penyaluran kredit UMKM masih belum merata dan terfokus pada wilayah-wilayah pusat aktivitas ekonomi. Hal tersebut tercermin dari realisasi kredit UMKM di pulau Jawa dan Sumatera yang mendominasi dengan pangsa sebesar 58,0% dan 19,7%. Sementara pangsa untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua masih relatif rendah, yakni masing-masing sebesar 7,2%, 7,0%, 5,7% dan 2,3%. Kondisi ini antara lain karena ketersediaan infrastruktur perbankan mayoritas berada di wilayah pulau Jawa dan Sumatera. Secara sektoral, mayoritas kredit UMKM diserap oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan pangsa 52,7% dan ditujukan pada kelompok Usaha Menengah. Dominasi sektor Perdagangan tersebut dipengaruhi oleh potensi risiko yang lebih terukur, sementara penyaluran kredit UMKM kepada sektor lainnya masih rendah.

Tingkat risiko kredit UMKM pada 2016 cenderung membaik dibandingkan 2015, terutama sejak pertengahan 2016. NPL kredit UMKM menurun dari 4,2% pada 2015 menjadi 4,15% pada akhir 2016. Tingkat risiko kredit UMKM tersebut masih relatif tinggi dibandingkan dengan periode 3 tahun terakhir (Grafik 8.30), yang dipengaruhi oleh masih belum kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Namun demikian, upaya perbankan untuk memperbaiki kolektibilitas nasabah UMKM, dapat menekan risiko yang ditandai dengan penurunan rasio NPL *gross* kredit UMKM pada akhir 2016. Upaya lain yang dilakukan oleh perbankan untuk menekan risiko adalah dengan meningkatkan penyaluran kredit UMKM secara selektif.

Grafik 8.29. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral

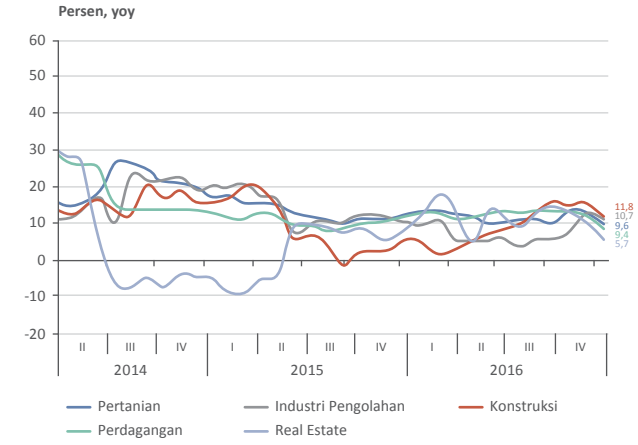

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 8.30. NPL *Gross* Kredit UMKM

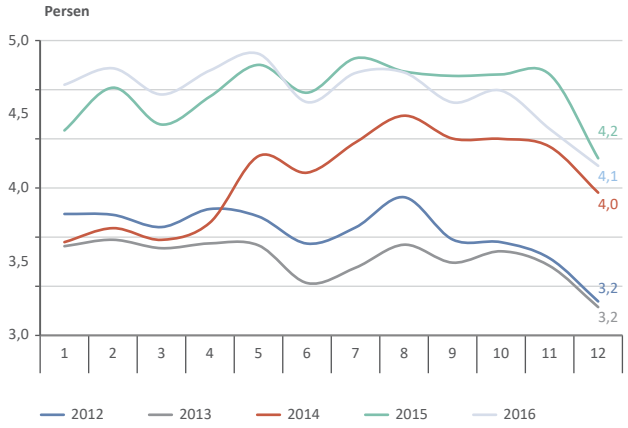

Sumber: Bank Indonesia

Dari lima sektor ekonomi dengan pangsa penyaluran kredit UMKM terbesar, perbaikan kualitas kredit terjadi pada sektor perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Rasio NPL ketiga sektor tersebut membaik menjadi 3,9%, 4,2%, dan 6,7%, meskipun masih memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi (Grafik 8.31). Berdasarkan klasifikasi usaha, membaiknya rasio NPL pada 2016, terjadi pada kredit Usaha Mikro dan Usaha Kecil menjadi 2,1% dan 4,3%. Sedangkan rasio NPL kredit Usaha Menengah tercatat memburuk menjadi 5,1%. Membaiknya NPL di kredit Usaha Mikro dan Usaha Kecil, ditengarai akibat rasio NPL KUR yang tercatat relatif kecil yaitu sebesar 0,4%.

Terkait dengan kewajiban pencapaian rasio kredit UMKM bank umum pada akhir 2016 minimal sebesar 10%, jumlah bank yang telah memenuhi ketentuan hanya sebanyak 56 bank dengan kualitas terjaga.[7] Sejumlah bank masih menghadapi kendala pemenuhan rasio kredit UMKM, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kurangnya kapabilitas bank dalam penyaluran kredit UMKM menjadi kendala utama. Keterbatasan SDM dan banyaknya bank yang terbiasa dalam penyaluran kredit konsumtif juga menjadi faktor penghambat dalam penyaluran kredit produktif kepada UMKM. Di samping itu, jaringan kantor dan infrastruktur yang kurang mendukung, serta meningkatnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) membuat bank nonpenyalur KUR semakin kesulitan dalam mendapatkan debitur baru yang potensial. Sementara dari sisi eksternal, perlambatan kinerja UMKM yang terdampak oleh kondisi ekonomi domestik menjadi kendala utama.

Grafik 8.31. NPL *Gross* Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

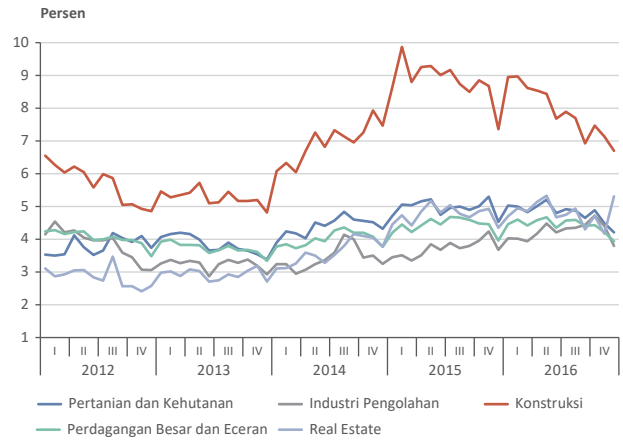

Sumber: Bank Indonesia

7 PBI Nomor 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah oleh PBI No.17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Untuk meningkatkan peran UMKM dan mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah terus meningkatkan penyaluran KUR. Pemerintah membuat terobosan pada 2016 dengan menurunkan suku bunga KUR menjadi 9% dari sebelumnya 12%, dan menaikan target penyaluran menjadi Rp100 triliun dari sebelumnya hanya Rp30 triliun. Disamping itu, Pemerintah juga memperluas cakupan lembaga penyalur KUR menjadi 37 lembaga dari sebelumnya 4 bank penyalur, dan penerima KUR yang mencakup perorangan dan badan usaha dari sebelumnya usaha produktif saja.[8] Pemerintah juga berupaya mengakselerasi penyaluran KUR melalui Paket Kebijakan Ekonomi XI yang memberikan stimulus bagi ekspor UMKM. Stimulus tersebut salah satunya berupa penyediaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE).

Realisasi penyaluran KUR pada 2016 mencapai Rp94,4 triliun atau 94,4% dari target. Kualitas penyaluran KUR sangat baik dengan rasio NPL yang rendah sebesar 0,4%. Namun distribusi penyaluran KUR masih terkonsentrasi pada beberapa wilayah dan sektor tertentu. Secara sektoral, penyaluran KUR terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan pertanian (Grafik 8.32). Berdasarkan sebaran wilayahnya, provinsi dengan penyerapan KUR terbesar adalah Jawa Tengah (Rp16,9 triliun), Jawa Timur (Rp14,6 triliun), dan Jawa Barat (Rp11,9 triliun), sedangkan untuk luar Jawa, penyaluran KUR tertinggi di Sulawesi Selatan (Rp5,1 triliun) dan Sumatera Utara (Rp4,3 triliun). Dominasi Provinsi Jawa Tengah dalam penyaluran KUR sejalan dengan tingginya

Grafik 8.32. Realisasi KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi

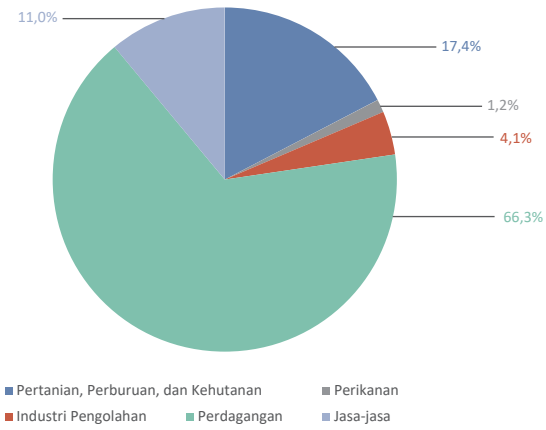

Sumber: Kemenko Bidang Perekonomian, 2016

8 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.9 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Gambar 8.1. Realisasi KUR Berdasarkan Wilayah

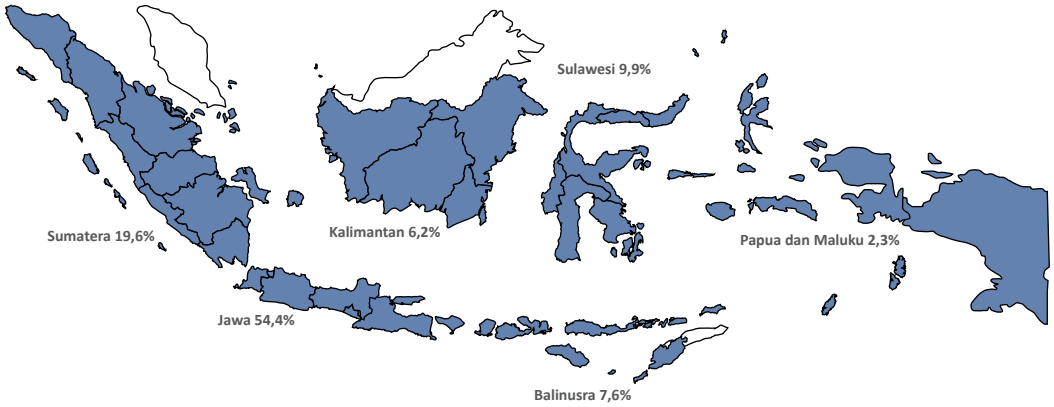

Sumber: Kemenko Bidang Perekonomian, 2016

indeks kebijakan dan infrastruktur (1,61) yang cukup kondusif untuk mendukung peningkatan daya saing UMKM sehingga mendorong peningkatan akses pembiayaan di wilayahnya (Gambar 8.1).[9]

8.4. KINERJA DAN RISIKO IKNB

Kinerja Perusahaan Pembiayaan (PP) mulai membaik seiring dengan meningkatnya pembiayaan yang mendorong perbaikan profitabilitas. Indikator *Return on Assets* (ROA) meningkat dari 3,3% menjadi 3,9% pada Desember 2016, sementara *Return on Equity* (ROE) meningkat dari 11,5% menjadi 12,0%. Namun peningkatan pembiayaan tersebut juga diiringi dengan naiknya risiko (Grafik 8.33). Rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/* NPF) PP meningkat menjadi 3,3% pada Desember 2016. Pembiayaan PP tumbuh positif sebesar 6.7% pada Desember 2016 disumbang oleh pembiayaan rupiah, sementara pembiayaan valas masih menurun (Grafik 8.34). Peningkatan pembiayaan PP juga didukung oleh perbaikan efisiensi tercermin dari BOPO yang menurun dari 85.4% pada 2015 menjadi 82,8% pada 2016 utamanya disumbang oleh penurunan biaya premi *swap*. Di sisi pendanaan, PP terus mengurangi Pinjaman Luar Negeri (PLN) sejalan dengan menurunnya pembiayaan valas yang disalurkannya. Hal ini turut berkontribusi dalam menurunkan biaya *hedging* PP berupa premi *swap*. Sementara pinjaman dari dalam negeri mengalami peningkatan baik melalui kredit perbankan, penerbitan SSB terutama obligasi maupun pinjaman subordinasi (Grafik 8.35).

Grafik 8.33. Kinerja Perusahaan Pembiayaan

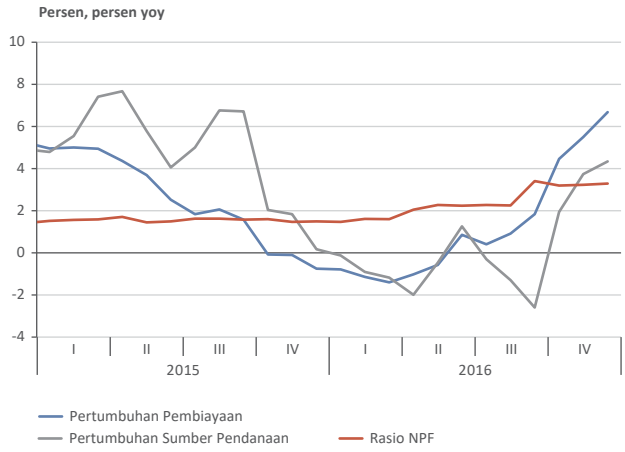

Sumber: OJK

Grafik 8.34. Pembiayaan PP Menurut Valuta

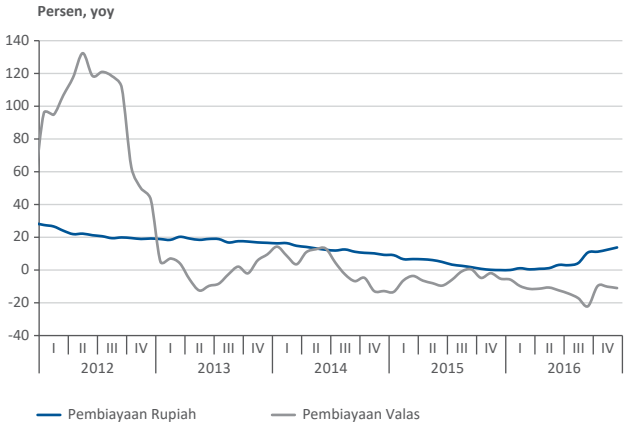

Sumber: OJK

9 Laporan Analisis Daya Saing UMKM, Bappenas, 2014.

Grafik 8.35. Pendanaan Perusahaan Pembiayaan

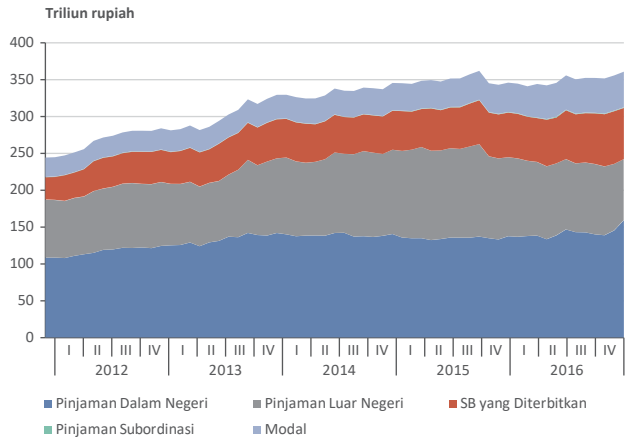

Sumber: OJK

Tabel 8.2. Perkembangan Pembiayaan Sektor Keuangan

Triliun rupiah

Total Pembiayaan Pasar Keuangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IPO + *Rights Issue*	62,8	21,0	57,5	47,6	53,6	↑ 79,2
Emiten Sektor Keuangan	20,4	3,1	16,6	12,8	3,7	↑ 16,1
Obligasi	51,3	77,7	50,5	47,5	55,3	↑ 112,0
Emiten Sektor Keuangan	41,4	53,7	30,8	30,3	35,1	↑ 83,2
MTN + NCD	5,9	10,1	4,9	14,9	20,1	↑ 39,0
Emiten Sektor Keuangan	1,9	2,1	3,2	9,2	14,2	↑ 25,3
Total	120,0	108,9	112,9	110,1	129,0	↑ 230,2
Total Emiten Sektor Keuangan	63,7	58,9	50,6	52,2	52,9	↑ 124,6

Sumber: OJK, diolah

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang terbatas dan melemahnya kegiatan usaha, kinerja Asuransi pada 2016 mengalami peningkatan baik dari sisi pertumbuhan aset, investasi, rasio premi maupun tingkat penetrasi. Total Aset meningkat 16,1% menjadi Rp932,1 triliun dengan komposisi aset terbesar adalah asuransi jiwa (41%), diikuti asuransi sosial (31%), asuransi umum dan reasuransi (15%), serta asuransi wajib (13%) pada akhir 2016. Naiknya porsi asuransi jiwa sejalan dengan meningkatnya jumlah agen asuransi yang diperkirakan mencapai 535 ribu orang pada akhir 2016. Kenaikan jumlah agen memegang peranan penting bagi pertumbuhan asuransi jiwa karena karakteristik penjualan asuransi melalui agen didasari oleh hubungan kedekatan antara agen dengan klien (*emotional selling*). Selanjutnya, investasi asuransi mengalami peningkatan 21,7% dari Rp641 triliun pada 2015 menjadi Rp780 triliun pada akhir 2016 terindikasi dari naiknya pendapatan premi. Rasio premi terhadap klaim bruto sebesar 158% per Desember 2016, meningkat 9,1% dari tahun sebelumnya didorong oleh peningkatan premi bruto yang lebih besar dari peningkatan klaim bruto. Sementara penetrasi asuransi pada triwulan III 2016 sebesar 2,6% meningkat dari triwulan II 2015 yang sebesar 2,2%.

8.5. PEMBIAYAAN, KINERJA, DAN RISIKO PASAR KEUANGAN

Pembiayaan ekonomi dari pasar keuangan pada 2016 tercatat meningkat di tengah belum kuatnya pertumbuhan kredit perbankan. Tren pembiayaan pasar keuangan tercatat mengalami peningkatan sejak 2015. Pada 2016, total pembiayaan melalui penerbitan saham perdana (*Initial public Offering*/IPO), *right issue*, obligasi korporasi, *medium term notes (MTN), negotiable certificate of deposit (NCD), promissory notes*, dan instrumen keuangan lainnya mencapai Rp230,2 triliun, lebih tinggi dari 2015 sebesar Rp129,0 triliun (Tabel 8.2). Peningkatan terbesar berasal penerbitan obligasi korporasi. Meningkatnya pembiayaan pasar keuangan menjadi alternatif bagi korporasi di tengah naiknya *lending standard* bank dan biaya yang lebih murah dibandingkan kredit. Dari sisi masyarakat sebagai pemilik dana, penerbitan SSB oleh korporasi menjadi alternatif investasi yang menarik di tengah turunnya suku bunga deposito.

Pembiayaan pasar keuangan pada 2016 terutama berasal dari penerbitan saham dan obligasi korporasi. Pembiayaan pasar keuangan (*gross*) pada 2016 terutama berasal dari penerbitan obligasi korporasi sebesar Rp112,0 triliun dan penerbitan saham melalui IPO dan *right issue* sebesar Rp79,2 triliun (Grafik 8.36). Secara neto, penerbitan obligasi korporasi pada 2016 mencapai Rp64,1 triliun, setelah

Grafik 8.36. Penerbitan Obligasi Neto dan Jatuh Tempo

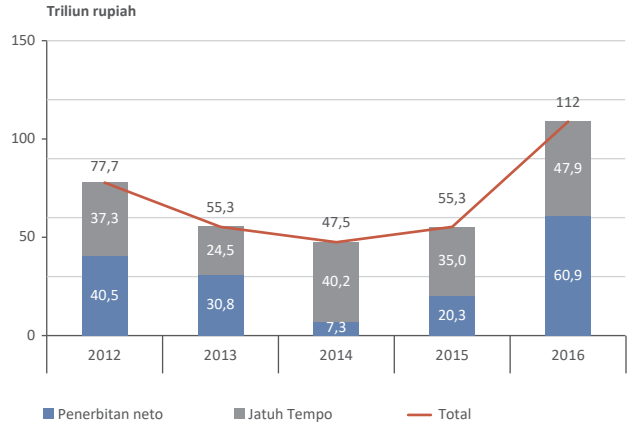

Sumber: OJK, Bloomberg, diolah

Grafik 8.37. Suku Bunga Bank dan *Yield* Obligasi

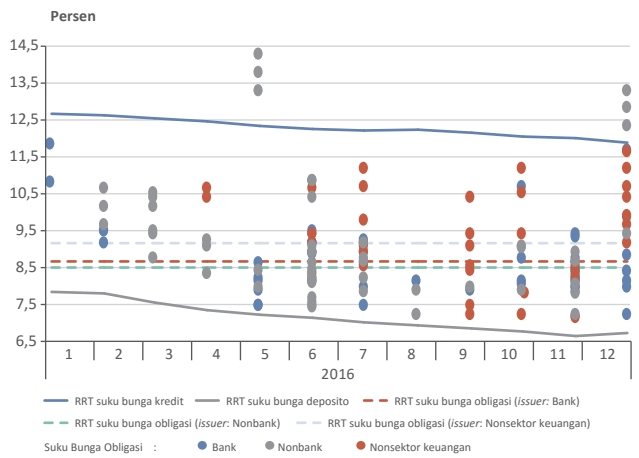

Sumber : Bank Indonesia, Bloomberg, diolah

dikurangi kebutuhan *refinancing* sebesar Rp47,9 triliun. Jumlah ini jauh melampaui jumlah penerbitan neto pada 2015 sebesar Rp20,3 triliun.

Faktor penurunan suku bunga turut mendorong naiknya penerbitan obligasi korporasi sepanjang 2016. Rata-rata tertimbang suku bunga obligasi korporasi sepanjang 2016 dengan kategori *issuer* korporasi nonbank tercatat sebesar 8,53% dan korporasi nonsektor keuangan sebesar 9,22% (Grafik 8.37). Suku bunga tersebut jauh di bawah rata-rata suku bunga kredit pada 2016. Biaya yang lebih murah dari kredit bank menjadi alasan utama meningkatnya pemanfaatan pembiayaan dari pasar keuangan, terutama penerbitan obligasi korporasi di tengah meningkatnya *lending standard* bank. Dari sisi pemilik dana, imbal hasil yang lebih tinggi dari suku bunga deposito pada 2016 yang mendorong meningkatnya permintaan terhadap instrumen pasar keuangan.

Pemanfaatan pembiayaan melalui pasar keuangan masih didominasi oleh korporasi sektor keuangan. Berdasarkan jenis instrumen, pembiayaan melalui IPO dan *rights issue* didominasi oleh perusahaan di sektor nonkeuangan dengan porsi masing-masing sebesar 89% dan 78%. Sementara penerbitan obligasi dan MTN/NCD didominasi perusahaan di sektor keuangan, khususnya perbankan masing-masing sebesar 45% dan 72% (Grafik 8.38). Penggunaan pembiayaan melalui pasar keuangan sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsolidasi. Proses konsolidasi bank tercermin dari kredit yang masih belum kuat meskipun sumber dana yang diperoleh dari obligasi dan NCD cukup besar. Sementara proses konsolidasi dari sektor nonkeuangan tercermin pada rencana penggunaan dana untuk ekspansi yang hanya 9,9%. Rencana penggunaan dana terbesar ditujukan untuk modal kerja yaitu sebesar 53,6%.

Meski meningkat signifikan, pembiayaan melalui pasar keuangan belum cukup mengimbangi perlambatan penyaluran kredit sehingga secara keseluruhan pembiayaan dalam negeri masih melambat. Secara neto, total pertumbuhan pembiayaan dalam negeri melambat menjadi 10,5% (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan 2015 sebesar 10, 9% (Tabel 8.3). Perlambatan ini disebabkan oleh pertumbuhan kredit rupiah yang tercatat sebesar 9,2%, lebih rendah dari pertumbuhan 2015 sebesar 12,0%. Secara neto, pembiayaan melalui pasar keuangan pada 2016 tumbuh Rp166,4 triliun atau 14,5%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 2015 sebesar 7,8% (Tabel 8.3). Dengan pertumbuhan tersebut, porsi pembiayaan nonbank meningkat signifikan dari 18,0% menjadi 31,2% dari total pembiayaan neto dalam negeri (Grafik 8.39).

Grafik 8.38. Pembiayaan Pasar Keuangan 2016

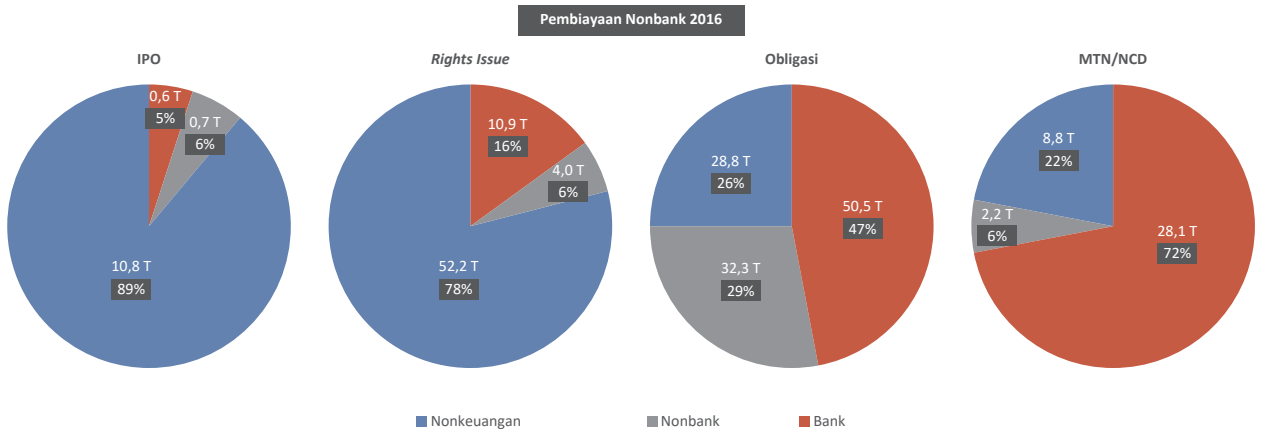

Sumber: Bloomberg, diolah

Tabel 8.3. Pangsa Pembiayaan Neto Dalam Negeri

Periode	Obligasi (Neto)	Saham	MTN/ NCD (Neto)	Total Non Kredit Rupiah	Kredit Rp	Total Pembiayaan Dalam Negeri
Pembiayaan Neto (Triliun rupiah)						
2014	7,3	47,6	11,3	66,2	337,5	403,7
2015	20,3	53,6	8,9	82,8	365,4	448,2
2016	60,9	80,2	25,3	166,4	313,3	479,7
Pertumbuhan Pembiayaan Neto (Persen, yoy)						
2014	3,4	6,2	106,5	6,7	12,4	10,9
2015	9,1	6,6	40,1	7,8	12,0	10,9
2016	24,4	9,3	81,7	14,5	9,2	10,5

Sumber: Bank Indonesia, OJK, diolah

Grafik 8.40. *Yield* SBN dan Net Jual/Beli Asing

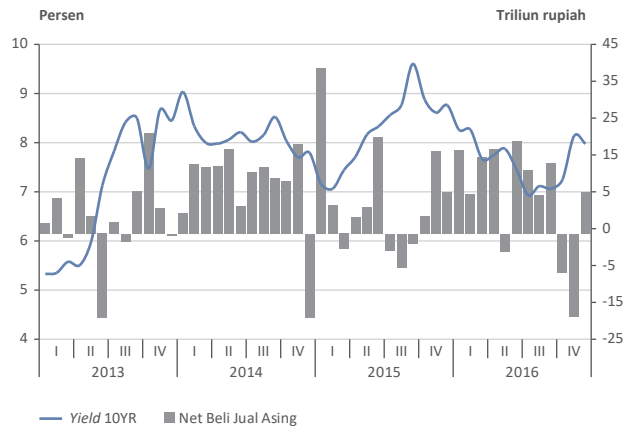

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg

Kinerja Pasar Obligasi

Risiko di pasar obligasi menunjukkan penurunan pada 2016. Hal ini ditunjukkan oleh imbal hasil SBN dengan tenor jangka 10 tahun yang mengalami penurunan 77 bps dari 8,75% pada Desember 2015 menjadi 7,97% pada Desember 2016 (Grafik 8.40). Menurunnya imbal hasil SBN juga terjadi pada tenor lainnya yaitu tenor jangka pendek, menengah dan panjang yang masing-masing turun sebesar 85 bps, 71 bps dan 71 bps menjadi 7,69%, 8,17% dan 8,38%. Secara keseluruhan, rata-rata imbal hasil SBN untuk seluruh tenor mengalami penurunan 75 bps dari 8,82% menjadi 8,07% pada akhir 2016.

Kinerja pasar SBN meningkat tercermin dari peningkatan aktivitas investor nonresiden yang membeli SBN. Selama 2016, investor nonresiden tercatat melakukan net beli sebesar Rp107,3 triliun, naik dari Rp96,1 triliun pada akhir 2015. Pada semester I 2016, investor nonresiden mencatat net beli secara signifikan mencapai Rp85,4 triliun (Grafik 8.41). Namun pada semester II 2016, aktivitas net beli oleh investor nonresiden mengalami penurunan. Hal ini dipicu oleh sentimen negatif terkait pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada di bawah ekspektasi pasar dan *concern* kenaikan FFR yang meningkat. Peran investor nonresiden masih cukup besar di pasar SBN. Pangsa kepemilikan investor di pasar SBN 2016 relatif stabil di kisaran 37%. Secara rata-rata, pangsa kepemilikan investor nonresiden di pasar SBN pada 2016 tercatat sebesar 37,6%, sedikit meningkat dibandingkan dengan 2015 yang sebesar 37,4% (Grafik 8.41). Kontribusi investor nonresiden yang cukup besar berimplikasi pada kuatnya pengaruh faktor eksternal dalam memengaruhi dinamika di pasar SBN.

Grafik 8.39. Pangsa Pembiayaan Neto Dalam Negeri

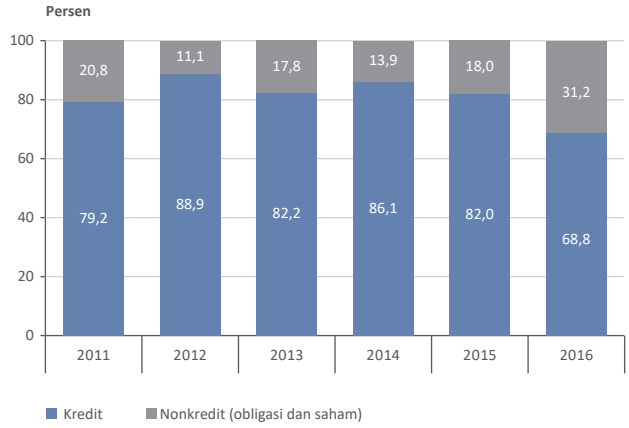

Sumber: Bank Indonesia, OJK, diolah

Grafik 8.41. Kepemilikan SBN Asing

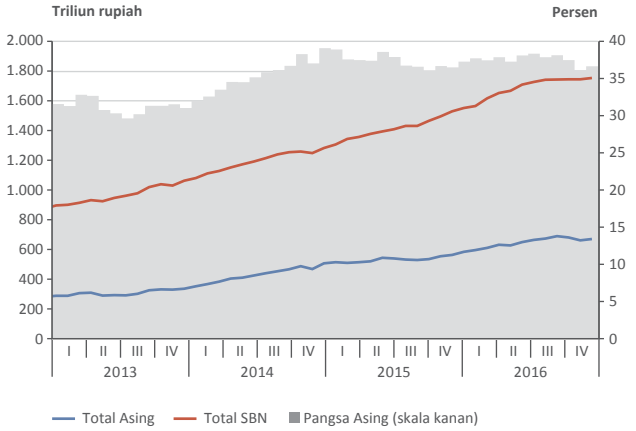

Sumber : Bloomberg, diolah

Grafik 8.42. IHSG dan Indeks Bursa Global

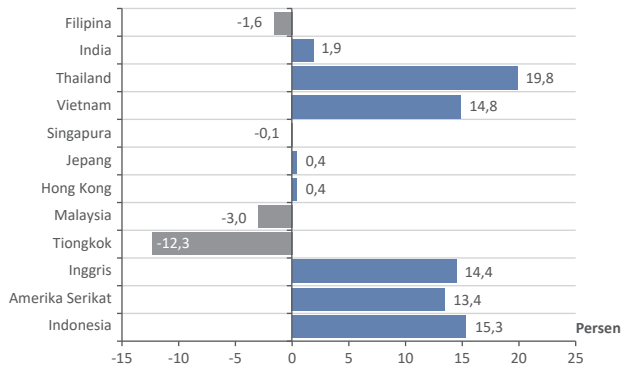

Sumber: Bloomberg

Grafik 8.43. Indeks Sektoral

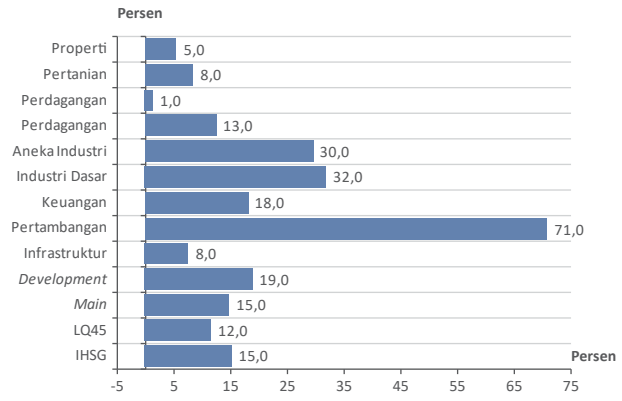

Sumber: BEI

Kinerja Pasar Saham

Kinerja pasar saham pada 2016 juga relatif meningkat terutama didorong oleh sentimen positif baik yang berasal dari global maupun domestik. Peningkatan kinerja tersebut ditunjukkan oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang meningkat menjadi 5.296,7 atau naik 704 poin (15,3%) dibandingkan dengan posisi akhir 2015. Dari sisi global, peningkatan IHSG secara umum dipengaruhi oleh faktor menurunnya ekspektasi kenaikan FFR pascarilis data perekonomian AS yang mengindikasikan pemulihan ekonomi belum solid. Di samping itu, pergerakan harga minyak dunia yang relatif membaik pada akhir triwulan III 2016 juga memberikan sentimen positif bagi pasar domestik. Sementara, dari sisi domestik, penguatan IHSG dipengaruhi oleh sentimen positif terhadap kondisi makroekonomi Indonesia yang resilien sepanjang 2016, tercermin terutama dari pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari ekspektasi pasar dan sentimen positif dari keberhasilan program amnesti pajak. Pasar saham domestik menunjukkan peningkatan kinerja di tengah bursa saham global yang bergerak *mixed* pada 2016. Kinerja IHSG tumbuh 15,3% tercatat tertinggi diantara bursa global maupun kawasan setelah Thailand (19,8%) (Grafik 8.42). Sementara indeks bursa saham di kawasan regional mengalami penurunan, seperti Malaysia (-3,0%) dan Filipina (-1,6%).

Perbaikan kinerja IHSG terjadi pada seluruh indeks sektoral. Sebagian besar indeks sektoral tercatat menguat hingga akhir tahun 2016, terutama sektor pertambangan (70,7%) dan industri dasar (32,0%). Menguatnya kinerja saham di sektor pertambangan dipengaruhi oleh membaiknya harga komoditas sejak akhir triwulan III 2016. Menguatnya harga batubara pada semester II 2016 merupakan salah satu faktor utama pendorong kenaikan harga saham sektor pertambangan (Grafik 8.43).

Risiko di pasar saham juga menunjukkan penurunan pada 2016 yang dicerminkan oleh naiknya IHSG dan turunnya volatilitas IHSG. Pada tahun 2016, volatilitas IHSG tercatat sebesar 291,1 atau turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 407,7. Penurunan volatilitas tersebut tidaklah terlepas dari tren penguatan IHSG dipengaruhi oleh baik dari sentimen positif domestik atas kondisi makroekonomi Indonesia yang resilien sepanjang 2016 maupun sentimen positif global terkait menurunnya ekspektasi kenaikan FFR dan harga minyak dunia yang relatif membaik.

BAB 9

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah selama 2016 berjalan dengan baik dan lancar. Sistem pembayaran nasional yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan industri dapat memproses seluruh transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah. Efisiensi transaksi keuangan juga semakin membaik seiring dengan meningkatnya pemanfaatan instrumen sistem pembayaran nontunai, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial Pemerintah. Sementara pengelolaan uang rupiah yang dilakukan Bank Indonesia mampu memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat dan dunia usaha dengan jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar. Dengan kinerja yang baik tersebut, sistem pembayaran nasional dan pengelolaan uang rupiah dapat secara optimal mendukung kegiatan perekonomian dan kestabilan sistem keuangan.

Keterangan gambar:
Bank Indonesia menerbitkan dan mengedarkan 11 pecahan uang rupiah Tahun Emisi 2016 sebagai pelaksanaan amanat UU Mata Uang. Uang Rupiah baru tersebut menampilkan gambar pahlawan nasional dan gambar tari nusantara serta pemandangan alam dari berbagai daerah di Indonesia.

Sistem pembayaran nasional pada 2016 menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung kegiatan perekonomian dan kestabilan sistem keuangan. Kinerja sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia tercermin pada keandalan dan ketersediaan sistem *(availability)* serta pelaksanaan *contingency plan* yang efektif sehingga mampu memproses seluruh transaksi keuangan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah. Seiring dengan hal tersebut, sistem pembayaran yang dilakukan oleh industri juga berjalan lancar. Kinerja pengelolaan uang rupiah juga baik, tercermin dari terpenuhinya kebutuhan uang tunai masyarakat dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kinerja yang baik tersebut tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia dalam melakukan penguatan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah pada 2016.

Sejalan dengan aktivitas perekonomian yang belum cukup kuat, transaksi sistem pembayaran khususnya nilai besar mengalami perlambatan pada 2016. Transaksi sistem pembayaran nilai besar melalui sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) mengalami penurunan 0,8% pada 2016. Sebaliknya transaksi sistem pembayaran ritel mengalami peningkatan cukup signifikan. Nilai transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meningkat 30% pada 2016. Sementara nilai transaksi dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) meningkat 14,5% dan transaksi menggunakan uang elektronik meningkat 34,3% jika dibandingkan dengan 2015. Peningkatan transaksi pada SKNBI antara lain disebabkan oleh dampak kenaikan batas minimal transaksi melalui BI-RTGS sehingga beralih menggunakan SKNBI. Sementara peningkatan penggunaan APMK dan uang elektronik merupakan hasil dari semakin gencarnya sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan adanya inisiatif untuk mendorong interoperabilitas dan interkoneksi antar penyelenggara sistem pembayaran yang memberikan kemudahan dan mendorong minat masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran ritel nontunai.

Pengelolaan uang rupiah juga menunjukkan peningkatan kinerja pada 2016. Peningkatan kinerja tersebut tercemin dari perkembangan sejumlah indikator, seperti uang kartal yang diedarkan (UYD) meningkat 4,4%, arus uang kartal keluar dari Bank Indonesia *(outflow)* meningkat 7,8% dan arus uang kartal masuk ke Bank Indonesia *(inflow)* meningkat 14,7% pada 2016. Meningkatnya *inflow* uang kartal berdampak pada peningkatan jumlah Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia yang mencapai 31,4% dari *inflow*. Meningkatnya pemusnahan UTLE mengindikasikan semakin baiknya kualitas uang kartal yang beredar di masyarakat karena berganti dengan Uang Layak Edar (ULE).

9.1. KINERJA SISTEM PEMBAYARAN

Sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan industri berjalan dengan baik dan lancar pada 2016. Penguatan infrastruktur dan kebijakan sistem pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia secara konsisten dan berkesinambungan mampu memitigasi risiko kredit, likuiditas, dan operasional dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran nasional mampu menyelesaikan seluruh transaksi dalam perekonomian dengan baik sehingga berkontribusi dalam mendukung kegiatan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Keandalan dan keamanan sistem pembayaran yang terjaga juga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan instrumen pembayaran nontunai. Untuk mendorong penggunaan instrumen sistem pembayaran nontunai, pada 2016 Bank Indonesia terus memperkuat sosialisasi dan edukasi GNNT yang telah dicanangkan sejak 2014, serta mendorong industri sistem pembayaran untuk melakukan interoperabilitas dan interkoneksi sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dalam mendorong GNNT juga ditujukan untuk perluasan akses keuangan masyarakat. Seiring kebijakan tersebut, penggunaan instrumen pembayaran nontunai terus meningkat, tercermin dari peningkatan indeks sistem pembayaran nontunai dari 249 pada 2015 menjadi 288 pada 2016 (Grafik 9.1). Peningkatan indeks sistem pembayaran nontunai mengindikasikan keberhasilan program GNNT dalam mendorong penggunaan instrumen sistem pembayaran nontunai dalam perekonomian. Berdasarkan

Grafik 9.1. Indeks Sistem Pembayaran Nontunai

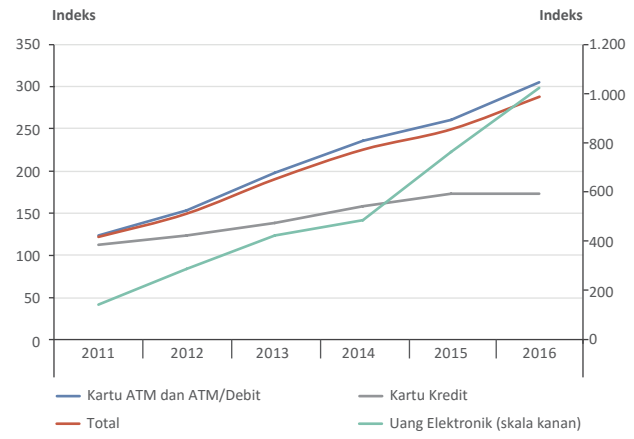

Sumber: Bank Indonesia

jenis instrumennya, peningkatan indeks pembayaran nontunai terbesar terjadi pada penggunaan uang elektronik. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penggunaan uang elektronik dalam penyaluran program bantuan sosial Pemerintah.

Nilai transaksi sistem pembayaran ritel yang terdiri dari SKNBI, APMK, uang elektronik, dan transfer dana tumbuh sebesar 15,5% pada 2016. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan rasio nilai transaksi sistem pembayaran ritel terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 0,74 pada 2015 menjadi 0,95 pada 2016 (Grafik 9.2). Sementara rasio nilai transaksi sistem pembayaran ritel terhadap nilai konsumsi masyarakat juga meningkat dari 1,31 pada 2015 menjadi 1,95 pada 2016. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat semakin terbiasa dalam menggunakan instrumen pembayaran nontunai untuk transaksi pengeluaran konsumsinya (Grafik 9.3). Peningkatan transaksi pembayaran ritel tersebut juga sejalan dengan tren peningkatan Indeks Penjualan Eceran (Grafik 9.4).

Grafik 9.3. Rasio Transaksi Ritel terhadap Konsumsi Rumah Tangga

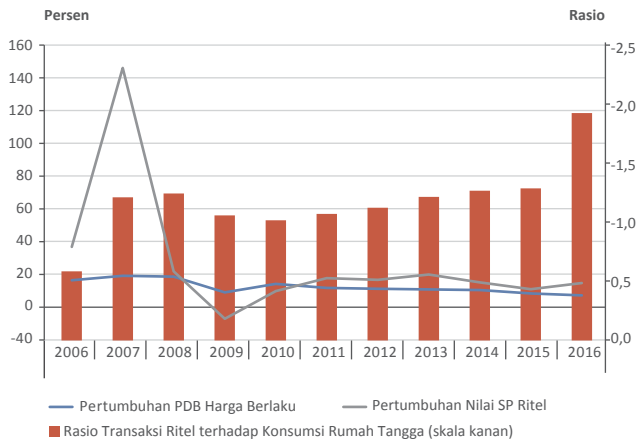

Sumber: Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Nontunai yang Diselenggarakan Bank Indonesia

Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

BI-RTGS yang merupakan sistem pembayaran nilai besar berjalan dengan aman dan lancar pada 2016. Pelaksanaan sistem BI-RTGS didukung oleh penerapan *continuity plan* yang efektif. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan dan kemampuan sistem BI-RTGS dalam menyelesaikan seluruh transaksi nilai besar di Indonesia. Dari sisi likuiditas, peserta sistem BI-RTGS juga memiliki dana harian yang cukup untuk menjaga kelancaran transaksi yang tercermin dari rendahnya transaksi yang tidak terselesaikan (*unsettled transaction*), minimnya penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), dan menurunnya *throughput* di zona III (di atas pukul 14:00). Posisi Desember 2016, rasio *throughput* zona III sebesar 30% atau berada di bawah *guideline* sebesar 40%, mengindikasikan peserta tetap patuh dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi melalui sistem BI-RTGS.

Nilai transaksi BI-RTGS pada 2016 sedikit menurun sejalan dengan aktivitas usaha yang sedang dalam tahap konsolidasi dan adanya perubahan ketentuan. Transaksi BI-RTGS pada 2016 tercatat sebanyak 7,6 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp111,8 ribu triliun. Volume maupun nilai transaksi tersebut mengalami penurunan sebesar 30,7% dan 0,8% dibandingkan dengan 2015 yang mencapai 11,0 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp112,7 ribu triliun. Secara rata-rata harian, volume transaksi sistem BI-RTGS pada 2016

Grafik 9.2. Rasio Transaksi Ritel terhadap PDB

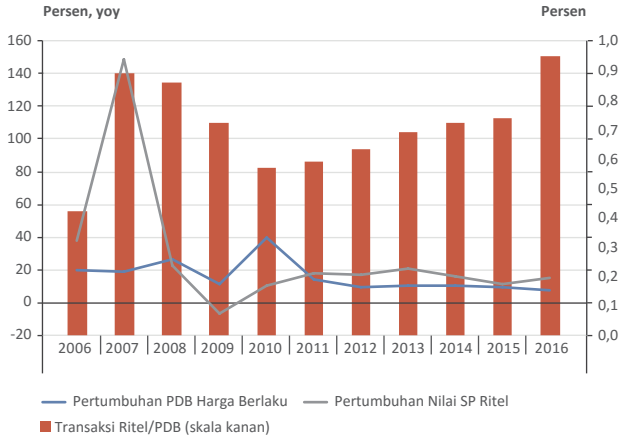

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.4. Indeks Penjualan Eceran dan Transaksi Ritel

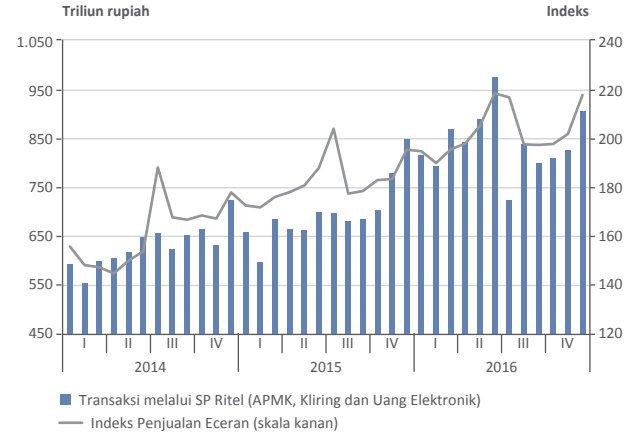

Sumber: Bank Indonesia

tercatat sebesar 30,9 ribu transaksi dengan nilai Rp450,9 triliun per hari. Volume dan nilai transaksi tersebut menurun 31,2% dan 1,6% dibandingkan dengan rata-rata transaksi harian pada 2015 yang mencapai 44,9 ribu transaksi dengan nilai Rp458,2 triliun per hari (Grafik 9.5). Penurunan transaksi BI-RTGS pada 2016 tersebut sebagian merupakan dampak kenaikan batas minimal nilai transaksi melalui BI-RTGS sehingga beralih menggunakan SKNBI.

Sepanjang 2016, kondisi likuiditas peserta sistem BI-RTGS yang masih memadai juga terindikasi dari indikator *turn over ratio* industri yang relatif stabil dengan sedikit kenaikan dari 1,0 pada 2015 menjadi 1,1 pada 2016 (Grafik 9.6). Peningkatan nilai *turn over ratio* menjadi lebih dari satu mengindikasikan peserta BI-RTGS, terutama bank banyak memanfaatkan *incoming transaction* dalam pengelolaan likuiditas untuk mengoptimalkan keuntungan. Meskipun nilai *turn over ratio* meningkat, risiko setelmen dalam sistem BI-RTGS nihil seiring dengan terselesaikannya seluruh transaksi melalui sistem BI-RTGS dengan baik dan lancar.

Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System

Transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS meningkat signifikan pada 2016. BI-SSSS tercatat melayani transaksi surat berharga sebanyak 289,1 ribu transaksi dengan nilai sebesar Rp52,5 ribu triliun pada 2016. Volume dan nilai transaksi tersebut masing-masing meningkat 57,4% dan 50,4% dibandingkan dengan volume dan nilai transaksi pada 2015 sebanyak 183,7 ribu transaksi dengan nilai sebesar Rp34,9 ribu triliun. Secara rata-rata harian, pada 2016 volume transaksi BI-SSSS mencapai 1.166 transaksi dengan nilai sebesar Rp211,6 triliun per hari. Rata-rata harian volume dan nilai transaksi tersebut masing-masing meningkat 56,1% dan 49,0% jika dibandingkan

Grafik 9.5. Perkembangan Transaksi Sistem BI-RTGS

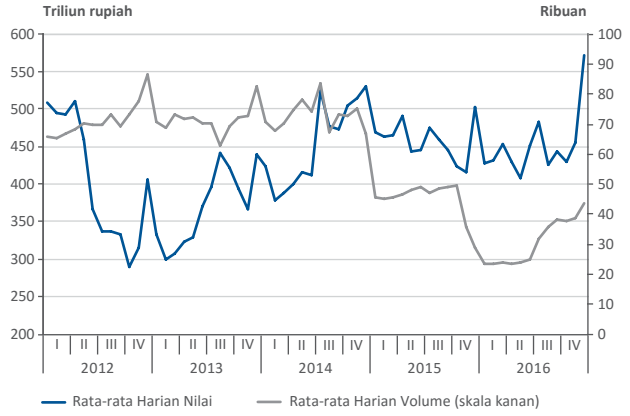

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.6. *Turnover Ratio* BI-RTGS

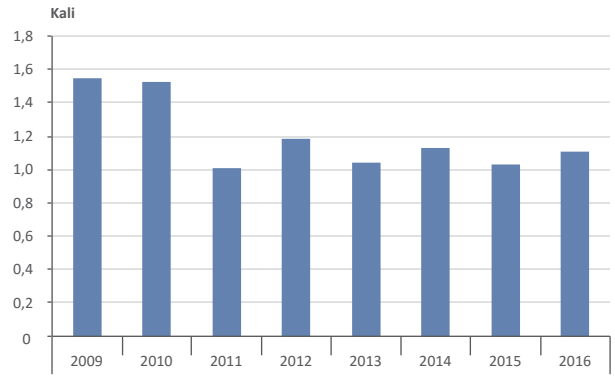

Sumber: Bank Indonesia

dengan 2015 sebanyak 747 transaksi dengan nilai sebesar Rp142,3 triliun per hari (Grafik 9.7). Peningkatan nilai transaksi melalui BI-SSSS yang cukup signifikan pada akhir 2016 ditengarai terkait dengan repatriasi dana amnesti pajak yang ditempatkan pada instrumen surat berharga.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Transaksi melalui SKNBI yang merupakan sistem pembayaran ritel juga mengalami peningkatan pada 2016. Volume transaksi SKNBI mencapai 124,5 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp4,16 ribu triliun. Volume dan nilai transaksi tersebut meningkat sebesar 9,7% dan 30% dibandingkan dengan volume dan nilai transaksi pada 2015 yang tercatat sebanyak 113,5 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp3,2 ribu triliun. Secara rata-rata harian, volume transaksi SKNBI pada 2016 tercatat sebanyak 502,1 ribu transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp16,8

Grafik 9.7. Perkembangan Transaksi BI-SSSS

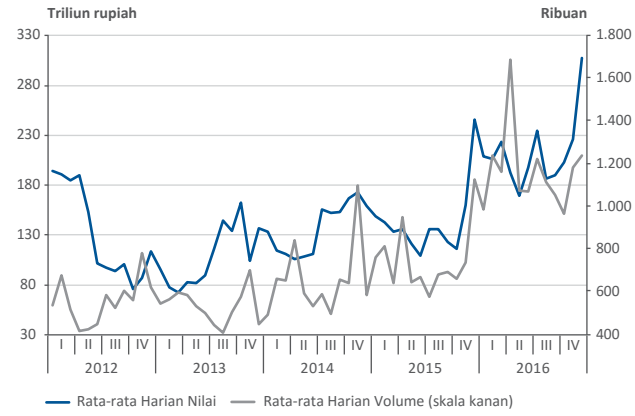

Sumber: Bank Indonesia

triliun per hari. Rata-rata harian volume dan nilai transaksi tersebut meningkat 8,8% dan 27,3% jika dibandingkan dengan rata-rata harian volume dan nilai transaksi pada 2015 yang tercatat sebanyak 461,5 ribu transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp13,2 triliun per hari (Grafik 9.8). Peningkatan transaksi SKNBI tersebut sebagian merupakan dampak dari kebijakan yang menaikkan batas minimal nilai transaksi melalui BI-RTGS dari Rp100 juta menjadi Rp500 juta pada 16 November 2015 sehingga beralih menggunakan SKNBI. Namun sejak 1 Juli 2016 ketentuan batas minimal nilai transaksi melalui BI-RTGS telah diturunkan kembali menjadi Rp100 juta sehingga sebagian transaksi kembali menggunakan BI-RTGS.

Sistem Pembayaran Nontunai yang Diselenggarakan Industri

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Seiring dengan semakin gencarnya sosialisasi GNNT, meningkatnya kepercayaan, dan kebutuhan kepraktisan mendorong peningkatan transaksi menggunakan APMK pada 2016. Transaksi pembayaran dengan APMK yang meliputi kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu ATM/debit, dan kartu kredit terus meningkat. Pada 2016 jumlah instrumen APMK yang beredar di masyarakat meningkat 12% menjadi 153,6 juta dari sebesar 137,1 juta kartu pada 2015. Volume dan nilai transaksi menggunakan APMK pada 2016 tercatat sebanyak 5,5 miliar transaksi dengan nilai sebesar Rp5,9 ribu triliun. Volume dan nilai transaksi tersebut masing-masing meningkat sebesar 13,8% dan 14,5% jika dibandingkan dengan 2015 yang tercatat sebanyak 4,9 miliar transaksi dengan nilai sebesar Rp5,2 ribu triliun. Secara rata-rata harian, volume dan nilai transaksi APMK pada 2016 sebanyak 15,1 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp16,2 triliun per hari. Rata-rata harian volume dan nilai transaksi APMK tersebut meningkat sebesar 13,1% dan 14,2% jika dibandingkan dengan rata-rata harian transaksi pada 2015 sebanyak 13,3 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp14,2 triliun per hari (Grafik 9.9).

Peningkatan transaksi APMK sebagian besar disumbang oleh transaksi kartu ATM dan kartu ATM/debit seiring dengan semakin mudah serta amannya transaksi dengan instrumen tersebut. Peningkatan volume dan nilai transaksi APMK tersebut didukung oleh peningkatan sarana pendukung transaksi APMK, yaitu mesin ATM dan mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Sampai dengan akhir 2016, terdapat sekitar 100,8 ribu unit mesin ATM dan 1,05 juta unit mesin EDC. Jumlah tersebut meningkat masing-masing sebesar 3,1% dan 5% jika dibandingkan dengan 2015 sebanyak 97,8 ribu unit mesin ATM dan 1 juta unit mesin EDC. Kemudahan dan efisiensi transaksi menggunakan APMK semakin meningkat seiring dengan mulai diimplementasikannya *National Payment Gateway* (NPG) pada akhir 2016 yang mendorong interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara instrumen pembayaran nontunai.

Kartu ATM dan Kartu ATM/Debit

Kebijakan Bank Indonesia untuk memperluas penggunaan instrumen pembayaran nontunai memperlihatkan hasil positif. Hal ini tercermin dari bertambahnya jumlah kartu ATM dan kartu ATM/debit yang beredar dan meningkatnya transaksi, baik volume maupun nilai transaksi. Jumlah kartu ATM dan ATM/debit yang beredar di masyarakat pada 2016 meningkat 12,5% menjadi 136,2 juta kartu dari sebesar 120,3 juta kartu pada 2015. Sejalan dengan jumlah kartu yang meningkat, transaksi menggunakan kartu ATM dan kartu ATM/debit mengalami peningkatan. Volume transaksi kartu

Grafik 9.8. Perkembangan Transaksi SKNBI

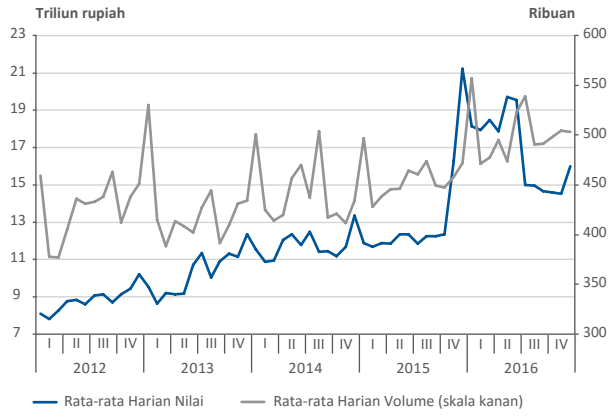

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.9. Perkembangan Transaksi APMK

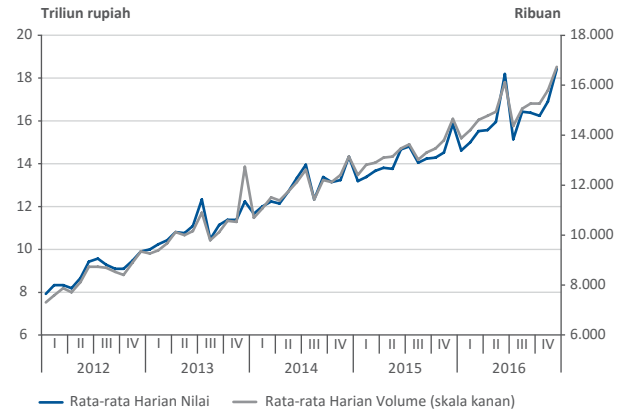

Sumber: Bank Indonesia

ATM dan kartu ATM/debit meningkat 14% menjadi 5,2 miliar transaksi dari sebanyak 4,6 miliar transaksi pada 2015. Dari sisi nilai transaksi kartu ATM dan ATM/debit meningkat 15,1% menjadi Rp5,6 ribu triliun dari sebesar Rp4,9 ribu triliun pada 2015. Sementara secara rata-rata harian, volume transaksi kartu ATM dan kartu ATM/Debit pada 2016 mencapai 14,2 juta transaksi per hari atau meningkat 13,6% dibandingkan dengan 2015 sebanyak 12,5 juta transaksi per hari. Dari sisi nilai transaksi juga meningkat 15% menjadi Rp15,4 triliun per hari dari periode sebelumnya sebesar Rp13,4 triliun per hari (Grafik 9.10).

Kartu Kredit

Jumlah dan transaksi kartu kredit pada 2016 mengalami peningkatan walaupun sempat melambat pada pertengahan tahun karena terdampak oleh ketentuan pelaporan perpajakan. Jumlah kartu kredit yang beredar pada 2016 mencapai 17,3 juta kartu, meningkat 3,0% jika dibandingkan dengan 2015 sebanyak 16,9 juta kartu. Dari sisi volume transaksi kartu kredit meningkat 8,8% menjadi 306,4 juta transaksi dari 281,3 juta transaksi pada 2015. Sementara nilai transaksi kartu kredit meningkat 0,5% menjadi Rp282 triliun dari sebesar Rp280,5 triliun pada 2015. Secara rata-rata harian, volume transaksi kartu kredit pada 2016 meningkat 8,6% menjadi 837,1 ribu transaksi per hari dari sejumlah 770,7 ribu transaksi per hari pada 2015. Secara nilai transaksi meningkat 0,3% menjadi Rp770,4 miliar per hari dari sebesar Rp768,4 miliar per hari pada 2015 (Grafik 9.11). Pertumbuhan kartu kredit sempat mengalami perlambatan pada pertengahan tahun terdampak oleh ketentuan yang mewajibkan pelaporan data dan transaksi kartu kredit untuk keperluan perpajakan. Peningkatan yang cukup signifikan kembali terjadi menjelang akhir tahun didorong oleh faktor siklikal dan kebijakan penurunan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari 2,95% menjadi 2,25% per bulan.

Perkembangan kredit bermasalah (*Non Performing Loans*/ NPL) pada kartu kredit juga terkendali dan cenderung membaik. Posisi NPL kartu kredit pada 2016 sebesar 2,4% atau membaik dibandingkan 2015 yang sebesar 2,6% (Grafik 9.12). Kolektibilitas pinjaman dari kartu kredit dengan kriteria lancar meningkat menjadi 91% dari sebesar 89% pada 2015. Peningkatan tersebut merupakan hasil perbaikan dari kredit dengan kolektibilitas kategori dalam perhatian khusus yang menurun dari 9% menjadi sebesar 7% pada 2016 (Grafik 9.13).

Uang Elektronik

Bank Indonesia bersama Pemerintah dan industri terus mendorong penggunaan uang elektronik. Untuk

Grafik 9.11. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

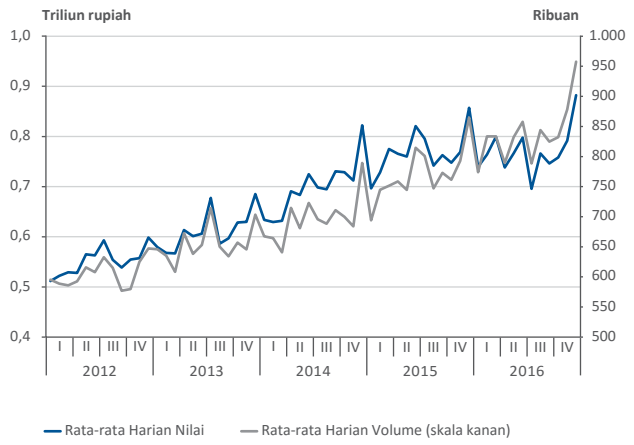

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.10. Perkembangan Transaksi ATM dan ATM/Debet

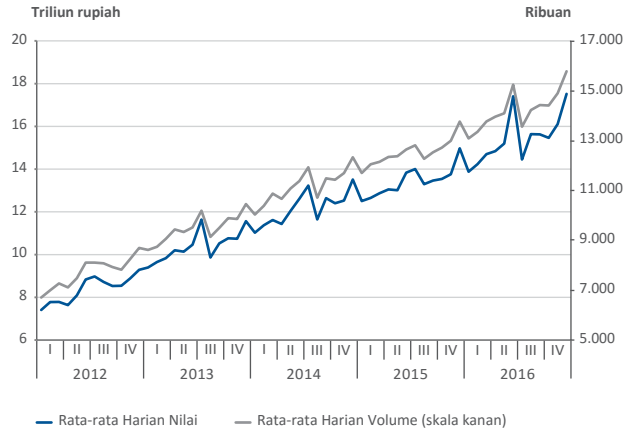

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.12. Rasio NPL Kartu Kredit

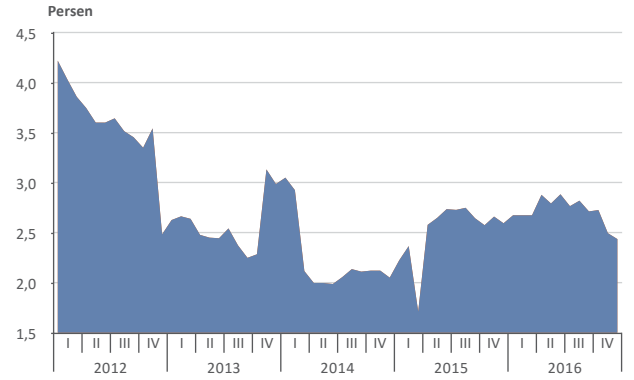

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.13. Kolektibilitas Kartu Kredit 2015 dan 2016

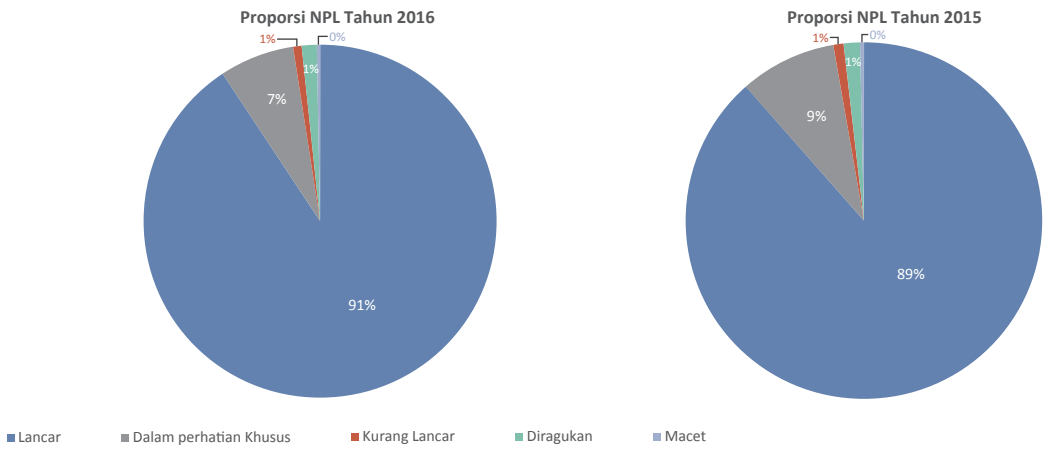

Sumber: Bank Indonesia

memperluas penggunaan instrumen sistem pembayaran ritel nontunai ke seluruh lapisan masyarakat, Bank Indonesia mendukung inisiatif penggunaan uang elektronik dalam penyaluran bantuan sosial Pemerintah. Pada 2016, Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap tiga dan tahap empat menggunakan Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk sekitar 695 ribu penerima di 68 kabupaten/kota di 20 provinsi. Pemerintah juga memperluas *pilot project* penyaluran bantuan sosial dengan Kartu Keluarga Sejahtera melalui *e-Warong* Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) di 33 kabupaten/kota. Penyaluran bantuan sosial Pemerintah menggunakan uang elektronik merupakan kelanjutan dari inisiatif yang telah digulirkan pada 2015.

Peningkatan penggunaan uang elektronik juga didukung oleh gencarnya sosialisasi program GNNT. Peningkatan penggunaan uang elektronik pada 2016 merupakan hasil dari tindak lanjut pencanangan program GNNT pada 2014, yang meliputi implementasi transaksi elektronik parkir (*e-Parking*), peluncuran Bandung *Smart Card*, dan Penyelenggaraan Festival GNNT. Berbagai upaya tersebut berhasil meningkatkan instrumen uang elektronik yang beredar, baik dari sisi jumlah, volume, maupun nilai transaksi. Pada 2016, Bank Indonesia mendorong perluasan penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran di jalan tol melalui pencanangan pembayaran tol dengan uang elektronik multibank di ruas tol Waru – Juanda Surabaya pada akhir 2016. Selain itu, Bank Indonesia juga membangun komitmen dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), operator, dan perbankan untuk melakukan migrasi pembayaran tol secara nontunai. Bank Indonesia juga menyusun pedoman interoperabilitas uang elektronik *server based* yang saat ini telah memasuki fase *proof of concept* interkoneksi uang elektronik.

Sejalan dengan berbagai inisiatif pengembangan pada 2016, jumlah instrumen uang elektronik meningkat signifikan. Jumlah instrumen uang elektronik yang beredar di masyarakat pada 2016 tercatat sebanyak 51,2 juta, meningkat 49,3% dari 2015 sebanyak 34,3 juta instrumen. Volume dan nilai transaksi uang elektronik pada 2016 mencapai 662,9 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp7,1 triliun, meningkat masing-masing 23,8% dan 34,3% dibandingkan dengan 2015 yang sebanyak 535,6 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp5,3 triliun. Secara rata-rata harian, volume transaksi uang elektronik pada 2016 sebanyak 1,8 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp19,4 miliar per hari. Transaksi tersebut masing-masing meningkat sebesar 24% dan 34,3% jika dibandingkan dengan rata-rata harian transaksi pada 2015 sebanyak 1,5 juta

Grafik 9.14. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

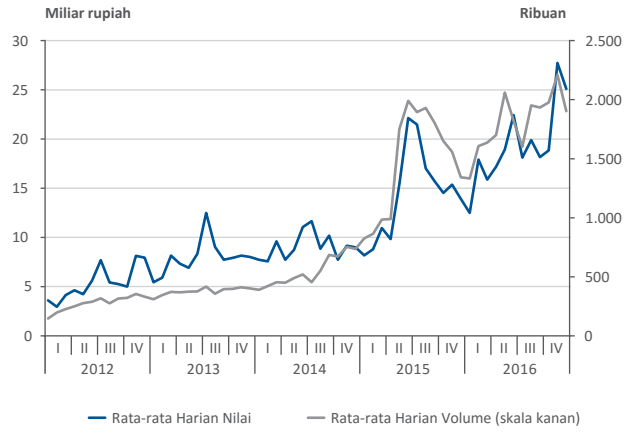

Sumber: Bank Indonesia

transaksi dengan nilai sebesar Rp14,4 miliar per hari (Grafik 9.14). Kenaikan kinerja transaksi uang elektronik tersebut dipengaruhi oleh berbagai program, antara lain penyaluran bantuan sosial Pemerintah menggunakan uang elektronik, pembayaran tol dengan uang elektronik multibank, penggunaan uang elektronik di Kereta *Commuter* Jakarta (KCJ) dan Transjakarta, serta kampanye GNNT dan LKD.

Penyelenggaraan Transfer Dana Bukan Bank

Transfer dana melalui institusi nonbank pada 2016 meningkat cukup signifikan. Transaksi transfer dana melalui penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (TD BB) pada 2016 tercatat sebanyak 26,1 juta transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp85,7 triliun. Sebagian besar transaksi yakni 57% dari volume transfer dana pada 2016 bersumber dari transaksi transfer dana domestik. Sementara dari segi nilai transaksi didominasi oleh *incoming transaction* yang mencapai 54% dari keseluruhan nilai transaksi (Grafik 9.15). Mengingat besarnya nilai transaksi transfer dana yang didominasi oleh *incoming transaction*, Bank Indonesia aktif melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai transfer dana kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran transfer dana, Bank Indonesia juga mendorong TKI untuk menggunakan penyelenggaran TD BB yang telah berizin di negara masing-masing.

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Tekanan nilai tukar rupiah pada triwulan IV mendorong peningkatan transaksi penukaran Uang Kertas Asing (UKA) pada 2016. Transaksi UKA pada 2016 meningkat 73,3% atau sebesar Rp13,0 triliun dibandingkan dengan transaksi pada 2015. Total transaksi pembelian dan penjualan UKA pada 2016 mencapai Rp256,8 triliun dengan rincian pembelian UKA sebesar Rp128,2 triliun dan penjualan UKA sebesar Rp128,6 triliun. Secara rata-rata bulanan, transaksi penukaran UKA pada 2016 sebesar Rp21,4 triliun per bulan, dengan rata-rata beli sebesar Rp10,7 triliun dan jual sebesar Rp10,7 triliun per bulan. Transaksi UKA tertinggi terjadi pada Desember 2016 sebesar Rp30,8 triliun, sedangkan transaksi UKA terendah terjadi pada Juli 2016 sebesar Rp16,1 triliun (Grafik 9.16).

Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) pada 2016 secara nasional meningkat. Sampai dengan Desember 2016, jumlah kantor pusat penyelenggara KUPVA BB berizin di Indonesia mencapai 1.064 penyelenggara atau meningkat dari 994 penyelenggara pada 2015. Jumlah penyelenggara KUPVA BB terbesar di wilayah DKI Jakarta sebanyak 404 penyelenggara (38%), diikuti wilayah Batam di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 153 penyelenggara (14%), dan Provinsi Bali sebanyak 141 penyelenggara (13%). Dari jumlah kantor pusat tersebut, terdapat 883 kantor cabang penyelenggara KUPVA BB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Grafik 9.17).

Bank Indonesia melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyelenggaraan KUPVA BB, baik secara tidak langsung (*offsite*) dan pengawasan langsung (pemeriksaan/ *onsite*). Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Selain itu, Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga melaksanakan pengawasan kepatuhan penyelenggara KUPVA BB dalam kaitan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Dalam menjalankan kewenangan tersebut,

Grafik 9.15. Pangsa Volume dan Nilai Transaksi Transfer Dana

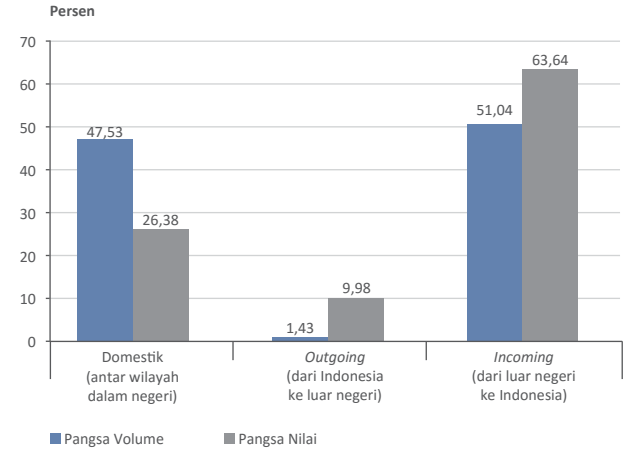

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.16. Perkembangan Transaksi Penukaran UKA melalui KUPVA BB

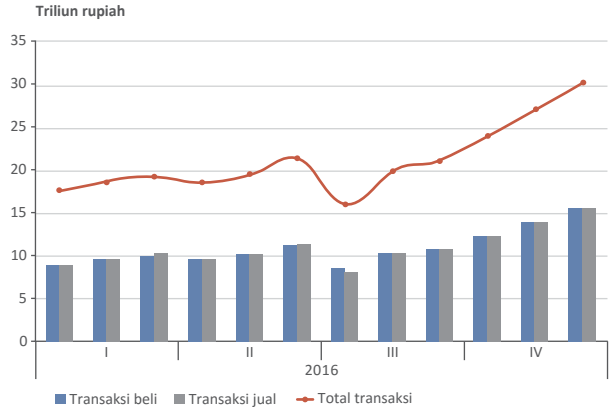

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.17. Pangsa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

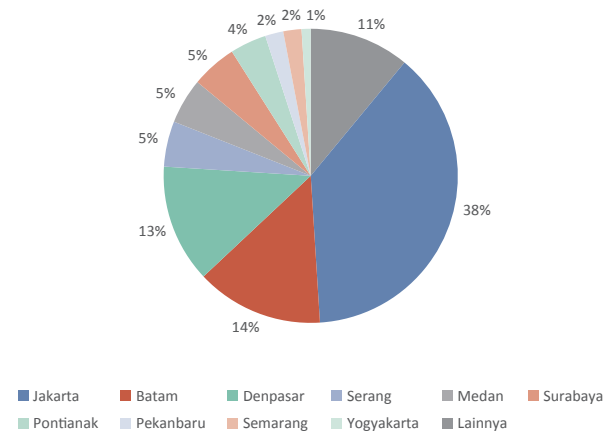

Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia melakukan pengawasan aspek APU dan PPT terhadap Penyelenggara KUPVA BB berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank. Pengawasan dilaksanakan secara desentralisasi berdasarkan lokasi kantor pusat penyelenggara KUPVA BB sesuai pembagian wilayah kerja Bank Indonesia, baik Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan di daerah.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia juga memantau penetapan kurs oleh KUPVA BB. Dalam melaksanakan pengawasan secara tidak langsung, Bank Indonesia memantau penetapan kurs oleh 27 penyelenggara KUPVA BB terpilih. Pada 2016, secara umum terdapat penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar 432 poin atau 3,12% pada kurs yang ditetapkan oleh penyelenggara KUPVA BB. Pada akhir Desember 2016, kurs beli dan jual dolar AS pada penyelenggara KUPVA BB masih dalam kisaran yang wajar dengan *spread* sebesar 76,2 dan varian volume jual dan beli yang relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan minimnya motif spekulasi pada KUPVA BB (Grafik 9.18).

9.2. KINERJA PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Sejalan dengan sistem pembayaran nontunai, pertumbuhan uang kartal yang diedarkan (UYD) pada 2016 juga mengalami perlambatan didorong oleh aktivitas perekonomian yang masih dalam masa konsolidasi. Posisi UYD pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp612,5 triliun atau tumbuh 4,4% jika dibandingkan dengan posisi akhir 2015 sebesar Rp586,8 triliun. Pertumbuhan UYD tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 2015 yang mencapai 11,0%. Ditinjau dari komponennya, pelambatan pertumbuhan UYD disebabkan oleh menurunnya posisi *cash in vault* (CiV) dari sebesar Rp117,3 triliun pada 2015 menjadi Rp107,3 triliun pada akhir 2016 (Grafik 9.19). Penurunan CiV tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya kebutuhan uang kartal perbankan untuk berjaga-jaga akibat periode libur Natal dan akhir tahun 2016 yang lebih pendek dibandingkan pada 2015. Berdasarkan pola UYD harian, posisi UYD memiliki pola musiman pada periode tertentu, terutama berkaitan dengan hari raya keagamaan (periode Ramadhan dan Natal) dan liburan. Selama 2016, posisi UYD tertinggi terjadi pada akhir Ramadhan sebesar Rp642,0 triliun atau tumbuh 6,4% dibandingkan dengan periode Ramadhan 2015 yang sebesar Rp603,5 triliun (Grafik 9.20).

Peran uang kartal dalam aktivitas perekonomian domestik masih cukup tinggi. Peran uang kartal yang masih tinggi tercermin pada rasio UYD terhadap PDB yang dalam

Grafik 9.18. Kurs Jual-Beli Penyelenggara KUPVA BB

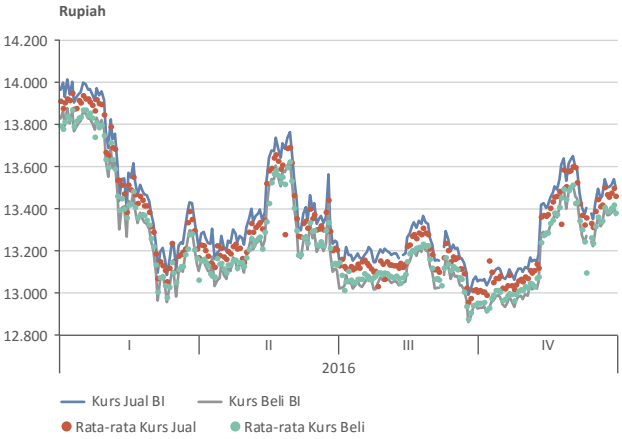

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.19. Posisi Uang Kartal yang Diedarkan Akhir Tahun

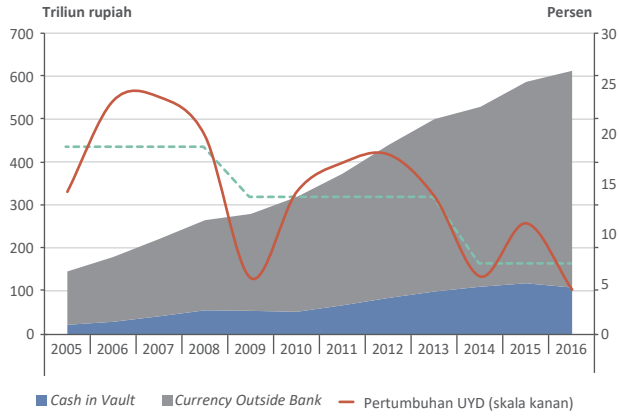

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.20. Perkembangan UYD secara Harian

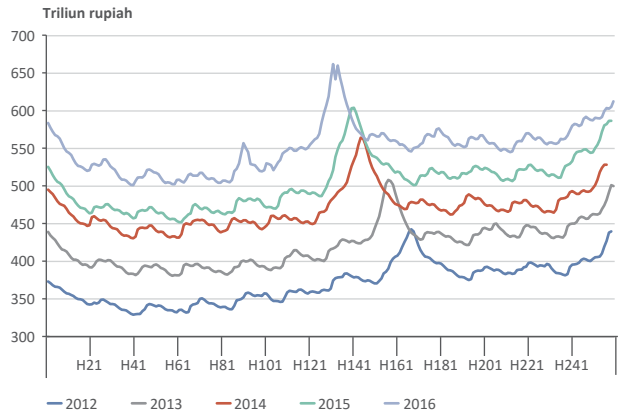

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.22. Perbandingan UYD terhadap M1 dan M2

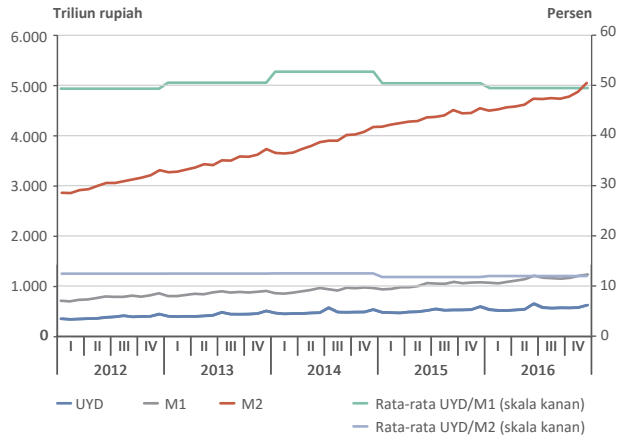

Sumber: Bank Indonesia

beberapa tahun terakhir relatif stabil di kisaran 5,1%. Tingginya peran uang kartal terhadap perekonomian juga terlihat pada rasio UYD terhadap konsumsi rumah tangga. Pada 2016, rasio UYD terhadap konsumsi rumah tangga mencapai 8,7% atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 2015 sebesar 9,1% seiring dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat (Grafik 9.21). Penurunan rasio UYD terhadap konsumsi tersebut ditengarai salah satunya juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya penggunaan instrumen sistem pembayaran nontunai yang mulai mengeser perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Peran uang kartal yang masih cukup signifikan juga terlihat dari pangsa UYD terhadap uang beredar, baik dalam arti sempit (M1) maupun dalam arti luas (M2), yang dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil (Grafik 9.22).

Berdasarkan denominasinya, pecahan Rp100.000 dalam UYD terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Komposisi UYD pecahan Rp100.000 meningkat signifikan dari sebesar 35,4% pada 2005 menjadi 65,0% pada 2016 (Grafik 9.23). Hal ini didorong oleh perilaku perbankan dan masyarakat yang cenderung untuk memegang uang rupiah pecahan besar karena faktor kepraktisan dan efisiensi. Preferensi masyarakat dalam memegang denominasi tertentu juga dipengaruhi oleh semakin mudahnya akses terhadap uang dengan pecahan tertentu, terutama melalui melalui mesin ATM dan ATM/debit yang terus mengalami peningkatan.

Pada 2016, jumlah transaksi uang kartal dari dan ke Bank Indonesia masih mengalami peningkatan sejalan dengan masih tingginya kebutuhan uang kartal dalam perekonomian. Selama 2016, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia tetap mengalami net *outflow* sebesar Rp25,8 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan 2015 yang mencapai Rp56,2 triliun. Aliran uang kartal yang ditarik dari

Grafik 9.21. Rasio UYD terhadap PDB dan Konsumsi Rumah Tangga

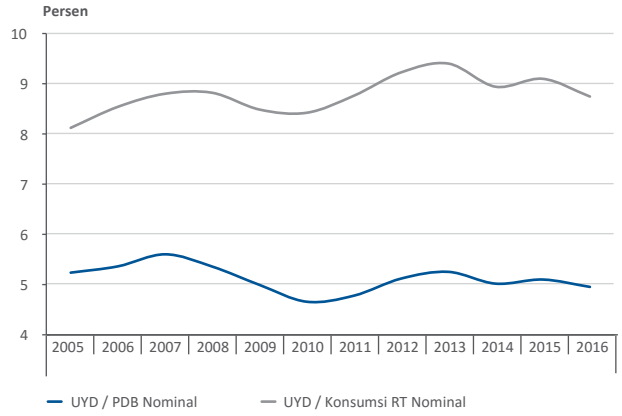

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.23. Pangsa UYD Berdasarkan Denominasi

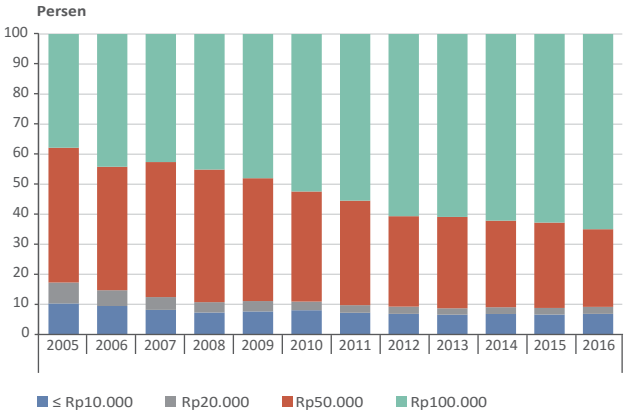

Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia (*outflow*) tercatat sebesar Rp610,4 triliun atau tumbuh 7,8% jika dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp566,3 triliun. Sementara itu, aliran uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) mencapai Rp584,6 triliun atau tumbuh 14,7% jika dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp509,8 triliun (Grafik 9.24).

Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang kartal pada sepanjang 2016. Untuk menjamin kelancaran transaksi pembayaran tunai dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat, Bank Indonesia senantiasa menjaga ketersediaan uang kartal. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan kas Bank Indonesia yang mencapai rata-rata 5,1 bulan *outflow* sepanjang 2016 atau sama dengan tahun sebelumnya. Rasio kecukupan kas tertinggi terjadi pada Februari-Maret 2016 mencapai 5,9 bulan *outflow*, sejalan dengan arus balik uang rupiah setelah periode Natal dan akhir 2015. Sementara posisi kas terendah terjadi pada Juni 2016 yang mencapai 3,4 bulan *outflow* sebagai akibat dari tingginya kebutuhan uang rupiah pada periode Ramadhan/ Idul Fitri 2016 (Grafik 9.25). Berdasarkan wilayah, rasio kecukupan kas tertinggi terdapat di Kantor Pusat Bank Indonesia yang mencapai 7,1 bulan *outflow*. Tingginya rasio kas tersebut bertujuan untuk menjaga *Iron Stock* Nasional (ISN) yang harus disediakan oleh Bank Indonesia sebagai antisipasi penarikan oleh perbankan yang mayoritas berkantor pusat di wilayah Jabodetabek (Grafik 9.26).[1] *Outflow* yang tetap meningkat namun lebih rendah dari tahun sebelumnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

Grafik 9.24. Aliran Uang Kartal melalui Bank Indonesia

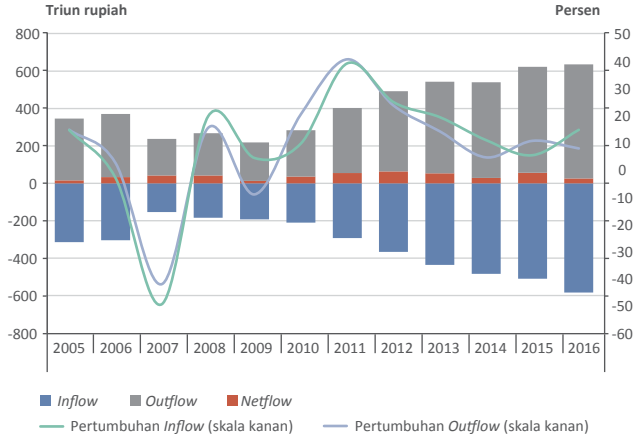

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.25. Rasio Posisi Kas terhadap Rata-rata *Outflow* Bulanan

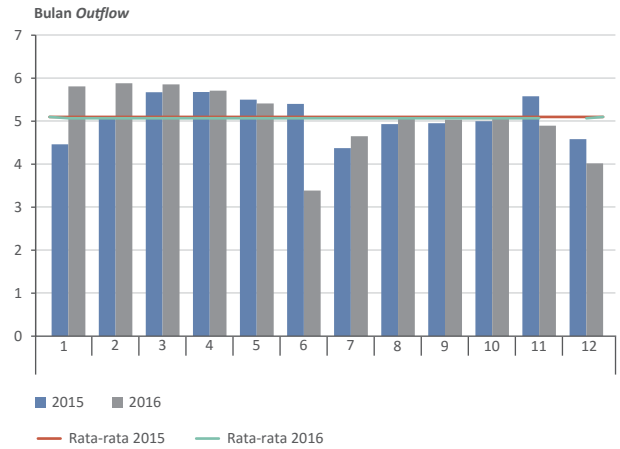

Sumber: Bank Indonesia

yang masih tumbuh melambat dibanding 2015. Selain itu, kebijakan *clean money policy* yang menaikkan *soil level* memengaruhi rasio kas yang menurun dibanding tahun sebelumnya.

Untuk melaksanakan amanat Undang Undang Mata Uang dan meningkatkan kualitas uang rupiah, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah Tahun Emisi (TE) 2016. Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan 11 pecahan uang rupiah TE 2016 yang terdiri dari tujuh pecahan uang kertas dan empat pecahan uang logam. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Mata Uang dan mempermudah pengenalan ciri keaslian uang serta memperkuat fitur pengaman pada uang rupiah. Pengeluaran dan pengedaran uang rupiah TE 2016 tersebut diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 19 Desember 2016 yang bertepatan dengan peringatan Hari Bela Negara.

Grafik 9.26. Rasio Posisi Kas terhadap Rata-rata *Outflow* Bulanan per Wilayah

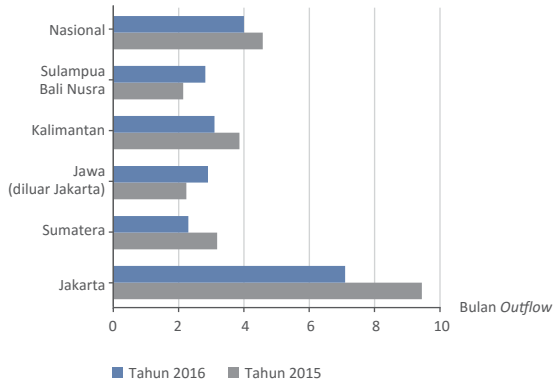

Sumber: Bank Indonesia

1 *Iron Stock* Nasional merupakan persediaan siaga untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan permintaan uang kartal yang tidak diprediksi pada saat penyusunan estimasi kebutuhan uang pada awal tahun, misalnya kenaikan harga BBM dan TTL pada periode tahun berjalan. Penetapan *iron stock* sebesar 20% dari proyeksi UYD adalah sesuai dengan *best practices* negara lain, misalnya Bank Sentral Spanyol dan Bank Sentral Korea.

Uang rupiah TE 2016 menampilkan gambar pahlawan nasional untuk menumbuhkan nilai-nilai patriotisme. Uang rupiah TE 2016 menampilkan dua belas gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama di bagian depan uang rupiah. Pencantuman gambar pahlawan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan bagi negara Indonesia. Selain itu, semangat kepahlawanan dan nilai-nilai patriotisme para pahlawan nasional diharapkan dapat menjadi teladan, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Untuk lebih memperkenalkan keragaman seni, budaya, dan kekayaan alam Indonesia, uang kertas rupiah menampilkan pula gambar tari nusantara dan pemandangan alam dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman dan keunikan alam dan budaya yang ditampilkan dalam uang rupiah diharapkan dapat semakin membangkitkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Untuk mempermudah identifikasi ciri keaslian uang rupiah oleh masyarakat serta mempersulit upaya pemalsuan uang, Bank Indonesia melakukan penguatan unsur pengaman pada uang rupiah TE 2016 (lihat Boks 9.1).

Dalam rangka meningkatkan cakupan layanan kas ke seluruh wilayah NKRI, Bank Indonesia menambah jumlah Kas Titipan.[2] Peningkatan Kas Titipan dilakukan pada wilayah yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia. Pada 2016, Bank Indonesia menambah jumlah Kas Titipan sebanyak 27 lokasi yakni dari 35 lokasi pada 2015 dengan 368 bank peserta menjadi total 62 lokasi dengan 510 bank peserta. Dengan pertambahan tersebut, jangkauan layanan kas Bank Indonesia meningkat dari 66% kota/kabupaten di Indonesia pada 2015 menjadi 82% pada 2016. Seiring dengan bertambahnya jumlah Kas Titipan, penarikan uang kartal di Kas Titipan juga meningkat cukup signifikan. Jumlah penarikan uang di Kas Titipan pada 2016 tercatat sebesar Rp68,9 triliun atau meningkat 45,4% dibandingkan 2015 yang sebesar Rp47,4 triliun (Grafik 9.27). Dari sisi wilayah, jumlah Kas Titipan tertinggi terdapat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia - Provinsi Papua dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni masing-masing sebanyak 6 Kas Titipan.

Bank Indonesia juga terus meningkatkan kegiatan Kas Keliling di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan pulau terdepan NKRI.[3] Upaya tersebut tercermin dari jumlah nominal penukaran uang yang tumbuh 40,3% yakni dari Rp1,8 triliun pada 2015 menjadi

Grafik 9.27. Jumlah Kas Titipan dan Penarikan Uang Rupiah

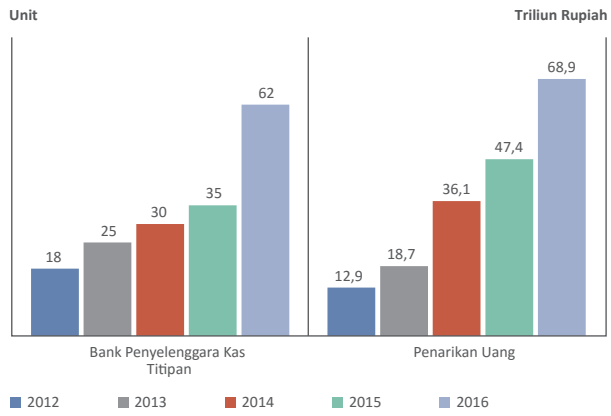

Sumber: Bank Indonesia

Rp2,6 triliun pada 2016 (Grafik 9.28). Selain itu, jumlah frekuensi Kas Keliling juga meningkat signifikan sebesar 48,8% yakni dari 2.598 kali pada 2015 menjadi 3.867 kali pada 2016. Tingginya pertumbuhan tersebut terutama terjadi pada triwulan II 2016 seiring peningkatan kebutuhan uang pada periode Ramadhan/Idul Fitri 2016. Peningkatan kegiatan Kas Keliling diharapkan dapat memenuhi kebutuhan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI sekaligus untuk menggantikan uang tidak layak edar menjadi uang layak edar sehingga kualitas uang rupiah yang beredar semakin meningkat.

Bank Indonesia berkomitmen untuk menyediakan uang layak edar bagi masyarakat. Uang layak edar adalah uang rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyediaan uang rupiah yang berkualitas sangat penting untuk menjaga integritas rupiah sebagai salah satu

Grafik 9.28. Penarikan Uang Kartal Dalam Rangka Kas Keliling

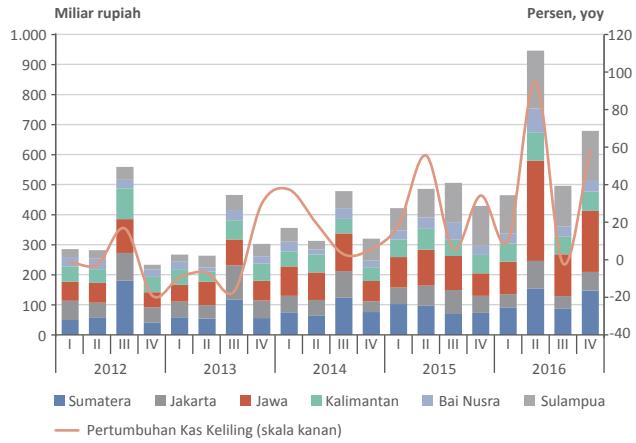

Sumber: Bank Indonesia

2 Kas Titipan adalah kegiatan penyediaan uang rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada salah satu bank untuk mencukupi persediaan kas bank-bank dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu.

3 Kas Keliling adalah kegiatan penukaran uang rupiah oleh Bank Indonesia kepada masyarakat atau pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dengan menggunakan moda transportasi; dilakukan dengan mekanisme *retail* (kepada masyarakat umum) dan *wholesale* (kepada perbankan)

simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, uang yang layak edar akan memberikan kenyamanan bertransaksi bagi masyarakat. Uang rupiah dinyatakan tidak layak edar berdasarkan standar Bank Indonesia apabila kondisinya telah berubah, antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia dan coretan atau yang fisiknya telah berubah karena terbakar, berlubang, atau robek. Secara rutin Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang untuk mendukung komitmen menyediakan uang yang layak edar di masyarakat.

Bank Indonesia secara konsisten terus meningkatkan standar kualitas uang rupiah. Untuk meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kebijakan *clean money policy* melalui peningkatan standar kualitas uang (*soil level*) yang diedarkan.[4] Hal ini tercermin dari meningkatnya uang tidak layak edar yang dimusnahkan, baik dari sisi jumlah bilyet maupun nilai nominal yakni masing-masing sebesar 16,2% dan 31,4%. Pada 2016, uang kertas yang dimusnahkan sebanyak 6,9 miliar bilyet senilai Rp210,5 triliun dan tidak terdapat pemusnahan uang logam. Sementara pada 2015, uang yang dimusnahkan tercatat sebanyak 5,9 miliar bilyet untuk uang kertas dan 49,0 juta keping untuk uang logam, dengan nilai total sebesar Rp160,3 triliun. Meningkatnya jumlah pemusnahan juga dipengaruhi oleh semakin tingginya jumlah pengolahan (penghitungan dan penyortiran) uang seiring bertambahnya jumlah uang yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) sepanjang 2016. Dengan

Grafik 9.29. Rasio Pemusnahan Uang Rupiah terhadap *Inflow*

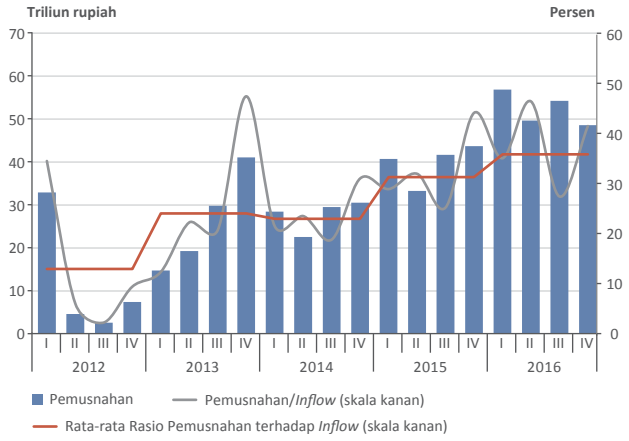

Sumber: Bank Indonesia

4 *Soil level* yang digunakan Bank Indonesia memiliki kisaran *soil level* 1 sampai dengan 16. *Soil level* 1 adalah uang yang sangat tidak layak edar dan *soil level* 16 adalah uang hasil cetak sempurna (HCS) dari Perum Peruri. Untuk 2016 Bank Indonesia menetapkan *soil level* 8 sebagai standar uang yang layak edar, sehingga uang dengan *soil level* 1 sampai dengan 7 merupakan uang tidak layak edar.

Tabel 9.1. Hasil Survei Kualitas Uang Layak Edar Tahun 2016

Kelompok Pecahan	Lokasi	Rata-rata Semester I	Rata-rata Semester II
UPB (≥ Rp20.000)	82 Kota IHK	10	11
UPK (≥ Rp10.000)	82 Kota IHK	6	8

Sumber: Bank Indonesia

perkembangan tersebut, rasio pemusnahan terhadap *inflow* pada tahun 2016 mencapai 36,0% atau lebih tinggi dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya sebesar 31,4% (Grafik 9.29). Berdasarkan jenis pecahan, pemusnahan UTLE pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk pecahan uang kertas lainnya, lebih dari 80% *inflow* dimusnahkan oleh Bank Indonesia (Grafik 9.30).

Kebijakan *clean money policy* berhasil meningkatkan kualitas uang beredar. Keberhasilan implementasi *clean money policy* selama 2016 tercermin dari hasil survei kualitas uang layak edar di beberapa kota. Berdasarkan survei yang dilakukan di 82 kota yang menjadi perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) selama semester I dan II 2016, kualitas uang menunjukkan kecenderungan meningkat yang tercermin dari peningkatan *soil level* (Tabel 9.1).

Bank Indonesia juga senantiasa mencegah dan menanggulangi peredaran uang rupiah palsu. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan uang rupiah serta meningkatkan kepatuhan perbankan dalam menyampaikan laporan uang rupiah palsu. Bank Indonesia juga terus meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi publik mengenai ciri keaslian uang rupiah. Dengan upaya tersebut, jumlah temuan uang rupiah palsu selama 2016

Grafik 9.30. Rasio Pemusnahan terhadap *Inflow* Berdasarkan Pecahan Uang Kertas

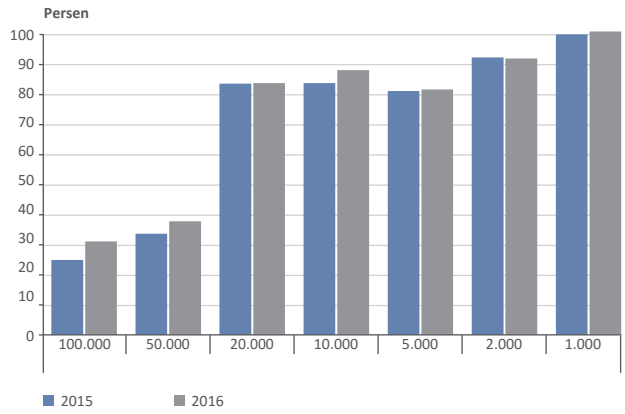

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.31. Temuan Uang Rupiah Palsu oleh Kepolisian dan Laporan Perbankan

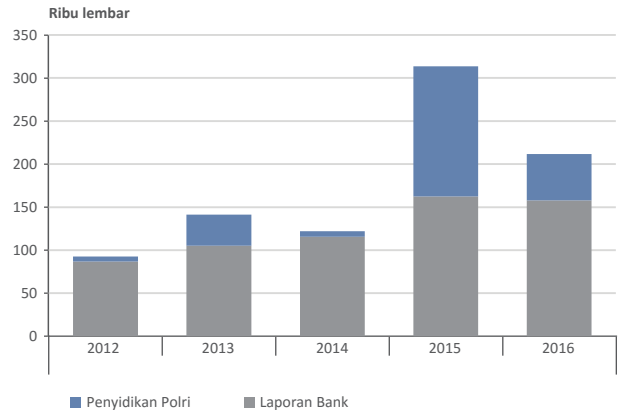

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.32. Temuan Uang Rupiah Palsu dan Rasionya terhadap Uang yang Diedarkan

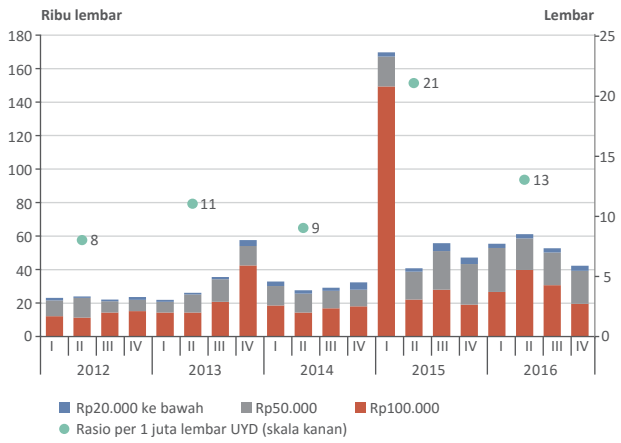

Sumber: Bank Indonesia

menurun cukup signifikan dibandingkan dengan 2015, yakni dari 313.538 lembar menjadi sebanyak 211.661 lembar. Temuan uang palsu tersebut terdiri dari laporan perbankan sebanyak 157.782 lembar dan penyidikan Polri sebanyak 53.879 lembar (Grafik 9.31). Berdasarkan pecahan, temuan uang palsu didominasi oleh uang kertas pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, masing-masing sebanyak 116.824 lembar (55,2%) dan 84.245 lembar (39,8%). Dengan perkembangan tersebut, rasio uang palsu turun dari 21 lembar menjadi 13 lembar per satu juta lembar uang yang diedarkan (Grafik 9.32).

Boks 9.1. Uang Rupiah Tahun Emisi 2016

Rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dihargai oleh setiap warga negara Indonesia. Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran termasuk pengelolaan uang rupiah, diamanatkan oleh UU Mata Uang untuk mengeluarkan, mengedarkan, dan mencabut serta menarik uang rupiah.

Pengeluaran dan pengedaran uang rupiah Tahun Emisi (TE) 2016 merupakan amanat UU Mata Uang yang antara lain mengatur mengenai ciri-ciri umum dan khusus yang dimuat dalam uang rupiah. Salah satu ciri umum pada uang rupiah kertas adalah pencantuman tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sementara salah satu ciri umum pada uang rupiah logam adalah pencantuman frasa "Republik Indonesia". Ciri-ciri umum uang rupiah tersebut menegaskan makna filosofis rupiah sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Pada 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah TE 2016 untuk seluruh pecahan. Uang rupiah TE 2016 terdiri dari tujuh pecahan uang kertas yaitu Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, dan empat pecahan uang logam yaitu Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100. Pengeluaran dan pengedaran uang baru TE 2016 tersebut merupakan momen spesial bagi bangsa Indonesia karena pertama kalinya dilakukan secara serentak untuk seluruh pecahan.

Pahlawan Nasional dan Tema Uang Rupiah

Sesuai dengan amanat UU Mata Uang, uang rupiah harus mencantumkan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan. Pencantuman gambar pahlawan nasional tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan dan mengukuhkan NKRI. Melalui pencantuman gambar pahlawan juga diharapkan dapat lebih memperkenalkan pahlawan nasional kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan dan sikap keteladanan pahlawan nasional. Dalam penentuan pahlawan yang dimuat dalam uang rupiah, Bank Indonesia berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah, sejarawan, akademisi, dan tokoh masyarakat. Terdapat beberapa kriteria pemilihan gambar pahlawan nasional, yakni belum pernah digunakan dalam uang rupiah (kecuali proklamator), keterwakilan daerah, keterwakilan gender, dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Seluruh gambar pahlawan nasional yang dicantumkan pada uang rupiah kertas dan logam diperoleh dari instansi yang berwenang menatausahakan pahlawan nasional dan disetujui oleh ahli waris pahlawan nasional. Selanjutnya, gambar pahlawan nasional terpilih yang digunakan dalam rupiah TE 2016 ditetapkan dalam surat Keputusan Presiden RI (Keppres Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan

Pecahan		Gambar Depan	Gambar Belakang	
		Pahlawan Nasional	Tari Nusantara	Pemandangan Alam
Uang kertas	Rp100.000	Dr. (H.C.) Ir. Soekarno – Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta	Topeng Betawi	Raja Ampat
	Rp50.000	Ir. H. Djuanda Kartawidjaja	Legong	Pulau Komodo
	Rp20.000	Dr. G.S.S.J. Ratulangi	Gong	Derawan
	Rp10.000	Frans Kaisiepo	Pakarena	Wakatobi
	Rp5.000	Dr. K.H. Idham Chalid	Gambyong	Gunung Bromo
	Rp2.000	Mohammad Hoesni Thamrin	Piring	Ngarai Sianok
	Rp1.000	Tjut Meutia	Tifa	Banda Neira
Uang logam	Rp1.000	Mr. I Gusti Ketut Pudja		
	Rp500	Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang		
	Rp200	Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo		
	Rp100	Prof. Dr. Ir. Herman Johannes		

Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 5 September 2016).

Selain gambar pahlawan nasional, uang rupiah kertas juga menampilkan gambar tari nusantara dan pemandangan alam Indonesia untuk memperkenalkan keragaman seni, budaya, dan kekayaan alam Indonesia. Pencantuman gambar pahlawan nasional, tari nusantara dan pemandangan alam Indonesia diharapkan dapat mendukung program revolusi karakter bangsa melalui aspek pengenalan sejarah dan nilai-nilai patriotisme serta cinta tanah air, selaras dengan salah satu program Nawa Cita yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah TE 2016

Guna memudahkan masyarakat mengenali keaslian uang rupiah dan mempersulit upaya pemalsuan, uang rupiah TE 2016 dilengkapi dengan 9-12 unsur pengaman. Secara umum, unsur pengaman uang rupiah terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu terbuka (*overt*), semi tertutup (*semi covert*) dan tertutup (*covert/forensic*). Unsur pengaman terbuka adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat. Unsur pengaman semi tertutup adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat yang sederhana, seperti kaca pembesar dan lampu *ultra violet* (UV). Sementara unsur pengaman tertutup adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium/forensik.

Unsur pengaman terbuka diperuntukkan bagi masyarakat agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Unsur pengaman terbuka yang terdapat pada uang rupiah TE 2016 antara lain:

1. Benang pengaman baik yang dianyam dan dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu maupun benang pengaman yang tertanam di kertas uang.

2. Tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan dan ornamen tertentu.

3. Gambar perisai yang berisi logo BI yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

4. Gambar tersembunyi multiwarna yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

Rp100.000	Rp50.000	Rp20.000	Rp10.000
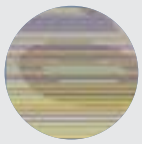	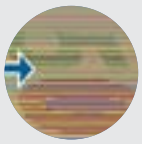	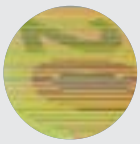	

5. Gambar tersembunyi berupa tulisan "BI" maupun angka yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

Rp100.000	Rp50.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp5.000	Rp2.000	Rp1.000
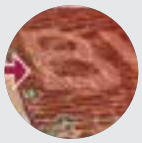	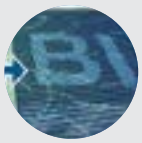	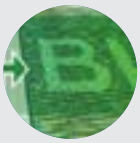	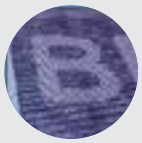	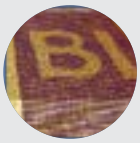	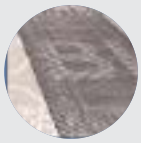	

6. Cetakan timbul berupa pasangan garis di bagian tepi uang yang terasa kasar apabila diraba yang digunakan sebagai kode bagi tuna netra (*blind code*).

Rp100.000	Rp50.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp5.000	Rp2.000	Rp1.000
						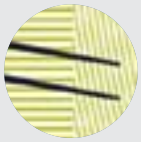

7. Gambar saling isi *(rectoverso)* dari logo BI yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.

Pecahan	Depan	Belakang	Terawang
Rp100.000			
Rp50.000			
Rp20.000			
Rp10.000			

Pecahan	Depan	Belakang	Terawang
Rp5.000			
Rp2.000			
Rp1.000			

Unsur pengaman semi tertutup diperuntukkan bagi profesional, seperti kasir dan bendahara, agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan menggunakan alat bantu sederhana seperti kaca pembesar *(loop)* dan lampu UV. Unsur-unsur pengaman semi tertutup yang terdapat pada uang rupiah TE 2016 antara lain:

1. Tulisan mikro dan gambar raster

Rp100.000	Rp50.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp5.000	Rp2.000	Rp1.000

2. Cetakan dengan tinta khusus yang akan memendar apabila dibawah lampu UV.

Pecahan	Depan	Belakang
Rp100.000		
Rp50.000		
Rp20.000		
Rp10.000		
Rp5.000		
Rp2.000		
Rp1.000		

Cara Merawat Uang Rupiah

Budaya menjaga dan merawat uang Rupiah perlu ditanamkan di masyarakat sejak usia dini. Menjaga uang rupiah itu sama artinya dengan menjaga simbol kedaulatan negara. Sementara itu, merawat rupiah merupakan ungkapan rasa syukur atas kerja keras. Dalam rangka mengajak masyarakat memperlakukan uang rupiah dengan baik, Bank Indonesia mengampanyekan slogan 3D yakni "Didapat-Disimpan-Disayang".

Unsur-unsur pengaman uang rupiah yang bersifat terbuka dan semi tertutup dapat dikenali dengan mudah kalau fisik uang rupiah masih dalam kondisi yang baik dan bersih. Untuk itu, kepedulian masyarakat untuk merawat fisik uang rupiah agar tidak cepat rusak, lusuh dan kotor merupakan keharusan. Masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga dan merawat uang rupiah, agar pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat dilakukan secara lebih efisien. Caranya dengan meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, misalnya membasahi, melipat dan meremas, mencoret-coret, serta menyatukan uang rupiah dengan *stapler*.

Dengan diterbitkannya uang rupiah tahun emisi 2016, uang rupiah kertas dan rupiah logam yang telah dikeluarkan dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia.

BAB 10
Ekonomi Regional

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 terutama didorong oleh membaiknya ekonomi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Perbaikan ekonomi di berbagai wilayah tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat dan perbaikan ekspor di triwulan IV 2016 seiring kenaikan harga komoditas di pasar global. Dukungan stimulus fiskal daerah di paruh pertama 2016 turut menopang perbaikan kinerja ekonomi di berbagai daerah, meski langkah penghematan di paruh kedua 2016 menyebabkan peran fiskal daerah menjadi terbatas. Membaiknya kinerja ekonomi tersebut juga didukung dinamika inflasi di berbagai daerah yang terkendali dan sejalan dengan sasaran inflasi 2016. Koordinasi pengendalian inflasi yang semakin solid, khususnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, turut berkontribusi pada terkendalinya inflasi daerah pada 2016. Capaian kinerja ekonomi daerah yang positif tersebut juga diikuti oleh menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Keterangan gambar:
Ekonomi regional menunjukkan respons yang berbeda terhadap dinamika harga komoditas global. Ekonomi daerah yang didominasi oleh komoditas Sumber Daya Alam cenderung mendapat manfaat dari tren perbaikan harga komoditas yang terjadi pada tahun 2016.

Kinerja ekonomi 2016 sebagian besar daerah menunjukkan adanya perbaikan terutama ditopang oleh masih kuatnya konsumsi swasta dan perbaikan kinerja ekspor pada triwulan IV 2016 seiring kenaikan harga komoditas di pasar global. Dukungan stimulus fiskal daerah di paruh pertama 2016 turut menopang perbaikan kinerja ekonomi di berbagai daerah, meski langkah penghematan di paruh kedua 2016 menyebabkan peran fiskal daerah secara keseluruhan tahun menjadi terbatas. Perbaikan kinerja ekonomi terutama terjadi di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Realisasi pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga masih berada pada level yang tinggi ditopang oleh cukup tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), kendati sedikit lebih lambat dibanding tahun sebelumnya karena melambatnya ekonomi wilayah Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra).

Di sisi inflasi, perkembangan inflasi di berbagai daerah hingga akhir tahun 2016 mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 4±1%. Terkendalinya inflasi di berbagai daerah tidak terlepas dari minimalnya tekanan permintaan domestik, terjaganya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi, menguatnya nilai tukar rupiah, dan terjadinya deflasi pada komoditas yang masuk dalam kelompok *administered prices* (AP). Di sisi lain, tekanan kenaikan inflasi pangan di berbagai daerah justru cenderung meningkat. Kenaikan tekanan inflasi pangan di beberapa daerah di wilayah Sumatera menyebabkan inflasi di wilayah Sumatera berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya pada 2016. Namun, koordinasi yang kuat dalam pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui forum Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan berbagai langkah kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam mengendalikan gejolak harga pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) berkontribusi positif dalam menahan tekanan kenaikan inflasi pangan lebih lanjut.

10.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Daerah

Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2016 terutama bersumber dari membaiknya ekonomi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sebagian besar provinsi di tiga wilayah tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Khusus untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur meskipun masih mengalami kontraksi namun tidak sedalam yang terjadi pada tahun sebelumnya (Gambar 10.1). Secara umum, perbaikan kinerja ekonomi di tiga wilayah tersebut bersumber dari kuatnya konsumsi domestik, meningkatnya kinerja ekspor seiring dengan perbaikan harga komoditas di pasar global, serta membaiknya investasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi KTI secara agregat masih berada pada level yang cukup tinggi ditopang oleh cukup tingginya capaian pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulampua. Namun, pertumbuhan ekonomi KTI 2016 tersebut masih lebih rendah dibanding realisasi pada 2015 akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Perekonomian wilayah Sumatera pada 2016 tumbuh sebesar 4,3% meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,5%. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh membaiknya kinerja ekonomi di hampir seluruh daerah di wilayah Sumatera, kecuali Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Peningkatan kinerja

Gambar 10.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2016

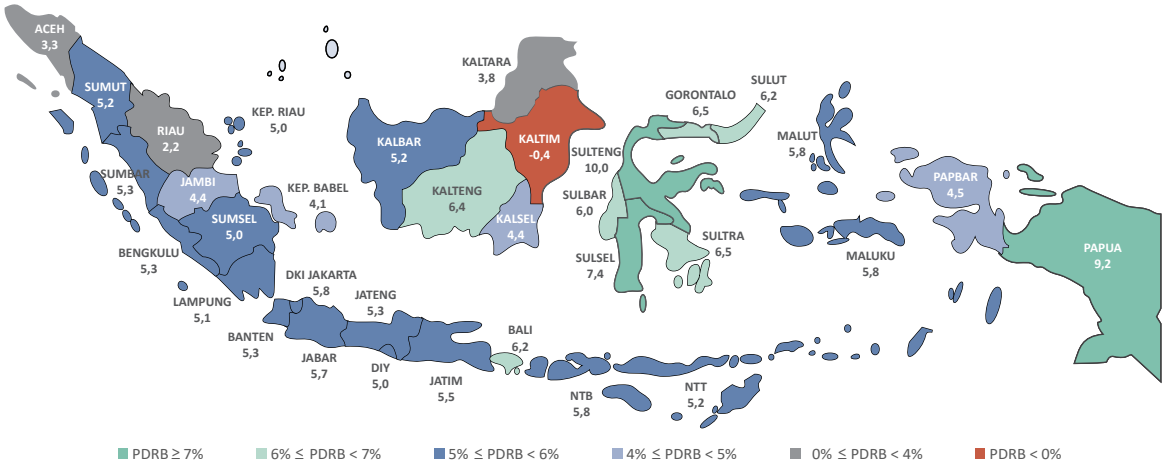

Sumber: BPS, diolah

ekonomi Sumatera terutama didorong oleh meningkatnya investasi dan membaiknya ekspor (Grafik 10.1). Investasi yang meningkat didukung oleh besarnya pengeluaran pemerintah pada paruh pertama 2016 sejalan dengan kegiatan proyek infrastruktur berskala besar seperti Jalan Tol Trans Sumatera, *Light Rapid Transit* (LRT) di Sumatera Selatan, dan pembangunan beberapa bandara udara di daerah Sumatera. Konsumsi pemerintah berbagai daerah di Sumatera di periode triwulan II 2016 secara agregat tumbuh hingga 6,8% (yoy), tertinggi sejak triwulan II 2013. Namun, peran konsumsi pemerintah kembali menurun dan tumbuh negatif di paruh kedua 2016 seiring dengan langkah konsolidasi fiskal yang ditempuh pemerintah.

Kinerja ekspor berbagai daerah di Sumatera membaik terutama di paruh kedua 2016 ditopang oleh ekspor antar daerah seiring dengan meningkatnya permintaan minyak sawit domestik untuk kebutuhan biodiesel. Ekspor ke luar negeri juga membaik didorong oleh beberapa komoditas berbasis sumber daya alam yang cukup dominan dalam ekspor Sumatera seperti kelompok bahan bakar mineral dan pelumas, kelompok bahan mentah, serta kelompok minyak nabati dan hewani (Grafik 10.2). Perkembangan ekspor yang positif tersebut pada gilirannya mendorong peran korporasi swasta melalui peningkatan investasi nonbangunan di paruh kedua 2016 ditengah peran stimulus fiskal yang terbatas. Peran konsumsi rumah tangga yang cukup kuat di berbagai daerah di Sumatera sepanjang tahun 2016 dapat menahan perlambatan kinerja konsumsi domestik akibat terbatasnya peran konsumsi pemerintah.

Dari sisi sektoral, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera pada 2016 didukung oleh membaiknya kinerja sektor *tradables* dan beberapa sektor *nontradables*. Perbaikan kinerja sektor *tradables* yakni pada Lapangan Usaha (LU) Pertambangan, LU Pertanian, dan LU Industri

Grafik 10.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Sisi Pengeluaran

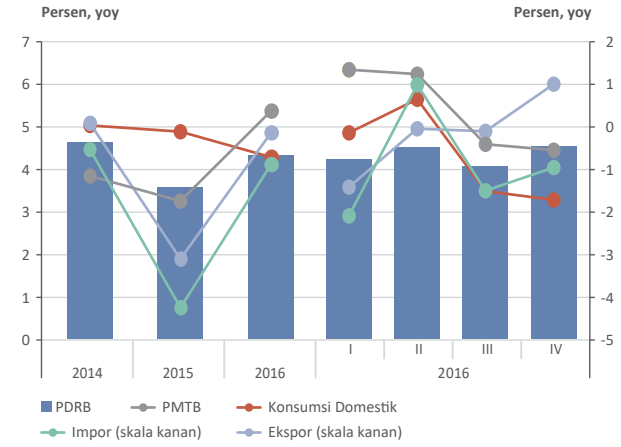

Sumber: BPS, diolah

Grafik 10.2. Pertumbuhan Ekspor Riil Komoditas Utama Sumatera

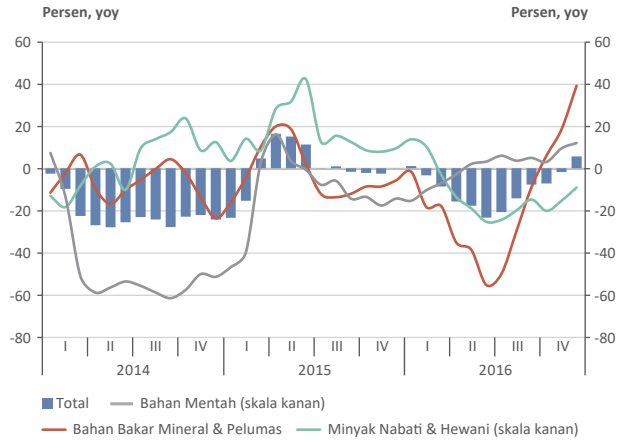

Sumber: Bank Indonesia

seiring dengan membaiknya ekspor di paruh kedua 2016. Meskipun demikian, fenomena iklim *El Nino* yang terjadi pada 2015 berimbas pada terbatasnya produksi perkebunan sehingga menahan perbaikan kinerja produksi LU Pertanian secara keseluruhan pada 2016. Sementara itu, beberapa sektor *nontradables* yang meningkat pada 2016 antara lain LU Konstruksi, LU Perdagangan, dan LU Jasa Keuangan. Meningkatnya kinerja beberapa sektor *nontradables* tersebut dipengaruhi oleh peningkatan investasi, khususnya investasi bangunan, yang terjadi di paruh pertama 2016 dan masih kuatnya peran konsumsi rumah tangga di berbagai daerah di Sumatera.

Perekonomian Jawa, yang memiliki pangsa paling besar dalam perekonomian nasional (58%), pada 2016 tumbuh sebesar 5,6%, sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,5%. Membaiknya pertumbuhan ekonomi Jawa didorong oleh meningkatnya kinerja ekonomi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta, sedangkan tiga provinsi lainnya tumbuh melambat. Membaiknya kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa bersumber dari menguatnya konsumsi domestik terutama konsumsi rumah tangga. Namun, peningkatan konsumsi domestik tertahan oleh menurunnya konsumsi pemerintah pada paruh kedua 2016 sejalan dengan konsolidasi fiskal yang ditempuh oleh Pemerintah (Grafik 10.3).

Kinerja ekspor Jawa mengalami perbaikan sejak awal tahun 2016 sehingga turut berkontribusi pada membaiknya ekonomi Jawa. Meningkatnya kinerja ekspor paling tinggi tercatat terjadi di Jawa Timur yakni sebesar 13,2%, didorong oleh meningkatnya ekspor antar daerah dan membaiknya permintaan produk manufaktur dari negara mitra dagang utama. Beberapa komoditas ekspor utama Jawa yang mencatat tren meningkat sejak awal tahun

Grafik 10.3. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Sisi Pengeluaran

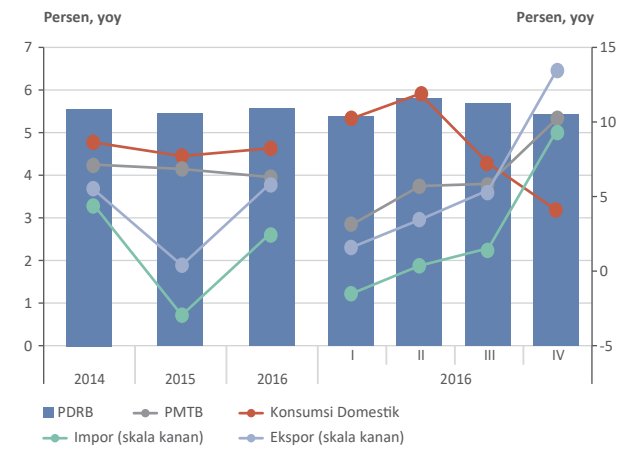

Sumber: BPS, diolah

2016 antara lain bahan kimia, serta minuman dan rokok (Grafik 10.4). Menguatnya konsumsi rumah tangga disertai perbaikan kinerja ekspor mendorong peningkatan investasi nonbangunan oleh korporasi swasta, terutama pada paruh kedua 2016, sehingga menopang kinerja investasi Jawa secara keseluruhan.

Menguatnya konsumsi domestik di Jawa berdampak positif pada meningkatnya kinerja beberapa sektor *nontradables* seperti LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Perkembangan ini sejalan dengan perbaikan penjualan ritel dan menguatnya aktivitas perdagangan antar daerah. Di samping itu, meningkatnya kapasitas infrastruktur telekomunikasi seluler di Jawa khususnya untuk layanan pita lebar disertai peningkatan penggunaan data seluler berdampak positif pada capaian pertumbuhan LU Informasi dan Komunikasi di Jawa. Sementara itu, kinerja LU Pertanian yang memiliki pangsa besar dalam perekonomian Jawa tumbuh stabil sebesar 3,3% pada 2016 didukung oleh capaian produksi pangan yang cukup baik di daerah sentra produksi. Di sisi lain, LU Industri dan LU Konstruksi justru tumbuh melambat dipengaruhi oleh masih relatif terbatasnya aktivitas pembangunan properti dan infrastruktur di 2016. Meski demikian, meningkatnya ekspor manufaktur dapat menopang kinerja LU Industri di Jawa.

Perekonomian wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 2,0% pada 2016, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,4%. Perbaikan laju pertumbuhan ekonomi terjadi di hampir seluruh provinsi di Kalimantan, termasuk kontraksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang membaik dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi satu-satunya yang tumbuh melambat pada tahun 2016. Pada awal paruh pertama 2016, perekonomian Kalimantan masih menghadapi tekanan seiring dengan masih terbatasnya perbaikan harga komoditas ekspor batubara dan menurunnya produksi gas di Kalimantan Timur (Grafik 10.5). Kinerja ekspor Kalimantan baru mulai kembali tumbuh positif pada triwulan II 2016, didukung oleh perbaikan ekspor batubara seiring dengan meningkatnya permintaan dari Tiongkok.

Perbaikan kinerja ekspor Kalimantan terus belanjut pada paruh kedua tahun 2016 sehingga menopang kinerja ekonomi Kalimantan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekspor di Kalimantan Timur bahkan mencapai 41,9% (yoy) pada triwulan IV 2016. Secara keseluruhan, perbaikan ekspor Kalimantan ditopang oleh kenaikan ekspor komoditas utama, khususnya batubara, pada paruh kedua 2016 seiring dengan meningkatnya harga di pasar global (Grafik 10.6). Membaiknya kinerja ekspor juga diikuti oleh meningkatnya investasi, terutama investasi nonbangunan oleh korporasi swasta yang mulai tumbuh positif pada

Grafik 10.4. Pertumbuhan Ekspor Riil Komoditas Utama Jawa

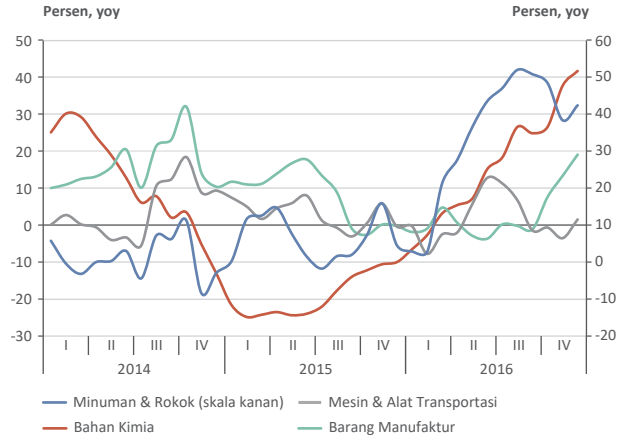

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 10.5. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Sisi Pengeluaran

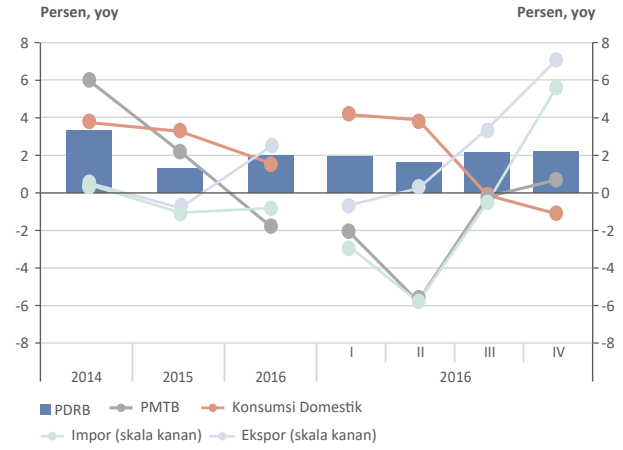

Sumber: BPS, diolah

Grafik 10.6. Pertumbuhan Ekspor Riil Komoditas Utama Kalimantan

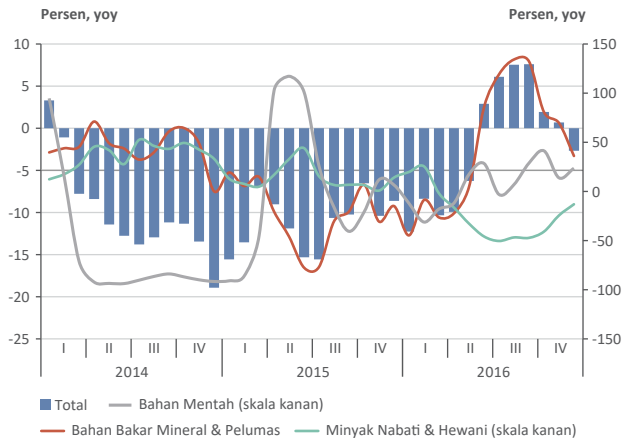

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 10.7. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia

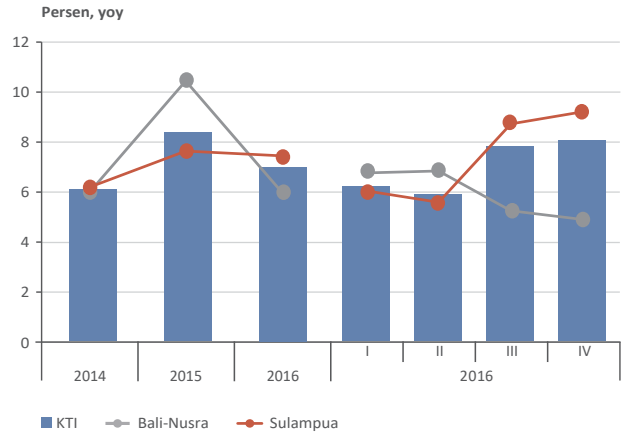

Sumber: BPS, diolah

triwulan III dan triwulan IV 2016. Di sisi lain, terbatasnya konsumsi pemerintah seiring dengan upaya konsolidasi fiskal menahan perbaikan investasi, khususnya investasi bangunan. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh melambat di hampir seluruh daerah di Kalimantan antara lain karena masih terbatasnya akselerasi dampak dari peningkatan kinerja ekspor.

Dari sisi sektoral, peningkatan kinerja sektor *tradables* mendukung perbaikan kinerja ekonomi Kalimantan pada 2016. Kinerja sektor *tradables* yang meningkat terutama LU Pertambangan dan LU Industri disebabkan oleh ekspor batubara yang membaik sejak triwulan II 2016 dan mulai beroperasinya pabrik smelter alumina baru di Kalimantan Barat. Selain itu, meningkatnya LU Industri di Kalimantan juga turut dipengaruhi oleh perbaikan kinerja produksi industri minyak sawit. Di sisi lain, kinerja sektor *nontradables* di Kalimantan masih tumbuh terbatas. Kinerja LU Konstruksi tumbuh melambat cukup dalam pada tahun 2016 seiring dengan terbatasnya proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Perekonomian KTI tercatat masih tumbuh cukup tinggi sebesar 7,0% pada 2016, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,4%. Melambatnya pertumbuhan KTI didorong oleh pertumbuhan ekonomi wilayah Sulampua dan Bali-Nusra yang melambat (Grafik 10.7). Beberapa daerah di Sulampua yang tumbuh melambat adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sementara itu, daerah di Bali-Nusra yang tumbuh melambat hanya terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara umum, perlambatan kinerja ekonomi KTI disebabkan oleh pertumbuhan ekspor yang melambat akibat masih berlanjutnya proses konsolidasi pelaku usaha dalam merespons upaya hilirisasi sektor pertambangan.

Pertumbuhan ekonomi KTI melambat terutama terjadi pada triwulan I dan triwulan II 2016. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh investasi yang menurun dan upaya konsolidasi terkait kendala teknis kegiatan produksi tambang di beberapa daerah basis produksi tambang seperti di Papua dan Nusa Tenggara Barat. Sebaliknya, konsumsi menguat terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga. Memasuki triwulan III dan IV 2016, konsumsi di wilayah KTI tumbuh melambat dipengaruhi oleh konsumsi pemerintah yang terbatas seiring langkah penghematan anggaran (Grafik 10.8). Sementara, perlambatan investasi dari triwulan I dan II 2016 masih berlanjut, terjadi baik pada investasi nonbangunan maupun bangunan. Investasi nonbangunan turun sejalan dengan kinerja di sektor tambang yang rendah, sedangkan penurunan investasi bangunan akibat terbatasnya proyek swasta maupun pemerintah. Sementara itu, kinerja ekspor mulai membaik di akhir paruh kedua 2016 didukung oleh kenaikan harga komoditas tambang dan upaya pelaku usaha untuk mengoptimalkan kuota ekspor tambang mineral di akhir tahun.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi KTI pada 2016 ditopang terutama oleh kinerja beberapa sektor *nontradables* yakni LU Perdagangan, LU Transportasi, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Perkembangan positif di ketiga LU tersebut sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga disertai meningkatnya aktivitas perdagangan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi KTI juga didukung oleh peningkatan kegiatan pariwisata di beberapa daerah basis pariwisata, seperti di Bali yang pada 2016 mencatat kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara hingga mencapai 23,1% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja LU Pengadaan Listrik di KTI pada 2016 juga tumbuh cukup tinggi didorong oleh mulai beroperasinya beberapa pembangkit listrik baru

Grafik 10.8. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia Sisi Pengeluaran

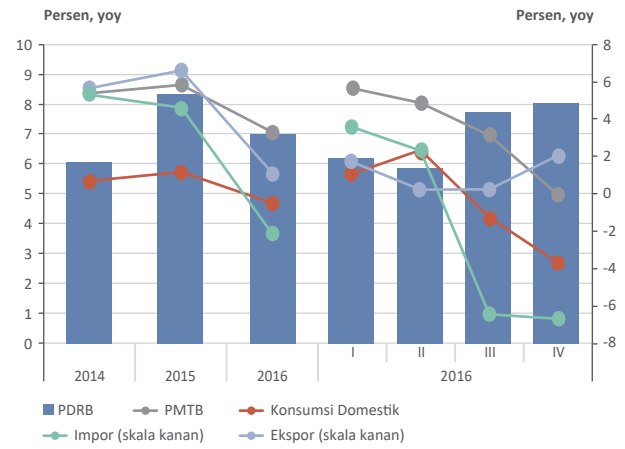

Sumber: BPS, diolah

di wilayah Sulampua dan Bali-Nusra. Di sisi lain, sektor *tradables* terutama LU Pertambangan dan LU Industri di wilayah Sulampua dan Bali-Nusra tumbuh terbatas pada 2016. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh masih terbatasnya perbaikan kinerja ekspor dan adanya kendala teknis yang dihadapi sejumlah daerah penghasil tambang seperti di Nusa Tenggara Barat dan Papua.

Dinamika perekonomian di berbagai daerah sepanjang 2016 menunjukkan momentum pemulihan ekonomi masih dihadapkan pada besarnya tantangan struktural di daerah. Tingginya ketidakpastian global diikuti oleh fluktuasi harga komoditas memberi implikasi pada keterbatasan perbaikan ekonomi daerah, terutama daerah yang mengandalkan ekspor komoditas primer/sumber daya alam. Tantangan struktural di daerah juga tidak terlepas dari belum meratanya ketersediaan infrastruktur pendukung antar daerah, baik infrastruktur konektivitas maupun energi.[1] Untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi daerah, diperlukan langkah-langkah terintegrasi dalam mendorong reformasi ekonomi dengan mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Terdapat tiga tantangan struktural di daerah yang perlu diatasi untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, ekonomi daerah perlu mengupayakan pengalihan pendapatan ekspor dari berbasis komoditas primer kepada berbasis tahap pengolahan (hilirisasi) sehingga dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi. Kedua, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti sektor maritim dan sektor pariwisata yang memiliki potensi sebagai salah satu basis sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiga, pemerintah daerah perlu melakukan upaya strategis penataan pengembangan wilayah perkotaan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Peran perkotaan yang strategis dalam menopang dan memberikan umpan balik bagi akselerasi perekonomian daerah membutuhkan daya dukung yang mencukupi baik secara kualitas maupun kuantitas, salah satunya melalui pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan (Lihat Boks 10.1).

Kondisi Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Regional

Pada tahun 2016, pertumbuhan angkatan kerja di hampir seluruh daerah meningkat disertai dengan kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja. Peningkatan pertumbuhan angkatan kerja paling tinggi terjadi di wilayah Kalimantan, diikuti Sumatera dan Jawa. Sementara itu, pertumbuhan angkatan kerja di KTI tumbuh melambat karena melambatnya pertumbuhan angkatan kerja di wilayah Sulampua (Grafik 10.9). Kenaikan pertumbuhan angkatan kerja di beberapa daerah tersebut disertai dengan perbaikan tingkat partisipasi angkatan kerja. Di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja cukup tinggi terutama didorong oleh meningkatnya pekerja informal, baik yang sifatnya bekerja sendiri maupun dibantu buruh tidak tetap. Meski demikian, terdapat beberapa daerah yang mencatat angkatan kerja yang menurun yakni Jawa Timur (-1,6%), Papua (-1,1%), dan Sumatera Utara (-0,4%). Menurunnya angkatan kerja di tiga daerah tersebut juga diikuti tingkat partispasi angkatan kerja yang menurun.

Meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja juga diikuti oleh membaiknya tingkat pengangguran di sebagian besar daerah. Hal ini didukung oleh perbaikan ekonomi

Grafik 10.9. Pertumbuhan Angkatan Kerja Regional

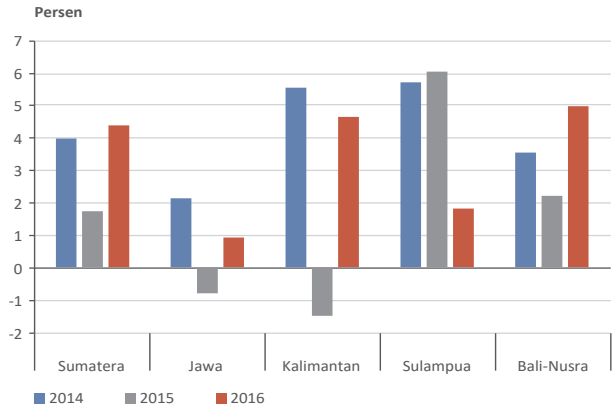

Sumber: BPS, diolah

1 Kajian Growth Diagnostics di 22 provinsi oleh Bank Indonesia pada tahun 2016.

yang mulai berlangsung sehingga dapat mendukung penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Perbaikan tingkat pengangguran terutama terjadi di KTI yakni di wilayah Bali-Nusra dan Sulampua, serta di wilayah Sumatera yang pada 2016 masing-masing tercatat sebesar 3,0%, 4,4%, dan 5,4%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,8% di Bali-Nusra, 5,6% di Sulampua, dan 6,5% di Sumatera (Grafik 10.10). Perbaikan tingkat pengangguran di KTI terjadi di seluruh provinsi karena meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor jasa kemasyarakatan, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Di Sumatera, perbaikan tingkat pengangguran terjadi di hampir seluruh provinsi dengan perbaikan terbesar terjadi di Bangka Belitung, Aceh, dan Sumatera Barat karena meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau justru meningkat terutama karena turunnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Membaiknya tingkat pengangguran juga terjadi di hampir seluruh daerah di Jawa, sedangkan tingkat pengangguran di Kalimantan justru meningkat terkait kinerja pertambangan yang masih terbatas. Perbaikan tingkat pengangguran di Jawa didukung oleh penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan, transportasi dan keuangan yang mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik dibanding sektor utama lainnya sepanjang tahun 2016. Namun, masih relatif terbatasnya kinerja manufaktur berdampak pada tingkat pengangguran di Jawa Barat yang justru meningkat. Di Kalimantan, sebagian besar daerah juga mengalami peningkatan angka pengangguran terbuka, kecuali Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Meningkatnya angka pengangguran di Kalimantan dipengaruhi oleh masih terbatasnya kinerja pertambangan yang cukup dominan dalam aktivitas perekonomian Kalimantan. Perbaikan angka pengangguran di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara lebih ditopang oleh penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan. Secara nasional, sebaran tingkat pengangguran antardaerah menunjukkan perbaikan pada tahun 2016 (Grafik 10.11).

Sejalan dengan menurunnya pengangguran, tingkat kesejahteraan penduduk di sebagian besar daerah membaik. Beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku mencatat tingkat kemiskinan yang menurun pada tahun 2016. Penurunan jumlah penduduk miskin paling besar terjadi di Jawa sebesar 479,5 ribu orang. Meski demikian, jumlah penduduk miskin di Jawa masih merupakan yang terbesar yaitu 14,83 juta jiwa atau 53,4% dari keseluruhan penduduk miskin secara nasional (Grafik 10.12). Secara umum, penurunan jumlah penduduk miskin lebih banyak terjadi di perdesaan, kecuali di Kalimantan yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin lebih banyak terjadi di perkotaan.

Membaiknya tingkat kemiskinan di berbagai daerah turut dipengaruhi oleh terkendalinya inflasi sepanjang tahun 2016. Hal ini tercermin dari perubahan garis kemiskinan yang cenderung melambat di tahun 2016 sejalan dengan perkembangan inflasi yang rendah. Melambatnya perubahan garis kemiskinan terutama terjadi di berbagai daerah di Jawa, baik di tingkat perdesaan (3,9%, yoy) maupun perkotaan (4,1%, yoy). Secara rata-rata, garis kemiskinan di Jawa pada September 2016 tercatat sebesar Rp376.381 per kapita/bulan untuk di perkotaan dan Rp334.302 per kapita/bulan untuk di perdesaan. Di Kalimantan, meskipun perubahan garis kemiskinan juga tumbuh melambat, namun masih lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Pada September 2016, garis kemiskinan di Kalimantan secara rata-rata tercatat sebesar Rp439.500 per kapita/bulan untuk di perkotaan dan Rp432.495 per kapita/

Grafik 10.10. Tingkat Pengangguran Regional

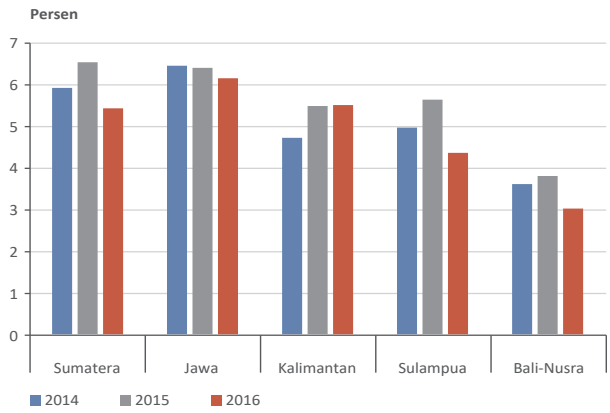

Sumber: BPS, diolah

Grafik 10.11. Disparitas Tingkat Pengangguran Regional

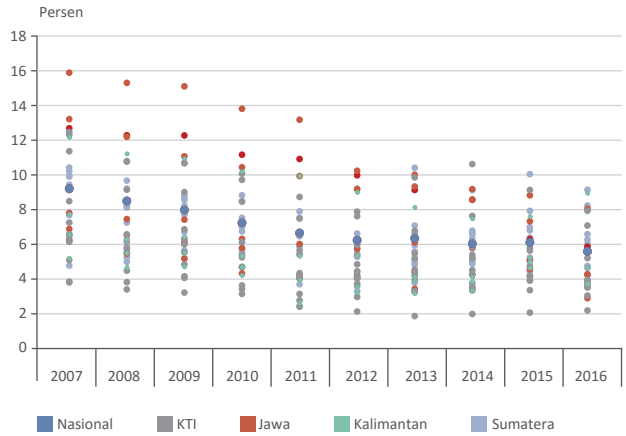

Sumber: BPS, diolah

Grafik 10.12. Jumlah Penduduk Miskin Regional

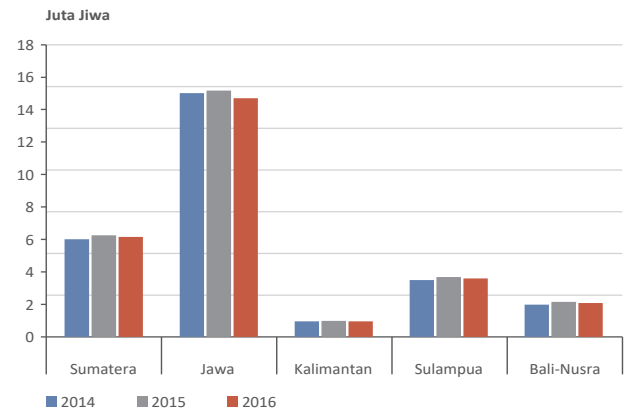

Sumber: BPS, diolah

bulan untuk di perdesaan. Membaiknya tingkat kemiskinan ditengarai turut ditopang oleh berkembangnya sektor informal, terindikasi dari adanya penyerapan angkatan kerja pada kategori berusaha sendiri dan indikasi bertambahnya penambahan jumlah wirausahawan.[2]

Ketimpangan pendapatan antar penduduk yang tercermin dari rasio Gini juga mengalami perbaikan pada 2016. Perbaikan tersebut terutama terjadi di seluruh daerah di Jawa dan Sumatera, kecuali Jawa Barat, Aceh, dan Kepulauan Bangka Belitung yang belum menunjukkan adanya perubahan rasio Gini. Meskipun membaik, namun rasio Gini di Jawa secara umum masih lebih tinggi dibanding daerah lainnya (Grafik 10.13). Sementara rasio Gini di berbagai daerah di Kalimantan dan KTI secara umum belum menunjukkan adanya perbaikan. Penurunan angka rasio Gini di dua wilayah ini terjadi di daerah yang justru tengah menghadapi tantangan keterbatasan perbaikan aktivitas sektor tambang seperti Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan tingkat kesenjangan lebih dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan di kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi.

10.2. Inflasi Regional

Dinamika Inflasi Regional

Perkembangan inflasi daerah mendukung tercapainya sasaran inflasi nasional dalam kisaran sasaran 4±1% yakni sebesar 3,02%. Berbagai daerah di Jawa mencatat inflasi yang cukup rendah yakni berada di bawah 3% pada akhir 2016, termasuk Jakarta yang memiliki pangsa cukup besar dalam pembentukan inflasi nasional dengan inflasi sebesar 2,37% (Gambar 10.2). Berbagai daerah di Kalimantan dan KTI juga mencatat inflasi cukup rendah. Beberapa daerah di KTI seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara bahkan tercatat mengalami inflasi di bawah 2%. Di sisi lain, sebagian besar daerah di Sumatera justru mengalami tekanan kenaikan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Inflasi di beberapa daerah di Sumatera bahkan berada di atas 5% seperti di Kepulauan Bangka Belitung (6,75%), Sumatera Utara (6,34%), dan Bengkulu (5,00%).

Grafik 10.13. Rasio Gini Daerah 2016

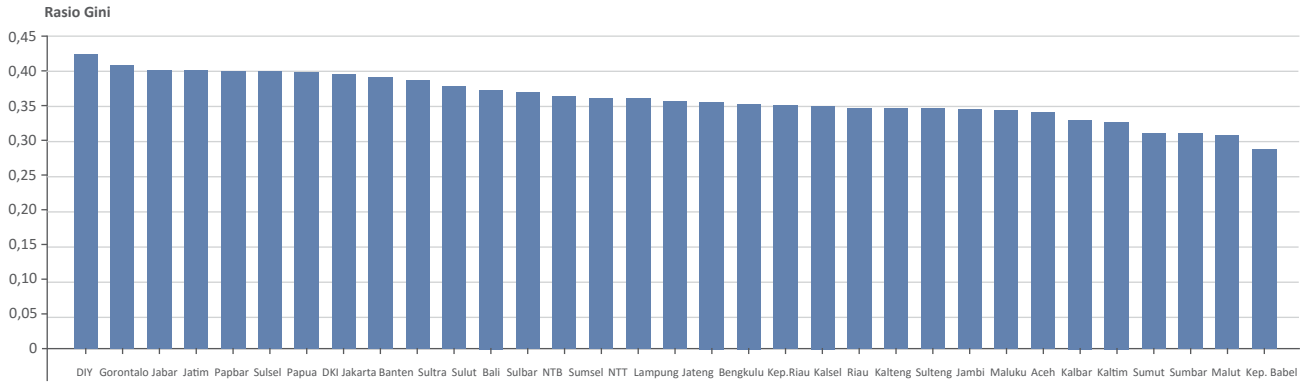

Sumber: BPS, diolah

2 Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 Badan Pusat Statistik, jumlah wirausahawan nonpertanian meningkat sekitar 17,6% dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2006 menjadi 26,7 juta jiwa.

Gambar 10.2. Peta Inflasi Daerah Tahun 2016

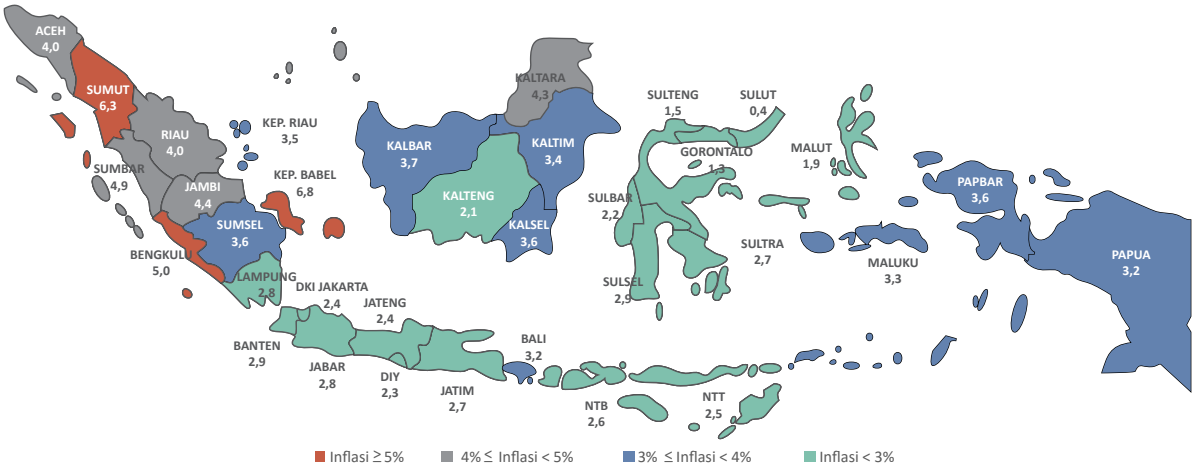

Sumber: BPS, diolah

Terkendalinya inflasi di berbagai daerah pada 2016 dipengaruhi oleh permintaan domestik yang relatif menurun, terjaganya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi, dan cenderung menguatnya nilai tukar rupiah. Koreksi harga beberapa komoditas *administered prices* pada 2016 seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan antar kota dan kereta api juga berpengaruh positif bagi terkendalinya inflasi. Selain itu, penundaan rencana kebijakan energi Pemerintah seperti kenaikan tarif tenaga listrik daya 900 Volt-Ampere (VA) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg juga mengurangi tekanan kenaikan inflasi di seluruh daerah.

Capaian inflasi pada 2016 di sebagian besar daerah merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Wilayah Sulampua mencatat inflasi terendah dibanding wilayah lainnya yakni sebesar 2,46%, diikuti Jawa (2,59%), Bali-Nusra (2,93%), Kalimantan (3,40%), dan Sumatera (4,53%) (Grafik 10.14). Beberapa daerah di Sulampua seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat pada empat bulan pertama tahun 2016 secara berturut-turut bahkan tercatat mengalami deflasi setiap bulannya sejalan dengan kebijakan penurunan tarif listrik dan harga bahan bakar. Penurunan harga bahan bakar tersebut lebih lanjut diikuti oleh penurunan tarif angkutan pada April hingga Juli 2016. Kebijakan penurunan tarif listrik dan bahan bakar minyak, yang diikuti penurunan tarif angkutan berdampak pada penurunan tekanan inflasi yang cukup merata di seluruh daerah pada periode paru pertama 2016. Sementara itu, inflasi berbagai komoditas yang masuk dalam kelompok inti seperti emas perhiasan, biaya sekolah, dan kontrak rumah di seluruh daerah relatif stabil. Terkendalinya inflasi inti tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia dalam mengelola permintaan domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan ekspektasi inflasi.

Minimalnya tekanan inflasi berbagai daerah pada paruh pertama 2016 turut dipengaruhi oleh terjaganya pasokan pangan. Panen raya di berbagai daerah sentra produksi padi pada April-Mei 2016, disertai cukup meningkatnya pasokan komoditas daging ayam dan telur ayam ras mendorong inflasi yang rendah pada paruh pertama 2016. Produksi beras di beberapa daerah sentra mengalami peningkatan dibanding 2015, ditengah terjadinya fenomena *La Nina* sepanjang 2016.[3] Peningkatan produksi beras yang cukup besar antara lain terjadi di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Timur. Sementara itu,

Grafik 10.14. Perkembangan Inflasi Regional 2012-2016

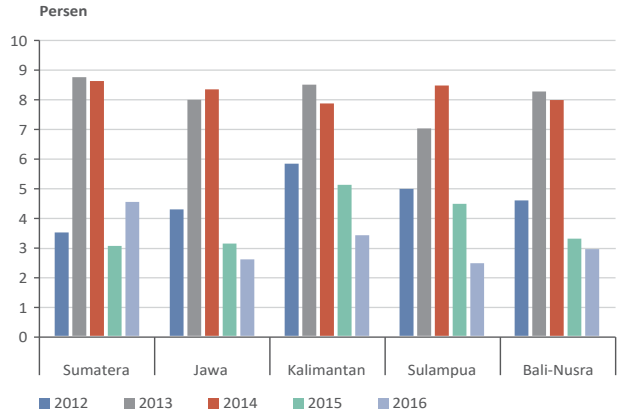

Sumber: BPS, diolah

3 Kementerian Pertanian merilis pra angka ramalan (pra ARAM II) pada akhir Desember 2016 yang menunjukkan kenaikan produksi padi 2016 mencapai 79,14 juta ton GKG, meningkat 3,74 juta ton dibanding 2015. Kenaikan produksi padi tahun 2016 yang relatif besar terjadi di Sumatera Selatan (21,81%), Jawa Barat (6,83%), Sulawesi Selatan (7,66%), Lampung (11,13%), Jawa Timur (2,93%), Sumatera Utara (8,86%), Jambi (48,13%), Kalimantan Barat (15,21%), Banten (7,56%) dan Kalimantan Selatan (7,67%)

pasokan ayam di berbagai daerah pada paruh pertama 2016 juga meningkat seiring terjaganya pasokan *day old chick* (DOC). Meskipun demikian, tekanan inflasi pangan tetap terjadi dari beberapa komoditas hortikultura seperti bawang merah dan aneka cabai karena terkendalanya pasokan dari beberapa daerah sentra utama.

Tekanan kenaikan inflasi di berbagai daerah kembali meningkat pada akhir paruh pertama 2016 dan berlanjut pada paruh kedua dipicu oleh kenaikan harga-harga komoditas pangan. Kenaikan inflasi pada akhir paruh pertama 2016 dipengaruhi oleh pola musiman menjelang HBKN Idul Fitri yang juga diikuti dengan naiknya tarif angkutan udara dan angkutan antar kota. Pada Juni 2016, yang merupakan periode puncak menjelang HBKN, kenaikan inflasi angkutan udara cukup tinggi terjadi di Papua (34,24%), Bengkulu (28,40%), dan Jawa Barat (27,19%). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tekanan inflasi pada periode HBKN pada 2016 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Hal ini merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah di tingkat pusat dan daerah disertai dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menghadapi potensi gejolak harga pada periode HBKN. Koordinasi di tingkat pusat dan daerah melalui forum TPI dan TPID difokuskan pada aspek penguatan pasokan dan kelancaran distribusi, antara lain melalui penguatan pasokan dari berbagai sumber.

Memasuki paruh kedua 2016, dinamika inflasi di berbagai daerah tetap terkendali walaupun tekanan inflasi pangan cenderung meningkat. Pasca Idul Fitri, tekanan inflasi di berbagai daerah kembali menurun pada periode Juli-Agustus 2016 sejalan dengan penurunan berbagai harga komoditas pangan dan tarif angkutan. Harga komoditas pangan pasca Idul Fitri pada 2016 mengalami koreksi yang cukup signifikan karena dibarengi dengan adanya masa panen beberapa komoditas pangan di beberapa sentra produksi. Tekanan kenaikan inflasi tetap terjadi bersumber dari kenaikan harga beberapa komoditas hortikultura, terutama cabai merah dan bawang merah. Kenaikan harga cabai merah yang terus berlanjut sejak awal tahun 2016 mendorong kenaikan tekanan inflasi pangan di Sumatera (Grafik 10.15). Meningkatnya harga cabai merah tersebut disebabkan oleh adanya gangguan produksi karena faktor cuaca dan virus kuning di sejumlah sentra produksi cabai merah di Sumatera Utara. Kenaikan tekanan inflasi pangan yang lebih besar di Sumatera menyebabkan secara keseluruhan tingkat inflasi Sumatera pada tahun 2016 berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya (Grafik 10.15).

Tantangan Pengendalian Inflasi Regional

Tantangan utama pengendalian inflasi daerah sepanjang 2016 masih terkait dengan produksi dan logistik pangan. Inflasi pangan masih menjadi pemicu kenaikan inflasi yang lebih tinggi di beberapa daerah terutama di Sumatera. Secara umum, beberapa tantangan pengendalian inflasi pangan di daerah antara lain bersumber dari daya dukung kapasitas infrastruktur penunjang produksi pangan dan logistik yang belum memadai, tingginya ketergantungan produksi pangan pada faktor iklim dan cuaca, dan tingginya alih fungsi lahan. Selain itu, kualitas infrastruktur logistik yang belum merata di setiap daerah menyebabkan masih tingginya biaya transportasi dalam logistik.

Keterbatasan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang produksi pangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya produktivitas pangan. Rendahnya kapasitas infrastruktur pertanian tercermin dari luas lahan irigasi teknis dan kemampuan waduk yang masih relatif minim dibandingkan kebutuhan pengairan lahan pertanian. Persentase kerusakan sistem irigasi di berbagai daerah juga masih cukup tinggi. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan sekitar 3 juta hektar saluran irigasi (dari 7,3 juta hektar) perlu masuk program rehabilitasi. Kemampuan waduk yang tersedia saat ini juga baru mampu mengairi 760 ribu hektar sawah dari total luas sawah mencapai 7,1 juta hektar.

Perbedaan daya dukung infrastruktur logistik antar daerah menyebabkan inefisiensi logistik dan memengaruhi aliran pasokan pangan dan masih besarnya disparitas harga pangan antar daerah. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh faktor *empty backhaul* yang terjadi pada jenis transportasi laut karena belum meratanya skala ekonomi antar daerah. Di samping itu, daya dukung infrastruktur dan layanan

Grafik 10.15. Perbandingan Antar Wilayah Inflasi Kelompok Bahan Makanan

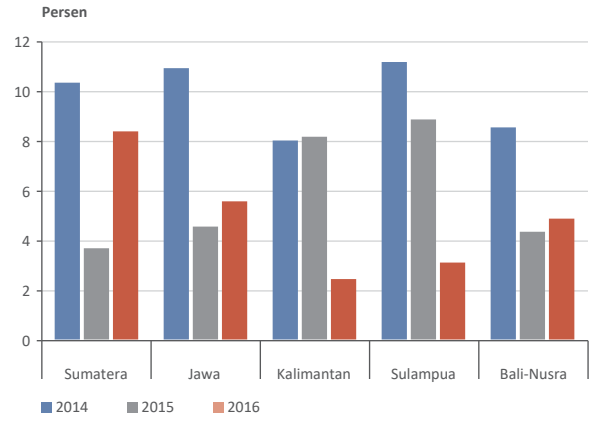

Sumber: BPS, diolah

pelabuhan yang belum merata, termasuk terkait dengan kedalaman alur laut pelabuhan, kapasitas *handling*, dan biaya turut berkontribusi pada tingginya biaya logistik melalui laut. Hal ini menyebabkan sebagian pelabuhan di Sumatera lebih berfungsi sebagai *feeder* bagi pelabuhan di Singapura (*transhipment* ke Singapura dibandingkan *direct shipping*). Rasio ketersediaan jalan sebagai pendukung transportasi darat juga belum cukup optimal sehingga menyebabkan masih terbatasnya aksesibilitas antar daerah produsen pangan dengan daerah konsumen.

Pola produksi komoditas pertanian di daerah yang masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap faktor iklim dan cuaca berdampak pada rentannya kesinambungan pasokan pangan antar waktu di daerah. Pola tanam daerah yang masih bersifat tradisional dan belum mengoptimalkan penggunaan teknologi merupakan penyebab tingginya ketergantungan produksi pangan terhadap faktor iklim. Kondisi ini seringkali menyebabkan terjadinya kegagalan panen karena faktor kekeringan, bencana alam, ataupun serangan hama. Pola produksi pangan yang cenderung masih bersifat tradisional menyebabkan peningkatan pertumbuhan produksi pangan hanya dapat mengandalkan peningkatan luas areal panen, baik melalui perluasan areal sawah maupun peningkatan intensitas pertanaman.[4]

Persoalan tingginya alih fungsi lahan produktif pertanian juga merupakan tantangan bagi kesinambungan produksi pangan di daerah. Di Jawa yang merupakan daerah penghasil utama pertanian, luas lahan pertanian justru cenderung terus menurun dari 5,6 juta Ha pada tahun 2002 menjadi 3,3 juta Ha pada tahun 2014 . Perubahan fungsi lahan ini umumnya terjadi dari lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, industri atau pemukiman. Kondisi ini pada gilirannya berdampak pada capaian produksi pangan. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 telah secara tegas mengatur mengenai alih fungsi lahan. Namun, di sisi lain Kementerian Pertanian mencatat belum semua kabupaten/kota yang mengadopsi aturan lahan pertanian pangan berkerlanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, penguatan infrastruktur logistik dan penunjang produksi pangan merupakan prioritas utama dalam menjamin stabilitas harga pangan daerah ke depan. Percepatan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur penunjang produksi pangan sangat diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan, yang diprioritaskan berasal dari hasil pertanian domestik. Koordinasi pengendalian inflasi dalam TPID perlu diarahkan untuk turut mengawal upaya penguatan kapasitas produksi dan logistik pangan daerah, dan turut berupaya mengatasi persoalan inflasi yang bersifat struktural. Dalam jangka pendek, TPID perlu mendorong penguatan kerjasama perdagangan antar daerah guna mendukung kesinambungan pasokan antar waktu dan antar daerah. Hal ini terkait dengan kondisi surplus defisit pangan antar daerah serta kesinambungan produksi yang berpengaruh pada tata niaga pangan. Kerjasama antar daerah juga perlu dioptimalkan sebagai sarana dalam memasarkan produk hasil pertanian masing-masing daerah.

10.3. Fiskal Daerah

Postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 secara agregat lebih tinggi dibandingkan APBD tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan meningkat sebesar 14,5%, lebih tinggi dibandingkan peningkatan anggaran belanja yang sebesar 13,6%. Hal tersebut menyebabkan defisit APBD tahun 2016 menjadi sedikit lebih kecil (Tabel 10.1). Peningkatan postur APBD terjadi diseluruh daerah, dengan peningkatan paling tinggi pada APBD daerah-daerah di wilayah Jawa dan KTI seperti Jawa Barat, Banten, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.[5]

Peningkatan APBD di sisi pendapatan ditopang oleh meningkatnya Dana Perimbangan (16,2%), khususnya komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) yang naik hampir tiga kali lipat. Kenaikan Dana Perimbangan (Daper) dalam APBD tersebut didorong alokasi transfer daerah dan dana desa pada APBN-P 2016 yang meningkat 24,6% dibandingkan realisasi 2015 menjadi Rp776,3 triliun. Jumlah alokasi transfer ke daerah tersebut lebih besar jika dibandingkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebesar Rp767,8 triliun. Alokasi Dana Desa juga meningkat menjadi Rp47 triliun, jauh lebih tinggi dibanding realisasi pada 2015 yang sebesar Rp20,76 triliun. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan (-31,5%), terutama DBH SDA Pertambangan Migas dan Umum akibat penurunan kinerja sektor pertambangan minyak dan batubara sejak 2015.

Di sisi belanja, alokasi belanja modal pada APBD 2016 secara agregat mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan belanja modal terkait pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi belanja modal terbesar terjadi di KTI

4 Bappenas mengestimasi laju pertumbuhan produksi padi di Indonesia selama lima tahun terakhir lebih banyak dikontribusi oleh pertumbuhan luas panen (65,28%), sedangkan sisanya dikontribusi oleh pertumbuhan produktivitas yaitu 34,72% (dihitung dari data FAO 2014)

5 Merupakan agregasi data APBD provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya

(yang naik lebih dari 30%), terutama di daerah Sulawesi Selatan (51%), Nusa Tenggara Timur (47%), Kalimantan Selatan (22%), dan Papua (15%). Selain itu, alokasi belanja transfer juga naik signifikan di seluruh daerah seiring kebutuhan transfer terkait Dana Desa. Di sisi lain, porsi alokasi belanja pegawai masih cukup besar sehingga alokasi APBD untuk pembangunan daerah cenderung masih terbatas.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi pendapatan daerah pada 2016 lebih rendah dibanding 2015 karena terbatasnya pencapaian penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi yang belum cukup kuat menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak cenderung terbatas (Gambar 10.3). Penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dalam transfer daerah juga menurun, terutama DBH Pajak. Sementara itu, DBH sumber daya alam (SDA) mulai membaik terutama di wilayah Kalimantan dan KTI, seiring perbaikan kinerja sektor utama dan naiknya harga komoditas ekspor utama seperti minyak, batubara, minyak kelapa sawit, tembaga, emas, dan nikel.

Komponen pendapatan daerah lainnya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar terjadi di wilayah Kalimantan dan KTI. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sejalan dengan penerapan pengaturan pola penyaluran DAU yang dikaitkan dengan kewajaran posisi saldo dana pemerintah daerah.[6] Secara umum, peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. Peraturan tersebut memungkinkan penyaluran transfer ke daerah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dalam hal posisi dana yang dimiliki Pemerintah Daerah melebihi batasan tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.[7] Penerapan aturan ini mendorong menurunnya posisi dana Pemerintah Daerah di perbankan pada akhir 2016. Kendati demikian, lebih rendahnya *outstanding* dana pemerintah daerah tersebut dapat juga dipengaruhi oleh penurunan pendapatan daerah.

Langkah penghematan anggaran yang ditempuh Pemerintah pada paruh kedua 2016, turut memengaruhi transfer daerah dalam bentuk DAU. Pemerintah melakukan penundaan transfer DAU bagi 169 daerah, yang terdiri dari 26 provinsi dan 143 kabupaten/kota, hingga sebesar Rp19,42 triliun, atau sekitar 5,04% dari total alokasi DAU 2016.[8] Terdapat tiga kriteria yang digunakan untuk penentuan penundaan transfer DAU tersebut, yakni kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan perkiraan posisi saldo kas daerah pada akhir 2016. Beberapa daerah di Kawasan Timur Indonesia cukup terdampak karena ketergantungan yang tinggi terhadap DAU. Secara keseluruhan, dampak penundaan DAU relatif terbatas terhadap perekonomian karena jumlah penundaan DAU yang relatif minim dibandingkan alokasi DAU secara keseluruhan. Selain itu, beberapa daerah yang mengalami penundaan transfer DAU juga melakukan optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) dan pendapatan daerah yang ada.

Dari sisi belanja, realisasi belanja Pemerintah Daerah secara agregat pada 2016 lebih rendah dibandingkan 2015. Realisasi belanja di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan KTI tertahan terutama belanja modal terkait berbagai kendala pembangunan proyek infrastruktur. Kendala tersebut diantaranya masalah pembebasan lahan serta aspek administratif lainnya terkait pembangunan

Tabel 10.1. Postur APBD Agregat Tahun 2016

Triliun rupiah

Uraian	2015	2016*
A. Pendapatan	898,5	1.028,4
1.1 Pendapatan Asli Daerah	214,5	229
1.1.1 Pajak Daerah	154,1	160
1.1.2 Retribusi Daerah	12,5	11,7
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,9	7,6
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40,9	49,7
1.2 Transfer	659,2	732,4
1.2.1 Dana Perimbangan	536,5	623,5
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil	145,6	99,7
1.2.1.2 Dana Alokasi Umum	355,3	382,4
1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus	35,5	141,3
1.2.2 Otsus dan Penyesuaian	122,7	108,9
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24,9	67
B. Belanja	958,1	1.088
2.1 Belanja Pegawai	371,1	400,6
2.2 Belanja Barang dan Jasa	202,3	222,2
2.3 Belanja Modal	222,1	248,7
2.4 Belanja Bansos dan Hibah	55,9	67,3
2.5 Belanja Transfer	39,6	144,1
2.6 Belanja Lainnya	67,1	5
Surplus (Defisit) (A-B)	-59,63	-59.56

*Angka agregat sementara yang tersedia di Kemenkeu per Mei 2016
Sumber: Kemenkeu, diolah

6 PMK No. 235/PMK.07/2015 sebagaimana telah disesuaikan dengan PMK No.93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai.

7 Posisi Kas Tidak wajar adalah selisih lebih posisi kas dan setara kas setelah dikurangi dengan belanja operasi dan belanja modal 3 bulan berikutnya, serta memperhatikan volume APBD, alokasi DBH atau DAU atau faktor lainnya yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah.

8 PMK No.125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016

Gambar 10.3. Realisasi Belanja Daerah

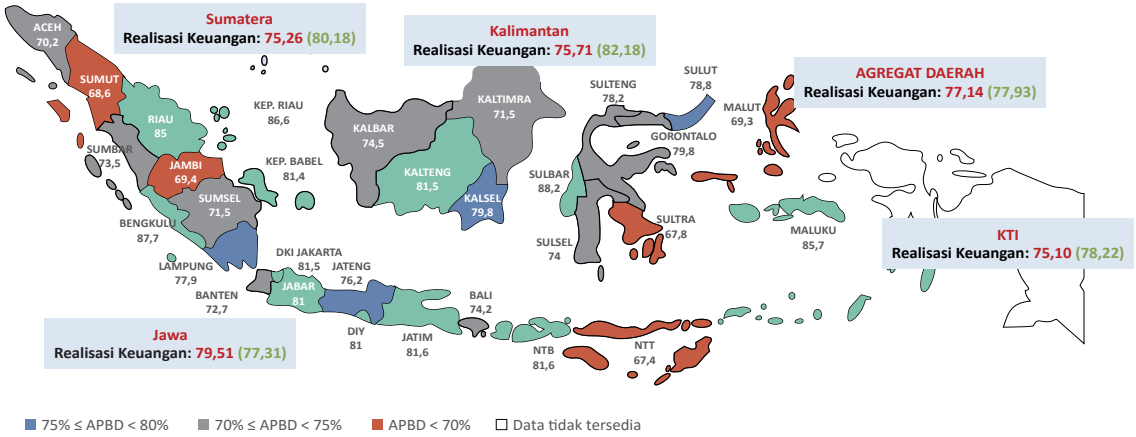

Sumber: Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA), diolah

proyek. Sejumlah daerah yang mencatat realisasi belanja rendah adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Maluku Utara, dan Jambi. Penyerapan belanja Pemerintah Daerah lebih banyak ditopang untuk pengeluaran belanja barang dan jasa, terutama di Jawa. Sementara itu, belanja transfer terkait Dana Desa secara agregat juga telah mencapai 99% sehingga berkontribusi pada kinerja realisasi belanja di berbagai daerah.

Tantangan Fiskal Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh fiskal daerah terutama terkait dengan pendapatan yang masih bergantung pada dana perimbangan dan belum optimalnya realisasi belanja Pemerintah Daerah. PAD masih belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan belanja di sebagian besar daerah. Pada 2016, penurunan DBH di daerah yang memiliki ketergantungan pada ekspor SDA turut menekan PAD di berbagai daerah, terutama daerah di luar Jawa seperti Kalimantan Timur, Papua dan Kepulauan Riau. Secara berurutan, rasio PAD terhadap PDRB dari yang terendah adalah wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan KTI. Transfer ke daerah yang meningkat signifikan pada 2016 belum diimbangi optimalisasi realisasi belanja oleh pemerintah daerah. Dalam tataran teknis, berbagai masalah pencairan belanja daerah disebabkan oleh keterlambatan pengajuan tagihan terkait disiplin administrasi, kualifikasi SDM pengadaan barang/jasa, penundaan atau kegagalan proses lelang, serta adanya prasyarat tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan yang belum terpenuhi.

Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong percepatan penyerapan belanja APBD pada 2016. Penerapan peraturan tentang konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai, berimplikasi positif bagi pengelolaan keuangan daerah. Melalui peraturan tersebut, terdapat upaya untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif, sehingga dapat mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu untuk mempercepat pembangunan daerah. Hal tersebut juga akan mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah yang tidak wajar. Selain itu, berbagai percepatan pengesahan administrasi terkait anggaran, revisi aturan pengadaan, percepatan lelang proyek infrastruktur, upaya pengetatan monitoring realisasi dan saldo anggaran secara berkala bersama dengan gubernur di level provinsi serta optimalisasi teknologi untuk mempercepat pengadaan (*e-catalog*/LKPP dan *e-procurement*) juga turut mendorong perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Stabilitas Keuangan Regional

Perkembangan penyaluran kredit di daerah secara umum masih belum cukup kuat. Penyaluran kredit perbankan di daerah lebih ditopang oleh kredit kepada sektor rumah tangga seiring dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga, sementara ekspansi kredit ke sektor korporasi belum cukup kuat seiring upaya konsolidasi internal pelaku usaha. Di samping itu, risiko kredit yang tercermin dari *Non Performing Loan* (NPL) mengalami peningkatan meski masih berada di bawah 5%. Melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit terjadi di seluruh wilayah terutama di wilayah Bali-Nusra dan di Kalimantan yang bahkan masih mencatat pertumbuhan negatif terkait dengan masih terbatasnya pemulihan aktivitas di pertambangan. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh meningkat

di hampir seluruh wilayah, kecuali di Bali-Nusra dan Sulampua.

Penyaluran kredit perbankan di daerah hingga akhir 2016 secara umum menunjukkan perlambatan seiring dengan konsolidasi pelaku usaha. Melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit kepada korporasi paling dalam terjadi di KTI, yang turun dari 20,6% pada 2015 menjadi 9,4% pada 2016 (Grafik 10.16). Hal ini terutama disebabkan oleh melambatnya penyaluran kredit ke lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan di Sulampua serta penyediaan akomodasi dan makan-minum di Bali-Nusra. Penyaluran kredit perbankan ke korporasi di Sumatera juga tumbuh lebih rendah terutama karena menurunnya kredit ke lapangan usaha perdagangan dan industri pengolahan. Sementara itu, meningkatnya aktivitas perdagangan di Jawa belum diikuti oleh penyaluran kredit ke sektor korporasi yang justru tumbuh melambat dari 13,4% pada tahun sebelumnya menjadi 8,5% pada akhir 2016. Di Kalimantan, penyaluran kredit korporasi masih tumbuh negatif sejalan dengan terbatasnya aktivitas pertambangan dan konstruksi di wilayah ini.

Melambatnya penyaluran kredit perbankan ke korporasi disertai peningkatan risiko kredit, meski secara keseluruhan masih berada di bawah 5%. Peningkatan rasio NPL untuk kredit korporasi terjadi di hampir seluruh wilayah. Di Jawa dan Sumatera, rasio NPL untuk kredit korporasi pada akhir 2016 masing-masing tercatat sebesar 3,4% dan 2,4%, lebih tinggi dibanding posisi akhir 2015 yang masing-masing tercatat sebesar 2,3% (Grafik 10.17). Kenaikan NPL untuk kredit korporasi tertinggi terjadi di wilayah Kalimantan hingga mencapai 6,2% pada akhir 2016, berada di atas tahun sebelumnya sebesar 5,3%. Kondisi ini tidak terlepas dari masih terbatasnya aktivitas pertambangan dan konstruksi. Sementara itu, NPL untuk kredit korporasi di KTI pada akhir 2016 mengalami perbaikan dari 4,5% pada 2015 menjadi 4,2%. Hal tersebut terutama dipengaruhi turunnya NPL di Sulampua dari 5,2% pada 2015 menjadi 3,9%.

Sejalan dengan masih kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, penyaluran kredit perbankan ke sektor rumah tangga pada 2016 tumbuh meningkat di hampir seluruh wilayah. Peningkatan tertinggi terjadi di Sulampua yang tumbuh hingga 15,3%, meningkat dibandingkan realisasi akhir 2015 yang sebesar 9,2% (Grafik 10.18). Kenaikan pertumbuhan kredit rumah tangga di Sulampua tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penyaluran Kredit Multiguna. Sementara itu, kredit ke sektor rumah tangga di Sumatera dan Kalimantan masing-masing tumbuh 9,8% dan 7,2% atau di atas realisasi akhir 2015, yang masing-masing tercatat 8,2% dan 6,4%. Di dua wilayah ini, kenaikan pertumbuhan kredit rumah tangga juga didorong oleh Kredit Multiguna. Sementara itu, penyaluran kredit ke sektor rumah tangga di Jawa pada akhir 2016 tercatat tumbuh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yakni dari sebesar 10,4% pada 2015 menjadi 9,4%. Melambatnya pertumbuhan kredit ke sektor rumah tangga di Jawa terutama bersumber dari melambatnya ekspansi Kredit Multiguna dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Risiko kredit rumah tangga masih terkendali pada level yang cukup rendah seiring dengan perbaikan pendapatan masyarakat. Secara umum, rasio NPL untuk KKB dan Multiguna lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015, sedangkan risiko Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengalami peningkatan. Rasio NPL untuk kredit ke sektor rumah tangga tertinggi tercatat di Kalimantan yang meningkat menjadi 2,1% dibandingkan 2015 yang sebesar 1,8% (Grafik 10.19). Peningkatan NPL tersebut di Kalimantan terutama bersumber dari kenaikan NPL untuk KPR menjadi 4,0% dari 3,4% pada 2015. Rasio NPL kredit rumah tangga di

Grafik 10.16. Pertumbuhan Kredit Korporasi di Daerah

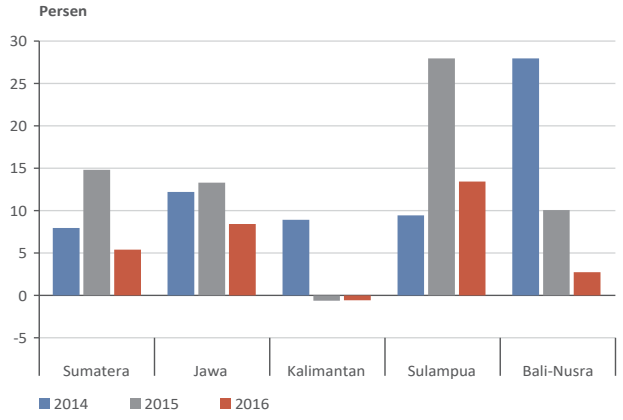

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 10.17. NPL Kredit Korporasi di Daerah

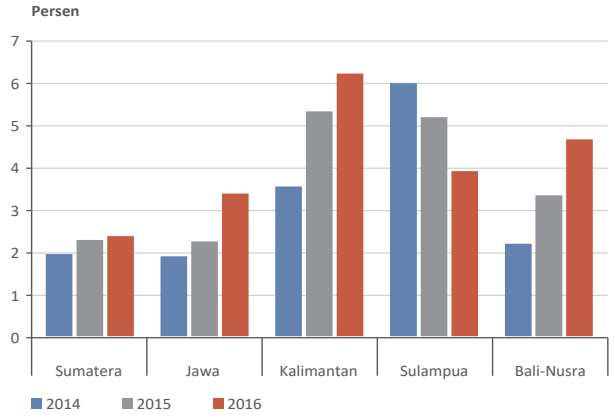

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 10.18. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Daerah

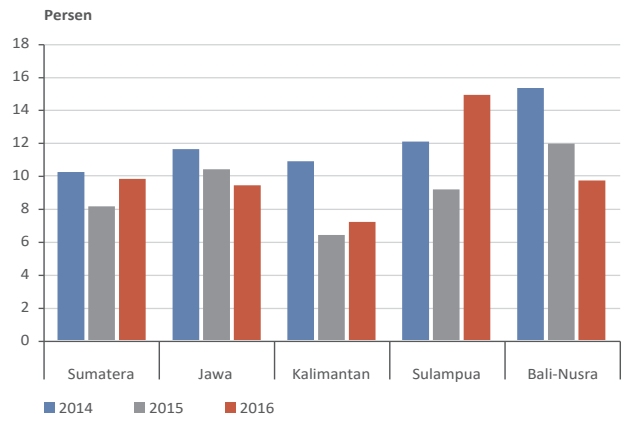

Sumber: Bank Indonesia

Jawa sedikit meningkat, dari 1,4% pada 2015 menjadi 1,5% pada 2016, terutama didorong oleh naiknya NPL Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dan KPR. Di sisi lain, NPL untuk kredit rumah tangga di wilayah Sumatera dan Sulampua tercatat lebih rendah pada 2016 dibandingkan posisi akhir 2015. NPL untuk kredit ke sektor rumah tangga di Sumatera tercatat sebesar 1,6% atau lebih rendah dari 1,7% pada tahun sebelumnya, terutama karena menurunnya NPL untuk Kredit Multiguna. Membaiknya NPL Kredit Multiguna juga mendorong perbaikan NPL kredit rumah tangga di KTI. Perbaikan NPL Kredit Multiguna di KTI tersebut terjadi di seluruh wilayah, baik di Bali-Nusra maupun Sulampua.

Setelah terus mengalami perlambatan sejak 2013, penyaluran kredit UMKM mulai tumbuh meningkat pada 2016. Pertumbuhan UMKM tertinggi terjadi di KTI, terutama di wilayah Bali-Nusra yang mencapai 17,1%, meningkat dibanding 2015 yang tumbuh 14,1% (Grafik 10.20).

Peningkatan pertumbuhan kredit UMKM di berbagai wilayah di KTI ditopang oleh kredit ke lapangan usaha perdagangan. Dengan porsinya yang besar (diatas 60%) terhadap total kredit UMKM di KTI, kredit ke lapangan usaha perdagangan mampu tumbuh tinggi sebesar 11,5% (yoy) pada 2016. Pertumbuhan kredit UMKM ke lapangan usaha perdagangan juga menopang pertumbuhan kredit UMKM ke Jawa dan Kalimantan, yang tercatat masing-masing tumbuh 8,8% dan 7,1% pada 2016, meningkat dibanding 2015 yang tercatat masing-masing 8,2% dan 6,3%. Di sisi lain, kredit UMKM di Sumatera justru tumbuh melambat, dari 5,8% pada 2015 menjadi 5,2% akibat menurunnya kredit ke lapangan usaha perdagangan dan pertanian. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM untuk modal kerja tercatat lebih tinggi di hampir seluruh wilayah, kecuali di Sumatera. Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM juga diikuti dengan perbaikan kualitas kredit, sebagaimana tercermin dari perbaikan rasio NPL untuk kredit UMKM di hampir seluruh wilayah. Kenaikan NPL untuk kredit UMKM hanya terjadi di Jawa dan Bali-Nusra, namun masih di bawah batas aman 5% (Grafik 10.21).

Penyaluran kredit oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih terbatas pada 2016, meski sedikit lebih baik dibandingkan pertumbuhan penyaluran oleh perbankan secara keseluruhan. Pertumbuhan penyaluran kredit oleh BPD ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi yang memiliki pangsa cukup dominan dalam penyaluran kredit oleh BPD. Penyaluran kredit investasi oleh BPD tercatat mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga 8,1% setelah pada tahun sebelumnya tercatat sebesar 3,3%. Secara umum, penyaluran kredit BPD yang masih terbatas terutama terjadi di Sumatera, diikuti oleh Jawa, Kalimantan dan KTI. Risiko kredit BPD pada akhir 2016 membaik sebagaimana tercermin dari penurunan angka rasio NPL di BPD, terutama terjadi di Jawa dan Kalimatan. Di sisi lain,

Grafik 10.19. NPL Kredit Rumah Tangga di Daerah

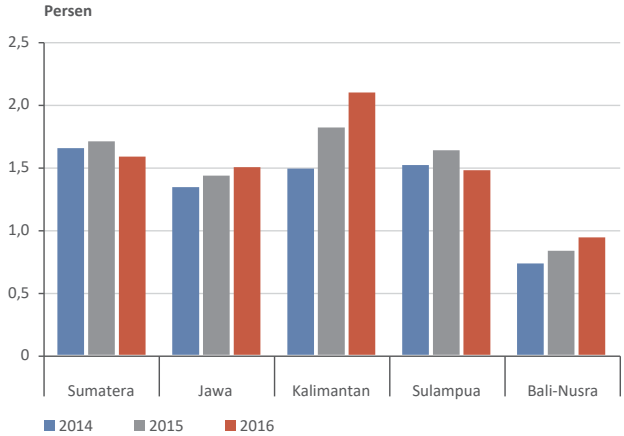

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 10.20. Pertumbuhan Kredit UMKM di Daerah

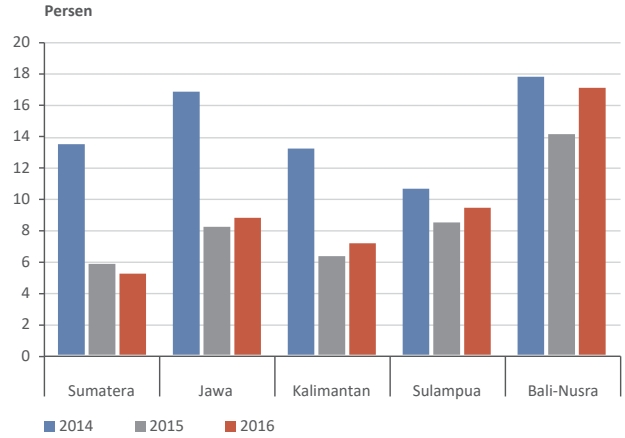

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 10.21. NPL Kredit UMKM di Daerah

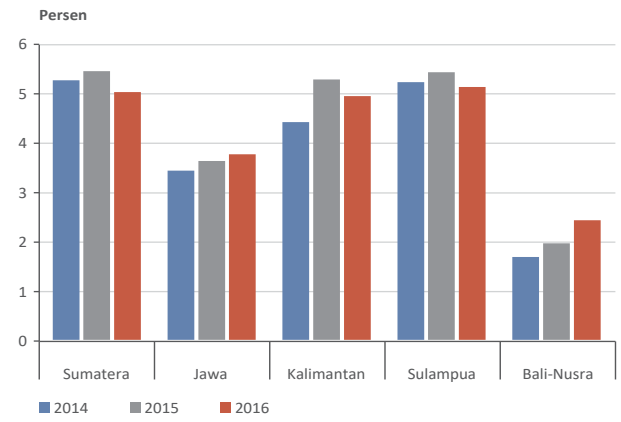

Sumber: BPS, diolah

Grafik 10.23. Pertumbuhan Penyaluran Lembaga Pembiayaan

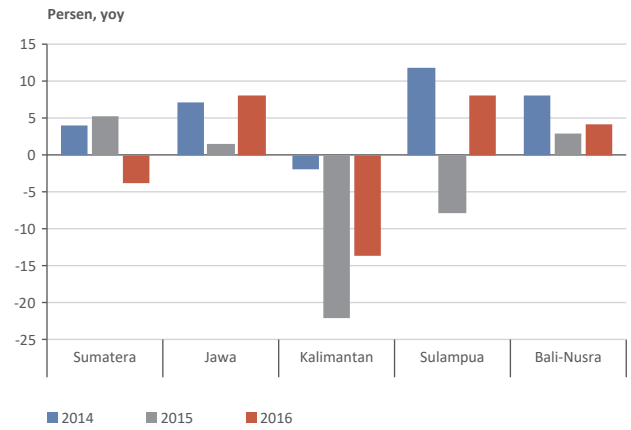

Sumber: OJK, diolah

risiko NPL BPD di Sumatera dan KTI mengalami sedikit peningkatan, terutama berasal dari kenaikan NPL di sektor perdagangan.

Dari aspek sumber pendanaan perbankan, DPK mengalami peningkatan pada 2016. Pertumbuhan DPK tertinggi terjadi di Jawa yakni mencapai 10,7% (yoy), lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan DPK tahun 2015 yang sebesar 7,5% (Grafik 10.22). Pertumbuhan DPK tercatat meningkat di hampir seluruh wilayah, kecuali di Sulampua dan Bali-Nusra yang tumbuh melambat. Peningkatan DPK terutama berasal dari tabungan dan deposito, sementara giro tumbuh melambat. Perkembangan DPK yang tumbuh lebih tinggi dari kredit menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tercatat menurun di sebagian besar daerah terutama di Jawa yakni menjadi sebesar 87,2% pada 2016 dari 89,8% dibandingkan akhir 2015. Hal ini disebabkan sebaran DPK terkonsentrasi di Jawa, sementara permintaan kredit dari

Grafik 10.22. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan di Daerah

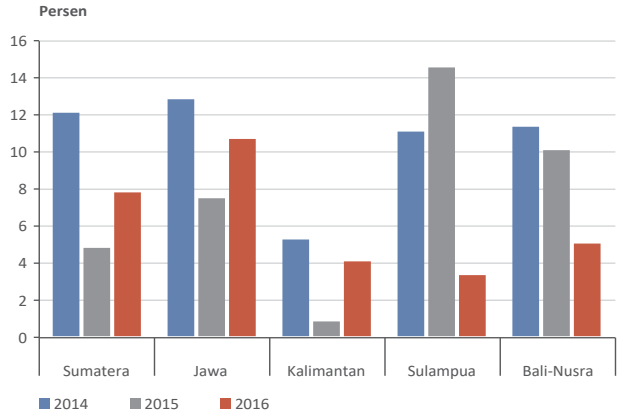

Sumber: BPS, diolah

Jawa pada 2016 masih relatif terbatas. Di sisi lain, rasio LDR di beberapa daerah di luar Jawa tercatat relatif tinggi hingga melebihi level 100%. LDR perbankan di KTI dan Sumatera tercatat sebesar 102,6% dan 100,1%, sementara Kalimantan masih tercatat 91%. Tingginya LDR di KTI terutama terjadi di Sulawesi (135,9%), sementara LDR di Bali-Nusra dan Sulampua masih tercatat di bawah 100%.

Di tengah perlambatan penyaluran kredit, penyaluran pinjaman oleh Perusahaan Pembiayaan (PP) tercatat membaik pada 2016 di berbagai daerah (Grafik 10.23). Membaiknya penyaluran pinjaman dari PP terjadi di hampir seluruh wilayah. Pertumbuhan penyaluran PP di Kalimantan meskipun membaik masih tetap mengalami pertumbuhan yang negatif dibanding tahun sebelumnya. Wilayah yang mencatat peningkatan pertumbuhan penyaluran pinjaman PP tertinggi adalah wilayah Jawa yang tumbuh sebesar 8,1% atau setara dengan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Jawa. Sementara itu, penyaluran pinjaman oleh PP di Sumatera justru mengalami kontraksi sebesar 3,7%. Secara nominal, penyaluran pinjaman oleh PP masih tergolong rendah dengan pangsa sekitar 9% dibandingkan penyaluran kredit oleh perbankan.

Boks 10.1. Pengembangan Daya Saing Perkotaan sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Wilayah perkotaan sebagai tempat berkumpul dan bertemunya sumber daya manusia dengan berbagai jenis keahlian, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Pengembangan dan pengelolaan wilayah perkotaan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi kunci bagi peningkatan daya saing perkotaan guna menumbuhkembangkan berbagai kegiatan ekonomi termasuk industri kreatif serta berbagai inovasi yang menciptakan keunggulan kompetitif (Gambar 1). Namun, daya saing kawasan perkotaan di Indonesia pada umumnya masih berada di bawah negara-negara *peer* yang antara lain ditunjukkan oleh relatif rendahnya elastisitas peningkatan pendapatan perkapita untuk setiap kenaikan urbanisasi.

Dalam struktur perekonomian daerah, wilayah perkotaan memiliki peran yang cukup dominan. Di Jawa, peran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota secara agregat pada tahun 2013 memberikan kontribusi cukup besar yaitu 51,4% terhadap total PDRB Jawa. Pangsa ekonomi Jawa yang dominan dalam perekonomian nasional sejalan dengan terkonsentrasinya keberadaan kota di wilayah ini (58,5%)[1]. Sementara di Sumatera, dengan pangsa terhadap PDB sebesar 22,2% mempunyai jumlah kota mencapai 22,1% terhadap nasional. Pangsa perkotaan di wilayah KTI dan Kalimantan masing-masing tercatat sebesar 11,3% dan 8,1% terhadap total perekonomian, memiliki jumlah kota masing-masing sebesar 15,0% dan 4,4% terhadap nasional.

Pembangunan perkotaan mensyaratkan adanya keseimbangan antar wilayah agar dapat menyeimbangkan migrasi penduduk usia produktif antar wilayah. Ketidakseimbangan tingkat kemajuan pembangunan perkotaan di luar Jawa diperkirakan justru menyebabkan perpindahan penduduk ke Jawa. Hal ini dapat berimplikasi pada beban di Jawa yang semakin tinggi dan dapat memicu ketimpangan dan kemiskinan lebih dalam. Selain itu, kondisi ini pada gilirannya akan menghambat pengembangan ekonomi daerah di luar Jawa. Walaupun persentase kemiskinan mengalami perbaikan di seluruh wilayah, namun persentase penduduk miskin di KTI masih lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Sementara itu, kemiskinan wilayah perkotaan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kemiskinan wilayah pedesaan (Grafik 1).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menekankan arah pembangunan perkotaan yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Strategi pembangunan kota jangka menengah panjang diarahkan kepada tahapan pencapaian kota yang nyaman ditinggali (*liveable city*) pada 2025, yang kemudian secara bertahap mengarah pada kota hijau (*green city*) sampai dengan kota cerdas (*smart city*) pada 2045 (Gambar 2). Pengembangan kota di luar Jawa menjadi prioritas agar pemerataan pembangunan dapat diwujudkan. Selama 2015–2019, pembangunan perkotaan diarahkan

Gambar 1. Aglomerasi dan Tantangan Pengembangan Kota

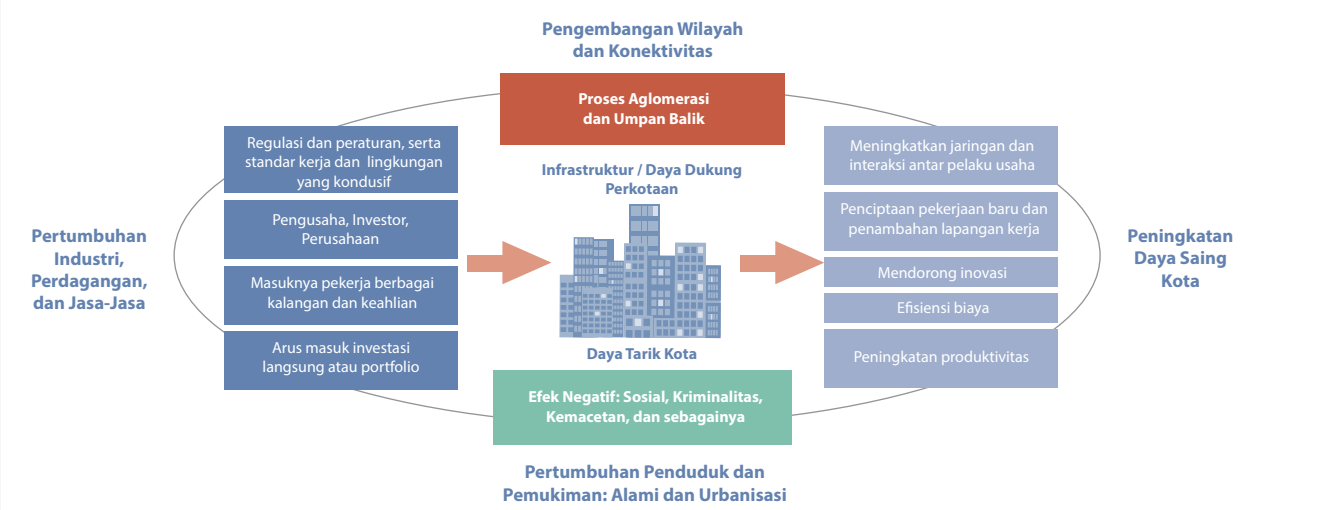

Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

1 Berdasarkan klasifikasi perkotaan dan pedesaan yang ditetapkan oleh BPS.

Grafik 1. **Rata-rata Persentase Penduduk Miskin Perkotaan**

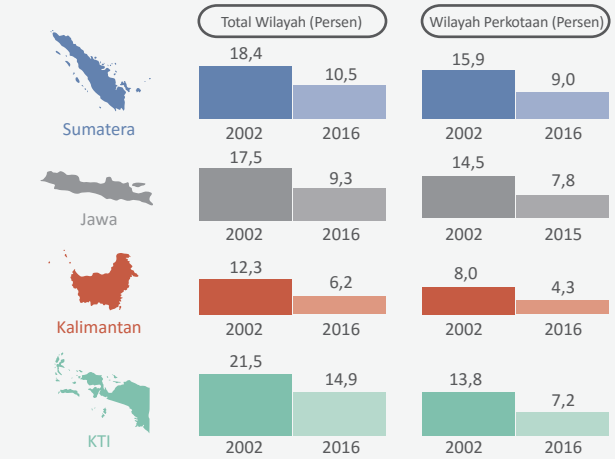

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2. **Pembangunan Perkotaan 2015 - 2019**

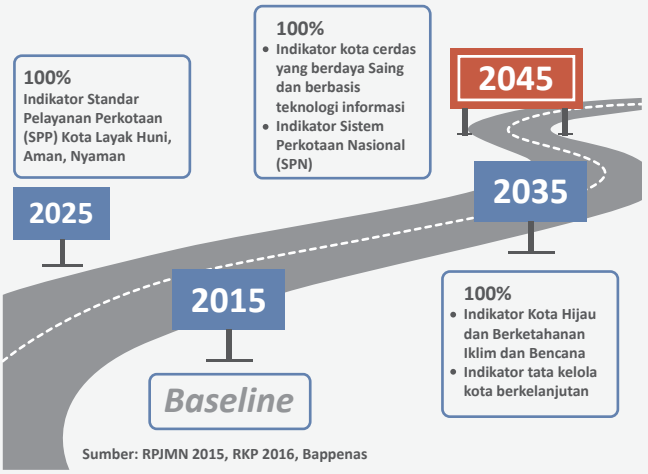

Sumber: RPJMN 2015, RKP 2016, Bappenas

pada pembangunan: (i) 5 kawasan metropolitan baru di luar Jawa-Bali; (ii) 7 kawasan metropolitan *existing*; (iii) 20 kota otonom (sedang) di luar Jawa dengan mengoptimalkan kota sebagai pusat kegiatan nasional/wilayah; (iv) 10 kota baru publik; dan (v) 39 pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Secara umum, impementasi pengembangan kawasan perkotaan masih menghadapi beberapa tantangan. Perencanaan yang belum terintegrasi dengan alokasi anggaran yang belum memadai merupakan kendala utama dalam pengembangan perkotaan. Di samping itu, kapasitas Pemerintah Daerah dan layanan infrastruktur dasar yang masih terbatas, serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata menjadi faktor yang menyebabkan pengembangan kota belum berjalan optimal. Dari perspektif kewilayahan, daerah-daerah di luar Jawa pada umumnya menghadapi tantangan dari rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Daerah tersebut pada umumnya mempunyai pola migrasi keluar (*outflow*) yang umumnya SDM dengan kualitas pendidikan yang lebih baik dan bekerja di sektor non pertanian, sementara migran pendatang (*inflow*) dalam kondisi sebaliknya. Motif migrasi, baik dalam maupun antar-wilayah, terutama untuk melanjutkan sekolah dan memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Secara khusus, pengembangan kota diarahkan untuk menuju kota cerdas dengan membangun interaksi yang lebih kuat antar masyarakat dan dengan pemerintah melalui pemanfaatan teknologi. Adanya interaksi yang kuat ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, implementasi dan monitoringnya, dalam upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik dan manajemen perkotaan serta ketahanan dan keberlanjutan kota. Dalam implementasinya, pengembangan kota cerdas menghadapi tantangan yang bersifat multi-sektor. Tantangan yang dihadapi cukup beragam, mulai dari perencanaan, pengembangan, pelayanan perizinan, sampai dengan daya dukung pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) secara menyeluruh. Inisiatif pengembangan kota cerdas yang dimulai di beberapa daerah seperti di Surabaya, Bandung, Balikpapan, Jakarta, dan Makassar cukup progresif. Pengembangan kota cerdas yang dilakukan oleh kota-kota tersebut difokuskan pada area peningkatan layanan publik, serta penguatan tata kelola keuangan dan pengadaan (*procurement*).

Pengembangan perkotaan harus memperhatikan integrasi dan keterkaitannya dengan pengembangan daerah sekitar. Keterkaitan antara kota-kota satelit dan desa mendorong penguatan pembangunan dan pemberdayaan desa untuk mengurangi kesenjangan yang ada antara kota dengan desa. Salah satu inisiatif tersebut diwujudkan dalam pengembangan wilayah pedesaan berbasis teknologi informasi seperti *Smart* Kampung Banyuwangi dan Kampung UKM Digital. Inisiatif ini membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, BUMN, dan UMKM. Selain itu konektivitas antara *smart city* dan *smart village* juga dapat mendorong efisiensi pasokan bahan pangan sehingga biaya logistik dapat lebih ditekan. *Financial inclusion* dalam hal perluasan akses keuangan kepada masyarakat, mendukung integrasi ekonomi wilayah perkotaan dengan daerah sekitarnya.

Ke depan, untuk mempercepat pengembangan kota, termasuk ke arah kota cerdas, strategi kebijakan perlu diprioritaskan pada lima hal. Pertama, perlu adanya

peta pandu pengembangan kota cerdas secara lengkap, terperinci, komprehensif dan terintegrasi yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019. Kedua, pengembangan kota perlu difokuskan pada penyelesaian di lima sektor pelayanan perkotaan yakni (i) sistem transportasi perkotaan; (ii) ketersediaan air bersih dan sanitasi; (iii) drainase, pengelolaan banjir di perkotaan dan manajemen risiko bencana; (iv) perumahan dan penanganan permukiman kumuh; (v) pengelolaan limbah dan sampah. Ketiga, Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur lebih difokuskan pada penyediaan air bersih, sanitasi, dan drainase di daerah, serta mendukung revitalisasi daerah aliran sungai (DAS). Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk perbaikan proses pengumpulan data dan pada saat yang bersamaan juga menjadi media untuk diseminasi informasi kepada masyarakat masyarakat. Kelima, mendorong pengembangan infrastruktur pendukung teknologi informasi, termasuk akses *broadband* di seluruh daerah. Di samping itu, pengembangan kota perlu disertai langkah-langkah yang intensif untuk pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat serta didukung adanya kebijakan pengupahan yang sejalan dengan kebutuhan hidup layak.

BAGIAN III RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

Keterangan gambar:
Laksana jalan layang yang tersusun sambung-menyambung dan saling menopang antar ruas, sinergi kebijakan untuk merespons berbagai tantangan global dan domestik juga harus saling mendukung sehingga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pada 2016, koordinasi antar otoritas terus diperkuat baik di tingkat pusat maupun daerah.

INFOGRAFIS BAGIAN III

RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

PEMERINTAH | BANK INDONESIA | OTORITAS JASA KEUANGAN

RESPONS JANGKA PENDEK

- FISKAL
- MONETER
- MAKRO PRUDENSIAL
- MIKRO PRUDENSIAL
- SP-PUR

RESPONS JANGKA PANJANG

- STRUKTURAL

FOKUS KEBIJAKAN

- Mitigasi risiko perlambatan ekonomi
- Mempertahankan stabilitas makroekonomi dan SSK
- Memperkuat struktur perekonomian melalui peningkatan efisiensi & produktifitas
- Mengelola kebijakan makroekonomi tetap sehat guna mendukung kesinambungan pertumbuhan

JANUARI

- Penurunan suku bunga kebijakan

FEBRUARI

- Penurunan suku bunga kebijakan
- Penurunan GWM Primer (Efektif 16 Maret 2016)
- Pengaturan transaksi lindung nilai dengan prinsip syariah

MARET

- Penurunan suku bunga kebijakan

APRIL - MEI

- Penyempurnaan ketentuan suku bunga penawan JIBOR (efektif 1 Juni 2016)
- Memperluas mata uang transaksi swap lindung nilai dengan Bank Indonesia
- Menetapkan CCB sebesar 0%

JUNI - JULI

- Penurunan Suku Bunga Kebijakan
- Kenaikan batas bawah GWM - LFR (efektif Agustus 2016)
- Relaksasi LTV / FTV (efektif Agustus 2016)

AGUSTUS

- Suku bunga kebijakan yang baru yakni BI7DRR mulai berlaku
- Perubahan koridor suku bunga menjadi simetris dan lebih sempit

SEPTEMBER

- Penurunan suku bunga kebijakan

OKTOBER

- Penurunan suku bunga kebijakan

NOVEMBER

- Menetapkan CCB Sebesar 0%

DESEMBER

- Pengeluaran & Pengedaran uang rupiah TE 2016

KEBIJAKAN BANK INDONESIA TAHUN 2016

BAGIAN III
Respons Bauran Kebijakan

Kebijakan makroekonomi pada 2016 diarahkan untuk memitigasi risiko perekonomian yang dipicu oleh kondisi global yang tidak sesuai harapan. Respons ditempuh melalui empat fokus kebijakan. Pertama, memitigasi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat peran permintaan domestik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Kedua, terus mempertahankan stabilitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang sudah terjaga dan telah menjadi pijakan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, memperkuat struktur perekonomian melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas guna terus meningkatkan daya saing perekonomian dalam jangka menengah panjang. Keempat, mengelola berbagai kebijakan yang ditempuh agar tetap dalam koridor kebijakan makroekonomi yang sehat guna mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan makroekonomi ditempuh melalui sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sinergi kebijakan diimplementasikan dalam satu bauran kebijakan yakni kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, mikroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta kebijakan struktural. Bauran kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memitigasi risiko siklikal jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat struktur perekonomian dalam jangka menengah panjang. Upaya yang konsisten memperkuat struktur ekonomi sejalan dengan komitmen untuk membangun perekonomian nasional agar semakin berdaya saing dan berdaya tahan dalam jangka menengah panjang. Sejalan dengan arah kebijakan makroekonomi, Bank Indonesia juga menempuh bauran kebijakan dengan mengombinasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran-pengelolaan uang rupiah.

Sejalan dengan arah kebijakan makroekonomi, Pemerintah pada 2016 memperkuat stimulus fiskal dengan memperbesar belanja ke sektor yang lebih produktif, dengan tetap konsisten menjaga prospek kesinambungan fiskal. Arah kebijakan ditempuh guna merespons risiko perekonomian global yang masih tinggi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang belum kuat dan harga komoditas yang rendah. Pemerintah menerjemahkan arah kebijakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 melalui strategi optimalisasi penerimaan pajak dan memperkuat kualitas belanja ke sektor yang produktif dan prioritas, termasuk dengan meningkatkan belanja infrastruktur. Strategi tersebut ditopang upaya menjaga kesinambungan pembiayaan sehingga dapat mengendalikan risiko fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Strategi fiskal yang ditempuh Pemerintah pada akhirnya mengarahkan defisit APBN-P 2016 tetap terkendali sebesar 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjaga posisi utang pemerintah tetap rendah dan berkesinambungan sebesar 27,8% dari PDB.

Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia diarahkan untuk memberikan ruang bagi upaya memperkuat momentum pemulihan ekonomi, sambil tetap konsisten menjaga stabilitas makroekonomi. Prospek stabilitas ekonomi yang cukup terkendali seperti inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang menurun, dan nilai tukar rupiah yang stabil, memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneter, tanpa mengganggu prospek stabilitas ekonomi. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia pada 2016 menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak 6 kali mencapai 150 bps dan membuat level suku bunga kebijakan yang baru yakni Bank Indonesia 7-day (*Reverse*) Repo Rate (BI7DRR) menjadi 4,75% pada akhir 2016. Selain itu, Bank Indonesia juga kembali menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) primer rupiah sebesar 1,0% pada Februari 2016 menjadi 6,50%.

Kebijakan moneter Bank Indonesia juga ditopang dengan kebijakan nilai tukar untuk menjaga nilai tukar rupiah agar bergerak sesuai dengan nilai fundamental. Kebijakan nilai tukar rupiah juga ditopang dengan penguatan pengelolaan permintaan dan penawaran valas dengan menyesuaikan lelang *FX Swap* kembali menjadi 2 kali seminggu, merelaksasi aturan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia yang memperluas pilihan mata uang, dan mengimplementasikan ketentuan pemenuhan minimum peringkat utang. Upaya memperkuat ketahanan sektor eksternal juga ditempuh dengan menjaga kecukupan cadangan devisa sebagai *first line of defense* dan memperkuat kerjasama jaring pengaman keuangan internasional sebagai *second line of defense*.

Arah kebijakan moneter juga diperkuat langkah reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter. Reformulasi kerangka operasional moneter ditempuh dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI7DRR yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain perubahan suku bunga kebijakan, Bank Indonesia juga memperkuat strategi operasi moneter dengan menjaga koridor suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (*Deposit Facility Rate*/DF Rate) dan batas atas koridor (*Lending Facility Rate*/ LF Rate) berada masing-masing 75bps di bawah dan di atas BI7DRR. Berbagai langkah kebijakan tersebut memiliki tiga tujuan utama, yaitu memperkuat sinyal kebijakan moneter, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter juga disertai dengan langkah percepatan pendalaman pasar uang, baik di pasar uang rupiah maupun pasar valas. Bank Indonesia mendorong transaksi pasar repo agar semakin aktif dengan meningkatkan kapasitas peserta pasar repo melalui *General Master Repo Agreement* (GMRA) yang ditujukan kepada bank beraset kecil, perusahaan asuransi, lembaga pensiun, dan lembaga pembiayaan. Bank Indonesia juga memperkuat kredibilitas *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) sebagai suku bunga *benchmark* di pasar uang dengan mendorong peningkatan frekuensi perdagangan, memperkenalkan mekanisme kuotasi yang dapat ditransaksikan (*hittable*), dan memperpanjang tenor untuk menciptakan likuiditas dalam tenor yang lebih panjang.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2016 juga ditopang dengan kebijakan makroprudensial. Arah kebijakan makroprudensial difokuskan untuk memperkuat intermediasi perbankan dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan yang sudah terpelihara, serta memitigasi risiko kredit yang berpotensi naik. Pada 2016, Bank Indonesia kembali melonggarkan ketentuan *Loan to Value (LTV)* atau *Financing to Value (FTV)* rasio untuk mendorong kredit properti. Bank Indonesia juga menyempurnakan ketentuan *Loan to Funding Ratio* (LFR) dengan menyesuaikan batas bawah rasio target LFR dari 78% menjadi 80% untuk mendorong minat perbankan menyalurkan kredit. Bank Indonesia juga mewajibkan bank umum untuk menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara bertahap yakni 10% dari total kredit pada 2016 dan meningkat hingga mencapai minimum 20% pada akhir 2018. Selain itu, Bank Indonesia kembali menetapkan besaran *Countercyclical Capital Buffer* (CCB) sebesar 0% setelah mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan risiko sistemik dari pertumbuhan kredit.

Kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dititikberatkan kepada upaya memperkuat infrastruktur sistem pembayaran. Setelah implementasi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II berjalan baik, Bank Indonesia menyempurnakan fitur layanan sistem pembayaran dengan mengimplementasikan layanan *bulk payment* pada 2 Mei 2016 dan menurunkan kembali batas nominal transfer dana melalui RTGS sejak 1 Juli 2016. Bank Indonesia juga menerapkan *National Payment Gateway* (NPG) sebagai infrastruktur yang mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik. Langkah Bank Indonesia tersebut juga sekaligus mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Untuk mewujudkan keuangan inklusif, Bank Indonesia terus memperluas akses keuangan dengan menginisiasi beberapa *pilot project* Layanan Keuangan Digital (LKD) di beberapa daerah. Bank Indonesia juga melakukan integrasi sistem pembayaran nontunai dengan program pemerintah melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu, kebijakan pengelolaan uang rupiah tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar hingga menjangkau wilayah terpencil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bauran kebijakan Bank Indonesia ditempuh dengan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Koordinasi kebijakan difokuskan kepada upaya mempercepat reformasi struktural guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait hal tersebut, koordinasi dengan pemerintah dilakukan untuk mengawal implementasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) melalui Satuan Tugas Pelaksanaan PKE. Sinergi kebijakan

dengan Pemerintah juga ditempuh melalui beberapa inisiatif untuk meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing kawasan perkotaan sebagai sumber pertumbuhan baru (*smart city*), mengembangkan infrastruktur maritim, dan memperbaiki daya saing produk manufaktur.

Di bidang keuangan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama dalam aspek pencegahan dan penanganan krisis. Untuk mendukung fungsi KSSK sebagaimana amanat Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi secara bilateral dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam kerangka makro-mikroprudensial. Koordinasi juga ditempuh dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya mendorong pendalaman pasar keuangan dan keuangan inklusif. Selain itu, koordinasi kebijakan untuk pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah melalui wadah Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga terus ditempuh.

Secara umum, bauran kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia dapat memperkuat ketahanan perekonomian domestik, di tengah kondisi global yang masih kurang menguntungkan. Perkembangan positif tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang tetap terpelihara. Pertumbuhan ekonomi 2016 meningkat menjadi 5,0% dan dibarengi dengan inflasi yang cukup rendah yakni 3,02%, defisit transaksi berjalan yang menurun menjadi 1,8% dari PDB, dan nilai tukar rupiah yang tetap terkendali. Stabilitas sistem keuangan juga terpelihara ditopang oleh ketahanan perbankan yang masih baik dan pasar keuangan domestik yang cukup stabil. Ke depan, bauran kebijakan yang telah ditempuh akan terus diperkuat guna mendukung berlanjutnya proses penguatan perekonomian nasional.

BAB 11
Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter pada 2016 diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pemulihan ekonomi, sambil tetap konsisten menjaga stabilitas makroekonomi. Arah kebijakan ditempuh setelah mempertimbangkan stabilitas makroekonomi yang semakin terpelihara. Perkembangan positif tersebut memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter yang pada gilirannya diharapkan dapat memperkuat momentum pemulihan ekonomi. Pelonggaran kebijakan moneter pada 2016 ditempuh dengan menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 150 bps dan rasio GWM Primer Rupiah sebesar 1,0% menjadi 6,5%, serta didukung dengan reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter guna memperkuat efektivitas transmisi kebijakan.

Keterangan gambar:
Pada 2016, pelonggaran kebijakan moneter dan penggunaan suku bunga acuan baru mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi.

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2016 diarahkan untuk memberikan ruang gerak bagi pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, dengan tetap konsisten menjaga stabilitas ekonomi. Arah kebijakan moneter ditempuh setelah mempertimbangkan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga sebagai dampak positif konsistensi kebijakan yang ditempuh sebelumnya. Berbagai indikator stabilitas ekonomi menunjukkan perbaikan, seperti inflasi 2016 tercatat rendah dan dalam kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan turun dan tetap di level yang sehat, serta nilai tukar rupiah yang terkendali. Stabilitas makroekonomi yang terjaga pada gilirannya memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melonggarkan arah kebijakan moneter guna mendukung pemulihan ekonomi.

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditempuh melalui bauran kebijakan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM), kebijakan nilai tukar dan penguatan ketahanan sektor eksternal, serta ditopang kebijakan makropudensial dan sistem pembayaran. Searah dengan ruang pelonggaran kebijakan yang ada, Bank Indonesia pada 2016 menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 150 bps. Arah kebijakan moneter juga diperkuat penurunan rasio GWM Primer Rupiah pada Februari 2016 sebesar 1,0% menjadi 6,5%. Sementara kebijakan nilai tukar rupiah diarahkan agar nilai tukar tetap bergerak dalam level fundamental sehingga dapat mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus memperkuat pencapaian sasaran akhir kebijakan, yakni inflasi.

Arah kebijakan moneter didukung langkah reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang diimplementasikan sejak 19 Agustus 2016 (lihat Boks 11.1). Reformulasi tersebut ditempuh dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7-day *(reverse)* Repo Rate (BI7DRR). Strategi operasi moneter juga diperkuat dengan koridor suku bunga PUAB simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (*Deposit Facility Rate*/ DF Rate) dan batas atas koridor (*Lending Facility Rate*/ LF Rate) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas BI7DRR. Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter memiliki tiga tujuan utama, yaitu memperkuat sinyal kebijakan moneter, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia dan ditopang dengan koordinasi erat dengan Pemerintah secara umum berkontribusi positif kepada tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada 2016. Inflasi 2016 tercatat sebesar 3,02%, atau dalam kisaran sasarannya. Defisit transaksi berjalan juga terjaga dalam level yang sehat, yaitu 1,8% dari PDB, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Nilai tukar rupiah dalam arah menguat dengan volatilitas yang tetap terjaga. Berbagai capaian positif di stabilitas ekonomi tersebut pada gilirannya mendukung upaya pemulihan ekonomi sehingga PDB tumbuh lebih tinggi dari 4,9% pada 2015 menjadi 5,0% pada 2016.

11.1. KEBIJAKAN SUKU BUNGA DAN GIRO WAJIB MINIMUM

Kebijakan moneter Bank Indonesia 2016 diarahkan untuk mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi, sambil tetap konsisten menjaga stabilitas ekonomi. Arah kebijakan moneter ditempuh dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga sebagai dampak positif dari konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh sebelumnya. Stabilitas makroekonomi yang terjaga pada gilirannya memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneter yang diharapkan menopang upaya pemulihan ekonomi.

Ruang pelonggaran kebijakan moneter ditempuh setelah mempertimbangkan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga ditandai tekanan inflasi yang cukup rendah yakni 3,02% pada 2016. Selain itu, defisit transaksi berjalan turun menjadi 1,8% dari PDB pada tahun 2016. Nilai tukar rupiah juga menguat didorong oleh defisit transaksi berjalan yang turun dan aliran masuk modal asing yang meningkat. Ruang pelonggaran kebijakan moneter juga relevan ditempuh karena pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi belum optimal akibat sektor swasta yang masih melakukan konsolidasi. Dalam perkembangannya, besaran dan waktu pelonggaran kebijakan moneter dilakukan secara terukur dan berhati-hati mengingat pada saat bersamaan risiko ketidakpastian global masih tinggi, termasuk dampak dari ketidakpastian rencana kenaikan FFR.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan pada 2016. Secara keseluruhan, suku bunga kebijakan diturunkan sebesar 150 bps. Pada semester I 2016, Bank Indonesia menurunkan BI Rate yang saat itu masih menjadi suku bunga kebijakan sebesar 100 bps masing-masing 25 bps pada Januari, Februari, Maret, dan Juni 2016. Ruang pelonggaran kebijakan moneter pada periode tersebut cukup besar mempertimbangkan berbagai aspek stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Pada semester II 2016 pada periode implementasi reformulasi kebijakan, Bank Indonesia menurunkan BI7DRR sebesar 50 bps masing-masing 25 bps pada September dan Oktober 2016. Bank Indonesia

menilai penurunan suku bunga kebijakan, pada satu sisi, tetap konsisten dalam mengarahkan inflasi ke depan tetap dalam kisaran yakni 4,0±1% pada 2016-2017 dan 3,5±1% pada 2018. Di sisi lain, penurunan suku bunga kebijakan juga diharapkan menopang pemulihan ekonomi.

Penurunan suku bunga kebijakan juga didukung dengan penurunan rasio GWM Primer Rupiah. Rasio GWM Primer Rupiah yang pada akhir 2015 telah diturunkan sebesar 0,5%, kembali diturunkan sebesar 1,0% pada Februari 2016 sehingga menjadi 6,5%. Penurunan rasio GWM Primer Rupiah ditempuh guna memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter yang sedang ditempuh.

11.2. KEBIJAKAN NILAI TUKAR

Kebijakan suku bunga kebijakan dan GWM juga ditopang dengan kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar ditujukan agar nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan nilai fundamental yang konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi ke depan. Kebijakan nilai tukar pada 2016 tetap berada dalam koridor sistem nilai tukar mengambang bebas yang diyakini menjadi peredam dalam mengarahkan sektor ekstenal ekonomi kembali kepada kondisi fundamental pasca terjadinya suatu gejolak. Namun, Bank Indonesia tetap berupaya menjaga agar volatilitas rupiah tidak terjadi secara berlebihan. Volatilitas yang berlebihan dapat memicu risiko ekspektasi yang berlebihan terhadap pergerakan nilai tukar dan inflasi ke depan sehingga berisiko mengganggu pencapaian sasaran inflasi.

Kebijakan nilai tukar diperkuat dengan upaya untuk memperbaiki struktur permintaan dan penawaran pasar valas. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian frekuensi lelang FX *Swap* kembali menjadi dua kali seminggu dan juga melakukan relaksasi aturan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mendukung pengelolaan likuiditas valas lebih baik, yang pada gilirannya dapat mengendalikan pergerakan nilai tukar.

Bank Indonesia juga memperkuat struktur permintaan dan penawaran pasar valas dengan mengakomodasi kebutuhan lindung nilai atas kegiatan ekonomi yang menggunakan valuta nondolar AS. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia memperluas pilihan mata uang yang diterima dalam transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia. Relaksasi ketentuan transaksi *swap* lindung nilai memungkinkan bank melakukan *swap* lindung nilai dalam dolar AS maupun valuta selain dolar AS sesuai dengan dokumen *underlying transaction* yang dimilikinya. Dengan kebijakan tersebut, bank dapat memanfaatkan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dalam beberapa valuta, yang selanjutnya diharapkan mendukung pengelolaan likuiditas valas dan meminimalkan risiko nilai tukar.

Relaksasi ketentuan transaksi *swap* lindung nilai untuk valuta nondolar AS dilatarbelakangi oleh potensi pemanfaatan valuta nondolar AS dalam transaksi ekonomi yang cukup besar. Potensi tersebut bersumber dari peta mitra dagang dan negara investor utama Indonesia yang tidak hanya didominasi AS atau negara lain yang menggunakan valuta dolar AS, tetapi juga mata uang nondolar AS. Data perdagangan internasional pada 2016 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN, selain Singapura sebagai pusat perdagangan internasional, merupakan tujuan ekspor utama Indonesia, diikuti oleh Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Sebaliknya negara asal impor utama Indonesia adalah Tiongkok, diikuti oleh ASEAN dan Singapura. Data posisi investasi internasional juga menunjukkan investor utama maupun kreditur Indonesia didominasi oleh negara-negara dari kawasan Asia.

Hasil identifikasi memperlihatkan beberapa jenis valuta nondolar AS berpotensi digunakan dalam transaksi valas domestik antara lain ialah valuta Euro (EUR), Yen (JPY) dan Renminbi (CNY/CNH). Dari ketiga valuta tersebut, Renminbi merupakan valuta dengan pertumbuhan transaksi tertinggi. Kondisi tersebut sejalan dengan tren di pasar global dimana menurut BIS *Triennial Survey*, *turnover* transaksi Renminbi global meningkat dua kali lipat menjadi 202 miliar dolar AS dalam kurun waktu tiga tahun (2013-2016). Pada 2016, valuta CNY tercatat sebagai mata uang ke-8 yang paling banyak ditransaksikan secara global, naik dibandingkan dengan posisi pada 2013 di nomor 9. Di pasar domestik, peningkatan volume transaksi CNY secara signifikan juga terjadi dalam satu tahun terakhir. Pada 2016, volume transaksi CNY terhadap rupiah maupun dolar AS tercatat meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan dengan transaksi pada 2015.

Kebijakan nilai tukar juga diperkuat dengan kebijakan untuk mengelola Utang Luar Negeri (ULN) guna mengurangi risiko nilai tukar. Bank Indonesia mengimplementasikan Ketentuan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) bagi korporasi yang akan menerbitkan atau melakukan penarikan ULN baru. Dalam ketentuan tersebut, setelah 1 Januari 2016 korporasi diwajibkan untuk menyampaikan informasi pemenuhan minimum peringkat utang sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Ketentuan tersebut juga mengatur peringkat utang yang ditetapkan minimum setara dengan BB- dan dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. Dalam perkembangannya, kemajuan terlihat pada pemenuhan

peringkat utang minimum dimana pada Desember 2016, sebanyak 32,8% dari korporasi yang wajib lapor telah menyampaikan informasi peringkat utang, meningkat dibandingkan dengan kondisi Januari 2016 yang baru mencapai 7,9%.

Kebijakan nilai tukar juga didukung dengan upaya mendorong penggunaan mata uang lokal (*local currency settlement*/LCS). Kebijakan tersebut untuk mendukung penyelesaian transaksi perdagangan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi risiko nilai tukar dan ketergantungan terhadap satu mata uang. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia, Bank of Thailand, dan Bank Negara Malaysia pada 23 Desember 2016 di Bangkok-Thailand menyepakati pembentukan kerangka kerja sama dalam mendorong penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal. Kesepakatan antar bank sentral tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya transaksi karena dilakukan dengan *direct quotation* dan tidak terbebani biaya konversi silang *(cross currency)* dari rupiah ke dolar AS ke mata uang negara yang dituju. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendiversifikasi ketergantungan mata uang rupiah terhadap satu mata uang, mengembangkan pasar mata uang regional, dan membuka akses dan partisipasi aktif pelaku perdagangan antar negara-negara yang bersepakat melakukan LCS.

Kebijakan nilai tukar rupiah juga didukung upaya untuk memperkuat kecukupan cadangan devisa sebagai strategi *first line of defense*. Penguatan cadangan devisa penting dalam memitigasi dampak ketidakpastian global yang berisiko mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah dan akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Posisi cadangan devisa pada akhir 2016 mencapai 116,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan akhir 2015 sebesar 105,9 miliar dolar AS (Grafik 11.1). Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2016 tersebut cukup untuk membiayai 8,8 bulan impor atau 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta tetap akan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Penguatan cadangan devisa didukung dengan penguatan *second line of defense* melalui peningkatan peran jaring pengaman keuangan internasional. Indonesia telah memiliki fasilitas *second line of defense* dalam bentuk kerja sama ketahanan sistem keuangan regional *(regional financial arrangement)* dan kerja sama bilateral dengan berbagai negara mitra. Fasilitas tersebut meliputi *ASEAN Swap Arrangement* (ASA), *the Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM), dan *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) Bank Indonesia – Bank of Japan (Tabel 11.1).

Grafik 11.1. Cadangan Devisa Indonesia

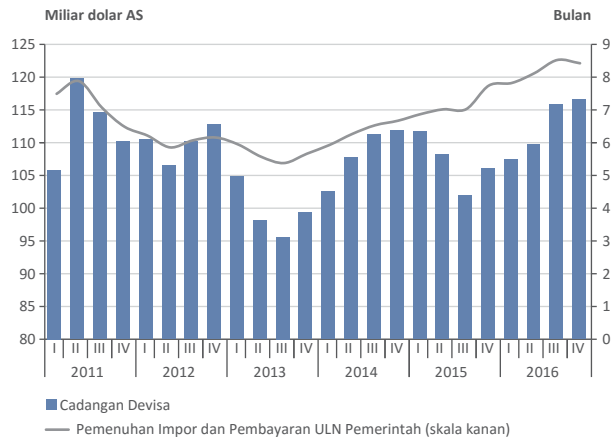

Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia dalam konteks regional juga telah menjalin kerjasama *swap arrangement* dengan negara-negara ASEAN dalam bentuk *ASEAN Swap Arrangement* (ASA). Kerjasama *swap arrangement* tersebut bernilai 2 miliar dolar AS dan masih berlaku hingga 2017. ASA dapat digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota yang mengalami tekanan neraca pembayaran. Pada periode 2015-2017, Bank Indonesia bertindak sebagai *Agent Bank* yang berperan sebagai koordinator implementasi ASA apabila terdapat *participating member* yang mengajukan aktivasi pemanfaatan fasilitas.

Bank Indonesia juga memiliki skema BSA dengan Bank of Japan (BoJ). Kerjasama tersebut merupakan kerja sama pertukaran mata uang *(swap)* dari rupiah dengan dolar AS antara Jepang dengan Indonesia. Kerja sama dilakukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek. Kerja sama BSA senilai 22,76 miliar dolar AS pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 dan terakhir diperpanjang pada 12 Desember 2016 dengan masa berlaku tiga tahun.

Bank Indonesia juga memperkuat kerjasama melalui skema *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan The People's Bank of China (PBoC), Bank of Korea (BOK), dan Reserve Bank of Australia (RBA). Kerjasama BCSA ditujukan untuk mendorong perdagangan bilateral dan menjamin penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal kedua negara. Bagi Indonesia, kerjasama diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS sehingga mendorong terciptanya stabilitas nilai tukar rupiah. Selain untuk tujuan itu, BCSA dengan PBoC juga dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan likuiditas jangka

Tabel 11.1. Kerja Sama *Swap Arrangement*

No	Jenis Fasilitas	Tujuan Fasilitas	Nilai Fasilitas	Penandatanganan Perjanjian	Masa Berlaku	Keterangan
1	ASEAN *Swap Arrangement*	Kerja sama multilateral dalam bentuk *swap* antara USD/Yen/ Euro dengan mata uang domestik sepuluh negara ASEAN, bertujuan untuk menyediakan bantuan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota yang mengalami permasalahan neraca pembayaran.	2 miliar dolar AS (maksimum fasilitas yang dapat ditarik Indonesia sebesar 600 juta dolar AS)	16 November 2015	2 tahun	Perpanjangan beberapa kali sejak penandatanganan pertama pada November 2005
2	CMIM	Kerja sama multilateral dalam bentuk swap antara USD dengan mata uang domestik negara anggota ASEAN+3, bertujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan.	240 miliar dolar AS (maksimum fasilitas yang dapat ditarik Indonesia sebesar 22,76 miliar dolar AS)	17 Juli 2014	Tidak terbatas	Amandemen perjanjian untuk penguatan fasilitas CMIM. Perjanjian awal ditandatangani Maret 2010
3	*Bilateral Swap Arrangement* BI-BOJ	Kerja sama bilateral dalam bentuk swap antara USD dengan rupiah, bertujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas potensial dan/ atau aktual.	22,76 miliar dolar AS	12 Desember 2016	3 tahun	Perpanjangan beberapa kali sejak penandatanganan pertama pada 17 Februari 2003, dengan peningkatan nilai dan jenis fasilitas
4	*Bilateral Currency Swap Arrangement* BI-PBoC	Kerja sama bilateral keuangan dalam bentuk *swap* CNY dan rupiah, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia - Tiongkok, membantu penyediaan likuiditas jangka pendek bagi stabilisasi pasar keuangan, dan tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	100 miliar yuan Tiongkok (ekuivalen Rp175 triliun)	1 Oktober 2013	3 tahun	Penandatanganan pertama pada Maret 2009
5	*Bilateral Currency Swap Arrangement* BI-BOK	Kerja sama bilateral keuangan dalam bentuk *swap* KRW dan rupiah, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia - Korea, serta memperkuat kerjasama keuangan yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi kedua negara.	10,7 triliun won Korea/Rp115 triliun (ekuivalen USD10 miliar dolar AS)	6 Maret 2014	3 tahun	
6	*Bilateral Currency Swap Arrangement* BI-RBA	Kerja sama bilateral keuangan dalam bentuk *swap* AUD dan rupiah, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia - Australia, dan tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	10 miliar dolar Australia (ekuivalen Rp100 triliun)	15 Desember 2015	3 tahun	

Sumber: Bank Indonesia

pendek guna menjaga stabilitas pasar keuangan. BCSA antara BI-PBoC ditandatangani pertama kali pada 23 Maret 2009 senilai 100 miliar yuan Tiongkok atau setara dengan Rp175 triliun. BCSA antara BI-BOK telah ditandatangani pada 2014 dengan masa berlaku hingga 2017 dan nilai fasilitas sebesar Rp115 triliun. Sementara BCSA antara BI-RBA ditandatangani pada 15 Desember 2015. Perjanjian tersebut memungkinkan dilakukannya transaksi *swap* mata uang lokal kedua negara senilai 10 miliar dolar Australia atau setara dengan Rp100 triliun. Perjanjian juga digunakan untuk kepentingan lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

11.3. PENDALAMAN PASAR UANG

Bank Indonesia pada 2016 menempuh berbagai langkah untuk mendorong pendalaman pasar uang rupiah dan pasar valuta asing (valas). Langkah tersebut penting dilakukan karena kedalaman dapat menjaga stabilitas pasar saat terjadi gejolak, menciptakan pasar uang yang semakin efisien, dan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, pasar uang yang lebih dalam diharapkan menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Upaya untuk terus memperdalam pasar uang rupiah dan pasar valas relevan ditempuh mempertimbangkan struktur dan manajemen likuiditas perbankan domestik. Satu sisi, ketersediaan likuiditas rupiah di industri perbankan belum tersebar secara merata di antara individu bank, meskipun secara agregat mengalami surplus likuiditas. Sisi lain, kondisi pasar uang juga masih tipis dan preferensi pengelolaan likuiditas perbankan cenderung dilakukan dalam horison waktu yang pendek. Sementara itu, transaksi di pasar valas juga masih rendah jika dibandingkan dengan kondisi di negara kawasan, meskipun volume transaksi sudah dalam tren meningkat.

Hasil identifikasi menunjukkan beberapa peta pada pasar uang rupiah dan pasar valas pada 2016. Dari pasar uang rupiah, rata-rata volume transaksi pada 2016 tercatat dalam kisaran Rp12,5 triliun per hari. Sebagian besar transaksi di pasar uang rupiah dilakukan di *uncollateralized market* yaitu melalui pasar uang antar bank (PUAB), dan sisanya di pasar repo (*collateralized market*). Selain itu, transaksi di PUAB juga masih didominasi oleh transaksi *overnight* (O/N) dan transaksi di bawah 1 minggu. Sementara transaksi di pasar repo didominasi transaksi dengan tenor di bawah 1 bulan. Sementara dari pasar valas, data BIS menunjukkan bahwa transaksi di pasar valas pada 2016 mencatatkan *turnover* sekitar 5 miliar dolar AS per hari. Angka tersebut belum merepresentasikan kegiatan ekonomi domestik dan lebih kecil dibandingkan dengan *turnover* transaksi valas di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Transaksi valas domestik juga masih didominasi oleh instrumen *spot* (62%), diikuti oleh *swap* dan *forward*. Selain itu, transaksi tenor pendek masih didominasi transaksi derivatif, meskipun porsi transaksi derivatif terus meningkat sebagai kontribusi positif upaya pendalaman pasar valas dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan pemetaan tersebut, kebijakan pendalaman pasar uang rupiah antara lain dilakukan dengan berbagai upaya untuk pengembangan pasar repo. Sejalan implementasi BI7DRR sebagai suku bunga kebijakan, Bank Indonesia semakin aktif meningkatkan pembangunan kapasitas peserta pasar repo dengan melakukan berbagai *Focus Group Discussion* (FGD) dan *workshop* pengembangan pasar uang rupiah, khususnya pasar repo. Bank Indonesia juga memfasilitasi dan mengakselerasi kesepahaman dan penandatanganan kontrak *Global Master Repo Agreement* (GMRA) untuk mempercepat implementasi transaksi repo dan memperluas pelaku pasar repo. Pada 2016, total bank yang menandatangani GMRA Indonesia telah mencapai 74 bank dan total bank yang telah bertransaksi di pasar repo mencapai 44 bank.

Dalam upaya pengembangan pasar repo tersebut, Bank Indonesia juga mendorong bank membangun stok atau portofolio surat-surat berharga yang diperlukan sebagai media melakukan transaksi repo. Selain itu, Bank Indonesia juga mempersiapkan instrumen baru di pasar keuangan seperti *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) dan *Commercial Paper* (CP). Berbagai upaya pengembangan pasar repo mulai menunjukkan kemajuan positif di pasar uang rupiah. Volume transaksi di pasar repo meningkat pada 2016 dan juga diikuti oleh penurunan suku bunga repo di hampir seluruh tenor (Grafik 11.2 dan Tabel 11.2).

Bank Indonesia juga terus berupaya memperkuat kredibilitas JIBOR sebagai suku bunga acuan. Pada semester I 2016, Bank Indonesia memperpanjang periode *window* mekanisme kuotasi yang ditransaksikan *(tradable)*, memperpanjang tenor untuk menciptakan likuiditas dalam *term* lebih panjang, serta meningkatkan nominal yang ditransaksikan. Berbagai langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk lebih meningkatkan likuiditas dan frekuensi perdagangan. Identifikasi awal juga menunjukkan langkah tersebut turut berkontribusi bersama dengan penurunan suku bunga kebijakan kepada penurunan suku bunga JIBOR di akhir 2016 (Grafik 11.3).

Grafik 11.2. Perkembangan Volume Transaksi Repo

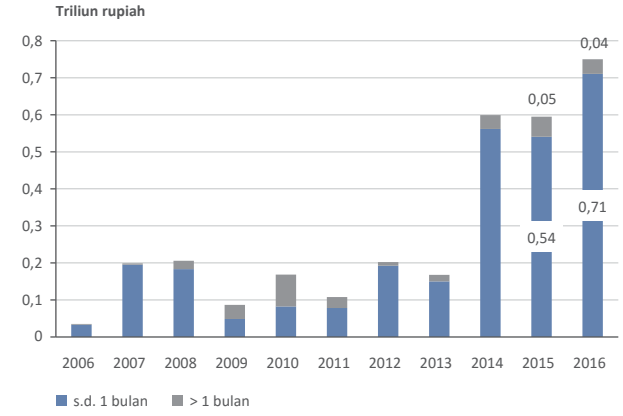

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 11.2. Perkembangan Pasar Uang Rupiah 2015-2016

Indikator	2015	2016	Perubahan
PUAB			
Suku Bunga (%)			
- PUAB O/N	5,8%	4,8%	-103 bps
- PUAB 1 Minggu	6,1%	5,5%	-64 bps
- PUAB 1 Bulan	7,1%	6,5%	-63 bps
Rata-Rata Harian Volume (Miliar rupiah)			
- PUAB O/N	6.843	7.155	4,4%
- PUAB Keseluruhan	11.625	11.746	1,0%
REPO ANTAR BANK			
Suku Bunga (%)			
- REPO O/N	n.a.	4,7%	n.a.
- REPO 1 Minggu	6,2%	5,4%	-74 bps
- REPO 1 Bulan	6,9%	6,1%	-77 bps
Rata-Rata Harian Volume (Miliar rupiah)			
- Repo Keseluruhan	596	735	19%

Sumber : Bank Indonesia

Bank Indonesia juga mendorong pendalaman pasar uang valas, antara lain dengan memberikan kemudahan dalam transaksi lindung nilai *(hedging)*. Pelaksanaan transaksi *forward* mendapat kemudahan melalui penyelesaian transaksi secara *netting* untuk *unwind*, *early termination* dan *rollover*. Kemudahan dimaksudkan untuk mengakomodasi pelaksanaan lindung nilai di perbankan domestik sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban lindung nilai bagi korporasi domestik yang memiliki selisih bersih utang luar negeri. Bersamaan dengan langkah tersebut, Bank Indonesia juga terus melakukan diseminasi tentang lindung nilai yang kemudian diikuti dengan kesepahaman FX *Line* oleh 7 korporasi BUMN dengan bank-bank BUMN. Bank Indonesia juga terus

Grafik 11.3. *Yield Curve* JIBOR

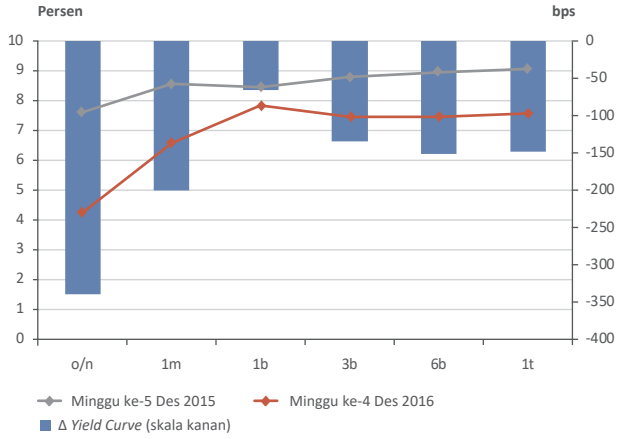

Sumber: Bank Indonesia

mendorong penggunaan instrumen derivatif dalam rangka lindung nilai atas risiko nilai tukar. Transaksi lindung nilai tersebut baik yang masih bersifat transaksi konvensional seperti *plain vanilla* (*forward, swap* dan *option*) maupun transaksi *structured product* seperti *call spread option* (CSO) dan transaksi lindung nilai berbasis prinsip syariah (*hedging* syariah).

Secara keseluruhan, berbagai upaya dalam pendalaman pasar uang diletakkan dalam konteks upaya Bank Indonsia mengembangkan ekosistem pasar keuangan. Hal tersebut penting dilakukan mengingat pasar keuangan yang dalam, likuid dan efisien memiliki peran yang penting dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan perekonomian. Pengembangan ekosistem pasar keuangan dituangkan dalam kerangka kebijakan yang berbasis 7 pilar/subsistem (Diagram 11.1).

Sejumlah ketentuan diterbitkan pada 2016 dalam upaya mendukung ekosistem pasar keuangan domestik. Ketentuan tersebut antara lain ialah (i) PBI Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang, yang diharapkan diikuti pengaturan instrumen pasar uang serta infrastrukturnya; (ii) pengaturan untuk meningkatkan kredibilitas *benchmark rate* dengan penyempurnaan JIBOR; (iii) penyempurnaan kode etik pasar *(market code of conduct)* dengan mengadopsi *internasional best practice* bersama dengan *Indonesian Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC); dan (iv) pengembangan pasar valuta asing, melalui PBI Nomor 18/18/PBI/2016 tentang tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan PBI Nomor 18/19/PBI/2016 tentang tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing. Dalam ketentuan tersebut perbankan diperkenankan menyediakan instrumen *hedging* yang beragam dan efisien. Hal tersebut dalam rangka mengantisipasi kebutuhan *hedging* korporasi, sejalan dengan diwajibkannya perusahaan dengan eksposur pinjaman dan kewajiban luar negeri melakukan *hedging* dengan bank domestik.

Pengembangan ekosistem pasar keuangan juga diperkuat dengan penyiapan infrastruktur pasar uang, termasuk penyempurnaan sistem transaksi dan pelaporan. Pengembangan infrastruktur antara lain meliputi pengembangan teknologi finansial (*fintech*) dan pengembangan *roadmap Central Clearing Counterparty* (CCP). Pengembangan CCP bertujuan meminimalkan risiko transaksi di pasar keuangan dengan mencegah kegagalan pelaksanaan/penyelesaian transaksi (*default*) yang menyebabkan efek domino sistemik dan mencegah pengenaan tarif dalam skema *margining rule* yang diterapkan di negara maju.

Diagram 11.1. Ekosistem Pengembangan Pasar Keuangan

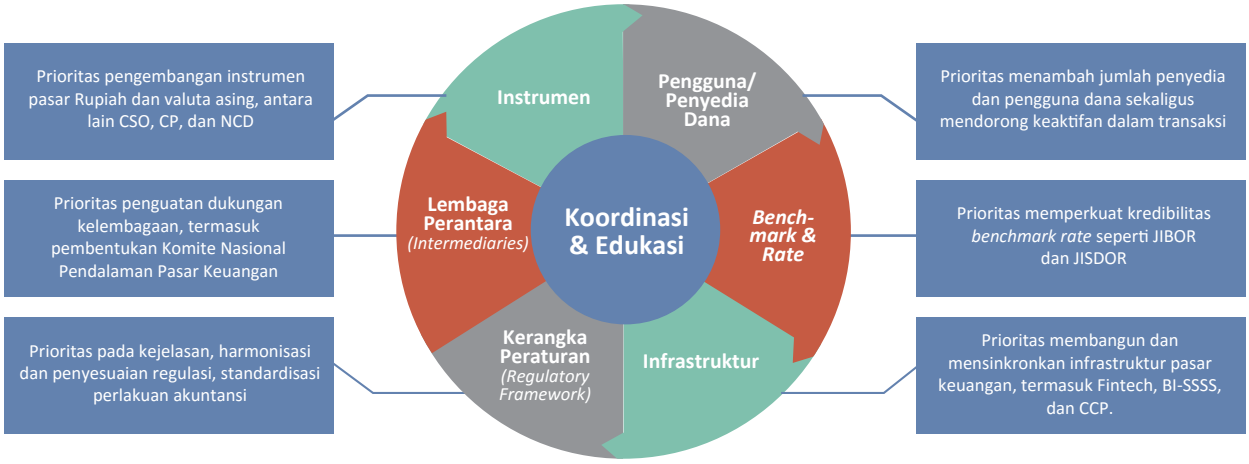

Sumber: Bank Indonesia

Pengembangan ekosistem pasar keuangan juga ditopang dengan pembentukan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Dalam forum tersebut, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan akan melakukan sinergi agar penerapan berbagai kebijakan di pasar obligasi, pasar saham, pasar uang, dan pasar valuta asing, menjadi lebih terintegrasi. Forum koordinasi dan komunikasi juga dilakukan pelaku pasar melalui Indonesia *Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC) dan asosiasi profesi *Association Cambiste Internationale* (ACI).

Selain pengembangan pasar keuangan konvensional, Bank Indonesia juga mendorong aktivitas transaksi mempergunakan instrumen keuangan syariah, sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan pasar keuangan syariah. Salah satunya adalah transaksi repo antar bank dengan *underlying instrumen* keuangan syariah. Transaksi repo antar bank dengan menggunakan sukuk negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) telah dilakukan sejak 2014, sebelum ketentuan Bank Indonesia terkait repo syariah diterbitkan 2015. Setelah diterbitkannya ketentuan Bank Indonesia untuk repo syariah sampai dengan tahun 2016, transaksi repo syariah tercatat telah dilakukan minimal tiga belas kali.

Bank Indonesia pada 2016 juga telah mengeluarkan pengaturan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam PBI Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah *(Hedging Syariah)*. Pengaturan ini sejalan dengan upaya memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar, termasuk di keuangan syariah. Transaksi yang dapat menjadi *underlying hedging* syariah adalah seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri dan/atau investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.

11.4. TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER

Transmisi Jalur Suku Bunga

Arah kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia dengan menurunkan suku bunga kebijakan dan menurunkan GWM Primer Rupiah tertransmisikan melalui jalur suku bunga dengan baik. Suku bunga PUAB *overnight* (O/N) pada sepanjang 2016 secara umum bergerak mengikuti suku bunga kebijakan. Suku bunga PUAB O/N pada akhir Desember 2016 tercatat sebesar 4,2% atau turun 155 bps dibandingkan dengan posisi level awal Januari 2016, tidak berbeda jauh dengan penurunan suku bunga kebijakan sebesar 150 bps (Grafik 11.4).

Dalam dinamika harian, suku bunga PUAB *overnight* (O/N) rupiah sempat meningkat akibat tekanan temporer kenaikan permintaan likuiditas. Pada akhir September 2016, suku bunga PUAB O/N sempat naik akibat tekanan likuiditas menjelang akhir periode program amnesti pajak tahap 1. Kenaikan suku bungan PUAB O/N tersebut membuat *spread* dengan suku bunga DF melebar (Grafik 11.5). Bank Indonesia merespon kenaikan suku bunga PUAB O/N melalui strategi operasi moneter lanjutan sehingga dapat meredam kenaikan suku bunga PUAB O/N yang berlebihan.

Perkembangan suku bunga PUAB O/N yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan juga dipengaruhi oleh strategi operasional Bank Indonesia. Bank Indonesia secara konsisten mengelola likuiditas bersih *(net liquidity)*

Grafik 11.4. Suku Bunga PUAB O/N dan Koridor Suku Bunga Bank Indonesia

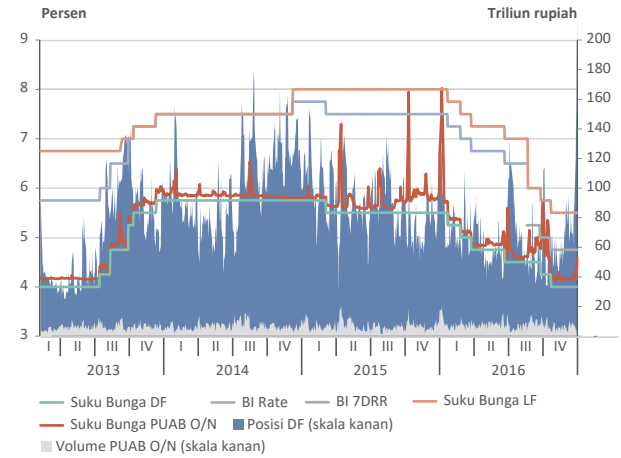

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 11.6. Posisi Operasi Moneter

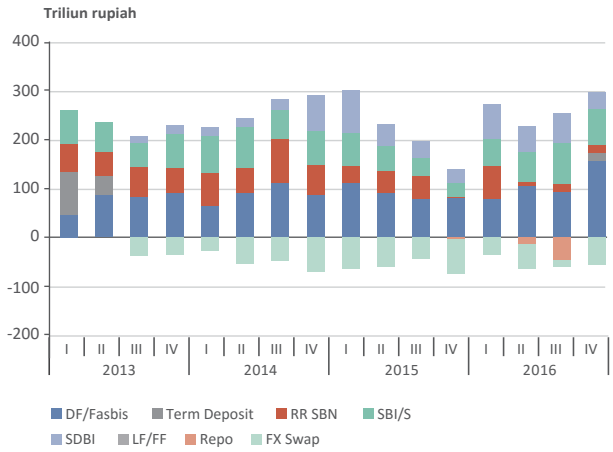

Sumber: Bank Indonesia

perbankan yang cenderung longgar pada 2016, akibat perlambatan penyaluran kredit dan pelonggaran GWM Primer rupiah. Operasi moneter Bank Indonesia dilakukan dengan menyerap peningkatan likuiditas ke berbagai instrumen moneter sehingga membuat rata-rata harian posisi OM kontraksi naik dari Rp324,3 triliun pada 2015 menjadi Rp332,0 triliun pada 2016 (Grafik 11.6). Likuiditas yang tinggi di pasar membuat bank menjadi lebih leluasa menjaga *precautionary liquidity* harian yang rendah sehingga posisi DF/S bank di Bank Indonesia menurun. Rata-rata harian volume DF/S turun dari Rp103,5 triliun pada 2015 menjadi Rp82,6 triliun pada 2016.

Dari komposisi penempatan, preferensi pengelolaan likuiditas bank domestik di instrumen pasar uang pada 2016 masih berorientasi ke instrumen jangka pendek. Hal tersebut tercermin dari aktivitas perbankan di PUAB dan komposisi instrumen OM. Transaksi volume PUAB masih didominasi oleh PUAB tenor *overnight* dengan komposisi 54% - 67% dari total volume PUAB. Begitu pula preferensi penempatan likuiditas bank pada instrumen OM juga masih didominasi oleh instrumen OM tenor pendek *(deposit facility, term deposit, reverse repo* SBN). Durasi instrumen OM cenderung memendek ketika terdapat kebutuhan permintaan musiman aliran keluar uang kartal. Sebaliknya, saat aliran uang kartal kembali ke dalam sistem perbankan maka durasi instrumen OM akan kembali naik. Pada paruh kedua 2016, durasi instrumen OM meningkat jauh di atas pola musiman disebabkan perubahan strategi OM dan ekspektasi penurunan suku bunga acuan (Grafik 11.7). Menjelang akhir tahun, bank kembali memperpendek durasi penempatan likuiditasnya di OM untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang kartal masyarakat.

Tren penurunan suku bunga PUAB O/N yang sejalan dengan arah kebijakan moneter juga berlanjut kepada suku bunga

Grafik 11.5. Posisi Operasi Moneter dan *Spread* PUAB O/N-DF

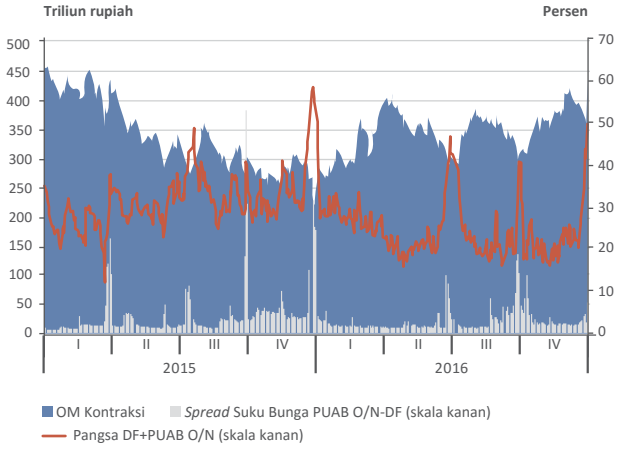

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 11.7. Durasi Operasi Moneter Menurut Sisa *Maturity*

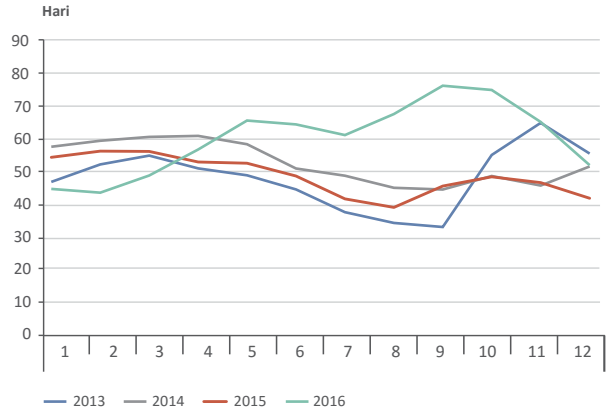

Sumber : Bank Indonesia

deposito bank. Pada 2016, suku bunga deposito menurun menjadi 6,72%, atau turun 122 bps dibandingkan dengan akhir 2015. Penurunan suku bunga deposito tersebut terjadi pada semua tenor suku bunga deposito dari 1 bulan hingga 12 bulan (Grafik 11.8 dan 11.9).

Penurunan suku bunga deposito juga diikuti penurunan suku bunga kredit, meskipun dengan besaran yang lebih kecil. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada akhir 2016 tercatat sebesar 12,04%, turun 79 bps dibandingkan dengan akhir 2015 yang tercatat sebesar 12,83% (Grafik 11.9). Penurunan suku bunga kredit yang lebih kecil dibandingkan dengan penurunan suku bunga deposito dipengaruhi oleh meningkatnya risiko kredit sepanjang tahun 2016 sehingga mendorong bank cenderung melakukan konsolidasi dan menahan penurunan suku bunga kredit.

Berdasarkan jenis penggunaannya, semua jenis suku bunga kredit turun dengan besaran yang bervariasi. Dibandingkan dengan akhir 2015, suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) turun 110 bps menjadi 11,36%, suku bunga Kredit Investasi (KI) turun 91 bps menjadi 11,21%, sedangkan suku bunga Kredit Konsumsi (KK) turun 29 bps menjadi 13,59%. Khusus untuk KK, penurunan suku bunga KK yang lebih terbatas banyak dipengaruhi risiko kredit kelompok KK yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko kredit di rata-rata industri perbankan.

Penurunan suku bunga deposito yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan suku bunga kredit berdampak kepada melebarnya *spread* suku bunga deposito dan suku bunga. *Spread* suku bunga perbankan pada 2016 melebar menjadi 532 bps dibandingkan dengan akhir 2015 sebesar 489 bps (Grafik 11.9). *Spread* suku bunga perbankan Indonesia tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan *spread* suku bunga perbankan di negara lain di kawasan, seperti Malaysia dan Singapura yang berada di kisaran 1,6%-2,0%.

Grafik 11.8. Suku Bunga Kebijakan, LPS dan Suku Bunga Deposito

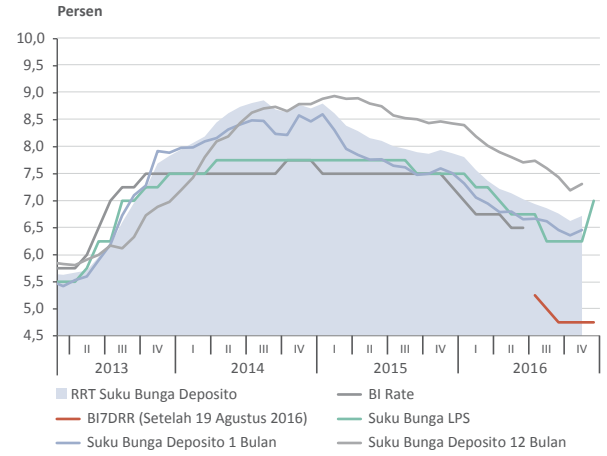

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 11.9. Suku Bunga Deposito dan Kredit

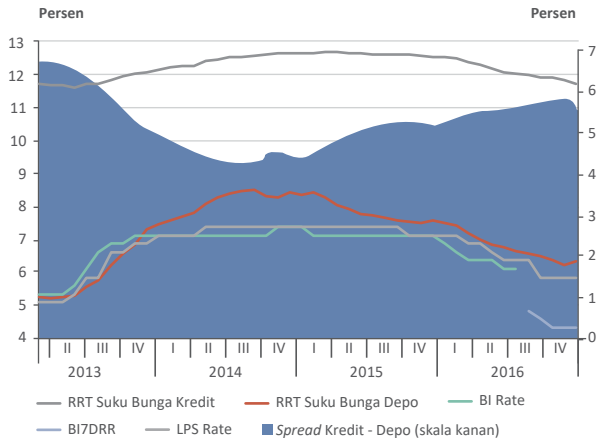

Sumber: Bank Indonesia

Transmisi Jalur Likuiditas

Pertumbuhan uang primer (M0) pada 2016 tercatat sebesar 4,6%, meningkat dari 3,0% pada 2015. Peningkatan pertumbuhan M0 dipengaruhi pertumbuhan signifikan dari posisi GWM sekunder, terutama komponen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI). Sementara itu, pertumbuhan uang yang diedarkan (*Currency Outside Bank*/COB dan *Cash in Vault*/CIV) masih belum kuat yaitu 4,4%, atau lebih rendah dari perkembangan 2015 yang tumbuh 11,0% (Grafik 11.10). Dari sisi faktor yang mempengaruhi, peningkatan pertumbuhan M0 pada 2016 didorong *Net Foreign Asset* (NFA) dan

Grafik 11.10. Pertumbuhan Komponen M0

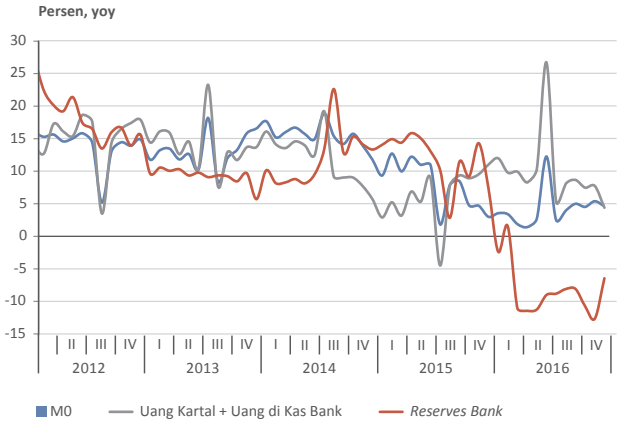

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 11.11. **Pertumbuhan Komponen M1**

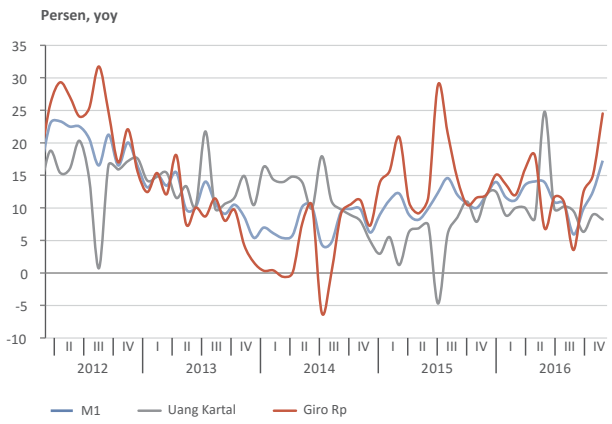

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 11.13. **Kontribusi Komponen Kuasi pada M2**

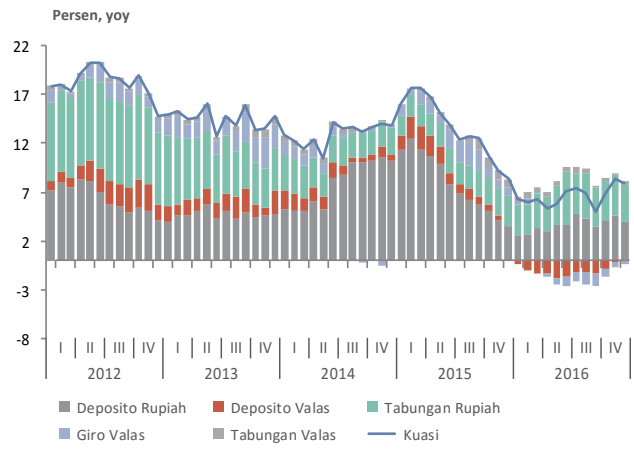

Sumber: Bank Indonesia

Net Domestic Asset (NDA) yang meningkat signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2015. Posisi NFA yang meningkat sejak awal 2016 sejalan dengan peningkatan cadangan devisa. Sementara itu, pertumbuhan NDA juga meningkat terutama disebabkan kenaikan posisi penempatan likuiditas perbankan di instrumen OM.

Likuiditas perekonomian yang tercermin pada indikator uang beredar dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2) terlihat meningkat pada 2016. Pertumbuhan M1 pada 2016 meningkat dari 12,0% pada 2015 menjadi 17,3%. Peningkatan pertumbuhan M1 terutama didorong kenaikan giro rupiah sedangkan, pertumbuhan uang kartal yang masih belum kuat. Uang kartal pada 2016 tumbuh sebesar 8,2%, menurun cukup signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2015 sebesar 12,0% (Grafik 11.11). Sementara itu, giro rupiah pada 2016 tumbuh sebesar 24,5%, meningkat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2015 sebesar 12,1%.

Grafik 11.12. **Pertumbuhan Komponen M2**

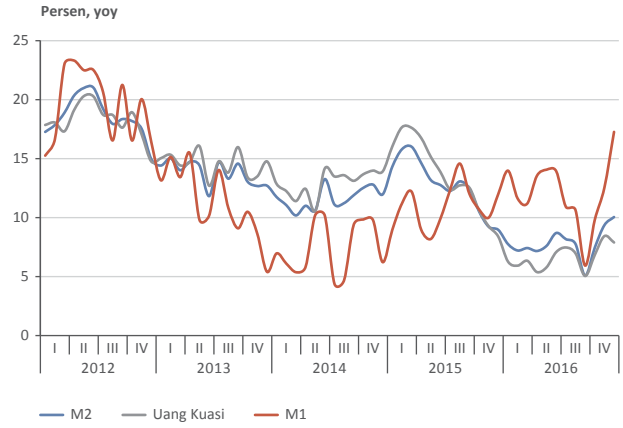

Sumber: Bank Indonesia

Peningkatan pertumbuhan M1 berkontribusi kepada kenaikan pertumbuhan M2 pada 2016. Pertumbuhan M2 tercatat naik dari 8,9% pada tahun sebelumnya menjadi 10,0% pada 2016 (Grafik 11.12). Sementara itu, kenaikan pertumbuhan M2 banyak dipengaruhi pertumbuhan M1, mengingat pertumbuhan uang kuasi melambat dari 8,4% pada 2015 menjadi 7,9% pada 2016. Perlambatan pertumbuhan uang kuasi tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan negatif dari simpanan valas di perbankan (baik deposito, tabungan, dan giro) sedangkan simpanan rupiah yang merupakan komponen terbesar uang kuasi tumbuh meningkat (Grafik 11.13). Pertumbuhan deposito rupiah pada 2016 tercatat sebesar 8,8%, meningkat dibandingkan dengan 2015 yang tumbuh sebesar 7,6%.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi, perbaikan pertumbuhan M2 disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan NFA. Pertumbuhan NFA tahun 2016 tercatat sebesar 14,0%, meningkat tajam dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,0% didorong dampak kenaikan cadangan devisa. Sementara itu, NDA tumbuh melambat dari 11,1% pada tahun 2015 menjadi 8,7% pada tahun 2016 terutama didorong perlambatan pertumbuhan kredit dari 10,5% pada 2015 menjadi 7,9% pada 2016.

Boks 11.1. Penguatan Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

Bank Indonesia sejak Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran akhir atau sering disebut *Inflation Targeting Framework* (ITF). Salah satu elemen penting yang mengemuka dalam implementasi ITF tersebut ialah peran penting suku bunga dalam transmisi kebijakan moneter. Bersamaan dengan implementasi ITF, Bank Indonesia menjadikan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan yang merepresentasikan sinyal respons kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran. Dalam praktiknya, BI Rate kemudian menjadi acuan bagi pergerakan suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) *overnight* (O/N) yang dijadikan sebagai sasaran operasional kebijakan. Pergerakan suku bunga PUAB O/N selanjutnya diharapkan dapat ditransmisikan ke suku bunga tenor jangka lebih panjang dan pada akhirnya mempengaruhi kegiatan di sektor riil dan inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter.

Grafik 1. BI Rate, Suku Bunga DF/LF dan Suku Bunga PUAB O/N

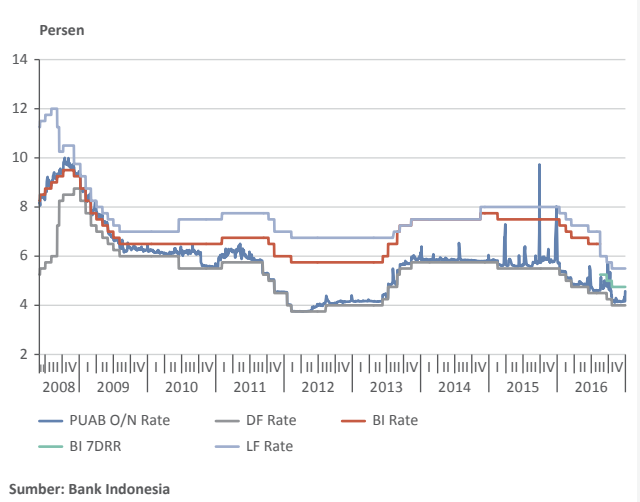

Sumber: Bank Indonesia

Kebijakan moneter menghadapi tantangan yang berbeda pascakrisis keuangan global 2008/09. Satu sisi, kebijakan moneter longgar yang ditempuh negara-negara maju mendorong aliran masuk modal asing ke negara berkembang meningkat signifikan, termasuk ke Indonesia. Aliran masuk modal asing tersebut kemudian menimbulkan ekses likuiditas di PUAB dan mendorong suku bunga PUAB, khususnya tenor O/N, menjadi sangat rendah. Namun di sisi lain, penurunan BI Rate sulit ditempuh mengingat tekanan terhadap inflasi domestik dan defisit transaksi berjalan masih tinggi. Perkembangan ini pada gilirannya membuat deviasi antara BI Rate dan suku bunga PUAB O/N melebar (Grafik 1). BI Rate yang pada tahun 2008 masih di sekitar suku bunga PUAB O/N, dalam perkembangannya hingga awal tahun 2016 telah melebar dan setara dengan suku bunga operasi moneter tenor 12 bulan. Perkembangan yang kurang menguntungkan karena mengakibatkan sinyal dan transmisi kebijakan moneter menjadi tidak optimal.

Bank Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan melakukan reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter. Langkah tersebut diumumkan pada 15 April 2016 dan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Reformulasi memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat sinyal arah kebijakan moneter. Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di PUAB untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan. Dalam implementasinya, reformulasi memegang empat prinsip. Pertama, reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan ITF. Kedua, reformulasi tidak untuk mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang ditempuh. Ketiga, reformulasi membuat suku bunga kebijakan terefleksikan di instrumen moneter dan dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia. Keempat, penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan dapat dipengaruhi suku bunga kebijakan.

Pada 19 Agustus 2016, reformulasi kerangka operasional moneter secara efektif diimplementasikan dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7-day *(Reverse)* Repo Rate (BI7DRR). Sesuai dengan prinsip kedua implementasi reformulasi, perubahan tersebut tidak mengubah *stance* kebijakan moneter karena kedua suku bunga kebijakan BI Rate dan BI7DRR berada dalam satu struktur suku bunga *(term structure)* yang sama dalam mengarahkan inflasi agar sesuai dengan sasarannya. Perbedaan hanya terlihat pada tenor instrumen, yakni BI Rate setara dengan instrumen moneter 12 bulan, sedangkan BI7DRR setara dengan instrumen moneter 7 hari. Perbedaan tenor tersebut pada gilirannya berimplikasi pada perbedaan level suku bunga yang pada 19 Agustus 2016 yakni 5,25% untuk instrumen tenor 7 hari yang menjadi acuan BI7DRR dan 6,50% untuk instrumen moneter 12 bulan yang setara dengan BI Rate (Grafik 2).

Selain perubahan suku bunga kebijakan, Bank Indonesia memperkuat strategi operasi moneter dengan menjaga koridor suku bunga PUAB simetris dan lebih sempit.

Grafik 2. BI7DRR dan Struktur Suku Bunga Instrumen Moneter pada 19 Agustus 2016

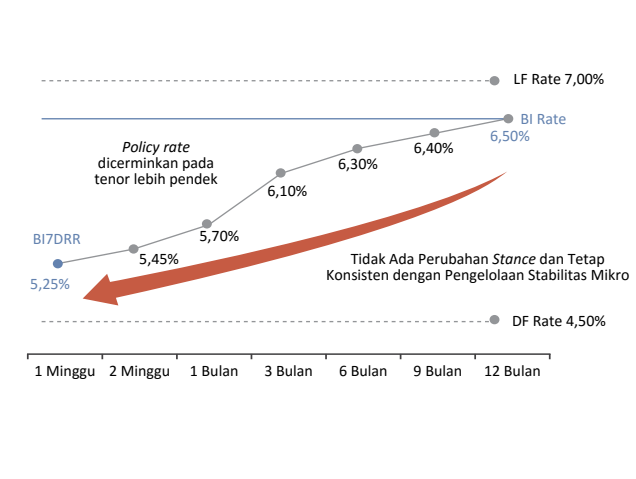

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3. Reformulasi Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

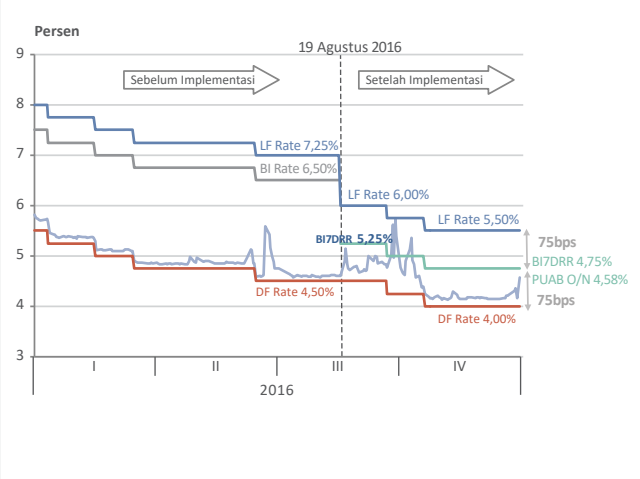

Sumber: Bank Indonesia

Batas bawah koridor *(deposit facility rate*/DF rate) dan batas atas koridor *(lending facility rate*/LF) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas BI7DRR (Grafik 3). Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter turut disertai langkah-langkah percepatan pendalaman pasar uang, antara lain melalui penjarangan frekuensi lelang Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penguatan komunikasi dengan pengumuman jadwal lelang OPT regular. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk memastikan penguatan kerangka operasional moneter dapat berjalan baik.

Evaluasi awal setelah implementasi menunjukkan reformulasi kerangka operasional moneter direspons positif. Berbagai kalangan, seperti investor, analis ekonomi, publik, dan media memandang implementasi BI7DRR memberikan kejelasan *stance* kebijakan moneter. Selain itu, konsistensi implementasi kerangka yang baru dipandang akan berdampak positif bagi penguatan kredibilitas kebijakan dan dapat mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter. Ke depan, penguatan terkait strategi operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan akan terus ditempuh sehingga dapat terus meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

BAB 12
Kebijakan Makroprudensial

Pada 2016 Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial akomodatif sebagai instrumen *countercyclical*. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menahan perlambatan sekaligus mendorong pertumbuhan kredit sehingga turut berkontribusi dalam mempercepat pemulihan ekonomi domestik dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Instrumen kebijakan makroprudensial yang digunakan meliputi pelonggaran ketentuan *Loan to Value Ratio* (LTV)/ *Financing to Value Ratio* (FTV) kredit/pembiayaan properti, peningkatan batas bawah target *Loan to Funding Ratio* (LFR), mempertahankan besaran *countercyclical buffer* (CCB), dan mendorong penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Implementasi kebijakan makroprudensial tersebut juga diperkuat dengan pengelolaan risiko sistem keuangan, khususnya perbankan, melalui surveilans dan pemeriksaan makroprudensial.

Keterangan gambar:
Merespons pertumbuhan ekonomi yang belum kuat, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial dengan mendorong aktivitas sektor properti. Tumbuhnya sektor properti kemudian diharapkan akan mendorong roda perekonomian bergulir lebih cepat.

Arah kebijakan makroprudensial pada 2016 disinergikan dengan *stance* kebijakan moneter bias longgar untuk mendorong pemulihan ekonomi domestik. Bank Indonesia pada 2016 melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif sebagai instrumen *countercyclical* dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menahan perlambatan sekaligus sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit sehingga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi. Kesinambungan dan konsistensi bauran kebijakan sangat penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat transmisi kebijakan, baik moneter maupun makroprudensial, memerlukan waktu tunda (*time lag*) untuk dapat tertransmisikan secara penuh dalam memengaruhi aktivitas perekonomian.

Bank Indonesia memanfaatkan serangkaian instrumen kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit pada 2016. Bank Indonesia kembali melonggarkan ketentuan *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV) pada Agustus 2016. Pelonggaran tersebut dilakukan dengan menaikkan rasio LTV/FTV untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dengan pelonggaran tersebut diharapkan dapat mendorong permintaan kredit, khususnya sektor properti. Kemudian untuk meningkatkan minat perbankan dalam menyalurkan kredit, Bank Indonesia menaikkan batas bawah target *Loan to Funding Ratio* (LFR). Bank Indonesia juga mempertahankan besaran *Countercyclical Buffer* (CCB) sebesar 0% untuk merespons perkembangan ekonomi dan risiko sistemik dari pertumbuhan kredit. Upaya mendorong pertumbuhan kredit juga dilakukan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan dua pendekatan utama, yakni mendorong penawaran kredit UMKM dari sisi perbankan dan meningkatkan kapasitas UMKM untuk memperbaiki sisi permintaan.

Untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan dan memperkuat pengelolaan risiko pada sistem keuangan, Bank Indonesia juga melakukan surveilans dan pengawasan makroprudensial. Dalam rangka pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia secara regular melakukan surveilans dan asesmen atas industri keuangan yang difokuskan pada risiko sistemik dan *stress testing* ketahanan institusi keuangan. Selanjutnya berdasarkan hasil surveilans dan asesmen tersebut, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan yang bersifat makro terhadap lembaga jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan risiko sistemik yang rendah.

12.1. PELONGGARAN KETENTUAN *LOAN/ FINANCING TO VALUE RATIO*

Kinerja sektor properti yang masih lambat mendorong Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran LTV yang telah dilakukan pada 2015. Melambatnya sektor properti antara lain tercermin dari perlambatan penjualan dan harga properti yang diikuti oleh penurunan permintaan KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA). Sebagai respons atas tren perlambatan tersebut, Bank Indonesia pada 2015 telah melonggarkan kebijakan makroprudensial dengan menaikkan rasio LTV atau rasio FTV untuk kredit atau pembiayaan properti.[1]

Pelonggaran LTV/FTV pada 2015 tersebut mampu menahan penurunan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang diberikan bank. Meskipun demikian, pelonggaran ketentuan LTV/FTV tersebut belum cukup kuat untuk meningkatkan pertumbuhan kredit atau pembiayaan sehingga diperlukan kebijakan pelonggaran lanjutan. Dengan tambahan pelonggaran lanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan di sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Peningkatan aktivitas pada sektor properti cukup strategis karena memiliki dampak rambatan kepada sektor-sektor penunjang yang cukup banyak sehingga dapat mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Bank Indonesia kembali melonggarkan kebijakan LTV/FTV dengan mengeluarkan PBI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio *Loan to Value* (LTV) untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* (FTV) untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Pelonggaran LTV/FTV lanjutan pada 2016 mencakup beberapa hal, terutama terkait dengan besaran rasio dan *tiering* LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti. Besaran rasio LTV/FTV dinaikkan sebesar 5% sampai dengan 15% pada semua kelompok properti yaitu rumah tapak, rumah susun dan rumah toko (ruko) atau rumah kantor (rukan) maupun untuk pemilikan rumah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Besaran rasio LTV/FTV untuk pembiayaan syariah dibedakan berdasarkan akadnya, yaitu rasio yang sama untuk akad *murabahah* dan *istishna'*.[2] Sementara untuk akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ)

1 Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/10/PBI/2015 tentang Rasio *Loan to Value* (LTV) atau Rasio *Financing to Value* (FTV) untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

2 *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli *(mustashni')* dan penjual atau pembuat *(shani')*.

dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) lebih tinggi 5% untuk properti rumah tapak tipe > 70 dan tipe 22-70, serta rumah susun tipe > 70.[3] Dengan demikian, kisaran rasio LTV/FTV menjadi 75% hingga 90% dengan rasio yang semakin besar apabila tipe properti semakin kecil dan untuk kepemilikan pertama. Sebaliknya, untuk tipe properti yang semakin besar serta kepemilikan properti kedua dan selanjutnya, maka besaran rasio LTV/FTV akan semakin kecil (Tabel 12.1).

Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, bank dimungkinkan untuk memberikan rasio LTV/FTV yang lebih besar apabila debitur memiliki risiko kredit yang rendah. Indikator risiko kredit tersebut dicerminkan pada rasio kredit/pembiayaan bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan bersih (neto) dan rasio kredit/pembiayaan properti bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan properti bersih (neto) kurang dari 5%. Sementara untuk bank yang memiliki rasio kredit/pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi dari ketentuan, maka wajib menggunakan rasio LTV/ FTV yang lebih ketat. Adapun kredit tambahan (*top up*) oleh bank umum dan pembiayaan baru oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan tambahan dari pembiayaan sebelumnya tetap menggunakan rasio LTV kredit properti atau rasio FTV pembiayaan properti yang sama sepanjang kredit atau pembiayaan properti tersebut memiliki kualitas lancar. Sementara untuk kredit atau pembiayaan pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh (inden) diperbolehkan sampai dengan urutan fasilitas kedua dengan pencairan bertahap.

Grafik 12.1. Pertumbuhan Kredit Properti

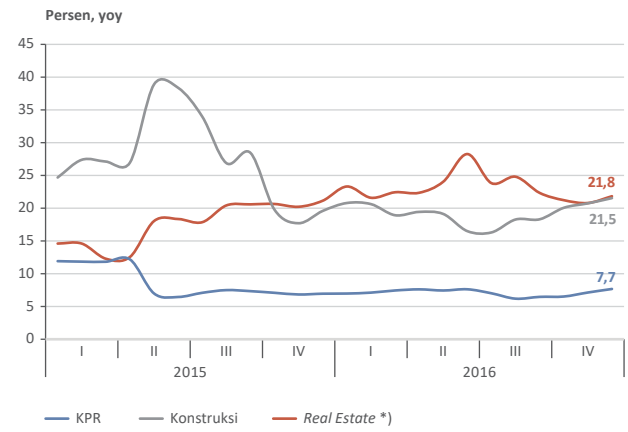

*) termasuk Perumnas
Sumber : Bank Indonesia

Pelonggaran lanjutan kebijakan LTV/FTV pada 2016 mulai berdampak meningkatkan pertumbuhan kredit properti. Setelah pelonggaran LTV pada Agustus 2016, pertumbuhan KPR meningkat menjadi sebesar 7,7% pada Desember 2016 dari sebesar 7,0% pada akhir 2015 (Grafik 12.1). Pertumbuhan kredit konstruksi meningkat menjadi 21,5% dari sebesar 19,5% pada 2015. Sementara kredit *real estate* juga mulai menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada penghujung 2016 menjadi sebesar 21,8%, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan pada 2015 sebesar 21,1%. Berdasarkan tipenya, pertumbuhan kredit properti untuk rumah tinggal tipe 22-70, tipe > 70, flat/apartemen < 21, dan ruko/rukan

Tabel 12.1. Besaran Rasio *Loan to Value* Kredit Properti dan *Financing To Value* Pembiayaan Properti Syariah

Kredit Properti (KP) & Pembiayaan Properti (PP) Berdasarkan Akad Murabahah & Akad Istishna'				Pembiayaan Properti (PP) Berdasarkan Akad MMQ & Akad IMBT			
Tipe Properti (m²)	Fasilitas KP & PP			Tipe Properti (m²)	Fasilitas KP & PP		
	I	II	III dst		I	II	III dst
Rumah Tapak				Rumah Tapak			
Tipe > 70	85%	80%	75%	Tipe > 70	90%	85%	80%
Tipe 22 - 70	-	85%	80%	Tipe 22 - 70	-	90%	85%
Tipe ≤ 21	-	-	-	Tipe ≤ 21	-	-	-
Rumah Susun				Rumah Susun			
Tipe > 70	85%	80%	75%	Tipe > 70	90%	85%	80%
Tipe 22 - 70	90%	85%	80%	Tipe 22 - 70	90%	85%	80%
Tipe ≤ 21	-	85%	80%	Tipe ≤ 21	-	85%	80%
Ruko/Rukan	-	85%	80%	Ruko/Rukan	-	85%	80%

Sumber: Bank Indonesia

3 *Musyarakah mutanaqisah* adalah pembiayaan *musyarakah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak *(syarik)* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

mulai meningkat (Grafik 12.2). Peningkatan pertumbuhan kredit properti relatif belum signifikan karena dampak pelonggaran kebijakan LTV/FTV masih memerlukan waktu yang lebih panjang untuk dapat tertransmisikan secara penuh.

12.2. KEBIJAKAN GIRO WAJIB MINIMUM TERKAIT *LOAN TO FUNDING RATIO*

Pertumbuhan kredit yang masih belum kuat mengindikasikan belum optimalnya peran perbankan dalam menyalurkan kredit. Ditinjau dari ketentuan LFR, masih banyak bank yang memiliki LFR di bawah 78% dan memiliki pertumbuhan kredit yang relatif rendah selama lima tahun terakhir. Pada dasarnya potensi bank-bank dengan LFR < 78% tersebut untuk meningkatkan penyaluran kredit cukup tinggi karena memiliki likuiditas dan permodalan yang tinggi. Namun, minat bank-bank tersebut dalam penyaluran kredit relatif rendah karena faktor model bisnis bank maupun *risk appetite* dalam strategi penempatan dananya.

Untuk mendorong bank-bank dengan LFR < 78% menyalurkan kredit, Bank Indonesia menaikkan batas bawah target LFR dari 78% menjadi 80%, dengan batas atas tetap sebesar 92% (Grafik 12.3). Kebijakan tersebut ditujukan untuk memacu bank-bank yang masih memiliki LFR rendah agar meningkatkan penyaluran kredit. Bagi bank yang tidak dapat mencapai kisaran target LFR akan dikenakan disinsentif berupa tambahan kewajiban giro wajib minimum (GWM) sehingga ketentuan ini dikenal dengan GWM-LFR. Perubahan ketentuan tersebut tertuang dalam PBI Nomor 18/14/PBI/2016 tentang Perubahan Keempat atas PBI Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing

Grafik 12.2. Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah Menurut Tipe

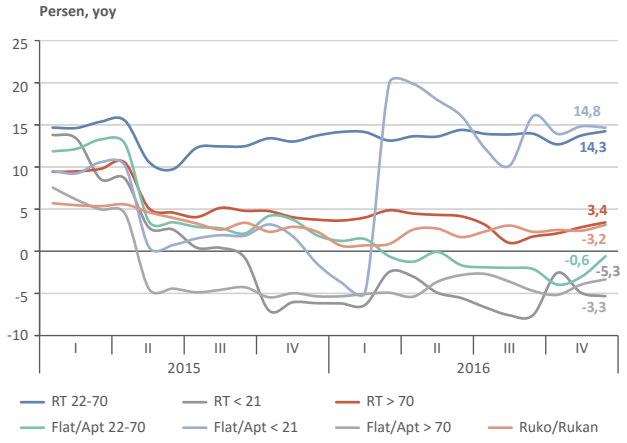

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 12.3. Perkembangan Batas Atas dan Batas Bawah Target *Loan to Funding Ratio*

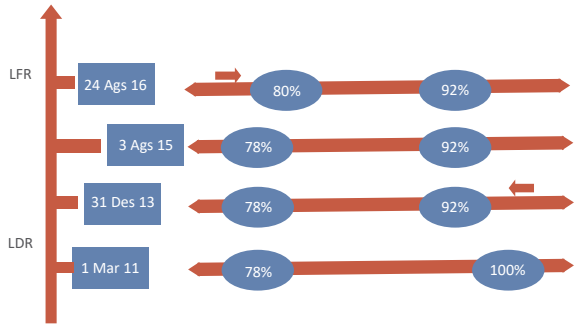

Sumber: Bank Indonesia

bagi Bank Umum Konvensional, yang secara efektif mulai diberlakukan sejak 24 Agustus 2016.

12.3. KEBIJAKAN MENDORONG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

UMKM memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia karena menyerap hampir 97% tenaga kerja.[4] Namun demikian, dukungan pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM hanya mencapai 6,9% dari PDB, paling rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Selain itu, saat ini tercatat baru sebanyak 23,1% pelaku UMKM yang memiliki akses pembiayaan kepada perbankan. Untuk mendorong pertumbuhan UMKM, Pemerintah berupaya melakukan pemberdayaan UMKM melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kapasitas dan kinerja usaha, penguatan dan perluasan peran sistem informasi pendukung usaha, serta peningkatan iklim usaha.

Pemerintah menerapkan beberapa strategi pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan antara lain melalui pelatihan dan pendampingan. Kedua, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ketiga, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, melalui perluasan penerapan teknologi serta integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun

4 Kementerian Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 2013.

ekspor. Keempat, penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (*backward-forward linkages)*. Kelima, kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha, diantaranya melalui harmonisasi perizinan sektoral dan daerah, pengurangan jenis, biaya, dan waktu pengurusan perizinan.

Dalam implementasinya, Pemerintah mengeluarkan beberapa Paket Kebijakan Ekonomi yang mendukung pengembangan UMKM. Untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi IV terkait penyediaan pembiayaan murah kepada UMKM. Dalam kebijakan tersebut Pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi 12% dan memperluas cakupan penerima KUR perorangan dan badan usaha, yang meliputi usaha produktif, calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), anggota keluarga karyawan atau TKI yang berpenghasilan tetap, dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan penyaluran KUR tersebut dilanjutkan pada 2016 melalui penurunan suku bunga KUR menjadi 9% dengan target penyaluran sebesar Rp100 triliun. Pemerintah juga mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XI yang memberikan stimulus untuk meningkatkan ekspor UMKM. Stimulus tersebut salah satunya berupa penyediaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE). Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XII untuk memperbaiki iklim berusaha, termasuk UMKM yang diberikan kemudahan berupa pemangkasan prosedur, waktu, biaya perizinan serta kewajiban modal dasar UMKM berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang disesuaikan dengan kesepakatan para pendiri.

Sejalan dengan program Pemerintah, Bank Indonesia juga mengimplementasikan serangkaian kebijakan pengembangan UMKM. Kebijakan pengembangan UMKM tersebut dilakukan untuk mendukung tiga fungsi utama Bank Indonesia, yakni menjaga stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi dari sisi penawaran, mendukung stabilitas sistem keuangan melalui terlaksananya fungsi intermediasi perbankan yang lebih seimbang, dan keandalan sistem pembayaran. Kerangka kebijakan pengembangan UMKM dilakukan melalui empat pilar utama yang mencakup: (i) peningkatan kapasitas ekonomi UMKM; (ii) peningkatan pembiayaan dan akses keuangan UMKM; (iii) peningkatan akses pasar UMKM; dan (iv) peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Kemudian kerangka kebijakan tersebut dijabarkan dalam beberapa area strategis antara lain: (i) mendorong produktivitas, daya saing, dan inovasi UMKM; (ii) memperkuat infrastruktur, kapasitas dan instrumen kebijakan; (iii) memfasilitasi perluasan pasar; dan (iv) meningkatkan efektivitas kerjasama, dan sistem informasi.

Untuk meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM, Bank Indonesia mendorong penciptaan aktivitas ekonomi baru di daerah dan pedesaan. Program tersebut dilakukan melalui pengembangan UMKM unggulan dengan pendekatan ekonomi lokal (*Local Economic Development*/LED). Pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian, menaikkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam program tersebut diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk melakukan identifikasi dan implementasi model pengembangan yang akan dilakukan. Di samping itu, program pengembangan UMKM juga dilakukan melalui pengembangan klaster untuk mendukung ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi. Pengembangan klaster dilakukan dengan pendekatan basis komoditas yang memiliki sumbangan inflasi signifikan dan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Hingga 2016, Bank Indonesia telah mengembangkan 169 klaster binaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai apresiasi terhadap upaya pengembangan klaster, Bank Indonesia memberikan penghargaan berupa 'Apresiasi Kinerja Program Pengendalian Inflasi' kepada klaster binaan Pemerintah dan Bank Indonesia**.** Penghargaan tersebut ditujukan untuk mendorong, menginspirasi, dan mempercepat replikasi program pengembangan komoditas penyumbang inflasi dengan pendekatan klaster.

Strategi peningkatan pembiayaan dan akses keuangan UMKM dilakukan melalui penguatan kebijakan, infrastruktur, dan kapasitas. Salah satu kebijakan Bank Indonesia yang ditujukan untuk mendorong akses keuangan UMKM adalah penetapan kewajiban pemenuhan rasio kredit UMKM minimum sebesar 20% bagi bank umum.[5] Rasio tersebut wajib dipenuhi oleh bank secara bertahap dengan rasio minimum sebesar 10% pada akhir 2016 dan meningkat menjadi 15% pada akhir 2017. Untuk meningkatkan efektivitasnya, ketentuan tersebut diikuti dengan pemberian insentif dan disinsentif. Bagi bank yang dapat memenuhi ketentuan lebih cepat diberikan insentif berupa pelonggaran batas atas LFR dari 92% menjadi 94%. Sementara bagi bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan dikenakan disinsentif berupa pengurangan jasa giro atas bagian kewajiban GWM rupiah yang mendapat remunerasi. Untuk menginspirasi dan mendorong bank dalam penyaluran kredit UMKM, Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada bank pendukung UMKM. Sementara untuk meningkatkan kapasitas SDM perbankan, Bank Indonesia memberikan insentif berupa pelatihan kepada *Account Officer* dan/atau Pejabat Kredit. Pelatihan

5 Dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai profil bisnis UMKM, terutama bagi bank yang belum memiliki keahlian dalam penyaluran kredit UMKM.

Pembiayaan kepada UMKM masih belum merata dan terfokus pada sektor ekonomi tertentu. Penyaluran pembiayaan kepada UMKM masih didominasi oleh sektor perdagangan, sementara pembiayaan pada sektor pertanian dan perikanan masih rendah. Untuk itu, Bank Indonesia berupaya meningkatkan akses keuangan melalui pengembangan jasa keuangan bagi masyarakat di sektor pertanian dan perikanan. Pengembangan produk jasa keuangan tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian yang diujicobakan di beberapa wilayah.[6] Produk jasa keuangan tersebut berupa tabungan dan pinjaman yang tidak selalu mensyaratkan agunan karena dapat memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai penjamin atau menggunakan sistem tanggung renteng. Pola pembiayaan tersebut dapat digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM di sektor pertanian dan perikanan. Upaya lain untuk meningkatkan akses keuangan pada sektor pertanian adalah pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG). Pemanfaatan resi gudang sebagai agunan dalam pembiayaan dapat meningkatkan aksesibilitas petani kepada lembaga keuangan. Dalam implementasinya, keberhasilan pemanfaatan SRG tersebut membutuhkan peran pengelola dan komitmen Pemerintah, yang didukung dengan pengembangan sistem informasi resi gudang.

Upaya mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM juga dilakukan melalui pengembangan infrastruktur berupa penyediaan sarana pencatatan transaksi keuangan terstandar. Melalui program Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK), usaha mikro dan kecil (UMK) didorong untuk menyusun laporan keuangan. Bank Indonesia telah mengembangkan Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (APIK) yang merupakan aplikasi pencatatan transaksi keuangan berbasis *smartphone (android).* Pengembangan aplikasi tersebut merupakan bagian dari program PTK dan berfungsi untuk memudahkan UMK menghasilkan laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Ke depan, APIK akan digunakan sebagai panduan dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, sistematis, dan terstandar, serta diimplementasikan secara nasional.

Mengingat tidak semua UMKM memiliki akses pasar dan terhubung dengan rantai pasokan yang lebih luas, maka Bank Indonesia memfasilitasi pemasaran produk UMKM secara *online* maupun *offline*. Fasilitas tersebut diantaranya berupa penyelenggaraan pameran produk UMKM untuk memperkenalkan produk UMKM secara lebih luas, utamanya tingkat nasional. Salah satu kegiatan fasilitasi tersebut adalah pameran 'Karya Kreatif Indonesia' yang diikuti oleh 35 UMKM premium binaan Bank Indonesia yang membukakan akses pasar produk UMKM pada pasar nasional, khususnya segmen menengah ke atas. Melalui kegiatan tersebut, UMKM dapat termotivasi dan terpicu kreativitasnya dalam inovasi produk yang berkualitas dengan nilai jual tinggi sehingga dapat lebih berkontribusi dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Ke depan, upaya pengembangan pasar akan dilakukan melalui *e-commerce* agar UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Pentingnya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan UMKM dipandang penting untuk mengatasi kompleksitas permasalahan UMKM. Implementasi program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah, Bank Indonesia maupun pihak lain memerlukan koordinasi lintas sektoral. Pemerintah dan Bank Indonesia serta *stakeholders* terkait telah melakukan sinergi program melalui kegiatan 'Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat' yang dicanangkan pada 11 April 2016 di Brebes, Jawa Tengah**.** Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperluas implementasi program yang telah dikembangkan, salah satunya dilaksanakan dalam bentuk *pilot project* hilirisasi klaster (komoditas bawang merah), yang terintegrasi dengan program-program seperti pemasaran, pembiayaan, dan elektronifikasi. Di samping itu, untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dalam pengembangan UMKM, Bank Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan beberapa Kementerian/ Lembaga. Pada 2016, Bank Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), yang diantaranya akan melakukan pertukaran data/informasi database UMKM dan implementasi konsep pemeringkatan kredit UMKM. Sementara untuk memperluas akses UMKM agar dapat memasuki *Global Value Chain*, Bank Indonesia turut berperan aktif dalam berbagai fora internasional, diantaranya AFI, RCEP, APRACA, dan ASEAN.[7] Selain untuk mengetahui isu-isu terkini mengenai pengembangan UMKM, keterlibatan Bank Indonesia dalam

6 Kajian "Peningkatan Akses Jasa Keuangan pada Kelompok Masyarakat Pesisir Sektor Perikanan Tangkap" dan Kajian proyek *"Documenting Global Best Practices on Sustainable Models of Pro-Poor Rural Financial Services in Developing Countries"* yang dilakukan Bank Indonesia bekerjasama dengan *Asia-Pacific Regional Conference on Rural Finance and Community Development* (APRACA).

7 Bank Indonesia terlibat dalam SME *Finance Working Group* (SMEFWG) dalam *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), *Regional Comprehensive Economic Partnership Working Group on Economic and Technical Cooperation* (RCEP WGETC), *Asia-Pacific Regional Conference on Rural Finance and Community Development* (APRACA), *ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises* (ACCMSME).

fora tersebut dapat menghubungkan UMKM Indonesia dengan pasar global.

12.4. KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL BUFFER*

Prosiklikalitas perbankan merupakan salah satu sumber kerentanan di dalam sistem keuangan yang perlu dicermati. Sebagai respons terhadap perilaku prosiklikalitas perbankan, dimana bank cenderung ekspansif yang berlebih di saat kondisi perekonomian membaik dan kontraktif yang berlebihan pada periode resesi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan CCB. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah peningkatan risiko sistemik yang bersumber dari pertumbuhan kredit yang berlebihan (*excessive credit growth*) sekaligus untuk mengantisipasi kerugian yang dihadapi perbankan. Kebijakan CCB dikeluarkan Bank Indonesia melalui PBI Nomor 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2016. Kebijakan tersebut mewajibkan bank untuk membentuk tambahan penyangga modal (*buffer*) pada periode ekspansi sehingga dapat menahan percepatan kredit. Sementara pada periode kontraksi, penurunan/pelepasan tambahan penyangga modal CCB yang telah dibentuk bank dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan. Bank Indonesia secara regular melakukan evaluasi besaran dan waktu pemberlakuan CCB paling kurang sekali dalam enam bulan.

Di tengah kondisi perekonomian dan intermediasi yang masih belum kuat, Bank Indonesia menetapkan besaran tambahan modal CCB tetap sebesar 0%. Hasil evaluasi besaran CCB pada Mei dan November 2016, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan besaran CCB sebesar 0%. Penetapan besaran CCB sebesar 0% tersebut didasari pada pertimbangan belum adanya indikasi pertumbuhan kredit yang berlebihan yang dapat menyebabkan terjadinya risiko sistemik di Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh kesenjangan antara kredit terhadap Produk Domestik Bruto (*Credit to GDP gap*) sebagai indikator utama CCB (Grafik 12.4 dan Grafik 12.5). Hal tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan kredit yang masih melambat hingga akhir 2016. Dengan besaran CCB sebesar 0% diharapkan perbankan dapat meningkatkan fungsi intermediasinya untuk mendukung pemulihan ekonomi.

12.5. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN OLEH BANK INDONESIA

Dalam rangka mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan

Grafik 12.4. Kesenjangan Kredit terhadap PDB

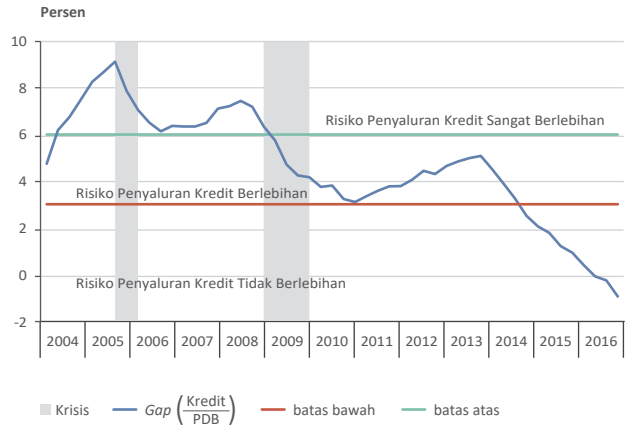

Sumber: Bank Indonesia

berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang makroprudensial. Instrumen pengaturan makroprudensial antara lain berkaitan dengan penguatan ketahanan permodalan, pengelolaan intermediasi yang optimal, dan pemenuhan likuiditas yang memadai. Sementara pengawasan makroprudensial dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemeriksaan terhadap bank dan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank. Pada dasarnya kegiatan surveilans dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko sistemik yang berasal dari pelaku dalam sektor keuangan, antara lain lembaga keuangan, korporasi, rumah tangga serta interkoneksinya.

Terdapat beberapa *tools* yang digunakan Bank Indonesia dalam mendukung kegiatan surveilans agar berjalan optimal, antara lain *granular stress test, bank industry*

Grafik 12.5. CCB *Buffer Rate*

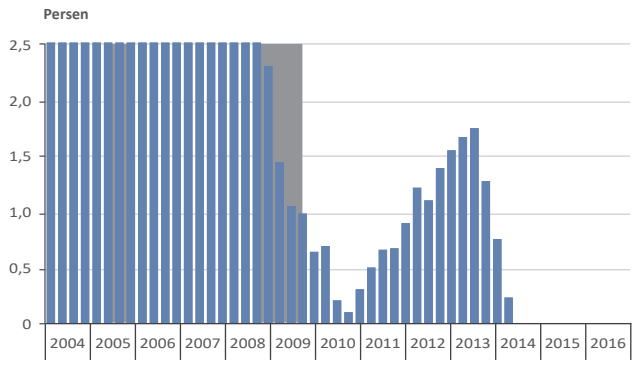

Sumber: Bank Indonesia

rating, risk register, dan asesmen *interconnectedness* grup korporasi.[8] Selain serangkaian asesmen tersebut, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan secara tidak langsung (*off-site)* terhadap implementasi kebijakan makroprudensial oleh perbankan, antara lain terkait ketentuan GWM-LFR, LTV dan CCB. Pengawasan tersebut selain untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, juga ditujukan untuk mengidentifikasi potensi risiko sistemik yang ditimbulkan dari aktivitas transaksi bank yang cenderung *procyclical*. Jika diperlukan, hasil pengawasan secara *off-site* tersebut dapat dilengkapi atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung (*on-site*) terhadap bank-bank tertentu yang dinilai memiliki eksposur risiko yang signifikan atau berdampak sistemik. Pemeriksaan yang dilakukan dapat bersifat tematik atau dalam rangka memastikan aspek kepatuhan terhadap peraturan/ketentuan yang diterbitkan Bank Indonesia.

Pada 2016, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan tematik terhadap beberapa bank terkait aspek likuiditas, implementasi kebijakan LTV, kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan Pialang Pasar Uang (PPU). Pemeriksaan likuiditas terutama ditujukan untuk menilai pengaruh kondisi makroekonomi terhadap ketahanan likuiditas bank yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik, menilai respons bank terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia, serta mendalami keterkaitan *(interconnectedness)* antar bank melalui posisi aktiva dan pasiva. Sedangkan pemeriksaan LTV ditujukan untuk menilai respons bank terhadap kebijakan LTV, mengidentifikasi kendala dalam penyaluran kredit properti, serta kepatuhan bank atas ketentuan rasio LTV. Sementara pemeriksaan APMK ditujukan antara lain untuk mengevaluasi kesiapan bank dalam implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan PIN *online* 6 *digit*, serta mengevaluasi kepatuhan bank terhadap ketentuan sistem pembayaran, khususnya APMK dan uang elektronik. Adapun pemeriksaan aktivitas PPU terutama ditujukan untuk mengecek aspek kepatuhan dan mekanisme pembentukan harga pada transaksi pasar uang melalui PPU.

Hasil pemeriksaan likuiditas menyimpulkan bahwa secara umum kondisi likuiditas bank memadai dan lebih baik dibandingkan dengan 2015, terutama pasca pelonggaran GWM. Meski demikian, dampak tambahan likuiditas dalam mendorong pertumbuhan kredit masih memerlukan waktu di tengah upaya konsolidasi internal bank. Sedangkan pelonggaran lanjutan kebijakan LTV pada Agustus 2016 telah direspons positif oleh bank dengan melakukan penyesuaian kebijakan internal. Adapun pertumbuhan kredit properti diperkirakan akan terlihat dalam beberapa periode ke depan seiring optimisme peningkatan tingkat konsumsi masyarakat serta pemulihan pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara, hasil pemeriksaan terkait APMK, antara lain menyimpulkan bahwa diperkirakan hampir seluruh bank yang menerbitkan APMK telah dapat mengimplementasikan PIN *online 6 digit* sebelum Juni 2017. Adapun hasil pemeriksaan terhadap beberapa PPU pada 2016 antara lain menyimpulkan bahwa secara umum tidak terdapat aktivitas PPU yang melanggar ketentuan Bank Indonesia, walaupun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja dan *governance* PPU.

Hasil pengawasan dan pemeriksaan makroprudensial menyimpulkan bahwa pertumbuhan kredit properti yang belum optimal di beberapa bank disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bersumber dari internal maupun eksternal bank, yakni permintaan kredit masyarakat yang masih lemah seiring tertahannya aktivitas perekonomian, pelunasan kredit yang dipercepat oleh nasabah *existing* dengan *refinancing* dari bank lain dengan tingkat bunga yang lebih rendah, adanya program angsuran dari *developer* berupa *down payment* (DP) dengan jangka waktu 1-3 tahun sehingga permintaan kredit baru akan timbul setelah angsuran DP selesai dilakukan, program pembayaran tunai bertahap, serta konsolidasi internal bank dalam memitigasi risiko kredit.

Perlambatan pertumbuhan kredit properti juga tercermin pada Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang melambat sejak akhir 2014 (Grafik 12.6). Pada periode 2010 – 2013, kenaikan IHPR cenderung tinggi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata di atas 9% dan mencapai puncaknya

Grafik 12.6. Indeks Harga Properti Residensial di Pasar Primer

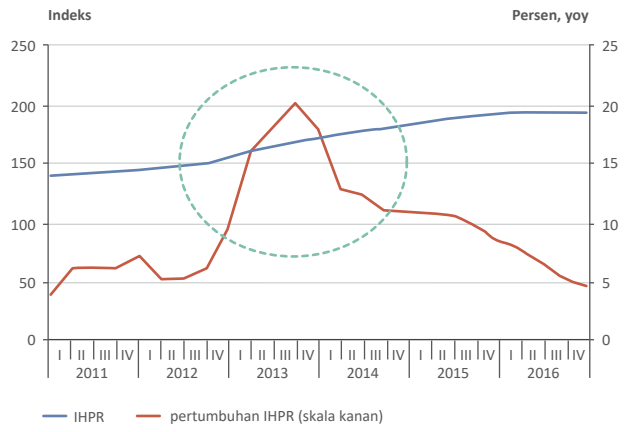

Sumber: Bank Indonesia

8 *Granular stress test* menilai secara lebih detil sensitivitas ketahanan bank terhadap variabel-variabel makroekonomi dengan memperhatikan pula aspek-aspek individual bank yang relevan.

pada triwulan III 2013, yaitu sebesar 13,5%. Kemudian menjelang akhir 2014, pertumbuhan IHPR cenderung melambat dan masih berlangsung hingga saat ini seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Masih melambatnya pertumbuhan kredit properti diduga turut dipengaruhi oleh kecenderungan meningkatnya transaksi pembelian properti secara tunai bertahap. Pembelian tunai bertahap merupakan cara pembelian properti dengan mengangsur langsung kepada pengembang dengan jangka waktu antara satu hingga tiga tahun dan pengenaan suku bunga yang disesuaikan dengan periode pembayaran angsuran. Walaupun cara pembelian properti melalui kredit bank memiliki porsi terbesar mencapai rata-rata 76,4%, namun cenderung menurun hingga 72,2% pada akhir 2014. Sementara pembelian secara tunai bertahap meningkat hingga 18,8%, selebihnya pembelian dilakukan secara tunai yang mencapai 9,0% (Grafik 12.7). Namun demikian pada triwulan IV 2016, porsi pembelian properti secara kredit mulai meningkat menjadi 77,2% sementara pembiayaan tunai bertahap turun menjadi 15,9% dan selebihnya secara tunai sebesar 6,9%. Hal ini sejalan dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit properti pada Desember 2016 menjadi sebesar 7,7% lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi Desember 2015 sebesar 7,0%.

Grafik 12.7. Cara Pembelian Properti oleh Konsumen

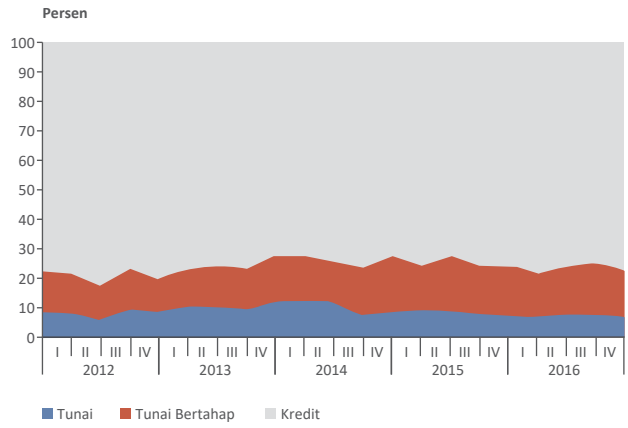

Sumber: Bank Indonesia

BAB 13

Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia pada 2016 tetap diarahkan untuk memperkuat infrastruktur secara berkesinambungan agar semakin efisien, aman, lancar, dan andal. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendorong penggunaan instrumen nontunai dan meningkatkan akses keuangan masyarakat, termasuk program elektronifikasi dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menyikapi perkembangan teknologi dan kecenderungan peningkatan kebutuhan transaksi melalui sistem pembayaran. Di sisi pengelolaan uang rupiah, kebijakan Bank Indonesia secara konsisten ditujukan untuk memastikan tersedianya uang rupiah berkualitas dengan jumlah memadai dan pecahan yang sesuai secara tepat waktu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bank Indonesia juga melakukan reformasi jaringan distribusi dan memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam pengedaran uang rupiah hingga ke wilayah terpencil dan terdepan NKRI.

Keterangan gambar:
Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi keuangan dan bisnis *online* yang terus berkembang, Bank Indonesia turut mendukung dan memfasilitasi kelancaran transaksi dengan menggalakkan instrument nontunai serta membentuk *Fintech Office*.

Kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia secara konsisten diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kelancaran, dan keandalan. Pada 2016, kebijakan sistem pembayaran tetap difokuskan pada penguatan infrastruktur sebagai kelanjutan dari tahun sebelumnya agar berkesinambungan. Di samping itu, Bank Indonesia juga semakin menggiatkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk mendorong keuangan inklusif melalui sistem pembayaran, khususnya program elektronifikasi dengan Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam penyaluran bantuan sosial Pemerintah. Bank Indonesia juga menempuh beberapa langkah strategis untuk menyikapi perkembangan *financial technology (fintech)*. Serangkaian kebijakan yang dilaksanakan pada 2016 tersebut mampu memberikan dukungan positif pada kinerja sistem pembayaran.

Penguatan infrastruktur yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Bank Indonesia berhasil mendorong sistem pembayaran nasional memenuhi standar internasional. Hasil asesmen menyimpulkan bahwa sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) telah sesuai dengan standar *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMIs) sehingga semakin andal dan aman. Sementara untuk meningkatkan kualitas layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia meluncurkan layanan *bulk payment* yang terdiri dari *bulk credit transfer* dan *direct debit*. Kemudian untuk memperkuat keamanan dan kelancaran transaksi, Bank Indonesia juga mendorong penggunaan *Central Bank Money* (CeBM) untuk setelmen transaksi surat berharga di pasar modal. Pengembangan CeBM tersebut selaras dengan rekomendasi Bank for International Setlement (BIS) dan International Organization of Securities Commission (IOSCO) mengenai penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan.

Bank Indonesia terus meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi pembayaran secara nontunai, baik secara elektronik maupun menggunakan kartu. Pada 2016 Bank Indonesia meluncurkan *National Payment Gateway* (NPG) yang mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran nontunai sehingga menjadi lebih efisien dan aman. Sementara untuk meningkatkan standar keamanan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Bank Indonesia terus mendorong implementasi Standar Nasional Kartu *Automated Teller Machine* (ATM)/debit yang sesuai dengan spesifikasi *National Standard of Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS). Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong keuangan inklusif melalui sistem pembayaran, salah satunya melalui program elektronifikasi penyaluran bantuan sosial pemerintah sebagai bagian dari GNNT. Untuk mendukung program Pemerintah tersebut, Bank Indonesia memfasilitasi tersedianya agen LKD sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara nontunai agar lebih efisien dan sekaligus dapat mengedukasi masyarakat mengenai akses keuangan.

Di sisi kebijakan pengelolaan uang rupiah (PUR), Bank Indonesia secara konsisten memastikan ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dengan jumlah memadai dan pecahan yang sesuai secara tepat waktu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketersediaan uang rupiah akan memperlancar transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat dalam perekonomian. Untuk mewujudkan misi tersebut, pada 2016 Bank Indonesia menempuh tujuh kebijakan pengelolaan uang rupiah, termasuk melakukan reformasi distribusi uang dan layanan kas agar dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan uang rupiah Tahun Emisi (TE) 2016 yang terdiri dari tujuh pecahan uang kertas dan empat pecahan uang logam. Penerbitan uang baru tersebut merupakan pelaksanaan Undang Undang Mata Uang dan sekaligus meningkatkan kualitas uang rupiah, baik dari segi keamanan maupun kualitasnya.

13.1. KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Kebijakan penguatan infrastruktur sistem pembayaran pada 2016 ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kelancaran, dan keandalan. Penguatan infrastruktur sistem pembayaran secara berkesinambungan diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan transaksi seiring perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi keuangan *(financial technology)*. Selain itu pengembangan infrastruktur juga ditujukan untuk mendukung keuangan inklusif masyarakat melalui program elektronifikasi. Meningkatnya efisiensi, keamanan, kelancaran, dan keandalan sistem pembayaran juga dilengkapi dengan upaya perlindungan konsumen sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran nasional.

Implementasi Penguatan Infrastruktur Sistem Pembayaran di Bank Indonesia

Kebijakan penguatan infrastruktur sistem pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia secara konsisten dan berkesinambungan berhasil mendorong sistem BI-RTGS Generasi II dan BI-SSSS Generasi II memenuhi standar internasional. Pada 2016 Bank Indonesia melakukan penilaian *(assessment)* terhadap BI-RTGS Generasi II sebagai *Systemically Important Payment System* (SIPS) dan BI-SSSS Generasi II sebagai *Central Securities Depository/ Securities Settlement System* (CSD/SSS). Penilaian

Tabel 13.1. Rekapitulasi Hasil *Assesment* BI-RTGS dan BI-SSSS

Principles	BI-RTGS	BI-SSSS
1. Legal Basis	*Observed*	*Observed*
2. Governance	*Observed*	*Observed*
3. Framework for the Comprehensive Management of Risks	*Observed*	*Observed*
4. Credit Risk	*Observed*	*Observed*
5. Collateral	*Observed*	*Observed*
6. Margin	*Irrelevant*	*Irrelevant*
7. Liquidity Risk	*Observed*	*Observed*
8. Settlement Finality	*Observed*	*Observed*
9. Money Settlements	*Observed*	*Observed*
10. Physical Deliveries	*Irrelevant*	*Not Applicable*
11. Central Securities Depositories	*Irrelevant*	*Observed*
12. Exchange-of-Value Settlement Systems	*Observed*	*Observed*
13. Participant-Default Procedures	*Observed*	*Observed*
14. Segregation and Portability	*Irrelevant*	*Irrelevant*
15. General Business Risk	*Observed*	*Observed*
16. Custody and Investment Risk	*Observed*	*Observed*
17. Operational Risk	*Observed*	*Observed*
18. Access and Participation Requirements	*Observed*	*Observed*
19. Tiered Participation Arrangements	*Not Applicable*	*Not Applicable*
20. FMI Links	*Irrelevant*	*Not Applicable*
21. Efficiency and Effectiveness	*Observed*	*Observed*
22. Communication Procedures and Standards	*Observed*	*Observed*
23. Disclosure of Rules and Key Procedures	*Observed*	*Observed*

Sumber: Bank Indonesia

dilakukan dengan merujuk kepada PFMIs yang merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh BIS. Hasil penilaian terhadap sistem BI-RTGS menyimpulkan bahwa penyelenggaraan BI-RTGS secara umum telah memenuhi standar PFMIs. Sebanyak 17 prinsip memperoleh peringkat *observed*, sementara satu prinsip yaitu *Principle* 19 – *Tiered Participation*, dinilai *Not Applicable* (Tabel 13.1). Sementara hasil penilaian terhadap sistem BI-SSSS juga menyimpulkan bahwa penyelenggaraan BI-SSSS secara umum telah memenuhi standar PFMIs. Sebanyak 19 prinsip memperoleh peringkat *observed*, sementara tiga prinsip, yaitu *Principle* 10 – *Physical Deliveries*, *Principle* 19 – *Tiered Participation*, dan *Principle* 20 – *FMI Links*, dinilai *Not Applicable.*

Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS merupakan infrastruktur penting dan sistemik dalam sistem keuangan Indonesia. BI-RTGS merupakan satu-satunya sarana transfer dana elektronik bernilai besar di Indonesia yang beranggotakan 144 institusi keuangan, termasuk seluruh bank umum. Porsi keanggotaan perbankan mencapai 97% dari seluruh peserta BI-RTGS (Grafik 13.1) dan peran perbankan sangat

Grafik 13.1. Komposisi Peserta Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*

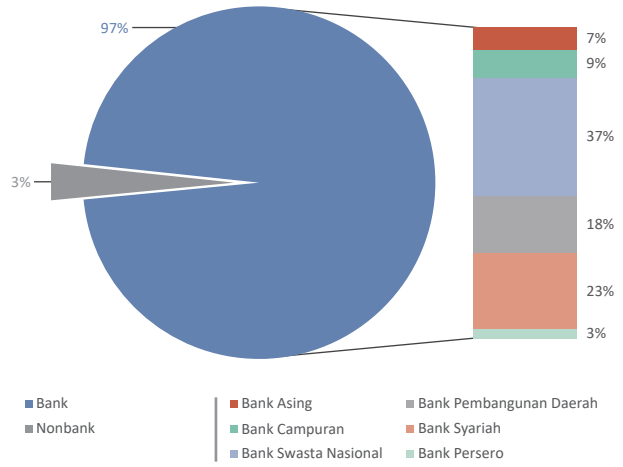

Sumber: Bank Indonesia

dominan dalam sistem keuangan Indonesia. Untuk itu, kelancaran dan keandalan dari penyelenggaraan BI-RTGS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sementara sistem BI-SSSS merupakan satu-satunya sarana penatausahaan transaksi surat berharga pemerintah di Indonesia. Seluruh setelmen dan pencatatan surat berharga yang diterbitkan pemerintah (Surat Berharga Negara/SBN dan Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) dan Bank Indonesia (Sertifikat Bank Indonesia/SBI dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia/SDBI) dilakukan melalui sistem BI-SSSS, baik untuk transaksi di pasar perdana maupun pasar sekunder. Sistem BI-SSSS saat ini memiliki 174 peserta, baik bank, institusi nonbank maupun *sub-registry* surat berharga (Grafik 13.2).

Mengingat sistem BI-RTGS dan BI-SSSS bersifat kritikal, Bank Indonesia senantiasa memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan kedua

Grafik 13.2. Komposisi Peserta Bank Indonesia-*Scriples Securities Settlement System*

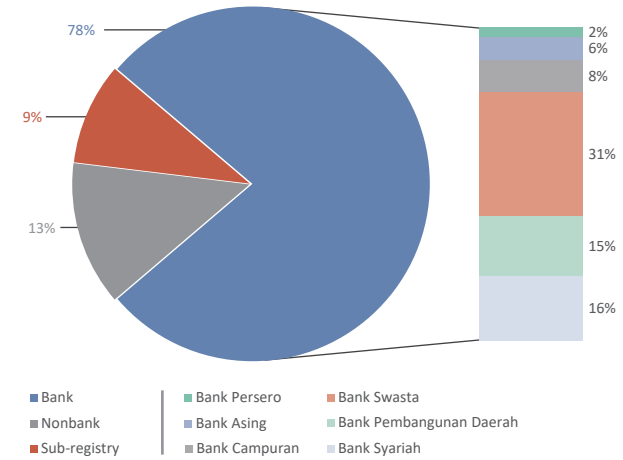

Sumber: Bank Indonesia

sistem tersebut. Untuk memitigasi risiko likuiditas pada penyelenggaraan sistem BI-RTGS, Bank Indonesia menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) apabila dana di rekening setelmen peserta tidak mencukupi. Kemudian untuk memitigasi risiko kredit atas pemberian FLI, maka peserta BI-RTGS diwajibkan menyediakan agunan berupa surat berharga yang berkualitas tinggi, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN). Sementara penyelenggaraan sistem BI-SSSS tidak terekspos risiko likuiditas maupun kredit. Mekanisme *delivery versus payment (DVP*) dalam BI-SSSS membuat setelmen hanya dapat diselesaikan jika jumlah dana dan surat berharga di rekening peserta mencukupi. Apabila saldo rekening dana peserta tidak mencukupi maka instruksi setelmen tersebut akan masuk ke dalam antrian. Kemudian jika sampai dengan periode awal *cut-off warning* saldo rekening dana belum mencukupi, instruksi tersebut akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem BI-SSSS.

Mitigasi risiko operasional BI-RTGS dan BI-SSSS juga terus diupayakan oleh Bank Indonesia. Infrastruktur BI-RTGS dan BI-SSSS terdiri atas *Central Node,* baik RTGS *Central Node* (RCN) maupun BI-SSSS *Central Node* (SCN) di sisi Bank Indonesia sebagai penyelenggara dan *Participant Platform*, baik RTGS *Participant Platform* (RPP) maupun BI-SSSS *Participant Platform* (SPP) di sisi peserta. Untuk mitigasi risiko operasional di sisi penyelenggara, RCN dan SCN telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *full redundancy* dan telah memiliki *Disaster Recovery Center* (DRC) yang lokasinya terpisah dengan *data center* utama. Sementara untuk memitigasi risiko operasional di sisi peserta apabila terdapat kendala pada RPP maupun SPP, peserta dapat mengajukan perpanjangan waktu atau menggunakan fasilitas *guest bank* yang disediakan Bank Indonesia untuk memastikan penyelesaian semua transaksi di akhir hari.

Bank Indonesia juga mengimplementasikan SKNBI Generasi II tahap II pada 2 Mei 2016 dengan fitur layanan yang semakin lengkap. Layanan SKNBI akan meliputi transfer dana, kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan penagihan reguler. Layanan pembayaran reguler dan penagihan reguler merupakan fitur baru dalam SKNBI yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi yang bersifat *bulk payment*, seperti pembayaran gaji, penyaluran bantuan, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sampai dengan akhir 2016, volume transaksi *bulk payment* SKNBI tercatat sebanyak 104.530 transaksi dengan nilai mencapai Rp1,1 triliun. Selain menambah fitur *bulk payment*, peningkatan layanan SKNBI juga dilakukan dengan menegaskan fungsi bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan (bukan surat berharga) dan meningkatkan aspek perlindungan nasabah. Untuk itu, pada 2016 Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan bilyet giro yang akan efektif berlaku mulai 1 April 2017.

Sebagai perwujudan *service excellence* kepada mitra strategis, khususnya Pemerintah, Bank Indonesia juga melakukan penguatan terhadap sistem Bank Indonesia *Government electronic Banking* (BIG-eB). Pada 2016 sistem BIG-eB ditetapkan sebagai aplikasi kritikal dengan tingkat ketersediaan hampir 100% dengan *maximum tolerable period of disruption* selama 60 menit. Secara umum, pengembangan BIG-eB yang dilakukan pada 2016 meliputi: (i) perluasan fitur transaksi interkoneksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Kementerian Keuangan, antara lain transfer valuta asing, kliring dan *future date*; (ii) penyediaan fitur informasi kurs khusus secara elektronik untuk transaksi valuta asing Kementerian Keuangan; (iii) penambahan fitur pembatalan transaksi untuk mendukung pelaksanaan *Business Contingency Plan* (BCP) layanan perbankan; dan (iv) implementasi infrastruktur *Data Center* dan *Data Recovery Center.*

Untuk meminimalkan risiko setelmen dan sejalan dengan upaya meningkatkan *compliance* terhadap standar internasional (PFMIs), Bank Indonesia mengimplementasikan penggunaan *Central Bank Money* (CeBM) untuk setelmen transaksi surat berharga di pasar modal. Sejak dicanangkan pada 2015, CeBM telah digunakan untuk setelmen Surat Berharga Negara (SBN) dan non-SBN oleh bank kustodian. Pada 2016 penggunaan CeBM diperluas untuk setelmen SBN oleh perusahaan efek. Rata-rata harian penggunaan CeBM pada 2016 mencapai 67% dari total nilai transaksi surat berharga di pasar modal (Rp11,3 triliun). Perluasan penggunaan CeBM juga dilakukan untuk pengiriman dana *subscriptions* transaksi reksadana, dengan nilai rata-rata harian penggunaan CeBM sebesar Rp303 miliar.[1] Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk implementasi *full* CeBM sehingga CeBM dapat digunakan untuk setelmen transaksi non-SBN oleh perusahaan efek.

Selanjutnya untuk membangun data investor surat berharga secara terkonsolidasi, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dan OJK mengimplementasikan penerapan Nomor Tunggal Identitas Investor. Setelah diimplementasikan di pasar saham dan obligasi korporasi, pada 2016, penggunaan Nomor Tunggal diperluas untuk investor SBN dan SBI yang ditatausahakan dengan BI-SSSS. Bank Indonesia menunjuk KSEI sebagai *generator* Nomor Tunggal Identitas Investor dengan menggunakan Nomor Identitas yang serupa dengan *Single Investor Identification* (SID) yang digunakan di pasar modal. Penggunaan Nomor

1 Dana *subscriptions* merupakan dana investor yang dikumpulkan oleh *Selling Agent* untuk dikirimkan kepada Bank Kustodian guna keperluan setelmen reksadana.

Diagram 13.1. Skema *National Payment Gateway* Indonesia

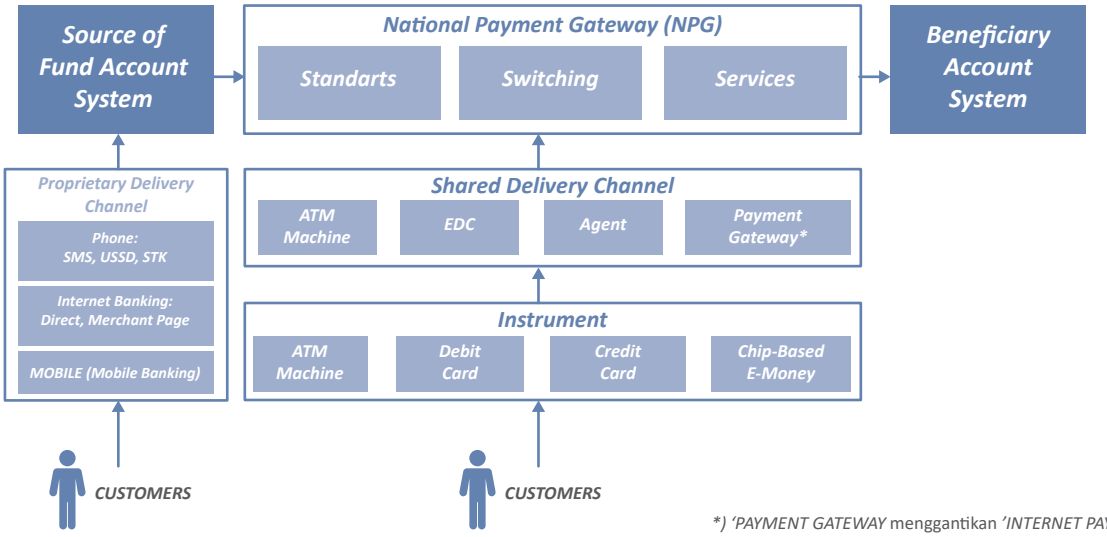

*) 'PAYMENT GATEWAY menggantikan 'INTERNET PAYMENT'

Sumber: Bank Indonesia

Tunggal Identitas Investor akan mendukung efektivitas pengambilan kebijakan karena memungkinkan konsolidasi data dan informasi kepemilikan serta aktivitas investor di berbagai instrumen keuangan, baik yang ditatausahakan melalui *Central Depository and Book Entry Settlement System* (C-BEST) maupun BI-SSSS. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerjasama dengan OJK dalam pengembangan *electronic trading platform* (ETP) untuk transaksi pasar sekunder SBN di luar bursa agar terorganisasi.

Pengembangan *National Payment Gateway* (NPG)

Gerbang Pembayaran Nasional atau *National Payment Gateway* (NPG) Bank Indonesia ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi pembayaran ritel, serta mempertegas kedaulatan negara dalam sistem pembayaran nasional. Pengembangan NPG dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan sistem pembayaran nontunai di Indonesia, baik menggunakan kartu ATM/debit, kartu kredit, dan uang elektronik, namun tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Hal ini tercermin dari infrastruktur yang belum efisien karena terdapat keterbatasan interkoneksi dan interoperabilitas antar prinsipal, pengelolaan data transaksi yang masih dilakukan secara bilateral antar penyelenggara jaringan sehingga berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Pemrosesan transaksi debit juga belum sepenuhnya dilakukan di dalam negeri sehingga sistem pembayaran nasional belum sepenuhnya berdaulat.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Bank Indonesia mengembangkan dan mengimplementasikan NPG guna mengoptimalkan fungsi sistem pembayaran nasional. NPG merupakan suatu sistem yang terdiri dari standar, *switching* dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme *(arrangement)* untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional guna memfasilitasi berpindahnya dana dari sumber dana ke penerima dana. Pada awal 2016 Bank Indonesia telah merumuskan desain NPG yang menggunakan model interkoneksi antar *switch*.[2] Pemilihan model tersebut mempertimbangkan optimalisasi infrastruktur sistem pembayaran yang telah ada dan memperhatikan keberadaan industri *switching* yang telah berkembang untuk menjaga kompetisi, efisiensi, serta inovasi produk dan layanan.

Dalam model NPG Indonesia, penyelenggaraan NPG dilakukan oleh Lembaga Standar, Lembaga *Switching* dan Lembaga *Services*.[3] Selain itu juga didukung oleh pihak-pihak yang terhubung dengan NPG, seperti *issuer*, *acquirer*, penyelenggara *payment gateway*, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Diagram 13.1). Dalam pelaksanaannya, Lembaga Standar akan dibentuk dari perluasan fungsi Lembaga Pelaksana Pengelola Standar yang saat ini cakupan pekerjaannya masih terbatas

2 Terdapat beberapa model *switching* yang diterapkan beberapa negara, yaitu *single switch*, *super switch*, *hub and spoke*, dan interkoneksi antar *switch*.

3 Lembaga yang bertugas memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas melalui penyusunan dan pengelolaan standar instrumen, kanal pembayaran, *switching* dan *security*. Lembaga yang bertugas menyediakan layanan *common functions* untuk mendukung peningkatan keamanan, kegiatan operasional secara efisien, pengelolaan risiko, perlindungan nasabah, dan perluasan akses layanan untuk menjamin interkoneksi dan interoperabilitas.

pada ATM/debit. Sedangkan Lembaga *Switching* yang bertugas memfasilitasi pemrosesan *routing* domestik untuk mewujudkan dan memelihara interkoneksi dan interoperabilitas secara aman dan efisien akan dijalankan oleh penyelenggara jaringan pembayaran ATM (*switching*) domestik yang telah ada.[4]

Dalam penyusunan dan implementasi NPG, Bank Indonesia senantiasa memerhatikan masukan pelaku industri sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia menyelenggarakan serangkaian *focus group discussion* untuk uji konsep (*proof of concept*) maupun menyiapkan sisi teknis NPG, pertemuan dengan level pimpinan dalam menyusun nota kesepahaman dan berdiskusi mengenai kelembagaan NPG. Adapun *roadmap* implementasi NPG akan dilakukan secara bertahap dan direncanakan berakhir pada 2021. *Milestones* dalam *roadmap* tersebut mencakup penerbitan pengaturan NPG, implementasi interkoneksi kartu debit dan interoperabilitas uang elektronik, serta pembentukan kelembagaan NPG. Ke depan, direncanakan akan dilakukan pengembangan *Electronic Billing/Invoice Payment and Presentment* (EBIPP), perluasan NPG untuk layanan pembayaran *online*, kartu kredit domestik, dan pemrosesan transaksi domestik untuk prinsipal internasional.

Pada akhir 2016 Bank Indonesia memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman Interkoneksi Kartu Debit Domestik antar prinsipal domestik, serta Nota Kesepahaman Interkoneksi Sistem dan Interoperabilitas Kartu Debit dan Uang Elektronik antara empat *issuer/ acquirer* utama di Indonesia yang memiliki pangsa transaksi lebih dari 75%. Kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen industri sistem pembayaran nasional untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam implementasi NPG di Indonesia. Kemudian dengan adanya NPG diharapkan dapat mendorong akselerasi GNNT dan keuangan inklusif, serta peningkatan jumlah penerbit, instrumen, dan layanan sistem pembayaran ritel domestik yang inovatif dan berdaya saing.

Keuangan Inklusif dan Gerakan Nasional Non Tunai

Bank Indonesia terus mengoptimalkan peran sistem pembayaran dalam mendukung inisiatif keuangan inklusif. Upaya untuk mendorong perluasan akses keuangan semakin tertata seiring dengan diluncurkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) oleh Presiden Jokowi pada 18 November 2016. Keuangan inklusif telah menjadi program prioritas sejak peluncuran dokumen awal SNKI pada 2012 oleh Wakil Presiden RI dalam rangkaian kegiatan *the 1st ASEAN Conference on Financial Inclusion,* hingga akhirnya pada 1 September 2016 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Keuangan inklusif akan mendorong setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dituju difokuskan pada masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat lintas kelompok, seperti pekerja migran, wanita, kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, pelajar, mahasiswa, dan pemuda. SNKI terdiri dari lima pilar, yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan kepada sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen. Pilar SNKI tersebut didukung oleh tiga pondasi, yakni kebijakan dan regulasi yang kondusif, infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif.

Menindaklanjuti arahan Presiden agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan dalam bentuk nontunai melalui sistem perbankan, maka pada 2016 Bank Indonesia mendorong program elektronifikasi penyaluran bansos sebagai bagian dari GNNT. Bank Indonesia menyusun model bisnis penyaluran bansos nontunai dengan menggunakan satu kartu dan satu rekening untuk penyaluran berbagai jenis bansos. Program ini menunjukkan peran strategis elektronifikasi dalam meningkatkan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, lembaga penyalur, maupun Pemerintah. Prinsip dalam mewujudkan program bantuan adalah "tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas (prinsip 6T)". Pada 2016 Bank Indonesia bersama Kementerian Sosial telah menginisiasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) kepada 695 ribu penerima di 20 provinsi dan penyaluran bantuan pangan beras sejahtera (Rastra) melalui Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara). Program penyaluran bansos nontunai akan terus diimplementasikan, antara lain untuk bantuan pangan (Rastra) di 44 kabupaten/kota, Program Keluarga Harapan, dan Program Indonesia Pintar.

Upaya perluasan LKD untuk mendorong transaksi nontunai sekaligus meningkatkan akses keuangan masyarakat

4 Proses penentuan jalur untuk mencapai *network* dan bank tujuan.

terus dilakukan Bank Indonesia dengan menjalin kerja sama bersama mitra strategis. Bank Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 26 Mei 2016 terkait Peningkatan Akses Keuangan dan Elektronifikasi Penyaluran Bantuan dalam rangka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, Kawasan Pedesaan, Daerah tertinggal dan Kawasan Transmigrasi. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia menginisiasi *pilot project* desa digital di desa Sindangjawa Cirebon dengan menghadirkan agen LKD untuk membantu pemanfaatan dana desa secara nontunai.

Pada 2016, Bank Indonesia juga mendorong penggunaan LKD di pondok pesantren untuk memfasilitasi sejumlah transaksi. Peran pondok pesantren sebagai *influencer* diharapkan dapat mendorong pemanfaatan LKD bagi masyarakat sekitarnya. Perluasan LKD berbasis komunitas juga dikembangkan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya melalui pengembangan remitansi secara nontunai berbasis digital. Peningkatan transaksi ritel nontunai juga dilakukan pada sektor transportasi yang saat ini masih menggunakan transaksi tunai melalui program *electronic toll collection* dan kerja sama *e-ticketing*, serta *e-parking*. Selain itu Bank Indonesia juga melakukan pengembangan konsep *smart city* dalam rangka pengembangan ekosistem pembayaran nontunai. Beberapa daerah dan kota besar telah mengimplementasikan konsep *smart city*, diantaranya kartu *Jakarta One*, Bandung *Smart Card*, Makassar *Smart Card*, dan Kartu *Sumut Elektonik Payment and Purchase* (SEPP), dan Kartu Layanan Keuangan Terintegrasi (Lantera) untuk komunitas nelayan.

Bank Indonesia juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk mendorong transaksi nontunai dan perlindungan konsumen sistem pembayaran. Sejumlah kegiatan sosialisasi GNNT diselenggarakan di beberapa kota untuk memberikan edukasi secara lebih intensif mengenai jasa sistem pembayaran. Kegiatan sosialisasi di Brebes dengan tema "*Launching* Program Ekonomi Kerakyatan", di Jakarta untuk kegiatan peringatan Hari Konsumen Nasional, dan di Semarang dengan nama acara "Edukasi Sistem Pembayaran" untuk perbankan, akademisi, dan mahasiswa. Di penghujung 2016, Bank Indonesia kembali melakukan edukasi publik terkait GNNT dengan tema "*Smart Money Wave*" di empat kota yaitu Banjarmasin, Makassar, Medan, dan Semarang. Kegiatan ini menyasar generasi muda milenial *(Gen-Y)* yang cenderung memiliki gaya komunikasi terbuka dan daya adopsi tinggi terhadap perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, *Smart Money Wave* memilih bentuk kegiatan yang sesuai dengan karakteristik *Gen-Y* yaitu *workshop*, kompetisi video dan blog, dan pesta *netizen*.

Implementasi Teknologi Chip dan PIN *Online* Enam Digit pada Kartu ATM/Debit

Bank Indonesia terus meningkatkan keamanan instrumen pembayaran nontunai melalui standarisasi kartu ATM/debit. Seluruh kartu ATM/debit di Indonesia wajib menerapkan spesifikasi *National Standard of Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS) pada 1 Januari 2022. Awal implementasi *Personal Identification Number* (PIN) enam digit dan persiapan *host and backend system* NSICCS adalah 1 Juli 2017. Selanjutnya implementasinya meningkat secara bertahap mencapai 30% pada 1 Januari 2019, kemudian 50% pada 1 Januari 2020, 80% pada 1 Januari 2021, dan akhirnya 100% pada 1 Januari 2022.

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia pada 2016, sebanyak 19,5% mesin ATM dan 20,0% mesin *Electronic Data Capture* (EDC) telah dapat memproses kartu ATM/debit *chip* NSICCS, serta sebanyak 0,6% kartu ATM/debit telah mengimplementasikan *chip* sesuai NSICCS. Implementasi NSICCS saat ini menghadapi tantangan berupa masih kurangnya pemahaman perbankan mengenai penyesuaian infrastruktur yang diperlukan untuk implementasi NSICCS. Oleh karena itu, Bank Indonesia secara aktif terus melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga target implementasi NSICCS dapat tercapai.

Untuk mendukung implementasi NSICCS, Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa ketentuan. Salah satu ketentuan yang dikeluarkan adalah Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 17/52/DKSP perihal Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan Penggunaan Personal *Identification Number Online* enam digit untuk kartu ATM dan/atau Kartu Debit yang diterbitkan di Indonesia. Ketentuan ini mengamanatkan adanya pengaturan pelaksanaan mengenai standar nasional kartu ATM/debit. Ketentuan tersebut juga diterbitkan dalam rangka memastikan pengelolaan standar nasional teknologi *chip* untuk kartu ATM/debit dilakukan dengan tata kelola yang baik serta memerhatikan kepentingan nasional.

Implementasi Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah

Guna menegakkan kedaulatan rupiah, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi pembayaran di wilayah NKRI. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut secara efektif mampu menurunkan transaksi dalam valuta asing oleh penduduk. Transaksi menggunakan mata uang asing tercatat menurun signifikan sejak diberlakukannya ketentuan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI pada 1 Juli 2015

Grafik 13.3. Perkembangan Transaksi Valas Domestik

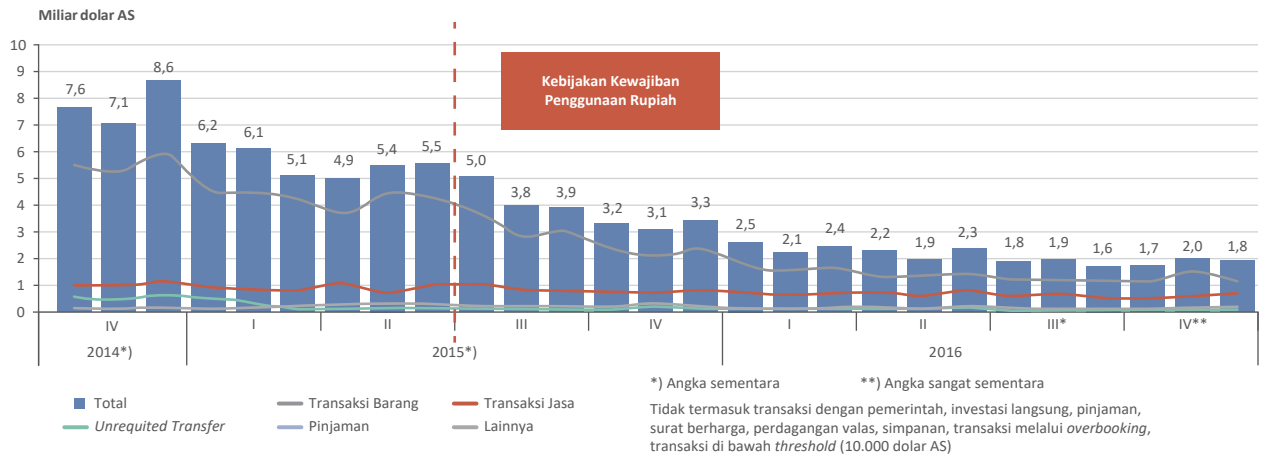

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tidak termasuk transaksi dengan pemerintah, investasi langsung, pinjaman, surat berharga, perdagangan valas, simpanan, transaksi melalui *overbooking*, transaksi di bawah *threshold* (10.000 dolar AS)

Sumber: Bank Indonesia

(Grafik 13.3).[5] Selain menegakkan kedaulatan rupiah sebagai mata uang NKRI, ketentuan tersebut juga berdampak positif terhadap upaya Bank Indonesia dalam mengelola permintaan valuta asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sejumlah transaksi masih dilakukan dalam valuta asing karena kontrak/perjanjiannya telah ditandatangani sebelum ketentuan tersebut berlaku dan pengecualian juga diberikan Bank Indonesia bagi pelaku usaha dengan karakter tertentu.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap transaksi valuta asing di wilayah NKRI untuk menegakkan ketentuan kewajiban penggunaan rupiah. Sejak Februari 2016, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap transaksi valuta asing yang terjadi di wilayah NKRI dengan ruang lingkup pengawasan meliputi transaksi maupun kuotasi harga. Hasil pengawasan secara umum menyimpulkan bahwa pelaku usaha telah mematuhi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Namun demikian, Bank Indonesia menemukan beberapa pelanggaran dalam kuotasi harga, khususnya oleh penyelenggara jasa umrah, pariwisata dan hotel. Atas pelanggaran tersebut, Bank Indonesia telah memberikan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis.

Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran

Bank Indonesia secara konsisten memerhatikan aspek perlindungan konsumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan instrumen pembayaran nontunai. Peran Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen sistem pembayaran dilakukan melalui edukasi, konsultasi dan fasilitasi kepada konsumen jasa sistem pembayaran.[6] Pada 2016, Bank Indonesia menerima pengaduan dari konsumen sistem pembayaran sebanyak 1.950 pengaduan, meningkat 4,3% dari pengaduan pada 2015, dengan pengaduan terbesar terkait kartu kredit dengan porsi mencapai 78% (Grafik 13.4). Pengaduan yang disampaikan antara lain terkait penggunaan instrumen sistem pembayaran oleh pihak lain, penyalahgunaan data melalui *skimming* dan *phising*, serta etika penagihan kartu kredit.

Grafik 13.4. Pengaduan Konsumen Sistem Pembayaran

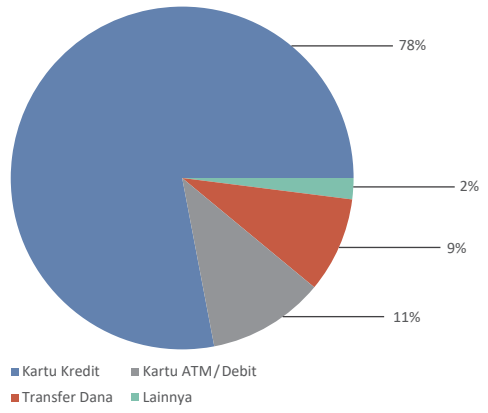

Sumber: Bank Indonesia

5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6 Tertuang dalam PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Pada 2016, Bank Indonesia kembali mendorong penyesuaian batas maksimum suku bunga kartu kredit. Batas maksimum suku bunga kartu kredit menjadi 2,25% per bulan atau 26,95% per tahun, turun dari sebelumnya sebesar 2,95% per bulan.[7] Penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan dengan kondisi ekonomi terkini dan mendorong efisiensi serta akseptasi masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit. Bank Indonesia juga mewajibkan penyelenggara kartu kredit menyampaikan pernyataan penutupan *(closing statement)* kartu kredit sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen.

Upaya aktif melalui sosialisasi dan edukasi juga terus dilakukan Bank Indonesia untuk memperkuat perlindungan konsumen sistem pembayaran. Sosialisasi dan edukasi dilakukan di berbagai wilayah Indonesia mengenai kiat-kiat bertransaksi secara nontunai agar terhindar dari *fraud* dan kejahatan di bidang sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia melakukan survei untuk mengetahui kinerja perlindungan konsumen di bidang sistem pembayaran. Berdasarkan hasil survei tersebut, responden yang tersebar di seluruh Indonesia merasa yakin dengan perlindungan konsumen ketika menggunakan alat pembayaran nontunai dan melakukan transfer dana. Bank Indonesia juga berpartisipasi dalam menyusun strategi nasional perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan transaksi perdagangan menggunakan sistem elektronik *(E-Commerce)* dalam aspek instrumen pembayaran nontunai dan transfer dana.

Penguatan Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Dalam rangka penguatan aspek hukum sistem pembayaran, pada 2016 Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan untuk mengantisipasi berkembangnya usaha *financial technology* (*fintech*).[8] Pengaturan tersebut ditujukan agar usaha *fintech* dapat memberi layanan yang optimal dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional dan aspek perlindungan konsumen, serta memenuhi standar dan praktik internasional. Hal ini mengingat perkembangan *fintech* sangat cepat dan memiliki peran penting dalam mendorong keuangan inklusif (lihat Boks 13.1). Selain itu juga diterbitkan ketentuan mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang diharapkan dapat menjadi panduan yang lebih jelas dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh lembaga bukan bank. Ketentuan ini juga merupakan upaya Bank Indonesia mendorong penyelenggara KUPVA, khususnya KUPVA BB untuk memiliki izin usaha.[9]

Kemudian untuk mendukung program elektronifikasi dan peningkatan akses keuangan dilakukan penyempurnaan ketentuan terkait uang elektronik dan LKD.[10] Ketentuan tersebut untuk mendukung perluasan ekosistem LKD dan penyaluran program bantuan sosial Pemerintah secara nontunai untuk mendukung keuangan inklusif. Beberapa pokok ketentuan terkait LKD direlaksasi, antara lain perluasan terhadap pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui agen LKD individu dan kemudahan operasionalisasi penyelenggaraan LKD melalui penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih sederhana.

Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan terkait bilyet giro.[11] Ketentuan tersebut mengatur antara lain mengenai: (i) penegasan kembali bahwa fungsi bilyet giro sebagai sarana alat pembayaran melalui pemindahbukuan (bukan surat berharga); (ii) penetapan tanggal efektif sebagai bagian dari syarat formal bilyet giro; (iii) kewajiban penarik untuk mengisi secara lengkap syarat formal pada saat penerbitan bilyet giro; (iv) kewenangan bank tertarik untuk menunda pembayaran dan menahan bilyet giro yang diduga dimanipulasi; dan (v) batasan koreksi kesalahan penulisan bilyet giro. Dengan ketentuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi pengguna bilyet giro sehingga tertarik untuk memanfaatkannya dalam transaksi pembayaran.

13.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Misi Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang rupiah (PUR) adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut serta pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan uang rupiah yang meliputi enam tahapan kegiatan. Tahapan

7 Tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 18/33/DKSP perihal Perubahan Keempat atas SEBI Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

8 PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

9 PBI Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

10 PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money)* dan SEBI Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital

11 PBI Nomor18/41/PBI tahun 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP tentang Bilyet Giro yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/28/KEP/DIR tahun 1995

kegiatan tersebut adalah perencanaan, pengeluaran, peredaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, peredaran, serta pencabutan dan penarikan. Sementara untuk kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan dilaksanakan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah.

Sementara untuk mencapai misi di bidang pengelolaan uang rupiah, pada 2016 secara garis besar Bank Indonesia menempuh tujuh jenis kebijakan. Pertama, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sesuai ciri yang diatur dalam UU Mata Uang. Kedua, menjaga kecukupan kas Bank Indonesia. Ketiga, meningkatkan kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat *(clean money policy)*. Keempat, memperluas jaringan distribusi uang dan layanan kas. Kelima, mengoptimalkan peran Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). Keenam, memperkuat komunikasi publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah. Ketujuh, melakukan pencegahan dan penanggulangan pemberantasan uang rupiah palsu.

Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang Rupiah Sesuai Ciri yang Diatur dalam UU Mata Uang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI dan merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati serta dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Karakteristik tertentu uang rupiah sebagai mata uang NKRI ditetapkan dalam UU Mata Uang. Untuk mewujudkan mata uang rupiah dengan karakteristik tertentu tersebut, Bank Indonesia sebagai lembaga yang diamanatkan oleh UU Mata Uang untuk mengeluarkan, mengedarkan, serta mencabut dan menarik uang rupiah, telah mencanangkan program kerja pengeluaran uang rupiah Tahun Emisi (TE) 2016 yang terdiri dari tujuh pecahan uang kertas dan empat pecahan uang logam.

Uang rupiah baru TE 2016 menampilkan 12 gambar pahlawan nasional yang mewakili seluruh wilayah NKRI sebagai gambar utama di bagian depan uang rupiah. Penggunaan gambar 12 pahlawan nasional tersebut bertujuan untuk lebih menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan generasi muda agar terus melahirkan karya terbaik bagi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara. Selain itu, uang rupiah kertas menampilkan pula gambar tari nusantara dan pemandangan alam Indonesia untuk lebih memperkenalkan keragaman seni, budaya, dan kekayaan alam Indonesia.

Pengeluaran dan peredaran uang baru TE 2016 bertujuan mempermudah identifikasi ciri keaslian uang rupiah oleh masyarakat serta mempersulit upaya pemalsuan uang. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia melakukan penguatan unsur pengaman pada uang TE 2016, antara lain peningkatan efek perubahan warna (*color shifting*) pada tinta *Optically Variable Ink* (OVI), penyeragaman *layout rainbow feature*, peningkatan efektivitas fitur *latent image* (gambar tersembunyi), penguatan desain dan penyeragaman posisi *rectoverso* (gambar saling isi), serta penguatan desain *ultra violet* (UV) *features* (memendar dari saat ini 1 warna menjadi 2 warna di bawah sinar UV).

Menjaga Kecukupan Kas Bank Indonesia

Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang kartal oleh perbankan dan masyarakat pada 2016, Bank Indonesia senantiasa menjaga kecukupan kas di kantor pusat maupun seluruh kantor perwakilan di daerah. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, Bank Indonesia menetapkan tingkat kecukupan kas dengan indikator jumlah *Iron Stock* Nasional (ISN) sebesar 20% dari proyeksi Uang Yang Diedarkan (UYD) tahun berjalan dan Kas Minimum sebesar 1,5 bulan proyeksi penarikan bank (*outflow*).[12] Pada 2016, Bank Indonesia mampu menjaga kecukupan kas secara nasional dengan pencapaian rata-rata sebesar 5,1 bulan *outflow*, relatif sama dengan rata-rata kecukupan kas pada 2015.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga kecukupan kas di seluruh kantor Bank Indonesia ditempuh melalui beberapa kebijakan. Dari sisi pasokan dan persediaan, Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan Perum Peruri sebagai institusi yang diberi amanat Undang Undang untuk melakukan pencetakan uang rupiah untuk memenuhi jumlah uang rupiah sesuai yang ditetapkan Bank Indonesia. Untuk memenuhi jumlah kebutuhan pencetakan uang Bank Indonesia yang meningkat, Perum Peruri melakukan modernisasi peralatan pencetakan uang dan optimalisasi waktu kerja. Kelancaran distribusi uang antar kantor Bank Indonesia juga menjadi faktor penting dalam menjaga kecukupan kas Bank Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan badan usaha yang menyelenggarakan moda transportasi, seperti PT. Kereta Api Indonesia (KAI), PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan badan usaha swasta lainnya.

Bank Indonesia juga melakukan pengaturan sisi permintaan untuk menjaga kecukupan kas. Sejak 2011, Bank Indonesia

12 Kas Minimum merupakan jumlah persediaan kas minimum yang harus dijaga di seluruh kantor Bank Indonesia, dengan asumsi tidak ada penyetoran uang dari bank ke Bank Indonesia. Faktor yang diperhitungkan dalam penetapan Kas Minimum adalah faktor distribusi dan transportasi serta pasokan uang Hasil Cetak Sempurna (HCS) oleh Perum Peruri.

telah menerapkan kebijakan yang mengatur penarikan dan/atau penyetoran uang kartal oleh bank. Penarikan dan/atau penyetoran uang kartal melalui Bank Indonesia dapat dilakukan setelah perbankan melakukan pertukaran uang kartal antar bank (TUKAB). TUKAB dapat dilakukan secara langsung antar bank maupun dengan perantaraan Bank Indonesia melalui mekanisme *dropshot*.[13] Kebijakan tersebut berdampak positif bagi bank karena mempercepat ketersediaan uang rupiah sesuai dengan kebutuhannya. Pengaturan ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi manajemen perkasan Bank Indonesia karena menekan pertumbuhan penarikan dan penyetoran uang kartal melalui Bank Indonesia, di luar faktor ekonomi atau siklikal (*seasonal factor*).

Ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup juga tercermin dari terpenuhinya penarikan uang kartal yang meningkat signifikan selama periode hari raya keagamaan. Penarikan uang kartal pada periode Ramadhan/Idul Fitri 2016 mencapai Rp146,1 triliun atau 91,1% dari proyeksi kebutuhan uang perbankan dan masyarakat. Sementara pada periode Natal dan liburan akhir tahun 2016, realisasi penarikan uang kartal mencapai Rp80,3 triliun atau 91,4% dari proyeksi kebutuhan uang perbankan dan masyarakat. Peningkatan kebutuhan uang kartal yang meningkat secara musiman tersebut dapat dipenuhi Bank Indonesia dengan baik di seluruh wilayah NKRI.

Meningkatkan Kualitas Uang yang Beredar di Masyarakat *(Clean Money Policy)*

Penyediaan uang rupiah yang berkualitas sangat penting dalam menjaga integritas rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia. Salah satu kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia untuk menyediakan uang rupiah berkualitas adalah dengan meningkatkan tingkat kelusuhan (*soil level*) yang menjadi standar bagi Bank Indonesia dan perbankan dalam melakukan sortasi antara uang layak edar (ULE) dan uang tidak layak edar (UTLE). Untuk mendukung tujuan tersebut, sejak 2015 Bank Indonesia melakukan peremajaan dan modernisasi alat pemrosesan dan pengolahan uang, di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) maupun Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN-BI).

Peningkatan kualitas uang Rupiah berpengaruh pada jumlah uang tidak layak edar. Peningkatan standar tingkat kelusuhan (*soil level*) menyebabkan jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan bertambah, baik dari sisi jumlah lembar/bilyet maupun nominal. Pada 2016, jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan naik 16,2% dari sisi jumlah lembar/bilyet atau naik 31,6% dari sisi nominal bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dampaknya, uang yang beredar di masyarakat semakin baik kualitasnya. Bank Indonesia juga melakukan percepatan penarikan uang lusuh sejak September 2016 dengan meningkatkan frekuensi kas keliling dan juga kerja sama dengan perbankan di seluruh wilayah Indonesia.

Memperluas Jaringan Distribusi Uang dan Layanan Kas

Bank Indonesia juga melakukan reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian misi Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, denominasi yang sesuai, tepat waktu, berkualitas dan dengan pertimbangan biaya yang efisien. Reformasi tersebut dilakukan secara berkesinambungan *(multiyears)* dengan target akhir berupa *coverage* jaringan distribusi uang dan layanan kas yang mencakup seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Reformasi jaringan distribusi uang ditempuh melalui perluasan peran Bank Indonesia dan peningkatan kerjasama dengan perbankan dan penyelenggaran jasa pengolahan uang. Upaya reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas secara garis besar mencakup perluasan peran Bank Indonesia sesuai mandat Undang-Undang Mata Uang dan peningkatan kerja sama dengan perbankan maupun badan usaha di bidang penyelenggaraan jasa pengolahan uang. Pada 2016, Bank Indonesia telah melakukan pengembangan infrastruktur, penyempurnaan manajemen perkasan dan proses bisnis pengelolaan uang rupiah (*cash management and business model*).

Dalam rangka mengembangkan infrastruktur pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia menambah 27 Kas Titipan pada 2016 (Gambar 13.1). Dengan demikian, sampai dengan akhir 2016, telah terdapat 62 Kas Titipan di seluruh wilayah NKRI. Dengan tambahan Kas Titipan tersebut, layanan kas Bank Indonesia telah menjangkau 82% atau 418 kota/kabupaten di Indonesia, meningkat dari 2015 yang sebesar 66% (Tabel 13.2). Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan dan pengembangan model bisnis Kas Titipan, serta memberikan bantuan keuangan (*financial assistance)* untuk *start up* dan operasionalisasi Kas Titipan.

Bank Indonesia meningkatkan frekuensi kas keliling untuk menjangkau daerah terdepan dan terpencil. Bank Indonesia

13 *Dropshot* adalah kebijakan pembayaran uang rupiah layak edar (ULE) setoran dari bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan penghitungan secara rinci dan penyortiran. Pembayaran oleh Bank Indonesia kepada bank dilakukan dalam satu kemasan plastik transparan (10 *brood*) yang masih utuh, tersegel, dan terdapat label bank penyetor.

Gambar 13.1. Peta Penyebaran Kas Titipan

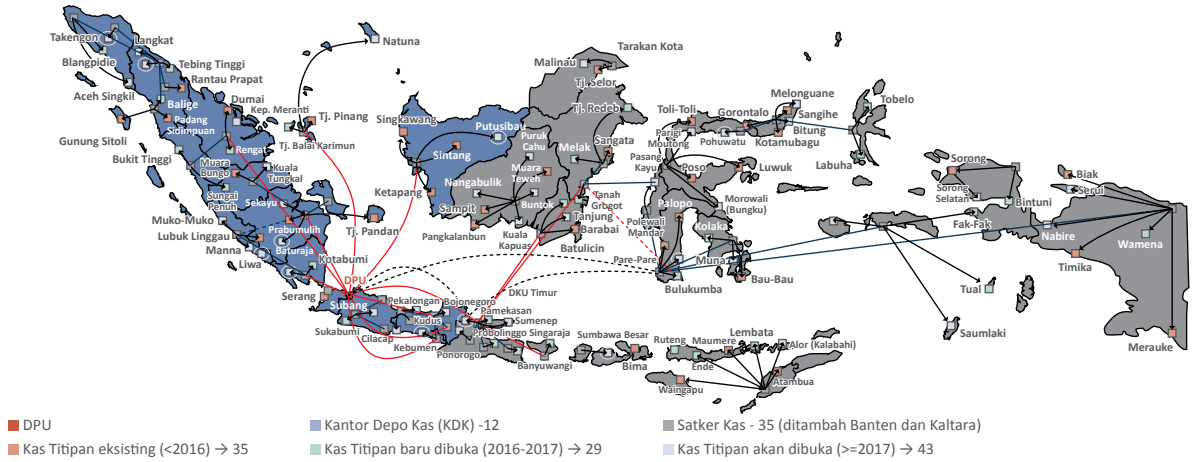

Sumber: Bank Indonesia

terus meningkatkan kegiatan kas keliling, baik yang dilakukan melalui jaringan kantor Bank Indonesia maupun melalui kerjasama dengan perbankan atau lembaga lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, TNI AL, dan Polisi Perairan. Peningkatan kegiatan Kas Keliling diharapkan dapat memenuhi kebutuhan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI sekaligus untuk menggantikan uang tidak layak edar menjadi uang layak edar sehingga kualitas uang rupiah semakin meningkat. Selain itu, Bank Indonesia juga menyempurnakan manajemen perkasan dan model bisnis pengelolaan uang. Untuk menyempurnakan manajemen perkasan, Bank Indonesia melakukan evaluasi dan penyelarasan terhadap struktur dan operasional jaringan kas agar sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini ditujukan agar kegiatan distribusi uang berjalan lebih efektif dan efisien sampai ke masyarakat dengan kualitas yang baik dengan denominasi yang sesuai, dan tepat waktu.

Mengoptimalkan Peran Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah

Kegiatan pengedaran uang rupiah juga melibatkan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang terus dioptimalkan perannya. Pada awalnya, BUJP bergerak di bidang usaha kawal angkut uang dan mengantongi izin operasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Saat ini, kegiatan usaha BUJP berkembang sehingga mencakup pula kegiatan pengelolaan uang rupiah. Namun demikian, kegiatan pengolahan uang rupiah tersebut belum diikuti dengan pengaturan dari Bank Indonesia mengenai standar sarana, prasarana dan infrastruktur, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan prinsip *governance* yang baku.

Bank Indonesia menerbitkan ketentuan untuk mengatur standar penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah. Selain untuk memastikan kegiatan BUJP sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia, ketentuan tersebut juga ditujukan memastikan berkembangnya industri jasa pengolahan uang rupiah yang sehat dan bertanggungjawab. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) dan ketentuan pelaksanaan berupa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/25/DPU perihal Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah. Jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi: (i) distribusi uang rupiah; (ii) pemrosesan uang rupiah; (iii) penyimpanan uang rupiah di khazanah; dan/atau (iv) pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang pada mesin komersial penarikan dan penyetoran uang (antara lain ATM, *Cash Deposit Machine* (CDM), dan/atau *Cash Recycling Machine* (CRM)).

Bank Indonesia juga melakukan pengawasan agar kegiatan jasa pengolahan uang rupiah mematuhi ketentuan Bank Indonesia. Setiap BUJP yang akan menjadi PJPUR diwajibkan memperoleh izin dari Bank Indonesia, termasuk pembukaan kantor cabangnya. Untuk menjaga kualitas kegiatan pengolahan uang rupiah, PJPUR diwajibkan untuk menerapkan prinsip *good governance* yang antara lain adalah memiliki *service level agreement* (SLA), mesin hitung uang, sarana dan infrastruktur, serta kompetensi SDM dalam melakukan pengolahan dan mengenai keaslian uang rupiah.

Memperkuat Komunikasi Publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan kegiatan

Tabel 13.2. Bank Pengelola dan Bank Anggota Kas Titipan

No.	Nama Bank Pengelola	Jumlah Kas Titipan	Lokasi dan Jumlah Bank Peserta
1	Bank Mandiri	10	87 Kantor Bank: Rantau Prapat (13), Toli-Toli (3), Tahuna (3), Gorontalo (15), Sorong (12), Timika (8), Biak (4), Tanjung Pinang (12), Tanjung Pandan (9), Singaraja (8)
2	Bank Negara Indonesia	13	83 Kantor Bank: Gunung Sitoli (4), Luwuk (7), Muaro Bungo (17), Bau-Bau (7), Padang Sidempuan (11), Tobelo (2), Sungai Penuh (5), Balige (3), Tanjung Balai Karimun (8), Tebing Tinggi (8), Bukit Tinggi (4), Pamekasan (2), Rengat (5)
3	Bank Rakyat Indonesia	8	52 Kantor Bank: Lubuk Linggau (11), Sampit (6), Waingapu (2), Dumai (14), Blangpidie (7), Tual (3), Kotabumi (3), Kolaka (6)
4	BPD Kalimantan Barat	3	33 Kantor Bank: Sintang (13), Ketapang (11), Singkawang (9)
5	BPD Kalimantan Tengah	2	14 Kantor Bank: Muara Teweh (5), Pangkalan Bun (9)
6	BPD Kalimantan Timur	5	24 Kantor Bank: Sangatta (2), Tanjung Selor (4), Tanjung Redab (9), Melak (4), Tana Paser (5)
7	BPD Nusa Tenggara Timur	5	18 Kantor Bank: Maumere (3), Atambua (3), Ruteng (4), Ende (6), Lembata (2)
8	BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	3	26 Kantor Bank: Palopo (12), Pare-Pare (6), Bulukumba (8)
9	BPD Sulawesi Utara	1	Kotamobogu (5)
10	BPD Sumsel Babel	1	Prabumulih (21)
11	BPD Nusa Tenggara Barat	1	Bima (5)
12	BPD Papua & Papua Barat	4	18 Kantor Bank: Merauke (7), Fak-fak (4), Bintuni (4), Wamena (3)
13	BPD Jabar & Banten	2	32 Kantor Bank: Serang (8), Sukabumi (24)
14	BPD Jatim	2	15 Kantor Bank: Probolinggo (9), Banyuwangi (6)
15	BPD Kalimantan Selatan	2	15 Kantor Bank: Batulicin (13), Tanjung (2)
		62	510 Kantor Bank Peserta

Sumber: Bank Indonesia

komunikasi publik terkait ciri keaslian uang rupiah. Materi komunikasi mencakup ciri-ciri keaslian uang rupiah, unsur pengaman uang rupiah, tata cara pelaporan uang palsu, dan tata cara penggantian uang rusak. Kegiatan komunikasi publik dilakukan dalam bentuk sosialisasi secara langsung kepada berbagai kelompok masyarakat, antara lain *cash handlers* (seperti kasir perbankan dan *retailers*), akademisi/pelajar, aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Kegiatan sosialisasi juga dikemas melalui keikutsertaan Bank Indonesia dalam pameran pembangunan di daerah maupun kesenian rakyat/tradisional. Sejak beberapa tahun yang lalu, materi ciri keaslian uang rupiah telah menjadi salah satu bagian dari materi ajar Kebanksentralan untuk pelajar sekolah menengah dan perguruan tinggi. Berbagai kegiatan komunikasi tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah dan meningkatkan kredibilitas uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial oleh masyarakat, komunikasi publik yang dilakukan Bank Indonesia juga memanfaatkan media sosial. Bank Indonesia menayangkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang keaslian uang rupiah dengan *tagline* 3D "Dilihat – Diraba – Diterawang" di beberapa televisi nasional dan media sosial. Bank Indonesia juga menyajikan *minisite* rupiah di *website* Bank Indonesia yang memuat berbagai informasi terkait ciri uang rupiah dan permainan interaktif mengenai uang rupiah. Materi tersebut juga dapat diunduh dalam bentuk video, *leaflet* dan *booklet* sesuai kelompok pengguna, seperti masyarakat umum, perbankan dan *cash handlers*, serta aparat penegak hukum.

Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Uang Rupiah Palsu

Bank Indonesia menempuh tiga strategi untuk mencegah dan menanggulangi uang rupiah palsu. Pertama, strategi *preemtive* melalui kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah dan cara memperlakukan uang rupiah dengan baik. Pada 2016 Bank Indonesia telah melakukan 819 kegiatan edukasi/sosialisasi kepada masyakarat. Kedua, strategi

pencegahan/preventif melalui kajian dan evaluasi terhadap kualitas unsur pengaman uang rupiah agar semakin sulit dipalsukan. Dalam hal ini, Bank Indonesia bekerjasama dengan lembaga internasional, seperti *Central Bank Counterfeit Detterence Group* dan Interpol. Ketiga, strategi penindakan/represif yang dilakukan melalui kerjasama intensif dengan institusi anggota Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yang terdiri dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. Bank Indonesia juga mengupayakan sanksi pidana maksimal bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah yang bertujuan menimbulkan efek jera.

Bank Indonesia bekerjasama dengan Polri memberantas peredaran uang rupiah palsu. Dalam rangka memperkuat tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam pemberantasan uang rupiah palsu, Bank Indonesia memberikan dukungan melalui penyediaan laboratorium analisis uang rupiah yang diduga palsu dan penyediaan sistem informasi Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC). Laboratorium digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti uang rupiah yang diduga palsu hasil pengungkapan kasus oleh Kepolisian RI maupun berdasarkan permintaan bank. Sementara itu, sistem informasi BI-CAC berfungsi sebagai *database* uang rupiah palsu yang dapat mendukung tugas Kepolisian dalam mengungkap jaringan pembuatan dan pengedaran uang rupiah palsu. Hasil pemeriksaan laboratorium dan BI-CAC juga menjadi bahan masukan penting bagi BI dalam meningkatkan kualitas fitur keamanan (*security features*) dalam rencana penerbitan uang rupiah ke depan. Di samping itu, sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memberi kewenangan pada Bank Indonesia untuk menyatakan keaslian uang rupiah, Bank Indonesia juga senantiasa menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai tenaga ahli dalam persidangan kasus tindak pidana kejahatan uang rupiah palsu.

Boks 13.1. *Financial Technology* dan *Regulatory Sandbox*

Gelombang Pertumbuhan *Financial Technology*

Teknologi keuangan (*financial technology* atau *fintech*) berkembang dengan cepat pada satu dekade terakhir didorong oleh berbagai inovasi, baik di sisi teknologi maupun model bisnis. Investasi di sektor *fintech* terus tumbuh secara signifikan. Data dari McKinsey (2016) menunjukkan bahwa industri *fintech* secara global meningkat signifikan dari sekitar 800 pelaku menjadi lebih dari 2.000 pelaku dalam kurun satu tahun. Perkembangan total transaksi global *fintech* pada 2016 diperkirakan mencapai 2.355 miliar dolar AS.

Di sisi investasi, menurut Accenture, total investasi bersih di bidang *fintech* pada dua tahun terakhir diperkirakan mencapai 35 miliar dolar AS.[1] Secara kumulatif sejak tahun 2010 hingga 2016 diperkirakan sekitar 60 miliar dollar AS modal ventura dan penyertaan yang diinvestasikan di sektor *fintech* (Grafik 1). Sementara Price Waterhouse Cooper (PWC) memperkirakan prospek investasi di bidang *fintech* akan melampaui 150 miliar dolar AS dalam kurun tiga hingga lima tahun ke depan.[2]

Secara sederhana, *fintech* merupakan inovasi yang menggabungkan fungsi keuangan (*financial*) dengan teknologi. Pelaku usaha *fintech* yang umumnya disebut dengan pelaku usaha rintisan (*start-ups*), berbekal ide kreatif dan inovatif, hadir memberi solusi alternatif atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa keuangan mulai dari pembayaran, pengiriman uang, pinjaman/pembiayaan, berbelanja dan berdagang (e-dagang) hingga berinvestasi. Pemain-pemain baru di bidang *fintech* bertindak sebagai *platform* atau mediator yang memfasilitasi transaksi keuangan masyarakat, termasuk keputusan investasi dan alokasi aset dalam prosedur yang relatif sederhana. Fasilitasi keuangan tersebut juga dilakukan melalui aplikasi dan/atau *algoritma* robotik berbasis jaringan internet (*network*) yang padat teknologi dan cenderung lintas batas (*borderless*).

1 Sumber: Laporan Accenture "*Fintech and the evolving landscape: landing points for the industry*" (2016)

2 Sumber: Laporan Price Waterhouse Coopers "*Blurred Lines: How FinTech is shaping Financial Services*" (2016)

Grafik 1. Nilai Investasi di Sektor *Fintech* Global

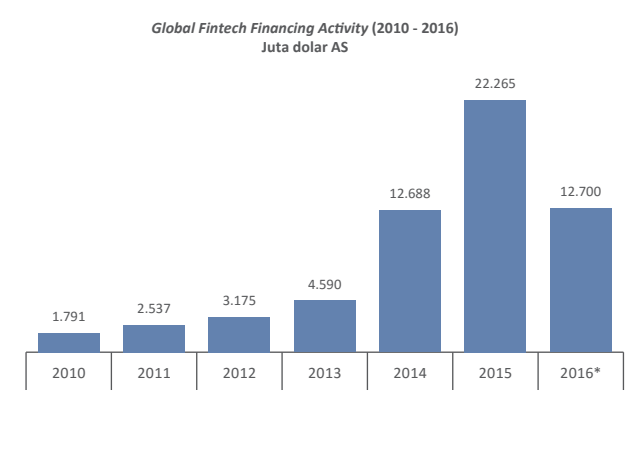

Sumber: Accenture (2016)

Karakteristik perkembangan *fintech* di negara berkembang dan negara maju berbeda. Perkembangan *fintech* di negara maju umumnya fokus pada penciptaan inovasi dan nilai tambah. Sementara di negara berkembang, *fintech* tumbuh sebagai solusi alternatif atas berbagai masalah ekonomi yang dihadapi negara tersebut, seperti keterbatasan akses masyarakat pada sektor keuangan, kesenjangan ekonomi hingga kesempatan kerja. Hal yang menarik dari perkembangan pelaku rintisan di bidang *fintech* adalah umumnya menjangkau segmen masyarakat dan/atau dunia usaha yang rata-rata tidak atau belum tersentuh oleh sektor keuangan formal. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan kapasitas jangkauan sektor keuangan formal maupun karena belum atau tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh sektor keuangan formal. Dengan demikian *fintech* diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses dan literasi keuangan.

Fintech menyimpan potensi besar dalam mendukung perekonomian ekonomi Indonesia. Hasil kajian Bank Indonesia menunjukkan bahwa akses pembiayaan dan konsumsi rumah tangga dari usaha *fintech* mampu memberi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kondisi Indonesia saat ini dapat menjadi pemicu bertumbuhnya usaha *fintech*. Pertama, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki akses ke layanan perbankan baru mencapai sekitar 36 persen dari total penduduk Indonesia. Kedua, jumlah kantor cabang bank per jumlah penduduk juga masih rendah.

Ketiga, kapasitas pembiayaan sektor keuangan formal, khususnya perbankan masih relatif terbatas. Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi permintaan pendanaan hingga Rp1.600 triliun. Namun demikian, hanya Rp600 triliun yang mampu disediakan oleh perbankan. Keempat, penggunaan telepon genggam di Indonesia cukup tinggi sehingga menjadi pintu masuk paling efektif bagi *fintech.* Saat ini terdapat 326 juta telepon genggam yang digunakan dan sebanyak 88,1 juta orang pengguna internet aktif. Peluang inilah yang menjadi salah satu pemicu pelaku usaha rintisan mengembangkan inovasi di bidang *fintech.*

Melihat pesatnya pertumbuhan *fintech*, terutama yang bergerak di bidang pembayaran, Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran memandang perlu untuk mendukung tumbuhnya inovasi dari pelaku *fintech.* Hal tersebut sesuai dengan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang memiliki tujuan utama menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal, dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen. Bank Indonesia menyadari bahwa inovasi pelaku *fintech* dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan memberi solusi atas permasalahan ekonomi Indonesia, seperti menjembatani kebutuhan dan menggerakan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong inklusi keuangan. Namun di sisi lain, inovasi tersebut juga harus dijaga agar tetap berada dalam koridor kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi berkembangnya usaha *Fintech* agar dapat melayani kepentingan nasional dan aspek perlindungan konsumen, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang mengatur terkait usaha jasa transaksi pembayaran.

Bank Indonesia *Fintech Office* dan Peran *Regulatory Sandbox*

Bank Indonesia *Fintech Office* yang dibentuk pada November 2016 merupakan sebuah unit kerja dengan fungsi untuk menjaga agar inovasi *Fintech* di Indonesia dapat berkembang dengan sehat dan tetap mengutamakan kehati-hatian dan perlindungan konsumen . Untuk itu, Bank Indonesia *Fintech Office* menjalankan fungsi mengelola *regulatory sandbox. Regulatory sandbox* merupakan wadah bagi Bank Indonesia dan pelaku *fintech* untuk dapat menguji produk, layanan, model bisnis, dan inovasi teknologi untuk menjaga *level of playing field* melalui rezim regulasi yang berimbang dan proporsional tanpa mematikan laju inovasi. Praktek pengujian melalui kerangka *regulatory sandbox* juga merupakan *international best-practice* yang diadopsi dan dilakukan di banyak negara, seperti Inggris, Australia, Kanada, Singapura, Uni Emirat Arab dan Hong Kong.

Pelaku usaha rintisan *fintech* yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dapat menjalankan operasi usahanya terlebih dahulu di *regulatory sandbox* dengan koordinasi dan monitoring oleh Bank Indonesia *Fintech Office*. Pelaku usaha rintisan yang masuk ke dalam *regulatory sandbox* dapat beroperasi secara normal namun dengan batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Batasan tersebut mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap konsumen dan sistem keuangan, serta kerangka pengaturan yang ada. Selain itu, Bank Indonesia *Fintech Office* juga merupakan wadah kolaborasi antar pelaku industri sehingga terbentuk sinergi dan harmoni antar regulator. Dengan demikian *regulatory sandbox* memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong sekaligus mengawal pengembangan *fintech* agar dapat berkembang secara sehat.

BAB 14
Koordinasi Kebijakan

Semakin kompleksnya dinamika global dan besarnya tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia membutuhkan dukungan koordinasi dan sinergi kebijakan yang solid antar otoritas. Koordinasi dan sinergi kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memitigasi risiko jangka pendek, melainkan juga untuk memperkuat struktur perekonomian dalam jangka menengah panjang. Pada 2016, Bank Indonesia bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta berbagai otoritas terkait terus memperkuat koordinasi kebijakan yang difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dan mempercepat reformasi struktural. Penguatan koordinasi kebijakan yang ditempuh telah berkontribusi positif pada efektivitas pengelolaan kondisi makroekonomi sebagaimana tercermin pada inflasi yang rendah, terjaganya stabilitas sistem keuangan, dan berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi.

Keterangan gambar:
Bank Indonesia bersama Pemerintah dan otoritas terkait terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk memitigasi risiko jangka pendek maupun panjang. Salah satu bentuk koordinasi adalah forum TPI dan TPID yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga.

Terjaganya stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan pada 2016 tidak terlepas dari sinergi respons kebijakan yang semakin solid antara Bank Indonesia, pemerintah, dan berbagai otoritas terkait lainnya. Dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk pengendalian inflasi. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan otoritas di sektor keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memitigasi berbagai potensi risiko yang dapat menjadi ancaman bagi stabilitas sistem keuangan. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat aspek makro-mikroprudensial sehingga turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan pada 2016.

Guna mendorong momentum pemulihan ekonomi, koordinasi yang dilakukan Bank Indonesia difokuskan pada upaya mempercepat implementasi reformasi struktural, meningkatkan kapasitas sumber pembiayaan domestik melalui pendalaman pasar keuangan, dan mengelola persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia untuk menjaga kelangsungan investasi. Upaya percepatan reformasi struktural diarahkan untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Koordinasi dalam mendorong pendalaman pasar keuangan diarahkan pada upaya memperluas dukungan sumber pembiayaan domestik untuk menopang pembangunan dan meningkatkan inklusi keuangan. Sementara itu, persepsi positif terhadap perekonomian domestik dikelola melalui koordinasi intensif antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menarik aliran masuk investasi. Selain itu, Bank Indonesia melalui jaringan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) secara aktif menjalin koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah guna mendorong pengembangan ekonomi daerah. Bank Indonesia juga melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan efisiensi transaksi dalam perekonomian melalui penguatan keandalan sistem pembayaran dan efektivitas pengelolaan uang rupiah.

14.1. KOORDINASI DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Koordinasi Terkait Pengendalian Inflasi

Pencapaian inflasi 2016 yang kembali berada dalam rentang sasaran inflasi 4±1% tidak terlepas dari dukungan koordinasi pengendalian inflasi yang kuat, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Langkah koordinasi diperlukan untuk memperkuat bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi agar sejalan dengan fundamental ekonomi nasional. Koordinasi pengendalian inflasi dilakukan melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai daerah. Pada 2016, koordinasi pengendalian inflasi difokuskan pada upaya memitigasi potensi inflasi *volatile food* dan mengendalikan inflasi *administered prices* seiring dengan berlanjutnya reformasi kebijakan subsidi energi. Dalam memitigasi potensi inflasi *volatile food,* koordinasi pengendalian inflasi diarahkan pada peningkatan produksi, perbaikan struktur pasar, perbaikan distribusi, penguatan regulasi, serta pengelolaan ekspektasi dan edukasi inflasi. Sementara itu, terkait dengan pengendalian inflasi *administered prices*, Pemerintah dan Bank Indonesia secara intensif berkoordinasi untuk merumuskan waktu penerapan dan besaran penetapan harga BBM dan komoditas energi lainnya untuk mendukung kebijakan subsidi tepat sasaran.

Berbagai langkah koordinasi pengendalian inflasi juga diarahkan untuk mempercepat implementasi berbagai kebijakan Pemerintah yang mendukung pada terjaganya stabilitas harga. Terkait hal tersebut, komitmen Pemerintah dalam menetapkan sektor pangan, infrastruktur dan energi sebagai sektor prioritas pembangunan memerlukan dukungan berbagai pihak, baik di tingkat pusat dan daerah, agar terimplementasi dengan baik. Komitmen Pemerintah untuk memperkuat konektivitas melalui pembangunan ruas jalan baru, jembatan, jalur kereta api, bandara dan pengembangan pelabuhan laut pada gilirannya akan mendukung kelancaran distribusi barang dan meminimalkan disparitas harga antar daerah. Pemerintah juga melakukan upaya untuk mendorong peningkatan produksi pertanian melalui pembangunan saluran irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemberian subsidi pupuk, dan perluasan areal pertanian. Di sektor energi, Pemerintah mendorong penggunaan gas bumi dan melanjutkan pembangunan pembangkit listrik untuk meningkatkan ketersediaan energi bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan berbagai terobosan kebijakan untuk memperlancar distribusi barang, seperti program Tol Laut, Gerai Maritim, dan pengembangan jaringan Toko Tani.

Peran dan dukungan Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi semakin menguat pada 2016. Hal ini tercermin dari perkembangan jumlah TPID yang hingga akhir 2016 telah terbentuk di 507 daerah, meningkat signifikan dibanding dengan posisi akhir 2015 sebanyak 442 daerah (Gambar 14.1). Pada 2016, program pengendalian inflasi difokuskan pada upaya untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, kelancaran distribusi, dan pengelolaan ekpektasi masyarakat

Gambar 14.1. Jumlah dan Sebaran TPID Posisi Desember 2016

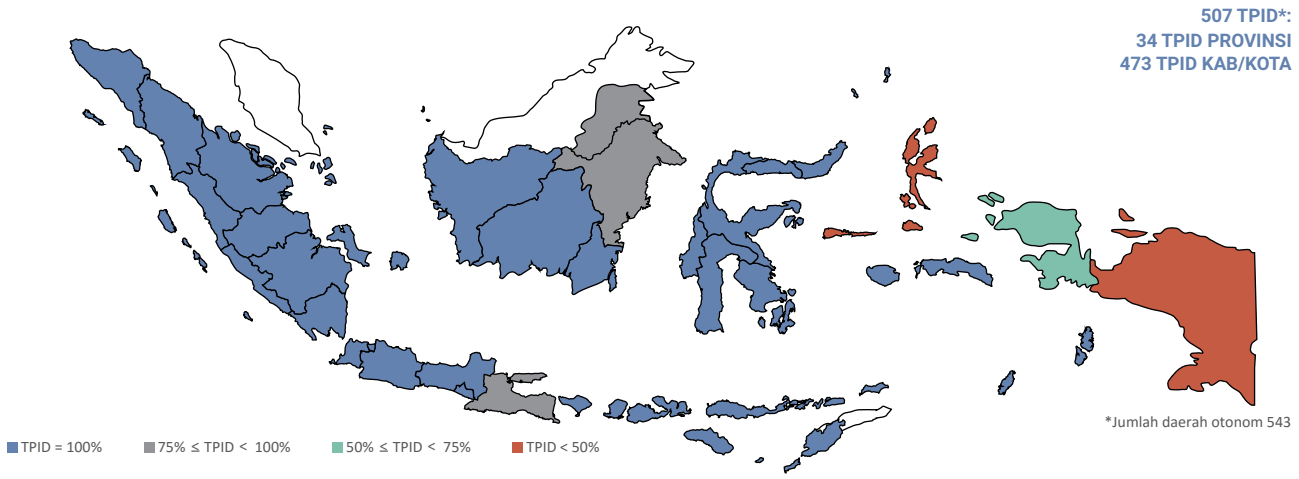

Sumber: Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas)-TPID

melalui komunikasi yang efektif. Kegiatan TPID yang ditujukan untuk menopang ketersediaan kebutuhan pokok melalui peningkatan produksi pangan juga mengintegrasikan program pengembangan klaster yang diinisiasi Bank Indonesia. Hingga akhir 2016 telah terdapat 169 klaster binaan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah yang telah dikembangkan.

Semakin intensifnya peran TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah juga tercermin pada terkendalinya tekanan inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di tahun 2016. Pada periode HBKN 2016, upaya untuk mengendalikan tekanan inflasi semakin intensif dilakukan melalui penyelenggaraan pasar murah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyelenggaraan pasar murah di berbagai daerah pada 2016 mulai memasukkan komoditas yang menjadi penyumbang inflasi di daerah tersebut, seperti telur ayam di Padang dan cabai merah di Banten. Beberapa daerah juga terus memperkuat kerja sama penyediaan pasokan pangan antar daerah, seperti Jambi dan Lampung yang bekerjasama dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk memasok bawang merah. Kegiatan komunikasi juga dilakukan secara intensif di berbagai daerah untuk meredam ekspektasi inflasi masyarakat, baik melalui media masa maupun dalam bentuk inspeksi langsung ke pasar dan gudang pasokan pangan. Secara keseluruhan, berbagai upaya pengendalian inflasi yang ditempuh di tingkat pusat dan daerah berdampak positif pada terkendalinya tekanan inflasi pada 2016.

Sejalan dengan semakin bertambahnya TPID, Bank Indonesia dalam wadah Kelompok Kerja Nasional TPID (Pokjanas TPID) terus memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah.[1] Sinergi kebijakan yang efektif diperlukan untuk mendukung implementasi berbagai kebijakan dan program kerja Pemerintah secara nasional yang berdampak positif bagi stabilisasi harga. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID VII 2016 kembali menegaskan komitmen bersama untuk pencapaian inflasi yang rendah dan stabil melalui sinergi percepatan pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga pangan.[2] Terkait program tersebut, perlu dukungan Pemerintah Daerah melalui percepatan realisasi anggaran belanja pembangunan, terobosan dan inovasi kebijakan stabilisasi harga disertai alokasi anggaran yang memadai, dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung distribusi pangan. Peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi melainkan juga pada pengendalian inflasi. Sebagaimana tahun sebelumnya, pada Rakornas VII TPID juga memberikan penghargaan kepada beberapa daerah yang memiliki kinerja terbaik dan berinovasi dalam pengendalian inflasi.[3]

Bank Indonesia melalui wadah TPI merumuskan landasan penguatan kelembagaan koordinasi pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun daerah. Penguatan dasar hukum diperlukan mempertimbangkan semakin pentingnya koordinasi kebijakan sektoral antara pusat dan daerah,

1 Pokjanas TPID dibentuk bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri.

2 Rakornas VII TPID dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan diselenggarakan di Jakarta pada 4 Agustus 2016. Kegiatan Rakornas VII TPID merupakan program inisiatif bersama antara Bank Indonesia dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri dalam Pokjanas TPID.

3 Penghargaan kepada TPID diberikan dalam tiga kategori yakni (i) "TPID Terbaik" bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan basis penghitungan inflasi, (ii) "TPID Berprestasi" untuk Kabupaten/Kota yang bukan merupakan basis penghitungan inflasi, dan (iii) "TPID Inovatif" untuk daerah yang memiliki inovasi terbaik dalam menjaga stabilitas harga.

baik dalam penyusunan program kerja dan anggaran, perumusan rekomendasi kebijakan, maupun pada tahap implementasinya. Di sisi lain, dasar hukum TPI dan Pokjanas TPID saat ini masih berupa Nota Kesepahaman, sementara untuk meningkatkan efektivitas koordinasi pengendalian inflasi diperlukan keterlibatan yang lebih luas dari berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, peran koordinasi di tingkat pusat dan daerah perlu dioptimalkan melalui penguatan dasar hukum, struktur organisasi, mekanisme kerja, dan peran sekretariat pengendalian inflasi.

Sebagai tindaklanjut Rakornas VII TPID 2016, Pokjanas TPID melakukan rangkaian pembahasan bersama dengan TPID di berbagai daerah yang difokuskan pada upaya mengatasi tantangan yang dihadapi daerah dalam pengendalian inflasi. Dalam rangkaian pembahasan tersebut, secara garis besar ditekankan kembali pentingnya penguatan landasan hukum bagi kegiatan pengendalian inflasi guna menegaskan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi di daerah. Selain itu, *roadmap* pengendalian inflasi perlu diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung pengendalian inflasi melalui perbaikan infrastruktur produksi pertanian di pedesaan. TPID juga menyepakati untuk mendorong peningkatan efisiensi birokrasi di daerah terkait perizinan maupun pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam rangka penerapan aturan mengenai tata ruang, serta memperkuat dukungan data dan informasi pangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.

Perluasan akses masyarakat terhadap informasi pangan merupakan salah satu program berkelanjutan yang menjadi prioritas Pokjanas TPID. Penguatan data informasi pangan diperlukan untuk mengatasi permasalahan asimetri informasi mengenai harga pangan sekaligus juga mendukung perumusan kebijakan stabilisasi harga pangan. Program tersebut dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dirintis sejak 2013. Pengembangan PIHPS Nasional tersebut juga sejalan dengan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang diinisiasi oleh Pemerintah pada April 2016.[4]

Pada 2016, pengembangan PIHPS Nasional difokuskan pada penguatan basis data harga komoditas pangan melalui penyempurnaan pelaksanaan survei harga harian. Saat ini, PIHPS Nasional telah mencakup data harga untuk 10 komoditas pangan strategis dengan berbagai varian yang disesuaikan dengan karakteristik konsumsi di masing-masing daerah.[5] Sejak pertengahan 2016, data dalam PIHPS Nasional diperkuat melalui survei harga yang dilaksanakan secara harian oleh Bank Indonesia di 164 pasar utama di 82 kota/kabupaten.[6] Pengembangan PIHPS Nasional pada 2016 juga difokuskan pada penyempurnaan akses publik melalui alamat internet www.hargapangan.id dan melalui *mobile application* (*android based* dan *iOS based*). Selain itu, PIHPS Nasional telah dilengkapi fitur *early warning system* (EWS) untuk mendukung perumusan respons kebijakan pengendalian harga dan fasilitas *virtual meeting* bagi koordinasi antar pemangku kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, data dalam PIHPS Nasional akan diperluas hingga mencakup data harga di pasar modern, pedagang besar, dan tingkat produsen.

Bank Indonesia secara khusus juga melakukan koordinasi terkait percepatan pembenahan logistik pangan guna mendukung pencapaian ketahanan pangan dan terjaganya stabilitas harga.[7] Rentannya gejolak harga di daerah, antara lain disebabkan oleh kualitas infrastruktur logistik yang masih belum memadai dan merata, biaya bongkar muat yang tinggi, dan skala ekonomi antar daerah yang belum seimbang. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah Pemerintah yang memprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas, perlu didukung dengan komitmen dan sinergi kebijakan yang erat dari berbagai pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Ketersediaan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar daerah pada gilirannya akan berdampak positif pada kelancaran distribusi dan logistik antar daerah. Pada saat yang bersamaan upaya untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat juga perlu terus dilakukan, antara lain dengan memperkuat kapasitas produksi dan intensifikasi pertanian, pembenahan struktur pasar dan rantai pasok komoditi pangan, serta perluasan akses masyarakat terhadap informasi pangan.

Bank Indonesia dan Pemerintah menyepakati lima langkah strategis yang perlu ditempuh guna memitigasi potensi kenaikan inflasi ke depan, khususnya di tahun 2017. Pertama, menekan laju inflasi *volatile food* (VF) hingga di kisaran 4-5%, antara lain melalui penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah serta penggunaan instrumen dan insentif fiskal untuk mendorong peran Pemerintah Daerah dalam

4 Presiden Republik Indonesia pada peresmian Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat menegaskan perlunya pusat data dan informasi harga pangan yang dilengkapi dengan fitur untuk pengambilan kebijakan pengendalian harga.

5 Komoditas strategis dalam PIHPS mencakup beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula pasir.

6 Pemilihan kota pada tahap awal pelaksanaan survei mengacu pada kota yang menjadi basis penghitungan inflasi IHK Nasional oleh Badan Pusat Statistik.

7 Bank Indonesia mengisiasi rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah pada 12 Februari 2016 di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengusung tema "Mempercepat Perbaikan Sistem Logistik untuk Memperkuat Ketahanan Pangan".

stabilisasi harga.[8] Kedua, mengendalikan dampak lanjutan dari penyesuaian kebijakan *administered prices*, seperti pengendalian tarif angkutan umum. Ketiga, melakukan pentahapan dalam penerapan kebijakan *administered prices*, termasuk rencana implementasi konversi beberapa jenis subsidi langsung menjadi transfer tunai. Keempat, memperkuat kelembagaan TPI dan TPID. Kelima, terus memperkuat koordinasi pusat dan daerah untuk mendukung sinergi kebijakan pengendalian inflasi. Bank Indonesia akan secara konsisten terus memperkuat bauran kebijakan guna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi.

Koordinasi terkait Stabilitas Sistem Keuangan

Pengelolaan stabilitas sistem keuangan pada 2016 menghadapi beberapa tantangan, baik yang bersumber dari global maupun domestik. Risiko dari sisi global terutama terkait dengan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada menurunnya volume permintaan dan harga komoditas global. Kondisi tersebut selanjutnya berimbas pada kinerja ekspor dan sektor korporasi Indonesia yang menurun. Penurunan kinerja korporasi tersebut kemudian meningkatkan risiko kredit perbankan pada 2016. Berbagai risiko juga masih membayangi pasar keuangan global, khususnya terkait dengan ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan AS (Fed Funds Rate), dan sentimen politik global yang dapat memicu terjadinya pembalikan arus modal. Sementara risiko domestik terkait kekhawatiran terhadap penerimaan pajak merupakan faktor yang menjadi perhatian di tengah berlangsungnya konsolidasi perekonomian.

Merespons berbagai risiko tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Koordinasi utamanya dilakukan dalam aspek pencegahan dan penanganan krisis melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang telah terbentuk sejak 2012. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) pada 15 April 2016, FKSSK beralih menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi melakukan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, serta penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis. UU PPKSK memberikan landasan hukum yang kuat dalam penanganan krisis keuangan. Terlebih sesuai amanat UU PPKSK, penetapan status krisis dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dengan mempertimbangkan rekomendasi KSSK (Lihat Boks 14.1).

Dalam pelaksanaan fungsinya, KSSK didukung oleh Protokol Manajemen Krisis (PMK) di setiap lembaga yang bertugas melakukan asesmen risiko sesuai bidang kerjanya masing-masing. Dalam forum tersebut, Bank Indonesia secara rutin menyampaikan asesmen terkait perkembangan ekonomi makro dan nilai tukar baik di tingkat teknis, tingkat deputi (*Deputies' Meeting*) dan *high-level* (Rapat KSSK). Untuk itu, Bank Indonesia juga memperkuat pengaturan internal terkait Protokol Manajemen Krisis (PMK) dan mempertajam alat analisis pemantauan risiko. Bank Indonesia memperbarui ketentuan internal sesuai dengan perkembangan organisasi serta menyelaraskan dengan pokok-pokok ketentuan UU PPKSK. Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan internal tentang PMK. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat kerangka kerja (*framework*) pemantauan risiko, termasuk indikator pemantauan risiko agar dapat menangkap lebih dini peningkatan potensi risiko perekonomian, khususnya di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran.

Dalam rangka menguji kesiapan protokol KSSK berdasarkan UU PPKSK, Bank Indonesia berpartisipasi dalam simulasi krisis nasional dan menyelenggarakan simulasi krisis secara internal. Simulasi krisis nasional telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya dengan melibatkan seluruh level, termasuk pimpinan lembaga anggota KSSK (*Full-Dress*). Simulasi yang dilaksanakan pada 15 September 2016 ditujukan untuk menguji operasionalisasi UU PPKSK serta aturan pelaksanaannya. Melalui simulasi tersebut, mekanisme koordinasi antar anggota KSSK diharapkan semakin optimal. Simulasi krisis juga dilakukan secara internal di Bank Indonesia dengan melibatkan seluruh satuan kerja terkait (*Bank Indonesia Wide*) guna menguji kesiapan Protokol Manajemen Krisis (PMK) dalam kondisi tekanan. Selain itu, Bank Indonesia berpartisipasi dan berkoordinasi dalam rangka *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) dengan menjadi bagian dari Tim Kerja Nasional FSAP bersama dengan Kemenkeu, OJK, dan LPS.[9]

8 Upaya pengendalian inflasi VF lainnya adalah pembangunan sistem data lalu lintas barang, khususnya komoditas pangan; mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat, terutama untuk konsumsi cabai dan bawang segar, antara lain dengan mendorong inovasi industri produk pangan olahan; penguatan kerja sama antar daerah; percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas; dan perbaikan pola tanam pangan.

9 *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) adalah suatu mekanisme untuk menilai stabilitas dan kesehatan (*soundness*) dari sektor keuangan, serta potensi kontribusinya terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara komprehensif.

Koordinasi terkait Kebijakan Makro-Mikroprudensial

Keberhasilan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tidak terlepas dari koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dengan institusi terkait, khususnya dengan OJK dan LPS. Adanya keterkaitan yang erat antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial, serta guna mendukung implementasi UU PPKSK diperlukan koordinasi yang efektif dan efisien, terutama dengan dengan OJK dan LPS. Untuk mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi dengan OJK maka dibentuk Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial (FKMM). Teknis pelaksanaan FKMM tersebut dituangkan dalam Protokol FKMM yang mencakup keanggotaan, penyelenggaraan pertemuan FKMM serta tata cara penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK kemudian diperkuat melalui Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama dan Mekanisme Koordinasi.

Kerja sama dan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK juga diperkuat pada aspek pertukaran data, penetapan bank sistemik, dan sistem informasi. Bank Indonesia dan OJK juga telah menyepakati pertukaran data surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang bersumber dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Petunjuk Teknis tentang Pertukaran Data Surat Berharga dalam rangka Perhitungan Giro Wajib Minimum *Loan to Funding Ratio* (GWM-LFR) yang ditandatangani pada 23 Desember 2016. Selain itu, Bank Indonesia dan OJK telah menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) kerja sama dan koordinasi dalam penetapan dan pemutakhiran daftar bank sistemik. Juklak tersebut diarahkan untuk membakukan proses penyelarasan data dan ruang lingkup data yang diperlukan dalam penetapan bank sistemik. Pada aspek sistem informasi, Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK untuk mengembangkan sistem informasi perkreditan yang andal dan berkualitas, terutama terkait dengan transisi pengelolaan sistem informasi debitur yang secara bertahap akan dilakukan oleh OJK.[10] Selain itu, Bank Indonesia secara intensif berkoordinasi dengan OJK guna mengevaluasi ketahanan permodalan perbankan dalam menyerap potensi risiko melalui pelaksanaan *stress test* secara berkala.

Koordinasi antara Bank Indonesia dengan LPS juga terus diperkuat dalam melaksanakan amanat UU PPKSK. Bank Indonesia dan LPS pada 28 Juli 2016 menyepakati delapan pokok cakupan koordinasi dan kerja sama.[11] Pertama, penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik berupa pencabutan izin usaha. Kedua, pendanaan dalam rangka penanganan permasalahan solvabilitas bank. Ketiga, pertukaran data dan informasi. Keempat, pengembangan kompetensi pegawai. Kelima, kegiatan penelitian, kajian, dan survei bersama. Keenam, sosialisasi dan edukasi bersama. Ketujuh, penugasan pegawai. Terakhir, penanganan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan. Kesepakatan koordinasi dan kerja sama tersebut juga telah menyesuaikan dengan perkembangan terkini seiring dengan terbitnya UU PPKSK, antara lain terkait pendanaan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik dalam kondisi krisis sistem keuangan.

Bank Indonesia dan LPS juga menyepakati pengaturan mengenai pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki LPS oleh Bank Indonesia untuk tujuan penanganan permasalahan bank. Hal ini terkait dengan kewenangan LPS sebagaimana tertuang dalam UU PPKSK untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS, untuk menguasai, mengelola, dan menjual/mengalihkan aset bank. Untuk memperoleh dana dalam melaksanakan tugasnya tersebut, LPS dapat menjual aset yang dimiliki berupa SBN ke pasar. Namun, penjualan SBN milik LPS dalam kondisi krisis dan jumlah besar berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, khususnya di pasar SBN. Dalam kaitan hal tersebut, Bank Indonesia dan LPS menyepakati mekanisme koordinasi dan pelaksanaan penjualan SBN oleh LPS kepada Bank Indonesia.[12] Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memperlancar dan mengoptimalkan transaksi penjualan SBN oleh LPS dalam rangka penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik dalam kondisi krisis sistem keuangan.

14.2. KOORDINASI DALAM RANGKA MENDORONG MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI

Koordinasi untuk Mendorong Reformasi Struktural

Momentum pemulihan ekonomi pada 2016 yang terus berlanjut perlu diperkuat melalui reformasi struktural. Penguatan struktur ekonomi diperlukan guna mendorong

10 Kesepakatan Bersama antara BI dan OJK No. 17/3/NK/GBI/2015 | PRJ-50A/D.01/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Debitur (SID).

11 Nota Kesepahaman antara BI dan LPS No.18/12/NK/GBI/2016 | MoU-3/DK/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Bank Indonesia dan LPS.

12 Perjanjian Kerja Sama antara BI dan LPS No. 18/3/PKS/DpG/2016 | PKS-1/KE/2016 tentang Penjualan Surat Berharga Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Kepada Bank Indonesia.

peningkatan efisiensi dan produktivitas sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan daya saing perekonomian. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah di tingkat pusat dan daerah, untuk bersama-sama mempercepat reformasi struktural yang diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia melalui seluruh jaringan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) di daerah secara aktif menjalin koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi fokus koordinasi dalam rangka mendorong reformasi struktural sepanjang 2016 antara lain terkait dengan pengembangan daya saing perkotaan dan penerapan kota cerdas (*smart city*), pengembangan sektor maritim sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan daya saing industri manufaktur.

Sinergi kebijakan untuk meningkatkan daya saing perkotaan menjadi salah satu prioritas koordinasi dalam mendorong reformasi struktural. Pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi kunci bagi peningkatan daya saing perkotaan untuk menumbuh kembangkan berbagai kegiatan ekonomi termasuk industri kreatif serta berbagai inovasi yang menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam pertemuan koordinasi yang diselenggarakan pada 2 Juni 2016 di Jakarta, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah membahas inisiatif-inisiatif yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan daya saing perkotaan dan pengembangan ke arah kota cerdas. Dalam kaitan pengembangan kota cerdas ini, Bank Indonesia mendorong implementasi program elektronifikasi yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi hubungan antara masyarakat-bisnis-pemerintahan (*People-Business-Government*) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien.

Potensi maritim yang besar juga perlu dioptimalkan untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengembangan sektor maritim memerlukan kebijakan yang integratif agar tercipta ekosistem maritim yang kuat. Untuk itu, diperlukan adanya sinergi dalam pembangunan infrastruktur maritim yang mencakup beberapa sektor terkait seperti perkapalan, perikanan, pariwisata, pelayaran dan sumber daya manusia maritim serta kelembagaannya. Dalam pertemuan koordinasi antara Bank Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah di Batam pada 12 Agustus 2016 disepakati beberapa hal yang perlu menjadi prioritas untuk mendukung pengembangan sektor maritim. Salah satunya melalui penerapan kebijakan satu peta dan satu desain kapal (*one map and one ship design policy*) guna mendukung berkembangnya industri perkapalan. Selain itu, perlu diintegrasikan strategi pengembangan infrastruktur logistik dengan pengembangan wilayah yang mendukung pada peningkatan konektivitas antar wilayah industri, permukiman, dan simpul-simpul transportasi. Peningkatan kualitas infrastruktur kelembagaan juga perlu menjadi prioritas melalui reformasi birokasi, khususnya pada aspek layanan publik dan sistem pemerintah berbasis elektronik, serta peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah.

Transformasi industri manufaktur merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Merespons hal tersebut, pertemuan koordinasi antara Bank Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah di Surabaya pada 25 November 2016 membahas strategi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional. Dalam pertemuan koordinasi tersebut disepakati bahwa transformasi industri harus dilakukan melalui pembenahan berbagai lini, mulai dari sumber daya manusia, hingga pasokan energi dan infrastruktur lainnya. Untuk itu, strategi kebijakan yang ditempuh untuk mendorong transformasi industri manufaktur harus dilakukan secara terintegrasi, bersinergi, dan secara konsisten diarahkan pada penguatan daya saing industri nasional. Transformasi industri nasional dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (Tahap 1), mendorong keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan (Tahap 2), serta menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh (Tahap 3).

Untuk mendukung percepatan reformasi struktural, Pemerintah meluncurkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dalam periode September 2015 hingga November 2016 (Tabel 14.1). Paket Kebijakan Ekonomi tersebut mencakup harmonisasi peraturan, kemudahan perizinan, serta insentif fiskal. Pemerintah meluncurkan 8 PKE pada 2015 dan 6 PKE pada 2016. PKE IX diluncurkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur kelistrikan dan infrastruktur pendukung perbaikan logistik (Tabel 14.1). Kemudian PKE X ditujukan memperbaiki iklim investasi melalui perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan peningkatan perlindungan terhadap UMKM dan Koperasi. Dilanjutkan PKE XI dengan fokus pada Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE), fasilitas lanjutan Dana Investasi Real Estate (DIRE), penerapan *Indonesia Single Risk Management* (IRSM), serta pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Dalam PKE XII, Pemerintah menitikberatkan pada upaya

Tabel 14.1. Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah

2016					
Paket Jilid IX	Paket Jilid X	Paket Jilid XI	Paket Jilid XII	Paket Jilid XIII	Paket Jilid XIV
• Infrastruktur listrik • Logistik	Keterbukaan Investasi (DNI)	• KURBE • IRSM	Perbaikan Peringkat Kemudahan Berusaha	Peningkatan akses MBR terhadap perumahan	Peluncuran Peta Jalan Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

Sumber: Kemenko Bidang Perekonomian

peningkatan kemudahan berusaha, khususnya UMKM, antara lain melalui penyederhanaan prosedur pendirian perusahaan dan pendirian bangunan. Sementara itu, PKE XIII lebih difokuskan pada upaya meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap perumahan. Pada akhir November 2016, Pemerintah meluncurkan PKE XIV terkait Peta Jalan Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*e-commerce*). Hingga penghujung tahun 2016, sinkronisasi dan penyelesaian deregulasi PKE I – XIV telah mencapai 99%.

Dalam rangka mengawal implementasi PKE, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan PKE. Satgas tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Satgas membentuk empat kelompok kerja (Pokja) (Diagram 14.1). Bank Indonesia terlibat secara khusus dalam Pokja III yang memiliki empat tugas pokok. Pertama, melakukan pemantauan dan inventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Kedua, melakukan evaluasi dan menganalisis efektivitas dan dampak atas pelaksanaan kebijakan ekonomi. Ketiga, melakukan kajian atas usulan deregulasi baru. Keempat, menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait evaluasi dan analisis

Diagram 14.1. Organisasi Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi

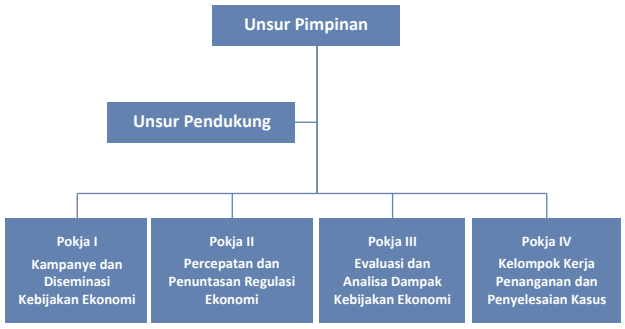

Sumber: Kemenko Bidang Perekonomian

dampak kebijakan ekonomi kepada Satgas. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan PKE, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu menyepakati kerja sama dalam kerangka pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.[13] Kesepakatan tersebut mencakup koordinasi dalam rangka perumusan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, pertukaran data dan informasi, serta pembentukan forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKD).

Koordinasi terkait Pendalaman Pasar Keuangan sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan serta inklusif diperlukan dukungan pembiayaan pembangunan yang memadai. Dalam kaitan ini, adanya pasar keuangan yang dalam, aktif, likuid, inklusif dan efisien menjadi faktor penting bagi tersedianya dana pembangunan. Selain itu, pendalaman pasar keuangan diperlukan untuk dapat meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter serta menyediakan sarana manajemen risiko dan likuiditas bagi pelaku ekonomi. Di sisi lain, pasar keuangan Indonesia saat ini masih relatif tertinggal dibandingkan dengan negara *peer* sehingga lebih bertumpu pada pembiayaan yang bersumber dari sektor perbankan. Di negara-negara maju, pembiayaan ekonomi semakin berkembang dan didominasi oleh pembiayaan yang bersumber dari luar perbankan, seperti pasar saham dan pasar obligasi.

Setidaknya terdapat enam aspek penting yang perlu menjadi prioritas dalam upaya mempercepat pendalaman pasar keuangan. Pertama, memperbanyak instrumen pasar keuangan. Kedua, memperkuat basis investor domestik, baik investor institusional (seperti dana pensiun dan asuransi) maupun investor ritel. Ketiga, memperkaya keragaman instrumen investasi yang memiliki tenor panjang disertai mekanisme *reverse repo* surat berharga

13 Nota Kesepahaman No. 18/4/NK/GBI/2016 | 500/1516/SJ | MoU-6/MK.010/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah

dan perluasan instrumen pengelolaan risiko (*hedging instrument*). Terkait hal tersebut, Bank Indonesia secara bertahap dan terukur mulai mengeluarkan ketentuan tentang instrumen *derivative* untuk memenuhi kebutuhan *hedging* dan menampung dana-dana dari luar negeri, termasuk dana repatriasi amnesti pajak. Keempat, penguatan peran lembaga perantara di pasar keuangan (*primary dealer/brokers*) untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi transaksi di pasar keuangan. Kelima, pembangunan infrastruktur pasar keuangan untuk meningkatkan volume dan menurunkan biaya transaksi seperti *Electronic Trading Platform* (ETP), sentralisasi kliring dan penjaminan (*Central Counterparty*/CCP), *Financial Technology (Fintech)*, penatausahaan surat berharga (*custody*), dan otomasi proses penyelesaian (*settlement*) yang terintegrasi dan efisien. Keenam, penyempurnaan dan harmonisasi antara otoritas yang berwenang di Indonesia.

Bank Indonesia bersama dengan Kemenkeu dan OJK juga menyepakati kerja sama dalam rangka percepatan penyediaan sumber pembiayaan ekonomi. Kerja sama tersebut mencakup pembentukan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan atau FK-PPPK (Diagram 14.2), perencanaan dan percepatan implementasi kebijakan yang terkait dengan semua unsur pasar keuangan, dan pertukaran data dan informasi. Sepanjang 2016, FK-PPPK telah menginisiasi beberapa kegiatan bersama, antara lain identifikasi tantangan pembiayaan proyek infrastruktur prioritas melalui instrumen pasar keuangan, penyelenggaraan *workshop* mengenai peran pasar modal sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur domestik, serta diskusi terbatas terkait potensi pembiayaan infrastruktur ketenagalistrikan. Di samping itu, FK-PPPK saat ini tengah menyusun *masterplan* pengembangan pasar keuangan.

Diagram 14.2. Stuktur Organisasi Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan

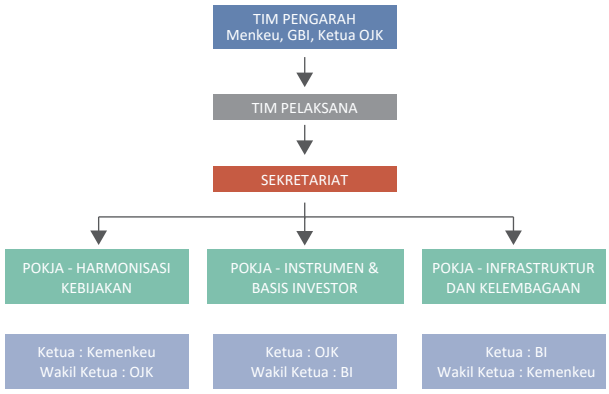

Sumber: FK-PPPK

Bank Indonesia juga secara aktif melakukan koordinasi untuk mendorong berkembangnya sumber pembiayaan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejalan dengan hal ini, Bank Indonesia menjadi salah satu anggota dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia.[14] Bank Indonesia juga bekerjasama dengan para praktisi industri keuangan syariah yang tergabung dalam *Indonesia Islamic Global Market Association* (IIGMA) dalam penyusunan *Islamic Financial Market Code of Conduct* (ICOC). Pada 25 Oktober 2016, ICOC diluncurkan sebagai panduan bagi praktisi di sektor keuangan syariah dalam bertransaksi agar sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Untuk mendorong aspek sosial di keuangan syariah, Bank Indonesia bekerjasama dengan lembaga terkait menginisiasi penyusunan *Zakat Core Principles* (ZCP) dan *Waqaf Core Principles* (WCP). ZCP dimaksudkan sebagai panduan bagi pengelolaan zakat secara efektif di forum internasional. Penyusunan ZCP dilakukan oleh BI bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB) dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam *International Working Group-Zakat Core Principles* (IWG-ZCP). ZCP telah diluncurkan dalam *World Humanitarian Summit of United Nations* di Istanbul, Turki, pada 23 Mei 2016. Sementara itu, WCP disusun oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), IRTI-IDB dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam IWG-WCP. Bank Indonesia juga bekerjasama dengan BWI dalam penyusunan *roadmap* BWI guna menjadi masukan dalam rangka amandemen Undang Undang Wakaf. Lebih lanjut, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Kemenkeu, dan BWI dalam merancang model *sukuk linked waqaf* guna mengoptimalkan aset wakaf menjadi aset yang lebih produktif dan menambah jenis sukuk untuk menarik minat investor.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ekonomi syariah, Bank Indonesia bekerjasama dengan pihak-pihak terkait terus menggalakkan program sosialisasi dan edukasi. Pada 2016, Bank Indonesia menyelenggarakan *Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF)* ketiga di Surabaya. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pencanangan Komitmen Bersama Akselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah antara Bank Indonesia, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemenkeu, Badan Ekonomi Kreatif, LPS, Pemda Jatim,

14 Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), menetapkan Dewan Pengarah KNKS yang beranggotakan 6 menteri dan empat pimpinan otoritas/lembaga terkait, termasuk Gubernur Bank Indonesia

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, BAZNAS, BWI, dan 17 Pondok Pesantren di Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut juga dihasilkan kesepakatan mengenai *roadmap* kemandirian ekonomi pesantren.

Koordinasi dalam rangka Mengelola Persepsi Positif Perekonomian Domestik

Momentum pemulihan ekonomi juga perlu didukung oleh pengelolaan persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik. Hal ini karena perilaku investor dalam berinvestasi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kondisi perekonomian negara tersebut. Persepsi tersebut umumnya terkait dengan iklim investasi dan tingkat risiko di suatu negara yang ditunjukkan oleh indikator-indikator fundamental ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit neraca transaksi berjalan, cadangan devisa, dan peringkat kredit negara (*sovereign credit rating*).

Di pasar keuangan global, *sovereign credit rating* merupakan indikator yang merefleksikan kemampuan suatu negara untuk membayar kewajiban pinjaman luar negerinya sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Penilaian *sovereign credit rating* dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang secara umum didasarkan pada aspek kondisi dan prospek ekonomi makro, kinerja keuangan pemerintah, risiko eksternal, efektivitas institusi, serta kinerja sektor fiskal dan moneter. Secara empiris, *sovereign credit rating* terbukti memberikan pengaruh pada besarnya biaya pinjaman (*cost of borrowing*) bila suatu negara hendak menerbitkan surat utang. *Sovereign credit rating* suatu negara juga berperan sebagai *benchmark* bagi *rating* yang diberikan kepada perusahaan swasta di negara tersebut, sehingga secara tidak langsung juga akan memengaruhi biaya investasi di sektor swasta. Selain itu, *sovereign credit rating* turut menentukan akses suatu negara ke pasar dana internasional.

Dalam rangka koordinasi untuk memelihara persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia, maka dibentuk *Investor Relation Unit* (IRU) Nasional. Bank Indonesia bertindak sebagai Sekretariat IRU Nasional yang bertugas melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka perumusan strategi komunikasi kepada investor dan lembaga pemeringkat. Selain itu, dalam upaya untuk mengurangi asimetri informasi, IRU Nasional secara rutin melakukan pengumpulan data dan informasi resmi dari berbagai Kementerian, Lembaga, serta Otoritas untuk disampaikan kepada lembaga pemeringkat. Hingga saat ini, IRU Nasional secara konsisten berhasil mengelola persepsi positif tiga lembaga pemeringkat utama, yaitu Fitch Ratings, Moody's Investor Service, dan Standard and Poors (S&P). Penilaian rating dari tiga lembaga tersebut menjadi rujukan investor di pasar global dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu juga terdapat dua lembaga pemeringkat Jepang yang secara rutin melakukan asesmen terhadap Indonesia dan menjadi rujukan bagi investor Jepang, yakni Japan Credit Rating Agency (JCRA) dan Rating and Investment Information Corporation (R&I).

Koordinasi melalui IRU Nasional berhasil memelihara persepsi positif lembaga pemeringkat. Hingga akhir 2016, Indonesia tercatat memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*) berdasarkan penilaian dari Fitch dan Moody's, serta lembaga pemeringkat Jepang. Selanjutnya, pada 21 Desember 2016, lembaga pemeringkat Fitch meningkatkan *outlook Sovereign Credit Rating* Republik Indonesia dari *Stable* menjadi *Positive* (Grafik 14.1). Fitch menyatakan bahwa terdapat tiga faktor kunci yang mendukung perbaikan *outlook* tersebut. Pertama, kinerja stabilitas makroekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global. Kedua, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan. Ketiga, reformasi struktural yang konsisten sejak September 2015 terbukti mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Upaya mengelola persepsi positif juga dilakukan di daerah, khususnya untuk meningkatkan investasi langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI). Bank Indonesia turut aktif meningkatkan daya tarik investasi di daerah melalui pembentukan *Regional Investor Relations Unit* (RIRU) dengan *pilot project* di lima provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan

Grafik 14.1. Perkembangan *Sovereign Credit Rating* Indonesia

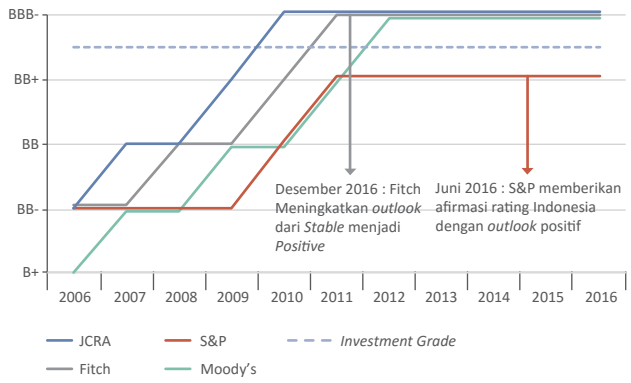

Sumber: Bank Indonesia

Sulawesi Utara. Melalui forum RIRU tersebut, Bank Indonesia membangun kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya dalam memfasilitasi aktivitas promosi dan pengelolaan persepsi positif investasi di daerah. Pada tahun 2016, *Pilot Project* RIRU di 5 provinsi tersebut terus mengembangkan dan menyempurnakan informasi tentang perkembangan ekonomi daerah serta potensi investasi daerah. RIRU Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur bahkan telah melakukan promosi investasi daerah masing-masing di luar negeri.

Di tataran global, upaya untuk menarik aliran masuk modal asing ke Indonesia dilakukan melalui pembentukan *Global Investor Relations Unit* (GIRU). Keberadaan GIRU direncanakan menjadi wadah koordinasi antara Kantor Perwakilan BI di luar negeri (KPwLN) dengan perwakilan Pemerintah melalui Kementrian dan Lembaga terkait, khususnya dengan Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal (KBRI/KJRI) dan *Indonesia Investment Promotion Centre* (IIPC) yang dikelola oleh BKPM. Mempertimbangkan lokasi geografis yang lebih dekat dengan investor luar negeri, GIRU diharapkan berperan sebagai perpanjangan tangan fungsi IRU Nasional dalam melakukan kegiatan hubungan investor antara lain melalui diseminasi perkembangan terkini ekonomi Indonesia.

Sinergi IRU, RIRU, dan GIRU dilakukan untuk memperkuat pengelolaan persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sinergi tersebut antara lain diwujudkan dalam kegiatan *investor summit* yang diselenggarakan oleh KBRI/KJRI untuk mempertemukan permintaan dan penawaran investasi, khususnya di sektor riil (Tabel 14.2). Pada forum tersebut, IRU berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan investor dengan potensi investasi di Indonesia. Sementara itu, GIRU berperan mempromosikan perkembangan ekonomi nasional dan RIRU mempromosikan perkembangan dan potensi ekonomi daerah.

Tabel 14.2. Sinergi IRU-RIRU-GIRU

Acara	Penyelenggara	Fokus Promosi investasi
Indonesia Festival 2016 di Ottawa & Montreal, Kanada, 22 – 25 Mei 2016	KBRI Ottawa	Perdagangan, Investasi dan Pariwisata
Business Forum di Calgary, Kanada, 23-24 November 2016	KJRI Vancouver dan Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Kanada	Sektor Energi dan Infrastruktur

Koordinasi untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah

Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) memperkuat koordinasi dengan pemangku kebijakan di daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. Koordinasi pengembangan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan mendukung pemerataan ekonomi antar daerah. Selain itu, koordinasi pengembangan ekonomi daerah diarahkan untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia. Hal ini mengingat perbedaan karakteristik antara satu daerah dengan daerah lainnya sehingga aspek dinamika spasial menjadi perhatian dalam proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia. Penguatan peran Bank Indonesia untuk turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi daerah ditegaskan dalam pengaturan internal dan tetap berada dalam koridor kerangka tugas dan wewenang yang dimiliki Bank Indonesia. Komitmen terhadap penguatan peran Bank Indonesia di daerah ini ditunjukan antara lain melalui pengembangan jaringan KPwDN di seluruh provinsi di Indonesia.

Koordinasi dengan pemangku kebijakan di daerah dalam rangka pengembangan ekonomi daerah diwujudkan dalam berbagai program kegiatan terutama terkait dengan perencanaan pembangunan. Bank Indonesia di berbagai daerah secara aktif berkontribusi dalam pembahasan dan perumusan asumsi ekonomi makro yang merupakan bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (RAPBD). Di beberapa daerah, seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan beberapa daerah lainnya, Bank Indonesia juga terlibat langsung sebagai narasumber dalam diskusi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Koordinasi dengan pemangku kebijakan daerah juga dilakukan dalam konteks pengembangan potensi ekonomi daerah dan UMKM. Salah satunya adalah inisiatif yang dilakukan oleh KPwDN Provinsi Maluku Utara dalam mendorong kerja sama lintas pulau bertajuk SE-HaTTI, akronim dari Segitiga Emas dan nama Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kerja sama tersebut (Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan). Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga mendorong perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga daerah ini juga melakukan promosi wisata bersama dengan membuat paket tur sejarah dan budaya di Ternate, Tidore, dan Jailolo.

Bank Indonesia turut mempromosikan obyek wisata dan kekayaan budaya ketiga daerah tersebut melalui Festival Kreasi dan Inovasi Anak Negeri pada November 2016. KPwDN Provinsi Papua bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jayapura dalam mendorong peningkatan produktivitas usaha komoditas ikan cakalang dan ikan ekor kuning melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan dan pembukuan sederhana kepada sejumlah kelompok nelayan.

Koordinasi terkait Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Momentum pemulihan ekonomi juga perlu didukung dengan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang optimal, andal, aman, dan efisien. Kondisi tersebut dapat terwujud melalui sinergi koordinasi antara Kementerian dan Lembaga, serta otoritas terkait. Di bidang sistem pembayaran, beberapa program utama mencakup koordinasi terkait keuangan inklusif serta Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA). Selain itu, kerjasama juga diperkuat dalam fora internasional, baik dengan bank sentral maupun lembaga internasional. Sementara di bidang pengelolaan uang rupiah, koordinasi difokuskan pada kegiatan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan uang rupiah, kegiatan pemusnahan, serta distribusi uang rupiah ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Koordinasi dalam kerangka pengembangan keuangan inklusif diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap layanan keuangan dapat mengurangi kerentanan dan merupakan alat untuk membangun aset serta kemampuan ekonomi, yang pada akhirnya dapat membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan. Tersedianya akses terhadap layanan keuangan dasar merupakan hal penting yang dapat membuka partisipasi yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah, untuk menerima manfaat lebih besar dari pembangunan nasional. Pada 2016, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendorong penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara nontunai melalui Layanan Keuangan Digital. Selain lebih tepat sasaran dan efisien, penyaluran bantuan sosial secara nontunai juga bermanfaat dalam mengedukasi dan meningkatkan akses keuangan masyarakat.

Dalam kaitan pengembangan akses keuangan tersebut, pemerintah meluncurkan dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada 2012 dalam rangkaian kegiatan *the 1st ASEAN Conference on Financial Inclusion*. Dokumen tersebut menjadi embrio bagi ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang kemudian secara resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada 18 November 2016. Implementasi SNKI secara terpadu diarahkan untuk mendorong penetrasi sektor keuangan guna memenuhi target persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal hingga mencapai 75% pada 2019. Pencapaian target tersebut akan ditempuh melalui sejumlah kebijakan keuangan inklusif yang didukung oleh regulasi, infrastruktur dan organisasi yang efektif. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif guna memperkuat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI, mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI.[15]

Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Koordinasi dengan aparat penegak hukum difokuskan pada empat aspek yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.[16] Pertama, penanganan dugaan tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).[17] Kedua, penanganan dugaan pelanggaran kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI dan dugaan tindak pidana terhadap rupiah.[18] Ketiga, pelaksanaan pengamanan Bank Indonesia dan pengawalan barang berharga milik negara.[19] Keempat, pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan yang melakukan kegiatan usaha kawal angkut uang dan

15 Dewan Nasional Keuangan Inklusif dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua dan Wakil Presiden RI sebagai Wakil Ketua. Menko Bidang Perekonomian bertindak sebagai Ketua Harian bersama dengan Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua Harian I dan Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Wakil Ketua Harian II.

16 Nota Kesepahaman (NK) tentang Kerja Sama dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kapolri pada 1 September 2014. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan penandatangan Pokok-Pokok Kesepahaman (PPK) oleh 29 Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN) dengan Kepolisian Daerah setempat.

17 Perjanjian Kerja Sama Bank Indonesia dengan Kabareskrim pada 24 September 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing.

18 Perjanjian Kerja Sama Bank Indonesia dengan Kabareskrim pada 20 November 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah.

19 Perjanjian Kerja Sama Bank Indonesia dengan Kakor Brimob pada 23 Februari 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Bank Indonesia dan Pengawalan Barang Berharga Milik Negara.

pengolahan uang rupiah.[20] Pada 2016, beberapa kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia dan Polri, baik di tingkat pusat dan daerah, antara lain pelaksanaan forum koordinasi dalam rangka menanggulangi KUPVA tidak berizin, forum diskusi mengenai *fraud* kartu kredit, sosialisasi terkait ketentuan dan penanganan sistem pembayaran ilegal, serta penyediaan tenaga ahli dalam pengusutan kasus-kasus terkait sistem pembayaran.

Bank Indonesia juga melaksanakan kerja sama di bidang sistem pembayaran dalam fora internasional. Dalam lingkup ASEAN, Bank Indonesia menjadi wakil ketua dalam *Working Committee on Payment and Settlement System* (WCPSS) dan *Working Committee on Financial Inclusion* (WC-FINC). Pada 2016, kegiatan WCPSS difokuskan untuk menindaklanjuti rencana yang telah ditetapkan dalam *Strategic Action Plan* (SAP) 2016-2025. Dalam upaya untuk melihat potensi *interlinkage* infrastruktur sistem pembayaran antarnegara, WCPSS melakukan survei pemetaan kondisi infrastruktur sistem pembayaran di ASEAN. WCPSS juga memberikan perhatian pada kebutuhan pekerja migran di negara ASEAN untuk melakukan remitansi secara lebih efektif dan efisien. Pada 2016, WC-FINC telah menyusun ASEAN *Digital Financial Inclusion* (DFI) *Framework* yang bertujuan untuk mempromosikan DFI melalui penyediaan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat luas. *Framework* tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap *digital trade* dan penggunaan *electronic payment* serta perlindungan konsumen *online*.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran uang rupiah palsu, Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dengan seluruh penegak hukum, terutama unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal).[21] Beberapa aspek koordinasi yang dilakukan antara lain terkait tukar menukar informasi, termasuk mengenai peningkatan unsur pengaman uang rupiah kertas, regulasi terkait pengadaan bahan baku dan mesin cetak uang untuk mendukung pengawasan yang lebih baik dan tepat, serta daftar pelaku kejahatan uang palsu secara nasional. Di samping itu, Bank Indonesia berperan untuk bertindak dalam pemberian keterangan ahli pada kasus tindak pidana pemalsuan uang rupiah, termasuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti uang rupiah yang diduga palsu atas permintaan Kepolisian. Dukungan Bank Indonesia terhadap upaya represif penegak hukum tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku kejahatan pemalsuan uang rupiah.

Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan transportasi perintis guna mendukung kelancaran distribusi uang. Pada 2016, Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI-AL dan Polisi Air untuk melaksanakan Kas Keliling di 39 pulau-pulau terdepan dan terluar Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan kerja sama dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk dukungan moda transportasi kereta api dan kapal penumpang yang terjadwal. Dalam mengamankan kegiatan distribusi uang, Bank Indonesia menjalin kerja sama pengamanan dan pengawalan dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Kemenkeu terkait kegiatan pemusnahan uang rupiah. Hal tersebut merupakan amanat UU Mata Uang yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah terkait koordinasi dalam hal perencanaan dan pencetakan, serta pemusnahan uang rupiah.[22] Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah penyampaian informasi mengenai jumlah uang rupiah yang dimusnahkan secara triwulanan. Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mengumumkan kepada publik mengenai jumlah pemusnahan uang rupiah yang telah dilakukan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam penerbitan uang rupiah Tahun Emisi (TE) 2016, Bank Indonesia berkoordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait. Koordinasi dilakukan antara lain dalam hal pemilihan gambar pahlawan nasional dan/atau presiden sebagai gambar utama dalam 11 (sebelas) uang rupiah TE 2016. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Mata Uang bahwa uang rupiah harus memuat gambar pahlawan nasional dan/atau presiden yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Presiden. Terkait hal ini, koordinasi dilakukan untuk penelusuran, kunjungan dan permohonan ijin kepada ahli waris terkait pencantuman gambar ke-11 pahlawan nasional pada uang rupiah TE 2016. Selanjutnya, hasil koordinasi ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Uang Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20 Perjanjian Kerja Sama Bank Indonesia dengan Kabaharkam pada 26 Februari 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan yang Melakukan Kegiatan Usaha Kawal Angkut Uang dan Pengolahan Uang Rupiah.

21 Sesuai dengan Pasal 28 UU Mata Uang, unsur Botasupal terdiri atas Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

22 Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan No.14/GBI/DPU//NK/MOU-5/MK.05/2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Uang Rupiah

Boks 14.1. Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Upaya pencegahan dan penanganan krisis memerlukan acuan dan landasan hukum yang kuat. Pengalaman di saat krisis menunjukkan bahwa penanganan krisis membutuhkan dana dan sumber daya yang besar. Biaya krisis atau *Fiscal Cost* Indonesia mencapai 57% terhadap PDB pada pada penanganan krisis perbankan tahun 1997 atau termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan negara *peer* (Grafik 1). Pangsa hutang Indonesia terhadap PDB pada masa krisis 2008 juga cukup tinggi sebesar 68% terhadap PDB (Grafik 2).[1] Selain itu, masalah terkait kepastian hukum merupakan tantangan utama bagi penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan di masa krisis. Dalam kondisi tersebut, koordinasi antar institusi memegang peranan penting terutama untuk mencegah berlanjutnya tekanan di sistem keuangan hingga memicu terjadinya krisis. Untuk itu, diperlukan dukungan payung hukum yang kuat dalam pencegahan dan penanganan krisis.

Setelah melalui berbagai rangkaian pembahasan yang panjang, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) ditetapkan pada 15 April 2016. Pengesahan UU PPKSK tersebut merupakan sebuah pencapaian yang sangat penting dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. UU PPKSK memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bagi upaya pencegahan dan penanganan krisis keuangan. UU PPKSK memperkuat fungsi dan peranan dari masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait sehingga tata kelola dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan semakin baik.

Grafik 1. Biaya Krisis: *Fiscal Cost*

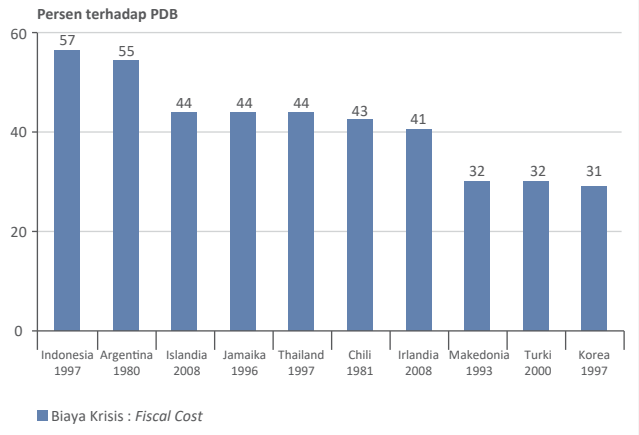

Sumber: IMF Working Paper, 2012

Grafik 2. Biaya Krisis: Peningkatan Utang

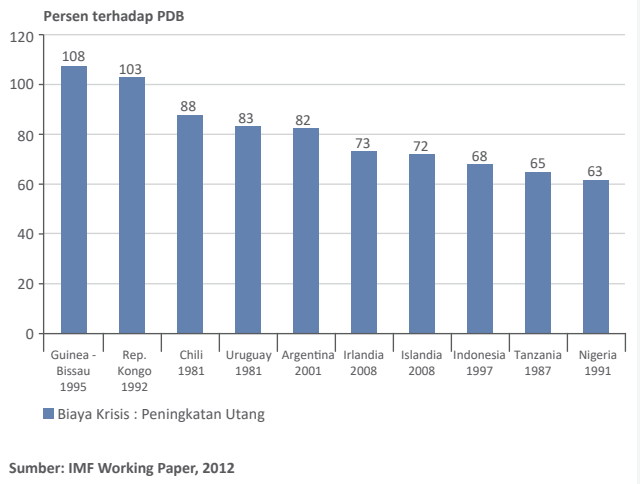

Sumber: IMF Working Paper, 2012

Secara umum, UU PPKSK mengamanatkan tiga hal utama. Pertama, koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang mencakup bidang fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan, serta resolusi bank. Kedua, penanganan krisis sistem keuangan. Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia memegang peranan penting dalam memutuskan kondisi krisis SSK, termasuk langkah penanganan yang diperlukan. Ketiga, penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Metode penanganan permasalahan bank dalam UU PPKSK mengedepankan konsep *bail-in*, yaitu penanganan permasalahan menggunakan sumber daya bank itu sendiri, sejalan dengan praktik internasional berdasarkan rekomendasi Financial Stability Board (FSB)

UU PPKSK mengamanatkan pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.[2] KSSK beranggotakan Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara, Ketua Dewan OJK sebagai anggota dengan hak suara, dan LPS sebagai anggota

1 Laeven dan Valenci, "*Systemic Banking Crisis Database: An Update*", IMF Working Paper, 2012

2 Sebelumnya dikenal sebagai Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)

Diagram 1. Struktur KSSK

Sumber: Bank Indonesia

tanpa hak suara. Keempat lembaga ini bertanggung jawab untuk menjaga SSK di Indonesia serta melakukan penanganan terhadap permasalahan bank sistemik. KSSK menyelenggarakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan anggota KSSK. Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan asesmen kondisi SSK termasuk langkah-langkah yang diperlukan. Pengambilan keputusan di dalam KSSK dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, usulan keputusan yang diajukan anggota KSSK dinyatakan ditolak namun dapat diajukan kembali dalam rapat KSSK. Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan suara terbanyak apabila rapat KSSK kembali tidak mencapai mufakat.

KSSK memiki kewenangan yang antara lain untuk melakukan penilaian terhadap kondisi SSK berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK. Selanjutnya, KSSK merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memutuskan perubahan status SSK, dari normal menjadi krisis atau dari krisis menjadi normal. KSSK juga berperan dalam menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada LPS, termasuk langkah yang dilakukan anggota KSSK untuk mendukung penanganan permasalahan bank sistemik oleh LPS. Selain itu, KSSK menetapkan keputusan pembelian SBN yang dimiliki LPS oleh Bank Indonesia atas SBN untuk kepentingan penanganan permasalahan bank.

Dalam pelaksanaannya, setiap anggota KSSK memiliki peran masing-masing sebagaimana amanat UU PPKSK. Setiap anggota KSSK melakukan pertukaran data dan informasi antar anggota. Data dan informasi tersebut kemudian menjadi acuan dalam pembahasan kondisi sistem keuangan pada Rapat KSSK. Kemenkeu berperan sebagai koordinator KSSK dan melakukan pemantauan risiko sektor fiskal. Sementara itu, selain berwenang untuk menetapkan bank sistemik, OJK juga melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank dalam pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) oleh Bank Indonesia. Dalam hal bank sistemik mengalami permasalahan solvabilitas, OJK akan berkoordinasi dengan LPS untuk tindak lanjut penanganannya. Terkait hal tersebut, LPS berperan dalam penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dengan beberapa metode yaitu mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank sistemik kepada bank penerima, mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank sistemik kepada bank perantara, dan melakukan penanganan Bank sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam pelaksanaan UU PPKSK tersebut, Bank Indonesia memiliki enam peran utama di dalam KSSK. Pertama, berperan dalam pengambilan keputusan di KSSK, baik dalam status SSK kondisi normal maupun status SSK kondisi krisis. Berdasarkan UU PPKSK, penetapan status krisis sistem keuangan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi KSSK. Kedua, koordinasi dalam pemantauan dan pemeliharaan SSK, terutama dalam mengidentifikasi potensi peningkatan risiko sistemik dan perumusan rekomendasi pencegahannya. Ketiga, koordinasi dengan OJK dalam penetapan bank sistemik. Keempat, terkait dengan pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan prinsip Syariah (PLJP/S). Kelima, pembelian SBN yang dimiliki LPS untuk penanganan permasalahan bank. Keenam, dukungan terhadap program restrukturisasi perbankan. Menindaklanjuti peran Bank Indonesia dalam UU PPKSK tersebut, Bank Indonesia juga telah memperkuat ketentuan internal Protokol Manajemen Krisis (PMK) dan menyusun sejumlah ketentuan turunan internal.

BAGIAN IV

TANTANGAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA

Keterangan gambar:
Salah satu tantangan utama dalam perekonomian Indonesia adalah kualitas infrastruktur. Jembatan merupakan elemen infrastruktur konektivitas yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata di Nusantara.

INFOGRAFIS BAGIAN IV

TANTANGAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA

TANTANGAN GLOBAL KE DEPAN

- Pertumbuhan ekonomi masih belum kuat
- Kebijakan perdagangan cenderung protektif
- Kebijakan yang meningkatkan pembalikan arus modal.
- Inflasi global cenderung meningkat.

TANTANGAN DOMESTIK KE DEPAN

Tantangan Domestik Jangka Pendek

- Kemampuan meningkatkan penerimaan pajak
- Penyelesaian proses konsolidasi korporasi dan perbankan
- Efektivitas transmisi kebijakan
- Risiko meningkatnya tekanan inflasi

Tantangan Domestik Jangka Menengah

- Memperbaiki komposisi produk ekspor
- Memperkuat peran sektor industri
- Mendorong persaingan pasar dan tata niaga yang lebih sehat
- Memperkuat struktur pembiayaan domestik

RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

PEMERINTAH | BANK INDONESIA | OTORITAS JASA KEUANGAN

FISKAL | MONETER | MAKRO PRUDENSIAL | MIKRO PRUDENSIAL | SP-PUR

STRUKTURAL

KOORDINASI DAN SINERGI

PROSPEK EKONOMI 2017

Pertumbuhan PDB	Inflasi	Defisit Transaksi Berjalan	Pertumbuhan Kredit	Pertumbuhan DPK
5,0-5,4%	4,0±1%	<2,5%	10-12%	9-11%

PROYEK JANGKA MENENGAH

- Defisit transaksi berjalan <2,5% dari PDB
- Inflasi diperkirakan di kisaran 3±1%
- Pertumbuhan lebih tinggi dan berkesinambungan

BAGIAN IV

Tantangan, Arah Kebijakan, dan Prospek Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia yang diperkirakan semakin solid tetap perlu terus dikelola dengan baik karena beberapa tantangan masih mengemuka dan dapat menurunkan prospek ekonomi ke depan. Tantangan bersumber dari risiko global dan domestik yang bila tidak segera dimitigasi, berisiko tidak hanya membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak sesuai perkiraan, namun juga bisa memberikan tekanan pada stabilitas perekonomian. Stabilitas yang terganggu bila terus berlanjut akan memberikan tekanan balik kepada pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah panjang.

Tantangan perekonomian dipicu empat risiko global yang saling berhubungan. Pertama, pemulihan pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global berisiko tidak sekuat perkiraan, yang kemudian dapat berdampak pada harga komoditas yang tidak setinggi proyeksi. Kedua, kebijakan perdagangan internasional di negara maju yang menjadi lebih protektif. Risiko kedua ini dapat kembali menurunkan volume perdagangan dunia, pertumbuhan ekonomi global, dan harga komoditas. Ketiga, kombinasi kebijakan makroekonomi AS terutama kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang lebih ketat yang dapat meningkatkan risiko pembalikan modal ke AS dan ketidakpastian pasar keuangan dunia. Keempat, inflasi global yang kembali naik bila harga komoditas dunia terus meningkat.

Tantangan perekonomian semakin perlu mendapat perhatian karena penyelesaian beberapa aspek domestik juga menjadi kunci percepatan pemulihan ekonomi. Pertama terkait dengan kemampuan meningkatkan penerimaan pajak sebagai basis untuk memperluas ruang stimulus fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua berhubungan dengan kecepatan penyelesaian proses konsolidasi korporasi dan perbankan. Ketiga tentang upaya memperkuat kembali efektivitas transmisi kebijakan moneter yang sebelumnya tersendat akibat konsolidasi perbankan dan korporasi. Terakhir mengenai upaya mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi yang berisiko meningkat.

Dalam jangka menengah panjang, tantangan perekonomian terkait dengan upaya memperkuat struktur perekonomian sehingga lebih berdaya tahan. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk menghindarkan Indonesia dari jebakan kelompok ekonomi berpendapatan menengah.

Tantangan berkaitan dengan upaya memperkuat struktur perekonomian dari sektor riil dan sektor keuangan. Tantangan struktural di sektor riil berhubungan dengan upaya untuk memperluas keragaman komposisi produk ekspor sehingga melengkapi peran ekspor produk sumber daya alam. Tantangan di sektor riil juga berhubungan dengan upaya meningkatkan peran industri pengolahan dalam perekonomian, dan memperkuat struktur pasar dan tata niaga sehingga lebih efisien. Tantangan di sektor keuangan berkenaan dengan upaya untuk memperkuat struktur pembiayaan domestik sehingga menjadi lebih beragam, meningkatkan struktur dana perbankan sehingga menjadi lebih seimbang, serta memperdalam pasar keuangan sehingga dapat mendukung pembiayaan ekonomi dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter.

Kebijakan makroekonomi pada 2017 diarahkan untuk memitigasi berbagai risiko dan dampaknya kepada perekonomian Indonesia. Arah kebijakan akan diimplementasikan melalui sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Sinergi kebijakan yang diimplementasikan melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, mikroprudensial, dan kebijakan struktural. Sinergi kebijakan ditujukan untuk memitigasi risiko siklikal jangka pendek guna tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Selain itu, sinergi kebijakan juga diarahkan untuk terus memperkuat struktur perekonomian sehingga semakin berdaya tahan dan berdaya saing.

Bank Indonesia pada tahun 2017 tetap akan konsisten menjaga stabilitas perekonomian, yang akan menjadi basis bagi percepatan pemulihan ekonomi. Dalam konteks ini, Bank Indonesia akan menempuh bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran-pengelolaan uang rupiah (SP-PUR). Kebijakan moneter difokuskan untuk memelihara stabilitas makroekonomi dan disinergikan

dengan kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah ditujukan untuk mendukung perbaikan struktural melalui peningkatan efisiensi transaksi dalam perekonomian sehingga dapat mendukung berjalannya transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia secara konsisten akan menempuh kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasaran dan menjaga defisit transaksi berjalan di tingkat yang sehat. Konsisten dengan arah kebijakan moneter, suku bunga kebijakan akan tetap diarahkan untuk menjaga inflasi sesuai dengan sasaran. Kebijakan nilai tukar tetap ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya. Arah kebijakan moneter juga akan ditopang dengan penguatan operasional kebijakan moneter, seperti implementasi sistem Giro Wajib Minimum (GWM) *Averaging* pada pertengahan 2017 dan mengoptimalkan penggunaan Surat Berharga Negara sebagai instrumen operasi moneter menggantikan Sertifikat Bank Indonesia secara bertahap.

Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan risiko sistemik yang rendah dan menopang efisiensi kegiatan ekonomi. Dalam kaitan ini, kebijakan makroprudensial tetap diarahkan untuk memitigasi akumulasi risiko yang muncul dari perilaku prosiklikalitas dan risiko sistemik dalam sistem keuangan. Bank Indonesia juga menempuh sejumlah inisiatif guna mengakselerasi pendalaman pasar keuangan untuk mendukung stabilitas sekaligus ketahanan sistem keuangan. Dalam arah kebijakan ini, Bank Indonesia akan terus melakukan pengembangan pasar keuangan melalui pendekatan ekosistem. Bank Indonesia juga mendukung akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pelengkap keuangan konvensional. Dari kebijakan sistem pembayaran, kebijakan difokuskan pada penguatan kelembagaan dan infrastruktur, serta mendorong inklusi keuangan.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2017 juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah dan OJK guna memperkuat efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pemulihan ekonomi. Sinergi tersebut termasuk koordinasi dengan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi sesuai target. Bank Indonesia juga terus mendukung berbagai upaya Pemerintah untuk memperkuat prospek kesinambungan fiskal yang diyakini akan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain itu, Bank Indonesia juga mendukung berbagai upaya Pemerintah untuk mempercepat dan menajamkan berbagai kebijakan struktural yang diyakini juga akan berkontribusi signifikan dalam mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi ke depan.

Konsistensi kebijakan dalam merespons berbagai tantangan diharapkan dapat terus menopang perbaikan ekonomi Indonesia pada 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 diproyeksikan meningkat dalam kisaran 5,0-5,4%. Pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang oleh permintaan domestik, yakni konsumsi dan investasi, meskipun kinerja ekspor diperkirakan mulai membaik. Konsumsi swasta diperkirakan masih kuat ditopang oleh keyakinan rumah tangga yang tetap baik dan peningkatan kelas menengah. Investasi juga meningkat dipengaruhi oleh berlanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah dan mulai bergulirnya investasi swasta sejalan dampak positif peningkatan harga komoditas. Sementara itu, ekspor diperkirakan juga meningkat didorong oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi dunia dan harga komoditas global.

Stabilitas ekonomi diperkirakan juga tetap terkendali dan diikuti dengan intermediasi perbankan yang membaik. Inflasi 2017 diprakirakan meningkat, tetapi masih mampu dikelola dalam kisaran sasarannya sebesar 4,0±1%. Peningkatan inflasi 2017 terutama didorong oleh dampak kenaikan harga energi serta pengaruh kenaikan inflasi kelompok *administered*, sedangkan inflasi inti masih terkendali. Stabilitas ekonomi yang terkendali juga diikuti oleh defisit transaksi berjalan yang diperkirakan masih tetap sehat di bawah level 2,5% dari PDB. Sementara dari intermediasi perbankan, prospek pertumbuhan ekonomi yang naik, risiko kredit yang menurun, serta suku bunga kredit yang masih berpotensi menurun bisa meningkatkan penyaluran kredit perbankan pada 2017 dalam kisaran

10-12%. Kenaikan pertumbuhan kredit bisa memberikan dampak pengganda bagi dana pihak ketiga yang pada 2017 diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 9-11%.

Prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka menengah diperkirakan terus berlanjut. Perkiraan didukung dampak positif reformasi struktural yang ditempuh oleh Pemerintah, termasuk berbagai perbaikan infrastruktur. Reformasi struktural akan menjadi pijakan bagi penguatan struktur ekonomi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian dan akhirnya daya saing perekonomian. Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi oleh Pemerintah diharapkan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Selain itu, konsumsi rumah tangga semakin meningkat seiring semakin kuatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah kelas menengah. Konektivitas antar wilayah juga akan semakin baik, yang tidak hanya memperkuat struktur produksi dan distribusi, tetapi juga menurunkan biaya produksi. Berbagai perbaikan diharapkan memperkuat stabilitas ekonomi, termasuk inflasi yang diperkirakan berada dalam kisaran 3,0±1% pada tahun 2021.

BAB 15
Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan

Perekonomian Indonesia pada 2016 yang tetap berdaya tahan menjadi pijakan positif bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi ke depan. Namun, beberapa risiko dari global dan domestik baik berdimensi jangka pendek maupun jangka menengah panjang, dapat memberikan tantangan bagi upaya mengelola prospek perekonomian. Arah kebijakan makroekonomi pada 2017 difokuskan untuk memitigasi risiko tersebut sehingga stabilitas makroekonomi tetap terkendali, proses pemulihan ekonomi dapat terus berlangsung, dan penguatan struktur ekonomi jangka menengah panjang dapat terus berjalan. Kebijakan diimplementasikan dalam satu sinergi kebijakan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Keterangan gambar:
Setiap upaya meraih kemajuan niscaya akan menghadapi tantangan. Perekonomian Indonesia membutuhkan strategi dan respons kebijakan yang tepat untuk memitigasi berbagai risiko yang muncul dari lingkungan global maupun domestik.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2016 yang tetap berdaya tahan menjadi pijakan positif bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi ke depan. Selain aspek siklikal global dan domestik yang diperkirakan membaik pada tahun 2017, stabilitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan (SSK) yang tetap terjaga menjadi dukungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi juga semakin besar karena sinergi kebijakan antar otoritas semakin solid. Selain itu, potensi keberlanjutan kepercayaan pelaku ekonomi korporasi dan perbankan yang mulai meningkat pada triwulan IV 2016, diharapkan juga mendukung prospek pemulihan ekonomi nasional.

Namun, beberapa risiko dari global dan domestik yang masih dapat mengemuka bisa memberikan tantangan bagi upaya mengelola prospek perbaikan perekonomian tersebut. Risiko tidak hanya dapat membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak sesuai perkiraan, namun juga bisa memberikan tekanan kepada stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Inflasi bisa meningkat, nilai tukar rupiah rentan tertekan, dan stabilitas sistem keuangan bisa terganggu. Stabilitas perekonomian dan sistem keuangan yang terganggu pada gilirannya dapat kembali meningkatkan risiko pada pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah panjang.

Dari global, risiko bersumber dari empat hal yang bila tidak direspons dengan tepat dapat mempengaruhi perekonomian domestik. Risiko pertama terkait dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global yang bisa saja kembali tidak sekuat harapan seperti tahun 2016, yang kemudian berisiko membuat harga komoditas juga tidak setinggi perkiraan. Risiko kedua berhubungan dengan kebijakan perdagangan internasional di negara maju yang menjadi lebih protektif dan diikuti kebijakan politik yang populis. Risiko ketiga berkenaan dengan arah kebijakan makroekonomi AS seperti kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang ketat, yang berisiko memicu pembalikan modal AS dari negara berkembang dan meningkatkan kenaikan ketidakpastian pasar keuangan dunia. Risiko terakhir tentang inflasi global yang dapat kembali meningkat, terutama bila harga komoditas dunia, termasuk harga energi, terus meningkat.

Dari domestik, risiko yang sekaligus menjadi tantangan berdimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, tantangan berkaitan dengan empat hal. Pertama berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak sebagai pra-kondisi dalam mendukung peningkatan ruang fiskal secara sehat dan kesinambungan. Kedua berhubungan dengan kecepatan penyelesaian proses konsolidasi korporasi dan perbankan. Ketiga tentang upaya untuk terus memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Terakhir ialah mengenai risiko inflasi yang dapat saja meningkat dipicu kenaikan inflasi kelompok barang *administered* strategis. Dalam jangka menengah panjang, tantangan perekonomian terkait dengan konsistensi untuk terus memperkuat struktur perekonomian sehingga menjadi lebih berdaya tahan dan sekaligus menghindarkan Indonesia dari perangkap negara berpendapatan menengah *(middle income trap)*. (Lihat Boks 15.1)

Arah kebijakan makroekonomi 2017 difokuskan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna menjaga berlanjutnya pemulihan ekonomi. Dalam kaitan ini, kebijakan diarahkan untuk memitigasi risiko siklikal jangka pendek sehingga momentum pemulihan ekonomi dan penguatan stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara dengan terus memperkuat struktur perekonomian agar lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut maka sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus diperkuat melalui bauran kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan makro-mikroprudensial, dan kebijakan reformasi struktural.

Sejalan dengan arah kebijakan makroekonomi, Bank Indonesia tetap konsisten untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran-pengelolaan uang rupiah. Fokus kebijakan moneter secara konsisten ditujukan untuk mengendalikan inflasi sesuai sasaran dan menjaga defisit transaksi berjalan di tingkat yang sehat. Kebijakan moneter juga didukung kebijakan nilai tukar yang sesuai dengan nilai fundamental serta penguatan kebijakan operasional moneter. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong pendalaman pasar keuangan melalui sejumlah pendekatan guna mendukung stabilitas dan ketahanan sistem keuangan, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kebijakan makroprudensial difokuskan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan risiko sistemik yang rendah, serta tetap memberi ruang bagi upaya pemulihan ekonomi. Kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada penguatan kelembagaan dan infrastruktur, serta mendorong keuangan inklusi. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi dan komunikasi kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat memperkuat efektivitas kebijakan yang ditempuh.

15.1. TANTANGAN PEREKONOMIAN

Risiko Perekonomian Global

Prospek perekonomian nasional 2017 yang diperkirakan membaik dipengaruhi asumsi perekonomian global berada dalam siklus yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan terus membaik ditopang kemajuan proses konsolidasi ekonomi yang ditempuh banyak negara maju. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia selanjutnya diasumsikan akan mendorong kenaikan harga komoditas, termasuk harga komoditas ekspor utama Indonesia. Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan global juga diasumsikan mereda sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi global.

Namun, prospek perekonomian global berisiko tidak sesuai harapan sehingga dapat menurunkan prospek perekonomian Indonesia. Empat risiko perlu mendapat perhatian dari perekonomian global karena bisa mengganggu pemulihan ekonomi Indonesia. Risiko global tersebut meliputi: (i) perkiraan pemulihan ekonomi dan volume perdagangan dunia yang tidak sesuai harapan yang kemudian berdampak pada tertahannya prospek kenaikan harga komoditas, (ii) penerapan kebijakan perdagangan internasional negara lebih protektif di negara maju, yang kemudian dapat kembali menekan pertumbuhan ekonomi global menjadi lebih rendah dari perkiraan, (iii) pembalikan modal dari negara berkembang akibat peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global yang dipengaruhi risiko respons kebijakan AS melalui kebijakan fiskal yang ekspansif yang kemudian diseimbangkan dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, serta risiko geopolitik di banyak negara, dan (iv) kenaikan inflasi global yang didorong pergerakan kenaikan harga komoditas global baik harga minyak dunia maupun harga komoditas nonmigas.

Risiko pertama dari sisi global terkait dengan potensi tertahannya pertumbuhan ekonomi global akibat belum selesainya proses konsolidasi ekonomi di negara maju, termasuk Tiongkok. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global yang lebih lambat dari perkirakan akan berdampak pada penurunan volume perdagangan global yang pada akhirnya membuat harga komoditas tidak setinggi perkiraan sebelumnya.

Risiko kedua berhubungan dengan penerapan kebijakan perdagangan internasional yang diadopsi AS dan sejumlah negara maju yang lebih protektif serta risiko kebijakan politik yang lebih populis. Pada tahap awal, arah kebijakan tersebut berpeluang menurunkan volume perdagangan dunia dan selanjutnya melebar kepada penurunan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas. Isu proteksionisme perdagangan dan kebijakan populis kemudian bisa juga meluas kepada peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Risiko global ketiga berkenaan dengan risiko pembalikan modal dari negara berkembang ke AS dipicu arah kebijakan makroekonomi yang ditempuh AS. Risiko pembalikan modal dipicu arah kebijakan ekspansi fiskal AS guna mendorong pertumbuhan ekonomi AS. Risiko pembalikan modal semakin meningkat saat kenaikan pertumbuhan ekonomi yang kemudian meningkatkan tekanan inflasi AS kemudian direspons oleh The Fed dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif. Risiko pembalikan modal ini bila terjadi bersamaan dengan risiko geopolitik di sejumlah negara dapat semakin meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global.

Risiko terakhir dipengaruhi tendensi peningkatan inflasi global yang didorong kenaikan harga komoditas global, baik harga energi maupun harga non-energi. Risiko kenaikan inflasi global tersebut perlu mendapat perhatian karena akan meningkatkan tekanan inflasi domestik dan mempengaruhi variabel-variabel ekonomi lainnya.

Tantangan Perekonomian Domestik

Dari domestik, risiko yang mengemuka sekaligus akan menjadi tantangan bagi pengendalian prospek perekonomian. Tantangan perekonomian domestik berdimensi waktu jangka pendek dan jangka menengah panjang. Dalam jangka pendek, tantangan terkait upaya meningkatkan penerimaan pajak, kecepatan penyelesaian proses konsolidasi korporasi dan perbankan, peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan risiko yang dapat meningkatkan tekanan inflasi. Dalam jangka menengah panjang, tantangan perekonomian terkait upaya membenahi permasalahan struktural agar ekonomi Indonesia menjadi lebih berdaya tahan. Beberapa tantangan jangka menengah panjang berkaitan dengan upaya memperkuat berbagai elemen pendukung kesinambungan pembangunan ekonomi.

Tantangan pertama perekonomian domestik dalam jangka pendek berkaitan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak sebagai basis memperluas ruang stimulus fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk terus meningkatkan pajak sangat penting karena dapat membuka ruang fiskal lebih besar, tanpa mengganggu prospek ketahanan fiskal. Perkembangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB belum banyak berubah yakni di sekitar

11%, masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian di negara kawasan. Program Amnesti Pajak yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2016 dapat menjadi langkah awal reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut.

Tantangan kedua berhubungan dengan kecepatan penyelesaian proses konsolidasi korporasi dan perbankan. Tantangan ini juga dipengaruhi kapasitas fiskal dalam memberikan stimulus pada perekonomian. Perkembangan terakhir pada triwulan IV 2016 mengindikasikan adanya perbaikan kinerja di investasi swasta, khususnya investasi nonbangunan. Kondisi ini cukup menggembirakan karena dapat mencerminkan mulai membaiknya keyakinan korporasi untuk melakukan ekspansi usaha. Pada triwulan IV 2016, keyakinan perbankan terindikasi juga membaik tercermin pada pertumbuhan kredit yang lebih baik. Perkembangan positif pada korporasi dan perbankan ini diharapkan terus berlanjut pada 2017 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Tantangan ketiga berkenaan dengan upaya memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, yang pada tahun 2016 belum kuat akibat proses konsolidasi di perbankan dan korporasi. Transmisi kebijakan moneter yang belum optimal pada tahun 2016 terlihat baik melalui jalur suku bunga maupun jalur kredit. Perkembangan yang tidak menguntungkan tersebut tidak terlepas dari pengaruh risiko kredit yang sedikit meningkat sehingga menahan pertumbuhan kredit dari sisi permintaan dan penawaran. Penurunan suku bunga kredit juga tidak sebesar penurunan suku bunga kebijakan.

Pada tahun 2017, efektivitas transmisi kebijakan moneter diharapkan kembali meningkat sejalan dengan proses konsolidasi korporasi dan perbankan yang semakin berkurang. Di satu sisi, perbankan diharapkan mulai menyalurkan kredit dan menurunkan suku bunga sejalan tren pelonggaran kebijakan moneter yang sebelumnya ditempuh Bank Indonesia pada tahun 2016. Di sisi lain, korporasi diharapkan pula mulai meningkatkan permintaan kredit sejalan dengan prospek ekonomi yang lebih baik.

Tantangan terakhir dipengaruhi risiko kenaikan inflasi dipicu kenaikan harga barang kelompok *administered* strategis. Risiko kenaikan barang *administered* berkaitan dengan prospek berlanjutnya peningkatan harga komoditas global, termasuk harga energi. Risiko ini pada tahap awal dapat berdampak langsung pada kenaikan harga kelompok *administered* strategis, seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Pada tahap berikutnya, dampak kenaikan inflasi dari *administered* perlu mendapat perhatian karena dapat merambat ke inflasi *volatile food* dan inflasi inti.

Dalam jangka menengah panjang, tantangan berkaitan dengan upaya memperkuat struktur perekonomian dari sektor riil dan sektor keuangan. Tantangan struktural di sektor riil berhubungan dengan upaya untuk memperluas keragaman komposisi produk ekspor sehingga melengkapi peran ekspor produk sumber daya alam. Tantangan di sektor riil juga berhubungan dengan upaya meningkatkan peran industri pengolahan dalam perekonomian, dan memperkuat struktur pasar dan tata niaga sehingga lebih efisien. Tantangan di sektor keuangan berkenaan dengan upaya untuk memperkuat struktur pembiayaan domestik sehingga menjadi lebih beragam, meningkatkan struktur dana perbankan sehingga menjadi lebih seimbang, serta memperdalam pasar keuangan sehingga dapat mendukung pembiayaan ekonomi dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter.

Tantangan struktural sektor riil untuk meningkatkan keragaman komposisi produk ekspor dipengaruhi kondisi saat ini yang masih perlu terus diperkuat. Dalam hal ini, komposisi produk ekspor yang mayoritas berupa produk sumber daya alam perlu diperluas agar menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi. Analisis Bank Indonesia menunjukkan keragaman ekspor Indonesia sejak tahun 2004 semakin terkonsentrasi pada produk sumber daya alam (Grafik 15.1). Tantangan sektor riil kedua berhubungan dengan upaya untuk lebih cepat memperkuat peran sektor industri sebagai basis peningkatan nilai tambah perekonomian. Penguatan sektor industri semakin mendesak dilakukan karena mempertimbangkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB yang berada dalam tren menurun (Grafik 15.2). Selain rekomposisi produk ekspor dan penguatan sektor industri, tantangan di sektor

Grafik 15.1. Keragaman Barang Ekspor – Impor

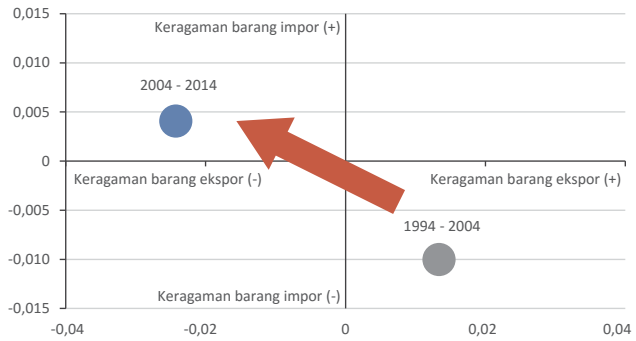

Sumber: UN Comtrade, diolah

Grafik 15.2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDB dan Pertumbuhan Industri Pengolahan

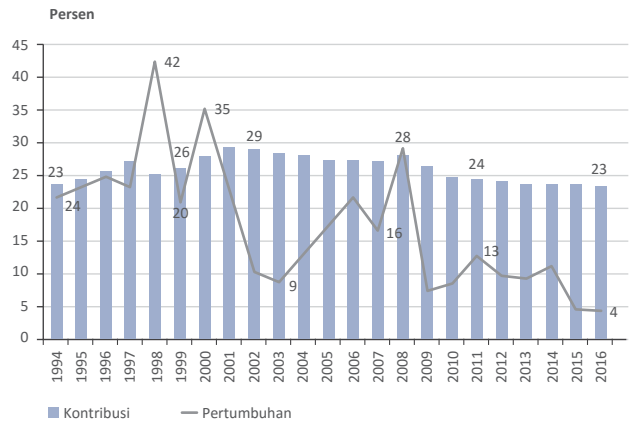

Sumber: BPS, diolah

riil yang juga perlu mendapat perhatian ialah upaya untuk menciptakan dan mendorong persaingan pasar dan tata niaga yang lebih sehat, termasuk pada struktur pasar dan tata niaga pada komoditas makanan pokok.

Pada sektor keuangan, tantangan berkaitan dengan upaya untuk memperkuat struktur pembiayaan domestik agar dapat secara optimal menopang pembiayaan ekonomi. Sejauh ini peluang untuk memperbesar peran sumber pembiayaan dari domestik masih sangat lebar. Selama ini, peran dana asing, khususnya dana asing jangka pendek, masih cukup besar menutupi kesenjangan sumber pembiayaan dari domestik. Meskipun keberadaan dana asing dapat menjembatani kesenjangan pembiayaan ekonomi tersebut, porsi dana asing jangka pendek yang besar bisa menimbulkan kompleksitas lain terkait pengendalian nilai tukar dan inflasi, termasuk membuat ekonomi menjadi rentan saat terjadi ketidakpastian global.

Pembenahan struktur ekonomi di sektor keuangan juga terkait dengan ketimpangan komposisi pendanaan dan penyaluran kredit di industri perbankan. Dari sisi pendanaan, ketimpangan diakibatkan komposisi dana jangka pendek yang cukup besar berasal dari dana deposan besar. Kondisi ini mengakibatkan biaya dana perbankan menjadi tidak murah karena sumber dana menjadi sensitif terhadap perubahan suku bunga. Komposisi dana yang tidak seimbang pada gilirannya mengakibatkan kemampuan perbankan memberikan kredit menjadi tidak optimal.

Tantangan lain di sektor keuangan juga berkaitan dengan komposisi pembiayaan di pasar keuangan domestik yang belum seimbang. Pembiayaan ekonomi saat ini masih banyak bergantung pada kredit perbankan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain, seperti pasar saham dan obligasi. Selain itu, pasar keuangan juga belum cukup dalam, antara lain akibat masih terbatasnya keragaman jenis instrumen pasar dan sempitnya basis investor domestik. Kondisi ini berisiko meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik saat terjadi fluktuasi harga di pasar keuangan, meskipun sumber gejolak yang terjadi tidak begitu besar.

15.2. ARAH KEBIJAKAN 2017

Sebagai respons atas berbagai tantangan tersebut, arah kebijakan makroekonomi pada tahun 2017 perlu difokuskan kepada upaya memelihara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sehingga dapat menjaga berlanjutnya pemulihan ekonomi. Arah kebijakan ditempuh mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian jangka pendek yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kemudian bisa menghambat proses pemulihan ekonomi. Upaya menjaga stabilitas mekroekonomi cukup penting karena stabilitas perekonomian menjadi pijakan bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat bersamaan, kebijakan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan upaya memperkuat struktur perekonomian dalam jangka menengah juga akan terus ditempuh.

Arah kebijakan makroekonomi juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan agar dapat menopang upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi yang inklusif perlu terus dikedepankan karena dapat menjadi jembatan bagi upaya mendistribusikan pendapatan secara lebih merata, memperluas akses memperoleh kebutuhan dasar, serta memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Implementasi arah kebijakan ditempuh melalui sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan melalui bauran kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan mikroprudensial, dan kebijakan struktural. Berbagai kebijakan yang ditempuh tidak hanya ditujukan untuk memitigasi risiko siklikal jangka pendek untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sinergi kebijakan juga diarahkan untuk terus memperkuat struktur perekonomian sehingga semakin berdaya tahan dan berdaya saing.

Arah Kebijakan Bank Indonesia

Searah dengan fokus kebijakan makroekonomi, Bank Indonesia pada tahun 2017 tetap konsisten menjaga stabilitas perekonomian. Dalam konteks ini, Bank Indonesia akan menempuh bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran-pengelolaan uang rupiah. Kebijakan moneter difokuskan untuk memelihara stabilitas makroekonomi dan disinergikan dengan kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dalam perekonomian sehingga dapat mendukung berjalannya transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial. Berbagai kebijakan yang telah ditempuh hingga 2016 dan ke depan merupakan kelanjutan proses transformasi Bank Indonesia yang telah dicanangkan pada 2014.

Dari kebijakan moneter, Bank Indonesia secara konsisten akan menempuh kebijakan untuk mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasaran dan menjaga defisit transaksi berjalan di tingkat yang sehat. Konsisten dengan arah kebijakan moneter ini, suku bunga kebijakan diarahkan untuk menjaga inflasi sesuai dengan sasaran. *Stance* kebijakan moneter ditopang kebijakan nilai tukar yang ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar bergerak sesuai dengan nilai fundamentalnya. Kebijakan nilai tukar juga didukung pengelolaan permintaan dan penawaran valas domestik, serta mendorong pendalaman pasar valas. Selain itu, Bank Indonesia juga akan memperkuat kerja sama bilateral, terutama dengan negara kawasan, dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Kerja sama bilateral ditujukan untuk mendorong setelmen transaksi di pasar keuangan domestik dengan menggunakan *local currency* pada transaksi perdagangan dan investasi internasional.

Arah kebijakan moneter diperkuat strategi operasional kebijakan moneter. Pertama, Bank Indonesia akan mengimplementasikan sistem Giro Wajib Minimum (GWM) *Averaging* pada pertengahan 2017. Kebijakan GWM *Averaging* ditujukan untuk memberikan fleksibilitas bagi bank dalam mengelola likuiditas secara lebih efisien yang pada akhirnya bisa memperkuat transmisi kebijakan moneter. Kedua, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen operasi moneter menggantikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara bertahap. Strategi ini ditujukan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan dan juga implementasi amanat UU Bank Indonesia dan UU Perbendaharaan Negara. Ketiga, Bank Indonesia akan kembali menerapkan mekanisme lelang *Variable Rate Tender* dalam pelaksanaan operasi moneter menggantikan sistem *Fixed Rate Tender*.

Bank Indonesia juga menempuh sejumlah inisiatif guna mengakselerasi pendalaman pasar keuangan. Dalam arah kebijakan ini, Bank Indonesia akan terus melakukan pengembangan pasar keuangan melalui pendekatan ekosistem. Pengembangan tersebut dilakukan melalui tujuh pilar yang mencakup instrumen, pengguna/penyedia dana, lembaga perantara, infrastruktur, kerangka pengaturan, *benchmark rate* dan koordinasi/edukasi. Untuk mendukung inisiatif tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait dalam mempercepat pendalaman pasar keuangan.

Dari kebijakan makroprudensial, kebijakan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan risiko sistemik yang rendah, serta tetap memberi ruang bagi pemulihan ekonomi. Dalam kaitan ini, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memitigasi akumulasi risiko yang muncul dari perilaku prosiklikalitas dan risiko sistemik dalam sistem keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia memperkuat dan memperluas cakupan surveilans makroprudensial terhadap rumah tangga, korporasi dan grup korporasi nonkeuangan. Pemantauan risiko di luar perbankan juga menjadi semakin penting seiring perkembangan teknologi keuangan (*financial technology/ fintech*). Dalam hal ini, Bank Indonesia akan mendalami berbagai potensi dan juga risiko dari *fintech* sebagai masukan bagi asesmen kebijakan makroprudensial.

Bank Indonesia akan terus memperkuat asesmen makroprudensial melalui penggunaan pendekatan *national and regional balance sheet* untuk memperkuat asesmen risiko sistemik dan identifikasi ketidakseimbangan sistem keuangan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengukuran risiko di setiap elemen dan risiko interkoneksi antar elemen sistem keuangan serta memperkuat pemetaan kerentanan dan sumber gangguan sistem keuangan daerah.

Bank Indonesia turut mendukung akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pelengkap keuangan konvensional. Untuk ini, Bank Indonesia akan menyusun dan meluncurkan cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang mencakup sisi komersial dan sisi keuangan sosial syariah (*Islamic social finance*). Di sisi pendalaman pasar keuangan syariah, Bank Indonesia akan mendorong instrumen pasar uang syariah dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai *underlying* transaksi dan implementasi *Waqaf Linked Sukuk*. Sementara di sisi keuangan sosial syariah, Bank Indonesia

akan mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan peran zakat dan waqaf, serta melanjutkan inisiasi pendirian lembaga standarisasi regulasi dan perumusan kebijakan dalam tataran internasional.

Bank Indonesia juga memberikan perhatian kepada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam upaya pengendalian harga, khususnya *volatile food*, Bank Indonesia akan mendorong perluasan dan pengembangan klaster pengendalian inflasi berbasis UMKM dengan pendekatan hilirisasi. Klaster pengendalian inflasi ini juga menjadi salah satu instrumen Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, Bank Indonesia akan melanjutkan program perluasan dan pendalaman infrastruktur kredit UMKM guna mengurangi kendala *assymmetric information* yang disebabkan kesenjangan antara kapasitas UMKM dan kapasitas pembiayaan Perbankan. Bank Indonesia juga akan memperkuat pelaksanaan program penciptaan aktivitas ekonomi baru di daerah dan desa melalui pengembangan UMKM unggulan dengan pendekatan pembangunan ekonomi lokal (*Local Economic Development*/LED).

Dari kebijakan sistem pembayaran, kebijakan akan diwujudkan dalam langkah-langkah memperkuat unsur kelembagaan dan infrastruktur sistem pembayaran domestik serta mendorong inklusi keuangan. Pelaksanaan arah kebijakan akan berpijak pada misi menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar dan andal, dengan memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen, guna mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan.

Dalam konteks penguatan kelembagaan dan infrastruktur, Bank Indonesia akan mengambil beberapa inisiatif. Pertama, mengimplementasikan aturan terkait Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) yang berlaku bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), termasuk pelaku *fintech*. Kedua, untuk mendorong perkembangan *fintech* secara sehat, Bank Indonesia akan memastikan *Fintech Office* yang telah dibentuk pada 14 November 2016 dan fungsi *regulatory sandbox* dapat berjalan efektif dan produktif. Ketiga, Bank Indonesia juga akan mempercepat pembentukan lembaga yang akan mengoperasikan fungsi-fungsi pengelolaan *National Standard of Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS) yang ditargetkan berdiri selambat-lambatnya 30 Juni 2017. Keempat, Bank Indonesia akan mengakselerasi *National Payment Gateway* (NPG). Kelima, Bank Indonesia akan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi keuangan di domestik, menempatkan data di domestik, menyimpan dana di perbankan nasional, menggunakan *central bank money*, dan mematuhi kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitan dengan upaya mendorong inklusi keuangan, Bank Indonesia akan terus memperluas akses keuangan dan meningkatkan efisiensi dengan mengintegrasikan ekosistem nontunai elektronik dalam program dan layanan Pemerintah. Strategi kebijakan akan diarahkan dengan perluasan skema *Government to People*, yaitu bantuan sosial secara non tunai yang disalurkan melalui sistem keagenan Layanan Keuangan Digital (LKD), dan pengembangan *People to Government*, yaitu program *smart city* yang antara lain mencakup pembayaran retribusi dan layanan publik oleh masyarakat.

Di sisi pengelolaan uang rupiah (PUR), Bank Indonesia akan mendorong *clean money policy* hingga ke wilayah terpencil dan terluar melalui masterplan *Centralized Cash Network Plan* (CCNP). Untuk itu, Bank Indonesia juga akan menginisiasi penerbitan uang Rupiah emisi baru untuk seluruh denominasi secara serentak.

Berbagai arah kebijakan yang akan ditempuh Bank Indonesia tersebut akan senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lain, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi yang sudah terjalin baik selama ini akan terus ditingkatkan dalam berbagai bentuk media koordinasi seperti *Round Table Policy Dialogue* (RTPD), Rapat Koordinasi Bank Indonesia – Pemerintah Pusat/Daerah, Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI). Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi untuk pendalaman pasar keuangan melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dan Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) serta Association Cambiste Internationale (ACI).

Untuk koordinasi di bidang stabilitas sistem keuangan, koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan maka dalam konteks implementasi UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) difokuskan pada penetapan *Systemically Important Bank* (SIB) dan mekanisme koordinasi penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek. Sementara itu, koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) difokuskan pada penanganan permasalahan solvabilitas bank terkait penjualan Surat Berharga Negara (SBN) milik LPS kepada Bank Indonesia.

Dalam tataran internasional, Bank Indonesia juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah guna mengamankan kepentingan nasional sekaligus

meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Bank Indonesia akan terus aktif menyuarakan pentingnya sinergi untuk mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi global serta meningkatkan resiliensi ekonomi dan sistem keuangan, baik pada forum kerja sama regional maupun global. Terkait dengan pengelolaan persepsi positif, Bank Indonesia akan terus mendukung upaya Pemerintah untuk memastikan terciptanya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan terus memperkuat peran Investor Relation Unit (IRU) dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perwakilan pemerintah di luar negeri untuk memastikan efektivitas kegiatan tersebut.

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran Indonesia di tataran internasional, Bank Indonesia akan bersinergi dengan Pemerintah untuk menyukseskan penyelenggaraan Sidang Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Bali pada tahun 2018. Sidang Tahunan IMF dan WB merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri oleh gubernur dan pejabat bank sentral, menteri dan pejabat kementerian keuangan dan pembangunan, sektor swasta, investor dan akademisi, untuk membahas isu-isu utama perekonomian global. Dengan kehadiran otoritas dan pelaku sektor keuangan dari 189 negara anggota IMF-WB, peran Indonesia sebagai tuan rumah Sidang Tahunan IMF-WB 2018 menjadi sangat strategis. Pertama, jumlah peserta dari berbagai rangkaian pertemuan ini diperkirakan mencapai 15.000 orang dari berbagai negara. Kedua, peserta pertemuan merupakan pejabat pembuat kebijakan dari berbagai negara serta pimpinan perusahaan dan investor terkemuka, sehingga menjadi ajang yang sangat strategis untuk mendorong dialog, promosi dan keputusan investasi. Selain itu, seluruh perhatian dunia ekonomi akan tertuju kepada negara penyelenggara pertemuan sehingga menjadi kesempatan untuk meningkatkan persepsi positif Indonesia dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang aman, mempunyai infrastruktur dan fasilitas yang baik, serta stabilitas makroekonomi yang terjaga.

Sebagai tuan rumah, Indonesia telah menyusun program kerja yang terstruktur dan komprehensif sebagai bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka menuju penyelenggaraan Sidang Tahunan IMF-WB 2018 di Bali yang diberi nama "*Voyage to Indonesia*" (Gambar 15.1). Misi dari *Voyage to* Indonesia adalah menyelenggarakan Sidang Tahunan IMF-WB 2018 dengan sukses, serta mengoptimalkan manfaat Sidang Tahunan IMF-WB 2018 bagi Indonesia dan kawasan. Pesan utama yang ingin disampaikan dalam program *Voyage to* Indonesia adalah Indonesia sebagai negara yang *reformed*, *resilient*, *and progressive* sehingga mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Program ini akan terdiri dari berbagai kegiatan seminar dan expo yang bertujuan untuk mempromosikan ekonomi Indonesia yang telah melakukan reformasi, memiliki daya tahan, dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Program ini juga mempromosikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan iklim investasi dan pariwisata, serta peningkatan peran wanita sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan dan akses keuangan.

Terkait dengan kerja sama internasional, Bank Indonesia juga akan senantiasa terlibat aktif dan mendukung pemerintah untuk mendorong kerja sama di bidang pembiayaan pembangunan, termasuk yang bersifat kerja sama internasional. Bentuk kerja sama internasional ini antara lain dalam pembentukan Islamic Investment Infrastructure Bank (IIIB) atau World Islamic Investment Bank (WIIB) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia. Dukungan kepada Pemerintah juga dilakukan dalam kaitannya dengan inisiatif agenda investasi dan infrastruktur dalam fora kerja sama G-20 (*Global Infrastructure Connectivity Alliance*), yang ditujukan untuk memfasilitasi konektivitas pembangunan infrastruktur lintas negara dengan melibatkan pula negara non-anggota G20.

Sinergi Kebijakan dengan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Struktural

Bauran kebijakan Bank Indonesia juga disinergikan dengan berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan OJK.

Gambar 15.1. Kerangka Kerja Program *Voyage to* Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Sinergi kebijakan ditempuh guna memperkuat efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pemulihan ekonomi.

Dalam konteks sinergi dengan kebijakan fiskal, Bank Indonesia mendukung berbagai upaya Pemerintah untuk memperkuat prospek kesinambungan fiskal sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan. Untuk itu, Bank Indonesia mendukung komitmen Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan tiga pilar reformasi atas kebijakan fiskal yakni optimalisasi pendapatan negara, pengelolaan belanja negara secara produktif dan berkualitas, serta pengelolaan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian.

Dari sisi optimalisasi pendapatan negara, Bank Indonesia mendukung upaya reformasi perpajakan sebagai basis untuk memperkuat struktur penerimaan pajak. Kebijakan Amnesti Pajak yang ditempuh pada tahun 2016 dengan capaian sangat baik dapat menjadi dasar bagi upaya memperkuat kinerja perpajakan sehingga dalam jangka menengah dapat mencapai sekitar 13-14% dari PDB. Dari pengelolaan belanja negara, Bank Indonesia mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Belanja negara perlu terus diarahkan kepada sektor-sektor prioritas dan produktif yang memberikan dampak pengganda besar kepada perekonomian. Dalam kaitan ini maka fungsi alokasi belanja menjadi penting seperti dengan melakukan realokasi belanja pada subsidi energi kepada belanja yang bersifat prioritas dan *mandatory* seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, strategi ini pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas peran kebijakan fiskal dalam menopang pemulihan ekonomi.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah di kebijakan fiskal tersebut, Bank Indonesia mendukung strategi Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Kebijakan fiskal pada APBN 2017 difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, serta kegiatan ekonomi yang produktif yang memiliki dampak pengganda besar ke perekonomian, dengan memperhatikan ketersediaan ruang fiskal dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Target anggaran untuk belanja infrastruktur 2017 ditargetkan mencapai Rp387 triliun, meningkat dari anggaran 2016 sebesar Rp225 triliun, meningkatkan pangsa belanja infrastruktur terhadap total belanja 2017 mencapai 18,6%, lebih tinggi dari pangsa tahun 2016 sebesar 15,2%. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal 2017 mengarahkan defisit APBN 2017 pada kisaran 2,4% PDB (Tabel 15.1).

Selain sinergi dalam kebijakan fiskal, Bank Indonesia juga mendukung berbagai upaya Pemerintah untuk mempercepat dan menajamkan berbagai kebijakan struktural. Kebijakan struktural ini sangat penting karena akan berkontribusi pada upaya mempekuat ketahanan dan daya saing perekonomian serta menghindarkan Indonesia dari risiko jebakan ekonomi pendapatan menengah (lihat Boks 15.1).

Dalam kaitan ini, Bank Indonesia setidaknya melihat ada tiga prioritas kebijakan yang perlu menjadi perhatian yakni kebijakan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, pangan, dan ketersediaan air; kebijakan memperkuat peran sektor; serta kebijakan mempercepat pembangunan infrastruktur baik fisik maupun nonfisik. Prioritas kebijakan tersebut sebagian menjadi perhatian Pemerintah dan telah menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang telah ditempuh Pemerintah (lihat Boks 15.2.).

Prioritas kebijakan yang pertama terkait berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi, pangan, dan ketersediaan air. Dari sisi kebijakan energi, Bank Indonesia mendukung upaya Pemerintah agar kebijakan diarahkan pada upaya untuk mendorong peningkatan energi primer dan meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam kerangka bauran energi nasional. Dari sisi pangan, kebijakan untuk membenahi tata niaga impor dan penyelesaian permasalahan distribusi bahan kebutuhan pokok diperlukan dalam jangka pendek guna menjamin ketersediaan pasokan, dan mencegah kesenjangan pasokan saat permintaan meningkat dan produksi terganggu. Namun, pada saat bersamaan, kebijakan jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui modernisasi sektor pertanian dan meningkatkan kinerja pertanian di daerah pedesaan seperti melalui program klaster, juga perlu dilakukan untuk menopang kemandirian dan ketahanan pangan. Terakhir, kebijakan memperkuat ketersediaan air bersih perlu memperoleh perhatian karena akan berkaitan dengan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan.

Prioritas kebijakan kedua, yaitu kebijakan industrialisasi, tidak hanya terbatas pada sektor industri pengolahan tetapi juga berlaku untuk sektor unggulan lainnya, termasuk industri maritim. Bank Indonesia mendukung agenda kerja pemerintah untuk memperkuat industri hulu seperti industri logam dasar dan industri kimia dasar dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam melalui pemanfaatan keunggulan komparatif pada sumber daya alam yang berlimpah. Dalam kaitan ini, kebijakan industrialisasi memang perlu diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor industri yang memiliki keterkaitan yang panjang dengan berbagai sektor lain (*backward* dan *forward linkage*). Selain itu, kebijakan

Tabel 15.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 -2017

Triliun rupiah

Rincian	2015		2016			2017
	APBN-P	Realisasi	APBN	APBN-P	Realisasi	APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**1.761,7**	**1.508,0**	**1.822,5**	**1.786,2**	**1.555,1**	**1.750,3**
Penerimaan Dalam Negeri	1.758,4	1.496,0	1.820,5	1.784,2	1.546,9	1.748,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.489,2	1.240,4	1.546,7	1.539,2	1.285,0	1.498,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	269,2	255,6	273,8	245,1	261,9	250,0
a.l. PNBP Sumber Daya Alam (SDA)	119,0	101,0	124,9	90,5	65,7	87,0
Hibah	3,3	12,0	2,0	2,0	8,2	1,4
B. Belanja Negara	**1.984,1**	**1.806,5**	**2.095,7**	**2.082,9**	**1.860,3**	**2.080,5**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.319,5	1.183,3	1.325,6	1.306,7	1.150,1	1. 315,5
Belanja Pegawai	2.93,1	281,1	347,5	342,4	305,1	343,3
Belanja Barang	238,8	233,3	325,0	304,2	259,4	296,6
Belanja Modal	275,8	215,4	201,6	206,6	166,4	194,3
Pembayaran Bunga Utang	155,7	156,0	184,9	191,2	182,8	221,2
Subsidi	212,1	186,0	182,6	177,8	174,2	160,1
Belanja Hibah	4,6	4,3	4,0	8,5	6,5	2,2
Bantuan Sosial	107,7	97,2	55,3	53,4	49,6	57,0
Belanja Lain-lain	31,7	10,1	24,7	22,5	6,0	41,0
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	664,6	623,1	770,2	776,3	710,3	764,9
1. Transfer ke Daerah	643,8	602,4	723,3	729,3	663,6	704,9
2. Dana Desa	20,8	20,8	47,0	47,0	46,7	60,0
C. Keseimbangan Primer	**-66,7**	**-142,5**	**-88,3**	**-105,5**	**-122,5**	**-109,0**
D. Surplus/Defisit Anggaran	**-222,4**	**-298,5**	**-273,2**	**-296,7**	**-305,2**	**-330,2**
(% PDB)	**(1,9)**	**(2,6)**	**(2,2)**	**(2,4)**	**(2,5)**	**(2,4)**
E. Pembiayaan	**222,4**	**323,1**	**273,2**	**296,8**	**331,0**	**330,2**
Kelebihan/(kekurangan)Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		**24,6**			**25,8**	

Sumber: Kementerian Keuangan

juga diarahkan untuk memperluas ruang inovasi pada industri kreatif, yang dapat memberikan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja yang tinggi.

Sejalan dengan kebijakan industrialisasi, kebijakan di sektor pariwisata dan sektor maritim juga perlu terus diperkuat guna mengoptimalkan berbagai potensi alam yang dimiliki Indonesia. Sektor pariwisata memiliki potensi yang cukup besar untuk terus ditingkatkan, mengingat sektor ini dapat menjadi peredam gejolak ekonomi, termasuk saat terjadi gejolak nilai tukar rupiah.

Khusus terkait industri sektor maritim, Bank Indonesia melihat potensi yang sangat besar dari sektor sektor ini mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Arah kebijakan untuk mendorong sektor ini memang merupakan tantangan tersendiri, karena sampai saat ini kontribusi subsektor maritim nonmigas masih sangat kecil dibandingkan kontribusi di negara kepulauan lain (Grafik 15.3). Peran sektor maritim juga menjadi penting mempertimbangkan kontribusi jasa transportasi laut terhadap defisit neraca jasa dan defisit transaksi berjalan (Grafik 15.4). Jika ditarik lebih jauh, berbagai faktor yang menyebabkan defisit tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu dukungan infrastruktur pelabuhan dan pengembangan industri perkapalan yang masih belum kuat.

Dengan melihat potensi sektor maritim ini, Bank Indonesia mendukung langkah Pemerintah untuk memperkuat industri kapal secara integratif bersama dengan pengembangan pelabuhan. Perkembangan positif industri kapal akan mempunyai dampak pengganda yang sangat besar bagi perekonomian, dimulai dari industri baja, sebagai pemasok bahan baku mesin dan perlengkapan kapal, hingga dukungan kepada sektor perikanan, pariwisata, serta industri pelayaran penangkap ikan, kapal pesiar, dan kapal pengangkut lainnya. Penguatan sektor maritim semakin memberikan nilai tambah jika pengembangan industri kapal dan infrastruktur pelabuhan dapat dipadukan dalam sebuah ekosistem kawasan ekonomi yang saling terkoneksi.

Selain aspek sektoral tersebut, kebijakan industrialisasi juga dapat dikaitkan dengan upaya untuk terus menumbuhkembangkan peran ekonomi digital dalam pembangunan ekonomi. Hal ini perlu mendapat perhatian mempertimbangkan penetrasi internet Indonesia yang

Grafik 15.3. Pangsa Sektor Maritim terhadap PDB

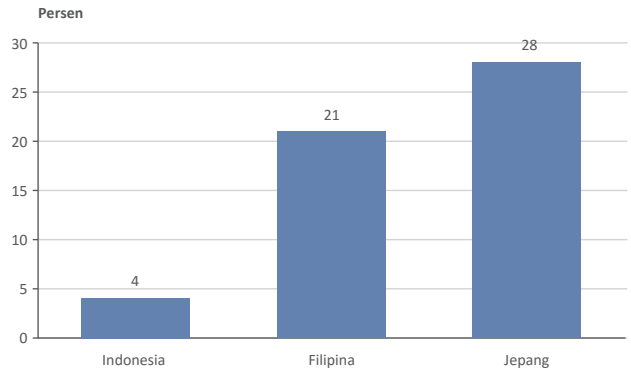

Sumber: CEIC, diolah

Grafik 15.4. Defisit Neraca Jasa dan Defisit Transaksi Berjalan

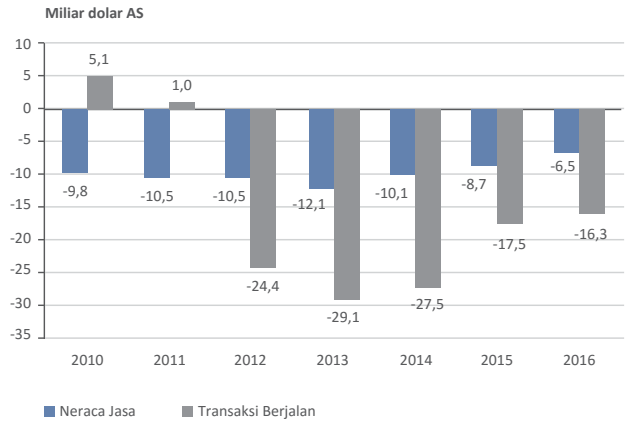

Sumber: Bank Indonesia

terus meningkat.[1] Potensi pasar digital Indonesia yang besar dengan pangsa mencapai 40,5% pasar digital Asia Tenggara, dan pertumbuhan perdagangan *online* mencapai 50%, dapat menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar spesial untuk usaha rintisan (*start-up*) berbasis internet.[2] Bank Indonesia mendukung strategi Pemerintah memperkuat ekspansi *start-up*, seperti melalui gerakan seribu *start-up* dan regulasi terkait pendanaan bagi perusahaan *start-up* yang tercakup dalam *e-commerce Roadmap*.

Prioritas kebijakan ketiga adalah percepatan pembangunan infrastruktur, baik kebijakan infrastruktur dalam arti fisik maupun kebijakan infrastruktur yang bersifat nonfisik. Dalam kaitan dengan infrastruktur fisik, Bank Indonesia terus mendukung upaya pemerintah untuk membangun proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, kereta api, dan revitalisasi pelabuhan. Bank Indonesia mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik karena akan berperan penting dalam mendorong proses industrialisasi. Bank Indonesia juga mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi serta ketersediaan air bersih seperti sistem pengelolaan air di berbagai lokasi.

Pembangunan infrastruktur nonfisik juga perlu mendapat perhatian serius. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian ialah komitmen untuk terus memperkuat berbagai modal dasar pembangunan, yang mencakup modal manusia, inovasi dan teknologi, serta kelembagaan yang kuat. Aspek modal manusia, inovasi dan teknologi menjadi modal penting dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi. Dari aspek kelembagaan, komitmen pemberantasan korupsi dan memperkuat kepastian hukum di Indonesia juga perlu terus diperkuat. Bank Indonesia meyakini komitmen Pemerintah untuk terus memperbaiki aspek kelembagaan tidak hanya akan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, tetapi juga akan dapat memperbaiki daya saing perekonomian.

Bank Indonesia meyakini bahwa sinergi kebijakan akan semakin solid bila berbagai kebijakan ekonomi yang ditempuh dapat selaras dan didukung Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal ini, perbaikan perekonomian secara nasional akan dapat dicapai bila masing-masing Pemerintah Daerah juga dapat meningkatkan penggunaan dana perimbangan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam ekonomi yang sedang membutuhkan stimulus, pemanfaatan dana Pemerintah Daerah dapat mengisi ruang kosong yang belum dapat dimanfaatkan Pemerintah Pusat.

1 Penjualan *online* Indonesia meningkat 40% setiap tahun (Ernst & Young). Penetrasi internet Indonesia terus meningkat hingga saat ini mencapai 40%, atau hingga 104 juta pengguna internet, dengan proyeksi nilai penjualan *online* mencapai 18 juta dolar AS pada akhir tahun 2016 (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia/APJII)

2 Survei yang dilakukan oleh Google Inc. dan Temasek Holdings Pte mengukur potensi pasar digital di Asia Tenggara, dan diperkirakan bahwa hingga tahun 2025 terdapat peluang pasar sebesar 200 juta dolar AS dan sekitar 40,5% atau 81 juta dolar AS berasal dari Indonesia yang terutama didominasi oleh sektor perdagangan *online (e-commerce)*

Boks 15.1. Perangkap Negara Berpendapatan Menengah *(Middle Income Trap)*

Memasuki abad 21, Indonesia memiliki begitu banyak harapan dan kesempatan. Pada tahun 2004, Indonesia dinobatkan dalam kelas negara baru, yaitu negara dengan penghasilan menengah.[1] Momen ini memberikan harapan dan sekaligus kesempatan untuk naik kelas menuju negara dengan penghasilan tinggi. Selain itu, pada saat ini Indonesia juga tengah memasuki periode bonus demografi (2010-2030), kondisi dimana rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang rendah (Grafik 1). Bonus demografi mengindikasikan adanya kesempatan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, perjalanan ini tidak mudah, perlu adanya upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan. Tanpa itu semua, akan sulit menghindari perangkap negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak ditopang oleh industri manufaktur, namun sejak tahun 2009 pertumbuhannya cenderung menurun. Demikian juga dengan proporsi sumbangan industri manufaktur yang terus menurun (terutama sejak 2005) jauh lebih rendah dibandingkan negara lainnya seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Menurunnya kondisi industri manufaktur Indonesia juga terlihat dalam profil ekspor nasional. Kontribusi komoditas industri manufaktur dalam ekspor semakin berkurang, tergantikan oleh ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) terutama bila dibandingkan periode sebelum 2000-an. Kinerja ekspor industri manufaktur Indonesia tergambar dalam Indeks Spesialisasi Perdagangan (*Trade Specialization Index*) yang mengukur infiltrasi produk Asia terhadap pasar dunia dan digunakan untuk mengukur daya saing produk industri manufaktur Indonesia. Sejak tahun 2001, indeks tersebut terus menurun dan bahkan terendah di kawasan ASEAN (Grafik 2).

Permasalahan industri manufaktur Indonesia merupakan permasalahan struktural, dimana pertumbuhan sektor konsumsi tidak diimbangi oleh pertumbuhan sektor produksi. Masyarakat berpendapatan tinggi mampu tumbuh 5,9%, jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat kelas bawah yang hanya tumbuh sebesar 1,3%. Transformasi konsumen Indonesia pada *Growth Incidence Curve* (GIC) menjadi masyarakat dengan kebutuhan yang kompleks, serupa dengan karakteristik masyarakat negara berpenghasilan tinggi, yang tercermin dari gaya hidup dan tingginya permintaan terhadap teknologi digital dan barang mewah lainnya (Gambar 1).[2] Namun, transformasi konsumen Indonesia tidak diikuti transformasi di sektor industri yang masih bergantung pada industri berbasis teknologi rendah. Kondisi ini menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan struktural.

Dalam jangka waktu yang lebih panjang, ketidakseimbangan struktural akan membawa konsekuensi lebih besar, yaitu risiko ekonomi Indonesia dapat terjebak sebagai negara dengan tingkat penghasilan menengah (*middle income trap*). Simulasi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% per tahun hanya akan membawa Indonesia memiliki PDB per kapita sebesar 7.152 dolar AS (2030).[3] Indonesia harus tumbuh minimal 6% per tahun untuk masuk ke dalam kelas negara berpenghasilan tinggi dengan batas PDB per kapita sebesar 12.616 dolar AS. Untuk itu, perlu terus diupayakan pencapaian

Grafik 1. Bonus Demografi

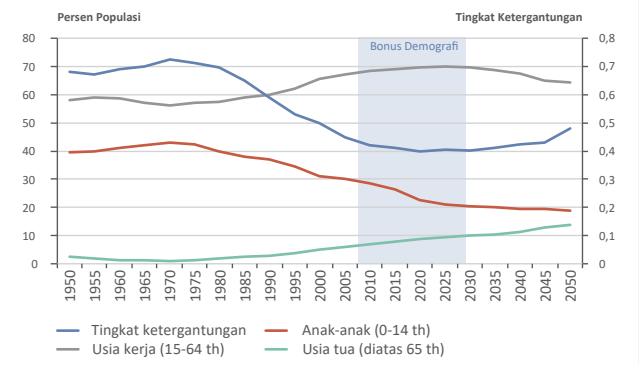

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Grafik 2. Indeks Spesialisasi Perdagangan – Produk Manufaktur

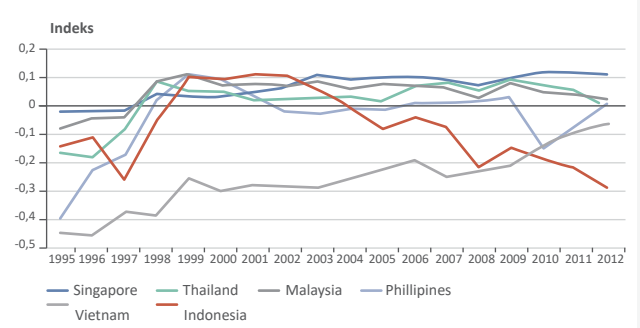

Sumber: UN Comtrade (Tijaja dan Faisal, 2014)

1 PDB per kapita Indonesia sebesar 1.080 per dolar AS pada tahun 2004, dimana posisinya di antara batas bawah negara berpenghasilan menengah (1.036 per dolar AS) dan batas bawah negara berpenghasilan tinggi (12.616 per dolar AS) berdasarkan pengelompokan Bank Dunia.

2 GIC menunjukkan laju pertumbuhan konsumsi tahunan antara dua periode untuk setiap persentil dalam distribusi. Dengan demikian, GIC menunjukkan bagaimana rata-rata pertumbuhan konsumsi didistribusikan lintas seluruh distribusi rumah tangga

3 Simulasi dengan tingkat pertumbuhan 5% per tahun, 6% per tahun dan 10% per tahun dengan posisi PDB per kapita tahun 2015 sebesar 3.440 dolar AS per tahun.

Gambar 1. Kerangka Reformasi Struktural

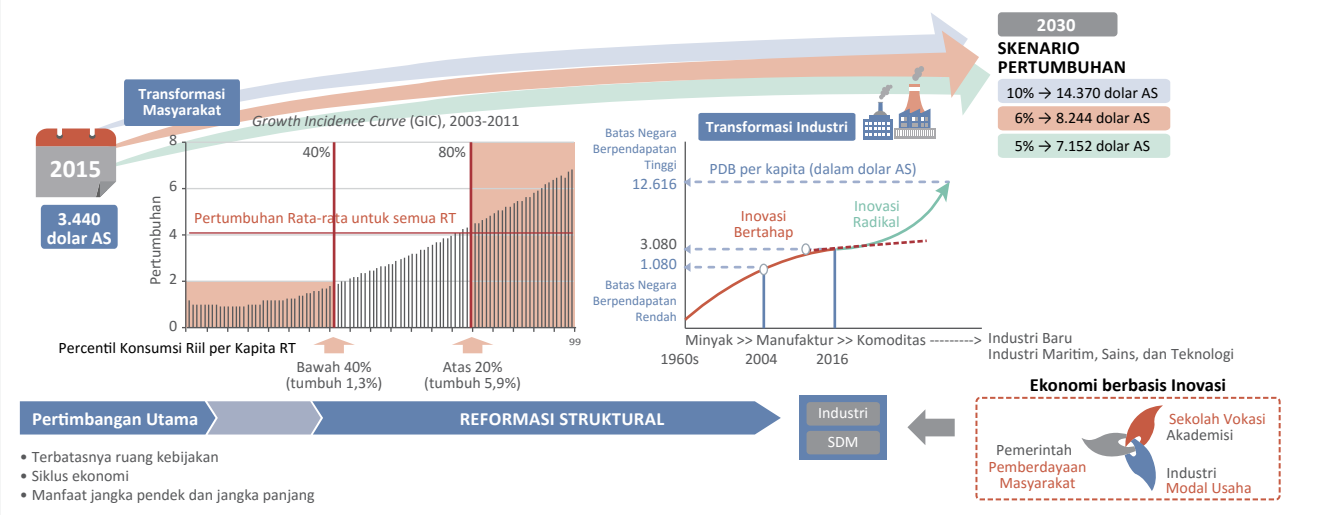

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Sehingga harapan menuju level negara berpenghasilan tinggi dapat diwujudkan.

Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi

Eichengreen, Park, dan Shin (2013) menyebutkan bahwa kunci keberhasilan suatu negara menghindari dari *middle income trap* yaitu dengan menguatkan ekspor produk berteknologi tinggi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Keduanya bermuara pada penguatan sektor industri, dimana peningkatan level industri berbasis teknologi menengah atau tinggi menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan produk berteknologi menengah atau tinggi. Untuk membangun industri yang kuat dibutuhkan SDM yang berkualitas, investasi yang besar dan teknologi yang tinggi disertai inovasi.

Pembangunan SDM melalui peningkatan pendidikan atau penambahan *schooling years* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi (Mankiw, Romer, dan Weil, 1992). Melalui peningkatan pendidikan, *skill* tenaga kerja akan meningkat dan berdampak pada peningkatan produktivitas. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan pendidikan, salah satunya yaitu mendorong pembentukan sekolah vokasi. Selain meningkatkan pendidikan dari sisi kuantitas, peningkatan kualitas pendidikan juga penting.[4] Studi di Indonesia menemukan hubungan positif antara kualitas pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi.[5] Pembangunan SDM itu sendiri selain untuk mendorong penguatan sektor industri, juga dapat untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga pada akhirnya dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kajian *Growth Diagnostic* (Bank Indonesia, 2016) menemukan hambatan utama dalam investasi di Indonesia antara lain masih kurang memadainya infrastruktur energi dan infrastruktur konektivitas. Saat ini, Pemerintah terus membangun infrastruktur energi seperti pembangkit listrik melalui Program 35,000 MW dan infrastruktur konektivitas seperti jalan, pelabuhan, rel kereta, dan bandara. Dengan penguatan infrastruktur tersebut, industri dapat menaikkan kapasitas produksinya dan menurunkan biaya pengiriman bahan baku atau barang produksi, sehingga dapat lebih produktif dan efisien. Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi terutama di sektor industri.

Dalam teori Schumpeter, investasi yang menjadi bagian penting dari pertumbuhan merupakan fungsi dari perkembangan teknologi dan jumlah wirausahawan (*supply of entrepreneurs*).[6] Lebih lanjut, Schumpeter berpendapat bahwa perusahaan dan industri kecil lebih efisien untuk menghasilkan inovasi. Besarnya proporsi industri kecil dibandingkan industri menengah (fenomena *missing middle*) mengindikasikan bahwa industri kecil Indonesia kesulitan untuk naik kelas menjadi industri menengah, kecuali mereka mampu membawa inovasi baru. Sehingga strategi pengembangan inovasi perlu menjadi perhatian bersama di samping strategi pembangunan SDM dan investasi untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

4 Hanuschek (2013) menekankan pentingnya keterampilan kognitif untuk pertumbuhan ekonomi, dimana tanpa meningkatkan kualitas sekolah, negara-negara berkembang akan sulit untuk meningkatkan kinerja perekonomian pada jangka panjang.

5 Affandi, Anugrah, dan Bary, "Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia", 2016 (belum diterbitkan)

6 Joseph Schumpeter (1883–1950) mengembangkan teori mengenai inovasi yang terkenal yaitu melalui *creative destruction* yang merupakan proses implementasi inovasi baru untuk metode yang sudah usang.

Boks 15.2. Survei Kinerja dan Efektivitas Reformasi Struktural Berupa Paket Kebijakan Ekonomi

Penerbitan 14 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dalam rangka percepatan reformasi struktural ditujukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk terus melakukan evaluasi atas penerapan PKE guna mengoptimalkan efektivitas dan dampak penerapan PKE dimaksud, salah satunya adalah melalui survei yang ditujukan pada dunia usaha dan Pemerintah Daerah.[1] Survei tersebut bertujuan untuk mengetahui persepsi atas *awareness* dan dampak atas efektivitas sejumlah PKE yang telah dikeluarkan.

Sebagian besar dunia usaha dan Pemerintah Daerah telah mengetahui sejumlah PKE tersebut. Untuk kelompok dunia usaha, 86% (dari 157 responden yang menjawab) menyatakan mengetahui mengenai 12 PKE yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sedangkan 14% tidak mengetahui. Demikian juga dengan kelompok Pemerintah Daerah, sebagian besar telah mengetahui mengenai 12 PKE yang dikeluarkan tersebut (98,1%).

Hasil survei juga menemukan bahwa semua PKE telah dipahami isinya, namun dengan persentase yang bervariasi. Pemahaman isi PKE V, VI, VII, dan XI kurang dari 50% responden dunia usaha (Tabel 1). Sementara itu, kurang dari 50% responden Pemerintah Daerah yang memahami isi PKE V, VIII, dan XI (Tabel 2). Hal ini menunjukkan masih perlunya sosialisasi yang lebih intens untuk meningkatkan pemahaman isi sejumlah PKE tersebut.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Dunia Usaha atas PKE

Paket Kebijakan Ekonomi	Memahami Tujuan	Memahami isi	Relevansi dengan usaha
Paket I	88,9%	58,5%	74,1%
Paket II	79,3%	60%	55,6%
Paket III	80%	55,6%	63%
Paket IV	77,8%	57,8%	67%
Paket V	60,7%	43,7%	32,6%
Paket VI	65,2%	43,7%	32,6%
Paket VII	68,9%	51,1%	40%
Paket VIII	45,9%	31,9%	12,6%
Paket IX	78,5%	62,2%	65,2%
Paket X	82,2%	60%	57,8%
Paket XI	65,9%	45,2%	43%
Paket XII	69,6%	51,9%	48,9%

Sumber: Hasil Survei POKJA III

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Pemda atas PKE

Paket Kebijakan Ekonomi	Memahami Tujuan	Memahami isi
Paket I	96,2%	82,7%
Paket II	94,2%	78,8%
Paket III	90,4%	65,4%
Paket IV	80,8%	53,8%
Paket V	65,4%	36,5%
Paket VI	84,6%	59,6%
Paket VII	84,6%	67,3%
Paket VIII	61,5%	30,8%
Paket IX	90,4%	73,1%
Paket X	92,3%	82,7%
Paket XI	73,1%	44,2%
Paket XII	78,8%	53,8%

Sumber: Hasil Survei POKJA III

Keyakinan dunia usaha terhadap efektivitas PKE masih terbatas. PKE diyakini efektif untuk tujuan pertama yaitu mengembangkan ekonomi makro yang kondusif oleh 48,4% responden, dan efektif untuk tujuan kedua yakni menggerakkan ekonomi nasional oleh 51,2% responden (Grafik 1). Sementara itu, hanya 31,2% responden yang berkeyakinan bahwa PKE akan efektif untuk tujuan ketiga yaitu melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dari sisi Pemerintah Daerah, hampir seluruh responden meyakini bahwa PKE akan

Grafik 1. Keyakinan Dunia Usaha atas Efektivitas PKE

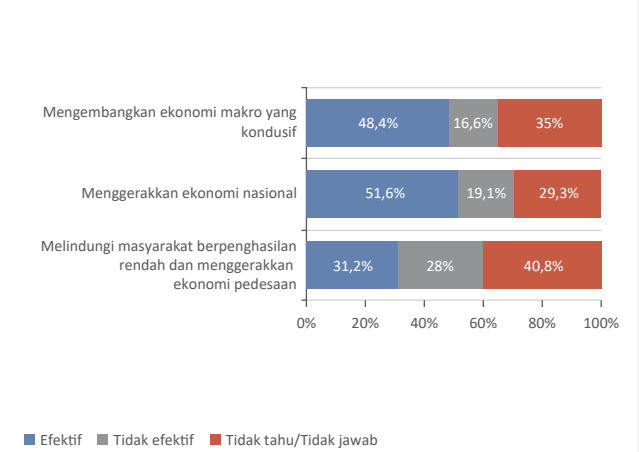

Sumber: Hasil Survei POKJA III

1 Survei dilakukan oleh Pokja III selama Juli 2016 dengan ruang lingkup survei meliputi 25 provinsi. Responden yang terdiri dari 157 responden dari kalangan pengusaha dan 52 responden dari Pemerintah Daerah

efektif untuk mencapai ketiga tujuan tersebut. Tercermin dari persentase keyakinan responden untuk tujuan pertama, kedua, dan ketiga masing-masing sebesar 92,5%, 92,5%, dan 81,1% (Grafik 2).

Survei juga dilakukan untuk mengukur persepsi atas efektivitas sejumlah PKE yang telah dikeluarkan. Survei tersebut diikuti oleh 300 responden perusahaan yang sebagian besar berasal dari sektor industri pengolahan. Dari 41 regulasi terkait PKE, yang paling banyak diketahui oleh dunia usaha adalah Peraturan tentang Pengupahan (91,3%), diikuti oleh ketentuan mengenai Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan (81,0%), dan Penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (80,3%). Sementara itu, ketentuan yang belum diketahui secara luas oleh dunia usaha (di bawah 50% responden) terutama mengenai Pelaksanaan Pembangunan dan Pengambangan Kilang Minyak di Dalam Negeri (39,7%), Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (41,3%), dan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (45,3%).

Dunia usaha menilai regulasi yang paling relevan dan bermanfaat terutama pada aspek kepastian usaha, produksi atau penjualan, biaya produksi, investasi, dan daya saing yaitu sebanyak 15 regulasi/ketentuan (Tabel 3). Namun demikian, masih terdapat sebagian kecil responden (sekitar 1-3%) yang memiliki persepsi bahwa ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Pengupahan memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha, yang disebabkan belum selarasnya regulasi tataran pusat dan daerah dan ketentuan pengupahan yang memberatkan kondisi keuangan.

Grafik 2. Keyakinan Pemerintah Daerah atas Efektivitas PKE

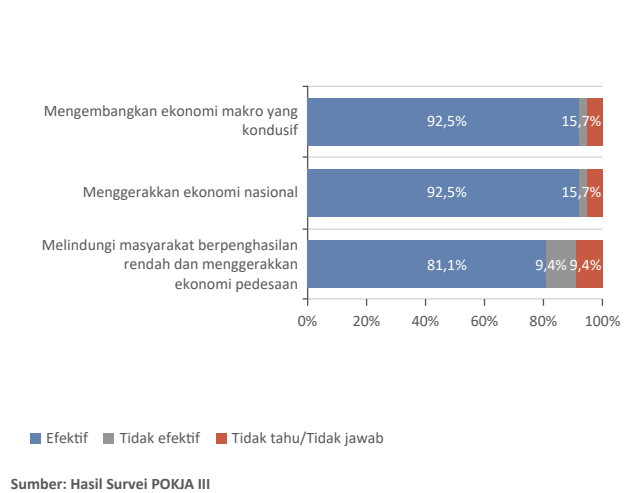

Sumber: Hasil Survei POKJA III

Dari hasil survei juga diketahui ketentuan-ketentuan yang paling berdampak positif terhadap kegiatan usaha. Kegiatan usaha tersebut terbagi menjadi tujuh aspek, yaitu: (i) produksi/penjualan, (ii) biaya produksi, (iii) investasi, (iv) ketenagakerjaan, (v) kondisi keuangan, (vi) kepastian usaha, dan (vii) daya saing.

BAB 16
Prospek Perekonomian

Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan terus membaik ditopang perbaikan ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dalam kisaran 5,0-5,4% dan inflasi dalam kisaran sasarannya 4,0±1%. Prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terus berlanjut pada jangka menengah didukung inflasi yang dalam tren menurun dan defisit transaksi berjalan yang berada pada level yang sehat. Prospek perbaikan perekonomian ekonomi jangka menengah dipengaruhi dampak positif berbagai langkah reformasi struktural sehingga kenaikan pertumbuhan ekonomi tetap dapat diikuti inflasi yang terkendali dan defisit transaksi berjalan yang sehat.

Keterangan gambar:
Ibarat sebuah perahu di tengah samudera luas, perekonomian Indonesia senantiasa menghadapi gelombang tantangan dan ketidakpastian. Namun ketekunan dan konsistensi akan mampu membawa perahu mencapai pulau tujuan.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan terus membaik dipengaruhi prospek perbaikan ekonomi global dan domestik. Dari global, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan capaian pada 2016. Perkembangan ini kemudian berkontribusi kepada kenaikan harga komoditas, baik energi maupun non-energi. Dari domestik, perbaikan prospek ekonomi ditopang perkiraan mulai berkurangnya proses konsolidasi internal yang dilakukan oleh korporasi dan perbankan. Korporasi diperkirakan melanjutkan ekspansi usaha yang sudah terlihat pada triwulan IV 2016 didorong kenaikan keyakinan berusaha antara lain sebagai dampak kenaikan harga komoditas dunia. Sejalan optimisme korporasi, perbankan diperkirakan juga mulai meningkatkan pemberian kredit dipengaruhi perkiraan risiko kredit yang juga turun. Selain itu, kebijakan fiskal 2017 juga tetap memberikan stimulus kepada perekonomian, khususnya kepada sektor prioritas dan sektor yang memiliki dampak pengganda yang besar.

Dengan asumsi tersebut, perekonomian Indonesia 2017 akan ditandai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 diproyeksikan meningkat dalam kisaran 5,0-5,4%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi masih akan banyak ditopang permintaan domestik, yakni konsumsi dan investasi, meskipun kinerja ekspor juga mulai membaik. Sementara itu, inflasi 2017 masih dalam kisaran sasarannya sebesar 4,0±1%, meskipun diperkirakan meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Stabilitas ekonomi yang terkendali juga diikuti defisit transaksi berjalan yang diperkirakan tetap sehat di bawah level 2,5% dari PDB. Prospek pertumbuhan ekonomi yang naik, risiko kredit yang menurun, serta suku bunga kredit yang masih berpotensi turun berpotensi meningkatkan penyaluran kredit perbankan yang diperkirakan dalam kisaran 10-12%. Kenaikan pertumbuhan kredit kemudian berdampak positif pada dana pihak ketiga yang diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 9-11%.

Prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terus berlanjut pada jangka menengah dengan didukung inflasi yang dalam tren menurun dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam level yang sehat. Perkiraan perekonomian jangka menengah panjang didukung dampak positif berbagai langkah reformasi struktural. Reformasi struktural diperkirakan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian yang pada gilirannya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada inflasi dan defisit transaksi berjalan. Inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran 3,0±1% pada 2021. Selain itu, defisit transaksi berjalan tetap berada dalam level yang sehat di bawah 2,5% PDB.

16.1. PROSPEK PEREKONOMIAN JANGKA PENDEK

Prospek Perekonomian Global

Pada tahun 2017, perekonomian global diperkirakan membaik. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 diperkirakan meningkat dari 3,1% menjadi 3,4% ditopang perbaikan kinerja di negara berkembang dan negara maju (Tabel 16.1). Pemulihan di negara berkembang dipengaruhi perbaikan pertumbuhan ekonomi negara-negara pengekspor komoditas energi dan non-energi. Perbaikan pertumbuhan di negara maju terutama didorong ekspektasi membaiknya ekonomi Amerika Serikat (AS) sedangkan kinerja ekonomi di Eropa dan Jepang masih belum kuat. Prospek Eropa yang belum kuat dipengaruhi risiko politik dan dampak dari Brexit sementara perkiraan Jepang yang masih lemah tidak terlepas dari pengaruh fenomena *aging population* sehingga membuat konsumsi di Jepang masih belum kuat .

Pertumbuhan ekonomi AS yang diperkirakan meningkat berkontribusi pada kenaikan pertumbuhan ekonomi global pada 2017. Kenaikan pertumbuhan ekonomi AS ditopang permintaan domestik yang semakin solid, baik pada konsumsi rumah tangga (RT) maupun investasi. Pertumbuhan konsumsi RT diperkirakan semakin kuat dipengaruhi kondisi ketenagakerjaan yang membaik seperti tercermin pada tingkat pengangguran yang berada di sekitar *Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment* (NAIRU) sebesar 4,8% serta tingkat partisipasi tenaga kerja dan upah yang naik. Sementara itu, pertumbuhan investasi

Tabel 16.1. Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

	2015	2016	2017[P)]
Dunia	3,2	3,1	3,4
Negara maju	2,1	1,6	1,9
Jepang	1,2	1,0	0,8
Amerika Serikat	2,6	1,6	2,3
Kawasan Eropa	2,0	1,6	1,6
Perancis	1,3	1,2	1,3
Jerman	1,5	1,9	1,5
Italia	0,7	0,9	0,7
Spanyol	3,2	3,2	2,3
Negara Berkembang	4,0	4,1	4,5
Tiongkok	6,9	6,7	6,5
India	7,2*	7,3*	7,2

* Penghitungan diseragamkan dengan negara lain yakni data periode Jan - Des 2016.
PDB India tahun 2015 berdasarkan tahun fiskal (Maret 2015 s.d. Maret 2016) adalah 7,5%.
[P)] Proyeksi
Sumber: WEO IMF Januari 2017, diolah

diperkirakan membaik dipengaruhi rencana ekspansi fiskal AS melalui berbagai proyek infrastruktur pemerintah yang direncanakan Presiden Trump saat kampanye di Pemilu AS.

Dinamika prospek perekonomian AS diperkirakan ditandai respons bank sentral AS, the Fed, yang akan melakukan normalisasi kebijakan moneter. Sejalan dengan arah kebijakan moneter tersebut, the Fed diperkirakan akan menaikkan *Fed Funds Rate* (FFR) pada tahun 2017. Respons kebijakan ditempuh sebagai antisipasi terhadap risiko kenaikan inflasi di AS dan kenaikan upah berlebihan akibat penurunan tajam pengangguran. Respons the Fed dapat semakin agresif jika tekanan inflasi semakin kuat antara lain akibat kebijakan ekspansi fiskal yang ditempuh Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump.

Perekonomian Tiongkok masih dalam proses konsolidasi sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 diperkirakan sedikit menurun dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Namun, proses konsolidasi tersebut masih dalam batasan yang tidak terlalu dalam karena investasi diperkirakan tetap kuat. Investasi yang masih kuat terutama dipengaruhi proyek infrastruktur Pemerintah yang besar dan penanaman modal asing langsung *(Foreign Direct Investment/FDI)* yang diperkirakan meningkat. Penamanan modal asing diperkirakan membaik dipengaruhi implementasi kebijakan relaksasi investasi asing. Meskipun demikian, risiko sektor keuangan yang masih besar akibat kondisi pinjaman yang berlebihan *(overleverage)* perlu dicermati karena dapat menurunkan prospek ekonomi Tiongkok.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi global yang membaik diperkirakan akan mendorong kenaikan harga komoditas, baik energi maupun non-energi. Tren peningkatan harga energi minyak dan komoditas non-energi global sejak semester II 2016 diperkirakan masih berlanjut. Peningkatan harga minyak dipengaruhi kesepakatan pemotongan produksi antara anggota OPEC dan non-OPEC yang efektif berlaku pada awal tahun 2017. Kebijakan ini diperkirakan akan menciptakan kondisi *net demand* di pasar minyak sejak triwulan III 2017 dan akhirnya mendorong kenaikan harga minyak. Sementara itu, peningkatan harga komoditas non-energi terutama terlihat pada logam dan batubara. Kenaikan harga logam didorong peningkatan permintaan untuk pembangunan infrastruktur di Tiongkok dan AS. Adapun kenaikan harga batubara, selain disebabkan peningkatan permintaan di Tiongkok, juga dipengaruhi permasalahan pasokan.

Prospek Perekonomian Domestik

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Prospek perekonomian dunia yang membaik dan harga komoditas yang meningkat diperkirakan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi 2017 juga membaik ditopang perbaikan keyakinan pelaku industri di sektor riil dan sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 diproyeksikan meningkat dalam kisaran 5,0-5,4% ditopang permintaan domestik yang tetap kuat dan prospek ekspor yang mulai membaik (Tabel 16.2). Prospek permintaan domestik yang tetap kuat dipengaruhi konsumsi dan investasi yang meningkat. Sementara itu, peningkatan kinerja ekspor tidak terlepas dampak positif perbaikan pertumbuhan ekonomi global dan kenaikan harga komoditas dunia.

Pada tahun 2017, konsumsi swasta yang merupakan gabungan konsumsi RT dan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) diperkirakan tumbuh solid pada kisaran 4,9-5,3%. Prospek konsumsi swasta yang tetap baik dipengaruhi inflasi yang tetap terkendali sehingga menopang daya beli RT. Selain itu, dampak lanjutan belanja pemerintah, termasuk belanja untuk proyek infrastruktur, diperkirakan berdampak tidak langsung dalam menopang pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan RT juga tidak terlepas dari pengaruh tidak langsung kenaikan harga komoditas dunia. Hal ini karena kenaikan harga komoditas akan mendorong kenaikan pendapatan masyarakat yang terkait dengan ekspor komoditas dan selajutnya mendorong konsumsi RT.

Pertumbuhan investasi diperkirakan juga meningkat dalam kisaran 5,8-6,2%. Prospek ini antara lain dipengaruhi rencana pembangunan proyek infrastruktur pemerintah sehingga menopang pertumbuhan investasi bangunan. Rencana Pemerintah tercermin pada alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur yang meningkat pada tahun 2017 (Grafik 16.1).

Tabel 16.2. Proyeksi PDB Sisi Pengeluaran

Persen, yoy

Komponen PDB	Realisasi 2016	Proyeksi 2017
Konsumsi Swasta	5,0	4,9 - 5,3
Konsumsi Pemerintah	- 0,2	1,7 - 2,1
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,5	5,8 - 6,2
Ekspor Barang dan Jasa	-1,7	3,3 - 3,7
Impor Barang dan Jasa	-2,3	2,2 - 2,6
Produk Domestik Bruto	**5,0**	**5,0 - 5,4**

Sumber: BPS dan Bank Indonesia

Grafik 16.1. Belanja Infrastruktur Pemerintah

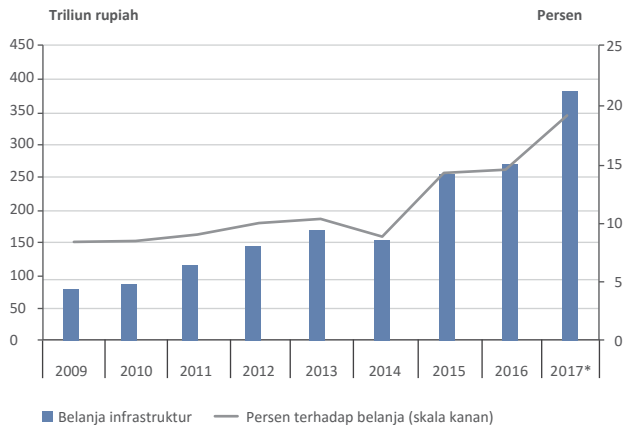

*Anggaran
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Peningkatan alokasi untuk belanja infrastruktur tidak terlepas dari dampak positif kebijakan realokasi subsidi ke belanja sektor produktif (Grafik 16.2). Prospek perbaikan investasi diperkirakan juga bersumber dari perbaikan investasi nonbangunan. Perbaikan investasi nonbangunan pada triwulan IV 2016 diperkirakan berlanjut pada tahun 2017 sejalan dengan proses konsolidasi internal korporasi yang mulai berkurang dan dampak lanjutan kenaikan harga komoditas dunia. Prospek perbaikan investasi nonbangunan juga dipengaruhi dampak positif perbaikan iklim investasi di Indonesia sebagai dampak positif perbaikan birokrasi dan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang telah ditempuh Pemerintah.

Pada sektor eksternal, kinerja ekspor diperkirakan membaik yakni dari kontraksi 1,7% pada 2016 menjadi tumbuh positif dalam kisaran 3,3-3,7%. Perbaikan kinerja ekspor

Grafik 16.2. Belanja Subsidi dan Infrastruktur

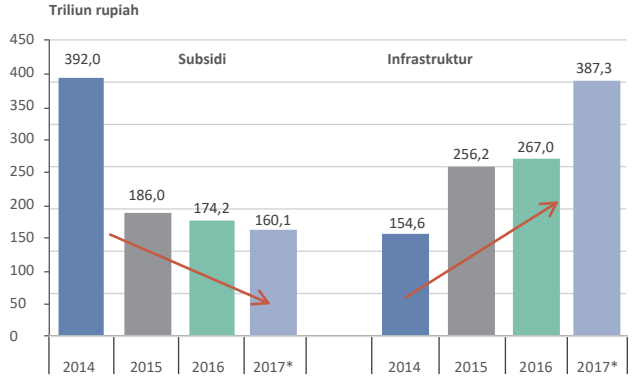

*Berdasarkan APBN 2017

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

merupakan dampak positif kenaikan pertumbuhan ekonomi dunia dan juga peningkatan harga komoditas global. Pertumbuhan negara mitra dagang yang diperkirakan membaik diharapkan memberikan dampak permanen pada kenaikan pertumbuhan ekspor. Namun, pada sisi lain, peningkatan permintaan domestik dan perbaikan ekspor diperkirakan mendorong kenaikan impor pada tahun 2017 ke dalam kisaran 2,2-2,6%. Berdasarkan kelompok barang, kenaikan impor banyak dipengaruhi kenaikan impor barang modal seperti mesin dan peralatan seiring dengan prospek kenaikan investasi.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), prospek pertumbuhan ekonomi 2017 masih banyak ditopang sektor yang berkaitan dengan permintaan domestik. Pertumbuhan yang tinggi terjadi pada LU Pengangkutan dan Komunikasi, LU Keuangan, dan LU Konstruksi (Tabel 16.3). LU Pengangkutan dan Komunikasi diperkirakan tetap melanjutkan tren positif, dengan pertumbuhan mencapai kisaran 8,7-9,1%, sejalan dengan pemulihan industri pengolahan dan kegiatan ekspor-impor. Hal ini juga didukung oleh semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur, antara lain mulai beroperasinya Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta dan New Tanjung Priok pada tahun 2017. Sementara itu, prospek sub-LU Komunikasi diperkirakan terus meningkat seiring perkembangan ekonomi digital melalui *e-commerce* dan *financial technology* (*fintech*).

Pengaruh perbaikan kondisi global, termasuk kenaikan harga komoditas, diperkirakan juga meningkatkan kinerja

Tabel 16.3. Proyeksi PDB Sisi Lapangan Usaha

Persen, yoy

Lapangan Usaha	Realisasi 2016	Proyeksi 2017
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	3,3	3,0- 3,4
Pertambangan dan Penggalian	1,1	1,5 - 1,9
Industri Pengolahan	4,3	4,4 - 4,8
Listrik, Gas dan Air Bersih*	5,3	5,0 - 5,4
Konstruksi	5,2	5,7 - 6,1
Perdagangan, Hotel dan Restoran**	4,1	4,4 - 4,8
Pengangkutan dan Komunikasi***	8,4	8,7 - 9,1
Keuangan, Persewaan dan Jasa****	7,0	6,3 - 6,7
Jasa-jasa*****	4,4	4,7 - 5,1
Produk Domestik Bruto	5,0	5,0 - 5,4

* Penggabungan 2 lapangan usaha: (i) Pengadaan Listrik dan Gas; (ii) Pengadaan air
** Penggabungan 2 lapangan usaha: (i) Perdagangan Besar dan Eceran , Reparasi Mobil dan Motor; (ii) Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum
*** Penggabungan 2 lapangan usaha: (i) Transportasi dan Pergudangan; (ii) Informasi dan Komunikasi
**** Penggabungan 3 lapangan usaha: (i) Jasa Keuangan; (ii) Real Estate; (iii) Jasa Perusahaan
***** Penggabungan 4 lapangan usaha: (i) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib; (ii) Jasa Pendidikan; (iii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya; (iv) Jasa Lainnya.

Sumber: BPS, diolah

LU Pertanian dan LU Pertambangan. Kedua LU ini pada tahun 2017 masing-masing diperkirakan tumbuh dalam kisaran 3,0-3,4% dan 1,5-1,9%. Searah dengan prospek tersebut, LU Industri Pengolahan diperkirakan sedikit naik dalam kisaran 4,4-4,8%, didorong perbaikan permintaan domestik dan dampak positif perbaikan iklim investasi didorong PKE yang ditempuh Pemerintah.

Dari sisi spasial, prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi ditopang kenaikan berbagai wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa diperkirakan dalam kisaran 5,4-5,8% ditopang perbaikan kinerja konsumsi dan investasi serta peningkatan ekspor. Keyakinan konsumen yang meningkat pada akhir tahun 2016 diperkirakan berlanjut pada tahun 2017. Pendapatan juga tetap terjaga dipengaruhi oleh penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pilkada serentak yang mendorong pertumbuhan konsumsi baik RT maupun LNPRT. Sementara itu, perkiraaan investasi diperkirakan meningkat didorong peningkatan proyek infrastruktur Pemerintah. Dari sisi eksternal, optimisme pemulihan perekonomian global dan rencana diversifikasi negara tujuan ekspor menjadi faktor yang mendorong peningkatan ekspor.

Pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,5-5,0%. Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ditopang perbaikan konsumsi RT sejalan dengan membaiknya daya beli masyarakat dan invetasi sejalan dengan prospek perbaikan korporasi. Secara sektoral, sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera berasal dari LU Pertanian, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. Pendorong kenaikan pertumbuhan LU Pertanian bersumber dari peningkatan permintaan produk pertanian dan kenaikan harga komoditas. Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan banyak didorong perbaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas. Sementara itu, kenaikan pertumbuhan LU Konstruksi dipengaruhi berbagai proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan dan proyek persiapan Asian Games 2018.

Prospek perekonomian wilayah Kalimantan dan Sulampua diperkirakan juga membaik. Perbaikan wilayah Kalimantan dipengaruhi oleh perkiraan peningkatan ekspor terkait dengan kenaikan harga komoditas batubara, minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*/CPO), dan olahan mineral. Sementara itu, perbaikan di Sulampua dipengaruhi dipengaruhi konsumsi dan investasi. Konsumsi RT diperkirakan meningkat seiring dengan perbaikan pendapatan di sektor primer sementara perbaikan investasi didorong komitmen percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas.

Prospek Inflasi

Inflasi IHK pada tahun 2017 diperkirakan tetap berada dalam kisaran target inflasi 4,0±1%, meskipun meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Inflasi IHK yang diperkirakan masih dalam kisaran dipengaruhi inflasi inti yang tetap terkendali sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terjaga, nilai tukar yang terkendali, dan permintaan agregat yang dapat dipenuhi penawaran agregat secara memadai. Inflasi *volatile food* diharapkan juga sedikit menurun seiring potensi dampak *La Nina* yang tidak sebesar tahun lalu sehingga membuat pasokan pangan akan lebih terkendali. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas produk holtikultura dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui produksi domestik diperkirakan turut menurunkan inflasi *volatile food.*

Prospek kenaikan inflasi IHK 2017 terutama dipengaruhi inflasi kelompok *Administered Prices* (AP) yang diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Kenaikan inflasi AP dipicu rencana kebijakan Pemerintah melakukan subsidi Tarif Tenaga Listrik (TTL) tepat sasaran untuk pelanggan daya 900 VA dengan mengenakan tarif nonsubsidi/keekonomian kepada pelanggan yang mampu. Selain itu, prospek kenaikan harga energi dunia juga berisiko mendorong peningkatan harga keekonomian komoditas AP seperti bahan bakar khusus dan tarif listrik.

Prospek Neraca Pembayaran Indonesia

Prospek neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2017 diperkirakan masih mencatat surplus. Prospek surplus pada NPI dipengaruhi defisit transaksi berjalan yang masih terkendali dan surplus pada neraca transaksi modal dan finansial (TMF) yang masih mampu membiayai defisit transaksi berjalan. Prospek surplus pada NPI tersebut diperkirakan akan meningkatkan cadangan devisa Indonesia.

Defisit transaksi berjalan pada tahun 2017 diperkirakan tetap sehat di bawah level 2,5% PDB. Kenaikan defisit transaksi berjalan 2017 dipengaruhi peningkatan defisit neraca migas yang melampaui peningkatan surplus neraca nonmigas. Peningkatan defisit neraca migas pada satu sisi banyak dipengaruhi oleh penurunan ekspor migas sejalan dengan penurunan *lifting* migas. Pada sisi lain, impor migas meningkat dipengaruhi kenaikan permintaan domestik. Sementara itu, neraca nonmigas diperkirakan mencatat kenaikan surplus. Prospek perbaikan neraca nonmigas dipengaruhi potensi perbaikan ekspor nonmigas didorong

peningkatan harga komoditas, meskipun pada sisi lain impor nonmigas juga meningkat dipengaruhi kenaikan permintaan domestik.

Neraca TMF pada tahun 2017 diperkirakan masih mencatat surplus, meskipun lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2016. Surplus TMF diperkirakan masih memadai untuk membiayai defisit transaksi berjalan. Surplus TMF dipengaruhi persepsi investor yang tetap positif terhadap prospek perekonomian nasional sehingga masih mendorong aliran masuk modal asing ke Indonesia, termasuk aliran modal berbentuk investasi portofolio. Namun, prospek aliran masuk modal asing tidak sebesar kondisi tahun 2016. Hal ini karena dipengaruhi ketidakpastian pasar keuangan global yang lebih tinggi antara lain seiring dengan risiko ketidakpastian respons kebijakan di AS baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter.

Prospek Stabilitas Sistem Keuangan

Prospek Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) diperkirakan tetap terkendali, ditopang oleh perbaikan kinerja perbankan dan pasar keuangan. Prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik dan stabilitas ekonomi yang terjaga diperkirakan memperkuat kinerja perbankan. Prospek pertumbuhan ekonomi yang naik, risiko kredit yang menurun, serta suku bunga kredit yang masih berpotensi turun bisa meningkatkan penyaluran kredit perbankan 2017. Pertumbuhan kredit pada tahun 2017 diperkirakan dalam kisaran 10-12%. Kenaikan pertumbuhan kredit tersebut bisa memberikan dampak pengganda bagi kenaikan dana pihak ketiga yang pada tahun 2017 diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 9-11%.

Perbaikan intermediasi perbankan didukung prospek kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan yang masih jauh di atas ketentuan minimum 8%. Risiko kredit diperkirakan tetap rendah dipengaruhi prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan perbankan. Likuiditas perbankan diperkirakan juga tetap baik, antara lain dipengaruhi dampak positif tambahan likuiditas dari repatriasi dana amnesti pajak.

Sejalan dengan perbaikan prospek kinerja perbankan, penerbitan obligasi dan penawaran umum perdana (*initial public offering*/IPO) di pasar modal diperkirakan meningkat. Prospek ini didorong oleh potensi imbal hasil investasi di Indonesia yang masih kompetitif dibandingkan dengan rata-rata imbal hasil global. Peningkatan pembiayaan ekonomi dari perusahaan pembiayaan juga diperkirakan tetap tumbuh. Potensi peningkatan pembiayaan nonbank ini diperkirakan dapat diserap oleh investor institusional seperti dana pensiun, asuransi, reksadana, dan investor asing.

16.2. PROSPEK PEREKONOMIAN JANGKA MENENGAH

Prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka menengah diperkirakan terus berlanjut dengan didukung inflasi yang turun dan defisit transaksi berjalan yang sehat. Prospek ekonomi jangka menengah panjang didukung dampak positif berbagai langkah reformasi struktural. Reformasi struktural diperkirakan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Peningkatan tersebut juga termasuk dampak positif perbaikan konektivitas antar wilayah yang akan memperkuat struktur produksi dan distribusi serta menurunkan biaya produksi. Secara keseluruhan, prospek perbaikan efisiensi dan produktivitas pada gilirannya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada inflasi dan defisit transaksi berjalan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan tumbuh dalam tren yang meningkat didorong perbaikan ekonomi global dan penguatan potensi dari ekonomi domestik. Perbaikan ekonomi global tidak hanya didorong perbaikan kinerja negara berkembang, tetapi juga didorong oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi negara maju. Namun, pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan tetap dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Sementara itu, potensi dari ekonomi domestik dipengaruhi implementasi berbagai reformasi struktural yang telah ditempuh. Reformasi struktural berpotensi meningkatkan produktivitas perekonomian yang selanjutnya dapat menopang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan. Hasil estimasi menunjukkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah berpotensi tumbuh lebih tinggi apabila reformasi struktural yang menyeluruh dapat berjalan maksimal sehingga dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan negara dengan tingkat penghasilan menengah atau dikenal dengan istilah *middle income trap*.

Berdasarkan komponen, prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah masih ditopang konsumsi RT. Konsumsi RT yang masih kuat didorong peningkatan daya beli masyarakat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kelas menengah dan terjaganya tingkat inflasi dalam sasaran jangka menengah. Di samping itu, Indonesia juga memiliki bonus

demografi sebagai modal bagi ketersediaan tenaga kerja yang produktif.

Implementasi reformasi struktural yang berjalan baik kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan tekanan inflasi. Inflasi diperkirakan dalam tren menurun sehingga berada dalam kisaran 3,0±1% pada tahun 2021. Prospek inflasi jangka menengah ini dipengaruhi ekspektasi inflasi yang menurun sejalan dengan perbaikan struktur perekonomian dan koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang semakin baik. Perbaikan struktur perekonomian tersebut termasuk dampak kenaikan produktivitas, perbaikan struktur pasar dan tata niaga, dan perbaikan distribusi dan logistik barang. Berbagai perbaikan tersebut pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi perekonomian dan pada akhirnya mengurangi tekanan terhadap inflasi.

Defisit transaksi berjalan pada tahun 2021, diperkirakan tetap sehat di bawah level 2,5% PDB. Perkiraan ini dipengaruhi dampak positif reformasi struktural, termasuk perkembangan infrastruktur, yang dapat meningkatkan kapasitas perekonomian. Peningkatan kapasitas perekonomian diharapkan dapat mendorong industri-industri yang memiliki daya saing tinggi sehingga kinerja ekspor ke depan dapat terus membaik. Selain itu, peningkatan produktivitas perekonomian dapat berimbas pada berkurangnya ketergantungan terhadap barang impor seiring kemampuan industri domestik dalam menghasilkan substitusi barang impor. Dengan prospek ekspor dan impor tersebut, surplus neraca perdagangan diperkirakan meningkat. Reformasi struktural diperkirakan juga berdampak positif kepada neraca Transaksi Modal dan Finansial (TMF). Surplus neraca TMF diperkirakan meningkat didorong bertambahnya aliran dana investasi masuk ke Indonesia dipengaruhi perbaikan iklim investasi. Secara keseluruhan perbaikan transaksi berjalan disertai peningkatan surplus TMF dapat mendorong kenaikan surplus neraca pembayaran dan akhirnya mendorong kenaikan cadangan devisa.

16.3. RISIKO DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN

Prospek ekonomi Indonesia ke depan tetap perlu dicermati karena beberapa risiko jangka pendek dan jangka menengah dari global dan domestik dapat mengemuka dan bisa kembali mengganggu prospek perekonomian. Berbagai risiko tidak hanya membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak sesuai perkiraan, namun juga bisa memberikan tekanan pada stabilitas perekonomian. Stabilitas yang terganggu bila terus berlanjut akan memberikan tekanan balik kepada pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah panjang.

Dari global, risiko perekonomian terkait empat faktor. Pertama, pemulihan pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global yang bisa kembali tidak sekuat harapan, serta harga komoditas yang tidak setinggi perkiraan. Kedua, kebijakan perdagangan internasional di negara maju yang cenderung menjadi lebih protektif dan diikuti kebijakan politik yang cenderung populis. Ketiga, arah kebijakan makroekonomi AS yang bisa meningkatkan risiko pembalikan modal AS dan ketidakpastian pasar keuangan dunia. Keempat, inflasi global yang berisiko kembali meningkat bila harga komoditas dunia, termasuk harga energi, terus meningkat.

Berbagai risiko perekonomian global tersebut memberikan tantangan bagi perekonomian Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Tantangan berkaitan dengan empat hal utama. Pertama, kemampuan meningkatkan penerimaan pajak sebagai pijakan untuk memperluas ruang stimulus fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, kecepatan penyelesaian proses konsolidasi korporasi dan perbankan. Ketiga, upaya untuk terus memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Terakhir, optimalisasi strategi pengendalian inflasi yang berisiko meningkat. Dalam jangka menengah panjang, tantangan perekonomian terkait dengan upaya memperkuat struktur perekonomian sehingga lebih berdaya tahan. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat perekonomian agar menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing guna mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi sekaligus menghindarkan Indonesia dari jebakan kelompok ekonomi berpendapatan menengah.

LAMPIRAN

Peraturan Bank Indonesia Tahun 2016

No.	Peraturan	Tanggal	Perihal
1	PBI No.18/1/PBI/2016	28 Januari 2016	Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2015
2	PBI No.18/2/PBI/2016	26 Februari 2016	Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Hedging Syariah)
3	PBI No.18/3/PBI/2016	10 Maret 2016	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
4	PBI No.18/4/PBI/2016	22 April 2016	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
5	PBI No.18/5/PBI/2016	2 Mei 2016	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
6	PBI No.18/6/PBI/2015	2 Mei 2016	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
7	PBI No.18/7/PBI/2016	17 Mei 2016	Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka Bilateral Currency Swap Arrangement
8	PBI No.18/8/PBI/2016	17 Mei 2016	Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia
9	PBI No.18/9/PBI/2017	3 Juni 2016	Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
10	PBI No.18/10/PBI/2016	30 Juni 2016	Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
11	PBI No.18/11/PBI/2016	29 Juli 2016	Pasar Uang
12	PBI No.18/12/PBI/2016	15 Agustus 2016	Operasi Moneter
13	PBI No.18/13/PBI/2016	15 Agustus 2016	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia
14	PBI No.18/14/PBI/2016	22 Agustus 2016	Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
15	PBI No.18/15/PBI/2016	29 Agustus 2016	Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
16	PBI No.18/16/PBI/2016	29 Agustus 2016	Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
17	PBI No.18/17/PBI/2016	29 Agustus 2016	Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
18	PBI No.18/18/PBI/2016	7 September 2016	Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
19	PBI No.18/19/PBI/2016	7 September 2016	Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
20	PBI No.18/20/PBI/2016	7 Oktober 2016	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
21	PBI No.18/21/PBI/2016	7 Oktober 2016	Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur
22	PBI No.18/22/PBI/2016	27 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016
23	PBI No.18/23/PBI/2016	27 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2016
24	PBI No.18/24/PBI/2016	27 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016.
25	PBI No.18/25/PBI/2016	27 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2016.
26	PBI No.18/26/PBI/2016	27 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016.
27	PBI No.18/27/PBI/2016	27 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 2016
28	PBI No.18/28/PBI/2016	27 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 200 (Dua Ratus) Tahun Emisi 2016
29	PBI No.18/29/PBI/2016	28 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016.
30	PBI No.18/30/PBI/2016	28 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016
31	PBI No.18/31/PBI/2016	28 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2016.
32	PBI No.18/32/PBI/2016	28 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2016
33	PBI No.18/33/PBI/2016	28 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016.
34	PBI No.18/34/PBI/2016	28 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016.
35	PBI No.18/35/PBI/2016	28 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016.
36	PBI No.18/36/PBI/2016	28 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2016.
37	PBI No.18/37/PBI/2016	28 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2016.
38	PBI No.18/38/PBI/2016	28 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016.
39	PBI No.18/39/PBI/2016	28 Oktober 2016	Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 100 (Seratus) Tahun Emisi 2016.
40	PBI No.18/40/PBI/2016	9 November 2016	Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
41	PBI No.18/41/PBI/2016	22 November 2016	Bilyet Giro
42	PBI No.18/42/PBI/2016	30 November 2016	Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia
43	PBI No.18/43/PBI/2016	28 Desember 2016	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Daftar Tabel

Nomor	Judul
Tabel 1	Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran
Tabel 2	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan)
Tabel 3	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku)
Tabel 4	Perkembangan Upah Minimum Provinsi per Bulan
Tabel 5	Indeks Harga Konsumen Indonesia
Tabel 6	Angka Inflasi di 82 Kota
Tabel 7	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia
Tabel 8	Neraca Pembayaran Indonesia
Tabel 9	Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas
Tabel 10	Volume Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas
Tabel 11	Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan (fob)
Tabel 12	Nilai Impor Menurut Kelompok Barang
Tabel 13	Nilai Impor Nonmigas Menurut Komoditas (cif)
Tabel 14	Volume Impor Nonmigas Menurut Komoditas
Tabel 15	Nilai Impor Nonmigas Menurut Negara Asal (cif)
Tabel 16	Nilai Ekspor Minyak dan Gas (fob)
Tabel 17	Uang Beredar
Tabel 18	Perubahan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Tabel 19	Suku Bunga Deposito dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Kelompok Bank
Tabel 20	Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank
Tabel 21	Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas Melalui Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia

Tabel 1. Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran [1)]

Miliar rupiah

Jenis penggunaan	2012	2013	2014	2015*	2016**				
					I	II	III	IV	Total
Harga Konstan									
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**4.195.788**	**4.423.417**	**4.651.018**	**4.881.904**	**1.247.622**	**1.263.973**	**1.307.604**	**1.307.300**	**5.126.499**
a. Makanan dan Minuman selain Restoran	1.545.636	1.612.839	1.685.185	1.776.327	455.956	462.050	477.251	474.491	1.869.748
b. Pakaian	172.878	182.010	190.369	198.344	49.914	50.827	51.822	51.769	204.333
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	575.044	608.427	636.225	667.414	170.484	172.446	176.359	177.415	696.704
d. Kesehatan dan Pendidikan	284.509	300.791	318.154	336.144	85.988	87.327	90.280	90.598	354.193
e. Transportasi dan Komunikasi	1.018.099	1.085.322	1.148.300	1.202.173	307.232	311.974	326.107	325.706	1.271.019
f. Restoran dan Hotel	381.367	403.321	430.250	451.848	115.103	116.121	121.450	122.612	475.285
g. Lainnya	218.255	230.706	242.536	249.654	62.945	63.228	64.335	64.709	255.217
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**81.919**	**88.618**	**99.420**	**98.800**	**25.123**	**25.755**	**26.852**	**27.611**	**105.341**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**681.819**	**727.812**	**736.283**	**775.427**	**138.456**	**187.546**	**187.187**	**261.109**	**774.298**
a. Konsumsi Kolektif	420.887	455.890	459.596	476.858	84.621	115.031	115.815	161.442	476.910
b. Konsumsi Individu	260.931	271.922	276.687	298.569	53.835	72.516	71.372	99.666	297.389
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	**2.527.729**	**2.654.375**	**2.772.471**	**2.911.471**	**725.622**	**742.960**	**769.098**	**804.146**	**3.041.825**
a. Bangunan	1.811.558	1.933.672	2.040.387	2.165.135	544.473	552.232	576.301	604.204	2.277.210
b. Mesin dan Perlengkapan	306.654	307.782	300.154	301.947	67.383	68.826	69.310	76.267	281.786
c. Kendaraan	171.259	161.592	152.090	152.953	35.688	39.797	47.353	48.577	171.415
d. Peralatan lainnya	35.908	37.472	40.913	44.896	12.841	11.759	12.077	14.027	50.704
e. *Cultivated Biological Resources* (CBR)	146.767	149.080	160.304	166.126	44.837	46.028	40.710	42.520	174.096
f. Produk Kekayaan Intelektual	55.583	64.776	78.622	80.414	20.400	24.317	23.347	18.551	86.615
5. a. Perubahan Inventori	**174.183**	**124.454**	**163.583**	**112.848**	**53.056**	**56.148**	**60.856**	**(30.471)**	**139.589**
b. Diskrepansi Statistik [1)]	30.882	57.576	81.318	57.357	35.071	40.135	33.493	(15.304)	93.395
6. Ekspor Barang dan Jasa	**1.945.064**	**2.026.114**	**2.047.887**	**2.004.416**	**481.698**	**493.801**	**475.820**	**518.316**	**1.969.635**
a. Barang	1.761.024	1.828.150	1.842.728	1.797.125	430.211	440.847	417.685	460.475	1.749.218
a.1. Nonmigas	1.479.142	1.584.709	1.607.807	1.538.123	366.091	378.574	355.855	402.747	1.503.267
a.2. Migas	281.882	243.441	234.921	259.002	64.120	62.273	61.830	57.728	245.951
b. Jasa	184.039	197.964	205.159	207.292	51.487	52.954	58.135	57.841	220.417
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	**1.910.300**	**1.945.867**	**1.987.114**	**1.859.712**	**442.559**	**455.521**	**432.341**	**487.128**	**1.817.549**
a. Barang	1.632.008	1.665.064	1.704.444	1.596.370	382.522	390.584	371.577	416.627	1.561.311
a.1. Nonmigas	1.326.281	1.338.229	1.377.904	1.272.167	303.285	310.474	287.072	338.125	1.238.956
a.2. Migas	305.727	326.835	326.541	324.203	79.237	80.110	84.505	78.503	322.355
b. Jasa	278.291	280.803	282.670	263.341	60.037	64.936	60.764	70.501	256.238
8. Produk Domestik Bruto	**7.727.083**	**8.156.497,8**	**8.564.866,6**	**8.982.511,3**	**2.264.089,7**	**2.354.797,7**	**2.428.569,9**	**2.385.577,1**	**9.433.034,4**
Harga Berlaku									
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**4.768.745**	**5.321.088**	**5.915.194**	**6.477.577**	**1.691.451**	**1.719.902**	**1.791.129**	**1.807.095**	**7.009.577**
a. Makanan dan Minuman selain Restoran	1.854.629	2.049.782	2.247.451	2.490.642	663.005	677.218	701.812	708.347	2.750.382

Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran [1] - Lanjutan

Jenis penggunaan	2012	2013	2014	2015*	2016**				
					I	II	III	IV	Total
b. Pakaian	187.041	203.088	221.633	239.249	61.621	63.607	65.480	64.897	255.606
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	637.060	705.522	774.867	850.102	218.867	221.601	228.323	231.291	900.082
d. Kesehatan dan Pendidikan	327.738	359.752	394.268	433.991	113.281	115.371	121.874	122.541	473.066
e. Transportasi dan Komunikasi	1.085.926	1.246.467	1.420.289	1.508.760	385.848	389.418	409.073	411.177	1.595.515
f. Restoran dan Hotel	443.100	499.346	570.465	636.739	166.114	168.770	178.080	180.785	693.749
g. Lainnya	233.251	257.131	286.222	318.094	82.715	83.917	86.486	88.058	341.177
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**89.586**	**103.929**	**124.242**	**130.951**	**34.088**	**35.098**	**36.923**	**38.360**	**144.470**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**796.848**	**908.574**	**996.197**	**1.124.812**	**201.147**	**290.750**	**289.888**	**390.635**	**1.172.420**
a. Konsumsi Kolektif	492.963	568.131	622.774	692.657	123.153	178.293	179.214	242.831	723.492
b. Konsumsi Individu	303.885	340.443	373.423	432.155	77.994	112.457	110.674	147.804	448.929
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	**2.819.026**	**3.051.496**	**3.436.924**	**3.782.143**	**962.048**	**985.791**	**1.021.403**	**1.071.255**	**4.040.498**
a. Bangunan	2.053.896	2.242.780	2.569.122	2.844.115	725.013	735.733	768.627	807.866	3.037.240
b. Mesin dan Perlengkapan	329.147	343.132	357.548	377.519	86.722	89.272	89.820	99.060	364.874
c. Kendaraan	179.039	172.446	163.609	173.924	43.156	48.136	57.585	59.418	208.295
d. Peralatan lainnya	38.480	41.709	49.215	59.047	17.406	15.882	16.440	19.213	68.941
e. *Cultivated Biological Resources* (CBR)	159.227	177.280	201.676	225.516	63.282	65.000	57.753	60.659	246.694
f. Produk Kekayaan Intelektual	59.236	74.149	95.753	102.023	26.470	31.768	31.178	25.039	114.454
5. a. Perubahan Inventori	**202.638**	**178.091**	**220.231**	**158.754**	**80.588**	**86.769**	**94.587**	**-47.839**	**214.105**
b. Diskrepansi Statistik [1]	-27.181	58.392	-44.000	-191.993	-53.621	-56.636	-61.042	-99.116	-270.415
6. Ekspor Barang dan Jasa	**2.118.979**	**2.283.777**	**2.501.425**	**2.439.107**	**557.905**	**585.087**	**571.669**	**652.671**	**2.367.332**
a. Barang	1.918.040	2.044.358	2.223.342	2.131.563	480.495	505.485	484.493	565.000	2.035.473
a.1. Nonmigas	1.572.451	1.703.499	1.869.262	1.884.921	433.942	465.221	442.688	520.273	1.862.123
a.2. Migas	345.589	340.859	354.080	246.642	46.553	40.263	41.805	44.728	173.349
b. Jasa	200.939	239.419	278.083	307.543	77.410	79.602	87.176	87.671	331.859
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	**2.152.937**	**2.359.212**	**2.580.508**	**2.389.633**	**542.161**	**571.626**	**539.106**	**618.285**	**2.271.178**
a. Barang	1.850.040	2.012.940	2.177.253	1.963.460	443.898	466.071	441.427	503.429	1.854.825
a.1. Nonmigas	1.439.293	1.523.386	1.652.229	1.625.136	389.632	400.063	372.773	435.677	1.598.146
a.2. Migas	410.747	489.554	525.024	338.325	54.265	66.007	68.654	67.752	256.679
b. Jasa	302.897	346.272	403.255	426.172	98.263	105.555	97.678	114.856	416.353
8. Produk Domestik Bruto	**8.615.705**	**9.546.134**	**10.569.705**	**11.531.717**	**2.931.446**	**3.075.135**	**3.205.452**	**3.194.776**	**12.406.810**

Catatan:
1) Data PDB sejak Tahun 2010 menggunakan tahun dasar 2010=100

*) Data sementara
**) Data sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan) [1)]

Miliar rupiah

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**				
					I	II	III	IV	TOTAL
Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan	**1.039.441**	**1.083.142**	**1.129.052,7**	**1.171.578,7**	**286.159,5**	**321.669,8**	**336.680,9**	**265.177,0**	**1.209.687,2**
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	816.304	847.764	880.389,5	906.804,5	220.614,5	253.125,2	267.538,7	194.176,7	935.455,1
Tanaman pangan	263.076	268.268	268.426,9	280.018,8	77.897,6	82.960,1	80.606,5	45.636,5	287.100,7
Tanaman hortikultura	117.425	118.208	124.300,9	127.110,0	30.399,4	34.974,2	36.229,7	28.923,8	130.527,1
Tanaman perkebunan	301.020	319.533	338.502,2	345.164,9	72.979,4	95.212,0	109.302,7	79.740,7	357.234,8
Peternakan	119.250	125.302	132.221,1	136.936,4	34.873,1	35.229,7	36.351,6	36.005,2	142.459,6
Jasa pertanian dan perburuan	15.534	16.453	16.938,4	17.574,4	4.465,0	4.749,2	5.048,2	3.870,5	18.132,9
Kehutanan dan penebangan kayu	58.872	59.229	59.573,5	60.757,4	13.468,1	16.010,9	15.011,6	15.218,3	59.708,9
Perikanan	164.264	176.149	189.089,7	204.016,8	52.076,9	52.533,7	54.130,6	55.782,0	214.523,2
Pertambangan dan penggalian	**771.562**	**791.054**	**794.489,5**	**767.327,2**	**195.814,8**	**191.093,0**	**192.193,1**	**196.384,7**	**775.485,6**
Pertambangan minyak dan gas bumi	323.632	313.328	307.161,7	307.325,8	80.220,9	78.452,3	78.623,9	78.206,4	315.503,5
Pertambangan batu bara dan lignit	230.589	247.595	251.073,6	232.725,3	57.630,2	54.441,1	53.582,6	57.444,7	223.098,6
Pertambangan biji logam	91.615	98.609	98.257,9	87.702,9	21.128,7	21.358,1	23.142,1	23.674,3	89.303,2
Pertambangan dan penggalian lainnya	125.726	131.523	137.996,3	139.573,2	36.835,0	36.841,5	36.844,5	37.059,3	147.580,3
Industri pengolahan	**1.697.787**	**1.771.962**	**1.854.256,7**	**1.934.533,2**	**490.175,7**	**507.499,7**	**511.699,1**	**508.180,6**	**2.017.555,1**
Industri batubara dan pengilangan migas	227.456	221.450	216.750,8	214.312,0	55.378,0	55.427,5	55.799,5	54.657,6	221.262,6
Industri makanan dan minuman	441.342	459.283	502.856,2	540.756,4	136.633,8	149.825,5	152.327,3	147.732,4	586.519,0
Pengolahan tembakau	73.011	72.814	78.878,7	83.798,7	20.433,6	21.213,9	21.523,8	22.003,2	85.174,5
Industri tekstil dan pakaian jadi	108.754	115.913	117.723,4	112.078,9	28.014,1	28.314,2	27.721,4	27.882,0	111.931,7
Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	20.665	21.746	22.967,7	23.879,2	6.279,8	6.506,4	6.409,5	6.630,4	25.826,1
Industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	54.787	58.181	61.742,5	60.735,4	15.824,4	15.729,6	15.140,0	15.137,1	61.831,1
Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	68.590	68.229	70.670,1	70.556,8	17.239,1	18.536,9	18.460,6	17.843,0	72.079,6
Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	140.102	147.249	153.191,9	164.843,0	41.433,7	43.079,4	44.520,0	44.836,4	173.869,5
Industri karet, barang dari karet dan plastik	73.307	71.946	72.777,3	76.442,1	17.525,3	17.467,7	17.132,6	17.938,6	70.064,2
Industri barang galian bukan logam	59.252	61.229	62.706,8	66.485,2	17.006,0	17.199,4	17.933,8	17.972,9	70.112,1
Industri logam dasar	60.889	67.972	72.059,1	76.532,1	20.028,9	19.320,1	18.560,2	19.206,2	77.115,4
Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	158.804	173.452	178.544,2	192.528,0	49.947,0	49.163,5	50.868,6	50.912,5	200.891,6
Industri mesin dan perlengkapan	25.437	24.164	26.259,7	28.250,5	7.441,4	7.538,0	7.536,7	7.161,3	29.677,4
Industri alat angkutan	148.905	171.166	178.022,5	182.289,1	46.910,7	47.813,9	47.636,1	48.164,2	190.524,9
Industri furnitur	21.589	22.375	23.179,9	24.377,4	6.020,2	6.271,5	6.098,4	6.102,4	24.492,5
Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	14.897	14.794	15.925,9	16.668,4	4.059,7	4.092,2	4.030,6	4.000,4	16.182,9
Pengadaan listrik	**84.393**	**88.805**	**94.047,2**	**94.894,8**	**24.425,4**	**25.208,1**	**24.673,3**	**25.703,1**	**100.009,9**
Ketenagalistrikan	70.827	75.051	79.581,5	81.407,0	21.093,3	21.907,9	21.369,0	22.210,1	86.580,3
Pengadaan gas dan produksi es	13.567	13.754	14.465,7	13.487,8	3.332,1	3.300,2	3.304,3	3.493,0	13.429,6
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	**6.330**	**6.540**	**6.882,5**	**7.369,0**	**1.870,9**	**1.907,7**	**1.916,3**	**1,939.7**	**7.634,6**

Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan) [1] - Lanjutan

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**				
					I	II	III	IV	TOTAL
Konstruksi	**728.226**	**772.720**	**826.615,6**	**879.163,9**	**220.736,9**	**224.166,1**	**234.722,7**	**245.436,8**	**925.062,5**
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor	**1.067.912**	**1.119.272**	**1.177.297,5**	**1.207.751,1**	**302.856,8**	**314.954,7**	**319.337,7**	**318.075,7**	**1.255.224,9**
Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya	203.431	218.291	229.228,4	229.967,5	58.891,0	59.744,0	59.622,6	60.341,9	238.599,5
Pedagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda	864.481	900.981	948.069,1	977.783,6	243.965,8	255.210,7	259.715,1	257.733,8	1.016.625,4
Transportasi dan pergudangan	**284.663**	**304.506**	**326.933,0**	**348.773,8**	**89.459,5**	**91.779,8**	**96.730,7**	**97.794,4**	**375.764,4**
Angkutan rel	2.202	2.337	2.823,1	2.948,6	736,6	740,8	781,2	792,0	3.050,6
Angkutan darat	155.852	167.560	180.367,4	193.257,0	50.254,3	50.920,3	53.103,4	53.645,0	207.923,0
Angkutan laut	25.601	27.372	29.473,7	30.173,7	7.263,2	7.590,1	7.859,3	7.838,3	30.550,9
Angkutan sungai, danau dan penyebrangan	9.057	9.469	10.117,6	10.222,2	2.491,1	2.531,3	2.646,8	2.702,7	10.371,9
Angkutan Udara	47.030	49.263	52.255,1	57.188,9	14.863,7	15.567,7	17.010,8	17.341,6	64.783,8
Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir	44.921	48.505	51.896,1	54.983,4	13.850,6	14.429,6	15.329,2	15.474,8	59.084,2
Penyediaan akomodasi dan makan minum	**228.233**	**243.748**	**257.815,5**	**268.922,4**	**69.193,3**	**69.943,2**	**70.882,1**	**72.181,8**	**282.200,4**
Penyediaan akomodasi	43.567	47.700	51.426,7	54.340,3	13.929,3	14.121,8	14.344,3	14.836,8	57.232,2
Penyediaan makan minum	184.665	196.049	206.388,8	214.582,1	55.264,0	55.821,4	56.537,8	57.345,0	224.968,2
Informasi dan komunikasi	**316.279**	**349.150**	**384.475,6**	**421.741,4**	**109.401,8**	**113.754,9**	**116.990,0**	**119.022,9**	**459.169,6**
Jasa keuangan	**280.896**	**305.515**	**319.825,5**	**347.308,6**	**92.058,2**	**93.905,4**	**96.525,3**	**95.745,8**	**378.234,7**
Jasa perantara keuangan	175.168	192.098	197.712,2	216.631,2	58.155,4	58.746,1	61.032,7	59.962,2	237.896,4
Asuransi dan dana pensiun	60.045	64.661	69.794,6	74.398,1	19.059,5	20.042,5	20.060,6	20.067,6	79.230,2
Jasa keuangan lainnya	38.868	41.372	44.464,7	48.013,8	12.763,0	12.971,0	13.239,6	13.475,5	52.449,1
Jasa penunjang keuangan	6.815	7.384	7.854,0	8.265,5	2.080,3	2.145,8	2.192,4	2.240,5	8.659,0
Real estate	**229.254**	**244.238**	**256.440,2**	**266.979,6**	**68.888,1**	**69.557,3**	**69.868,9**	**70.158,6**	**278.472,9**
Jasa perusahaan	**116.293**	**125.491**	**137.795,3**	**148.395,5**	**38.997,4**	**39.480,4**	**40.097,8**	**40.746,1**	**159.321,7**
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	**282.235**	**289.449**	**296.329,7**	**310.054,2**	**77.810,0**	**78.086,4**	**79.379,7**	**84.676,9**	**319.953,0**
Jasa pendidikan	**232.704**	**250.016**	**263.685,0**	**283.020,1**	**68.777,0**	**73.073,0**	**72.139,8**	**79.887,8**	**293.877,6**
Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya	**78.380**	**84.621**	**91.357,1**	**97.463,0**	**24.828,5**	**25.147,3**	**25.306,5**	**27.056,0**	**102.338,3**
Jasa lainnya	**115.675**	**123.083**	**134.070,1**	**144.902,4**	**37.919,7**	**38.665,2**	**39.417,8**	**40.195,8**	**156.198,5**
Nilai tambah bruto pada harga dasar	7.560.263	7.953.312	8.351.368,7	8.700.178,9	2.199.373,5	2.279.892,0	2.328.561,7	2.288.363,7	9.096.190,9
Pajak kurang subsidi pada produk	166.821	203.186	213.497,9	282.332,4	64.716,2	74.905,7	100.008,2	97.213,4	336.843,5
PRODUK DOMESTIK BRUTO	**7.727.083**	**8.156.498**	**8.564.866,6**	**8.982.511,3**	**2.264.089,7**	**2.354.797,7**	**2.428.569,9**	**2.385.577,1**	**9.433.034,4**

1) Data PDB sejak Tahun 2010 menggunakan tahun dasar 2010=100
*) Data sementara **) Data sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3. Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku) [1)]

Miliar rupiah

Lapangan Usaha	Harga Konstan				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan	**1.152.262**	**1.275.048**	**1.409.656**	**1.555.747**	**1.668.998**
Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	902.126	994.778	1.089.550	1.183.971	1.266.361
Tanaman pangan	305.671	332.112	343.252	397.409	424.898
Tanaman hortikultura	125.108	137.369	160.569	174.454	186.909
Tanaman perkebunan	323.362	358.172	398.261	405.292	429.682
Peternakan	130.614	147.982	167.008	184.152	200.611
Jasa pertanian dan perburuan	17.372	19.143	20.460	22.666	24.261
Kehutanan dan penebangan kayu	65.882	69.599	74.618	82.860	85.545
Perikanan	184.254	210.671	245.488	288.917	317.092
Pertambangan dan penggalian	**1.000.308**	**1.050.746**	**1.039.423**	**881.694**	**893.947**
Pertambangan minyak dan gas bumi	492.894	520.088	509.783	384.516	369.354
Pertambangan batu bara dan lignit	270.519	282.193	259.767	229.974	231.698
Pertambangan biji logam	100.845	98.468	93.615	74.264	73.301
Pertambangan dan penggalian lainnya	136.050	149.996	176.258	192.940	219.595
Industri pengolahan	**1.848.151**	**2.007.427**	**2.227.584**	**2.418.376**	**2.544.576**
Industri batubara dan pengilangan migas	298.403	314.216	337.201	320.330	286.061
Industri makanan dan minuman	457.773	491.142	562.017	647.072	741.734
Pengolahan tembakau	79.340	82.684	95.668	108.652	117.163
Industri tekstil dan pakaian jadi	116.558	129.912	139.032	139.394	143.481
Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	21.687	24.810	28.600	31.441	35.145
Industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	60.629	66.958	76.072	77.993	80.133
Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	73.665	74.319	84.373	87.760	89.246
Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	143.460	157.042	180.037	209.788	222.597
Industri karet, barang dari karet dan plastik	76.425	76.466	80.263	85.951	79.243
Industri barang galian bukan logam	63.028	69.401	76.852	83.371	89.048
Industri logam dasar	64.557	74.495	82.119	90.159	89.352
Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	162.970	186.195	198.081	226.678	241.794
Industri mesin dan perlengkapan	24.832	25.504	33.079	37.288	40.171
Industri alat angkutan	166.391	192.768	207.401	220.511	236.568
Industri furnitur	22.487	24.931	28.118	31.340	32.126
Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	15.947	16.584	18.673	20.649	20.716
Pengadaan listrik	**95.638**	**98.687**	**114.905**	**131.250**	**142.772**
Ketenagalistrikan	73.350	74.358	84.151	102.069	113.049
Pengadaan gas dan produksi es	22.288	24.329	30.754	29.182	29.723
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	**6.604**	**7.209**	**7.841**	**8.546**	**8.948**
Konstruksi	**805.208**	**905.991**	**1.041.950**	**1.177.084**	**1.287.659**
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor	**1.138.484**	**1.261.146**	**1.419.239**	**1.535.288**	**1.635.960**
Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya	228.667	258.942	292.839	311.606	334.100
Pedagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda	909.818	1.002.203	1.126.400	1.223.682	1.301.860
Transportasi dan pergudangan	**313.156**	**375.306**	**466.969**	**579.060**	**647.154**

Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku) [1] - Lanjutan

Lapangan Usaha	Harga Konstan				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
Angkutan rel	2.783	3.143	4.228	6.358	6.928
Angkutan darat	159.226	190.201	225.882	283.222	305.024
Angkutan laut	26.615	30.062	36.075	39.307	39.907
Angkutan sungai, danau dan penyebrangan	9.780	11.165	13.137	14.267	14.185
Angkutan udara	62.201	77.722	108.792	142.536	176.549
Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir	52.552	63.014	78.855	93.370	104.561
Penyediaan akomodasi dan makan minum	**252.612**	**289.498**	**321.062**	**341.556**	**362.232**
Penyediaan akomodasi	51.052	63.489	74.255	80.791	86.108
Penyediaan makan minum	201.560	226.009	246.807	260.765	276.125
Informasi dan komunikasi	**311.362**	**341.009**	**369.457**	**405.992**	**449.141**
Jasa keuangan	**320.534**	**370.132**	**408.439**	**465.020**	**520.926**
Jasa perantara keuangan	204.479	237.170	256.029	291.510	328.161
Asuransi dan dana pensiun	65.882	76.005	87.337	99.041	109.269
Jasa keuangan lainnya	42.688	48.279	55.245	63.465	71.825
Jasa penunjang keuangan	7.485	8.679	9.829	11.003	11.672
Real estate	**237.914**	**264.275**	**294.573**	**327.601**	**348.298**
Jasa perusahaan	**127.724**	**144.604**	**165.991**	**190.268**	**211.624**
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	**340.568**	**372.195**	**404.630**	**450.233**	**478.636**
Jasa pendidikan	**270.372**	**307.862**	**341.818**	**388.042**	**418.258**
Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya	**86.235**	**96.881**	**109.147**	**122.928**	**132.428**
Jasa lainnya	**122.566**	**140.316**	**163.549**	**190.580**	**212.220**
PRODUK DOMESTIK BRUTO	**8.615.705**	**9.546.134**	**10.569.705**	**11.531.717**	**12.406.810**

1) Data PDB sejak Tahun 2010 menggunakan tahun dasar 2010=100
*) Data sementara
**) Data sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4. Perkembangan Upah Minimum Provinsi per Bulan

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nanggroe Aceh Darussalam	1.350.000	1.400.000	1.550.000	1.750.000	1.900.000	2.118.500
Sumatera Utara	1.035.500	1.200.000	1.375.000	1.505.850	1.625.000	1.811.875
Sumatera Barat	1.055.000	1.150.000	1.350.000	1.490.000	1.615.000	1.800.725
Riau	1.120.000	1.238.000	1.400.000	1.700.000	1.878.000	2.095.000
Kepulauan Riau	975.000	1.015.000	1.365.087	1.665.000	1.954.000	2.178.710
Jambi	1.028.000	1.142.000	1.300.000	1.502.230	1.710.000	1.906.650
Sumatera Selatan	1.048.440	1.195.220	1.630.000	1.825.600	1.974.346	2.206.000
Bangka Belitung	1.024.000	1.110.000	1.265.000	1.640.000	2.100.000	2.341.500
Bengkulu	815.000	930.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.605.000
Lampung	855.000	975.000	1.150.000	1.399.037	1.581.000	1.763.000
Banten	1.000.000	1.042.000	1.170.000	1.325.000	1.600.000	1.784.000
DKI Jakarta	1.290.000	1.529.150	2.200.000	2.441.301	2.700.000	3.100.000
Jawa Barat	732.000	780.000	850.000	1.000.000	1.131.862	2.250.000
Jawa Tengah	675.000	720.000	830.000	910.000	1.100.000	1.265.000
D.I. Yogyakarta	808.000	892.660	947.114	988.500	1.108.249	1.235.700
Jawa Timur	705.000	745.000	866.250	1.000.000	1.150.000	1.283.000
Bali	890.000	967.500	1.181.000	1.542.600	1.621.172	1.807.600
Nusa Tenggara Barat	950.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.330.000	1.482.950
Nusa Tenggara Timur	850.000	925.000	1.010.000	1.150.000	1.250.000	1.425.000
Kalimantan Barat	802.500	900.000	1.060.000	1.380.000	1.560.000	1.739.400
Kalimantan Tengah	1.134.580	1.327.459	1.550.000	1.723.970	1.896.367	2.057.550
Kalimantan Selatan	1.126.000	1.225.000	1.337.000	1.620.000	1.870.000	2.085.050
Kalimantan Timur	1.084.000	1.177.000	1.752.073	1.886.315	2.026.126	2.161.253
Kalimantan Utara	-	-	-	-	2.026.126	2.175.340
Sulawesi Utara	1.050.000	1.250.000	1.550.000	1.900.000	2.150.000	2.400.000
Sulawesi Tengah	827.500	885.000	995.000	1.250.000	1.500.000	1.670.000
Sulawesi Selatan	1.100.000	1.200.000	1.440.000	1.800.000	2.000.000	2.250.000
Sulawesi Tenggara	930.000	1.032.300	1.125.207	1.400.000	1.652.000	1.850.000
Sulawesi Barat	1.006.000	1.127.000	1.165.000	1.400.000	1.655.500	1.864.000
Maluku	900.000	975.000	1.275.000	1.415.000	1.650.000	1.775.000
Maluku Utara	889.350	960.498	1.200.622	1.440.746	1.577.617	1.681.266
Gorontalo	762.500	837.500	1.175.000	1.325.000	1.600.000	1.875.000
Papua	1.403.000	1.585.000	1.710.000	1.900.000	2.193.000	2.435.000
Papua Barat	1.410.000	1.450.000	1.720.000	1.870.000	2.015.000	2.237.000

Keterangan:
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.PER-01/MEN/1999 tahun 1999, setiap awal tahun Upah Minimum Regional Tingkat I atau Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan Daerah masing-masing provinsi

Sumber:
- Kemenakertrans, Direktorat Pengupahan & Jamsostek - Ditjen PHI
- 2011 - 2014 diperoleh dari Badan Pusat Statistik
- 2015-2016 Berdasarkan Perda Masing-masing Provinsi

Tabel 5. Indeks Harga Konsumen Indonesia

Akhir periode [1]	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan Rekreasi & Olaharaga	Transpor dan Komunikasi	Umum	Perubahan Indeks Umum
2001	290,74	278,75	208,57	277,90	262,99	224,12	221,47	249,15	12,55
2002	317,29	304,35	235,08	285,38	277,79	248,43	255,85	274,13	10,03
2003	311,84	323,35	256,74	305,60	293,54	277,52	266,34	287,99	5,06
2004 [2]	111,10	115,70	124,19	113,36	113,06	126,20	114,25	116,86	6,40
2005	126,55	131,56	141,50	121,21	119,99	136,60	165,38	136,86	17,11
2006	142,92	139,93	148,34	129,50	127,03	147,70	167,06	145,89	6,60
2007	159,01	148,90	155,58	140,41	132,51	160,74	169,15	155,50	6,59
2008 [3]	122,70	114,98	113,02	112,27	109,13	109,84	107,26	113,86	11,06
2009	127,46	123,96	115,09	119,01	113,38	114,11	103,32	117,03	0,33
2010	147,39	132,59	119,79	126,76	115,86	117,86	106,10	125,17	0,92
2011	152,76	138,57	123,95	136,35	120,79	123,94	108,14	129,91	0,57
2012									4,30
Januari	155,59	139,47	124,62	136,24	121,40	124,12	108,39	130,90	0,76
Februari	154,45	139,95	124,96	137,90	121,58	124,22	108,46	130,96	0,05
Maret	153,94	140,59	125,21	138,11	121,77	124,31	108,57	131,05	0,07
April	154,13	141,46	125,51	137,48	122,05	124,39	108,80	131,32	0,21
Mei	153,90	142,03	125,74	137,18	122,27	124,41	108,88	131,41	0,07
Juni	156,32	142,71	126,19	137,71	122,53	124,55	108,91	132,23	0,62
Juli	158,94	143,98	126,39	137,96	123,04	125,25	109,25	133,16	0,70
Agustus	161,29	144,94	126,72	139,14	123,34	127,38	110,89	134,43	0,95
September	159,80	145,76	127,16	141,19	123,51	128,74	110,00	134,45	0,01
Oktober	159,12	146,32	127,69	142,52	123,82	129,01	109,98	134,67	0,16
November	158,91	146,61	127,88	142,38	124,08	129,09	110,23	134,76	0,07
Desember	161,44	147,04	128,10	142,72	124,30	129,16	110,52	135,49	0,54
2013									8,38
Januari	166,91	147,71	128,82	143,07	124,66	129,22	110,21	136,88	1,03
Februari	170,39	148,41	129,87	142,23	125,36	129,47	110,30	137,91	0,75
Maret	173,87	149,00	130,14	141,23	125,66	129,62	110,51	138,78	0,63
April	172,48	149,45	130,68	139,63	125,94	129,82	110,62	138,64	-0,10
Mei	171,04	149,98	131,66	137,92	126,23	129,90	110,67	138,60	-0,03
Juni	173,04	150,98	131,93	137,52	126,52	129,95	114,88	140,03	1,03
Juli	182,48	153,32	132,51	137,39	127,02	130,85	125,91	144,63	3,29
Agustus	185,67	154,37	133,39	139,88	127,49	132,63	127,10	146,25	1,12
September	180,32	155,57	134,20	144,06	127,83	133,57	126,09	145,74	-0,35
Oktober	179,20	156,42	134,55	143,26	128,25	133,98	126,76	145,87	0,09
November	178,36	156,85	135,47	143,22	128,69	134,13	126,79	146,04	0,12
Desember	179,77	157,99	136,07	143,46	128,90	134,21	127,50	146,84	0,55
2014 [4]									8,36
Januari	117,81	110,71	108,72	103,88	105,76	105,98	113,72	110,99	1,07
Februari	118,23	111,19	108,90	104,47	106,06	106,16	113,89	111,28	0,26
Maret	117,71	111,67	109,07	104,55	106,50	106,31	114,16	111,37	0,08
April	116,43	112,17	109,34	104,29	107,15	106,56	114,39	111,35	-0,02
Mei	116,26	112,56	109,59	104,42	107,59	106,63	114,63	111,53	0,16
Juni	117,41	112,92	110,01	104,73	107,98	106,72	114,85	112,01	0,43
Juli	119,69	114,05	110,50	105,62	108,40	107,20	115,86	113,05	0,93
Agustus	120,12	114,64	111,31	105,86	108,76	108,89	115,72	113,58	0,47

Indeks Harga Konsumen Indonesia - Lanjutan

Akhir periode [1]	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan Rekreasi & Olaharaga	Transpor dan Komunikasi	Umum	Perubahan Indeks Umum
September	119,92	115,23	112,17	105,68	109,07	109,63	115,44	113,89	0,27
Oktober	120,22	115,73	113,34	105,90	109,72	109,88	115,62	114,42	0,47
November	122,80	116,55	113,90	105,81	110,19	109,97	120,58	116,14	1,50
Desember	126,76	118,84	115,55	106,49	111,00	110,37	127,27	119,00	2,46
2015									**3,35**
Januari	127,52	119,61	116,48	107,39	111,73	110,66	122,13	118,71	-0,24
Februari	125,65	120,15	116,96	107,95	112,17	110,81	120,26	118,28	-0,36
Maret	124,73	120,88	117,30	107,86	112,89	110,92	121,19	118,48	0,17
April	123,75	121,48	117,56	108,12	113,32	110,98	123,37	118,91	0,36
Mei	125,47	122,09	117,80	108,37	113,70	111,05	123,62	119,50	0,50
Juni	127,48	122,76	118,07	108,67	114,06	111,13	123,75	120,14	0,54
Juli	130,06	123,39	118,22	109,09	114,47	111,51	125,90	121,26	0,93
Agustus	131,24	124,26	118,41	109,10	115,27	113,43	125,17	121,73	0,39
September	129,83	124,75	118,65	110,01	115,78	114,44	124,67	121,67	-0,05
Oktober	128,46	125,25	118,76	110,29	116,11	114,62	124,69	121,57	-0,08
November	128,89	125,84	118,94	110,04	116,62	114,68	124,76	121,82	0,21
Desember	133,01	126,47	119,41	110,14	116,90	114,75	125,32	122,99	0,96
2016									**3,02**
Januari	135,93	127,11	120,04	110,43	117,32	114,92	123,93	123,62	0,51
Februari	135,14	127,91	119,50	111,14	117,63	114,99	123,74	123,51	-0,09
Maret	136,07	128,37	119,42	111,75	117,98	115,02	123,47	123,75	0,19
April	134,79	128,82	119,26	112,00	118,35	115,05	121,50	123,19	-0,45
Mei	135,19	129,57	119,28	112,49	118,67	115,08	121,76	123,48	0,24
Juni	137,38	130,32	119,46	113,28	119,07	115,12	122,53	124,29	0,66
Juli	138,92	131,03	119,75	113,78	119,51	115,71	124,03	125,15	0,69
Agustus	137,98	131,57	120,24	114,24	119,98	117,07	122,76	125,13	-0,02
September	137,88	132,02	120,59	114,39	120,38	117,68	122,99	125,41	0,22
Oktober	137,59	132,34	121,26	114,04	120,73	117,80	122,95	125,59	0,14
November	139,88	132,67	121,46	114,03	121,09	117,82	123,04	126,18	0,47
Desember	140,58	133,27	121,68	113,50	121,48	117,88	124,42	126,71	0,42
2017									
Januari	141,51	133,89	123,01	113,87	122,09	118,02	127,35	127,94	0,97

1) Angka tahunan/triwulanan adalah angka akhir periode yang bersangkutan
2) Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2002 = 100 di 45 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok
3) Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2007 = 100 di 66 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok pada Juni 2008
4) Sejak Januari 2014, Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2012 = 100 di 82 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 6. Angka Inflasi di 82 Kota

Kota	2010 [1)]	2011 [1)]	2012 [1)]	2013 [1)]	2014 [2)]	2015 [2)]	2016 [2)]
Meulaboh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,20	0,58	3,77
Banda Aceh	4,64	3,32	0,06	6,39	7,83	1,27	3,13
Lhokseumawe	7,19	3,55	0,39	8,27	8,53	2,44	5,60
Sibolga	11,83	3,71	3,30	10,08	8,36	3,34	7,39
Pematang Siantar	9,68	4,25	4,73	12,02	7,94	3,36	4,76
Medan	7,65	3,54	3,79	10,09	8,24	3,32	6,60
Padang Sidempuan	7,42	4,66	3,54	7,82	7,38	1,66	4,28
Padang	7,84	5,37	4,16	10,87	11,90	0,85	5,02
Bukit Tinggi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,24	2,79	3,93
Tembilahan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,06	2,06	2,58
Pekanbaru	7,00	5,09	3,35	8,83	8,53	2,71	4,19
Dumai	9,05	3,09	3,21	8,60	8,53	2,63	3,98
Bungo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,99	1,29	3,11
Jambi	10,52	2,76	4,22	8,74	8,72	1,37	4,54
Palembang	6,02	3,78	2,72	7,04	8,38	3,05	3,68
Lubuk Linggau	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,34	3,47	2,74
Bengkulu	9,08	3,96	4,61	9,94	10,85	3,25	5,00
Bandar Lampung	9,95	4,24	4,30	7,56	8,36	4,65	2,75
Metro	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,50	2,67	2,92
Tanjung Pandan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,15	0,88	4,92
Pangkal Pinang	9,36	5,00	6,57	8,71	6,81	4,66	7,78
Batam	7,40	3,76	2,02	7,81	7,61	4,73	3,61
Tanjung Pinang	6,17	3,32	3,92	10,09	7,49	2,46	3,06
Jakarta	6,21	3,97	4,52	8,00	8,95	3,30	2,37
Bogor	6,57	2,85	4,06	8,55	6,83	2,70	3,60
Sukabumi	5,43	4,26	3,98	8,03	8,38	2,20	2,57
Bandung	4,53	2,75	4,02	7,97	7,75	3,93	2,93
Cirebon	6,70	3,20	3,36	7,86	7,08	1,56	1,87
Bekasi	7,88	3,45	3,46	9,46	7,68	2,22	2,47
Depok	7,97	2,94	4,11	10,97	7,49	1,87	2,60
Tasikmalaya	5,56	4,17	3,87	6,89	8,09	3,53	2,75
Cilacap	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,18	2,63	2,77
Purwokerto	6,04	3,40	4,73	8,50	7,09	2,52	2,42
Kudus	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,59	3,28	2,32
Surakarta	6,65	1,93	2,87	8,32	8,01	2,56	2,15
Semarang	7,11	2,87	4,85	8,19	8,52	2,56	2,32
Tegal	6,73	2,58	3,10	5,80	7,40	3,95	2,71
Yogyakarta	7,38	3,88	4,31	7,32	6,59	3,09	2,29
Jember	7,09	2,43	4,49	7,21	7,53	2,31	1,93
Banyuwangi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,59	2,15	1,91
Sumenep	6,75	4,18	5,05	6,62	8,04	2,62	2,19
Kediri	6,80	3,62	4,63	8,05	7,49	1,71	1,30
Malang	6,70	4,05	4,60	7,92	8,14	3,32	2,62
Probolinggo	6,68	3,78	5,88	7,98	6,79	2,11	1,53
Madiun	6,54	3,49	3,51	7,52	7,39	2,75	2,25
Surabaya	7,33	4,72	4,39	7,52	7,90	3,43	3,22
Serang	6,18	2,78	4,41	9,16	10,07	4,67	3,26
Tangerang	6,08	3,78	4,44	10,02	9,81	4,28	2,65
Cilegon	6,12	2,35	3,91	7,98	11,37	3,94	4,22
Singaraja	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,32	2,97	4,57
Denpasar	8,10	3,75	4,71	7,35	8,03	2,70	2,94
Mataram	11,07	6,38	4,10	9,27	7,18	3,25	2,47
Bima	6,35	7,19	3,61	10,42	7,37	4,11	3,11

Angka Inflasi di 82 Kota - Lanjutan

Kota	2010 1)	2011 1)	2012 1)	2013 1)	2014 2)	2015 2)	2016 2)
Maumere	8,48	6,59	6,49	6,24	4,00	3,89	3,62
Kupang	9,97	4,32	5,10	8,84	8,32	5,07	2,31
Pontianak	8,52	4,91	6,62	9,48	9,38	6,17	3,88
Singkawang	7,10	6,72	4,21	6,15	9,65	4,00	2,58
Sampit	9,53	3,60	4,69	7,25	7,90	5,72	2,46
Palangkaraya	9,49	5,28	6,73	6,45	6,63	4,20	1,91
Tanjung	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,80	6,69	2,18
Banjarmasin	9,06	3,98	5,96	6,98	7,16	5,03	3,68
Balikpapan	7,38	6,45	6,41	8,56	7,43	6,26	4,13
Samarinda	7,00	6,23	4,81	10,37	6,74	4,24	2,83
Tarakan	7,92	6,43	5,99	10,35	11,91	3,42	4,31
Manado	6,28	0,67	6,04	8,12	9,67	5,56	0,35
Palu	6,40	4,47	5,87	7,57	8,85	4,17	1,49
Bulukumba	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,45	2,17	1,48
Watampone	6,74	3,94	3,65	6,86	8,22	0,97	1,50
Makassar	6,82	2,87	4,57	6,24	8,51	5,18	3,18
Pare-pare	5,78	1,60	3,49	6,31	9,38	1,58	2,11
Palopo	3,99	3,35	4,11	5,25	8,95	3,38	2,74
Kendari	3,87	5,09	5,25	5,92	7,40	1,64	3,07
Bau-bau	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,37	3,95	1,71
Gorontalo	7,43	4,08	5,31	5,84	6,14	4,30	1,30
Mamuju	5,12	4,91	3,28	5,91	7,88	5,07	2,23
Ambon	8,78	2,85	6,73	8,81	6,81	5,92	3,28
Tual	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,48	8,58	2,97
Ternate	5,32	4,52	3,29	9,78	9,34	4,52	1,91
Manokwari	4,68	3,64	4,88	4,63	5,70	2,77	5,75
Sorong	8,13	0,90	5,12	7,93	6,84	6,17	2,95
Merauke	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,31	5,76	0,82
Jayapura	4,48	3,40	4,52	8,27	7,98	2,79	4,13
Inflasi Nasional	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02

Keterangan:
1) Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2007 = 100 di 66 kota
2) Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2012 = 100 di 82 kota

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 7. Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia

Kelompok	2010 1)	2011 2)	2012	2013	2014	2015	Perubahan 2015 thd 2104	2016	Perubahan 2016 thd 2105
Pertanian	231,43	248,78	263,25	287,44	175,05	240,68	37,49	358,41	48,92
Pertambangan dan penggalian	212,31	221,50	231,20	239,05	117,22	119,87	2,26	118,43	-1,20
Industri	172,01	180,32	187,48	194,09	122,83	128,89	4,93	133,92	3,90
Impor	160,90	177,37	189,17	199,25	137,37	134,19	-2,32	128,10	-4,53
Ekspor	137,80	154,11	163,15	168,71	138,73	130,46	-5,96	133,31	2,18
Migas	124,52	173,11	194,38	202,32	168,10	110,65	-34,18	94,42	-14,67
Nonmigas	142,05	148,03	153,16	157,95	129,07	136,98	6,13	146,11	6,66
Indeks Umum	**170,59**	**183,31**	**192,69**	**201,95**	**132,44**	**138,26**	**4,39**	**149,16**	**7,89**

1) Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2005 = 100, sejak Januari 2009

2) Data tahun 2011 telah menggunakan tahun dasar 2010 = 100. Pada bulan November-Desember 2013, BPS tidak menerbitkan angka IHPB ekspor Migas

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 8. Neraca Pembayaran Indonesia

Juta dolar AS

KETERANGAN	2013	2014	2015	2016				
				I*	II*	III*	IV**	
I. Transaksi Berjalan	**-29.114,92**	**-27.509,87**	**-17.760,61**	**-4.650,88**	**-5.203,40**	**-4.680,19**	**-1.812,45**	**-16.346,92**
A. Barang	5.833,23	6.982,57	14.048,57	2.648,30	3.749,00	3.923,39	5.069,54	15.390,22
- Ekspor, fob	182.089,23	175.292,79	149.124,48	33.039,20	36.281,77	34.890,73	40.229,36	144.441,06
- Impor, fob	-176.255,99	-168.310,22	-135.075,91	-30.390,91	-32.532,77	-30.967,34	-35.159,82	-129.050,84
1. Barang Dagangan Umum	4.068,67	5.474,03	13.319,03	2.340,05	3.516,90	3.706,30	5.239,51	14.802,76
- Ekspor	180.293,99	173.759,96	147.724,65	32.687,09	35.976,63	34.553,81	39.843,31	143.060,84
- Impor	-176.225,32	-168.285,94	-134.405,63	-30.347,04	-32.459,73	-30.847,51	-34.603,80	-128.258,08
a. Nonmigas	13.777,23	17.303,64	19.022,52	3.243,58	4.958,90	5.041,89	6.381,06	19.625,43
- Ekspor	146.705,57	145.007,89	130.541,01	29.835,60	32.752,08	31.292,26	36.293,50	130.173,44
- Impor	-132.928,34	-127.704,25	-111.518,49	-26.592,02	-27.793,18	-26.250,37	-29.912,44	-110.548,01
b. Migas	-9.708,56	-11.829,61	-5.703,49	-903,53	-1.442,00	-1.335,58	-1.141,55	-4.822,67
- Ekspor	33.588,42	28.752,07	17.183,65	2.851,49	3.224,55	3.261,55	3.549,81	12.887,40
- Impor	-43.296,98	-40.581,68	-22.887,14	-3.755,02	-4.666,55	-4.597,13	-4.691,36	-17.710,07
2. Barang Lainnya	1.764,56	1.508,54	729,54	308,25	232,10	217,09	-169,97	587,46
- Ekspor	1.795,23	1.532,83	1.399,83	352,11	305,14	336,92	386,06	1.380,22
- Impor	-30,67	-24,29	-670,29	-43,87	-73,04	-119,83	-556,03	-792,76
B. Jasa - jasa	-12.071,65	-10.009,69	-8.696,67	-1.040,94	-2.272,68	-1.614,27	-1.558,42	-6.486,30
- Ekspor	22.944,08	23.530,93	22.220,88	5.945,77	5.429,41	5.974,23	6.801,46	24.150,87
- Impor	-35.015,73	-33.540,62	-30.917,55	-6.986,71	-7.702,08	-7.588,50	-8.359,88	-30.637,17
C. Pendapatan Primer	-27.054,65	-29.702,61	-28.379,13	-7.493,10	-7.903,18	-8.012,85	-6.272,19	-29.681,33
- Penerimaan	2.602,36	2.129,61	2.821,70	515,30	691,84	646,46	989,33	2.842,93
- Pembayaran	-29.657,01	-31.832,22	-31.200,83	-8.008,40	-8.595,02	-8.659,31	-7.261,52	-32.524,25
D. Pendapatan Sekunder	4.178,15	5.219,87	5.508,49	1.234,86	1.223,46	1.023,54	948,63	4.430,49
- Penerimaan	8.508,30	9.373,54	10.361,58	2.479,39	2.563,30	2.414,83	2.348,40	9.805,92
- Pembayaran	-4.330,15	-4.153,67	-4.853,09	-1.244,53	-1.339,84	-1.391,29	-1.399,78	-5.375,44
II. Transaksi Modal	**45,29**	**26,57**	**16,63**	**0,32**	**4,24**	**4,92**	**0,00**	**9,49**
- Penerimaan	45,29	26,57	16,63	0,32	4,24	4,92	0,00	9,49
- Pembayaran	-	0	0	0	0	0	0	0
III. Transaksi Finansial [1)]	**21.964,42**	**44.916,08**	**16.843,10**	**4.378,31**	**7.502,13**	**10.550,96**	**6.756,69**	**29.188,09**
- Aset	-15.467,05	-10.786,21	-21.488,65	-1.315,90	-3.848,93	3.925,02	20.417,67	19.177,86
- Kewajiban	37.431,47	55.702,29	38.331,75	5.694,21	11.351,05	6.625,94	-13.660,98	10.010,22
1. Investasi Langsung	12.295,44	14.733,20	10.704,48	3.082,13	3.271,61	6.532,92	2.234,32	15.120,98
a. Aset	-11.111,69	-10.387,53	-9.074,65	-851,68	-1.185,47	471,38	12.924,78	11.359,00
b. Kewajiban	23.407,13	25.120,73	19.779,13	3.933,81	4.457,08	6.061,54	-10.690,46	3.761,97
2. Investasi Portofolio	10.874,79	26.066,63	16.182,68	4.439,24	8.276,75	6.541,49	-385,16	18.872,32
a. Aset	-1.272,76	2.586,74	-1.268,43	-167,66	401,62	1.937,84	14,20	2.186,00
b. Kewajiban	12.147,55	23.479,89	17.451,11	4.606,90	7.875,13	4.603,65	-399,36	16.686,33
- Sektor publik	10.257,27	15.379,83	17.386,09	4.918,89	7.212,57	3.211,08	1.492,11	16.834,66
- Sektor swasta	1.890,28	8.100,06	65,02	-311,99	662,56	1.392,57	-1.891,48	-148,33
3. Derivatif Finansial	-334,36	-155,55	19,96	-21,84	-24,68	-28,13	65,61	-9,05
4. Investasi Lainnya	-871,45	4.271,80	-10.064,02	-3.121,21	-4.021,55	-2.495,32	4.841,92	-4.796,17
a. Aset	-3.427,38	-3.426,84	-11.812,13	-573,00	-3.235,67	1.355,60	7.477,35	5.024,29
b. Kewajiban	2.555,93	7.698,63	1.748,12	-2.548,21	-785,89	-3.850,92	-2.635,43	-9.820,45
- Sektor publik	-1.375,64	-4.208,60	-189,86	-119,28	-1.599,25	-1.241,61	-318,50	-3.278,64
- Sektor swasta	3.931,58	11.907,23	1.937,98	-2.428,93	813,36	-2.609,32	-2.316,93	-6.541,81
IV. Total (I + II + III)	**-7.105,20**	**17.432,79**	**-659,01**	**-272,25**	**2.302,97**	**5.875,69**	**4.944,25**	**12.850,66**
V. Selisih Perhitungan Bersih	**-219,52**	**-2.184,20**	**-439,04**	**-14,52**	**-141,00**	**-167,44**	**-438,85**	**-761,79**
VI. Neraca Keseluruhan (IV + V)	**-7.324,73**	**15.248,59**	**-1.098,05**	**-286,77**	**2.161,97**	**5.708,26**	**4.505,40**	**12.088,87**

Neraca Pembayaran Indonesia - Lanjutan

KETERANGAN	2013	2014	2015	2016				
				I*	II*	III*	IV**	
VII. Cadangan Devisa dan yang terkait[2)]	**7.324,73**	**-15.248,59**	**1.098,05**	**286,77**	**-2.161,97**	**-5.708,26**	**-4.505,40**	**-12.088,87**
A. Transaksi Cadangan Devisa	7.324,73	-15.248,59	1.098,05	286,77	-2.161,97	-5.708,26	-4.505,40	-12.088,87
B. Kredit dan Pinjaman IMF	-	0	0	0	0	0	0	0
C. *Exceptional Financing*	-	0	0	0	0	0	0	0
Memorandum:								
- Posisi Cadangan Devisa	99.386,71	111.861,60	105.931,02	107.542,59	109.788,72	115.671,35	116.361,53	116.361,53
Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	5,47	6,45	7,39	7,72	8,02	8,50	8,41	8,41
- Transaksi Berjalan (% PDB)	-3,19	-3,09	-2,03	-2,14	-2,25	-1,92	-0,75	-1,75

Catatan:

1) Tidak termasuk cadangan devisa dan yang terkait

2) Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit

*) Data sementara

**) Data sangat sementara

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 9. Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas [1)]

Ribu dolar AS

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Hasil pertanian	**5.077.862**	**3,32**	**5.584.278**	**3,68**	**5.787.688**	**3,90**	**5.927.312**	**4,04**	**5.764.642**	**4,37**	**5.494.499**	**4,18**
Biji coklat	616.202	0,40	388.326	0,26	443.372	0,30	201.407	0,14	118.047	0,09	85.498	0,06
Udang	1.064.620	0,70	1.111.388	0,73	1.467.208	0,99	1.786.335	1,22	1.331.640	1,01	1.441.053	1,10
Biji kopi	1.030.338	0,67	1.241.922	0,82	1.166.406	0,79	1.030.826	0,70	1.210.617	0,92	1.000.542	0,76
Ikan dan lain-lain	970.195	0,63	1.106.691	0,73	1.003.940	0,68	987.893	0,67	967.149	0,73	1.097.431	0,83
Rempah-rempah	430.320	0,28	631.746	0,42	554.137	0,37	577.627	0,39	780.981	0,59	698.007	0,53
Teh	136.366	0,09	126.754	0,08	131.112	0,09	108.843	0,07	89.969	0,07	85.057	0,06
Bahan nabati	159.926	0,10	134.133	0,09	165.132	0,11	228.122	0,16	160.884	0,12	124.978	0,10
Buah-buahan	172.746	0,11	181.322	0,12	184.506	0,12	299.853	0,20	363.396	0,28	323.155	0,25
Tembakau	61.037	0,04	60.791	0,04	93.458	0,06	82.397	0,06	58.878	0,04	49.440	0,04
Sayur-sayuran	57.605	0,04	83.943	0,06	67.687	0,05	82.958	0,06	109.080	0,08	75.858	0,06
Damar dan getah damar	87.903	0,06	94.134	0,06	105.591	0,07	107.564	0,07	111.456	0,08	100.502	0,08
Karet alam	28.493	0,02	19.481	0,01	14.178	0,01	11.675	0,01	11.017	0,01	11.081	0,01
Hasil pertanian lainnya	262.111	0,17	403.647	0,27	390.962	0,26	421.812	0,29	451.527	0,34	401.896	0,31
Hasil industri	**111.461.020**	**72,83**	**112.171.467**	**73,91**	**109.321.211**	**73,62**	**115.437.931**	**78,78**	**104.774.489**	**79,41**	**105.910.012**	**80,51**
Minyak sawit	16.709.854	10,92	17.685.127	11,65	16.518.525	11,12	17.461.545	11,92	15.402.551	11,67	14.357.670	10,91
Tekstil dan produk tekstil	13.172.828	8,61	12.510.222	8,24	12.770.966	8,60	12.847.055	8,77	12.338.750	9,35	11.883.622	9,03
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	8.592.466	5,61	11.157.423	7,35	10.716.148	7,22	10.108.187	6,90	8.777.604	6,65	8.386.800	6,38
Produk logam dasar	10.774.417	7,04	9.303.974	6,13	8.614.179	5,80	9.085.294	6,20	7.580.115	5,75	7.436.785	5,65
Karet olahan	14.083.724	9,20	10.368.180	6,83	9.306.376	6,27	7.022.184	4,79	5.843.690	4,43	5.538.628	4,21
Kertas dan barang dari kertas	4.144.400	2,71	3.938.382	2,59	3.732.138	2,51	3.779.966	2,58	3.599.154	2,73	3.442.980	2,62
Makanan olahan	4.582.987	2,99	5.089.625	3,35	5.369.071	3,62	6.325.797	4,32	6.284.553	4,76	6.560.205	4,99
Bahan kimia	4.579.567	2,99	3.634.536	2,39	3.498.625	2,36	3.851.429	2,63	2.805.673	2,13	3.236.879	2,46
Produk kayu olahan	3.244.615	2,12	3.338.150	2,20	3.510.392	2,36	3.906.760	2,67	3.813.415	2,89	3.691.546	2,81
Alas kaki	3.254.189	2,13	3.518.257	2,32	3.859.520	2,60	4.109.724	2,80	4.507.503	3,42	4.639.983	3,53
Damar tiruan, bahan plastik	2.402.329	1,57	2.475.062	1,63	2.608.021	1,76	2.760.476	1,88	2.320.337	1,76	2.318.175	1,76
Furnitur	1.722.845	1,13	1.728.879	1,14	1.693.575	1,14	1.728.798	1,18	1.684.509	1,28	1.585.583	1,21
Kapal laut dan sejenisnya	328.274	0,21	397.701	0,26	683.239	0,46	746.924	0,51	373.775	0,28	493.069	0,37
Bahan kertas	1.537.801	1,00	1.540.093	1,01	1.816.694	1,22	1.713.636	1,17	1.725.688	1,31	1.560.572	1,19
Suku cadang kendaraan	1.213.935	0,79	1.961.842	1,29	1.814.455	1,22	2.096.510	1,43	2.240.556	1,70	2.522.363	1,92
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	1.541.550	1,01	2.491.899	1,64	2.492.773	1,68	2.919.493	1,99	2.668.979	2,02	2.742.145	2,08
Suku cadang mesin	457.288	0,30	854.526	0,56	684.059	0,46	763.367	0,52	730.405	0,55	587.515	0,45
Asam berlemak	1.334.065	0,87	1.878.791	1,24	1.718.603	1,16	2.367.180	1,62	1.835.927	1,39	2.329.295	1,77
Komputer dan bagiannya	279.570	0,18	699.832	0,46	575.740	0,39	579.213	0,40	542.119	0,41	467.005	0,35
Sabun mandi dan cuci	740.114	0,48	866.562	0,57	895.776	0,60	906.194	0,62	801.827	0,61	812.794	0,62
Minyak atsiri dan lainnya	527.167	0,34	546.023	0,36	566.619	0,38	593.827	0,41	548.881	0,42	607.826	0,46

Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas [1] - Lanjutan

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Gelas dan barang dari gelas	432.356	0,28	498.666	0,33	452.941	0,31	432.535	0,30	405.962	0,31	328.908	0,25
Pupuk	415.196	0,27	548.257	0,36	631.035	0,42	508.675	0,35	302.134	0,23	357.121	0,27
Perlengkapan olahraga	323.236	0,21	453.825	0,30	545.887	0,37	514.885	0,35	468.007	0,35	417.696	0,32
Produk keramik	375.447	0,25	342.240	0,23	342.339	0,23	365.290	0,25	348.555	0,26	332.938	0,25
Makanan ternak	510.353	0,33	599.077	0,39	733.112	0,49	775.918	0,53	568.749	0,43	554.350	0,42
Margarin dan lemak lainnya	922.707	0,60	811.401	0,53	618.983	0,42	777.803	0,53	620.029	0,47	686.816	0,52
Produk farmasi	428.328	0,28	441.752	0,29	449.277	0,30	519.046	0,35	574.177	0,44	562.711	0,43
Barang dari logam mulia	1.053.125	0,69	170.300	0,11	183.584	0,12	2.122.861	1,45	3.292.902	2,50	4.093.041	3,11
Kulit dan barang dari kulit	223.765	0,15	211.209	0,14	230.055	0,15	218.039	0,15	193.115	0,15	192.300	0,15
Preparat pembasmi kuman	236.899	0,15	247.671	0,16	318.040	0,21	302.762	0,21	277.198	0,21	282.733	0,21
Pesawat udara dan bagiannya	160.270	0,10	105.480	0,07	102.608	0,07	97.571	0,07	87.749	0,07	120.754	0,09
Bahan celup organik sintetik	133.908	0,09	140.127	0,09	164.488	0,11	182.768	0,12	188.510	0,14	188.424	0,14
Semen	57.724	0,04	20.050	0,01	49.657	0,03	37.365	0,03	62.539	0,05	82.332	0,06
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	109.138	0,07	197.914	0,13	105.918	0,07	143.786	0,10	406.731	0,31	467.025	0,36
Barang anyaman	56.680	0,04	85.021	0,06	81.805	0,06	77.596	0,05	76.891	0,06	71.326	0,05
Rotan olahan	42.098	0,03	1.586	0,00	877	0,00	504	0,00	1.207	0,00	1.192	0,00
Peti kemas	7.556	0,00	9.865	0,01	12.727	0,01	5.833	0,00	3.430	0,00	1.915	0,00
Gliserol dan larutan alkali	22.959	0,02	47.161	0,03	75.656	0,05	76.636	0,05	34.465	0,03	55.089	0,04
Hasil industri lainnya	10.725.291	7,01	11.254.781	7,42	10.776.727	7,26	12.604.496	8,60	10.436.126	7,91	11.911.898	9,05
Hasil pertambangan dan sektor lainnya	**34.270.797**	**22,39**	**31.365.925**	**20,67**	**30.946.415**	**20,84**	**22.838.643**	**15,59**	**19.464.745**	**14,75**	**18.222.285**	**13,85**
Batubara	26.924.584	17,59	26.248.270	17,29	24.359.167	16,40	20.818.030	14,21	16.004.035	12,13	14.560.768	11,07
Biji tembaga	4.706.934	3,08	2.565.990	1,69	2.999.560	2,02	1.673.548	1,14	3.277.196	2,48	3.481.608	2,65
Biji nikel	1.333.171	0,87	1.458.409	0,96	1.677.366	1,13	85.913	0,06	0	0,00	0	0,00
Bauksit	767.138	0,50	637.597	0,42	1.318.775	0,89	47.742	0,03	744	0,00	431	0,00
Granit	35.792	0,02	15.598	0,01	131	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00
Hasil pertambangan lainnya	503.179	0,33	440.061	0,29	591.415	0,40	213.410	0,15	182.769	0,14	179.479	0,14
Hasil sektor lainnya [2]	555.909	0,36	644.161	0,42	650.255	0,44	804.009	0,55	537.133	0,41	546.642	0,42
Ekspor yang tidak dapat diklasifikasikan [3]	**1.676.441**	**1,10**	**2.009.286**	**1,32**	**1.795.235**	**1,21**	**1.532.832**	**1,05**	**1.399.827**	**1,06**	**1.380.222**	**1,05**
Jumlah, fob	**153.042.030**	**100,00**	**151.775.118**	**100,00**	**148.500.805**	**100,00**	**146.540.725**	**100,00**	**131.940.836**	**100,00**	**131.553.661**	**100,00**

Catatan:

1) Klasifikasi komoditas berdasarkan *Harmonized System* (HS) dan bersumber dari Bank Indonesia sebagai pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia

2) Terdiri dari barang seni, barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik, dan barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut

3) Mencakup emas nonmoneter dan *merchanting*

* Data sementara

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 10. **Volume Ekspor Impor Nonmigas Menurut Komoditas [1)]**

Ribu ton

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Hasil pertanian	**2695,96**	**0,52**	**3.005**	**0,54**	**3.103**	**0,48**	**3.215**	**0,63**	**3.773**	**0,81**	**3.442**	**0,74**
Biji coklat	211	0,04	172	0,03	198	0,03	77	0,02	54	0,01	38	0,01
Udang	119	0,02	133	0,02	145	0,02	160	0,03	149	0,03	158	0,03
Biji kopi	344	0,07	446	0,08	532	0,08	384	0,08	513	0,11	413	0,09
Ikan dan lain-lain	550	0,11	644	0,12	649	0,10	623	0,12	420	0,09	431	0,09
Rempah-rempah	96	0,02	111	0,02	119	0,02	156	0,03	151	0,03	140	0,03
Teh	68	0,01	62	0,01	65	0,01	61	0,01	51	0,01	46	0,01
Bahan nabati	230	0,04	169	0,03	192	0,03	203	0,04	207	0,04	186	0,04
Buah-buahan	209	0,04	243	0,04	245	0,04	300	0,06	352	0,08	285	0,06
Tembakau	20	0,00	16	0,00	20	0,00	17	0,00	12	0,00	13	0,00
Sayur-sayuran	88	0,02	147	0,03	104	0,02	111	0,02	196	0,04	127	0,03
Damar dan getah damar	38	0,01	71	0,01	73	0,01	50	0,01	69	0,01	76	0,02
Karet alam	9	0,00	9	0,00	7	0,00	6	0,00	8	0,00	7	0,00
Hasil pertanian lainnya	713	0,14	780	0,14	755	0,12	1.068	0,21	1.591	0,34	1.524	0,33
Hasil industri	**62.703**	**12,20**	**64.782**	**11,73**	**70.819**	**10,88**	**75.443**	**14,85**	**78.316**	**16,87**	**77.291**	**16,54**
Minyak sawit	15.823	3,08	18.967	3,43	21.517	3,31	22.889	4,51	26.496	5,71	22.794	4,88
Tekstil dan produk tekstil	1.934	0,38	1.951	0,35	2.109	0,32	2.213	0,44	2.264	0,49	2.204	0,47
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	573	0,11	623	0,11	588	0,09	536	0,11	517	0,11	511	0,11
Produk logam dasar	2.256	0,44	2.361	0,43	2.019	0,31	3.059	0,60	3.667	0,79	3.780	0,81
Karet olahan	3.080	0,60	3.030	0,55	3.324	0,51	3.248	0,64	3.258	0,70	3.216	0,69
Kertas dan barang dari kertas	4.216	0,82	4.227	0,77	4.263	0,66	4.343	0,86	4.552	0,98	4.118	0,88
Makanan olahan	2.499	0,49	2.315	0,42	2.538	0,39	3.351	0,66	2.988	0,64	3.046	0,65
Bahan kimia	4.843	0,94	4.088	0,74	3.863	0,59	4.185	0,82	3.943	0,85	5.290	1,13
Produk kayu olahan	3.986	0,78	4.202	0,76	4.900	0,75	5.972	1,18	5.420	1,17	5.480	1,17
Alas kaki	193	0,04	199	0,04	213	0,03	214	0,04	235	0,05	240	0,05
Damar tiruan, bahan plastik	1.201	0,23	1.279	0,23	1.350	0,21	1.483	0,29	1.417	0,31	1.576	0,34
Furnitur	588	0,11	599	0,11	551	0,08	552	0,11	505	0,11	467	0,10
Kapal laut dan sejenisnya	128	0,02	165	0,03	107	0,02	134	0,03	159	0,03	275	0,06
Bahan kertas	2.902	0,56	3.185	0,58	3.671	0,56	3.494	0,69	3.400	0,73	3.532	0,76
Suku cadang kendaraan	156	0,03	231	0,04	230	0,04	259	0,05	286	0,06	321	0,07
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	178	0,03	260	0,05	268	0,04	322	0,06	314	0,07	317	0,07
Asam berlemak	1.200	0,23	1.855	0,34	2.150	0,33	21	0,00	20	0,00	15	0,00
Komputer dan bagiannya	15	0,00	25	0,00	22	0,00	863	0,17	839	0,18	882	0,19
Sabun mandi dan cuci	621	0,12	745	0,13	839	0,13	100	0,02	90	0,02	99	0,02
Minyak atsiri dan lainnya	106	0,02	100	0,02	101	0,02	656	0,13	686	0,15	621	0,13
Makanan ternak	3.660	0,71	4.236	0,77	4.613	0,71	805	0,16	802	0,17	855	0,18

Volume Ekspor Impor Nonmigas Menurut Komoditas - Lanjutan

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Margarin dan lemak lainnya	796	0,15	766	0,14	681	0,10	24	0,00	21	0,00	20	0,00
Produk farmasi	19	0,00	21	0,00	26	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Barang dari logam mulia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	7	0,00	6	0,00
Kulit dan barang dari kulit	12	0,00	10	0,00	11	0,00	95	0,02	82	0,02	76	0,02
Preparat pembasmi kuman	79	0,02	72	0,01	82	0,01	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Pesawat udara dan bagiannya	1	0,00	0	0,00	1	0,00	34	0,01	32	0,01	35	0,01
Bahan celup organik sintetik	25	0,00	30	0,01	34	0,01	571	0,11	1.216	0,26	2.082	0,45
Semen	1.318	0,26	275	0,05	946	0,15	15	0,00	37	0,01	42	0,01
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	11	0,00	20	0,00	11	0,00	22	0,00	21	0,00	19	0,00
Barang anyaman	22	0,00	23	0,00	22	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Rotan olahan	40	0,01	1	0,00	0	0,00	3	0,00	1	0,00	1	0,00
Peti kemas	3	0,00	3	0,00	4	0,00	318	0,06	168	0,04	361	0,08
Gliserol dan larutan alkali	96	0,02	164	0,03	248	0,04	6.238	1,23	5.549	1,20	5.529	1,18
Hasil industri lainnya	7.871	1,53	6.219	1,13	6.688	1,03	429.253	84,51	382.009	82,31	386.351	82,68
Hasil pertambangan dan sektor lainnya	**448.449**	**87,27**	**484.713**	**87,73**	**576.742**	**88,64**	**408.345**	**80,40**	**367.041**	**79,09**	**370.231**	**79,23**
Batubara	348.056	67,74	385.421	69,76	422.637	64,95	715	0,14	1.712	0,37	1.913	0,41
Biji tembaga	1.480	0,29	1.109	0,20	1.455	0,22	4.284	0,84	-	0,00	-	0,00
Biji nikel	37.474	7,29	46.901	8,49	64.232	9,87	2.087	0,41	3	0,00	2	0,00
Bauksit	39.634	7,71	29.799	5,39	55.557	8,54	-	0,00	0	0,00	-	0,00
Granit	4.468	0,87	2.002	0,36	19	0,00	13.822	2,72	13.254	2,86	14.205	3,04
Hasil pertambangan lainnya	17.337	3,37	19.480	3,53	32.842	5,05	3	0,00	2	0,00	219	0,05
Hasil sektor lainnya 2)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	**513.849**	**100,00**	**552.502**	**100,00**	**650.666**	**100,00**	**507.914**	**100,00**	**464.100**	**100,00**	**467.302**	**100,00**

Catatan:

1) Klasifikasi komoditi berdasarkan Harmonized System (HS) dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, barang untuk diperbaiki, dan penyesuaian cakupan ekspor industri Batam. Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia.

2) Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik

*Data sementara

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 11. Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan (fob) [1)]

Ribu dolar AS

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Amerika	**19.749.881**	**12,90**	**18.824.693**	**12,40**	**19.401.683**	**13,07**	**20.327.656**	**13,87**	**19.273.316**	**14,61**	**19.578.169**	**14,88**
Amerika Utara	15.967.415	10,43	15.286.203	10,07	15.795.051	10,64	16.607.330	11,33	16.023.284	12,14	16.387.135	12,46
Amerika Serikat	15.019.944	9,81	14.497.394	9,55	15.017.442	10,11	15.851.790	10,82	15.297.600	11,59	15.652.462	11,90
Kanada	946.635	0,62	787.624	0,52	775.984	0,52	754.366	0,51	724.445	0,55	733.140	0,56
Amerika Utara Lainnya	836	0,00	1.185	0,00	1.626	0,00	1.174	0,00	1.238	0,00	1.533	0,00
Amerika Tengah dan Selatan	3.782.466	2,47	3.538.490	2,33	3.606.631	2,43	3.720.326	2,54	3.250.033	2,46	3.191.034	2,43
Argentina	352.449	0,23	310.359	0,20	336.956	0,23	237.166	0,16	238.132	0,18	219.225	0,17
Brasil	1.665.021	1,09	1.479.334	0,97	1.517.190	1,02	1.503.465	1,03	1.164.516	0,88	1.099.466	0,84
Meksiko	597.834	0,39	594.865	0,39	625.022	0,42	814.494	0,56	802.893	0,61	795.730	0,60
Amerika Tengah dan Selatan lainnya	1.167.162	0,76	1.153.932	0,76	1.127.463	0,76	1.165.201	0,80	1.044.491	0,79	1.076.613	0,82
Eropa	**22.381.070**	**14,62**	**20.827.697**	**13,72**	**19.998.354**	**13,47**	**20.044.107**	**13,68**	**18.474.670**	**14,00**	**19.393.969**	**14,74**
Uni Eropa	19.204.575	12,55	17.780.102	11,71	16.613.817	11,19	16.846.951	11,50	14.769.696	11,19	14.404.140	10,95
Belanda	4.728.965	3,09	4.473.179	2,95	4.009.880	2,70	3.909.794	2,67	3.407.638	2,58	3.217.926	2,45
Belgia	1.341.888	0,88	1.293.102	0,85	1.254.708	0,84	1.217.226	0,83	1.103.886	0,84	1.122.655	0,85
Inggris	1.627.847	1,06	1.679.815	1,11	1.618.871	1,09	1.659.576	1,13	1.521.994	1,15	1.582.567	1,20
Italia	2.995.989	1,96	2.279.791	1,50	2.121.981	1,43	2.287.691	1,56	1.871.943	1,42	1.570.686	1,19
Jerman	3.201.299	2,09	3.064.411	2,02	2.860.998	1,93	2.819.491	1,92	2.652.510	2,01	2.629.585	2,00
Perancis	1.049.478	0,69	1.116.351	0,74	1.053.698	0,71	1.018.400	0,69	971.332	0,74	886.124	0,67
Spanyol	2.231.984	1,46	2.059.230	1,36	1.806.692	1,22	1.938.255	1,32	1.476.585	1,12	1.578.057	1,20
Uni Eropa lainnya [2)]	2.027.124	1,32	1.814.223	1,20	1.886.988	1,27	1.996.519	1,36	1.763.807	1,34	1.816.541	1,38
Rusia	852.039	0,56	866.396	0,57	934.132	0,63	1.056.775	0,72	993.581	0,75	1.273.965	0,97
Turki	1.423.668	0,93	1.361.964	0,90	1.537.295	1,04	1.447.167	0,99	1.159.227	0,88	1.022.876	0,78
Eropa lainnya	900.788	0,59	819.235	0,54	913.110	0,61	693.214	0,47	1.552.167	1,18	2.692.988	2,05
Asia dan Timur Tengah	**103.157.274**	**67,40**	**102.731.460**	**67,69**	**99.945.259**	**67,30**	**96.266.318**	**65,69**	**86.429.505**	**65,51**	**85.681.577**	**65,13**
ASEAN	**26.971.924**	**17,62**	**30.797.388**	**20,29**	**29.359.595**	**19,77**	**28.840.547**	**19,68**	**27.180.205**	**20,60**	**28.491.913**	**21,66**
Brunei Darussalam	65.327	0,04	116.854	0,08	88.496	0,06	98.866	0,07	85.588	0,06	85.335	0,06
Filipina	3.642.588	2,38	3.651.969	2,41	3.757.698	2,53	3.886.987	2,65	3.917.396	2,97	5.244.085	3,99
Kamboja	266.448	0,17	290.188	0,19	316.755	0,21	416.539	0,28	429.189	0,33	424.465	0,32
Laos	10.613	0,01	23.736	0,02	5.087	0,00	6.212	0,00	7.135	0,01	5.863	0,00
Malaysia	8.779.155	5,74	8.445.424	5,56	7.161.960	4,82	6.400.296	4,37	6.186.335	4,69	5.904.556	4,49
Myanmar	321.484	0,21	412.643	0,27	576.497	0,39	587.256	0,40	610.521	0,46	597.072	0,45
Singapura	7.142.675	4,67	10.136.569	6,68	9.687.013	6,52	10.012.470	6,83	8.639.824	6,55	8.617.760	6,55
Thailand	4.547.436	2,97	5.469.613	3,60	5.209.797	3,51	4.990.703	3,41	4.590.229	3,48	4.607.542	3,50
Vietnam	2.196.200	1,44	2.250.393	1,48	2.556.292	1,72	2.441.218	1,67	2.713.988	2,06	3.005.236	2,28
Hong Kong SAR	3.078.247	2,01	2.644.935	1,74	2.646.008	1,78	2.760.064	1,88	2.048.572	1,55	2.127.947	1,62
India	13.158.360	8,60	12.454.827	8,21	12.948.553	8,72	12.220.101	8,34	11.606.701	8,80	9.943.155	7,56
Irak	148.874	0,10	44.886	0,03	171.973	0,12	70.480	0,05	94.987	0,07	91.069	0,07
Jepang	18.135.364	11,85	17.165.696	11,31	16.025.840	10,79	14.636.828	9,99	12.990.521	9,85	13.149.692	10,00
Korea Selatan	7.283.875	4,76	6.657.016	4,39	5.999.024	4,04	5.725.271	3,91	5.410.487	4,10	5.244.905	3,99
Pakistan	910.807	0,60	1.375.854	0,91	1.412.034	0,95	2.048.083	1,40	1.988.049	1,51	2.017.960	1,53
Republik Rakyat Tiongkok	21.414.082	13,99	20.783.070	13,69	21.156.450	14,25	16.465.326	11,24	13.250.531	10,04	15.160.683	11,52
Saudi Arabia	1.372.845	0,90	1.764.557	1,16	1.728.591	1,16	2.155.287	1,47	2.060.074	1,56	1.327.878	1,01
Taiwan, Provinsi Tiongkok	4.154.619	2,71	4.084.297	2,69	3.714.616	2,50	3.891.682	2,66	3.642.075	2,76	2.561.948	1,95
Asia dan Timur Tengah lainnya	6.528.277	4,27	4.958.934	3,27	4.782.574	3,22	7.452.648	5,09	6.157.303	4,67	5.564.427	4,23

Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan (fob) [1] - Lanjutan

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Australia dan Oseania	**3.235.990**	**2,11**	**4.026.451**	**2,65**	**3.922.662**	**2,64**	**4.519.496**	**3,08**	**3.730.292**	**2,83**	**3.350.097**	**2,55**
Australia	2.445.147	1,60	3.296.172	2,17	2.989.647	2,01	3.697.363	2,52	2.991.168	2,27	2.648.491	2,01
New Zealand	388.844	0,25	356.826	0,24	444.951	0,30	460.164	0,31	396.674	0,30	358.059	0,27
Australia dan Oseania Lainnya	401.999	0,26	373.454	0,25	488.064	0,33	361.970	0,25	342.451	0,26	343.547	0,26
Afrika	**3.961.906**	**2,59**	**4.552.974**	**3,00**	**4.400.184**	**2,96**	**4.857.604**	**3,31**	**3.503.548**	**2,66**	**3.021.562**	**2,30**
Afrika Selatan	1.409.167	0,92	1.642.411	1,08	1.245.443	0,84	1.378.907	0,94	665.661	0,50	727.757	0,55
Afrika lainnya	2.552.739	1,67	2.910.563	1,92	3.154.740	2,12	3.478.697	2,37	2.837.887	2,15	2.293.805	1,74
Ekspor yang tidak dapat diklasifikasikan [3]	**555.909**	**0,36**	**811.843**	**0,53**	**832.663**	**0,56**	**525.544**	**0,36**	**529.503**	**0,40**	**528.287**	**0,40**
Jumlah, fob	**153.042.030**	**100,00**	**151.775.118**	**100,00**	**148.500.805**	**100,00**	**146.540.725**	**100,00**	**131.940.836**	**100,00**	**131.553.661**	**100,00**

Catatan:

1) Klasifikasi komoditi berdasarkan Harmonized System (HS) dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, barang untuk diperbaiki, dan penyesuaian cakupan ekspor industri Batam. Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia.

2) Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik.

3) Mencakup emas nonmoneter dan *merchanting*

*Data sementara

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 12. **Nilai Impor Menurut Kelompok Barang [1)]**

Ribu dolar AS

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Barang konsumsi	**22.611.945**	**14,38**	**25.532.632**	**14,29**	**26.879.699**	**15,25**	**25.907.577**	**15,39**	**18.461.404**	**13,67**	**17.031.317**	**13,20**
Makanan dan minuman, baku, untuk rumah tangga	1.832.692	1,17	1.537.179	0,86	1.394.325	0,79	1.541.254	0,92	1.320.173	0,98	1.729.433	1,34
Makanan dan minuman, olahan, untuk rumah tangga	3.533.437	2,25	2.759.331	1,54	2.812.575	1,60	2.750.512	1,63	2.332.869	1,73	3.008.403	2,33
Mobil penumpang	872.628	0,55	1.498.307	0,84	1.171.510	0,66	784.431	0,47	583.152	0,43	594.982	0,46
Alat angkutan bukan untuk industri	555.433	0,35	367.729	0,21	383.485	0,22	268.909	0,16	243.873	0,18	142.456	0,11
Barang konsumsi tahan lama	1.192.777	0,76	1.592.871	0,89	1.624.973	0,92	1.415.739	0,84	1.073.667	0,79	1.208.969	0,94
Barang konsumsi semi-tahan lama	1.501.594	0,95	1.921.446	1,08	2.150.785	1,22	1.952.560	1,16	1.965.991	1,46	2.221.105	1,72
Barang konsumsi tidak tahan lama	1.490.297	0,95	1.910.634	1,07	2.154.691	1,22	2.158.041	1,28	2.023.181	1,50	2.154.847	1,67
Bahan bakar dan pelumas, olahan, produk minyak [2)]	11.465.941	7,29	13.720.367	7,68	14.736.636	8,36	14.504.300	8,62	8.181.422	6,06	5.146.414	3,99
Barang yang tidak dirinci secara spesifik	167.147	0,11	224.769	0,13	450.718	0,26	531.831	0,32	737.074	0,55	824.708	0,64
Bahan baku dan bahan penolong	**113.151.281**	**71,94**	**126.732.417**	**70,93**	**127.649.765**	**72,42**	**121.677.775**	**72,29**	**97.936.858**	**72,51**	**95.107.896**	**73,70**
Makanan dan minuman, baku untuk industri	4.112.931	2,61	4.005.713	2,24	4.348.635	2,47	4.934.923	2,93	4.100.987	3,04	4.423.637	3,43
Makanan dan minuman, olahan untuk industri	3.261.887	2,07	3.317.376	1,86	3.294.925	1,87	3.247.084	1,93	2.726.501	2,02	3.463.722	2,68
Bahan pasokan, baku untuk industri	6.679.561	4,25	5.480.589	3,07	6.180.739	3,51	5.967.884	3,55	4.616.310	3,42	3.987.153	3,09
Bahan pasokan, olahan untuk industri	49.204.480	31,28	58.236.091	32,59	56.624.346	32,13	56.247.051	33,42	49.421.677	36,59	47.305.728	36,66
Suku cadang dan perlengkapan untuk barang modal	13.831.250	8,79	18.011.245	10,08	17.191.495	9,75	15.552.758	9,24	14.628.024	10,83	15.537.453	12,04
Suku cadang dan perlengkapan untuk alat angkutan	6.617.550	4,21	8.267.873	4,63	8.980.793	5,10	7.128.761	4,24	6.139.368	4,55	6.384.705	4,95
Bahan bakar dan pelumas, baku	10.923.734	6,95	11.008.146	6,16	13.322.222	7,56	12.896.531	7,66	8.011.548	5,93	7.197.942	5,58
a.l: minyak mentah [2)]	10.905.440	6,93	10.987.073	6,15	13.236.094	7,51	12.600.220	7,49	7.725.385	5,72	6.874.010	5,33
Bahan bakar dan pelumas, olahan	18.519.887	11,77	18.405.384	10,30	17.706.610	10,05	15.702.783	9,33	8.292.444	6,14	6.807.557	5,28

Nilai Impor Menurut Kelompok Barang [1] - Lanjutan

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
a.l: produk minyak [2]	16.590.030	10,55	15.540.944	8,70	14.408.358	8,17	12.442.784	7,39	6.057.936	4,48	4.744.722	3,68
a.l: gas elpiji [3]	1.708.094	1,09	2.626.816	1,47	3.094.502	1,76	3.039.246	1,81	2.061.615	1,53	1.841.452	1,43
Barang Modal	**30.490.023**	**19,39**	**36.086.323**	**20,20**	**30.909.621**	**17,54**	**29.448.344**	**17,50**	**24.854.992**	**18,40**	**22.315.959**	**17,29**
Barang modal (kecuali alat angkutan)	22.301.038	14,18	26.642.473	14,91	25.541.302	14,49	25.570.739	15,19	22.424.297	16,60	19.860.202	15,39
Mobil penumpang	872.628	0,55	1.498.307	0,84	1.171.510	0,66	784.431	0,47	583.152	0,43	594.982	0,46
Alat angkutan lainnya, untuk industri	7.316.357	4,65	7.945.543	4,45	4.196.809	2,38	3.093.174	1,84	1.847.542	1,37	1.860.775	1,44
Barang dagangan lainnya [4]	724.016	0,46	743.455	0,42	714.679	0,41	753.791	0,45	419.459	0,31	473.567	0,37
Impor yang tidak dapat diklasifikasikan [5]	71.097	0,05	43.071	0,02	32.398	0,02	25.620	0,02	706.213	0,52	832.126	0,64
Jumlah, cif	**167.048.361**	**106,21**	**189.137.898**	**105,86**	**186.186.162**	**105,63**	**177.813.107**	**105,65**	**142.378.926**	**105,41**	**135.760.866**	**105,20**
Asuransi dan ongkos pengangkutan	**9.764.655**	**6,21**	**10.470.943**	**5,86**	**9.930.168**	**5,63**	**9.502.882**	**5,65**	**7.303.013**	**5,41**	**6.710.029**	**5,20**
Jumlah, fob	**157.283.706**	**100,00**	**178.666.955**	**100,00**	**176.255.994**	**100,00**	**168.310.225**	**100,00**	**135.075.913**	**100,00**	**129.050.837**	**100,00**

Catatan:

1) Klasifikasi komoditas berdasarkan Broad Economic Category (BEC). Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia

2) Merupakan komponen impor minyak

3) Merupakan komponen impor gas

4) Terdiri dari barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki

5) Terdiri dari barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki

*Data sementara

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 13. **Nilai Impor Nonmigas Menurut Komoditas (cif)** [1)]

Ribu dolar AS

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Hasil pertanian	**9.277.539**	**7,82**	**8.129.294**	**5,90**	**8.650.023**	**6,51**	**9.340.745**	**7,31**	**7.683.036**	**6,85**	**7.954.150**	**7,14**
Biji coklat	62.895	0,05	62.719	0,05	77.422	0,06	342.015	0,27	169.735	0,15	182.452	0,16
Udang	49.459	0,04	51.709	0,04	63.173	0,05	60.399	0,05	49.054	0,04	67.845	0,06
Biji kopi	39.092	0,03	109.399	0,08	29.424	0,02	39.856	0,03	27.492	0,02	43.460	0,04
Ikan dan lain-lain	172.917	0,15	129.259	0,09	139.702	0,11	139.614	0,11	142.605	0,13	155.335	0,14
Rempah-rempah	396.509	0,33	153.669	0,11	30.082	0,02	71.275	0,06	35.429	0,03	101.894	0,09
Teh	24.749	0,02	28.732	0,02	24.199	0,02	19.568	0,02	19.914	0,02	23.450	0,02
Bahan nabati	1.896	0,00	1.748	0,00	1.834	0,00	1.422	0,00	4.129	0,00	1.434	0,00
Buah-buahan	792.567	0,67	834.467	0,61	653.001	0,49	781.392	0,61	656.088	0,58	832.295	0,75
Tembakau	134.434	0,11	258.929	0,19	224.698	0,17	205.018	0,16	82.833	0,07	78.779	0,07
Sayur-sayuran	557.773	0,47	470.697	0,34	612.965	0,46	612.117	0,48	530.410	0,47	669.144	0,60
Damar dan getah damar	4.131	0,00	2.174	0,00	2.163	0,00	7.671	0,01	4.723	0,00	2.624	0,00
Karet alam	27.408	0,02	39.576	0,03	36.709	0,03	31.477	0,02	30.798	0,03	26.106	0,02
Hasil pertanian lainnya	7.013.708	5,92	5.986.217	4,34	6.754.652	5,08	7.028.921	5,50	5.929.827	5,29	5.769.334	5,18
Hasil industri	**115.099.993**	**97,08**	**136.202.320**	**98,80**	**129.985.389**	**97,76**	**123.554.860**	**96,73**	**108.052.242**	**96,31**	**106.513.465**	**95,66**
Minyak sawit	24.992	0,02	509	0,00	46.251	0,03	489	0,00	4.624	0,00	4.117	0,00
Tekstil dan produk tekstil	6.529.501	5,51	6.788.245	4,92	7.061.634	5,31	7.178.665	5,62	6.869.687	6,12	7.055.350	6,34
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	15.462.441	13,04	19.690.154	14,28	19.581.953	14,73	17.966.458	14,07	16.305.177	14,53	16.444.105	14,77
Produk logam dasar	14.687.575	12,39	20.917.890	15,17	19.191.815	14,43	17.403.341	13,63	14.234.548	12,69	13.283.611	11,93
Karet olahan	1.260.895	1,06	1.624.157	1,18	1.423.535	1,07	1.303.276	1,02	1.094.270	0,98	1.102.522	0,99
Kertas dan barang dari kertas	1.941.297	1,64	1.931.670	1,40	1.914.713	1,44	2.026.246	1,59	1.730.720	1,54	1.782.397	1,60
Makanan olahan	5.203.802	4,39	4.572.444	3,32	4.471.081	3,36	4.392.198	3,44	3.939.240	3,51	5.519.774	4,96
Bahan kimia	8.642.410	7,29	9.284.444	6,73	9.219.775	6,93	9.169.681	7,18	7.547.230	6,73	6.536.464	5,87
Produk kayu olahan	366.068	0,31	378.610	0,27	367.416	0,28	349.575	0,27	316.108	0,28	297.683	0,27
Alas kaki	314.536	0,27	367.657	0,27	412.326	0,31	389.560	0,30	411.766	0,37	485.067	0,44
Damar tiruan, bahan plastik	6.270.210	5,29	7.139.882	5,18	7.827.678	5,89	7.913.122	6,20	6.973.838	6,22	7.075.996	6,36
Furnitur	261.448	0,22	365.781	0,27	371.420	0,28	340.918	0,27	325.487	0,29	321.963	0,29
Kapal laut dan sejenisnya	2.134.241	1,80	2.006.036	1,46	1.411.337	1,06	1.452.848	1,14	1.110.857	0,99	1.003.856	0,90
Bahan kertas	1.180.856	1,00	1.043.749	0,76	1.259.124	0,95	1.274.317	1,00	961.080	0,86	981.246	0,88
Suku cadang kendaraan	3.013.552	2,54	3.890.143	2,82	3.995.442	3,01	3.527.161	2,76	2.987.819	2,66	3.124.393	2,81
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	5.842.187	4,93	7.580.873	5,50	4.627.083	3,48	3.266.401	2,56	2.202.997	1,96	2.070.963	1,86
Emas batangan		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
Suku cadang mesin	1.630.158	1,37	2.615.726	1,90	2.066.901	1,55	2.167.452	1,70	1.901.345	1,69	1.950.582	1,75
Asam berlemak	66.289	0,06	65.820	0,05	68.853	0,05	62.857	0,05	53.913	0,05	73.222	0,07
Komputer dan bagiannya	2.707.714	2,28	2.641.069	1,92	2.758.276	2,07	2.465.939	1,93	2.312.212	2,06	2.043.105	1,84
Sabun mandi dan cuci	263.520	0,22	325.142	0,24	329.083	0,25	348.722	0,27	305.795	0,27	291.224	0,26
Minyak atsiri dan lainnya	683.025	0,58	849.363	0,62	1.098.519	0,83	1.014.065	0,79	952.198	0,85	1.024.407	0,92
Gelas dan barang dari gelas	320.015	0,27	398.987	0,29	395.404	0,30	374.295	0,29	307.417	0,27	344.843	0,31
Pupuk	2.587.220	2,18	2.617.943	1,90	1.744.110	1,31	1.822.385	1,43	2.014.518	1,80	1.555.282	1,40
Perlengkapan olahraga	185.708	0,16	248.572	0,18	233.121	0,18	160.270	0,13	157.148	0,14	209.966	0,19

Nilai Impor Nonmigas Menurut Komoditas (cif) [1] - Lanjutan

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Produk keramik	259.801	0,22	425.998	0,31	320.347	0,24	369.382	0,29	326.269	0,29	371.983	0,33
Makanan ternak	2.208.054	1,86	2.783.272	2,02	3.044.755	2,29	3.274.681	2,56	2.736.151	2,44	2.481.302	2,23
Margarin dan lemak lainnya	27.930	0,02	41.562	0,03	39.595	0,03	33.930	0,03	33.816	0,03	34.397	0,03
Produk farmasi	513.397	0,43	560.115	0,41	612.677	0,46	685.807	0,54	717.287	0,64	775.540	0,70
Barang dari logam mulia	11.364	0,01	29.145	0,02	22.971	0,02	20.092	0,02	16.342	0,01	21.430	0,02
Kulit dan barang dari kulit	473.948	0,40	445.709	0,32	460.467	0,35	549.072	0,43	511.559	0,46	505.928	0,45
Preparat pembasmi kuman	277.063	0,23	289.489	0,21	407.411	0,31	392.330	0,31	380.986	0,34	413.196	0,37
Pesawat udara dan bagiannya	2.014.855	1,70	2.320.848	1,68	1.495.957	1,13	675.982	0,53	797.216	0,71	769.763	0,69
Bahan celup organik sintetik	349.173	0,29	378.996	0,27	441.577	0,33	486.373	0,38	432.465	0,39	449.901	0,40
Semen	65.850	0,06	206.954	0,15	240.513	0,18	249.431	0,20	191.719	0,17	39.592	0,04
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	139.190	0,12	165.928	0,12	207.286	0,16	145.336	0,11	127.339	0,11	61.395	0,06
Barang anyaman	3.740	0,00	1.751	0,00	1.354	0,00	2.387	0,00	2.804	0,00	2.068	0,00
Rotan olahan	81	0,00	5	0,00	73	0,00	44	0,00	46	0,00	382	0,00
Peti kemas	16.253	0,01	14.359	0,01	21.626	0,02	21.487	0,02	13.207	0,01	9.331	0,01
Gliserol dan larutan alkali	2.622	0,00	959	0,00	272	0,00	206	0,00	81	0,00	343	0,00
Hasil industri lainnya	27.157.012	22,90	31.192.368	22,63	30.791.657	23,16	30.278.076	23,71	26.744.964	23,84	25.994.778	23,35
Hasil pertambangan dan hasil sektor lainnya	**1.197.691**	**1,01**	**1.130.859**	**0,82**	**1.302.202**	**0,98**	**1.521.494**	**1,19**	**1.469.514**	**1,31**	**1.352.588**	**1,21**
Batubara	12.860	0,01	18.699	0,01	82.752	0,06	296.310	0,23	286.080	0,25	323.792	0,29
Biji tembaga	103.809	0,09	102.762	0,07	148.665	0,11	42.830	0,03	107.472	0,10	7	0,00
Biji nikel	0	0,00	11	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	27	0,00
Bauksit	421	0,00	716	0,00	811	0,00	280	0,00	734	0,00	476	0,00
Granit	8.853	0,01	9.883	0,01	6.971	0,01	8.205	0,01	6.799	0,01	6.174	0,01
Hasil pertambangan lainnya	1.071.747	0,90	998.788	0,72	1.062.997	0,80	1.173.870	0,92	1.068.428	0,95	1.022.112	0,92
Hasil sektor lainnya [2]	458.608	0,39	474.557	0,34	429.382	0,32	457.091	0,36	265.343	0,24	379.758	0,34
Impor yang tidak dapat diklasifikasikan [3]	**71.097**	**0,06**	**43.071**	**0,03**	**32.398**	**0,02**	**25.620**	**0,02**	**706.213**	**0,63**	**832.126**	**0,75**
Jumlah, cif	**126.104.929**	**106,36**	**145.980.103**	**105,89**	**140.399.394**	**105,60**	**134.899.810**	**105,61**	**118.176.348**	**105,34**	**117.032.088**	**105,11**
Asuransi dan ongkos pengangkutan	**7.538.026**	**6,36**	**8.123.524**	**5,89**	**7.440.379**	**5,60**	**7.171.269**	**5,61**	**5.987.570**	**5,34**	**5.691.318**	**5,11**
Jumlah, fob	**118.566.903**	**100,00**	**137.856.579**	**100,00**	**132.959.014**	**100,00**	**127.728.541**	**100,00**	**112.188.777**	**100,00**	**111.340.770**	**100,00**

Catatan:

1) Klasifikasi komoditas berdasarkan *Harmonized System* (HS) dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki. Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia.

2) Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik, dan barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut.

3) Merupakan emas nonmoneter

*Data sementara

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 14. Volume Impor Nonmigas Menurut Komoditas [1)]

Ribu ton

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Hasil pertanian	**13.900**	**16,43**	**12.787**	**13,98**	**14.902**	**15,54**	**15.982**	**16,23**	**16.053**	**16,23**	**17.023**	**16,24**
Biji coklat	19	0,02	24	0,03	31	0,03	109	0,11	53	0,05	60	0,06
Udang	6	0,01	7	0,01	8	0,01	7	0,01	6	0,01	6	0,01
Biji kopi	14	0,02	51	0,06	13	0,01	18	0,02	12	0,01	24	0,02
Ikan dan lain-lain	213	0,25	141	0,15	138	0,14	127	0,13	122	0,12	106	0,10
Rempah-rempah	72	0,08	57	0,06	31	0,03	32	0,03	29	0,03	42	0,04
Teh	19	0,02	23	0,03	20	0,02	14	0,01	14	0,01	19	0,02
Bahan nabati	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00
Buah-buahan	781	0,92	781	0,85	505	0,53	548	0,56	434	0,44	478	0,46
Tembakau	36	0,04	63	0,07	56	0,06	39	0,04	22	0,02	17	0,02
Sayur-sayuran	896	1,06	791	0,86	784	0,82	853	0,87	711	0,72	742	0,71
Damar dan getah damar	1	0,00	1	0,00	1	0,00	2	0,00	2	0,00	1	0,00
Karet alam	9	0,01	18	0,02	19	0,02	21	0,02	27	0,03	26	0,02
Hasil pertanian lainnya	11.830	13,98	10.831	11,84	13.296	13,86	14.213	14,43	14.621	14,78	15.501	14,79
Hasil industri	**63.747**	**75,35**	**71.648**	**78,31**	**72.661**	**75,76**	**69.652**	**70,73**	**67.651**	**68,38**	**70.963**	**67,69**
Minyak sawit	23	0,03	0	0,00	65	0,07	0	0,00	8	0,01	3	0,00
Tekstil dan produk tekstil	1.075	1,27	1.252	1,37	1.317	1,37	1.358	1,38	1.315	1,33	1.487	1,42
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	2.380	2,81	1.207	1,32	1.080	1,13	1.022	1,04	1.014	1,02	1.134	1,08
Produk logam dasar	11.551	13,65	17.652	19,29	20.758	21,64	15.476	15,72	14.703	14,86	16.808	16,03
Karet olahan	329	0,39	304	0,33	426	0,44	290	0,29	274	0,28	294	0,28
Kertas dan barang dari kertas	3.143	3,72	3.066	3,35	3.053	3,18	3.016	3,06	2.417	2,44	2.874	2,74
Makanan olahan	5.993	7,08	5.443	5,95	4.894	5,10	4.952	5,03	5.330	5,39	7.526	7,18
Bahan kimia	7.560	8,94	8.770	9,58	8.603	8,97	8.720	8,86	8.468	8,56	8.182	7,80
Produk kayu olahan	703	0,83	735	0,80	776	0,81	657	0,67	547	0,55	529	0,50
Alas kaki	52	0,06	58	0,06	57	0,06	50	0,05	49	0,05	66	0,06
Damar tiruan, bahan plastik	3.455	4,08	3.401	3,72	3.709	3,87	3.718	3,78	3.817	3,86	4.238	4,04
Furnitur	142	0,17	140	0,15	142	0,15	131	0,13	140	0,14	139	0,13
Kapal laut dan sejenisnya	1.380	1,63	1.225	1,34	550	0,57	679	0,69	482	0,49	968	0,92
Bahan kertas	1.310	1,55	1.349	1,47	1.629	1,70	1.605	1,63	1.310	1,32	1.425	1,36
Suku cadang kendaraan	463	0,55	537	0,59	550	0,57	533	0,54	451	0,46	501	0,48
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	532	0,63	663	0,72	458	0,48	337	0,34	247	0,25	227	0,22
Emas batangan		0,00		0,00		0,00	177	0,18	168	0,17	174	0,17
Suku cadang mesin	204	0,24	262	0,29	187	0,20	40	0,04	42	0,04	51	0,05
Asam berlemak	31	0,04	36	0,04	59	0,06	45	0,05	47	0,05	44	0,04
Komputer dan bagiannya	60	0,07	51	0,06	49	0,05	145	0,15	141	0,14	134	0,13
Sabun mandi dan cuci	97	0,12	124	0,14	139	0,14	107	0,11	101	0,10	96	0,09

Volume Impor Nonmigas Menurut Komoditas [1] - Lanjutan

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Minyak atsiri dan lainnya	83	0,10	93	0,10	113	0,12	386	0,39	333	0,34	407	0,39
Gelas dan barang dari gelas	363	0,43	403	0,44	413	0,43	6.679	6,78	7.376	7,46	6.894	6,58
Pupuk	6.457	7,63	6.285	6,87	5.483	5,72	42	0,04	41	0,04	58	0,06
Perlengkapan olahraga	73	0,09	69	0,08	62	0,06	966	0,98	992	1,00	1.233	1,18
Produk keramik	520	0,61	872	0,95	734	0,76	5.355	5,44	5.502	5,56	5.597	5,34
Makanan ternak	4.362	5,16	4.890	5,34	5.017	5,23	13	0,01	14	0,01	15	0,01
Margarin dan lemak lainnya	7	0,01	10	0,01	12	0,01	25	0,03	29	0,03	31	0,03
Produk farmasi	20	0,02	26	0,03	31	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Barang dari logam mulia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,06	53	0,05	64	0,06
Kulit dan barang dari kulit	56	0,07	53	0,06	57	0,06	71	0,07	72	0,07	91	0,09
Preparat pembasmi kuman	53	0,06	53	0,06	69	0,07	2	0,00	1	0,00	2	0,00
Pesawat udara dan bagiannya	8	0,01	37	0,04	2	0,00	77	0,08	70	0,07	76	0,07
Bahan celup organik sintetik	63	0,07	70	0,08	78	0,08	4.066	4,13	3.379	3,42	896	0,85
Semen	1.391	1,64	3.370	3,68	3.685	3,84	13	0,01	9	0,01	6	0,01
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	12	0,01	13	0,01	17	0,02	1	0,00	2	0,00	2	0,00
Barang anyaman	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rotan olahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	4	0,00	3	0,00
Peti kemas	2	0,00	3	0,00	5	0,01	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Gliserol dan larutan alkali	8	0,01	2	0,00	0	0,00	8.833	8,97	8.699	8,79	8.687	8,29
Hasil industri lainnya	9.782	11,56	9.125	9,97	8.382	8,74	12.839	13,04	15.223	15,39	16.852	16,07
Hasil pertambangan dan hasil sektor lainnya	**6.950**	**8,22**	**7.061**	**7,72**	**8.342**	**8,70**	**2.260**	**2,30**	**2.814**	**2,84**	**3.574**	**3,41**
Batubara	48	0,06	65	0,07	496	0,52	23	0,02	63	0,06	0	0,00
Biji tembaga	33	0,04	39	0,04	73	0,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Biji nikel	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00
Bauksit	1	0,00	1	0,00	1	0,00	26	0,03	19	0,02	29	0,03
Granit	29	0,03	42	0,05	27	0,03	10.529	10,69	12.326	12,46	13.247	12,64
Hasil pertambangan lainnya	6.839	8,08	6.914	7,56	7.744	8,07	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Hasil sektor lainnya [2]	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	**84.598**	**100,00**	**91.498**	**100,00**	**95.907**	**100,00**	**98.474**	**100,00**	**98.928**	**100,00**	**104.838**	**100,00**

Catatan:

1) Klasifikasi komoditas berdasarkan *Harmonized System* (HS) dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki. Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia.

2) Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik

*Data sementara

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 15. **Nilai Impor Nonmigas Menurut Negara Asal (cif)** [1)]

Ribu dolar AS

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Amerika	**15.688.248**	**12,44**	**16.193.572**	**11,09**	**15.874.282**	**11,31**	**14.697.090**	**10,89**	**13.501.594**	**11,42**	**12.949.464**	**11,06**
Amerika Utara	11.068.663	8,78	11.382.731	7,80	10.871.756	7,74	9.982.751	7,40	9.189.604	7,78	8.603.297	7,35
Amerika Serikat	9.064.606	7,19	9.556.941	6,55	8.766.560	6,24	8.073.713	5,98	7.567.220	6,40	7.219.787	6,17
Kanada	1.998.298	1,58	1.809.859	1,24	2.104.103	1,50	1.907.658	1,41	1.620.628	1,37	1.381.503	1,18
Amerika Utara Lainnya	5.759	0,00	15.931	0,01	1.094	0,00	1.380	0,00	1.756	0,00	2.008	0,00
Amerika Tengah dan Selatan	4.619.585	3,66	4.810.841	3,30	5.002.526	3,56	4.714.339	3,49	4.311.989	3,65	4.346.167	3,71
Argentina	1.577.916	1,25	1.749.601	1,20	1.683.663	1,20	1.460.787	1,08	1.298.541	1,10	1.369.519	1,17
Brasil	1.789.636	1,42	1.934.842	1,33	2.205.400	1,57	2.548.100	1,89	2.425.589	2,05	2.350.080	2,01
Meksiko	394.537	0,31	566.649	0,39	516.890	0,37	186.888	0,14	197.406	0,17	177.236	0,15
Amerika Tengah dan Selatan lainnya	857.496	0,68	559.748	0,38	596.573	0,42	518.563	0,38	390.453	0,33	449.333	0,38
Eropa	**14.176.998**	**11,24**	**17.366.142**	**11,90**	**17.387.563**	**12,38**	**15.509.072**	**11,50**	**13.767.244**	**11,65**	**13.468.983**	**11,51**
Uni Eropa	11.045.709	8,76	13.533.662	9,27	13.374.868	9,53	12.665.808	9,39	11.278.268	9,54	10.641.772	9,09
Belanda	808.102	0,64	843.705	0,58	865.846	0,62	908.390	0,67	792.260	0,67	709.705	0,61
Belgia	570.577	0,45	614.244	0,42	649.753	0,46	581.431	0,43	556.595	0,47	486.049	0,42
Inggris	1.030.182	0,82	1.280.271	0,88	1.063.312	0,76	898.540	0,67	816.181	0,69	877.945	0,75
Italia	1.089.934	0,86	1.506.481	1,03	1.680.403	1,20	1.720.335	1,28	1.417.381	1,20	1.388.326	1,19
Jerman	3.085.809	2,45	4.039.148	2,77	4.377.945	3,12	4.095.067	3,04	3.440.408	2,91	3.137.012	2,68
Perancis	1.544.263	1,22	1.607.593	1,10	1.525.163	1,09	1.292.626	0,96	1.315.034	1,11	1.354.791	1,16
Spanyol	390.512	0,31	521.227	0,36	573.305	0,41	553.596	0,41	472.661	0,40	483.331	0,41
Uni Eropa lainnya [2)]	2.526.330	2,00	3.120.994	2,14	2.639.142	1,88	2.615.822	1,94	2.467.748	2,09	2.204.613	1,88
Rusia	1.255.824	1,00	1.743.576	1,19	2.038.204	1,45	1.184.540	0,88	904.150	0,77	846.317	0,72
Turki	334.116	0,26	409.520	0,28	257.638	0,18	259.152	0,19	248.968	0,21	273.668	0,23
Eropa lainnya	1.541.349	1,22	1.679.384	1,15	1.716.853	1,22	1.399.572	1,04	1.335.858	1,13	1.707.226	1,46
Asia dan Timur Tengah	**88.138.518**	**69,89**	**104.529.392**	**71,61**	**99.498.165**	**70,87**	**96.425.276**	**71,48**	**84.359.339**	**71,38**	**84.127.765**	**71,88**
ASEAN	25.074.815	19,88	31.711.907	21,72	30.210.287	21,52	29.605.452	21,95	25.990.236	21,99	25.171.432	21,51
Brunei Darussalam	8.941	0,01	14.703	0,01	6.406	0,00	26.161	0,02	26.744	0,02	8.003	0,01
Filipina	751.789	0,60	795.015	0,54	770.294	0,55	693.242	0,51	681.157	0,58	814.871	0,70
Kamboja	7.324	0,01	11.053	0,01	17.752	0,01	18.722	0,01	21.133	0,02	25.197	0,02
Laos	1.292	0,00	3.278	0,00	7.543	0,01	51.265	0,04	1.027	0,00	4.196	0,00
Malaysia	5.218.598	4,14	6.339.805	4,34	5.913.357	4,21	5.752.177	4,26	4.990.731	4,22	4.744.427	4,05
Myanmar	69.558	0,06	63.359	0,04	72.997	0,05	122.243	0,09	159.685	0,14	112.982	0,10
Singapura	6.548.829	5,19	10.745.357	7,36	10.117.172	7,21	10.050.010	7,45	8.952.440	7,58	7.705.178	6,58
Thailand	10.135.104	8,04	11.221.263	7,69	10.624.689	7,57	9.685.779	7,18	8.011.076	6,78	8.583.859	7,33
Vietnam	2.333.380	1,85	2.518.074	1,72	2.680.076	1,91	3.205.853	2,38	3.146.241	2,66	3.172.720	2,71
Hong Kong SAR	2.338.465	1,85	1.897.323	1,30	1.956.494	1,39	1.892.903	1,40	1.806.733	1,53	1.814.999	1,55
India	3.856.988	3,06	3.991.576	2,73	3.756.065	2,68	3.559.370	2,64	2.667.156	2,26	2.831.492	2,42
Irak	703	0,00	200	0,00	49	0,00	342	0,00	243	0,00	106	0,00
Jepang	18.461.913	14,64	22.624.472	15,50	18.934.319	13,49	16.805.848	12,46	13.225.760	11,19	12.923.624	11,04
Korea Selatan	7.243.088	5,74	8.276.805	5,67	8.787.367	6,26	7.749.581	5,74	6.278.130	5,31	5.890.617	5,03
Pakistan	190.042	0,15	271.276	0,19	162.555	0,12	158.655	0,12	173.600	0,15	156.776	0,13
Republik Rakyat Tiongkok	24.222.690	19,21	29.030.885	19,89	29.488.605	21,00	30.473.168	22,59	29.197.341	24,71	30.572.284	26,12
Saudi Arabia	948.559	0,75	1.021.447	0,70	973.749	0,69	967.809	0,72	673.083	0,57	703.560	0,60
Taiwan, Provinsi Tiongkok	3.681.422	2,92	4.198.366	2,88	4.142.844	2,95	3.628.231	2,69	3.106.184	2,63	2.845.552	2,43

Nilai Impor Nonmigas Menurut Negara Asal (cif) [1] - Lanjutan

RINCIAN	2011		2012		2013		2014		2015		2016*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Asia dan Timur Tengah lainnya	2.119.833	1,68	1.505.136	1,03	1.085.831	0,77	1.583.918	1,17	1.240.874	1,05	1.217.324	1,04
Australia dan Oseania	**5.756.139**	**4,56**	**5.767.039**	**3,95**	**5.761.917**	**4,10**	**6.365.424**	**4,72**	**5.333.648**	**4,51**	**5.216.215**	**4,46**
Australia	4.985.847	3,95	5.004.988	3,43	4.879.329	3,48	5.485.538	4,07	4.675.840	3,96	4.517.429	3,86
New Zealand	726.069	0,58	692.249	0,47	796.396	0,57	837.699	0,62	628.441	0,53	660.958	0,56
Australia dan Oseania lainnya	44.223	0,04	69.803	0,05	86.192	0,06	42.187	0,03	29.367	0,02	37.828	0,03
Afrika	**1.895.420**	**1,50**	**1.663.061**	**1,14**	**1.473.965**	**1,05**	**1.475.904**	**1,09**	**971.285**	**0,82**	**918.274**	**0,78**
Afrika Selatan	687.657	0,55	649.171	0,44	622.865	0,44	475.771	0,35	230.613	0,20	287.362	0,25
Afrika lainnya	1.207.764	0,96	1.013.890	0,69	851.101	0,61	1.000.133	0,74	740.672	0,63	630.912	0,54
Impor yang tidak dapat diklasifikasikan [3]	**449.606**	**0,36**	**460.896**	**0,32**	**403.501**	**0,29**	**427.043**	**0,32**	**243.239**	**0,21**	**351.387**	**0,30**
Jumlah, cif	**126.104.929**	**100,00**	**145.980.103**	**100,00**	**140.399.394**	**100,00**	**134.899.810**	**100,00**	**118.176.348**	**100,00**	**117.032.088**	**100,00**

1) Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia

2) Pemekaran menjadi 27 negara sejak Bulgaria dan Romania bergabung dengan Uni Eropa pada Januari 2007

3) Terdiri dari barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki

*Data sementara

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 16. **Nilai Ekspor Minyak dan Gas (fob)**

Ribu dolar AS

Rincian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
Nilai Eskpor (juta dolar AS)								
Minyak bumi dan produknya	8.290	11.635	14.821	14.648	17.889	13.806	7.833	6.267
Gas	9.002	12.840	17.663	17.860	15.700	14.946	9.351	6.620
- LNG	7.879	11.708	15.204	12.448	10.568	10.294	6.894	4.813
- LPG	24	8	74	9	11	4	7	1
- Gas alam	980	900	2.164	5.402	5.121	4.648	2.444	1.763
- Gas lainnya	119	224	220	0	0	0	6	44
Total	17.292	24.475	32.484	32.507	33.588	28.752	17.184	12.887
Volume Ekspor								
Minyak Bumi dan produknya (juta barel)	152	156	149	132	170	143	156	156
Gas	1.452	1.896	1.711	1.411	1.253	1.182	1.159	1.165
- LNG (juta MMBTU)	1.115	1.506	1.264	931	888	834	841	866
- LPG (ribu MT)	46	11	81	8	10	4	10	1
- Gas Alam (juta MMBTU)	137	123	207	472	355	347	317	295
- Gas Lainnya	155	256	158	0	0	0	0	4
Total	1.604	2.051	1.860	1.543	1.422	1.325	1.315	1.321

MMBTU: *Million British Thermal Unit*
MT: *Metric Ton*
*Data sementara
**Data sangat sementara

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 17. Uang Beredar

Miliar rupiah

Akhir Periode	M1 [1]		Uang Kuasi [2]		M2 [3]		
	Posisi	"Pangsa (%)"	Posisi	"Pangsa (%)"	Posisi	Perubahan	
						Tahunan	Triwulanan
2010	605.411	24,52	1.856.720	75,12	2.471.206	15,32	8,55
2011	722.991	25,13	2.139.840	74,37	2.877.220	16,43	8,85
2012	841.652	25,45	2.455.435	74,24	3.307.508	14,95	5,73
2013	887.084	23,78	2.820.521	75,61	3.730.409	12,79	4,08
2014							
Januari	842.678	23,07	2.787.449	76,32	3.652.349	11,73	
Februari	834.532	22,96	2.787.035	76,67	3.635.060	10,81	
Maret	853.502	23,37	2.785.176	76,25	3.652.531	9,93	-2,09
April	880.470	23,66	2.828.686	76,00	3.721.882	10,74	
Mei	906.727	23,98	2.860.135	75,65	3.780.955	10,35	
Juni	945.718	24,51	2.903.415	75,26	3.857.962	13,02	5,62
Juli	918.566	23,63	2.959.732	76,14	3.887.407	10,86	
Agustus	895.827	23,05	2.982.674	76,74	3.886.520	10,97	
September	949.168	23,67	3.044.842	75,93	4.010.147	11,89	3,94
Oktober	940.349	23,37	3.066.421	76,19	4.024.489	12,51	
November	955.535	23,44	3.099.350	76,03	4.076.670	12,74	
Desember	942.221	22,58	3.209.475	76,90	4.173.327	11,87	4,07
2015							
Januari	918.079	21,99	3.233.881	77,46	4.174.826	14,31	
Februari	927.848	22,00	3.278.945	77,73	4.218.123	16,04	
Maret	957.580	22,55	3.275.499	77,14	4.246.361	16,26	1,75
April	959.376	22,44	3.302.204	77,23	4.275.711	14,88	
Mei	980.915	22,87	3.293.147	76,79	4.288.369	13,42	
Juni	1.039.518	23,85	3.305.641	75,84	4.358.802	12,98	2,65
Juli	1.031.906	23,60	3.325.908	76,05	4.373.208	12,50	
Agustus	1.026.323	23,30	3.362.148	76,34	4.404.085	13,32	
September	1.063.039	23,58	3.426.343	76,00	4.508.603	12,43	3,44
Oktober	1.036.311	23,32	3.391.260	76,33	4.443.078	10,40	
November	1.051.191	23,61	3.386.209	76,05	4.452.325	9,21	
Desember	1.055.440	23,20	3.479.961	76,50	4.548.800	9,00	0,89
2016							
Januari	1.046.257	23,26	3.436.492	76,39	4.498.361	7,75	
Februari	1.035.551	22,90	3.473.033	76,80	4.521.951	7,20	
Maret	1.064.738	23,34	3.483.694	76,37	4.561.873	7,43	0,29
April	1.089.212	23,77	3.479.713	75,95	4.581.878	7,16	
Mei	1.118.768	24,25	3.483.442	75,50	4.614.062	7,59	
Juni	1.184.329	25,00	3.539.326	74,71	4.737.451	8,69	3,85
Juli	1.144.501	24,19	3.573.997	75,55	4.730.380	8,17	
Agustus	1.135.548	23,93	3.596.408	75,78	4.746.027	7,76	
September	1.126.046	23,77	3.599.248	75,97	4.737.631	5,08	0,00
Oktober	1.142.786	23,92	3.622.679	75,81	4.778.479	7,55	
November	1.182.730	24,29	3.671.427	75,41	4.868.651	9,35	
Desember	1.237.643	24,73	3.753.809	75,00	5.004.977	10,03	5,64

1) Terdiri atas uang kartal dan giro
2) Terdiri atas deposito berjangka dan tabungan, dalam rupiah dan valuta asing serta giro valuta asing milik penduduk
3) Terdiri atas uang beredar dalam arti sempit (M1),uang kuasi, dan surat berharga selain saham dengan sisa jangka waktu s.d 1 tahun

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 18. **Perubahan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi**

Rincian	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
						I	II	III	IV
Uang Beredar									
M2	2.877.220	3.307.508	3.730.409	4.173.327	4.548.800	4.561.873	4.737.451	4.737.631	5.004.977
M1	722.991	841.652	887.084	942.221	1.055.440	1.064.738	1.184.329	1.126.046	1.237.643
Kartal	307.760	361.897	399.609	419.262	469.534	420.214	511.295	469.542	508.124
Giral	415.231	479.755	487.475	522.960	585.906	644.524	673.034	656.504	729.519
Kuasi	2.139.840	2.455.435	2.820.521	3.209.475	3.479.961	3.483.694	3.539.326	3.599.248	3.753.809
Faktor yang Memengaruhi	**2.877.220**	**3.307.508**	**3.730.409**	**4.173.327**	**4.548.800**	**4.561.873**	**4.737.451**	**4.737.631**	**5.004.977**
Aktiva Luar Negeri Bersih	912.174	965.442	1.011.361	1.105.783	1.176.638	1.186.803	1.221.949	1.270.287	1.298.938
Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat	351.177	389.827	406.611	416.608	491.127	517.322	511.217	410.538	519.065
Tagihan kepada Sektor Lainnya	2.383.823	2.917.452	3.526.612	3.961.583	4.318.126	4.309.736	4.451.853	4.535.305	4.711.239
Tagihan kepada Pemerintah Daerah	1.410	2.790	4.727	6.635	6.516	6.779	6.969	1.245	589
Tagihan kepada Sektor Swasta	2.118.376	2.581.327	3.098.305	3.488.677	3.822.128	3.799.229	3.901.644	3.978.129	4.115.821
Aktiva Lainnya Bersih	-29.895	17.778	34.146	49.733	57.313	43.782	116.936	83.143	79.272

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 19. **Suku Bunga Deposito dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank[1)]**

Jangka Waktu	Desember 2011		Desember 2012		Desember 2013		Desember 2014		Desember 2015		Desember 2016	
	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas
Bank Persero												
1 bulan	6,04	1,32	5,22	0,95	7,15	1,11	8,12	1,81	7,14	0,73	6,24	1,03
3 bulan	6,62	2,11	5,54	1,11	7,60	1,38	8,73	1,61	7,25	0,73	6,35	1,01
6 bulan	6,54	2,05	5,58	1,98	6,84	1,37	8,83	1,99	7,56	1,21	6,61	1,17
12 bulan	6,94	1,47	5,91	1,66	6,88	1,69	8,80	1,75	7,87	1,43	6,83	0,79
24 bulan	6,40	1,25	5,87	1,23	8,19	0,94	9,34	0,65	9,09	1,85	7,32	1,80
Bank Swasta Nasional												
1 bulan	6,62	1,81	5,96	2,06	8,53	2,48	9,04	2,34	7,89	1,23	6,58	0,94
3 bulan	6,91	2,03	5,81	2,14	7,53	2,51	9,11	2,53	8,35	1,36	7,04	1,22
6 bulan	7,28	2,41	6,18	2,40	7,61	2,64	9,54	2,59	8,84	1,68	7,31	1,25
12 bulan	7,05	1,93	5,82	2,47	6,79	2,39	8,58	2,52	8,36	1,64	7,16	1,03
24 bulan	5,83	0,41	4,23	2,63	7,43	3,28	7,33	2,67	9,09	2,52	7,12	2,62
Bank Pemerintah Daerah												
1 bulan	7,39	2,09	5,92	2,03	7,55	2,60	8,05	2,76	7,81	1,42	7,32	2,53
3 bulan	8,04	6,29	6,69	2,48	8,41	2,82	9,03	2,64	8,26	1,11	7,49	2,13
6 bulan	8,24	1,00	6,60	1,55	7,81	1,45	9,35	1,09	8,42	1,10	7,83	0,81
12 bulan	8,41	1,28	7,08	1,04	7,32	1,80	9,10	1,52	9,21	0,62	8,39	1,56
24 bulan	7,63	-	6,65	1,20	7,44	1,15	7,70	1,04	7,68	0,53	7,23	0,50
Bank Asing & Campuran												
1 bulan	5,00	1,19	4,61	1,51	7,51	1,67	7,51	1,37	7,36	0,60	6,18	0,64
3 bulan	5,74	1,62	5,54	1,90	7,98	1,52	8,57	1,41	8,11	0,78	6,72	0,77
6 bulan	6,47	1,74	6,04	2,04	8,17	2,02	9,23	1,52	8,71	0,96	6,91	0,94
12 bulan	6,64	1,51	6,19	1,86	6,90	2,42	9,50	2,40	8,86	1,37	7,40	1,10
24 bulan	6,64	1,17	6,20	0,92	9,18	1,46	10,01	1,40	9,62	1,74	6,85	0,44
Bank Umum												
1 bulan	6,35	1,53	5,58	1,48	7,92	1,80	8,58	2,00	7,60	1,00	6,50	0,97
3 bulan	6,81	1,90	5,76	1,86	7,61	2,07	8,94	2,18	7,99	1,13	6,78	1,11
6 bulan	7,19	2,11	6,05	2,20	7,49	2,10	9,30	2,23	8,54	1,38	7,15	1,18
12 bulan	7,06	1,69	6,09	2,09	6,89	2,14	8,79	2,25	8,47	1,54	7,33	0,94
24 bulan	6,33	0,80	5,47	1,63	8,17	2,01	9,26	1,96	9,07	2,22	7,23	2,16

1) Rata-rata tertimbang pada akhir periode

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 20. **Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank** [1)]

Akhir Periode	Bank Persero		Bank Pemerintah Daerah		Bank Swasta Nasional		Bank Asing & Campuran		Bank Umum	
	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi
2009	13,63	12,56	13,91	12,54	14,09	13,51	11,73	12,22	13,69	12,96
2010	13,06	10,81	13,57	12,44	13,02	13,20	10,23	11,82	12,83	12,28
2011	12,37	10,39	13,52	12,40	12,34	12,64	8,71	14,89	12,16	12,04
2012	11,70	10,08	13,66	12,25	11,68	11,88	7,90	9,47	11,49	11,27
2013										
Maret	11,72	10,07	13,44	12,20	11,58	11,82	8,04	9,44	11,44	11,24
Juni	11,79	10,35	13,60	12,24	11,46	11,67	8,11	9,49	11,41	11,14
September	11,71	10,53	13,61	12,27	12,15	12,16	9,23	10,24	11,80	11,50
Desember	11,94	10,84	13,37	12,23	12,55	12,51	9,84	10,71	12,12	11,82
2014										
Januari	12,05	10,91	13,34	12,21	12,68	12,63	9,96	10,87	12,23	11,92
Februari	12,06	10,96	13,34	12,27	12,86	12,69	10,09	11,04	12,33	11,98
Maret	12,09	10,98	13,36	12,23	12,87	12,72	10,20	10,97	12,37	12,00
April	12,23	11,04	13,30	12,34	12,79	12,77	10,19	10,99	12,38	12,06
Mei	12,38	11,13	13,19	12,18	13,19	12,96	10,25	11,04	12,63	12,18
Juni	12,26	11,20	13,24	12,21	13,29	13,02	10,27	11,00	12,63	12,24
Juli	12,34	11,40	13,27	12,22	13,36	13,06	10,41	10,78	12,70	12,32
Agustus	12,42	11,43	13,21	12,22	13,43	13,07	10,44	10,91	12,76	12,34
September	12,44	11,44	13,24	12,23	13,43	13,08	10,44	10,94	12,78	12,34
Oktober	12,52	11,48	13,72	12,51	13,39	13,13	10,49	10,94	12,82	12,39
November	12,53	11,48	13,84	12,40	13,41	13,13	10,41	10,90	12,84	12,38
Desember	12,50	11,47	13,63	12,38	13,36	13,11	10,49	10,93	12,79	12,36
2015										
Januari	12,52	11,47	13,56	12,25	13,31	13,02	10,39	10,59	12,76	12,29
Februari	12,55	11,45	13,38	12,13	13,29	13,03	10,26	10,51	12,74	12,27
Maret	12,65	11,49	13,71	12,37	13,36	13,06	10,26	10,47	12,82	12,32
April	12,64	11,45	13,71	12,36	13,25	13,06	10,23	10,77	12,75	12,32
Mei	12,61	11,45	13,72	12,38	13,20	13,02	10,21	10,75	12,72	12,30
Juni	12,60	11,46	13,74	12,39	13,17	13,02	10,18	10,60	12,70	12,29
Juli	12,54	11,46	13,56	12,18	13,14	12,98	10,28	10,68	12,65	12,26
Agustus	12,59	11,45	13,47	12,45	13,03	12,87	10,30	10,67	12,63	12,21
September	12,48	11,44	13,47	12,52	13,00	12,83	10,51	10,78	12,58	12,19
Oktober	12,43	11,42	13,45	12,25	12,98	12,85	10,72	10,95	12,58	12,19
November	12,36	11,40	13,66	12,44	12,92	12,77	10,79	11,13	12,55	12,14
Desember	12,30	11,35	13,50	12,19	12,82	12,77	10,79	11,25	12,46	12,12
2016										
Januari	12,26	11,34	13,46	12,18	12,88	12,48	10,71	11,25	12,46	11,96
Februari	12,16	11,27	13,22	12,17	12,88	12,49	10,51	11,12	12,40	11,93
Maret	12,05	11,18	13,14	12,16	12,81	12,40	10,06	10,83	12,28	11,83
April	11,83	11,04	13,12	12,09	12,73	12,32	9,90	10,52	12,14	11,71
Mei	11,68	10,99	12,62	11,81	12,58	12,18	9,75	10,34	11,97	11,60
Juni	11,52	10,89	12,80	11,77	12,43	12,08	9,64	10,28	11,82	11,49
Juli	11,44	10,84	12,78	11,63	12,40	12,04	9,61	10,35	11,78	11,45
Agustus	11,36	10,81	12,75	11,61	12,38	12,02	9,44	10,37	11,73	11,42
September	11,19	10,72	12,76	11,76	12,31	11,97	9,35	10,29	11,61	11,36
Oktober	11,15	10,71	12,69	11,60	12,31	11,98	9,27	10,16	11,59	11,34
November	11,09	10,63	12,65	11,42	12,22	12,05	9,21	10,12	11,52	11,33
Desember	10,83	10,42	12,59	11,49	12,10	11,94	9,22	10,32	11,35	11,20

1) Rata-rata tertimbang

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 21. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas Melalui Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia

Miliar rupiah

Satuan Kerja	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Wilayah Sumatera	57.900,3	80.092,2	65.910,6	85.234,6	74.281,8	97.846,7	86.023,1	102.338,2	86.497,0	109.185,1	97.763,5	121.991,7
Nanggroe Aceh Darussalam	2.308,0	6.338,1	2.619,6	6.378,0	4.035,8	8.242,4	4.567,0	8.632,4	4.709,8	9.636,6	5.774,9	11.310,6
Sumatera Utara	23.237,8	22.176,5	25.980,6	22.494,6	26.674,6	22.284,0	30.499,9	26.389,3	30.253,6	27.877,1	34.426,9	31.958,8
Sumatera Barat	9.384,5	5.299,7	11.192,1	6.434,3	13.151,6	7.204,7	14.102,9	7.060,0	13.308,8	7.470,7	14.078,2	9.197,8
Riau	3.012,5	12.434,1	4.447,3	13.013,8	6.286,8	15.974,0	6.356,3	15.157,5	7.156,5	15.788,6	8.210,9	17.645,0
Kepulauan Riau	1.426,3	5.818,6	2.236,0	6.965,6	2.295,2	9.257,9	2.563,0	10.231,5	3.217,7	9.802,5	4.316,5	10.067,6
Jambi	1.867,6	5.216,7	2.138,5	5.013,2	3.864,9	8.018,7	5.169,1	8.379,3	4.978,1	8.324,5	4.398,2	7.774,0
Sumatera Selatan	7.820,3	14.523,6	9.126,0	15.600,1	8.056,5	14.350,6	10.039,8	13.262,9	10.797,2	13.483,7	12.751,7	15.755,9
Bengkulu	1.153,1	2.560,5	1.201,3	2.959,3	2.642,0	4.262,8	3.261,5	4.561,9	2.791,3	4.851,5	2.888,9	5.162,7
Lampung	7.690,1	5.724,4	6.969,2	6.375,6	7.274,3	8.251,6	9.450,1	8.341,1	8.107,5	9.945,2	9.373,1	10.435,5
Bangka Belitung							13,7	322,1	1.176,6	2.004,8	1.544,2	2.683,8
Wilayah DKI Jakarta	62.958,0	101.604,4	76.664,9	136.466,6	84.525,8	149.240,8	92.103,0	152.275,9	100.424,8	163.749,4	115.684,4	170.613,7
Wilayah Jawa (selain DKI Jakarta)	123.916,7	83.511,4	160.482,3	111.362,6	200.722,0	137.567,4	217.301,9	147.069,0	230.140,4	171.567,5	261.606,6	190.567,8
Jawa Barat	43.774,9	20.781,8	60.629,0	28.894,9	72.420,8	35.821,4	78.660,2	40.856,6	81.302,7	47.062,7	88.036,1	49.404,8
Jawa Tengah	35.136,8	19.975,1	43.298,1	28.492,9	57.317,7	37.673,4	60.475,4	39.110,2	65.198,1	46.840,5	72.781,7	53.659,3
D.I. Yogyakarta	6.489,8	7.537,8	9.172,7	9.486,0	13.984,1	12.072,6	13.890,7	13.171,1	14.831,2	14.079,7	17.350,1	13.012,8
Jawa Timur	38.515,2	35.216,7	47.382,5	44.488,8	56.999,4	52.000,1	64.275,6	53.931,2	68.808,4	63.584,7	83.438,7	74.490,8
Wilayah Kawasan Timur Indonesia	48.650,1	82.407,4	63.198,8	96.487,6	77.347,9	105.352,5	88.792,6	110.393,6	92.694,7	121.178,9	109.548,7	127.264,8
Bali	6.394,3	8.911,8	8.202,5	10.781,8	10.433,2	13.145,0	11.599,9	13.103,6	13.071,7	14.470,6	17.913,7	18.139,6
Nusa Tenggara Barat	1.802,6	3.818,7	3.675,7	4.379,1	4.516,4	5.179,4	5.694,4	5.619,5	6.285,0	6.727,9	8.841,7	8.149,2
Nusa Tenggara Timur	2.125,2	3.693,1	2.735,0	4.259,6	3.168,8	4.708,7	3.512,4	4.663,1	3.651,2	5.529,6	4.210,0	5.652,3
Kalimantan Barat	2.830,8	5.221,4	3.385,7	5.698,1	4.029,1	6.011,1	5.942,5	6.735,8	6.675,5	8.485,6	7.439,8	9.402,2
Kalimantan Tengah	778,8	6.849,9	1.134,8	7.740,6	1.896,7	8.031,5	1.887,4	8.309,8	3.546,9	10.190,2	3.694,3	10.131,2
Kalimantan Selatan	5.369,1	5.125,7	7.311,0	5.579,8	8.471,1	6.419,1	9.613,8	6.264,8	9.558,4	6.754,6	10.809,5	7.424,3
Kalimantan Timur	4.293,3	12.337,5	5.743,2	14.425,7	7.542,2	17.550,8	8.935,6	17.425,6	9.646,0	16.514,4	10.903,2	15.221,2
Sulawesi Utara	5.671,0	6.606,3	6.634,6	6.375,0	7.436,4	4.738,8	7.374,5	7.207,1	6.286,3	7.202,2	7.265,6	7.707,4
Sulawesi Tengah	1.562,9	4.017,5	1.884,8	4.457,9	2.585,6	5.045,5	3.000,1	5.731,1	2.593,3	5.309,8	2.665,3	4.962,4
Sulawesi Selatan	10.593,5	8.967,2	13.701,5	11.872,6	16.805,3	14.149,9	19.384,3	15.645,6	19.583,1	16.235,7	21.043,3	15.493,6
Sulawesi Tenggara	659,4	2.888,8	963,6	2.950,2	1.392,7	3.511,4	2.255,7	3.537,5	2.384,8	4.715,8	3.490,9	4.488,0
Sulawesi Barat											536,1	1.514,0

Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas Melalui Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia - Lanjutan

Satuan Kerja	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Maluku Utara	586,2	1.631,0	632,6	1.677,2	895,9	2.016,6	1.005,8	1.815,6	1.006,5	2.397,0	1.259,1	2.246,5
Maluku	1.272,8	2.352,4	1.147,1	2.689,7	1.388,7	2.716,3	1.781,0	2.865,8	1.789,5	3.123,3	2.367,2	3.309,1
Papua	4.710,1	9.986,1	6.046,8	13.600,2	6.785,9	12.128,3	6.793,7	11.298,5	6.099,0	11.623,5	6.291,4	11.500,0
Papua Barat							11,7	170,1	517,5	1.898,6	817,7	1.923,8

Keterangan: KPw Bangka Belitung dan KPw Papua Barat mulai beroperasi pada tahun 2014.

Sumber: Bank Indonesia

Daftar Istilah

Istilah	Keterangan
Administered Prices	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah
Advanced Economy (AE)	Kelompok negara-negara maju (developed countries) yang antara lain tercermin dari PDB dan tingkat industrialisasi yang tinggi
Aging Population	Keadaan meningkatnya median umur di suatu daerah atau negara sehingga suatu negara memiliki porsi populasi orang tua yang meningkat dibandingkan dengan orang muda.
Apresiasi	Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
Back-to-back loan	Kredit dengan agunan tunai
Bank Sistemik	Bank-bank yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan domestik
Barel	Satuan pengukur volume yang biasa digunakan dalam perdagangan minyak internasional
Base effect	Konsekuensi dari kondisi apnormal (baik tinggi maupun redah) dari satu periode sebelumnya, sehingga mempengaruhi tingkat pertumbuhan pada periode berjalan
Bauran kebijakan	Penggunaan beberapa kebijakan dalam waktu bersamaan
Bauran kebijakan Bank Indonesia	Penggunaan beberapa kebijakan baik kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran
BI Rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
Brexit	Merupakan singkatan dari British Exit, atau fenomena keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. Brexit digunakan sejak pelaksanaan referendum yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016 yang dimenangkan oleh kubu Brexit.
BUKU	Pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki
Call option	Perjanjian yang memberikan hak (bukan kewajiban) untuk membeli instrumen keuangan pada harga dan waktu tertentu
Capital control	Kebijakan meregulasi aliran dana masuk atau keluar dari pasar modal suatu negara
Capital flows	Aliran modal yang dapat berupa aliran masuk atau keluar
Capital reversal	Pembalikan arah pergerakan aliran modal
Circuit breaker	Mekanisme dimana saat fluktuasi harga telah mencapai batas aman (threshold), kegiatan perdagangan surat berharga akan dihentikan untuk jangka waktu tertentu
Clean money policy	Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar
Consensus Forecast	Prediksi masa depan yang disusun dengan menggabungkan bersama beberapa perkiraan yang dilakukan oleh berbagai lembaga/pengamat/ekonom secara terpisah
Consumption smoothing	Menjaga konsumsi pada tingkat yang stabil
Cost-push inflation	Jenis dugaan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan substansial dalam biaya penting barang atau jasa di mana tidak ada alternatif yang sesuai tersedia.
Counter cyclical	Bergerak dengan arah berlawanan dengan siklus ekonomi
Countercyclical capital buffer (CCB)	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Crisis Management Protocol	Prosedur manajemen krisis yang menetapkan protokol penggelaran tim manajemen dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab anggota tim tersebut
Deflasi	Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum
Deposit Facility	Fasilitas simpanan berjangka overnight dengan bank sentral
Deposit Rate	Tingkat suku bunga simpanan
Deposito	Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah
Depresiasi	Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
Derivatif	Produk turunan yaitu kontrak, perjanjian, atau transaksi yang nilainya diturunkan dari suatu produk
Devisa	Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional
Divestasi	Pelepasan atau pengurangan modal suatu perusahaan
Dovish	Aliran pemikiran (atau advisor) yang pro terhadap rezim suku bunga kebijakan yang rendah untuk meningkatkan kinerja pasar tenaga kerja dan perekonomian
Down Payment	Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian
Dutch Disease	Fenomena terjadinya pemusatan pada sektor ekstraktif sejalan dengan melimpahnya SDA sehingga sektor lainnya melambat
e-commerce	Transaksi perdagangan secara online atau menggunakan teknologi internet
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain
El Nino dan La Nina	El Nino merupakan fase hangat (warm) dan La Nina merupakan fase dingin (cool) dari pola musim yang berulang di daeran tropis Pasifik. El Nino dan La Nina menyebabkan perubahan pada suhu dan curah hujan global
Emerging Market (EM)	Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.

Daftar Istilah

Istilah	Keterangan
Euro	Mata uang negara kawasan eropa
Executive orders	Keputusan/Order (mengikat seperti UU) yang dikeluarkan oleh Presiden AS langsung kepada petugas atau agen pemerintah Federal AS.
Financial inclusion	Pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah masyarakat
First line of defense	Penguatan ketahanan lapis pertama yaitu dalam bentuk pengelolaan kebijakan moneter dan perbankan secara berhati-hati (prudent) dan konsisten
Foreign Direct investment	Investasi luar negeri langsung ke badan usaha
Forward	Kontrak penjualan untuk membeli atau menjual aset dengan harga tertentu di masa mendatang (future date)
Full employment	Kondisi dimana tenaga kerja yang bersedia bekerja dalam suatu perekonomian dapat digunakan dengan seefisien mungkin.
Garis kemiskinan	Jumlah pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan
Gen-Y atau generasi milenial	Generasi yang lahir pada awal tahun 1980an s.d. 1990an, secara umum generasi ini lebih intensif menggunakan digital teknologi dan internet
Geopolitik	Kondisi politik yang dipengaruhi oleh faktor geografis
Giro	Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan
Green economy	Ekonomi yang bertujuan mencapai pertumbuhan berkelanjutan tanpa menurunkan kualitas lingkungan
Hawkish	Aliran pemikiran (atau advisor) yang pro terhadap suku bunga kebijakan yang relatif tinggi untuk mencapai sasaran inflasi
Hedging	Transaksi Lindung nilai dengan cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
Imported inflation	Inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang-barang impor
Indeks Kedalaman Kemiskinan	Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin
Indeks Keparahan Kemiskinan	Ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan Ekspektasi Inflasi
Inflasi inti traded	Inflasi tidak termasuk komponen indeks harga konsumen dengan fluktuasi ke atas dan ke bawah terbesar
Interoperabilitas	Kapabilitas dari suatu sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain tanpa batasan akses
Investasi	Suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Investment grade	Rating yang mengindikasikan kelayakan surat hutang pemerintah/swasta
Kebijakan fiskal konsolidatif	Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah
Keseimbangan Primer (primary balance)	Total penerimaan dikurangi dengan total belanja dengan mengeluarkan komponen pembayaran bunga.
Ketahanan energi	Kondisi ketersediaan sumber energi yang tidak terganggu dan dengan harga yang terjangkau
Ketahanan pangan	Kondisi kecukupan ketersediaan pangan secara stabil (tidak fluktuatif karena musim), terjangkau, dan memiliki kualitas/keamanan pangan
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan, atau sentra UMKM
Lending Facility	Penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada bank
Lifting	Volume minyak yang diambil dari tangki penampungan, diangkut dengan tanker atau melalui pipa, dan dijual kepada pembeli. Dengan kata lain, lifting minyak adalah produksi minyak yang siap jual
Likuiditas	Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya
Literasi Keuangan	Pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan
M1	Uang dalam arti sempit (uang kartal dan uang giral)
M2	Uang dalam arti luas (uang kartal, giral, dan deposito)
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
Middle income trap	Jebakan negara berpenghasilan menengah
Mikroprudensial	Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya
Mismatch	Perbedaan jangka waktu antara aset dengan kewajiban dari suatu institusi keuangan
Multiplier	Alat untuk meningkatkan efek pengganda bagi suatu hal/kebijakan

Daftar Istilah

Istilah	Keterangan
Necara Transaksi Berjalan	Bagian dari neraca pembayaran indonesia yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara, dari dan ke luar negeri
New Economy	Ekonomi yang bertumpu pada jasa dan teknologi (intangible assets)
Non tradable	Lihat definisi tradable
Nostro	Rekening valuta asing suatu bank yang ada pada bank koresponden di luar negeri
Offshore	Pasar valas di luar wilayah yang menggunakan mata uang yang ditransaksikan
Old Economy	Ekonomi yang bertumpu pada industri pengolahan dan komoditas (tangible assets)
Onshore	Pasar valas di dalam wilayah yang menggunakan mata uang yang ditransaksikan
Otoritas Moneter	Suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang
Output gap	Perbedaan antara PDB aktual dengan PDB potensial
Peer countries	Grup negara-negara dengan karakteristik yang sama
Pelonggaran Moneter	Kebijakan moneter yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja perekonomian yang dinilai terlalu lambat. Contoh: menurunkan tingkat suku bunga
Pengampunan pajak / Amnesti Pajak (Tax amnesty)	Penghapusan pajak bagi WP yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan imbalan membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah
Pengetatan Moneter	Kebijakan moneter yang ditujukan untuk menahan kinerja perekonomian yang dinilai terlalu cepat. Contoh: menaikkan tingkat suku bunga
Phising	Pencurian data dengan melalui email
Prefunding	Pembiayaan awal
Price bubble	Lonjakan harga diatas fundamentalnya
Procyclical	Kebijakan yang searah dengan siklus perekonomian
Proteksionisme	Kebijakan pembatasan perdagangan melalui kebijakan tarif impor barang, pembatasan quota dll. Kebijakan ini biasanya bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri
Quantitative Easing	Kebijakan pelonggaran atau penambahan stimulus moneter oleh bank sentral dengan cara membeli aset keuangan dalam jumlah tertentu dari bank komersial atau institusi swasta lainnya
Rasio Gini	Koefisien yang mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat
Real effective exchange rate	Indeks yang menggambarkan kekuatan suatu mata uang terhadap keranjang mata uang negara lainnya (basket of other currencies)
Rebalancing Tiongkok	Kebijakan Tiongkok yang bertujuan agar pertumbuhan yang didorong oleh ekonomi (consumption-led-growth) dan pembatasan ekspansi kredit untuk investasi
Refinancing	Mengganti suatu pinjaman dengan pinjaman lainnya
Reformasi struktural	Perubahan dari suatu sistem
Repatriasi	Pemulangan kembali dana ke negeri asalnya
Repurchase Agreement	Transaksi penjualan instrumen efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati
Return	Salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya
Reverse Repo	Transaksi pembelian surat berharga dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan
Risk Adjusted Return	Hasil dari suatu investasi dengan memperhitungkan risiko terkait suatu produk investasi
Risk aversion	Penghindaran akan risiko
Safe Haven Currency	Mata uang yang memiliki risiko rendah dan dipercaya sebagai mata uang yang stabil nilainya dibandingkan mata uang lain. Mata uang yang termasuk katagori antara lain dolar AS,
Samurai Bond	Obligasi dalam denominasi mata uang yen yang diterbitkan oleh penerbit obligasi dari suatu negara di luar Jepang dan diperdagangkan pada pasar Jepang
Second line of defense	Penguatan ketahanan lapis kedua yaitu dalam bentuk kerjasama ketahanan sistem keuangan regional (regional financial arrangement) dan kerjasama bilateral dengan negara mitra
Second round effect	Dampak rambatan
Shale oil	Merupakan minyak yang diekstrak dari batuan sedimen yang memiliki kandungan hidrokarbon bernama shale. Shale oil substitusi dari minyak mentah (crude oil) maupun jenis energi karbon lainnya seperti batubara
Shortfall	Kegagalan/defisit dari apa yang diproyeksikan semula
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
Skimming	Pencurian data keuangan melalui penyalahgunaan magnetic stripe dari kartu kredit, debit dan ATM
Smelter	Pabrik pengolahan dan pemurnian mineral
Solvabilitas	Kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajibannya
Spot	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari

Daftar Istilah

Istilah	Keterangan
Start-up company	Pelaku usaha rintisan
Stimulus fiskal	Kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mendorong permintaan agregat yang selanjutnya diharapkan akan berpangaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek
Stress test	Simulasi untuk menguji ketahanan suatu sistem terhadap adanya syok
Subsidi	Bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah untuk produsen, distributor, dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah
Sunset Policy	Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga
Surveillance	Pengamatan atau pemantauan aktivitas, perilaku, atau perubahan informasi lainnya dari suatu obyek
Swap	Suatu transaksi / kontrak untuk membeli atau menjual valuta asing lawan valuta (asing) lainnya pada tanggal valuta tertentu sekaligus dengan perjanjian untuk menjual atau membeli kembali pada tanggal valuta berbeda di masa yang akan datang, dengan harga yang ditentukan pada tanggal kontrak. Kedua transaksi tersebut dilaksanakan sekaligus dan dengan counterparty yang sama.
Taper tantrum	Volatilitas di pasar keuangan terkait probabilitas kebijakan normalisasi (tapering off) yang dilakukan oleh The Fed
Tax evader	Individu dan perusahaan yang secara ilegal mengurangi atau menghindari kewajiban pajak
Teknologi keuangan (Financial technology/Fintech)	Inovasi yang menggabungkan fungsi Keuangan (Financial) dengan Teknologi
Term Deposit	Sejumlah dana yang disimpan di bank atau subjek lembaga keuangan lainnya untuk jangka waktu minimum, sebelum dapat ditarik tanpa hukuman. Juga disebut deposito berjangka
Term of trade	Perbandingan harga ekspor suatu negara terhadap harga impornya.
The Fed	Gabungan dari 12 bank swasta nasional di AS dan dipimpin oleh dewan gubernur yang beranggotakan 7 orang.
Tradable	Sektor ekonomi yang outputnya bisa diperdagangnya secara Internasional, misalnya sektor industri pengolahan
Troughput	Rasio dari total transaksi yang di selesaikan pada periode tertentu di hari x dengan total transaksi yang di selesaikan di hari x
Trump Effect	Efek yang terjadi terkait dengan terpilihan presiden AS Donald Trump
Uang elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu
Uang layak edar	Uang rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
Unconventional monetary policy	Kebijakan moneter yang ditempuh oleh institusi moneter saat suku bunga telah mencapai nol (zero lower bound), sehingga untuk memberikan stimulus pada perekonomian tidak bisa menggunakan suku bunga tetapi menggunakan kebiajakan lain seperti quantitative easing
Volatile food	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Yield	Imbal hasil

Daftar Singkatan

No	Singkatan	Kepanjangan
1	ACI	Association Cambiste Internationale
2	ADB	Asian Development Bank
3	AE	Advanced Economies
4	AFI	Alliance for Financial Inclusion
5	AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
6	AL/NCD	Alat Likuid terhadap Non Core Deposit
7	AMRO	ASEAN+3 Macroeconomic Research Office
8	AP	Administered Prices
9	APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11	APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan
12	APEC	Asia Pasific Economic Cooperation
13	APIK	Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
14	APMK	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
15	APP	Asset Purchase Programme
16	APRACA	Asia-Pacific Regional Conference on Rural Finance and Community Development
17	APU dan PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
18	ARRA	American Recovery and Reinvestment Act
19	AS	Amerika Serikat
20	ASDP	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
21	ASEAN	Association of South-East Asian Nations
22	ASN	Aparatur Sipil Negara
23	ATM	Automated Teller Machine
24	ATMR	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
25	BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
26	BBM	Bahan Bakar Minyak
27	BBRT	Bahan Bakar Rumah Tangga
28	BI-CAC	Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center
29	BI-RTGS	Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement
30	BIS	Bank for International Settlements
31	BI-SCN	BI-SSSS Central Node
32	BI-SPP	BI-SSSS Participant Platform
33	BI-SSSS	Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System
34	BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
35	BLU	Badan Layanan Umum
36	BOPO	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
37	Botasupal	Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu
38	BPD	Bank Pembangunan Daerah
39	BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
40	BPS	Badan Pusat Statistik
41	Brexit	British Exit
42	BRIC	Brazil, Russia, India, dan Tiongkok
43	BSA	Bilateral Swap Arrangement
44	BUJP	Badan Usaha Jasa Pengamanan
45	BUKU	Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha
46	Bulog	Badan Urusan Logistik
47	BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
48	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
49	BUS	Bank Umum Syariah
50	BWI	Badan Wakaf Indonesia

No	Singkatan	Kepanjangan
51	CAR	Capital Adequacy Ratio
52	CBP	Cadangan Beras Pemerintah
53	CCB	Countercyclical Capital Buffer
54	CCP	Central Counterparty
55	CDD	Customer Due Diligence
56	CDM	Cash Deposit Machine
57	CDS	Credit Default Swap
58	CeBM	Central Bank Money
59	CF	Consensus Forecast
60	CFETS	China Foreign Exchange Trade System
61	CiV	Cash in Vault
62	CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
63	CMIM	Chiang Mai Initiative Multilateralization
64	COP-21	the 21st Conference on Parties Agreement
65	CP	Commercial Paper
66	CPI	Consumer Price Index
67	CPO	Crude Palm Oil
68	CRM	Cash Recycling Machine
69	CSD/SSS	Central Securities Depository/Securities Settlement System
70	DAU	Dana Alokasi Umum
71	DBH	Dana Bagi Hasil
72	DER	Debt to Equity Ratio
73	DF	Deposit Facility
74	DIRE	Dana Investasi Real Estate
75	DJP	Direktorat Jendral Pajak
76	DOC	Day Old Chick
77	DP	Down Payment
78	DPK	Dana Pihak Ketiga
79	DRC	Disaster Recovery Center
80	DVP	Delivery Versus Payment
81	EBA	Efek Beragun Aset
82	EBITDA	Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortization
83	EDC	Electronic Data Capture
84	EM	Emerging Markets
85	EMEAP	Executives Meeting of East Asia Pacific
86	EODB	Ease of Doing Business
87	ETF	Exchange-Traded Fund
88	ETP	Electronic Trading Platform
89	EU	European Union
90	FDI	Foreign Direct Investment
91	FFR	Federal Funds Rate
92	FGD	Focus Group Discussion
93	FinTech	Financial Technology
94	FKMM	Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
95	FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
96	FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
97	FLI	Fasilitas Likuiditas Intrahari
98	FOMC	Federal Open Market Committee
99	FSAP	Financial Sector Assessment Program
100	FSB	Financial Stability Board
101	FTV	Financing to Value

No	Singkatan	Kepanjangan
102	GFI	Global Financial Integrity
103	GMRA	Global Master Repo Agreement
104	GNNT	Gerakan Nasional NonTunai
105	G-SIFIs	Global Systemically Important Financial Institutions
106	GWM	Giro Wajib Minimum
107	GWM LFR	Giro Wajib Minimum Loan to Funding Ratio
108	Harkornas	Hari Konsumen Nasional
109	HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
110	HCS	Hasil Cetak Sempurna
111	HIMBARA	Himpunan Bank-Bank Milik Negara
112	HJE	Harga Jual Eceran
113	ICOC	Islamic Financial Market Code of Conduct
114	ICR	Interest Coverage Ratio
115	IFEMC	Indonesia Foreign Exchange Market Committee
116	IHK	Indeks Harga Konsumen
117	IHPB	Indeks Harga Perdagangan Besar
118	IHPR	Indeks Harga Properti Residensial
119	IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
120	IKNB	Industri Keuangan Nonbank
121	IMBT	Ijarah Muntahiya Bittamlik
122	IMF	International Monetary Fund
123	IOSCO	International Organization of Securities Commission
124	IPO	Initial Public Offering
125	IRSM	Indonesia Single Risk Management
126	IRTI-IDB	Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank
127	ISN	Iron Stock Nasional
128	ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
129	ITF	Inflation Targeting Framework
130	JIBOR	Jakarta Interbank Offered Rate
131	JISDOR	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
132	KAI	PT. Kereta Api Indonesia
133	KCJ	Kereta Commuter Jakarta
134	KEKP	Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
135	KFLN	Kewajiban Finansial Luar Negeri
136	KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
137	KMK	Kredit Modal Kerja
138	KNKS	Komite Nasional Keuangan Syariah
139	KPA	Kredit Pemilikan Apartemen
140	KPBI	Kantor Pusat Bank Indonesia
141	KPPK	Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian
142	KPR	Kredit Pemilikan Rumah
143	KPw BI	Kantor Perwakilan Bank Indonesia
144	KPwDN-BI	Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia
145	KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
146	KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
147	KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
148	KTI	Kawasan Timur Indonesia
149	KUBE PKH	Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
150	KUPVA	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
151	KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

No	Singkatan	Kepanjangan
152	KUR	Kredit Usaha Rakyat
153	KURBE	Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor
154	LAZ	Lembaga Amil Zakat
155	LBU	Laporan Bank Umum
156	LCGC	Low Cost Green Car
157	LCS	Local Currency Settlement
158	LDR	Loan to Deposit Ratio
159	LED	Local Economic Development
160	LF	Lending Facility
161	LFR	Loan to Funding Ratio
162	LGFV	Local Government Financial Vehicles
163	LKD	Layanan Keuangan Digital
164	LMAN	Lembaga Manajemen Aset Negara
165	LNG	Liquid Natural Gas
166	LNPRT	Lembaga Non Profit Rumah Tangga
167	LPP	Lembaga Pengawas dan Pengatur
168	LPPI	Lembaga Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
169	LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
170	LTV	Loan-to-value
	LU	Lapangan Usaha
171	Mbpd	Million Barrel per Day
172	MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
173	Migas	Minyak dan gas
174	MRA	Master Repo Agreement
175	mtm	month to month
176	MTN	Medium term notes
177	Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
178	NAFTA	North American Free Trade Agreement
179	NAIRU	Non-Accelerating Inflation Rate Of Unemployment
180	NCD	Negotiable Certificate of Deposit
181	NG	Natural Gas
182	NIM	Net Interest Margin
183	NK	Nota Kesepahaman
184	NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
185	NPG	National Payment Getaway
186	NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
187	NPL	Non Performing Loans
188	NSICCS	National Standard of Indonesian Chip Card Specification
189	NTT	Nusa Tenggara Timur
190	O/N	Overnight
191	OCA	Overseas Current Account
192	OECD	The Organisation for Economic Co-operation and Development
193	OIC	Organization of Islamic Cooperation
194	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
195	OM	Operasi Moneter
196	OP	Orang Pribadi
197	OPEC	Organization Petroleum of Exporting Countries
198	OPT	Operasi Pasar Terbuka
199	OVI	Optically Variable Ink
200	PAD	Pendapatan Asli Daerah
201	PBB	Pajak Bumi dan Bangunan

Daftar Singkatan

No	Singkatan	Kepanjangan
202	PBoC	People's Bank of China
203	PCE	Private Consumption Expenditure
204	PDB	Produk Domestik Bruto
205	Pelni	PT. Pelayaran Nasional Indonesia
206	Pergub	Peraturan Gubernur
207	PFMIs	Principles for Financial Market Infrastructures
208	PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
209	PII	Posisi Investasi Internasional
210	Pilkada	Pemilu Kepala Daerah
211	Pilpres	Pemilihan presiden
212	PIRAC	Public Interest Research and Advocacy Center
213	PJPUR	Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
214	PK	Pedoman Kerja
215	PKE	Paket Kebijakan Ekonomi
216	PKH	Program Keluarga Harapan
217	PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
218	PMA	Penanaman Modal Asing
219	PMI	Purchasing Managers' Index
220	PMK	Protokol Manajemen Krisis
221	PMN	Penyertaan Modal Negara
222	PNBP	Penerimaan Negara Bukan pajak
223	PNS	Pegawai Negeri Sipil
224	PP	Perusahaan Pembiayaan
225	PPh	Pajak Penghasilan
226	PPI	Producer Price Index
227	PPKSK	Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
228	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
229	PPP	Public Private Partnership
230	PTK	Pencatatan Transaksi Keuangan
231	PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak
232	PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
233	PUAB	Pasar Uang Antar Bank
234	PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
235	PYD	Pembiayaan yang disalurkan
236	QE	Quantitative Easing
237	Rakor Pusda	Rapat Koordinasi Pusat Daerah
238	Rakornas	Rapat Koordinasi Nasional
239	Rastra	Penyaluran Bantuan Pangan Beras Sejahtera
240	RBI	Reserve Bank of India
241	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership
242	RCN	RTGS Central Node
243	RFCC	Residual Fluid Catalytic Cracking
244	RIRU	Regional Investor Relations Unit
245	RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
246	ROA	Return on Assets
247	ROE	Return on Equity
248	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
249	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
250	RPK	Rumah Pangan Kita
251	RPP	RTGS Participant Platform
252	RTRW	Rencana Tata ruang wilayah

No	Singkatan	Kepanjangan
253	RUEN	Rencana Umum Energi Nasional
254	RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
255	Satgas	Satuan Tugas
256	SBI	Sertifikat Bank Indonesia
257	SBN	Surat Berharga Negara
258	SBR	Savings Bond Retail
259	SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
260	SDA	Sumber Daya Alam
261	SDBI	Sertifikat Deposito Bank Indonesia
262	SDM	Sumber Daya Manusia
263	SDR	Special Drawing Rights
264	SILPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
265	S-INVEST	Sistem Investasi Terpadu
266	SIPS	Systemically Important Payment System
267	SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
268	SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
269	SLA	Service Level Agreement
270	SLC	Senior Level Committee
271	SNKI	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
272	SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
273	SSB	Surat Surat Berharga
274	SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
275	SUN	Surat Utang Negara
276	TA	Tax Amnesty
277	TB	Transaksi Berjalan
278	TD BB	Transfer Dana Bukan Bank
279	TE	Tahun Emisi
280	TFA	Trade Facilitation Agreement
281	TKA	Tenaga Kerja Asing
282	TKI	Tenaga Kerja Indonesia
283	TLAC	Total Loss Absorbing Capacity
284	TMF	Transaksi Modal dan Finansial
285	TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
286	TPI	Tim Pemantuan dan Pengendalian Inflasi
287	TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
288	TPMSE	Transaksi Perdagangan Menggunakan Sistem Elektronik
289	TPP	Trans Pacific Partnership
290	TPT	Tekstil dan Produk Tekstil
291	TTL	Tarif Tenaga Listrik
292	TUKAB	Pertukaran Uang Kartal Antar Bank
293	UKA	Uang Kertas Asing
294	ULN	Utang Luar Negeri
295	UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
296	UMP	Upah Minimum Provinsi
297	USD	United States Dollars
298	UTLE	Uang Tidak Layak Edar
299	UU	Undang-undang
300	UU PPKSK	Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
301	UUS	Unit Usaha Syariah
302	UV	Ultra violet
303	UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
304	Valas	Valuta asing

No	Singkatan	Kepanjangan
305	VF	Volatile food
306	VIX	Volatility Index
307	WC-FINC	Working Committee on Financial Inclusion
308	WCP	Waqaf Core Principles
309	WCPSS	Working Committee on Payment and Settlement System
310	WIOD	World Input Output Database
311	WJI	West Java Incorporated
312	WP	Wajib Pajak
313	WTO	World Trade Organization
314	yoy	year on year
315	ZCP	Zakat Core Principles

Tim Penyusun LPI 2016

Pengarah	Dody Budi Waluyo, Juda Agung
Penanggung Jawab dan Editor	Yoga Affandi, Firman Mochtar, Bambang Pramono
Koordinator Penyusun	Nugroho Joko Prastowo, Donni Fajar Anugrah, Dian Prima Susiandri
Tim Penulis	Agus Taufik; Angsoka Yorintha P.; Archi Hilmardhany; Asrianti Mira A.; Bambang Satya Permana; Bayu Panji Permono; Beny Okta Tutuarima; Darius Tirtosuharto; Deasy Ariyanti; Fenty Tirtasari E.; Ferry Kurniawan; Handri Adiwilaga; Hayatullah Khumaeni; Herriman Budi S.; I Nyoman Agus Wirya; Indra Astrayuda; Irene Hennywati; Irfan Sukarna; Karina Arti; Linda Nurliana P.; Meliana Rizka; Merlin Dwi Yuniar; Minda Putri Dwinanda; Neva Andina; Nurkholisoh Ibnu Aman; Olga Desiani; Pakasa Bary; Prayudhi Azwar; Ragil Misas Fu'adi; Rikie Fasha; Rizki Fitrama; Sinta Atharinanda; Syachman Perdymer; Tumpak Silalahi; Vidi Adyatama Nugraha; Yanfitri; Yenny Fridayanti; Zulfia Fatma
Tim Pendukung	Illinia Ayudhia Riyadi; Rio Khasananda; Saraswati
Kontributor	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Departemen Pengelolaan Moneter Departemen Kebijakan Makroprudensial Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Departemen Statistik Departemen Internasional Departemen Pengelolaan Uang Departemen Pengembangan UMKM Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Departemen Surveilans Sistem Keuangan Departemen Regional I Departemen Regional II Departemen Regional III

BANK INDONESIA • Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 - INDONESIA
www.bi.go.id